



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021



H. SUGIANTO SABRAN
Gubernur Kalimantan Tengah



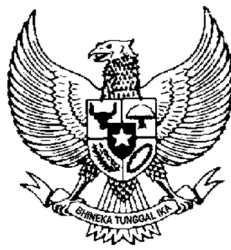
H. EDY PRATOWO
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021

RPJMD
2021 - 2026



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan visi misi kepala daerah selama 5 tahun yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, program prioritas beserta kerangka anggarannya yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

7. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/atau Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
8. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDALITBANG adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
16. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
17. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan

serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
19. Peraturan Kepala Daerah yang disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
20. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005- sampai dengan Tahun 2025.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
25. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

31. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
32. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
33. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
34. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
35. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
36. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
37. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
38. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
39. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal disusun berpedoman pada pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
- a. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; dan
 - b. Tujuan, sasaran, kebijakan keuangan daerah, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah disertai pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN;
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III	: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
BAB V	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
BAB VI	: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
BAB VII	: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
BAB VIII	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
BAB IX	: PENUTUP.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

- a. Perangkat Daerah dalam Menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target capaian sasaran akhir pembangunan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang RPJMD belum diundangkan, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD dan mengacu pada RPJMN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 November 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

tdd

NURYAKIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:
(6-224/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Gubernur berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun, serta dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemangku kepentingan" adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik, LSM/ORMAS, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota serta desa/kelurahan, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 102

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 25 NOVEMBER 2021

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021-2026**

DAFTAR ISI

BAB I

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.3.1 Keselarasan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	I-12
1.3.2 Keselarasan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025	I-13
1.3.3 Keselarasan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035	I-15
1.3.4 Keselarasan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dengan KLHS.....	I-17
1.4 Maksud dan Tujuan	I-19
1.5 Sistematika Penulisan	I-20

BAB II

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-2
2.1.1 Letak Geografi, Batas Administrasi dan Kondisi Fisik	II-2
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-6
2.1.3 Potensi Resiko Bencana	II-8
2.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-25
2.1.4.1 Profil Daya Dukung Lingkungan Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia	II-25
2.1.4.2 Profil Daya Dukung Lingkungan Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan	II-33
2.1.5 Jumlah Penduduk	II-48
2.1.6 Sex Ratio Penduduk	II-49
2.1.7 Distribusi Penduduk Kalimantan Tengah	II-50
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-52
2.2.1 Pertumbuhan PDRB	II-52
2.2.2 Struktur Perekonomian.....	II-57
2.2.3 Laju Inflasi.....	II-60
2.2.4 Kemiskinan	II-61
2.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka	II-65
2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	II-66
2.2.7 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia	II-68



BAB II

2.2.8 Indeks Gini	II-68
2.2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-69
2.2.10 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah	II-71
2.2.11 Angka Harapan Hidup	II-72
2.2.12 Angka Harapan Hidup	II-72
2.2.13 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-73
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-75
2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-75
2.3.1.1 Urusan Pendidikan	II-75
2.3.1.2 Urusan Kesehatan	II-83
2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-92
2.3.1.3.1 Bina Marga	II-92
2.3.1.3.2 Cipta Karya	II-94
2.3.1.3.3 Sumber Daya Air	II-96
2.3.1.3.4 Penataan Ruang.....	II-99
2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-100
2.3.1.4.1 Perumahan	II-101
2.3.1.4.2 Kawasan Permukiman Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	II-101
2.3.1.4.3 Prasarana dan Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	II-104
2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-104
2.3.1.6 Urusan Sosial.....	II-106
2.3.2 Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar	II-108
2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja.....	II-108
2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-112
2.3.2.3 Urusan Pangan.....	II-112
2.3.2.4 Urusan Pertanahan.....	II-116
2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup	II-121
2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-124
2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-125
2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-126
2.3.2.9 Urusan Perhubungan	II-126
2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika	II-133
2.3.2.11 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	II-134

BAB II

2.3.2.12	Usuran Penanaman Modal.....	II-136
2.3.2.13	Usuran Kepemudaan dan Olahraga	II-140
2.3.2.14	Usuran Statistik.....	II-141
2.3.2.15	Usuran Kebudayaan.....	II-141
2.3.2.16	Usuran Perpustakaan.....	II-143
2.3.2.17	Usuran Kearsipan.....	II-144
2.3.3	Usuran Pilihan.....	II-144
2.3.3.1	Usuran Kelautan dan Perikanan	II-144
2.3.3.2	Usuran Pariwisata.....	II-147
2.3.3.3	Usuran Pertanian.....	II-147
2.3.3.3.1	Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	II-147
2.3.3.3.2	Sektor Perkebunan	II-156
2.3.3.4	Usuran Kehutanan.....	II-158
2.3.3.5	Usuran Energi dan Sumber Daya Mineral.....	II-164
2.3.3.6	Usuran Perdagangan	II-168
2.3.3.7	Usuran Perindustrian	II-169
2.3.3.8	Usuran Transmigrasi	II-170
2.3.4	Unsur Pendukung Usuran Pemerintahan Daerah	II-171
2.3.4.1	Sekretariat Daerah.....	II-171
2.3.4.2	Sekretariat DPRD	II-172
2.3.5	Unsur Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	II-172
2.3.5.1	Perencanaan	II-172
2.3.5.2	Keuangan.....	II-173
2.3.5.3	Kepegawaian	II-173
2.3.5.4	Pendidikan dan Pelatihan.....	II-174
2.3.5.5	Penelitian dan Pengembangan	II-175
2.3.5.6	Unsur Pengawasan	II-175
2.3.5.7	Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik).....	II-176
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-207
2.4.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita.....	II-207
2.4.2	Nilai Tukar Petani	II-207
2.4.3	Jumlah Bank, Restoran, dan Hotel.....	II-208
2.4.4	Rasio Ketergantungan.....	II-208
2.5	Capaian Sasaran Pembangunan Periode Lalu	II-209
2.6	Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-219
2.6.1	SPM Bidang Pendidikan.....	II-219



BAB II

2.6.1.1 Target Dan Capaian SPM Daerah	II-219
2.6.1.2 Permasalahan Dan Solusi	II-219
2.6.2 SPM Kesehatan	II-220
2.6.2.1 Target Dan Pencapaian SPM Daerah	II-220
2.6.2.2 Permasalahan Dan Solusi	II-222
2.6.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum	II-222
2.6.3.1 Target Dan Capaian SPM Daerah	II-222
2.6.3.2 Realisasi	II-223
2.6.3.3 Permasalahan Dan Solusi	II-223
2.6.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat	II-224
2.6.4.1 Target Pencapaian SPM Daerah	II-224
2.6.4.2 Permasalahan Dan Solusi	II-225
2.6.5 SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-226
2.6.5.1 Target Pencapaian SPM Daerah	II-226
2.6.5.2 Realisasi	II-227
2.6.5.3 Permasalahan Dan Solusi	II-231
2.6.6 SPM Bidang Sosial	II-232
2.6.6.1 Indikator, Nilai SPM, Target Daerah serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional serta Realisasi	II-232
2.6.6.2 Permasalahan dan Solusi	II-235
2.7 Pandemi COVID-19 dan Dampak yang Ditimbulkannya	II-235
2.7.1 Perekonomian	II-236
2.7.2 Nilai Tukar Petani (NTP)	II-237
2.7.3 Investasi	II-237
2.7.4 Ekspor	II-237
2.7.5 Impor	II-238
2.7.6 Kemiskinan	II-239
2.7.7 Ketenagakerjaan	II-239
2.7.8 Jasa Akomodasi	II-239

BAB III

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.1.1 Perkembangan Pendapatan Daerah	III-3
3.1.1.2 Perkembangan Belanja Daerah	III-12



BAB III

3.1.1.3 Perkembangan Pembiayaan Daerah	III-18
3.1.2 Neraca Daerah	III-21
3.2. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu (2016-2020)	III-28
3.2.1 Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	III-28
3.2.2 Efektivitas Serapan Belanja Daerah	III-31
3.2.3 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-33
3.2.4 Analisis Pembiayaan Daerah	III-39
3.3. Kerangka Pendanaan	III-44
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III-44
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-49

BAB IV

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	IV-2
4.1.2 Aspek Pelayanan Umum.....	IV-3
4.1.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	IV-3
4.1.2.2 Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar	IV-16
4.1.2.3 Urusan Pilihan	IV-35
4.1.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	IV-42
4.1.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IV-44
4.1.2.6 Unsur Pengawasan	IV-46
4.1.2.7 Unsur Pemerintahan Umum	IV-47
4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	IV-47
4.2 Isu Strategi	IV-48
4.2.1 Isu International (SDG's).....	IV-48
4.2.2 Isu Nasional	IV-52
4.2.3 Analisa Persebaran Corona Virus.....	IV-53
4.2.4 Isu Regional Kalimantan Tengah	IV-55
4.2.5 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035.....	IV-70
4.2.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.....	IV-74
4.2.7 Isu Regional Daerah Sekitar.....	IV-86
4.2.7.1 Isu Perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah dan Daerah Sekitar	IV-94
4.2.8 Isu Strategis Kalimantan Tengah	IV-96



BAB V

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	V-1
5.1. Visi.....	V-1
5.2. Misi.....	V-11
1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan	V-11
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global... ..	V-13
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi	V-14
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing	V-17
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender	V-18
5.3 Tujuan dan Sasaran	V-21

BAB VI

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1. Strategi Umum Pembangunan	VI-1
6.2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran.....	VI-9
6.3. Arah Kebijakan.....	VI-16
6.3.1.Arah Kebijakan Pembangunan.....	VI-16
6.3.2.Arah Kebijakan Kewilayahan.....	VI-18
6.3.2.1 Implementasi Visi RPJPD kedalam Tahapan Keempat RPJMD (Periode 2021- 2026) serta Keterkaitannya dalam Kewilayahan	VI-22
6.3.2.2 Prioritas Penanganan Kewilayahan	VI-25
6.3.2.3 Penetapan Klaster Kewilayahan	VI-32
6.3.2.4 Kawasan Strategis Prioritas Pembangunan Ekonomi	VI-35
6.4. Program Pembangunan Daerah.....	VI-54
6.4.1.Program Prioritas I: Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar	VI-64
6.4.2.Program Prioritas II : Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah	VI-64



BAB VII

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan VII-1

7.2. Program Perangkat Daerah VII-4

BAB VIII

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1

8.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah VIII-1

BAB IX

BAB IX PENUTUP VIII-1

9.1. Pedoman Transisi IX-1

9.1. Kaidah Pelaksanaan IX-2



BAB I

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	I-4
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah . I-10	
Gambar 1.3 Hasil Penilaian dan Analisis Capaian Indikator TPB di Kalimantan Tengah yang dikategorikan kedalam 4 (Empat) Kategori	I-18
Gambar 2.1 Rata-Rata Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2016-2019 (Persen).....	II-5
Gambar 2.2 Grafik Nilai Indeks Resiko Bencana Prov. di Kalteng Tahun 2015-2020	II-8
Gambar 2.3 Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-11
Gambar 2.4 Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah	II-14
Gambar 2.5 Grafik Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-15
Gambar 2.6 Grafik Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Tengah	II-17
Gambar 2.7 Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kalimantan Tengah...	II-19
Gambar 2.8 Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kalimantan Tengah	II-21
Gambar 2.9 Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-23
Gambar 2.10 Grafik Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kalimantan Tengah	II-25
Gambar 2.11 Trend Luas Area Yang Memiliki Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 1996, 2006, dan 2018 (Ha)	II-27
Gambar 2.12 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1996.....	II-28
Gambar 2.13 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006.....	II-28
Gambar 2.14 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.....	II-29
Gambar 2.15 Trend Luas Area Yang Memiliki Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 1996, 2006, dan 2018	II-31

BAB II



BAB II

Gambar 2.16 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1996	II-32
Gambar 2.17 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun	II-32
Gambar 2.18 Pebaran Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	II-33
Gambar 2.19 Trend Luas Area Yang Memiliki Jasa Ekosistem Pengaturan Air di Provinsi Kalimantan Tengah pada Periode Tahun 1996, 2006, dan 2018 (Ha)	II-35
Gambar 2.20 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Air di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1996	II-35
Gambar 2.21 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Air di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006	II-35
Gambar 2.22 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Air di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	II-36
Gambar 2.23 Trend Luas Area Yang Memiliki Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah pada Periode Tahun 1996, 2006, dan 2017 (Ha)	II-37
Gambar 2.24 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1996	II-38
Gambar 2.25 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006	II-39
Gambar 2.26 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016	II-39
Gambar 2.27 Trend Luas Area Yang Memiliki Jasa Ekosistem Pengaturan Mitigasi Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 1996, 2006, dan 2018 (Ha)	II-40
Gambar 2.28 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1996	II-40
Gambar 2.29 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006	II-41
Gambar 2.30 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Mitigasi Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	II-42
Gambar 2.31 Trend Luas Area Yang Memiliki Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan (Mitigasi) Longsor di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 1996, 2006, dan 2018	II-43
Gambar 2.32 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1996	II-43
Gambar 2.33 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006	II-44

Gambar 2.34 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan
 Perlindungan Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017II-45

Gambar 2.35 Trend Luas Area Yang Memiliki Jasa Ekosistem Pengaturan
 Mitigasi Kebakaran di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 1996,
 2006, dan 2018 II-46

Gambar 2.36 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Penguraian Limbah di
 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1996 II-46

Gambar 2.37 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Penguraian Limbah di
 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 II-47

Gambar 2.38 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Penguraian Limbah di
 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 II-47

Gambar 2.39 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berdasar
 Jenis Kelamin II-49

Gambar 2.40 Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi
 Kalimantan Tengah (SP 2020) II-51

Gambar 2.41 PDRB ADHK dan PDRB ADHB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
 2016 - 2020 (Milyar Rupiah) II-53

Gambar 2.42 Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan dan Nasional
 Tahun 2015-2020 (Persen) II-55

Gambar 2.43 Laju Inflasi Tahunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020
 (Persen) II-60

Gambar 2.44 Tingkat Kemiskinan di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2016-
 2020 (Persen) II-62

Gambar 2.45 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
 2016-2020 (Persen) II-63

Gambar 2.46 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
 2014-2020 (Persen) II-64

Gambar 2.47 Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Nasional
 Tahun 2016-2020 (%) II-65

Gambar 2.48 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Tengah
 Tahun 2016-2020 II-67

Gambar 2.49 Distribusi Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2015-
 2019 II-68

Gambar 2.50 Indeks Gini Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2016-2020...
 II-69

Gambar 2.51 Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Nasional
 Tahun 2016-2020 II-70

Gambar 2.52 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-
 2019 (Tahun) II-72



BAB II

Gambar 2.53 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 (Tahun)	II-73
Gambar 2.54 Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.....	II-109
Gambar 2.55 Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.....	II-110
Gambar 2.56 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	II-114
Gambar 2.57 Perkembangan Komposisi Pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2020	II-115
Gambar 2.58 Perkembangan Skor Pph Ketersediaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2020*	II-116
Gambar 2.59 IKLH Provinsi Kalimantan Tengah	II-123
Gambar 2.60 Peta Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Tengah	II-129
Gambar 2.61 Peta Bandar Udara di Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-130
Gambar 2.62 Peta Terminal di Provinsi Kalimantan Tengah	II-133
Gambar 2.63 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2015-2020 Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-136
Gambar 2.64 Investor PMA/PMDN Tahun 2015-2020 Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-138
Gambar 2.65 Jumlah Investasi PMA/PMDN Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-139
Gambar 2.66 Jumlah Izin Dan Non Izin Yang Diproses Selesai	II-140
Gambar 2.67 Jumlah Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Tahun 2019-2020 (Ha).....	II-148
Gambar 2.68 Capaian Produktivitas Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Tahun 2019 - 2020 (Ku/Ha).....	II-149
Gambar 2.69 Capaian Produksi Tanaman Pangan Prov.Kalteng Tahun 2019-2020 (Ton)	II-150
Gambar 2.70 Perkembangan Ketersediaan Beras Prov.Kalteng Tahun 2016 s.d Tahun 2020.....	II-152
Gambar 2.71 Capaian Jumlah Luas Panen Tanaman Hortikultura Tahun 2019 - 2020 Prov.Kalteng	II-152
Gambar 2.72 Capaian Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura Prov.Kalteng Tahun 2019 – 2020.....	II-153
Gambar 2.73 Capaian Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Prov.Kalteng Tahun 2019 – 2020.....	II-154
Gambar 2.74 Luas Perkebunan Karet Tingkat Kabupaten Tahun 2020	II-158
Gambar 2.75 Interkoneksi Jaringan SUTT 150 KV Kalimantan Tengah.....	II-164

BAB II

Gambar 2.76 Kondisi Desa Berlistrik Dan Belum Berlistrik Tahun 2015-2020 Provinsi Kalimantan Tengah	II-165
Gambar 2.77 Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020	II-166
Gambar 2.78 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019.....	II-210

BAB III

Gambar 3.1 Rata-Rata Komposisi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2020	III-10
Gambar 3.2 Rata-Rata Komposisi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020.....	III-11
Gambar 3.3 Rata-Rata Komposisi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2016- 2020	III-11
Gambar 3.4 Rata-Rata Komposisi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2020	III-12

BAB IV

Gambar 4.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	IV-50
Gambar 4.2 Perkembangan Covid-19 Di Provinsi Kalimantan Tengah	IV-55
Gambar 4.3 Jumlah Indikator (Kategori Indikator) Berdasarkan Tujuan TPB	IV-76
Gambar 4.4 Capaian Indikator TPB dalam Kategori A berdasarkan Jumlah TPB/Indikator	IV-78
Gambar 4.5 Capaian Indikator TPB dalam Kategori B berdasarkan Jumlah TPB/Indikator	IV-79
Gambar 4.6 Capaian Indikator TPB dalam Kategori C berdasarkan Jumlah TPB/Indikator	IV-80
Gambar 4.7 Capaian Indikator TPB dalam Kategori D berdasarkan Jumlah TPB/Indikator	IV-81
Gambar 4.8 Capaian Kategori TPB A Berdasarkan Pilar	IV-82
Gambar 4.9 Capaian Kategori TPB B Berdasarkan Pilar	IV-83
Gambar 4.10 Capaian Kategori TPB C Berdasarkan Pilar.....	IV-83
Gambar 4.11 Capaian Kategori TPB D Berdasarkan Pilar.....	IV-84
Gambar 4.12 Capaian Kategori TPB A tiap OPD	IV-85
Gambar 4.13 Capaian Kategori TPB B tiap OPD	IV-85
Gambar 4.14 Capaian Kategori TPB C tiap OPD	IV-86
Gambar 4.15 Capaian Kategori TPB D tiap OPD	IV-86

BAB V

Gambar 5.1 Pondasi Dalam Pencapaian Visi.....	V-8
Gambar 5.2 Kerangka Kerja Operasional Pokok Visi.....	V-10

Gambar 6.1 Visi Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Periode Tahun 2021-2026.....	VI-10
Gambar 6.2 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019-2024	VI-16
Gambar 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	VI-17
Gambar 6.4 Sinkronisasi RPJPD, RTRW kedalam tahap Keempat Pembangunan RPJMD hingga Dokumen Perencanaan Tahunan.....	VI-24
Gambar 6.5 Peta Sebaran Kondisi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah.	VI-25
Gambar 6.6 Peta Sebaran Pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah.....	VI-27
Gambar 6.7 Peta Sebaran Kondisi Ekonomi	VI-29
Gambar 6.8 Prioritas Pembangunan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah...	VI-31
Gambar 6.9 Klaster Sektor Unggulan Pertanian Minapolitan Provinsi.....	VI-33
Gambar 6.10 Klaster Sektor Unggulan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	VI-34
Gambar 6.11 Klaster Pertanian Minapolitan dan Peternakan di Provinsi Kalimantan Tengah	VI-35
Gambar 6.12 Tahapan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan di Kalimantan Tengah Tahun 2020-2026.....	VI-39
Gambar 6.13 Pemanfaatan Kawasan EKS-PLG di Kalimantan Tengah.....	VI-41
Gambar 6.14 Peta Kawasan <i>Food Estate</i> di Lahan Ex-PLG Provinsi Kalimantan Tengah.....	VI-41
Gambar 6.15 Peta Komposit Kesesuaian Lahan Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah	VI-43
Gambar 6.16 Pola Integrasi Pengembangan Kawasan Terpadu Budidaya Tambak Udang Vaname di Kabupaten Sukamara	VI-45
Gambar 6.17 Pengembangan Kluster Tambak Udang di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara.....	VI-46
Gambar 6.18 Kondisi Teknis Mendukung Program Shrimp Estate di Kabupaten Sukamara.....	VI-46
Gambar 6.19 Rencana Pembangunan Tambak Udang Vaname Tahap I Lokasi di Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara	VI-47
Gambar 6.20 Perwilayahan Industri Pada WPI Kalimantan Bagian Barat.....	VI-50
Gambar 6.21 Zonasi Pengembangan Potensi Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah.....	IV-57



DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel 1.1 Keselarasan Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 I-12

Tabel 1.2 Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RPJPD..... I-13

Tabel 1.3 Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RTRW..... I-15

Tabel 1.4 Keselarasan Dokumen RPJMD dengan KLHS..... I-19

BAB II

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah..... II-2

Tabel 2.2 Inventarisasi Nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman dan Lebar di Provinsi Kalimantan Tengah..... II-4

Tabel 2.3 Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 II-5

Tabel 2.4 Luas Daerah berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan II-6

Tabel 2.5 Tutupan Lahan Tahun 2020 berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan II-7

Tabel 2.6 Potensi Bencana Provinsi Kalimantan Tengah..... II-9

Tabel 2.7 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah II-10

Tabel 2.8 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah II-13

Tabel 2.9 Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kalimantan Tengah II-14

Tabel 2.10 Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Tengah II-16

Tabel 2.11 Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kalimantan Tengah II-18

Tabel 2.12 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kalimantan Tengah II-20

Tabel 2.13 Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kalimantan Tengah II-22

Tabel 2.14 Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kalimantan Tengah II-24

Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah Tahun Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020..... II-48

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020..... II-50

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah Tahun Hasil Sensus Penduduk 2020 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin II-50

Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota (SP 2020)..... II-51

Tabel 2.19 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha II-53

Tabel 2.20 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah II-55

Tabel 2.21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-56



BAB II

Tabel 2.22 PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2019	II-57
Tabel 2.23 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Distribusi Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	II-59
Tabel 2.24 Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2019.....	II-61
Tabel 2.25 Garis Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 serta Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dan 2020	II-62
Tabel 2.26 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020	II-64
Tabel 2.27 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	II-66
Tabel 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020.....	II-67
Tabel 2.29 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	II-71
Tabel 2.30 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019	II-72
Tabel 2.31 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	II-74
Tabel 2.32 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	II-74
Tabel 2.33 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-75
Tabel 2.34 Jumlah Guru/Pendidik yang Berkualifikasi DIV/S1 di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	II-75
Tabel 2.35 Jumlah Guru/Pendidik yang Telah Tersertifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	II-76
Tabel 2.36 Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	II-76
Tabel 2.37 Jumlah Satuan Pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	II-77
Tabel 2.38 Jumlah Pendidik per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.....	II-77
Tabel 2.39 Jumlah Peserta Didik per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	II-78
Tabel 2.40 Jumlah SMK Berdasarkan Bidang Keahlian	II-78
Tabel 2.41 Jumlah SMK Berdasarkan Kompetensi Keahlian	II-79
Tabel 2.42 Angka Partisipasi Sekolah dan Rasio Guru terhadap Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019.....	II-81



BAB II

Tabel 2.43 Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-82
Tabel 2.44 Kondisi Bangunan Satuan Pendidikan SMA/SMK/MA.....	II-83
Tabel 2.45 Sarana dan Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020.....	II-83
Tabel 2.46 Rasio Sarana dan Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.....	II-84
Tabel 2.47 Indikator Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020	II-85
Tabel 2.48 Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular Provinsi Kalimantan Tengah	II-88
Tabel 2.49 Jumlah Penderita Penyakit Menular Provinsi Kalimantan Tengah....	II-88
Tabel 2.50 Jumlah Kasus Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020....	II-88
Tabel 2.51 Panjang jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Yang Berwenang Mengelolanya di Provinsi Kalimantan Tengah	II-93
Tabel 2.52 Panjang Jaringan Jalan Nasional dan Provinsi Berdasarkan Kondisi Tahun 2020.....	II-94
Tabel 2.53 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2016-2020.....	II-95
Tabel 2.54 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota.....	II-95
Tabel 2.55 Data – Data Bendungan di Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	II-96
Tabel 2.56 Status Daerah Irigasi Kewenangandinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	II-97
Tabel 2.57 Perda RTRW Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah	II-99
Tabel 2.58 Perkembangan Revisi Perda dan Perkada RDTR Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-100
Tabel 2.59 Jumlah dan Luasan Kawasan Kumuh lingkup kewenangan Provinsi Tahun 2020	II-101
Tabel 2.60 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Layak Huni (RLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	II-102
Tabel 2.61 Realisasi Pembangunan Perumahan KPR Melalui BTN Cabang Palangka Raya	II-103
Tabel 2.62 Realisasi Penjualan Rumah yang Dibangun Perum Perumnas dan Pengembang Swasta Melalui KPR BTN Cabang Palangka Raya.....	II-103
Tabel 2.63 Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020	II-104
Tabel 2.64 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019.....	II-105



BAB II

Tabel 2.65 Jumlah Bencana dan Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	II-106
Tabel 2.66 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	II-107
Tabel 2.67 PMKS yang Telah dilayani di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019....	II-108
Tabel 2.68 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 – 2020	II-109
Tabel 2.68.a Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	II-110
Tabel 2.68.b Data Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	II-111
Tabel 2.69 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.....	II-112
Tabel 2.70 Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019	II-114
Tabel 2.71 Data Izin Lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	II-117
Tabel 2.72 Data Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	II-117
Tabel 2.73 Jumlah Sengketa Tanah Garapan Kalimantan Tengah Tahun 2020	II-118
Tabel 2.74 Nilai IKA Provinsi Kalimantan Tengah	II-122
Tabel 2.75 Nilai IKU Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-122
Tabel 2.76 Nilai IKLH Provinsi di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2019	II-123
Tabel 2.77 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2020	II-124
Tabel 2.78 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019	II-125
Tabel 2.79 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.....	II-126
Tabel 2.80 Data Perkembangan Produksi Angkutan Udara 5 Tahun Terakhir di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya Tahun 2016-2020	II-130
Tabel 2.81 Data Perkembangan Produksi Angkutan Udara 5 Tahun Terakhir di Bandar Udara H. Asan Sampit Tahun 2016-2020.....	II-131
Tabel 2.82 Data Perkembangan Produksi Angkutan Udara 5 Tahun Terakhir di Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun Tahun 2016-2020.....	II-131
Tabel 2.83 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2020.....	II-131
Tabel 2.84 Data Terminal di Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-132
Tabel 2.85 Data Terminal di Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-133



BAB II

Tabel 2.86 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019	II-134
Tabel 2.87 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	II-135
Tabel 2.88 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	II-136
Tabel 2.89 Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing	II-137
Tabel 2.90 Jumlah Investor PMA/PMDN Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Tengah	II-138
Tabel 2.91 Jumlah Investasi PMA/PMDN Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Tengah	II-139
Tabel 2.92 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020	II-140
Tabel 2.93 Capaian Kinerja Seni dan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2020	II-141
Tabel 2.94 Capaian Kinerja Seni dan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-142
Tabel 2.95 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dan 2020	II-143
Tabel 2.96 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2020	II-144
Tabel 2.97 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	II-145
Tabel 2.98 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2020	II-147
Tabel 2.99.a Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	II-148
Tabel 2.99 Perkembangan Surplus Beras Provinsi Kalteng Tengah Tahun 2016-2020	II-155
Tabel 2.100 Populaasi Ternak Utama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	II-155
Tabel 2.101 Produksi Daging Utama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	II-156
Tabel 2.102 Luas Lahan Komoditas – Komoditas Utama Tanaman Perkebunan 2014 – 2019	II-156
Tabel 2.103 Produksi Komoditas – Komoditas Utama Tanaman Perkebunan 2014 – 2019	II-157
Tabel 2.104 Daftar Komposisi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah	II-159
Tabel 2.105 Daftar Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Kalimantan Tengah	II-159



BAB II

Tabel 2.106 Daftar Rekapitulasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Berbasis Korporasi	II-161
Tabel 2.107 Daftar Rekapitulasi Izin Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Perhutanan Sosial).....	II-161
Tabel 2.108 Daftar Realisasi Produksi Kayu Bulat Tahun 2016-2020	II-161
Tabel 2.109 Daftar Target dan Realisasi PNBPN Sub Sektor Kehutanan Tahun 2016-2020	II-162
Tabel 2.110 Daftar Rekapitulasi Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IIPHHK)	II-162
Tabel 2.111 Daftar Realisasi Produksi Kayu Olahan Tahun 2016-2020	II-162
Tabel 2.112 Daftar Capaian Kinerja RPJMD Urusan Bidang Kehutanan Tahun 2016-2020	II-163
Tabel 2.113 Penataan IUP Tahun 2016-2019	II-166
Tabel 2.114 Produksi Batubara IUP Tahun 2015-2019	II-167
Tabel 2.115 Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang Tahun 2015-2019	II-167
Tabel 2.116 Realisasi PNBPN Tahun 2015-2019	II-167
Tabel 2.117 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	II-168
Tabel 2.118 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	II-170
Tabel 2.119 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019	II-171
Tabel 2.120 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019	II-171
Tabel 2.121 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	II-172
Tabel 2.122 Capaian Kinerja Unsur Perencanaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2019	II-172
Tabel 2.123 Capaian Kinerja Unsur Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	II-173
Tabel 2.124 Capaian Kinerja Unsur Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	II-173
Tabel 2.125 Capaian Kinerja Unsur Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	II-174
Tabel 2.126 Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2018	II-175
Tabel 2.127 Capaian Kinerja Pengawasan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	II-175



BAB II

Tabel 2.128 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	II-176
Tabel 2.129 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019	II-179
Tabel 2.130 Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	II-207
Tabel 2.131 Nilai Tukar Petani Subsektor Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	II-208
Tabel 2.132 Jumlah Bank, Restoran, dan Hotel di Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	II-208
Tabel 2.133 Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020... ..	II-209
Tabel 2.134 Capaian Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019.....	II-211
Tabel 2.135 Target dan Capaian SPM.....	II-219
Tabel 2.136 Target dan Capaian SPM.....	II-221
Tabel 2.137 Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	II-224
Tabel 2.138 Pendataan Kawasan Kumuh di sempadan sungai pada 5 Kabupaten/Kota.....	II-225
Tabel 2.139 Target Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	II-227
Tabel 2.140 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019.....	II-228
Tabel 2.141 Kegiatan Satpol PP Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019	II-229
Tabel 2.142 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	II-233

BAB III

Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	III-7
Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	III-14
Tabel 3.3 Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	III-17
Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	III-20
Tabel 3.5 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	III-23



BAB III

Tabel 3.6 Analisis Rasio Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	III-27
Tabel 3.7 Kriteria Efektivitas APBD	III-29
Tabel 3.8 Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah	III-30
Tabel 3.9 Analisis Efektivitas Serapan Anggaran Belanja Daerah	III-32
Tabel 3.10 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	III-34
Tabel 3.11 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	III-38
Tabel 3.12 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019	III-39
Tabel 3.13 Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah	III-40
Tabel 3.14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	III-41
Tabel 3.15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	III-42
Tabel 3.16 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	III-43
Tabel 3.17 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	III-45
Tabel 3.18 Proyeksi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	III-49
Tabel 3.19 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	III-51
Tabel 3.20 Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2026	III-53

BAB IV

Tabel 4.1 Kriteria Indikator TPB	IV-77
Tabel 4.2 Capaian TPB berdasarkan TPB	IV-82
Tabel 4.3 Isu Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dan Daerah Sekitarnya	IV-94

BAB V

Tabel 5.1 Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	V-9
Tabel 5.2 Keterkaitan Pokok-pokok Visi dengan Misi Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2026	V-20
Tabel 5.3 Indikator Tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah	V-22
Tabel 5.4 Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah	V-25



BAB VI

Tabel 6.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	VI-10
Tabel 6.2 Daftar Prioritas Berdasarkan RIPIN 2015-2035	VI-51
Tabel 6.3 Jenis Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah.....	VI-52
Tabel 6.4 Rencana Pembangunan Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2040	VI-54
Tabel 6.5 Integrasi BERKAH ke dalam Program Perangkat Daerah	VI-74
Tabel 6.6 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Kalimantan Tengah	VI-84
Tabel 6.7 Penyelarasan Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	VI-139

BAB VII

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Tengah	VII-3
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2026	VII-5
Tabel 7.3 Rekapitulasi Program RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026	VII-75

BAB VIII

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	VIII-3
Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	VIII-4
Tabel 8. 3 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	VIII-7
Tabel 8. 4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	VIII-47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Wilayah yang luas dengan 14 Kabupaten/Kota menjadi potensi sekaligus tantangan bagi Kalimantan Tengah dalam membangun masyarakat dan wilayahnya. Salah satu tantangan yang menjadi ciri Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dataran gambut, Pemerintah Daerah dan masyarakat provinsi Kalimantan Tengah di dihadapkan dengan tuntutan pengelolaan dan perlindungan dataran gambut khususnya dalam pengelolaan perkebunan dan kehutanan untuk menghindari potensi kebakaran yang sering terjadi. Selain itu, pembangunan di Kalimantan Tengah juga perlu memperhatikan keberadaan ekoregion pegunungan struktural Kalimantan yang memiliki potensi untuk daerah resapan air.

Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan rencana pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan untuk merespon

perkembangan dunia di era digitalisasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan provinsi oleh kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 telah menghasilkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Periode 2021-2026, yaitu pasangan **H. Sugianto Sabran** dan **H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.** Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dilantik pada tanggal 25 Mei 2021 oleh Presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa setiap Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

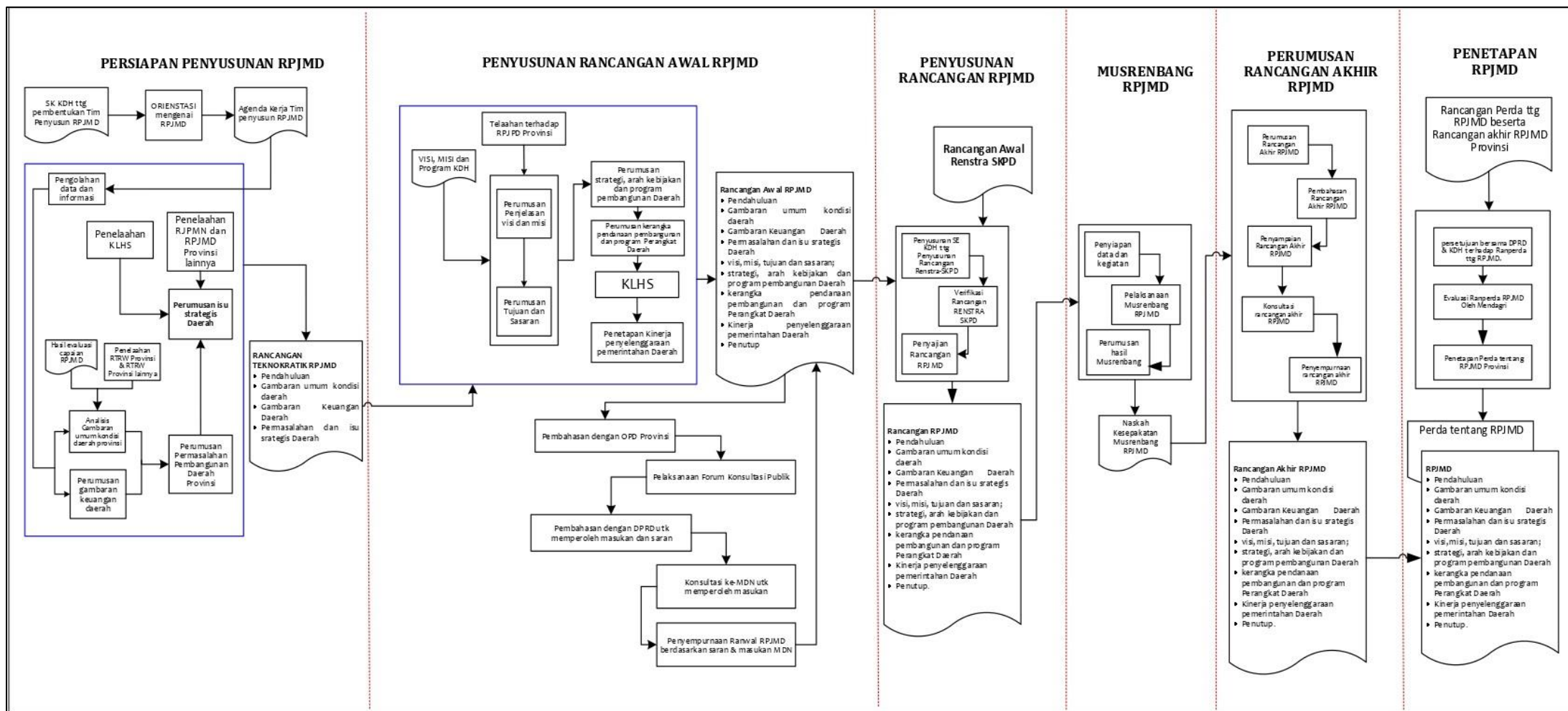
RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2026 merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2026, yang selanjutnya harus dipedomani oleh kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Tengah dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk periode berkenaan. Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan

4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Selain pendekatan proses, penyusunan dokumen tersebut juga berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
3. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.



Gambar 1. 1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 41 huruf e, penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 dimulai dengan penyusunan rancangan teknokratik, baik sebelum maupun sesudahnya pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rancangan Teknokratik dilakukan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah dengan melibatkan para ahli (akademisi), praktisi, pejabat pemerintah daerah, dan stakeholders pembangunan lainnya. Rancangan Teknokratik tersebut kemudian diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sehingga menghasilkan suatu Rancangan Awal RPJMD yang mulai disusun pada saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan melibatkan partisipasi stakeholder pembangunan secara luas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Masukan atau saran yang disampaikan dalam Musrenbang tersebut menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD. Selanjutnya Rancangan Akhir dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Gubernur. Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lebaran Negara Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

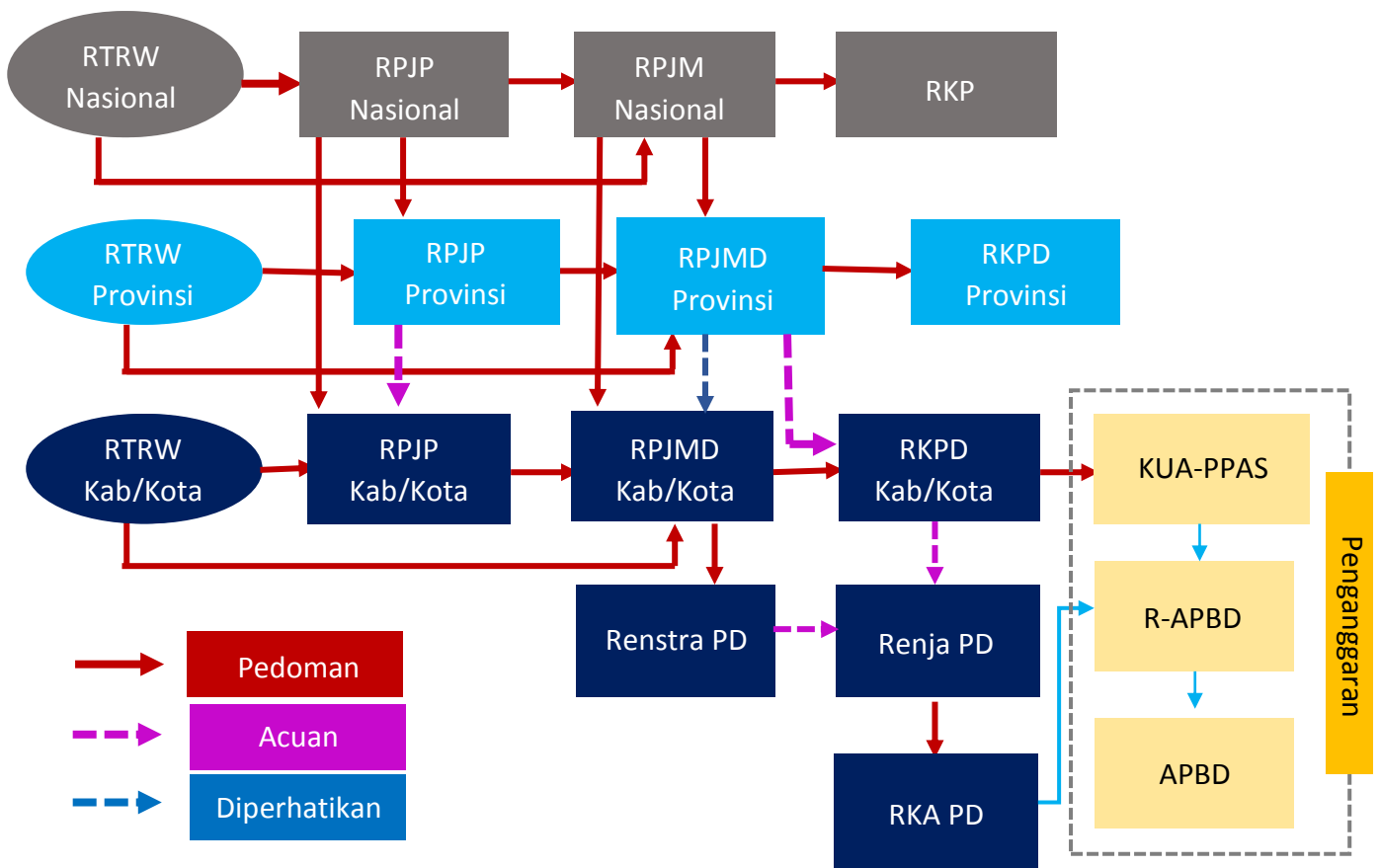
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81); dan
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Untuk itu RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun yang mencakup RPJPN Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah juga mengacu terhadap dokumen KLHS yang menunjukkan capaian *Sustainable Development Goals* di Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun

2021-2026 juga berpedoman pada RTRW Nasional Tahun 2011-2031 serta RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah struktur dan pola pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah periode 2021-2026. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Hubungan antar dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 harus berpedoman pada RPJMN dengan memperhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus

memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

- b. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025 pada RPJMD tahap terakhir.
- c. RPJMD dan Renstra PD merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan dalam Renstra masing-masing PD sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Pada pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, dokumen RPJMD ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD.
- e. Berpedoman pada Renstra PD, setiap PD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan PD untuk menjadi bagian RKPD.
- f. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 didasarkan pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah. RPJMD harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dimaksudkan agar keselarasan perencanaan pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan rencana penataan ruang wilayah. Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional dengan memperhatikan kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
- g. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara substansi, keselarasan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dengan berbagai dokumen terkait akan disampaikan sebagai berikut:

1.3.1 Keselarasan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024. Secara umum, keselarasan 5 (lima) misi daerah pada dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Keselarasan Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

No	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
VISI		
	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandasan Gotong Royong	Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis
MISI		
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 4 : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 5 : Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 5 : Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
7	Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Misi 2 : Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

1.3.2 Keselarasan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RPJPD

No	RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025	RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
VISI		
	Kalimantan Tengah Yang Maju, Mandiri Dan Adil	Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis
MISI		
1	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.	Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan	Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
3	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah	Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
4	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah	Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
5	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik	Misi 5 : Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

No	RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025	RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
	secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.	
6	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.	Misi 4 : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing
7	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
8	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	Misi 2 : Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
9	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
10	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.	Misi 4 : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing
11	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang	Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif

No	RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025	RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
	serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	dan Berwawasan Lingkungan
12	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

1.3.3 Keselarasan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035.

Tabel 1.3 Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RTRW

No	Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035
1	Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan	<p>Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi Pasal 5;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayat 1 menyatakan meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara PKN, PKW, dan PKL; • Ayat 2 menyatakan pengembangan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; dan • Ayat 3 mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif serta berdaya dukung terhadap pengembangan potensi provinsi

No	Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035
		<p>Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi Pasal 6;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayat 1 menyatakan meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi antarmoda baik darat, laut maupun udara. <p>Pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi pasal 11;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayat 1 menyatakan penetapan lokasi-lokasi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan teknologi • Ayat 2 meningkatkan prasarana dan sarana pada kawasan strategis provinsi • Ayat 3 meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi budaya pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan budaya
2	Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global	<p>Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan Pasal 8;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayat 1 menyatakan pengembangan kawasan pertanian dalam rangka mendukung lumbung pangan <p>Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi Pasal 9;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayat 1 menyatakan pengembangan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi <p>Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi Pasal 10;</p>

No	Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035
		Ayat 4 menyatakan mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan terhambatnya perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi	Misi 3 tidak secara langsung terkait dengan RTRW mengingat lingkungannya tidak berkenaan dengan kewilayahan.
4	Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing	Misi 4 tidak secara langsung terkait dengan RTRW mengingat lingkungannya tidak berkenaan dengan kewilayahan.
5	Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender	Pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi pasal 11; <ul style="list-style-type: none"> • Ayat 4 menumbuhkembangkan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat melalui pelestarian budaya lokal • Ayat 5 melestarikan seni dan budaya Dayak seperti musik, tarian, lagu, upacara adat, seni kerajinan dan olahraga tradisonal

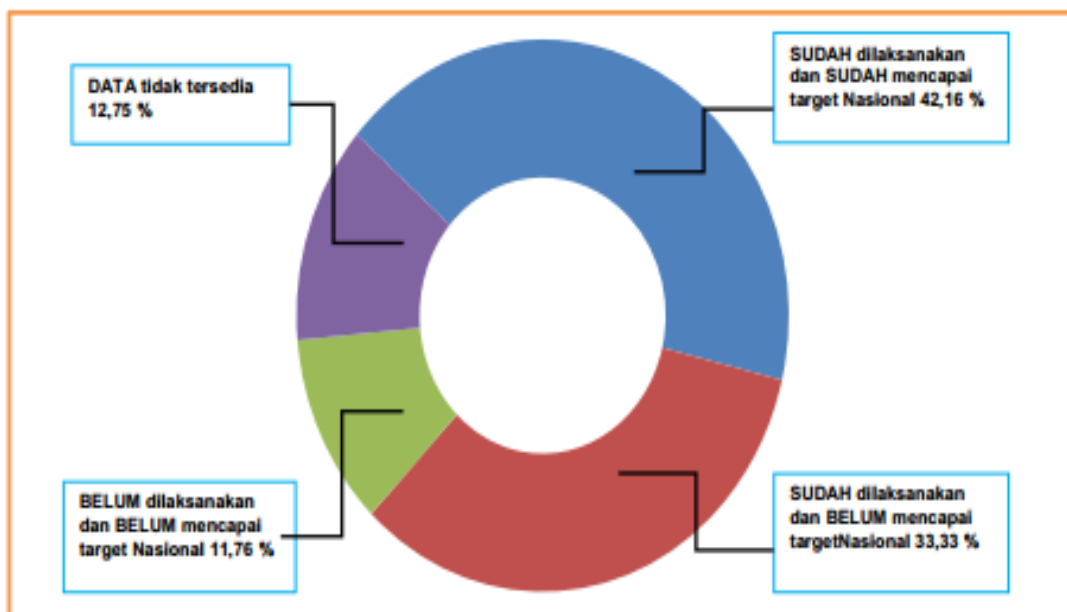
Mengacu pada tabel diatas dapat diketahui bahwa berbagai strategi pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 telah menjadi pijakan dalam perumusan RPJMD Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.

1.3.4 Keselarasan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dengan KLHS

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah turut berperan aktif dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat 319 indikator sasaran dan sesuai dengan kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 212 indikator

sasaran yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 dari TPB/SDGs dengan rincian sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan
- Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan
- Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas
- Tujuan 5 : Kesetaraan Gender
- Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
- Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau
- Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan
- Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan
- Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim
- Tujuan 14 : Ekosistem Lautan
- Tujuan 15 : Ekosistem Daratan
- Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan



Sumber: KLHS Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 1. 3 Hasil Penilaian dan Analisis Capaian Indikator TPB di Kalimantan Tengah yang dikategorikan kedalam 4 (Empat) Kategori

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebesar 42,16 %, indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

sebesar 33,33 %, indicator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebesar 11,76 %, dan data tidak tersedia sebesar 12,75 %. Keberadaan data dan hasil capaian TPB di Provinsi Kalimantan tengah tersebut mengindikasikan, bahwa Provinsi Kalimantan Tengah harus lebih serius dalam melakukan berbagai kegiatan terkait pencapaian TPB agar target di tahun 2030 dapat dicapai dengan baik.

Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dengan KLHS Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dari persandingan isu strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.4 Keselarasan Dokumen RPJMD dengan KLHS

No	Isu Strategis KLHS Provinsi Kalimantan Tengah	RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
1	Konflik Sosial, Budaya dan Kelembagaan	Sesuai Misi 5: Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender
2	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Kebakaran Hutan dan Lahan, Penurunan Kualitas Air Sungai, Deforestasi dan Degradasi Lahan Gambut)	Misi 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
3	Pengelolaan lanskap berkelanjutan (<i>Sustainable Landscape</i>)	Tujuan 1.2 Misi 1: Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan
4	Ekonomi hijau (<i>Green Economy</i>) dan implikasinya	
5	<i>Low Emission Development Strategies</i> (LEDS) / Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE)	

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi serta program kepala daerah selama periode 2021-2026 secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, keuangan daerah, serta program

perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD), dan Rancangan APBD.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi sekitar yang sinergi dan terpadu.
5. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan Perda, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
6. Menjadi instrumen dalam pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5 Capaian Sasaran Pembangunan Periode Lalu (2016-2021)
- 2.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal
- 2.7 Kondisi Daerah Akibat Pandemi COVID-19

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu (2016-2021)

3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.2 Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

5.2 Misi

5.3 Tujuan

5.4 Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

6.3 Program Pembangunan Daerah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

6.2 Program Pembangunan Daerah

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang berdiri setelah adanya restrukturisasi provinsi di Pulau Kalimantan. Merunut ke belakang berdasarkan wilayah geografisnya, Provinsi Kalimantan Tengah dahulu merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari aspek geografisnya, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki cukup banyak kesamaan karakteristik dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan yang ditandai dengan luasnya wilayah hutan, rawa-rawa, hingga lahan gambut. Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki sebelas sungai besar dan 33 sungai kecil yang bermula dari utara dan mengalir ke Laut Jawa. Sungai Barito merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah dengan panjang mencapai 900 km dengan kedalaman berkisar antara 6 hingga 14 meter. Sungai merupakan lokasi utama pemukiman dan moda transportasi yang penting di Kalimantan Tengah.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki ibu kota provinsi di Palangka Raya. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak di pertengahan wilayah Kalimantan Tengah atau berada di titik sentral seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjadikan pembangunan daerah antara ibu kota provinsi dan kabupaten memiliki kesetaraan dalam pencapaian kualitas pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki kelebihan dalam pencapaian pembangunan daerah dibandingkan dengan kabupaten lainnya, seperti: Kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Utara, maupun Kotawaringin Bara

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi.

2.1.1 Letak Geografi, Batas Administrasi dan Kondisi Fisik

Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°47'27" Lintang Utara hingga 3°32'37" 3°30' Lintang Selatan dan 110°43'54" Bujur Timur hingga 115°51'22" Bujur Timur. Kalimantan Tengah dengan luas sekitar 15.526.599 hektar merupakan provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Wilayah administrasinya dibagi menjadi tiga belas kabupaten dan satu kota. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Batas Utara: Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
- Batas Timur: Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
- Batas Selatan: Laut Jawa; dan
- Batas Barat: Kalimantan Barat.

Secara administratif, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, 139 kelurahan dan 1.432 desa. Kabupaten yang terluas adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas sekitar 15,43% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara daerah terkecil yaitu Kota Palangka Raya dengan luas sekitar 1,56% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Kotawaringin Barat	10.759	6	13	81
2	Kotawaringin Timur	16.796	17	17	168
3	Kapuas	14.999	17	17	214
4	Barito Selatan	8.830	6	7	86
5	Barito Utara	8.300	9	10	93
6	Katingan	17.500	13	7	154
7	Seruyan	16.404	10	3	97
8	Sukamara	3.827	5	3	29
9	Lamandau	6.414	8	3	85
10	Gunung Mas	10.805	12	13	114
11	Pulang Pisau	8.997	8	4	95
12	Murung Raya	23.700	10	9	116
13	Barito Timur	3.834	10	3	100

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
14	Kota Palangka Raya	2.399,50	5	30	-
	Kalimantan Tengah	153.564,50	136	139	1.432

Sumber: Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Tabel 2.1, selain menyajikan luas kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Tengah juga membagi daerah-daerah tersebut dalam jumlah wilayah kecamatan, kelurahan dan pemerintahan desa. Selain Kota Palangka Raya, kabupaten dengan jumlah kecamatan paling sedikit adalah Kabupaten Sukamara dengan 5 kecamatan, menyusul Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat yang sama-sama memiliki 6 kecamatan, dan Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Pulang Pisau yang sama memiliki 8 kecamatan. Daerah dengan kecamatan paling banyak adalah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas yang sama-sama memiliki 17 kecamatan, menyusul Kabupaten Katingan dengan 13 kecamatan, dan Kabupaten Seruyan, Barito Timur dan Kabupaten Murung Raya masing-masing dengan 10 kecamatan.

Di Kota Palangka Raya ada 30 kelurahan tanpa ada desa, menyusul yang jumlah pemerintahan desanya sedikit adalah Kabupaten Sukamara dengan 29 desa, Kabupaten Kotawaringin Barat 81 desa, Kabupaten Barito Selatan 86 desa, Kabupaten Lamandau 85 desa. Sebaliknya, 3 kabupaten dengan jumlah desa paling banyak desanya adalah Kabupaten Kapuas 214 desa, Kabupaten Kotawaringin Timur 168 desa, dan Kabupaten Katingan 154 desa. Setelah Kota Palangka Raya, kabupaten dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan 17 kelurahan, dan Kabupaten Gunung Mas dan Kotawaringin Barat dengan 13 kelurahan.

a. Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah, dan menerus dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi landai hingga kemiringan tertentu dan memiliki pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sedangkan pada sektor Utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam memanjang dari Barat Daya ke Timur. Titik tertinggi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian mencapai 1.660 meter dpl.

b. Geologi dan Tanah

Perihal potensi kesuburan tanah, wilayah-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah tergolong memiliki potensi kesuburan rendah. Menurut tingkat kesuburannya, tanah di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kelas III, IV, dan V dengan jenis tanah terdiri dari Organosol, Aluvial, Regosol, PMK, Podsol, Latosol, Litosol, dan Laterit.

c. Hidrologi

Provinsi Kalimantan Tengah mengalir beberapa sungai besar yang berhulu di sektor utara. Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai kemiringan yang rendah hingga ke sektor tengah sehingga jangkauan pengaruh pasang air laut, khususnya pada musim kemarau, relatif jauh. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah dataran yang dilintasinya. Selain itu, rawa gambut terdapat hingga ke sektor tengah dan pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Sedangkan wilayah bagian hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan kemiringan tinggi bahkan beriam.

Tabel 2. 2 Inventarisasi Nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman dan Lebar di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Kedalaman (m)	Lebar (m)
1	Sungai Jelai	200	8	150
2	Sungai Arut	250	4	100
3	Sungai Lamandau	300	6	150
4	Sungai Kumai	175	6-9	250
5	Sungai Seruyan	350	5	250
6	Sungai Mentaya	400	6	350
7	Sungai Katingan	650	3-6	250
8	Sungai Sebangau	200	5	100
9	Sungai Kahayan	600	7	450
10	Sungai Kapuas	600	6	450
11	Sungai Barito	900	6-14	350-500

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2021

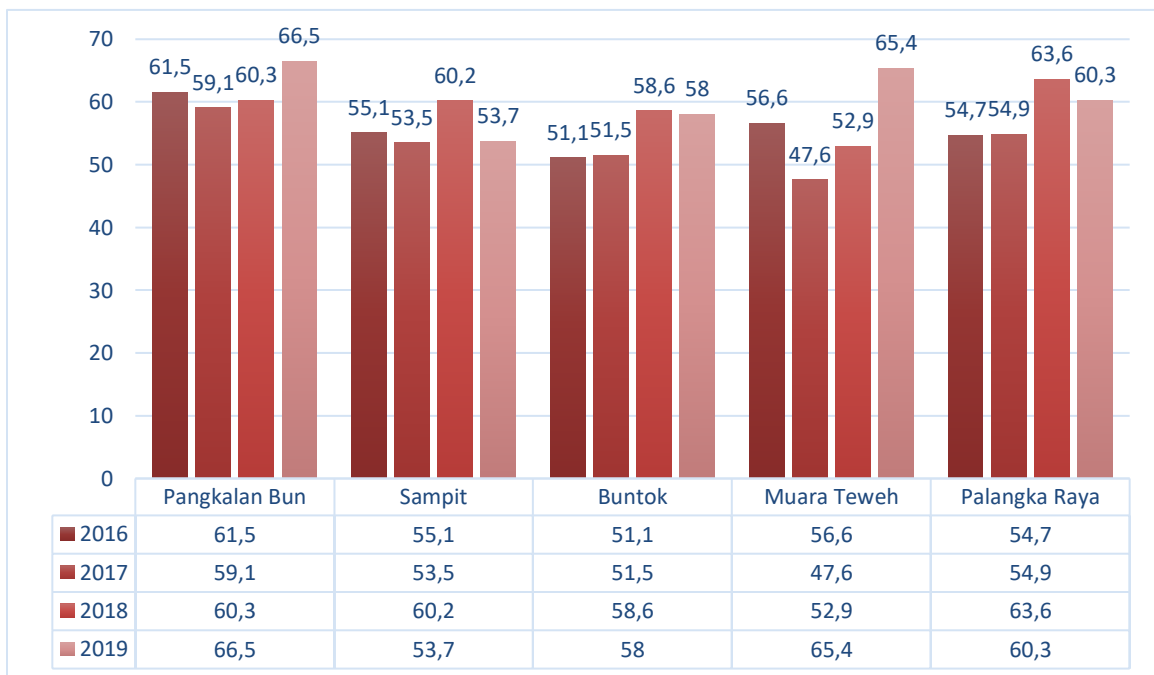
d. Klimatologi

Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam tipe A dengan iklim tropis yang lembab dan panas. Pengukuran iklim di Provinsi Kalimantan Tengah hanya berada pada titik-titik tertentu. Berdasarkan pengamatan klimatologi dan geofisika (BMKG), suhu udara maksimum dan rata-rata suhu udara tertinggi tahun 2020 mencapai 35,15 derajat celsius berada Muara Teweh dan Buntok dan mencapai 34.53 derajat celsius berada di Pangkalan Bun. Selain itu, persentase penyinaran matahari tertinggi berada di Pangkalan Bun sebesar 66,5% , namun curah hujan bulanan tertinggi berada di Muara Teweh dengan jumlah curah hujan sebesar 3035,1 mm³

**Tabel 2. 3 Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2020**

No	Indikator	Pangkalan Bun	Sampit	Buntok	Muara Teweh	Palangka Raya
1	Suhu Udara					
	- Maksimum	34,53	34,73	35,15	35,15	34,75
	- Minimum	22,39	21,81	21,20	21,36	22,40
2	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	83	84	84	84	81
3	Rata-rata Tekanan Udara (mb)	1010,7	1011,5	1013,2	1012,3	1013,6
4	Rata-rata Kecepatan Angin (knot)	2	2	2	1	4
5	Curah Hujan Bulanan (mm ³)	2670	2448,9	1525,5	3035,1	2326,4
6	Penyinaran Matahari (%)	66,5	53,7	58	65,4	60,3

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2021



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2020

Gambar 2. 1 Rata-Rata Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2016-2019 (Persen)

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan pembangunan wilayah dan pembangunan masyarakat. Untuk itu diperlukan mengelompokkan potensi pengembangan wilayah yang ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan terus dikembangkan berdasarkan pengelompokan pola ruang yang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (RTRWP) yakni pola penggunaan lahan dalam kawasan hutan dan pola penggunaan lahan diluar kawasan hutan yang dapat dijabarkan dibawah ini.

a. Pola Penggunaan Lahan dalam Kawasan Hutan

Berdasarkan analisis batas administrasi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah versi terakhir (Juli 2020?) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.9415/MENLHK-PKTL/KUH/PUA.2/II/2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2018, luasan kawasan hutan per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada 2.4.

Tabel 2. 4 Luas Daerah berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

No	Kabupaten/Kota	Kawasan Hutan		Non Kawasan Hutan		Jumlah	
		Hektar	Persen	Hektar	Persen	Hektar	Persen
1	Kotawaringin Barat	688.197	72,63	259.339	27,37	947.536	6,10
2	Kotawaringin Timur	1.016.194	65,37	538.376	34,63	1.554.570	10,01
3	Kapuas	1.291.776	75,67	415.392	24,33	1.707.167	11,00
4	Barito Selatan	475.160	73,30	173.079	26,70	648.239	4,18
5	Barito Utara	880.323	83,52	173.664	16,48	1.053.986	6,79
6	Katingan	1.788.784	87,71	250.601	12,29	2.039.386	13,13
7	Seruyan	1.178.884	77,50	342.190	22,50	1.521.074	9,80
8	Sukamara	235.729	70,59	98.221	29,41	333.950	2,15
9	Lamandau	592.997	73,49	213.963	26,51	806.959	5,20
10	Gunung Mas	741.463	79,36	192.869	20,64	934.332	6,02
11	Pulang Pisau	738.173	76,58	225.746	23,42	963.919	6,21
12	Murung Raya	2.297.309	95,32	112.913	4,68	2.410.222	15,52
13	Barito Timur	112.326	35,11	207.622	64,89	319.948	2,06
14	Palangka Raya	231.256	81,05	54.054	18,95	285.310	1,84
	Jumlah	12.268.570	79,02	3.258.028	20,98	15.526.599	100,00

Sumber: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.9415/MENLHK-PKTL/KUH/PUA.2/II/2019 dan Batas Daerah Versi Juli 2020 dengan analisis, 2021

Berdasarkan tabel 2.4 tersebut terlihat bahwa kabupaten/kota dengan luasan atau persentase luasan kawasan hutan terkecil adalah Kabupaten Barito

Timur dengan luas Areal Penggunaan Lain (APL) atau Non Kawasan Hutan hanya seluas sekitar 112,326 hektar atau hanya 35,11%. Sebaliknya dengan luasan APL terbanyak adalah Kabupaten Murung Raya seluas sekitar 2.297.309 hektar atau 95,32%nya

b. Pola Penggunaan Lahan diluar Kawasan Hutan

Tutupan lahan tahun 2020 terbanyak pada kawasan hutan berturut-turut adalah hutan lahan kering sekunder 4.329.336 hektar, semak belukar rawa 1.665.697 hektar, hutan rawa sekunder 1.629.505 hektar dan hutan lahan kering primer seluas sekitar 1.093.341 hektar. Sementara tutupan lahan tahun 2020 pada non kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) berturut-turut perkebunan 1.076.593 hektar, pertanian lahan kering camur semak sekitar 516.257 hektar, semak belukar rawa 439.068 hektar dan semak belukar seluas sekitar 318.741 hektar. Secara keseluruhan, 4 (empat) jenis tutupan lahan tahun 2020 terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah berturut-turut hutan lahan kering sekunder seluas sekitar 4.412.812 hektar (28,42%), semak belukar rawa seluas sekitar 2.104.765 hektar (13,56%), perkebunan 1.995.590 hektar (12,85%), dan hutan rawa sekunder seluas sekitar 1.706.911 hektar (10,99%).

Tabel 2. 5 Tutupan Lahan Tahun 2020 berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

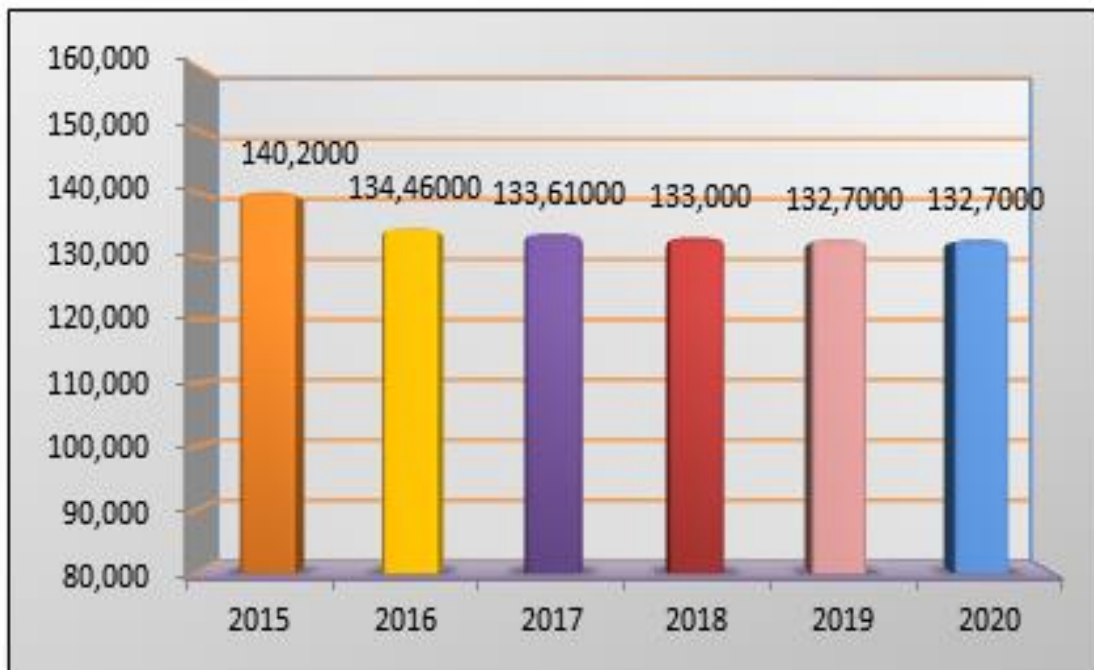
No.	Tutupan Lahan Tahun 2020	Kawasan Hutan	Non Kawasan Hutan	Jumlah (ha)
1	Hutan Lahan Kering Primer	1.093.341	344	1.093.684
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	4.329.336	83.476	4.412.812
3	Hutan Mangrove Primer	1.633	144	1.777
4	Hutan Mangrove Sekunder	16.118	5.030	21.148
5	Hutan Rawa Primer	32.361	12	32.373
6	Hutan Rawa Sekunder	1.629.505	77.406	1.706.911
7	Hutan Tanaman	151.578	19.928	171.505
8	Lahan terbuka	193.694	57.194	250.888
9	Pemukiman	7.652	67.526	75.178
10	Perkebunan	918.996	1.076.593	1.995.590
11	Pertambangan	92.803	36.922	129.726
12	Pertanian Lahan Kering	144.102	245.595	389.697
13	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	926.440	516.257	1.442.697
14	Rawa	169.018	29.930	198.948
15	Sawah	17.422	135.229	152.651
16	Semak Belukar	868.573	318.741	1.187.315
17	Semak Belukar Rawa	1.665.697	439.068	2.104.765
18	Tambak	6.187	6.975	13.162

No.	Tutupan Lahan Tahun 2020	Kawasan Hutan	Non Kawasan Hutan	Jumlah (ha)
19	Transmigrasi	1.287	15.103	16.390
20	Bandara/Pelabuhan		282	282
21	Tubuh Air	2.828	126.274	129.101
	Jumlah (hektar)	12.268.570	3.258.028	15.526.599

Sumber : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 9415/MENLHK-PKTL/PUA/KUH/PUA.2/II/2019/ dan Tutupan Lahan Tahun 2020, KLHK dengan analisis, 2021

2.1.3 Potensi Resiko Bencana

Secara geografis, wilayah Kalimantan Tengah terletak di daerah iklim tropis dan memiliki 2 (dua) musim yaitu musim panas dan musim hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam. dapat menimbulkan potensi ancaman bersifat hidro-meteorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan dan cuaca ekstrim. Kecenderungan saat ini, selain bencana alam, bencana akibat faktor non alam dan dampak perubahan iklim juga menunjukkan intensitas yang semakin meningkat.



Gambar 2. 2 Grafik Nilai Indeks Resiko Bencana Prov. di Kalteng Tahun 2015-2020

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tingkat indeks resiko bencana sedang dengan nilai 132,70 dan Jenis ancaman yang berpotensi menimbulkan bencana di Kalimantan Tengah yaitu : (1) kebakaran hutan dan lahan, (2) banjir, (3) tanah longsor, (4) cuaca ekstrim, (5) kekeringan, (6) gelombang ekstrim/abrasi dan (7)

Gempa Bumi. Berikut ini grafik indeks resiko bencana Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2015 sampai dengan 2020.

Tabel 2. 6 Potensi Bencana Provinsi Kalimantan Tengah

c	Kab.Kota	POTENSI BENCANA / INDEKS RESIKO BENCANA							
		Karhutla	Banjir	Tanah Longsor	Keringan	Cuaca Ektrim	Gel. Ektrim/ Abrasi	Gempa Bumi	Multi Ancaman
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Kobar	Red	Red	Yellow	Green	Red	Red	Yellow	Red
2.	Kotim	Red	Red	Yellow	Red	Red	Red	Yellow	Red
3.	Kapuas	Red	Red	Red	Red	Green	Red	Yellow	Yellow
4.	Barsel	Red	Red	Yellow	Green	Red	--	Yellow	Yellow
5.	Barut	Red	Red	Yellow	Red	Red	--	Yellow	Yellow
6.	Sukamara	Red	Red	Yellow	Green	Red	Red	Yellow	Red
7.	Lamandau	Red	Red	Yellow	Green	Red	--	Yellow	Red
8.	Seruyan	Red	Red	Yellow	Green	Red	Red	Yellow	Yellow
9.	Katingan	Red	Red	Yellow	Red	Red	Red	Yellow	Red
10.	Pulpis	Red	Red	Yellow	Red	Red	Red	Yellow	Red
11.	Gunung Mas	Red	Green	Red	Red	Red	--	Yellow	Yellow
12.	Bartim	Red	Red	Yellow	Green	Red	--	Yellow	Yellow
13.	Mura	Red	Red	Yellow	Red	Red	--	Yellow	Yellow
14.	P.Raya	Red	Red	Yellow	Red	Green	--	Yellow	Yellow

Keterangan :

Sumber : BNPB, IRBI 2020

■	Rendah
■	Sedang
■	Tinggi

Sumber : BNPB, IRBI 2020

Tabel 2.6 menyajikan klasifikasi tingkat resiko bencana dan potensi ancaman bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang dikutip dari Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020, dengan mengacu pada jenis dan potensi ancaman bencana tersebut, secara umum karakteristik potensi bencana di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kebakaran hutan dan lahan

Fenomena kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir setiap tahun pada musim kemarau, yaitu memasuki bulan Juli sampai dengan bulan Oktober dan rentang antara bulan tersebut terjadi peningkatan jumlah hotspots di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini berkorelasi juga dengan pantauan cuaca dari BMKG yang menyatakan bahwa puncak kemarau untuk sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah terjadi antara bulan Agustus – Oktober. Faktor penyebab terjadinya kebakaran lahan dan hutan antara lain adalah :

- Iklim, yaitu kemarau panjang yang sering terjadi bersamaan dengan pengaruh *El Nino*, Dipole Mode, Sirkulasi Monsun Asia-Australia,

Daerah pertemuan angin antar tropis, dan suhu permukaan laut, yang merupakan faktor pendorong lain terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

- Kondisi lahan yang sebageian besarnya adalah gambut merupakan faktor pendorong lain yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan menjadi sulit untuk dipadamkan. Selain itu lemahnya penegakan hukum, lambatnya penindakan dini tidak dipungkiri menjadi salah satu faktor bahwa upaya pengendalian kebakaran hutan belum optimal.
- Pembersihan lahan. Terdapat dua tujuan pembersihan lahan di kalangan masyarakat, yaitu yang bertujuan untuk pembersihan lahan pertanian dan yang hanya untuk status kepemilikan.

Dampak yang ditimbulkan kebakaran ini adalah kabut asap yang ini cukup parah, karena selain mengganggu transportasi juga mengancam kesehatan masyarakat serta terganggunya pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk musnahnya *biodiversity* (keanekaragaman hayati). Potensi ancaman bencana Karhutla terdapat pada semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dan mempunyai tingkat resiko tinggi.

Potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah

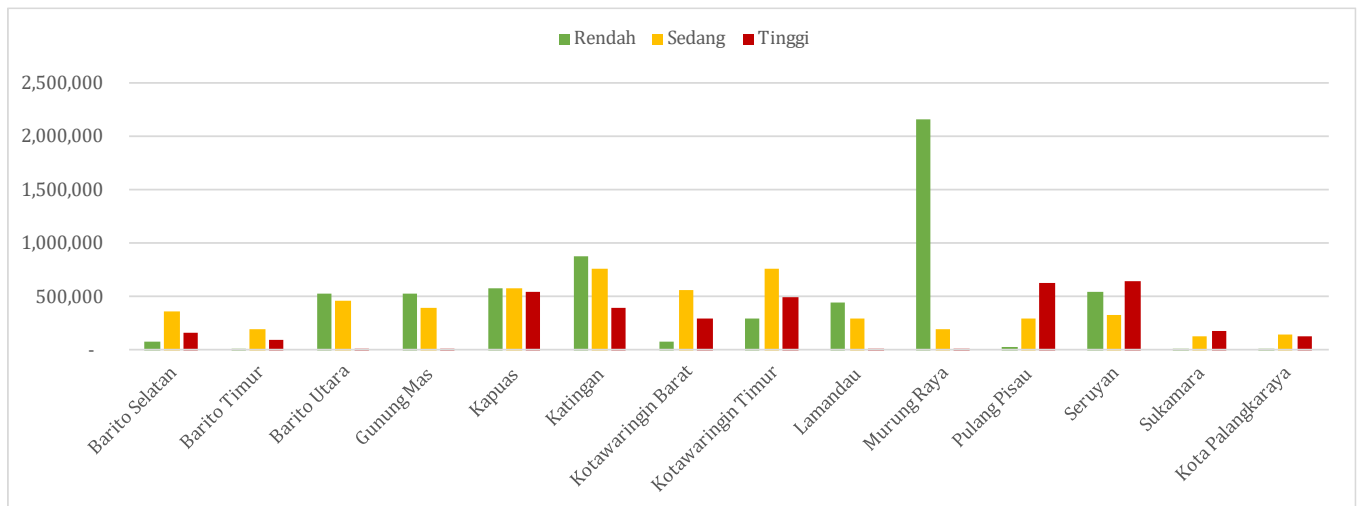
No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	Barito Selatan	83,882	371,604	171,466	626,952	Tinggi
2	Barito Timur	20,503	202,240	97,686	320,429	Tinggi
3	Barito Utara	527,583	463,393	7,542	998,518	Sedang
4	Gunung Mas	529,310	398,089	6,117	933,516	Sedang
5	Kapuas	580,477	582,376	542,360	1,705,213	Tinggi
6	Katingan	881,758	764,242	394,159	2,040,159	Tinggi
7	Kotawaringin Barat	88,314	565,345	295,940	949,599	Tinggi
8	Kotawaringin Timur	291,365	768,086	496,751	1,556,202	Tinggi
9	Lamandau	455,680	303,889	8,538	768,107	Tinggi
10	Murung Raya	2,153,658	201,380	2,592	2,357,630	Sedang
11	Pulang Pisau	37,558	302,809	624,104	964,471	Tinggi
12	Seruyan	547,305	326,877	649,515	1,523,697	Tinggi
13	Sukamara	8,292	138,273	180,940	327,505	Tinggi
B	Kota					
1	Kota Palangkaraya	16,930	143,109	125,225	285,264	Tinggi

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
	Provinsi Kalimantan Tengah	6,222,615	5,531,712	3,602,935	15,357,262	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan.

Potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 15.357.262,00 Ha dan berada pada kelas tinggi, yang meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 6.222.615,00 Ha, kelas sedang 5.531.712,00 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 3.602.935,00 Ha.



Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Gambar 2.3 Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah

Pada grafik di atas, terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan masing-masing kabupaten/kota. Luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah adalah 2.153.658,00 Ha, yaitu Kabupaten Murung Raya, sedangkan pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas 768.086,00 Ha. Kabupaten Seruyan adalah wilayah

yang memiliki potensi bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan yang tertinggi untuk kelas tinggi, yaitu 649.515,00 Ha.

2. Banjir

Potensi ancaman bencana banjir di Kalimantan Tengah ada 2 (dua) yaitu ancaman Banjir Bandang atau kiriman dan Banjir Rob atau air pasang. Potensi ancaman dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, banjir bandang merupakan fenomena yang terjadi setiap tahun, di disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi di atas normal di hulu sungai sehingga debit air sungai meluap dengan durasi relative lama. Terjadi pada musim hujan yaitu memasuki bulan Nopember sampai dengan bulan Februari, disisi lain Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh Daerah Aliran Sungai (DAS), baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, tercatat ada 11 (sebelas) sungai besar dan 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil yang mengalir membelah bentangan alam Kalimantan Tengah. Secara umum pola sungai di Kalimantan Tengah adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai, maka potensi ancaman banjir mempunyai tingkat resikonya yang tinggi, sehingga rentan menggenangi wilayah yang ada di sekitar daerah aliran sungai, khususnya di bagian hulu sungai dan kemudian berangsur-angsur luapan air mengalir, dan bergeser ke DAS bagian tengah dan terpecah atau berakhir pada daerah aliran sungai dibagian hilir. Dampaknya yaitu tergenangnya pemukiman penduduk yang berada di bantaran DAS dan melumpukan aktivitas masyarakat secara total. Potensi ancaman ini meliputi Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas bagian utara dan tengah, Kabupaten Pulang Pisau bagian Utara, Kabupaten Gunung Mas bagian utara dan tengah, Kabupaten Katingan bagian utara dan tengah, Kabupaten Kotim bagian utara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan bagian utara dan tengah.

Kedua, banjir Rob atau air pasang disebabkan oleh naiknya permukaan air disungai atau pesisir pantai sebagai akibat pasang laut atau meningginya gelombang laut oleh badai, potensi ancaman ini meliputi kawasan Wilayah bagian selatan Kalimantan Tengah yang langsung berhadapan dengan laut Jawa yang mempunyai wilayah pesisir pantai seperti Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Sukamara, Seruyan, Pulang Pisau, dan Kapuas. \

Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dari hasil Kajian Resiko Bencana di Kalimantan Tengah sebagai berikut:

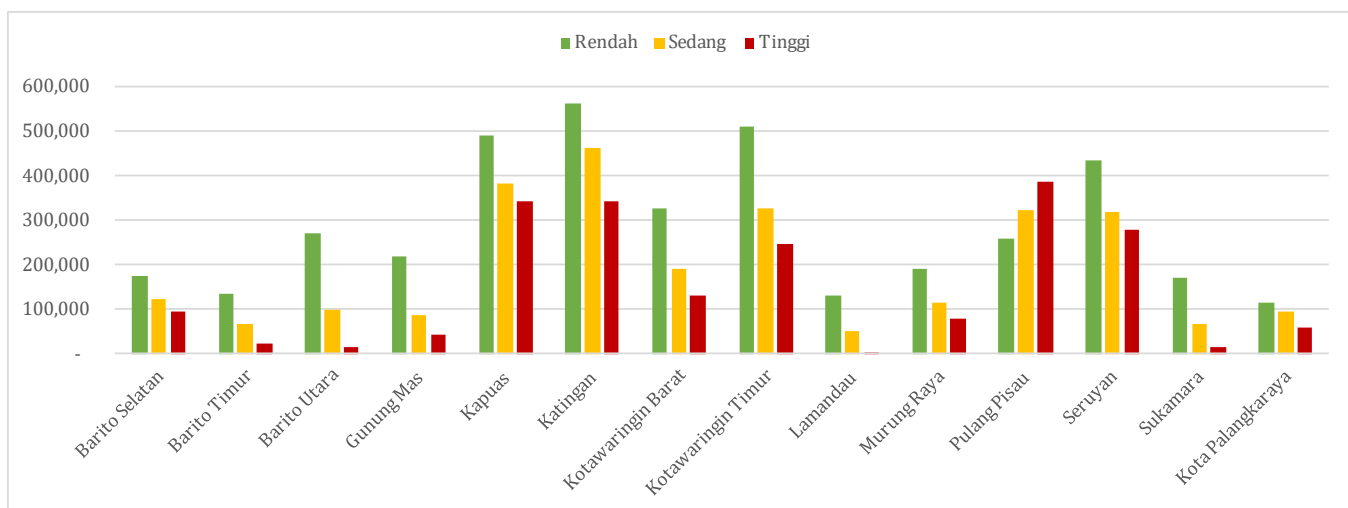
Tabel 2.8 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)			Total	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
A	Kabupaten					
1	Barito Selatan	176,409	125,258	97,596	399,263	Tinggi
2	Barito Timur	137,148	69,659	25,090	231,897	Sedang
3	Barito Utara	272,051	97,820	14,643	384,514	Tinggi
4	Gunung Mas	217,431	89,269	43,431	350,131	Tinggi
5	Kapuas	489,062	381,272	343,485	1,213,819	Tinggi
6	Katingan	563,232	463,370	341,497	1,368,099	Tinggi
7	Kotawaringin Barat	325,515	190,583	132,387	648,485	Tinggi
8	Kotawaringin Timur	510,700	327,857	245,496	1,084,053	Tinggi
9	Lamandau	130,138	52,148	4,980	187,266	Tinggi
10	Murung Raya	191,793	116,682	79,140	387,615	Tinggi
11	Pulang Pisau	258,604	323,655	388,896	971,155	Tinggi
12	Seruyan	436,719	318,136	279,783	1,034,638	Tinggi
13	Sukamara	170,326	68,495	15,228	254,049	Tinggi
B	Kota					
1	Kota Palangkaraya	115,606	96,890	60,696	273,192	Tinggi
	Provinsi Kalimantan Tengah	3,994,734	2,721,094	2,072,348	8,788,176	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya banjir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Potensi bahaya banjir pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang terdampak bahaya banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum seluruh Provinsi Kalimantan Tengah yang terdampak banjir.

Total luas bahaya banjir di Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan adalah 8.788.176,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 3.994.734,00 Ha, kelas sedang seluas 2.721.094,00 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 2.072.348,00 Ha.



Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Gambar 2.4 Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah

Dari grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya banjir masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kabupaten Katingan dengan luas 563.232,00 Ha. Pada kelas sedang, kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir adalah Kabupaten Katingan dengan luas 463.370,00 Ha. Sedangkan untuk kelas tinggi, daerah yang memiliki luas bahaya banjir tertinggi adalah Kabupaten Pulang Pisau dengan luas 388.896,00 Ha.

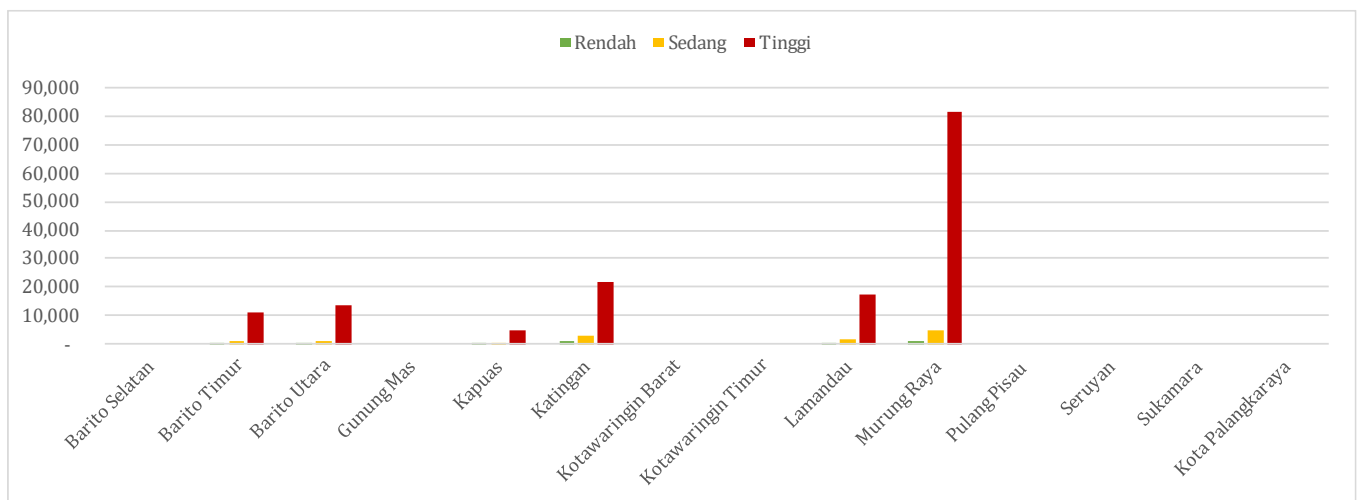
Tabel 2.9 Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	Barito Selatan	-	-	-	-	-
2	Barito Timur	316	1,291	11,277	12,884	Tinggi
3	Barito Utara	264	1,060	13,385	14,709	Tinggi
4	Gunung Mas	-	-	-	-	-
5	Kapuas	139	608	4,640	5,387	Tinggi
6	Katingan	747	2,812	21,471	25,030	Tinggi
7	Kotawaringin Barat	-	-	-	-	-
8	Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-
9	Lamandau	387	1,700	17,318	19,405	Tinggi
10	Murung Raya	851	5,109	81,539	87,499	Tinggi
11	Pulang Pisau	-	-	-	-	-
12	Seruyan	-	-	-	-	-
13	Sukamara	-	-	-	-	-
B	Kota					
1	Kota Palangkaraya	-	-	-	-	-
	Provinsi Kalimantan Tengah	2,704	12,580	149,630	164,914	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Potensi luas bahaya banjir bandang dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir bandang berdasarkan kajian bahaya banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdampak bahaya banjir bandang.

Potensi luas bahaya banjir bandang adalah 164.914,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 2.704,00 Ha, kelas sedang seluas 12.580,00 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi adalah dengan luas 149.630,00 Ha.



Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Gambar 2.5 Grafik Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kalimantan Tengah

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya banjir bandang masing-masing di kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas rendah adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas 851,00 Ha, dan pada kelas sedang dengan luas tertinggi adalah Kabupaten Murung Raya seluas 5.109,00 Ha. Kabupaten Murung Raya merupakan wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas tinggi, yaitu 81.539,00 Ha.

3. Tanah longsor.

Potensi ancaman tanah longsor umumnya terjadi pada wilayah yang mempunyai morfologi relief kasar dengan lereng-lereng yang terjal dan topografi berbukit, pegunungan dan wilayah bagian hulu DAS dengan tingkat kemiringan curam antara 8 – 25 %. Umumnya, terjadi pada musim hujan dengan intensitas yang tinggi dengan durasi yang cukup lama, potensi ancaman yaitu bagian utara Kalimantan Tengah yang meliputi Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas bagian utara, Kabupaten Gunung Mas bagian utara, Kabupaten Katingan bagian utara, Kabupaten Kotim bagian utara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan bagian utara dan Kabupaten Sukamara bagian utara.

Potensi luas dan kelas bahaya tanah longsor di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Tengah

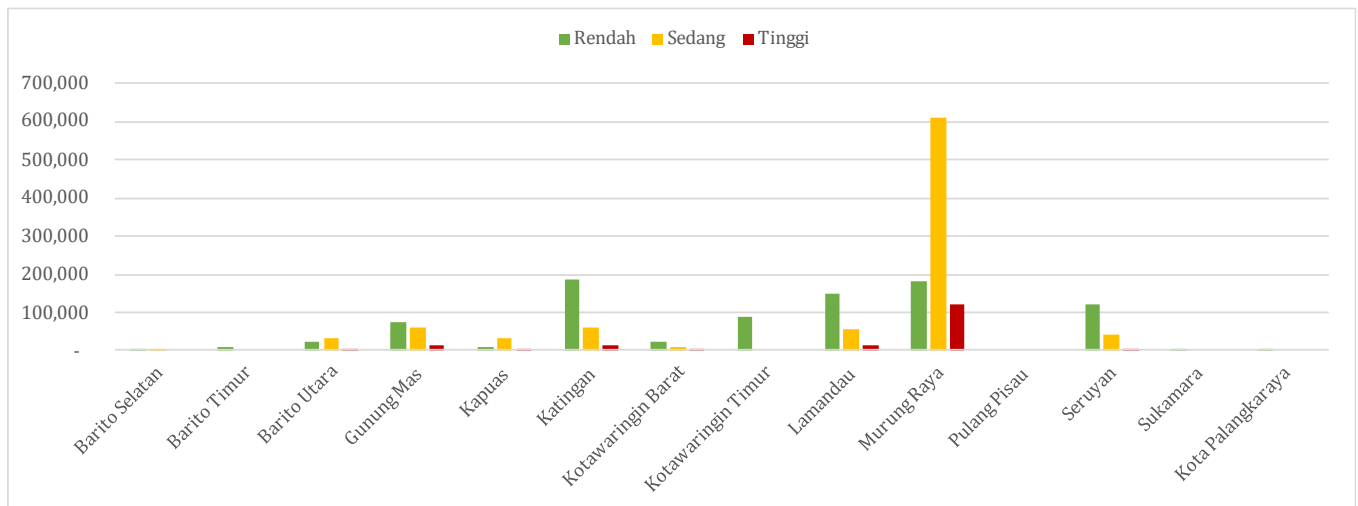
No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	Barito Selatan	4,577	6,846	-	11,423	Sedang
2	Barito Timur	8,962	-	-	8,962	Rendah
3	Barito Utara	24,530	33,131	2,770	60,431	Sedang
4	Gunung Mas	75,135	62,052	13,633	150,820	Sedang
5	Kapuas	10,039	32,730	3,840	46,609	Sedang
6	Katingan	186,664	58,508	16,205	261,377	Sedang
7	Kotawaringin Barat	24,497	7,076	1,051	32,624	Rendah
8	Kotawaringin Timur	87,717	-	-	87,717	Rendah
9	Lamandau	146,791	54,530	14,189	215,510	Sedang
10	Murung Raya	182,800	608,253	121,474	912,527	Tinggi
11	Pulang Pisau	-	-	-	-	-
12	Seruyan	119,666	39,987	5,657	165,310	Sedang
13	Sukamara	4,683	-	-	4,683	Rendah
B	Kota					
1	Kota Palangkaraya	145	-	-	145	Rendah
	Provinsi Kalimantan Tengah	876,206	903,113	178,819	1,958,138	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah

longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor.

Potensi luas bahaya tanah longsor adalah 1.958.138,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luasan tersebut dikelompokkan ke dalam potaesi luas bahaya dengan kelas rendah 876.206,00 Ha, kelas sedang seluas 903.113,00 Ha, dan kelas tinggi seluas 178.819,00 Ha.



Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Gambar 2.6 Grafik Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Tengah

Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya tanah longsor masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas rendah adalah Kabupaten Katingan dengan luas 186.664,00 Ha, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas sedang adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas 608.253,00 Ha, dan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas tinggi adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas 121.474,00 Ha.

4. Kekeringan.

Terjadi pada musim kemarau dimana curah hujan pada tingkatan dibawah normal, potensi ancaman kekeringan terutama pada wilayah dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan atau pada daerah non pasang surut yang meliputi Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kapuas bagian utara, Kabupaten Gunung Mas bagian utara, Kabupaten Katingan bagian utara, Kabupaten Kotim bagian utara, Kabupaten Lamandau,

Kabupaten Seruyan bagian utara. Sedangkan wilayah selatan Kalimantan Tengah merupakan daerah pasang surut dimana wilayahnya relatif basah oleh pengaruh tersuplynya air dengan cukup sehingga potensi ancamannya relatif rendah seperti Kabupaten Kapuas bagian selatan dan tengah, Pulang Pisau bagian selatan dan tengah, Katingan bagian selatan dan tengah, serta bagian selatan Kabupaten Seruyan, Kotim, sukamara, Kobar.

Potensi luas dan kelas bahaya kekeringan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kalimantan Tengah

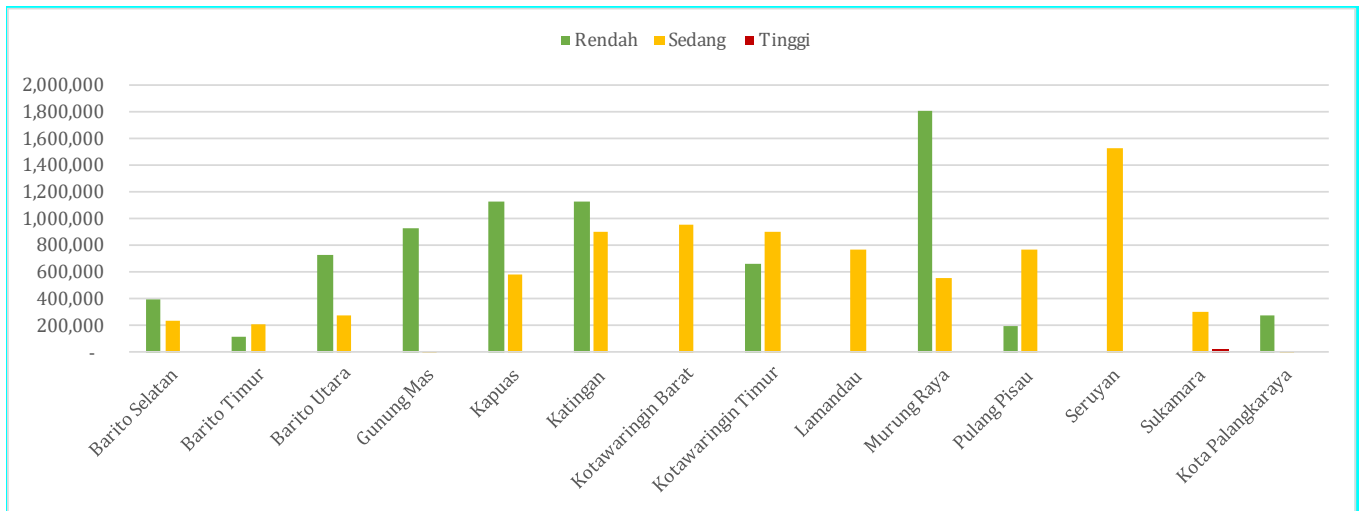
No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)			Total	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
A	Kabupaten					
1	Barito Selatan	391,704	235,248	-	626,952	Sedang
2	Barito Timur	115,865	204,564	-	320,429	Sedang
3	Barito Utara	727,201	271,317	-	998,518	Sedang
4	Gunung Mas	930,547	2,969	-	933,516	Rendah
5	Kapuas	1,124,347	581,073	-	1,705,420	Sedang
6	Katingan	1,134,158	906,129	-	2,040,287	Sedang
7	Kotawaringin Barat	-	949,983	-	949,983	Sedang
8	Kotawaringin Timur	658,408	897,971	-	1,556,379	Sedang
9	Lamandau	-	768,107	-	768,107	Sedang
10	Murung Raya	1,800,514	557,116	-	2,357,630	Sedang
11	Pulang Pisau	190,776	773,930	-	964,706	Sedang
12	Seruyan	-	1,523,849	-	1,523,849	Sedang
13	Sukamara	-	306,207	21,337	327,544	Tinggi
B	Kota					
1	Kota Palangkaraya	282,272	2,992	-	285,264	Rendah
	Provinsi Kalimantan Tengah	7,355,792	7,981,455	21,337	15,358,584	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya terpapar kekeringan tiap kabupaten. Potensi bahaya kekeringan pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten. Kelas bahaya kekeringan Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kalimantan Tengah yang terdampak kekeringan.

Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan adalah 15.358.584,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Secara terinci, luas bahaya dengan kelas

rendah 7.355.792,00 Ha kelas sedang seluas 7.981.455,00 Ha dan kelas tinggi seluas 21.337,00 Ha.



Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Gambar 2.7 Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kalimantan Tengah

Sebaran luas bahaya kekeringan masing-masing kabupaten/kota yang dipresentasikan pada grafik di atas, memperlihatkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas rendah adalah Kabupaten Murung Raya, yaitu 1.800.514,00 Ha, sedangkan Kabupaten Seruyan adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang dengan luas 1.523.849,00 Ha, dan Kabupaten Sukamara merupakan wilayah yang memiliki luas tertinggi potensi bahaya kekeringan dengan kelas tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 21.337,00 Ha.

5. Cuaca Ektrim

Cuaca Ektrim seperti angin puting beliung dan angin topan sering terjadi di Kalimantan Tengah, terutama terkait dengan meningkatnya dampak perubahan iklim global. Ancaman yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung yang umumnya terjadi pada musim pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau maupun dari musim kemarau ke musim hujan. Wilayah Kalimantan Tengah yang mempunyai tingkat resiko tinggi adalah bagian selatan dan tengah yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Murung Raya, Gunung Mas, Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Pulang Pisau, Katingan, Kapuas dan Kota Palangka Raya.

Potensi luas dan kelas bahaya cuaca ekstrim di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang diperoleh dari hasil kajian, diuraikan sebagai berikut :

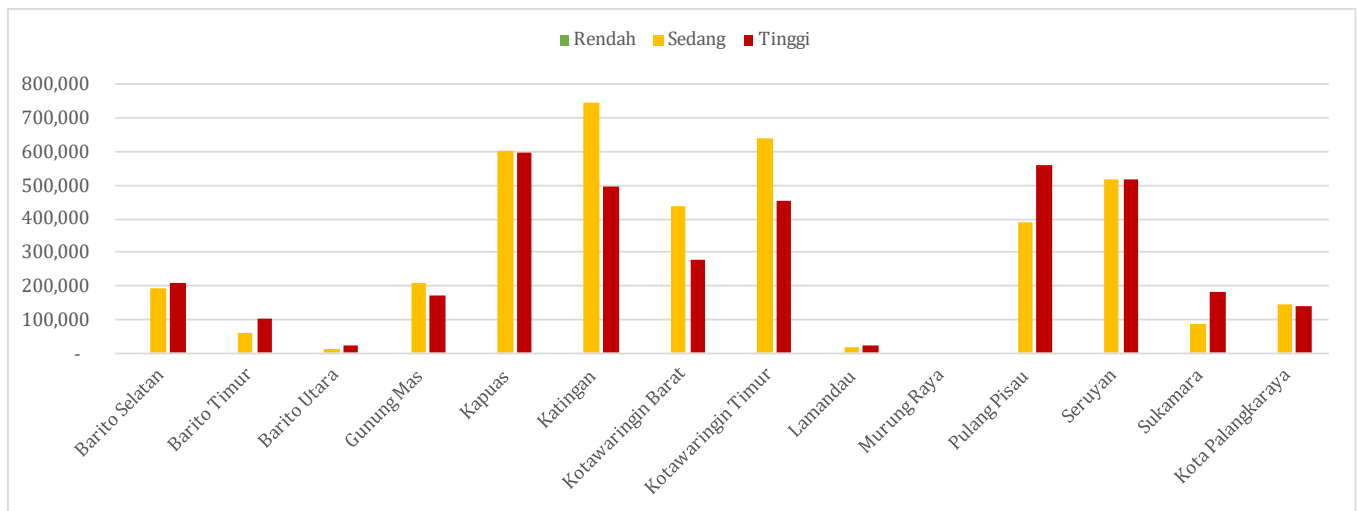
Tabel 2.12 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	Barito Selatan	-	194,628	209,945	404,573	Tinggi
2	Barito Timur	-	57,466	101,731	159,197	Tinggi
3	Barito Utara	-	11,070	21,318	32,388	Tinggi
4	Gunung Mas	-	207,559	170,762	378,321	Tinggi
5	Kapuas	-	601,034	597,628	1,198,662	Tinggi
6	Katingan	-	747,148	496,764	1,243,912	Tinggi
7	Kotawaringin Barat	-	439,157	278,271	717,428	Tinggi
8	Kotawaringin Timur	-	640,154	452,844	1,092,998	Tinggi
9	Lamandau	-	19,384	20,295	39,679	Tinggi
10	Murung Raya	-	-	-	-	-
11	Pulang Pisau	-	392,006	561,187	953,193	Tinggi
12	Seruyan	-	515,343	516,776	1,032,119	Tinggi
13	Sukamara	-	85,097	179,596	264,693	Tinggi
B	Kota					
1	Kota Palangkaraya	-	143,072	140,244	283,316	Tinggi
	Provinsi Kalimantan Tengah	-	4,053,118	3,747,361	7,800,479	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Potensi bahaya cuaca ekstrim pada tabel tersebut di atas memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya per kabupaten/ kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdampak cuaca ekstrim.

Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan adalah 7.800.479,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah adalah -Ha, pada kelas sedang seluas 4.053.118,00 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 3.747.361,00 Ha.



Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Gambar 12.8 Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kalimantan Tengah

Pada grafik di atas, dapat dilihat sebaran luas bahaya cuaca ekstrim masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah adalah Kabupaten Barito Selatan dengan luas -Ha. Luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas sedang, yaitu 747.148,00 Ha, terdapat di Kabupaten Katingan, dan wilayah kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi adalah Kabupaten Kapuas, yaitu 597.628,00 Ha

6. Gelombang Ektrim / Abrasi

Gelombang ekstrim pada umumnya ditimbulkan oleh siklon tropis ditandai dengan kecepatan angin yang tinggi diikuti dengan peningkatan tinggi gelombang laut. Disamping itu pengaruh monsun (musim barat dan timur) terhadap kondisi gelombang dengan jelas terlihat di perairan Kalimantan Tengah bagian selatan yang menyebabkan abrasi pantai. Pada musim timur dengan tinggi gelombang perairan pada kisaran $\pm 0,75 - 1$ meter, yang terjadi dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus dimana kondisi angin bertiup dari Timur ke Barat. Kemudian pada musim Barat tinggi gelombang cukup signifikan di perairan Kalimantan Tengah dengan ketinggian berkisar diantara $\pm 0,75 - 2$ m, dengan arah penjalaran dari barat ke timur yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Februari yaitu angin bertiup dari Barat ke Timur.

Abrasi dan akresi sebenarnya merupakan fenomena yang wajar terjadi pada setiap garis pantai, namun ketika terjadi pada kondisi yang intens maka dapat menjadi masalah yaitu berubahnya garis pantai dimana kondisi garis pantai yang maju dan/atau mundur dapat

memberikan dampak negatif, seperti masalah kepemilikan hak tanah akibat akresi, berkurangnya luas lahan tambak, kerusakan bangunan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir.

Wilayah bagian selatan Kalimantan Tengah dengan panjang garis pantai + 750 km yang langsung berhadapan dengan laut Jawa yang mempunyai wilayah pesisir pantai sangat rentan terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, seperti Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Sukamara, Seruyan, Pulang Pisau, dan Kapuas.

Potensi luas dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kalimantan Tengah

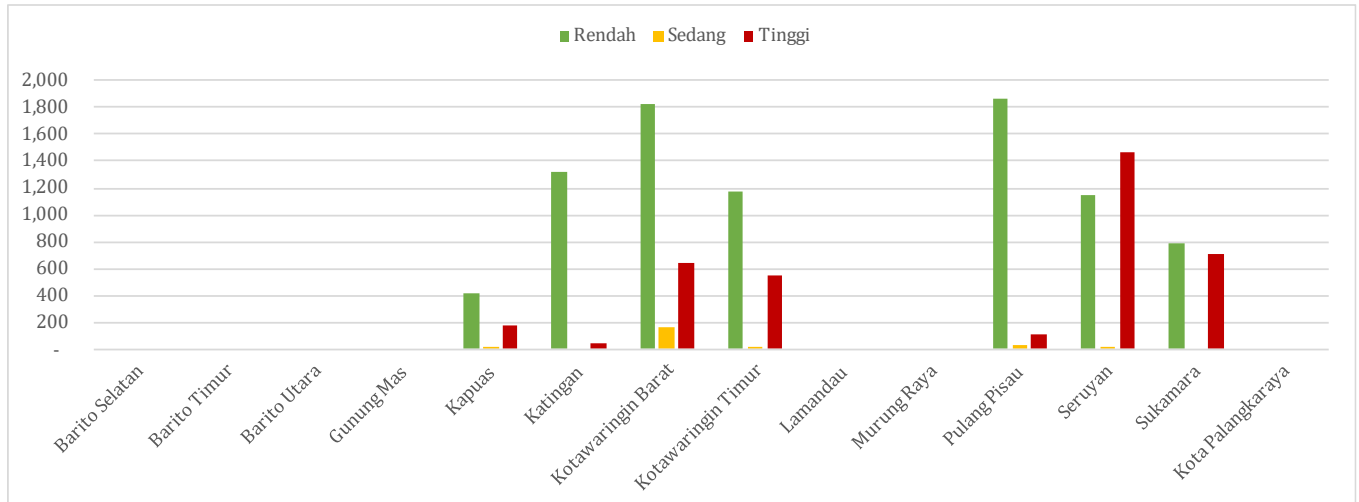
No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)			Total	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
A	Kabupaten					
1	Barito Selatan	-	-	-	-	-
2	Barito Timur	-	-	-	-	-
3	Barito Utara	-	-	-	-	-
4	Gunung Mas	-	-	-	-	-
5	Kapuas	415	1	179	595	Tinggi
6	Katingan	1,321	-	39	1,360	Tinggi
7	Kotawaringin Barat	1,821	161	640	2,622	Tinggi
8	Kotawaringin Timur	1,168	17	543	1,728	Tinggi
9	Lamandau	-	-	-	-	-
10	Murung Raya	-	-	-	-	-
11	Pulang Pisau	1,867	25	108	2,000	Rendah
12	Seruyan	1,151	1	1,464	2,616	Tinggi
13	Sukamara	786	-	709	1,495	Tinggi
B	Kota					
1	Kota Palangkaraya	-	-	-	-	-
	Provinsi Kalimantan Tengah	8,529	205	3,682	12,416	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah yang terdampak

bencana gelombang ekstrim dan abrasi.

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 12.416,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Potensi luas bahay tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 8.529,00 Ha, pada kelas sedang seluas 205,00 Ha, dan kelas tinggi seluas 3.682,00 Ha.



Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Gambar 2.9 Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kalimantan Tengah

Grafik di atas mendeskripsikan sebaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi masing-masing kabupaten/kota, di mana Kabupaten Pulang Pisau memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah, yaitu seluas 1.867,00 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas sedang adalah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas 161,00 Ha, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi adalah Kabupaten Seruyan, yaitu 1.464,00 Ha.

7. Gempa Bumi.

Letak wilayah Kalimantan Tengah tidak berhadapan langsung dengan Samudra Hindia yang merupakan zona pertemuan lempeng tektonik IndoAustralia dan Eurasia yang menjadi penyebab terjadinya gempa bumi. Sehingga potensi ancaman sangat kecil dan kejadian gempa bumi sangat jarang walaupun terjadi getarannya terasa sangat kecil, akan tetapi di dalam Buku IRBI tahun 2020 potensi ancaman gempa bumi dimasukkan pada wilayah provinsi di kepulauan Kalimantan. Berdasarkan kajian resiko semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah

tingkat resikonya sedang.

Potensi luas dan kelas bahaya gempa bumi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

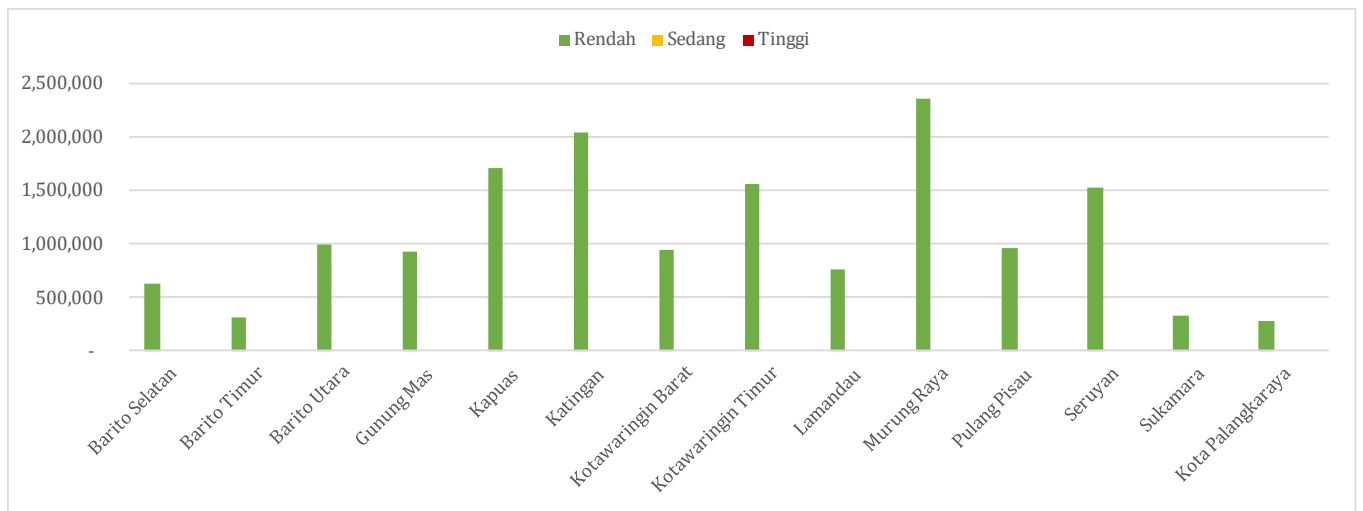
Tabel 2.14 Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)			Total	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
A	Kabupaten					
1	Barito Selatan	626,952	-	-	626,952	Rendah
2	Barito Timur	320,429	-	-	320,429	Rendah
3	Barito Utara	998,518	-	-	998,518	Rendah
4	Gunung Mas	933,516	-	-	933,516	Rendah
5	Kapuas	1,705,438	-	-	1,705,438	Rendah
6	Katingan	2,040,357	-	-	2,040,357	Rendah
7	Kotawaringin Barat	950,075	-	-	950,075	Rendah
8	Kotawaringin Timur	1,556,548	-	-	1,556,548	Rendah
9	Lamandau	768,107	-	-	768,107	Rendah
10	Murung Raya	2,357,630	-	-	2,357,630	Rendah
11	Pulang Pisau	964,770	-	-	964,770	Rendah
12	Seruyan	1,524,016	-	-	1,524,016	Rendah
13	Sukamara	327,624	-	-	327,624	Rendah
B	Kota					
1	Kota Palangkaraya	285,264	-	-	285,264	Rendah
	Provinsi Kalimantan Tengah	15,359,244	-	-	15,359,244	Rendah

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya gempa bumi per kabupaten/kota terpapar bencana gempabumi. Potensi bahaya gempa bumi tersebut merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya per kabupaten. Sedangkan kelas bahaya gempa bumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdampak bahaya gempa bumi.

Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan adalah 15.359.244,00 Ha dan berada pada kelas rendah. Secara lebih rinci, luas bahaya dengan kelas rendah adalah 15.359.244,00 Ha, kelas sedang 0,00 Ha, dan kelas tinggi seluas - Ha.



Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 (KRB Kalteng 2020-2024)

Gambar 2.10 Grafik Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kalimantan Tengah

Sebaran potensi luas bahaya gempa bumi masing-masing kabupaten/kota dipersentasikan pada grafik di atas. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas rendah adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas 2.357.630,00 Ha, pada kelas sedang adalah Kabupaten Barito Selatan dengan luas 0,00 Ha, dan yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas tinggi adalah Kabupaten Seruyan dengan luas - Ha.

2.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.4.1 Profil Daya Dukung Lingkungan Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia

Penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mengetahui kemampuan ekosistem dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu fungsi ekosistem dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia disebut sebagai Jasa Ekosistem Penyedia. Jasa yang dihasilkan bersifat alamiah yang disediakan langsung oleh kondisi bentang alam dan kondisi tutupan lahan. Namun, pemanfaatan sumber daya secara berlebihan tanpa memperhatikan batas ketersediaan dapat mempengaruhi keberlanjutan jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, informasi terkait ketersediaan jasa ekosistem pada suatu area menjadi penting dalam rangka pengelolaan area tersebut secara berkelanjutan.

Kelompok jasa ekosistem penyediaan merupakan jasa ekosistem yang mencerminkan kemampuan ekosistem untuk memberikan jasa penyediaan/produksi berupa barang dan jasa. Kuantitas layanan ekosistem seperti penyediaan makanan, dan air yang digunakan oleh manusia meningkat pesat seringkali lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk, bahkan dalam sejumlah kasus kelompok jasa ekosistem penyediaan digunakan pada tingkat yang tidak berkelanjutan. Dalam kajian ini, kelompok jasa ekosistem dijelaskan

dengan indeks jasa ekosistem terhadap jasa ekosistem penyediaan pangan, air bersih, serat, dan sumberdaya genetik.

a. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

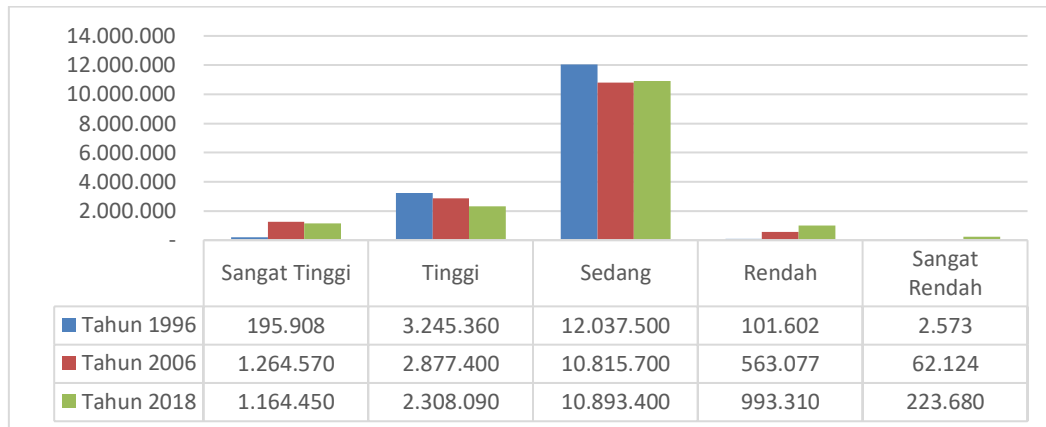
Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis – jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, serta hasil laut.

Untuk memenuhi kebutuhan pangannya, penduduk Kalimantan merubah beberapa ekosistem alami menjadi lahan-lahan persawahan. Persawahan dalam skala yang luas terdapat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sawah-sawah tersebut umumnya berasal dari lahan-lahan yang sebelumnya adalah ekosistem rawa air tawar, rawa pasang surut dan rawa gambut. Untuk tujuan komersial, di Kalimantan juga dibangun perkebunan kelapa sawit yang luas. Kalimantan Tengah adalah provinsi dengan luasan perkebunan kelapa sawit terbesar di Kalimantan. Kebun- kebun kelapa sawit itu berasal dari berbagai macam tipe ekosistem alami: ekosistem hutan hujan dataran rendah, hutan gambut, hutan kerangas, hutan rawa air tawar dan areal-areal terdegradasi dari ekosistem-ekosistem tersebut. Salah satu bentuk ekosistem buatan berskala besar lainnya di Kalimantan adalah hutan tanaman. Hutan tanaman adalah hasil perubahan ekosistem hutan alami Kalimantan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi menjadi ekosistem hutan monokultur dengan keanekaragaman hayati rendah (P3E Kalimantan, 2016).

Berdasarkan hasil pengkelasan nilai indeks jasa ekosistem penyediaan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa pada periode tahun 1996, 2006 dan 2018, terjadi penurunan luas area dengan kelas jasa ekosistem penyedia pangan tinggi dan sedang (Gambar 4.1). Penurunan luas area yang memiliki jasa ekosistem penyediaan pangan tinggi dan sedang cenderung terjadi pada periode tahun 1996–2006. Hal ini menunjukkan bahwa luas lahan yang kurang mampu menyediakan pangan bagi masyarakat semakin meningkat luasannya, atau dengan kata lain, ketersediaan pangan dari alam semakin berkurang.

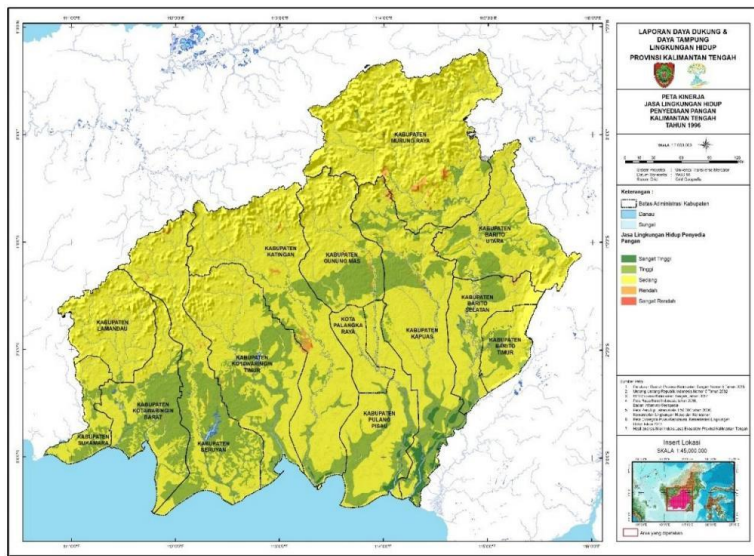
Menurunnya kemampuan jasa ekosistem dalam penyediaan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terjadi karena terjadi penurunan luas hutan serta meningkatnya luas lahan terbuka. Dalam penentuan jasa ekosistem penyediaan pangan, tutupan lahan memiliki bobot yang cukup besar, sehingga

perubahan tutupan lahan akan berpengaruh terhadap jasa ekosistem penyediaan pangan. Meskipun penurunan luas area yang terjadi tidak signifikan, namun penting halnya bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mulai memperhatikan secara lebih serius terkait kondisi ketahanan pangan di wilayahnya. Selain dukungan jasa ekosistem dan lahan, ketahanan pangan dapat dicapai melalui penyediaan pangan dari wilayah lain yang masih memiliki ketersediaan pangan tinggi.



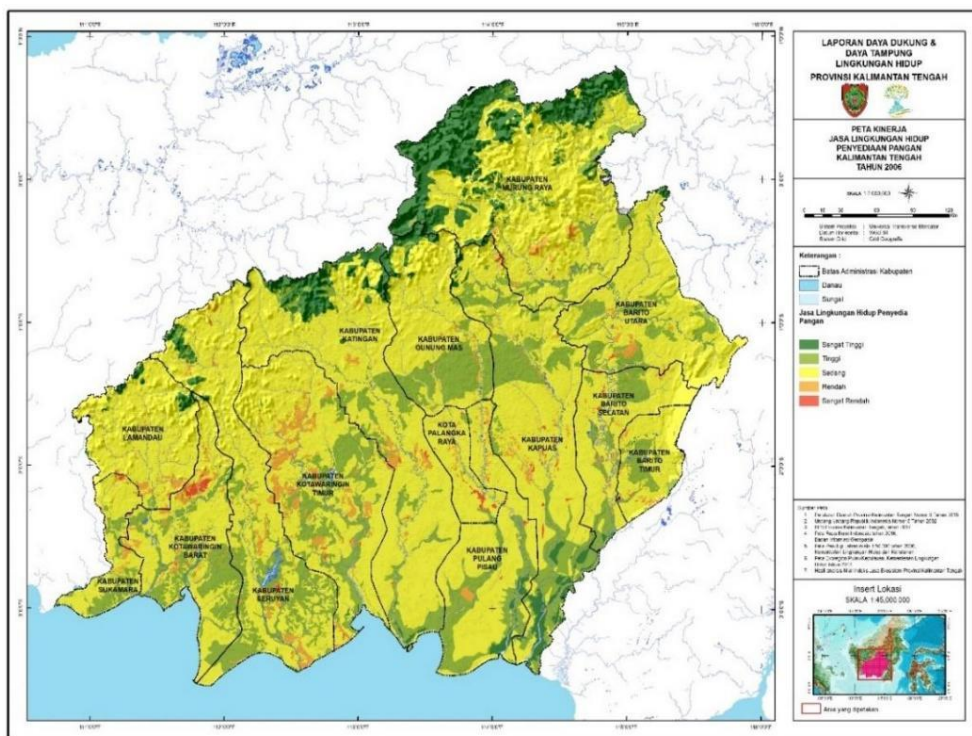
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 2. 11 Trend Luas Area Yang Memiliki Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 1996, 2006, dan 2018 (Ha)

Secara spasial, pada tahun 1996, diketahui bahwa jasa ekosistem penyediaan pangan tinggi dengan luas yang cukup dominan terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas mencapai 46,7% dari luas kabupaten/kota. Pada tahun yang sama, jasa ekosistem penyediaan pangan rendah dengan luas paling besar terdapat di Kabupaten Murung Raya, yaitu mencapai 1,45% dari luas kabupaten. Di sisi lain, kabupaten yang masih memiliki jasa ekosistem penyediaan pangan sangat tinggi dengan luas cukup besar pada tahun 1996 adalah Kabupaten Kapuas. Area dengan jasa ekosistem penyediaan pangan sangat tinggi cenderung terletak pada area dengan tutupan hutan yang masih baik. Sedangkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung didominasi oleh areal yang memiliki jasa ekosistem penyediaan pangan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, ketersediaan pangan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1996 masih cukup tinggi.



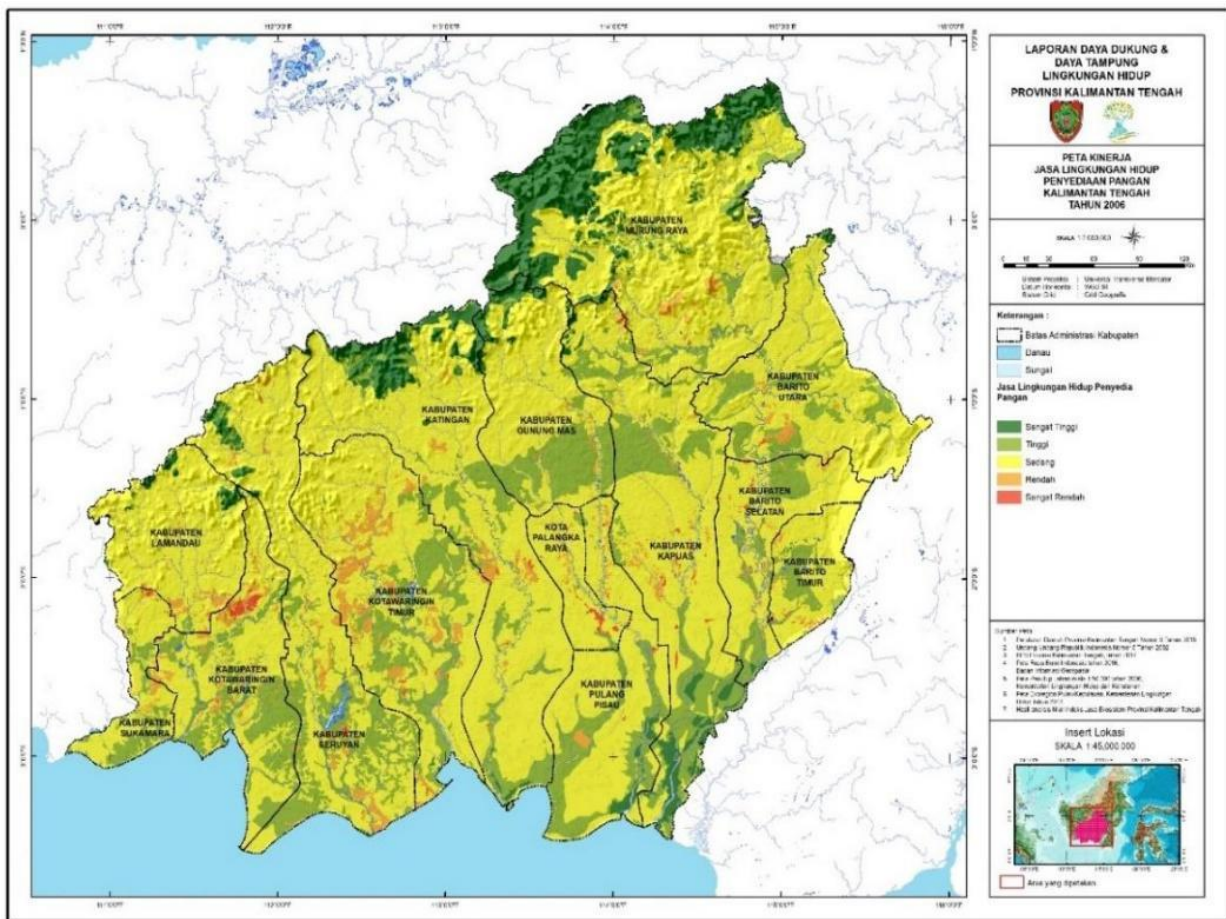
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 2.12 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1996

Secara temporal, berdasarkan hasil analisis tahun 2006 tidak terdapat perubahan signifikan jika dibandingkan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan tahun 1996. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masih didominasi oleh jasa ekosistem penyediaan pangan sedang hingga tinggi. Namun terjadi perubahan luas yang cukup besar pada periode tahun 2006–2018. Perubahan ini berupa peningkatan luas area dengan jasa ekosistem penyediaan pangan rendah, yang luasnya di beberapa kabupaten/kota menjadi sangat signifikan. Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan luas area dengan jasa ekosistem penyediaan pangan rendah paling besar adalah Kabupaten Sukamara, yang pada tahun 2006 seluas 5,14% dari luas kabupaten, meningkat menjadi 22,58% dari luas kabupaten pada tahun 2018.



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 2.13 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006

Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Berdasarkan kelas ekoregion, lahan berpotensi tinggi – sangat tinggi paling besar proporsinya berada di ekoregion Dataran Struktural Lipatan (Berombak - Bergelombang) (7,85%) seluas 4.204.750,53 hektar dan Dataran Fluvial (Datar - Landai) (4,98%) seluas 2.665.264,44 hektar. Nilai sangat menonjol ditunjukkan pada jenis ekoregion Perbukitan Struktural Lipatan dan Dataran Gambut untuk klasifikasi sangat rendah – rendah, yang masing-masing nilai persentasenya adalah 7,83% dan 4,23%. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa pada kondisi ekoregion tersebut kurang berpotensi atau berpotensi rendah untuk dikembangkan sebagai jasa penyediaan pangan. Nilai penyedia pangan di Kalimantan Tengah dengan kategori rendah dan sangat rendah seluas 3.738.215,64 ha (6,98%), kategori sedang seluas 7.129.568,48 (13,31%) dan kategori tinggi dan sangat tinggi seluas 4.437.902,89 ha (8,29%) dari total luas pulau kalimantan, yaitu 53.400.935,7 ha (P3E Kalimantan, 2016).



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 2.14 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

a. Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

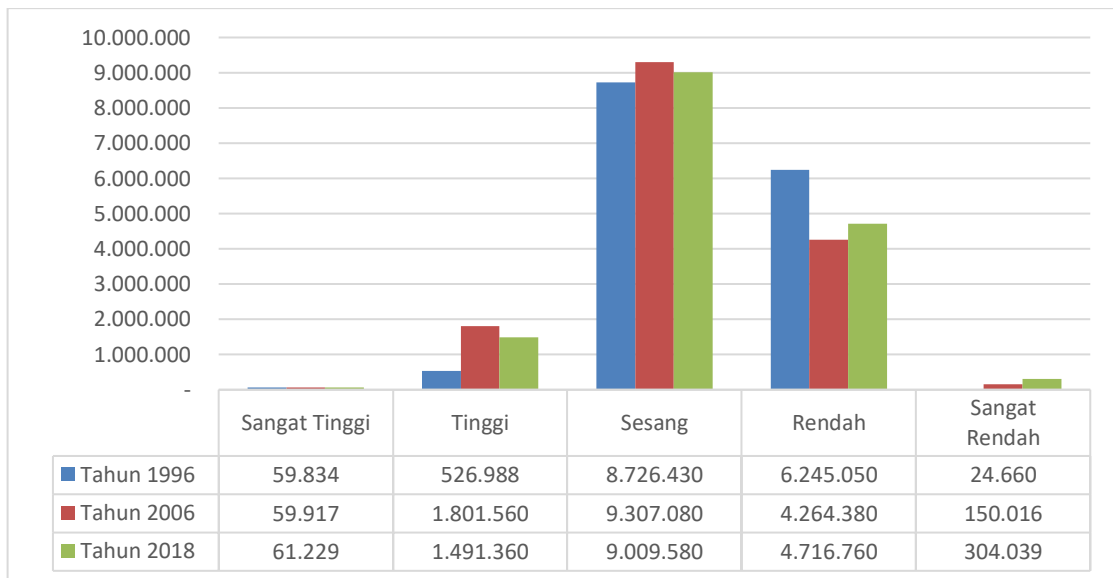
Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kebutuhan air sangat krusial bagi manusia, baik dalam manfaatnya sebagai air minum atau dalam

memenuhi kebutuhan sehari – hari, serta merupakan modal utama dalam pembangunan. Dalam rangka pelestarian fungsi air, maka menjadi penting halnya untuk melakukan pengelolaan lahan dengan tetap memperhatikan kepentingan lingkungan. Sebagaimana tertuang dalam Undang–Undang RI No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa sumber daya air memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dalam segala bidang, dan wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras. Dalam pemenuhan kebutuhan air, ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa.

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Secara umum Pulau Kalimantan berdasarkan kelas ekoregion, lahan berpotensi tinggi- sangat tinggi paling besar luasnya mencapai 10.218.062,70 hektar (19,08%) pada jenis ekoregion Pegunungan Struktural Lipatan. Jenis Ekoregion lain yang mempunyai potensi tinggi untuk penyediaan air adalah Dataran Struktural Lipatan (Berombak - Bergelombang) seluas 5.395.398,01 hektar (10,07%) dan Dataran Gambut seluas 3.420.538,86 hektar (6,39%). Sebagian besar luasan Pulau Kalimantan memiliki peran penyedia air bersih tinggi dan sangat tinggi dengan luasan 38.022.334,11 hektar (70,99%). Khusus wilayah Kalimantan Tengah, penyedia air bersih dengan kategori rendah-sangat rendah ada seluas 2.756.418 ha (5,15%), kategori sedang seluas 1.486.332 ha (2,78%), dan tinggi-sangat tinggi seluas 11.062.937 ha (20,65%) dari total luas pulau kalimantan, yaitu 53.400.935,7 ha (P3E Kalimantan, 2016).

Berdasarkan hasil pengkelasan nilai indeks jasa ekosistem penyediaan air bersih di Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode tahun 1996 sampai 2018 terjadi peningkatan luas area dengan jasa ekosistem penyediaan air yang signifikan untuk semua kategori. Pada periode yang sama juga terjadi penurunan luas area dengan jasa ekosistem penyediaan air sangat rendah. Peningkatan atau penurunan kemampuan ekosistem dalam menyediakan air bersih bagi kehidupan sangat dipengaruhi oleh tutupan lahan hutan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut P3E Kalimantan (2016)

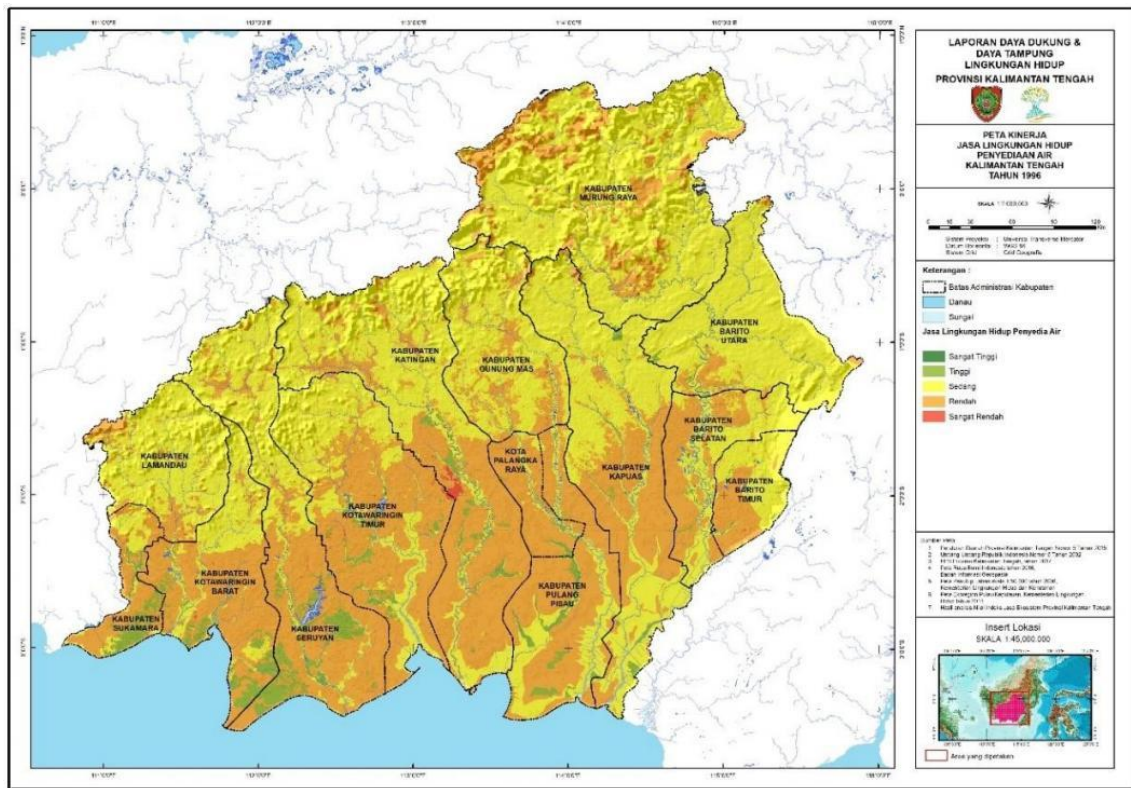
kawasan hutan yang terletak di perbukitan dan pegunungan merupakan wilayah pengisi air (*recharge area*). Perbukitan atau pegunungan memiliki curah hujan yang relatif tinggi menyebabkan air hujan akan masuk ke dalam tanah baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui tumbuhan. Kualitas air tanah di pegunungan dan perbukitan lebih baik karena banyaknya vegetasi sehingga tidak tercampur dengan sedimen.



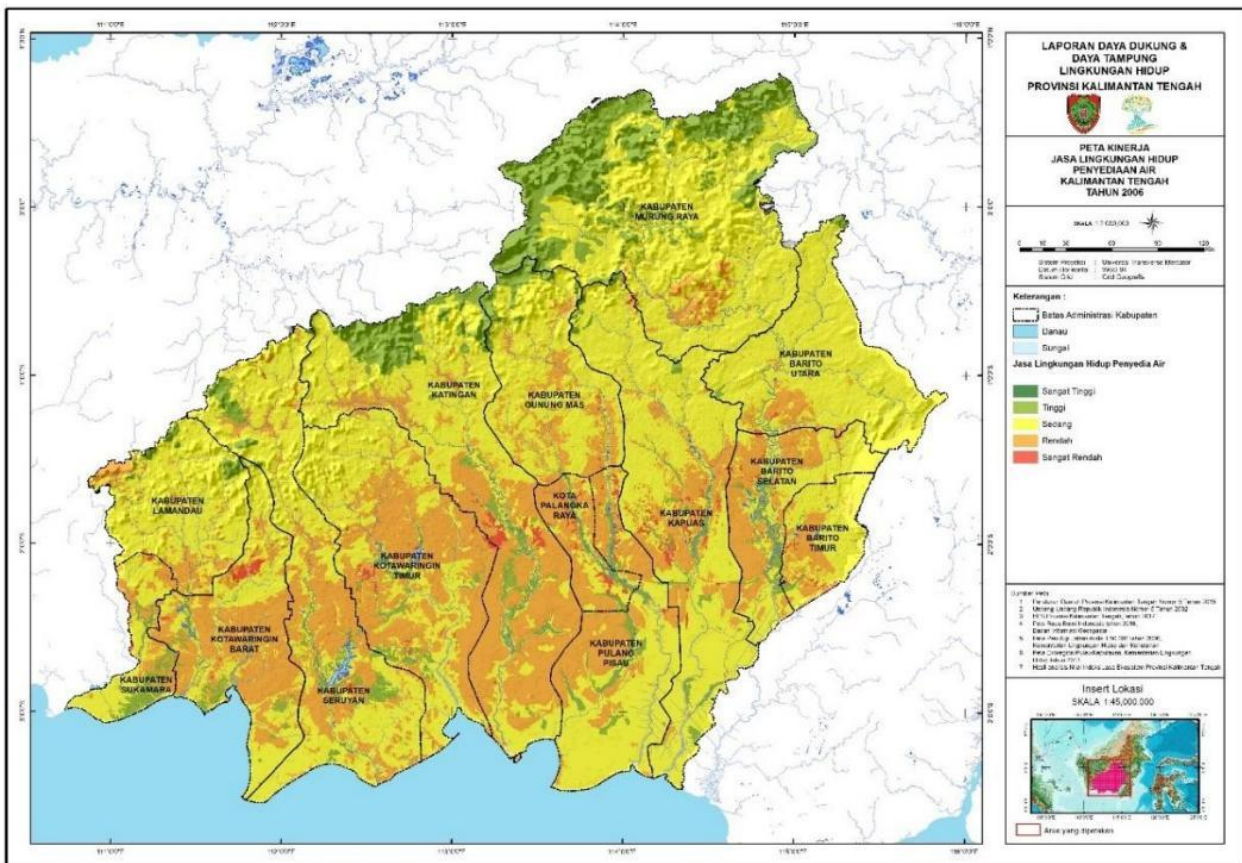
Gambar 2. 15 Trend Luas Area Yang Memiliki Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 1996, 2006, dan 2018

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah

Secara spasial, pada tahun 1996, diketahui bahwa jasa ekosistem penyediaan air bersih tinggi dengan luas yang cukup besar, terdapat di Sukamara dengan luas 19,93% dari luas kabupaten (Gambar 4.6). Area yang masih memiliki jasa ekosistem penyediaan air bersih tinggi, cenderung terletak pada area dengan tutupan hutan yang baik. Namun secara keseluruhan, sejak tahun 1996, Provinsi Kalimantan Tengah telah didominasi oleh area dengan jasa ekosistem penyediaan air rendah dan sedang. Beberapa kabupaten/kota yang didominasi oleh area dengan jasa ekosistem penyediaan air bersih rendah adalah Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya, dengan luas masing-masing area secara berturut-turut mencapai 67,15 dan 83,11% dari luas kabupaten/kota. Sedangkan beberapa kabupaten yang didominasi oleh area dengan jasa ekosistem penyediaan air bersih sedang adalah Kabupaten Barito Utara, Lamandau dan Murung Raya, dengan luas masing-masing area secara berturut-turut mencapai 91,81%, 83,87% dan 79,87% dari luas kabupaten.

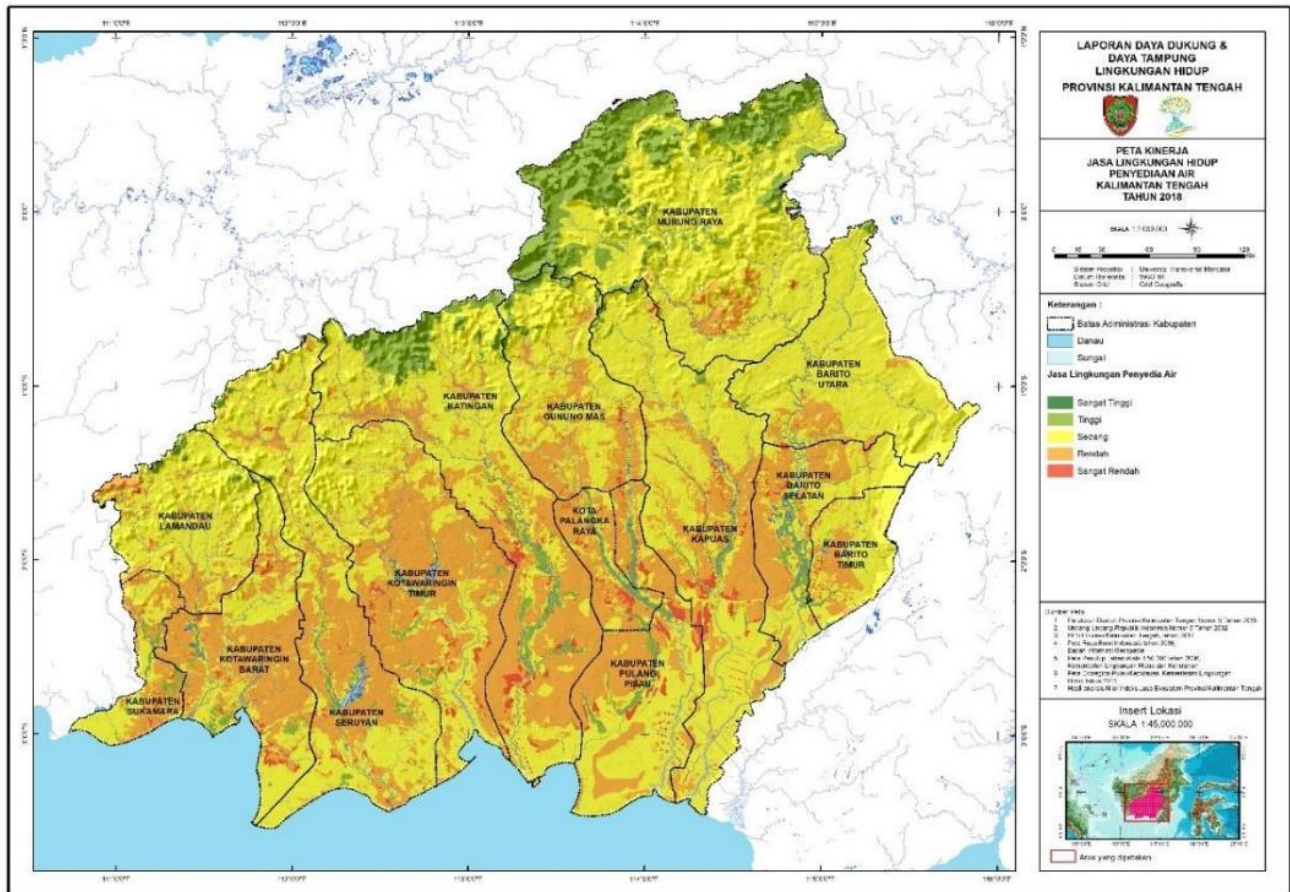


Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 2.16 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1996



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 2.17 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 2. 18 Pebaran Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

Secara spasial, pada periode tahun 2006 hingga 2018 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan luas area dengan jasa ekosistem penyediaan air bersih tinggi yang cukup signifikan di Kabupaten Seruyan dari 7,93% pada tahun 2006 menjadi 3,16%. Selain itu, pada periode tahun 2006 hingga tahun 2017, juga terjadi peningkatan luas area dengan jasa ekosistem penyediaan air bersih sangat rendah yang cukup signifikan di Kabupaten Gunung Mas. Perubahan pada periode ini menunjukkan bahwa secara umum wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan kemampuan ekosistem dalam menyediakan air bersih bagi kehidupan. Jika tidak diperhatikan lebih seksama, trend penurunan kemampuan ekosistem dalam menyediakan air bersih akan terus berlanjut.

2.1.4.2 Profil Daya Dukung Lingkungan Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan

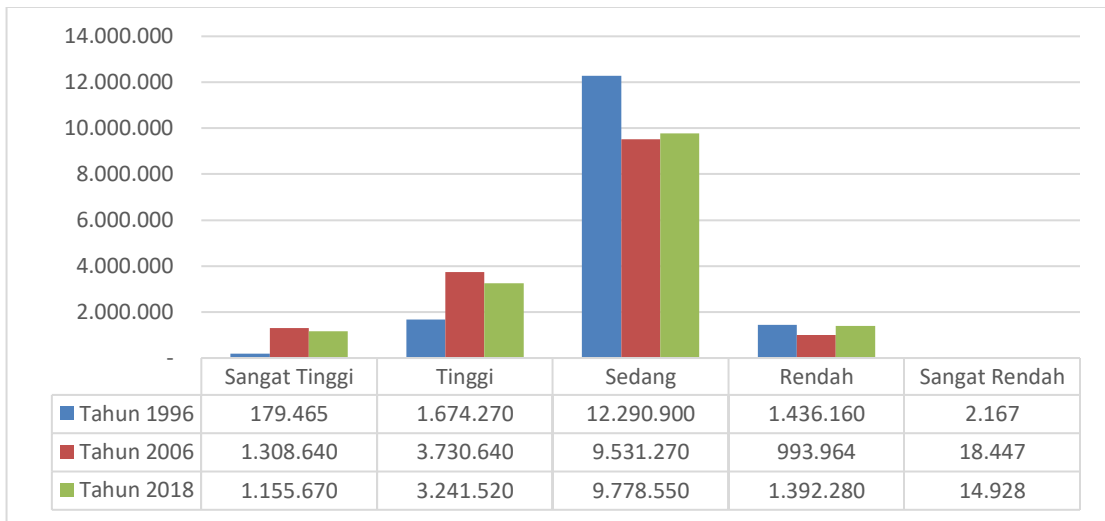
Jasa regulasi/pengaturan merupakan hasil kemampuan ekosistem dalam mengatur iklim, siklus air dan biokimia, proses permukaan tanah, serta berbagai proses biologi. Dalam perkembangannya, jasa ekosistem pengaturan cenderung mengalami penurunan ataupun perubahan yang disebabkan oleh kegiatan untuk meningkatkan pasokan layanan jasa penyediaan dan menghasilkan limbah yang melebihi kemampuan ekosistem. Dalam kajian ini, jasa ekosistem pengaturan yang dianalisis melalui perhitungan nilai Indeks Jasa Pengaturan dengan pendekatan ekoregion dan tutupan lahan secara

temporal tahun 1996, 2006 dan 2017. Analisis dilakukan dengan memperhatikan faktor temporal untuk melihat trend perubahan jasa ekosistem pengaturan pada masing-masing periode perhitungan, sehingga dapat memberi gambaran dalam penentuan rencana pengelolaan lahan selanjutnya. Adapun jasa ekosistem pengaturan yang menjadi fokus analisis dalam kajian ini meliputi Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim, Tata Aliran Air dan Banjir, Pencegahan dan Perlindungan (Mitigasi) Bencana, Pengolahan dan Penguraian Limbah, Pemeliharaan Kualitas Udara, Penyerbukan Alami, Pengendalian Hama dan Penyakit, serta Pengaturan Kesuburan Tanah.

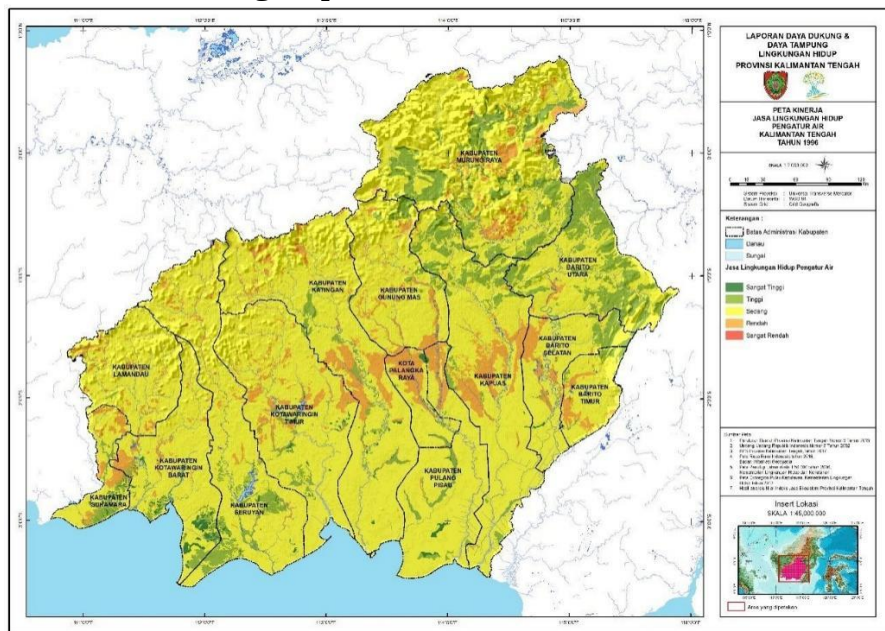
a. Jasa Ekosistem Pengaturan Air

Selain jasa lingkungan penyedia air, juga terdapat jasa lingkungan pengatur air. Jasa lingkungan pengatur air memiliki definisi peran bentang alam dan penutupan lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala, dengan indikator keadaannya adalah kapasitas infiltrasi dan retensi air serta pengaruhnya terhadap wilayah hidrologis. Hutan berperan sebagai pengatur tata air, dimana sebagian curah hujan yang jatuh di atasnya akan disimpan sebagai air tanah dan akan dikeluarkan saat musim kemarau. Areal dengan tutupan hutan yang baik akan mampu menyimpan air lebih banyak dibandingkan dengan areal yang tidak memiliki tutupan hutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan luas area yang memiliki jasa ekosistem pengaturan tata air sedang dan rendah bisa terjadi akibat adanya penurunan luas hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

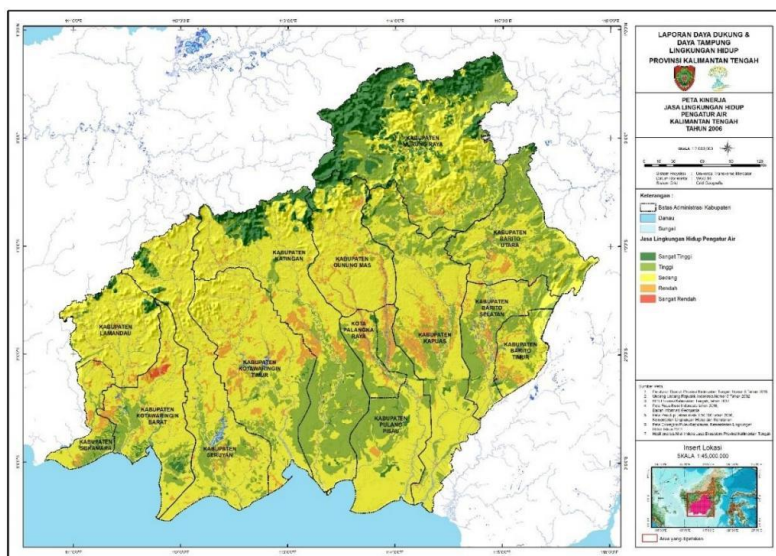
Berdasarkan gambar di bawah, dapat diketahui bahwa selama periode tahun 1996 hingga tahun 2017, cenderung tidak terjadi perubahan luas area dengan kelas jasa ekosistem pengaturan air secara signifikan. Secara umum, kemampuan ekosistem di Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengaturan air masih tergolong baik, hal ini terlihat dari dominansi area dengan jasa ekosistem pengaturan air tinggi dan sedang. Namun demikian, terjadi penurunan luas area yang memiliki jasa ekosistem pengaturan air sedang secara dari periode tahun 1996 hingga 2017. Hal ini menunjukkan bahwa, secara perlahan telah terjadi penurunan kemampuan lingkungan dalam pengaturan air. Jika tidak diperhatikan secara serius, maka kualitas air di Provinsi Kalimantan Tengah dikhawatirkan akan menjadi semakin buruk.



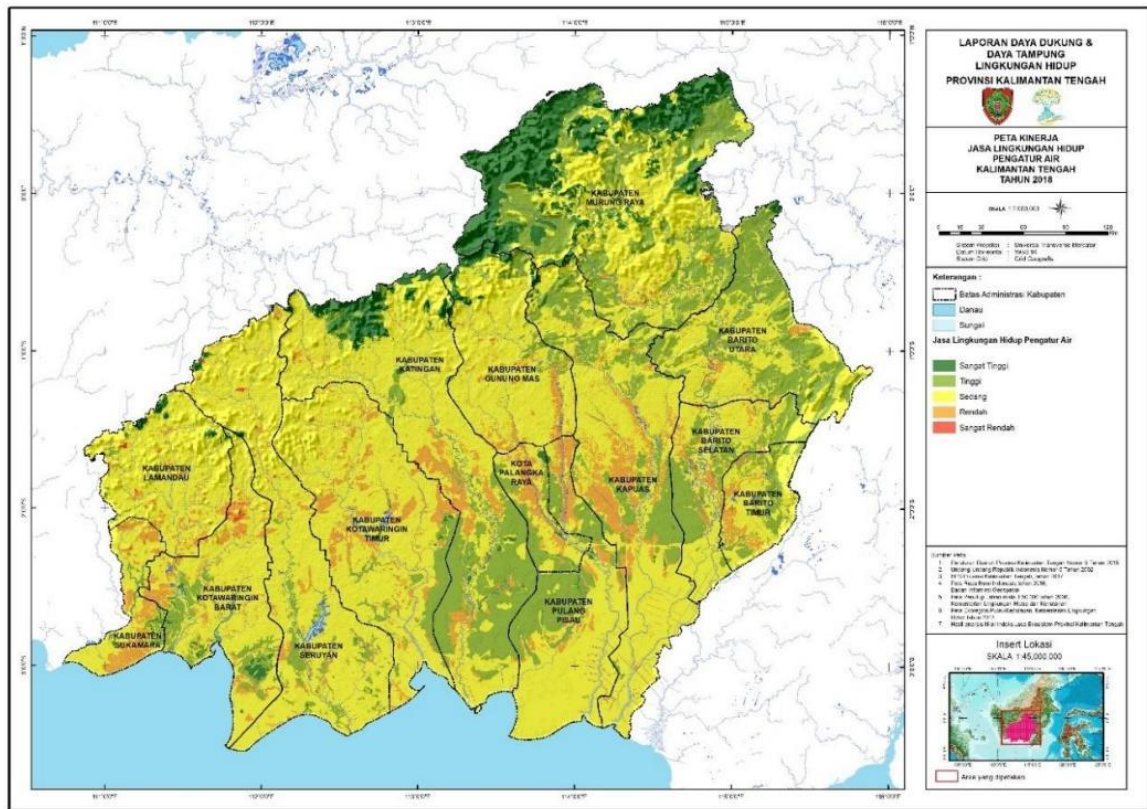
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 2. 19 Trend Luas Area Yang Memiliki Jasa Ekosistem Pengaturan Air di Provinsi Kalimantan Tengah pada Periode Tahun 1996, 2006, dan 2018 (Ha)



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 2. 20 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Air di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1996



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 2. 21 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Air di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 2. 22 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Air di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

Berdasarkan 3 gambar di atas, terlihat bahwa hingga periode tahun 2017, Provinsi Kalimantan Tengah masih didominasi oleh area dengan jasa ekosistem pengaturan air tinggi dan sedang, yang tertelak di bagian tengah – utara wilayah provinsi. Bagian tersebut merupakan area pegunungan yang didominasi oleh hutan sehingga pengaturan air relatif banyak.

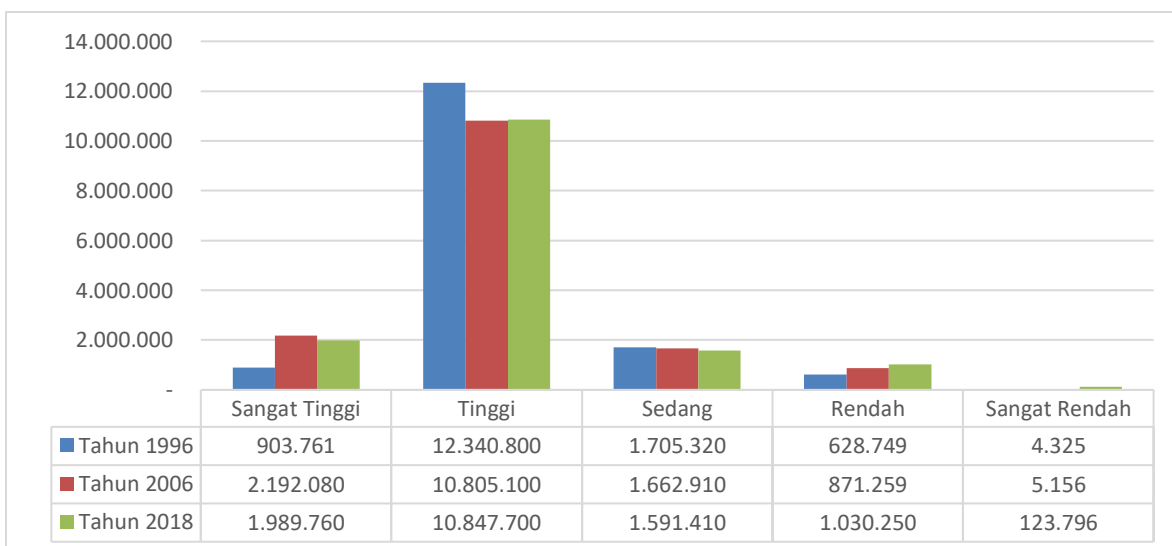
Pada tahun 1996, beberapa kabupaten yang sebagian besar wilayahnya memiliki jasa ekosistem pengaturan air sangat tinggi adalah Kabupaten Kotawaringin Barat (5,05% dari luas kabupaten). Jika memperhatikan Gambar 2.15, dapat dilihat bahwa hampir semua kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah mampu menjaga ekosistem dalam mendukung jasa penyediaan air. Peningkatan luas area dengan jasa ekosistem pengaturan air sangat tinggi paling besar terjadi di Kabupaten Murung Raya dari 0,39% luas kabupaten di tahun 1996 menjadi 33,92% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Murung Raya telah menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi hijau. Strategi ini menjelaskan tentang peluang yang dimiliki kabupaten Murung Raya untuk bisa beralih ke model pertumbuhan ekonomi baru yang mendatangkan kesejahteraan dan sekaligus melestarikan lingkungan. Strategi ini mengidentifikasi dan menguraikan langkah-langkah yang bisa dilakukan di empat sektor yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi hijau di Murung Raya, yaitu: kehutanan, pertambangan, perkebunan dan energi (Kabupaten Murung Raya, 2015). Adapun peningkatan luas area

paling besar untuk kelas rendah terjadi di Kabupaten Sukamara dari 19,42% dari luas kabupaten di tahun 1996 menjadi 29,54% di tahun 2018.

b. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur iklim memiliki definisi pengaruh ekosistem terhadap iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis. Indikator keadaannya adalah tutupan lahan yang bervegetasi, sedangkan indikator kinerjanya adalah luas tutupan lahan yang bervegetasi.

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Dalam kajian ini, jasa ekosistem pengaturan iklim dihitung secara temporal untuk kondisi tahun 1996, 2006, dan 2018, yang disajikan dalam gambar di bawah.



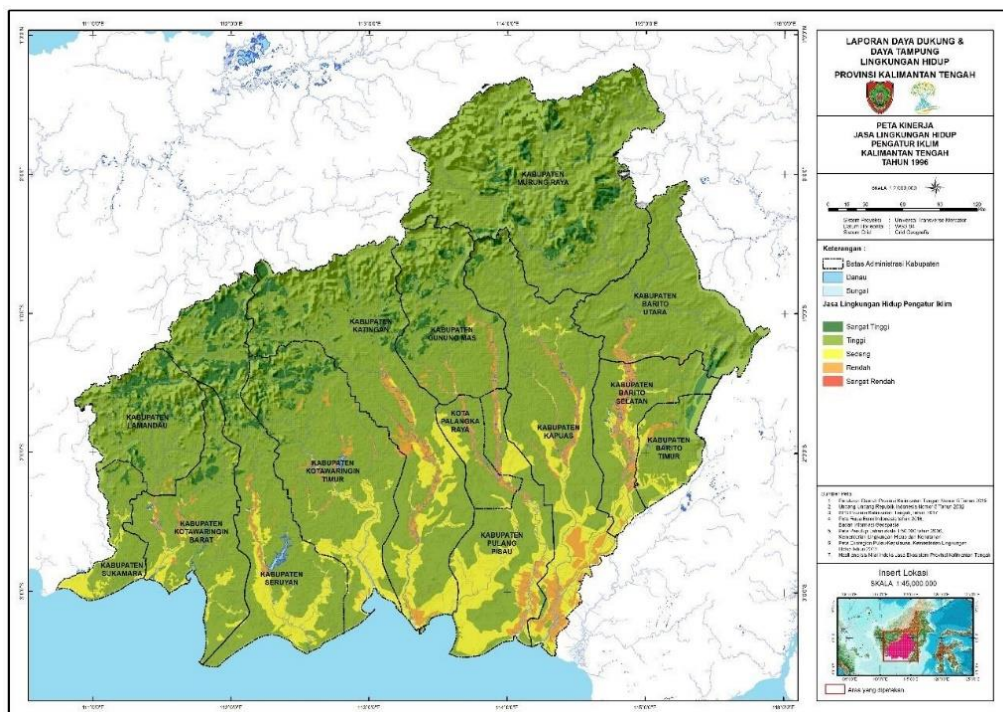
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 2. 23 Trend Luas Area Yang Memiliki Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah pada Periode Tahun 1996, 2006, dan 2017 (Ha)

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jasa ekosistem pengaturan iklim yang tinggi, meskipun luasnya menurun dalam dua dekade terakhir. Pada periode tahun 2006 terjadi perubahan luas paling besar pada kemampuan ekosistem

dalam pengaturan iklim. Perubahan tersebut berupa peningkatan luas area dengan jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi sebesar $\pm 9,85\%$ dari luas provinsi, dan penurunan luas area dengan jasa ekosistem pengaturan iklim sedang sebesar $\pm 0,27\%$ dari luas provinsi. Meningkatnya kemampuan alam dalam mengatur iklim sangat dipengaruhi oleh kondisi lahan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Penggunaan lahan dan ketinggian tempat menyebabkan udara di pegunungan dan perbukitan lebih sejuk dan relatif bersih. Hutan juga menjadi penyaring alami polusi udara yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

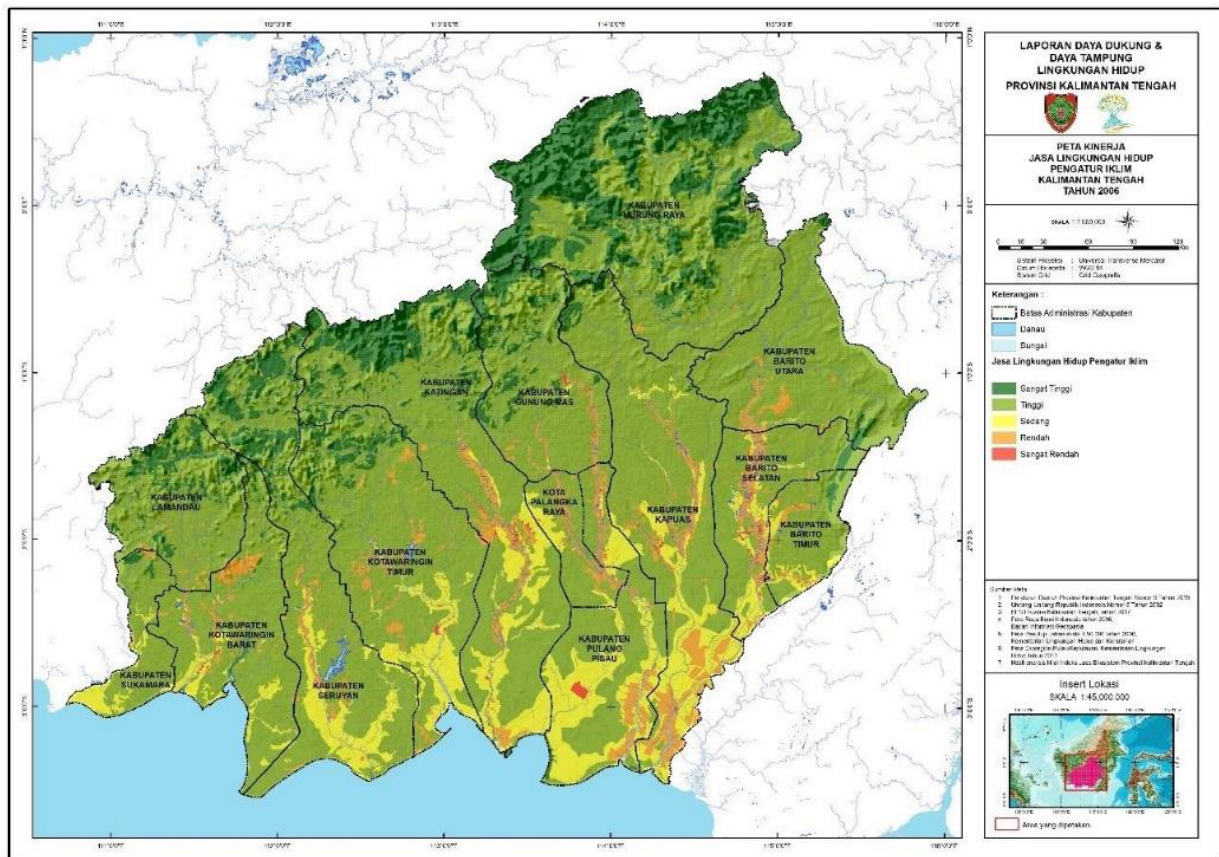
Gambar di bawah menunjukkan bahwa sebagian besar area yang memiliki jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan terdapat kabupaten yang hampir keseluruhan areanya memiliki jasa ekosistem pengaturan iklim sangat tinggi, yaitu Kabupaten Barito Utara dengan luas area yang memiliki jasa ekosistem pengaturan iklim mencapai $95,43\%$ dari luas kabupaten. Terdapat area yg memiliki jasa ekosistem sangat rendah dengan luas $0,01\%$, dan hanya sekitar $2,14\%$ dari luas kabupaten yang memiliki jasa ekosistem rendah di Kabupaten Barito Utara. Adapun area dengan jasa ekosistem pengatur iklim rendah paling luas terdapat di Kabupaten Barito Selatan, dengan luas $11,93\%$ dari luas kabupaten.



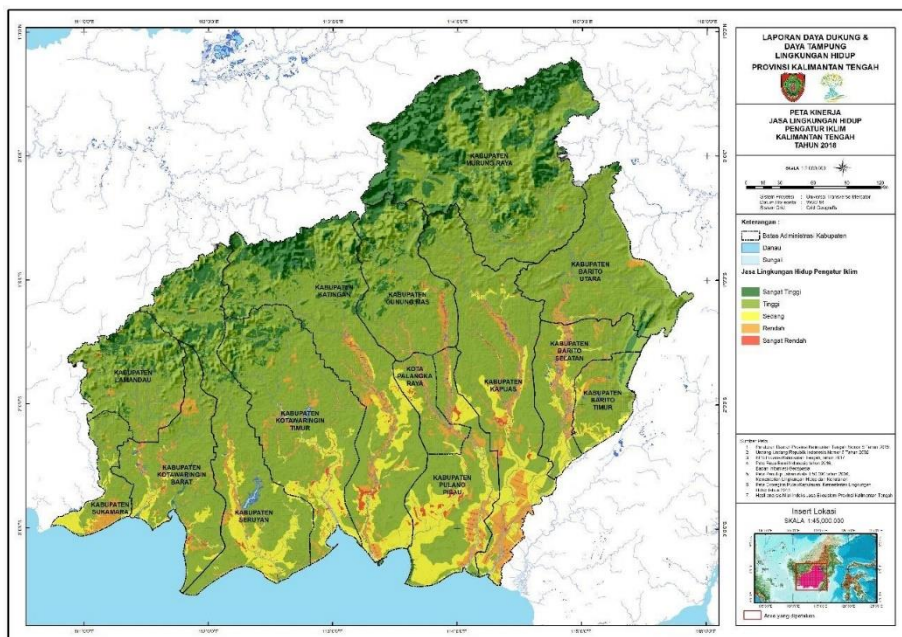
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 2. 24 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1996

Berdasarkan 2 gambar di bawah, diketahui bahwa terjadi perubahan kemampuan ekosistem terkait jasa pengaturan iklim di kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2006 hingga 2018. Perubahan cukup besar terjadi di Kabupaten Sukamara, berupa peningkatan luas area dengan jasa ekosistem pengaturan iklim rendah seluas dari $1,75\%$ di tahun

2006 menjadi 12,30% di tahun 2018. Perubahan luas area dengan jasa ekosistem pengaturan iklim dapat terjadi karena penurunan luas hutan, yang mana hutan memiliki peran penting dalam pengaturan iklim di suatu wilayah.



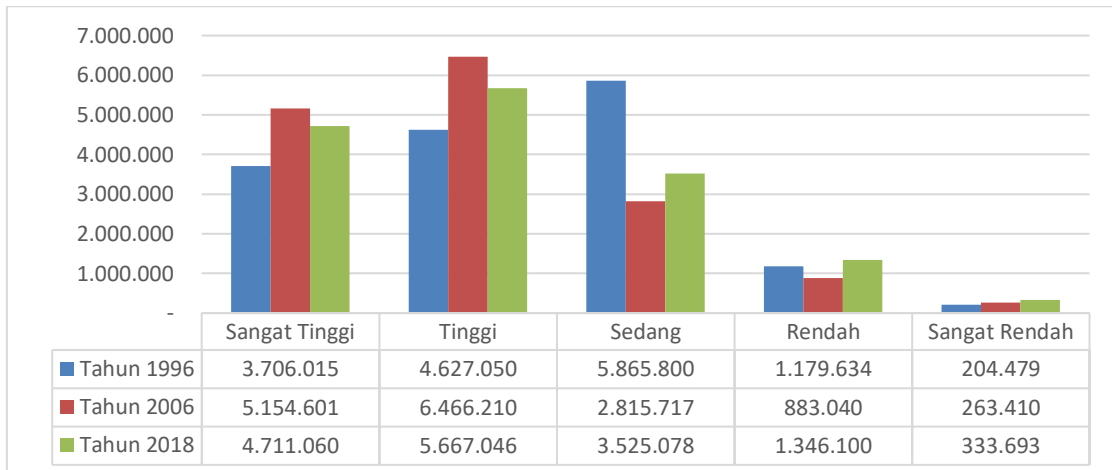
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 2. 25 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 2. 26 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

c. Jasa Ekosistem Pengaturan Mitigasi Banjir

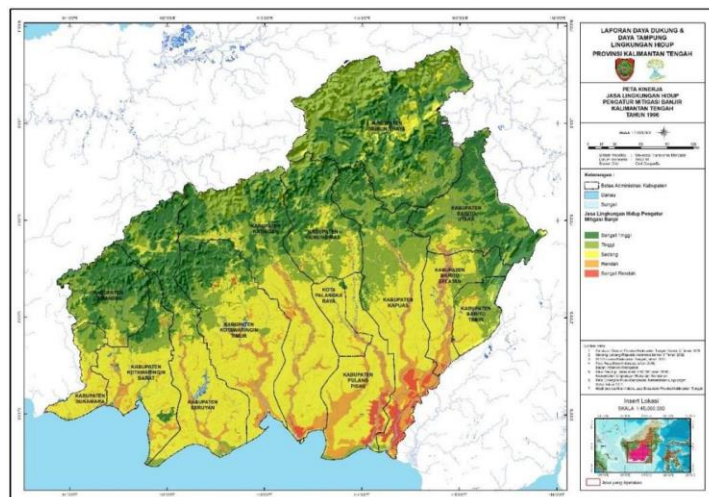
Kinerja jasa ekosistem sebagai pengatur mitigasi bencana banjir memiliki definisi bahwa struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari banjir. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan banjir. Dalam kajian ini, analisis terhadap kemampuan ekosistem dalam melakukan pengaturan tata aliran air dan mitigasi banjir dilakukan terhadap data tahun 1996, 2006, 2018, dan ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 2. 27 Trend Luas Area Yang Memiliki Jasa Ekosistem Pengaturan Mitigasi Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 1996, 2006, dan 2018 (Ha)

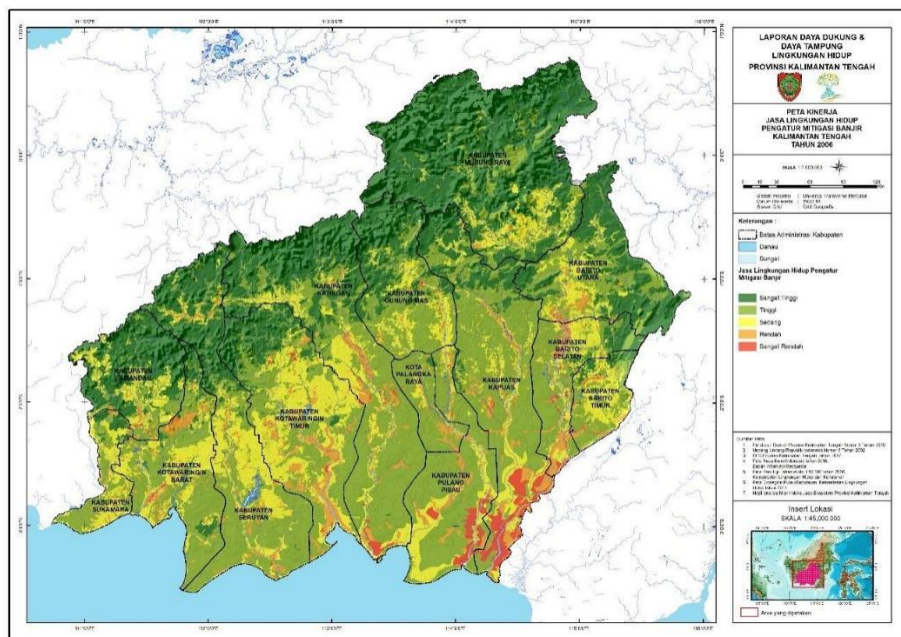
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah

Dari tahun 1996 hingga tahun 2018 telah terjadi peningkatan luas kemampuan ekosistem dalam pengaturan mitigasi banjir kategori sangat tinggi dan tinggi. Meskipun di tahun 2006 luas area lebih tinggi dibanding dengan tahun 2018. Untuk kategori rendah dan sangat rendah mengalami peningkatan luasan. Ini menunjukkan penurunan kualitas jasa ekosistem.



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
 Gambar 2. 28 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1996

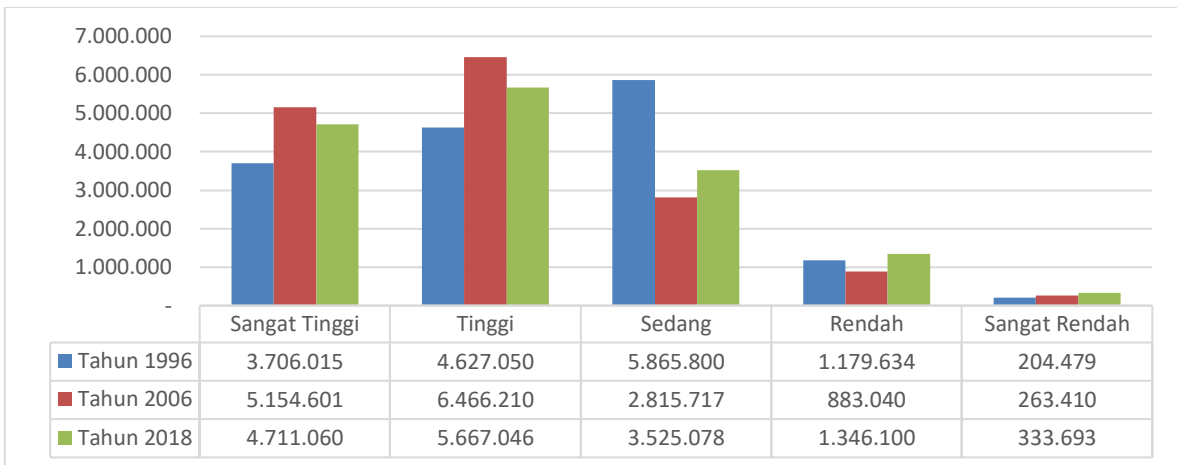
Secara spasial, diketahui bahwa pada tahun 1996, Provinsi Kalimantan Tengah cukup didominasi dengan jasa ekosistem pengaturan mitigasi banjir sangat tinggi dan tinggi yang tersebar di semua kabupaten (Gambar 2.22). Beberapa kabupaten yang areanya didominasi oleh jasa ekosistem pengaturan mitigasi banjir kategori sangat tinggi dan tinggi adalah Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Murung Raya dengan luas secara berturut – turut mencapai 53,07% dan 57,40% dari luas kabupaten. Di sisi lain, diketahui bahwa pada tahun 1996 beberapa kabupaten telah mengalami kerusakan lingkungan, yang ditandai oleh adanya area dengan jasa ekosistem pengaturan banjir rendah dengan luas cukup besar, yaitu Kabupaten Pulang Pisau (24,14% dari luas kabupaten



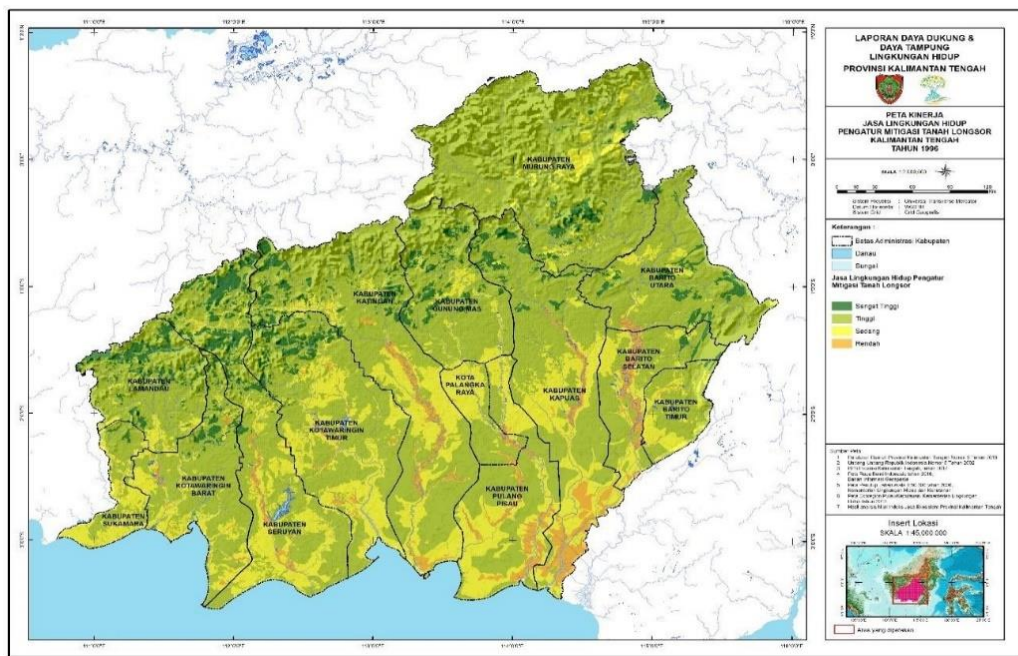
Sumber: *Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah*
 Gambar 2. 29 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006

Berdasarkan 2 gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada periode tahun 1996 hingga tahun 2006, terjadi perubahan kemampuan lahan dalam pengaturan mitigasi banjir di Kabupaten Pulang Pisau. Dalam periode 10 tahun, telah terjadi penurunan luas area dengan jasa ekosistem pengaturan mitigasi banjir kategori sedang seluas 48,18% dari luas kabupaten, di Kabupaten Pulang Pisau. Penurunan luas area tersebut dibarengi dengan peningkatan luas area dengan jasa ekosistem pengaturan mitigasi banjir kategori tinggi sebesar 64% dari luas kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan kualitas lingkungan dalam pengaturan mitigasi banjir di Kabupaten Pulang Pisau.

Dengan memperhatikan gambar di bawah, terlihat bahwa pada periode selanjutnya (periode tahun 2006–2017), telah terjadi penurunan kualitas lingkungan. Hal ini terlihat terutama di Kabupaten Pulang Pisau, dimana terjadi perubahan atau peningkatan luas areal jasa ekosistem pengaturan mitigasi banjir rendah, seluas 10,73% dari area kabupaten 7,67% di tahun

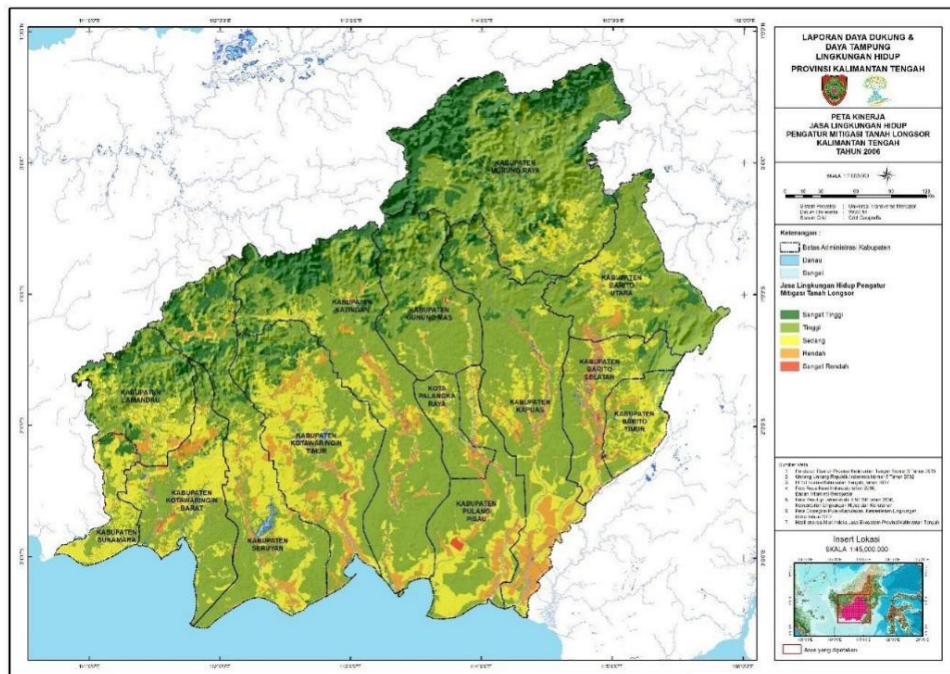


Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
 Gambar 2. 31 Trend Luas Area Yang Memiliki Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan (Mitigasi) Longsor di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 1996, 2006, dan 2018



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
 Gambar 2. 32 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1996

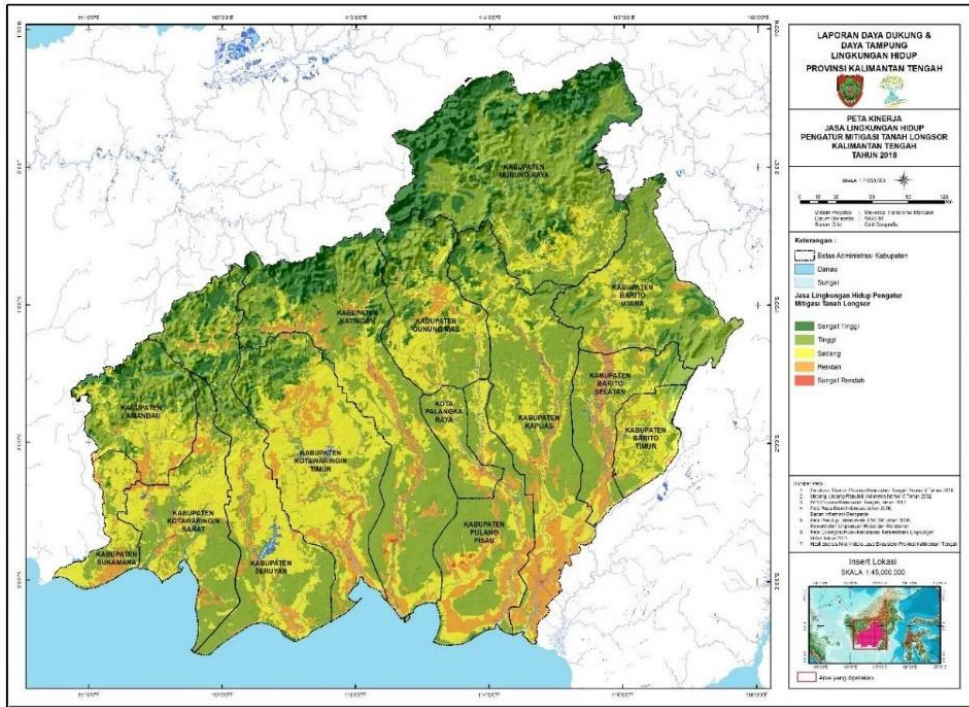
Secara spasial, dapat diketahui bahwa pada tahun 1996 hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh area yang memiliki jasa ekosistem pencegahan longsor kategori tinggi dan sangat tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh ekoregion pegunungan, perbukitan dan dataran struktural lipatan dengan tutupan lahan yang masih bervegetasi memiliki potensi tinggi untuk mencegah bencana. Namun demikian, masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana rendah dengan luas yang cukup besar. kabupaten/kota tersebut diantaranya yaitu Kabupaten Barito Selatan, Pulang Pisau dan Kapuas dengan luas masing masing 13,04%, 10,62% dan 10,35% dari luas Kabupaten.



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 2. 33 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006

Berdasarkan 2 gambar diatas, diketahui bahwa perubahan kemampuan lahan dalam pengaturan mitigasi bencana longsor yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2006. Pada periode tersebut, walaupun masih didominasi oleh area yang memiliki jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana tinggi, namun di beberapa kabupaten/kota terjadi peningkatan luas area yang memiliki jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana rendah. Peningkatan persentase luas area tersebut paling besar terjadi di Kabupaten Pulang Pisau dengan peningkatan luas mencapai 14,34% dari luas kabupaten dan juga Kabupaten Sukamara sebesar 13,59% dari luas kabupaten. Di sisi lain, terjadi penurunan luas area dengan jasa ekosistem pengaturan tinggi di Kabupaten Gunung Mas, dengan persentase penurunan mencapai 27,33% dari luas kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode tahun 1996 hingga 2006, telah terjadi penurunan kemampuan lahan dalam mencegah terjadinya bencana alam. Penurunan kemampuan lahan dalam mencegah terjadinya bencana masih terjadi pada periode tahun 2006 hingga 2018, namun dengan luas yang tidak terlalu besar.

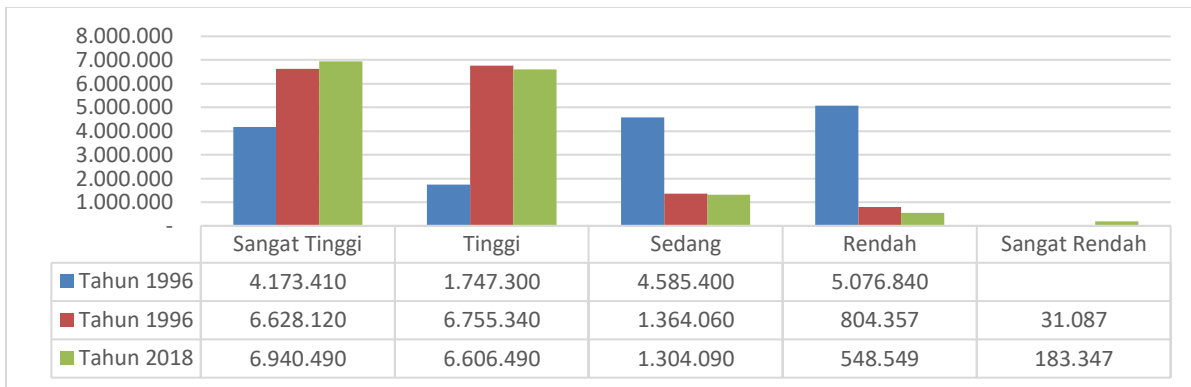


Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
 Gambar 2. 34 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

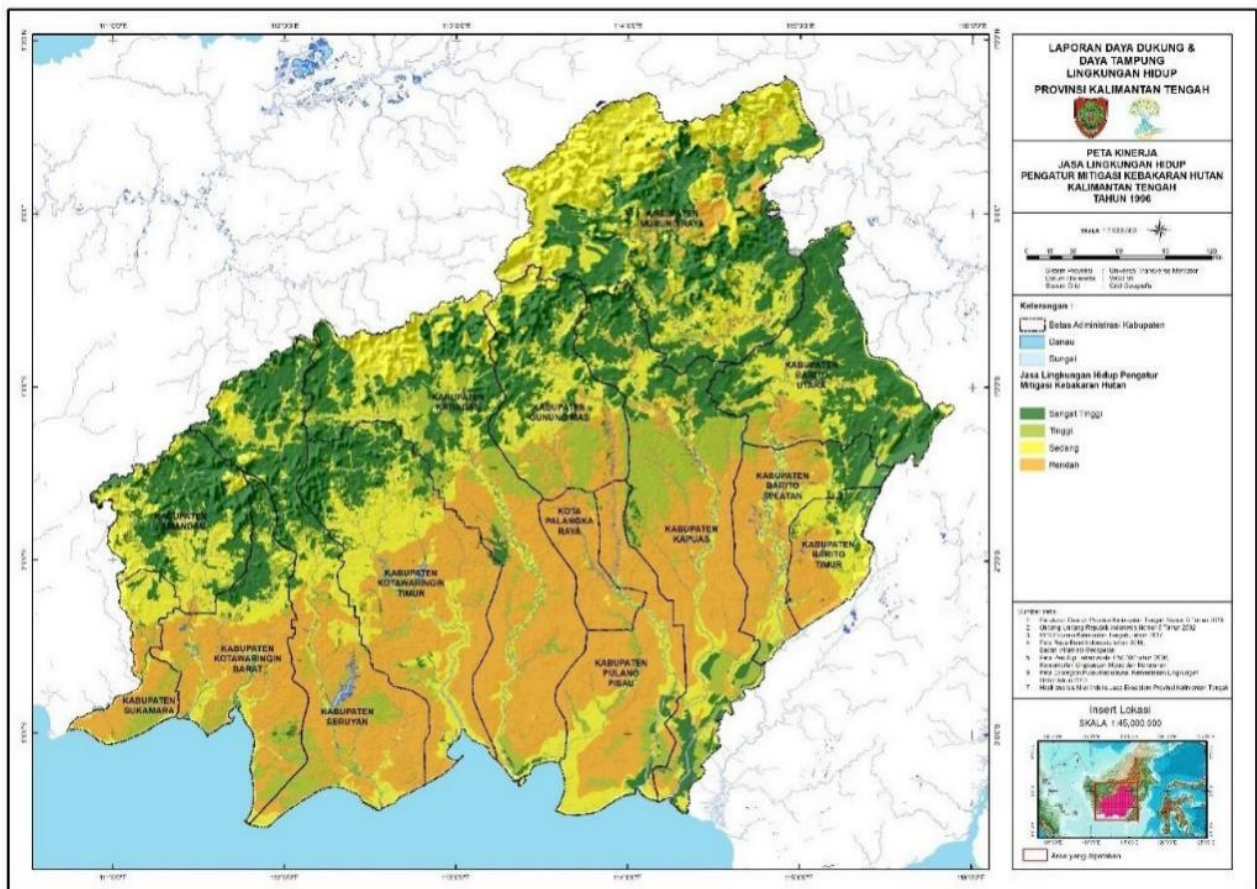
e. Jasa Ekosistem Pengaturan Mitigasi Kebakaran

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan didefinisikan sebagai struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

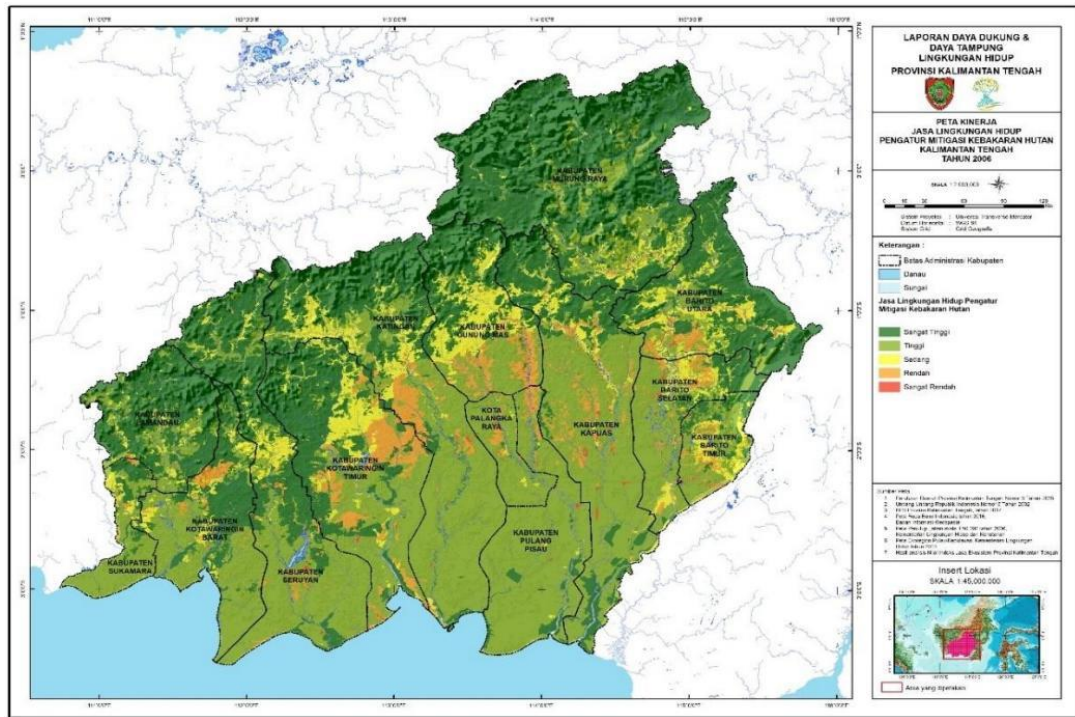
Berdasarkan gambar di bawah dapat diketahui bahwa antara periode tahun 1996 hingga tahun 2018 terjadi perubahan kemampuan lahan dalam mitigasi kebakaran yang cukup signifikan. Hingga tahun 2018, Provinsi Kalimantan Tengah masih didominasi oleh area yang memiliki jasa ekosistem pengaturan mitigasi kebakaran sangat tinggi dan tinggi. Pada periode tahun 1996 hingga 2006 juga tidak terdapat area yang memiliki jasa ekosistem pengaturan mitigasi kebakaran kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut kemampuan lingkungan dalam mitigasi kebakaran masih sangat baik.



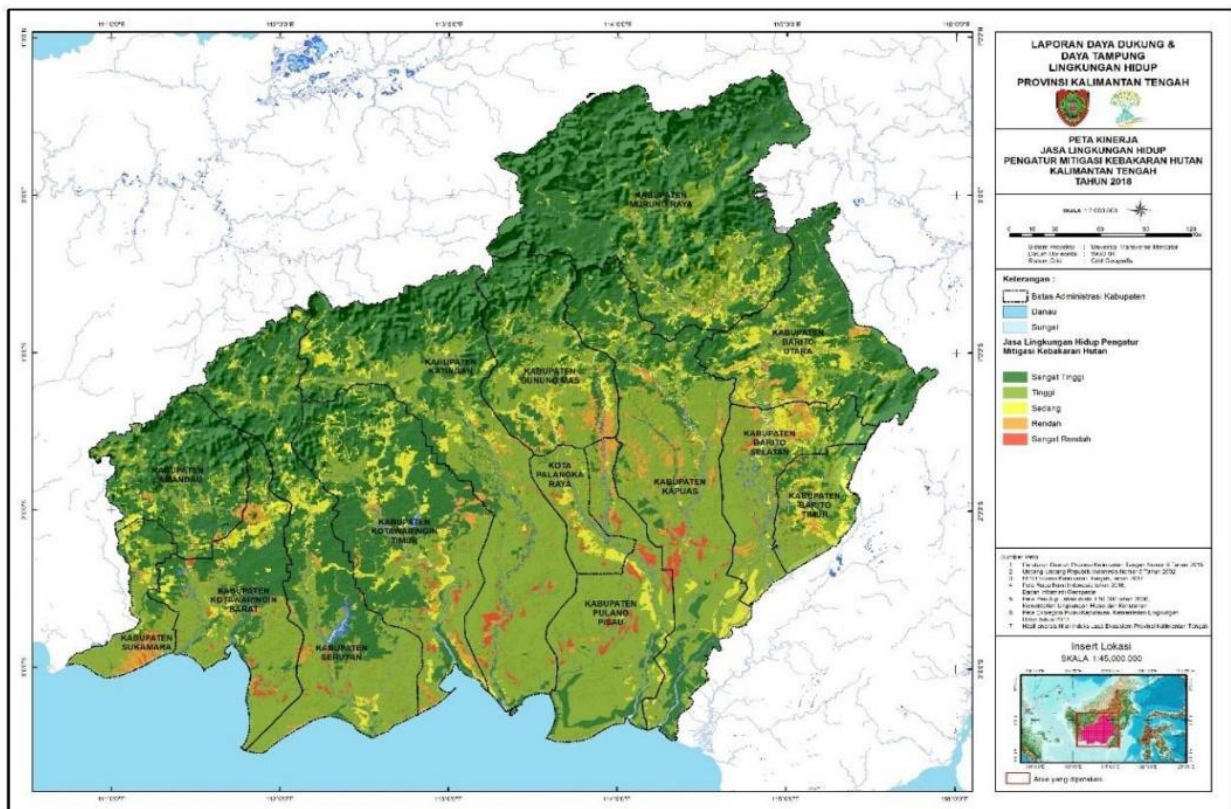
Gambar 2. 35 Trend Luas Area Yang Memiliki Jasa Ekosistem Pengaturan Mitigasi Kebakaran di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 1996, 2006, dan 2018



Gambar 2. 36 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Penguraian Limbah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1996



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi
 Gambar 2. 37 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Penguraian Limbah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah
 Gambar 2. 38 Sebaran Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Penguraian Limbah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

Berdasarkan 2 gambar di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar area yang memiliki jasa ekosistem pengaturan mitigasi kebakaran kategori sangat tinggi terdapat di bagian Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun beberapa kabupaten yang sebagian besar areanya memiliki jasa ekosistem pengaturan mitigasi kebakaran kategori sangat tinggi di tahun 2006 adalah

Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Lamandau dengan luas berturut-turut mencapai 80,65% dan 72,90% dari luas kabupaten.

Berdasarkan Gambar 4.32, diketahui bahwa pada tahun 2018, terjadi peningkatan kualitas kemampuan lahan mitigasi kebakaran, dimana terjadi perubahan luas areal jasa ekosistem pengaturan mitigasi kebakaran kategori rendah menurun. Beberapa kabupaten yang mengalami perubahan tersebut adalah Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan penurunan luas area secara berturut-turut menjadi 8,2%, 6,07%, 4,21%, 6,80% dan 4,11% dari luas kabupaten.

2.1.5 Jumlah Penduduk

Penduduk Kalimantan Tengah berdasarkan Sensus Penduduk 2020 sebesar 2.669.969 orang dengan laju pertumbuhan penduduk dibanding Sensus Penduduk (SP) 2010 sebesar 1,84% atau bertambah sekitar 0,46 juta jiwa.

Tabel 2. 15 Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	SP 2020		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kotawaringin Barat	140.537	129.851	270.388
2	Kotawaringin Timur	222.617	206.278	428.895
3	Kapuas	211.973	198.473	410.446
4	Barito Selatan	67.113	64.027	131.140
5	Barito Utara	80.473	74.339	154.812
6	Sukamara	33.387	30.077	63.464
7	Lamandau	52.143	45.468	97.611
8	Seruyan	86.211	76.695	162.906
9	Katingan	84.278	77.944	162.222
10	Pulang Pisau	70.180	64.319	134.499
11	Gunung Mas	71.378	63.995	135.373
12	Barito Timur	58.112	55.117	113.229
13	Murung Raya	57.948	53.579	111.527
14	Palangka Raya	149.535	144.102	293.457
	Kalimantan Tengah	1.385.705	1.284.264	2.669.969

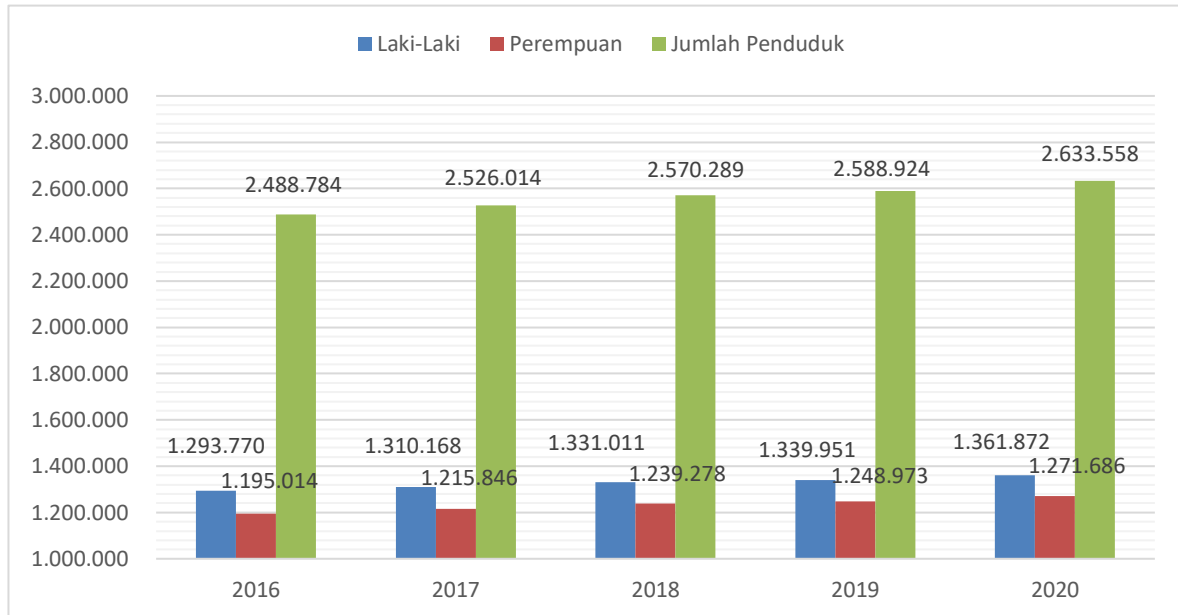
Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Tahun 2021

Berdasarkan data sebaran penduduk tahun 2020 diatas, Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk terbesar yakni sebesar 16,06% dari total penduduk Kalimantan tengah, sedangkan dengan jumlah penduduk terkecil pada tahun 2020 adalah Kabupaten Sukamara yakni sebesar 2,38% dari total penduduk Kalimantan tengah. Jumlah penduduk yang bertambah dari tahun-tahun sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya kelahiran alamiah dan adanya migrasi penduduk.

Sedangkan untuk jumlah penduduk dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil, Kemendagri sebagai berikut :

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil, Kemendagri (data diolah)

Gambar 2.39 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berdasar Jenis Kelamin



Data Konsolidasi Bersih (DKB) ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Pasal 6 huruf (d) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Jika dilihat antara data sensus penduduk 2020 dengan DKB 2020, terdapat selisih data jumlah penduduk sebanyak 36.411. Hal ini memang dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan cara pengambilan data. DKB ini dilakukan secara periodik selama 2 (dua) kali dalam setahun alias setiap semester, dimana yang berwenang dalam memprosesnya adalah Kementerian Dalam Negeri.

2.1.6 Sex Ratio Penduduk

Berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Tengah diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, hal ini dilihat dari besarnya sex ratio yaitu sebesar 107,09 pada tahun 2020. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan di Tahun 2020 terdapat 107 penduduk laki-laki.

Tabel 2. 16 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	Penduduk (Jiwa)					Sex Ratio
	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	
2016	1.293.770	51,98	1.195.014	48,02	2.488.784	108,26
2017	1.310.168	51,87	1.215.846	48,13	2.526.014	107,76
2018	1.331.011	51,79	1.239.278	48,21	2.570.289	107,40
2019	1.339.951	51,76	1.248.973	48,24	2.588.924	107,28
2020	1.361.872	51,71	1.271.686	48,29	2.633.558	107,09

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil, Kemendagri (data diolah)

Berdasarkan data time series diatas, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin terlihat cenderung semakin meningkat di tiap tahunnya dengan sex ratio yang cenderung terus menurun setiap tahunnya dalam rentang 5 tahun terakhir. Hal ini dapat diartikan berdasarkan data tersebut bahwa penambahan penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penambahan penduduk laki-laki setiap tahunnya.

2.1.7 Distribusi Penduduk Kalimantan Tengah

Persebaran penduduk di Kalimantan Tengah tahun 2020 secara umum cukup merata dengan basis kependudukan terpusat di Kotawaringin Timur (16,06 persen), Kapuas (15,37 persen), dan Kotawaringin Barat (10,12 persen). Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah persentase kependudukannya sebesar 10,99 persen dengan jumlah penduduk 293.457 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah Hasil Sensus Penduduk 2020 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Kotawaringin Barat	270.388	10,12
2	Kotawaringin Timur	428.895	16,06
3	Kapuas	410.446	15,37
4	Barito Selatan	131.140	4,91
5	Barito Utara	154.812	5,80
6	Sukamara	63.464	2,38
7	Lamandau	97.611	3,66
8	Seruyan	162.906	6,10
9	Katingan	162.222	6,08
10	Pulang Pisau	134.499	5,08
11	Gunung Mas	135.373	5,07
12	Barito Timur	113.229	4,24
13	Murung Raya	111.527	4,18
14	Palangka Raya	293.457	10,99
	Kalimantan Tengah	2.669.969	100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Prov. Kalimantan Tengah, 2021 (data diolah)

4	Barito Selatan	30.779	93.639	5.676	1.046	131.140
5	Barito Utara	37.223	111.047	5.688	854	154.812
6	Sukamara	15.936	45.314	1.793	421	63.464
7	Lamandau	23.496	69.801	3.443	871	97.611
8	Seruyan	42.209	114.796	4.118	1.783	162.906
9	Katingan	43.909	110.548	5.564	2.201	162.222
10	Pulang Pisau	33.397	92.153	7.132	1.817	134.499
11	Gunung Mas	35.339	94.083	4.594	1.357	135.373
12	Barito Timur	25.942	80.953	4.979	1.355	113.229
13	Murung Raya	30.707	76.627	3.112	1.081	111.527
14	Palangka Raya	72.933	207.890	11.054	1.580	293.457
	Kalimantan Tengah	660.147	1.889.199	97.969	22.654	2.669.969
	Persentase	24,72	70,76	3,67	0,85	100

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Prov. Kalimantan Tengah, 2021 (data diolah)

Memperhatikan komposisi persentase penduduk usia produktif Provinsi Kalimantan Tengah yang memperlihatkan usia produktif lebih banyak dari pada usia non produktif merupakan potensi demografi bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Bila dilihat berdasarkan sudut pandang pembangunan, struktur penduduk yang demikian sangat menguntungkan masyarakat karena beban ketergantungan usia non produktif semakin berkurang atau mengecil.

Dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif tersebut perlu didukung dan diimbangi adanya ketersediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data BPS, jumlah Angkatan kerja pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.381.442 orang, berkurang sebanyak 3.233 orang dibanding tahun 2019 dengan komponen pembentuk Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana penduduk yang bekerja pada tahun 2020 sebanyak 1.318.133 orang, turun 9.752 orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 63.309 orang mengalami peningkatan sebanyak 6.519 orang dibanding setahun yang lalu.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

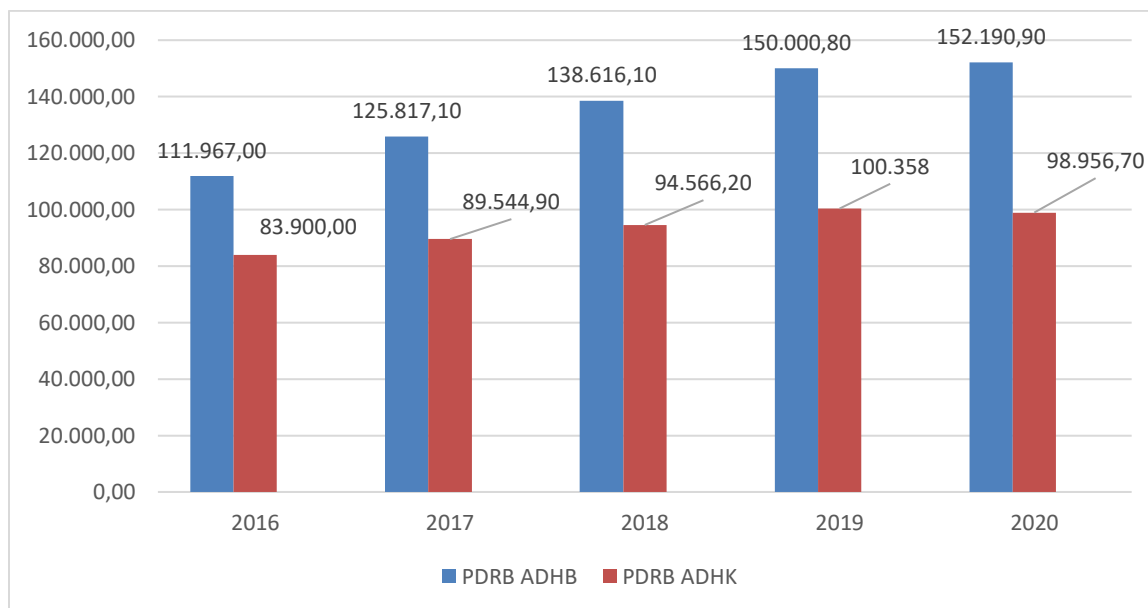
2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan daerah tidak pernah lepas dari pertumbuhan ekonomi regional, baik mikro maupun makro. Berdasarkan kontribusi sektor ekonomitersebut, pemerintah dapat menentukan sektor andalan guna menyokong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di masyarakat yang terlihat dari nilai tambah suatu produk/olahan produk di wilayah tersebut. Struktur ekonomi suatu wilayah juga dapat terlihat dari data PDRB karena setiap sektor ekonomi memiliki andil tersendiri dalam membentuk peta perekonomian wilayah.

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun terjadi

kenaikan, baik atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 maupun atas dasar harga berlaku (ADHB). Data menunjukkan pada Tahun 2020 PDRB ADHK menurut lapangan usaha mencapai Rp 98.956,70 miliar, sementara PDRB ADHB mencapai Rp 152.190,90 miliar. Angka ini meningkat dari tahun ke tahun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016.



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2021

Gambar 2. 41 PDRB ADHK dan PDRB ADHB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2020 (Milyar Rupiah)

Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah berada di kisaran 6,16 persen hingga 7,01 persen, dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perlambatan dan mencapai 6,35 persen (*year on year*). Angka ini dapat dikatakan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Walau sempat naik pada Tahun 2017 menjadi 6,73 persen, namun pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan menjadi 5,61 persen, dan selanjutnya pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 6,16 persen.

Tabel 2. 19 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,92	3,84	4,68	7,08	6,97	0,1
B. Pertambangan dan Penggalian	1,88	7,60	8,67	-0,29	5,82	-9,65
C. Industri Pengolahan	6,51	7,45	8,95	5,11	4,26	-0,24
D. Pengadaan Listrik dan Gas	30,64	10,34	5,82	9,01	9,5	18,83
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,08	4,35	0,27	8,56	6,1	6,29
F. Konstruksi	10,65	7,82	5,41	1,68	6,94	-
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,20	7,29	8,14	11,21	6,23	-0,99
H. Transportasi dan Pergudangan	12,10	9,17	8,15	8,24	7,79	-3,3
I. Penyediaan Akomodasi dan	8,52	7,86	5,52	6,96	6,2	-4,27

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Makan Minum						
J. Informasi dan Komunikasi	5,24	6,23	6,47	8,25	5.14	10.19
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,18	7,27	8,87	2,13	6.08	9.86
L. <i>Real Estate</i>	6,69	5,36	4,24	8,59	4.38	0.61
M, N. Jasa Perusahaan	7,85	6,03	5,45	7,79	6.87	- 13.74
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,80	2,33	4,05	7.27	6.58	11.67
P. Jasa Pendidikan	8,67	6,21	3,53	8.47	6.16	5.66
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,30	5,40	5,64	8,57	5.23	9.57
R, S, T, U. Jasa Lainnya	7,57	6,84	4,11	8,38	6.65	8.38
PDRB	7,01	6,35	6,73	5.61	6.12	-1.4

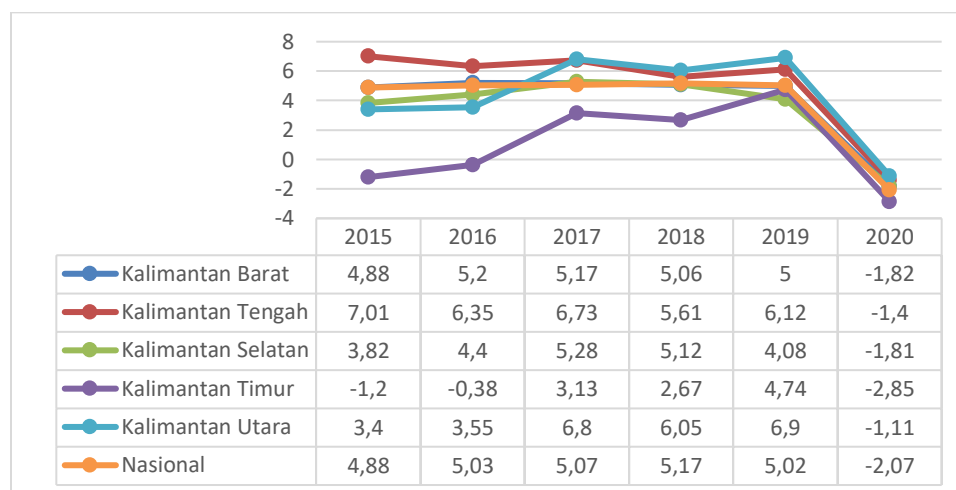
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Pada Tahun 2018 perlambatan ekonomi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, meski mengalami perlambatan Ada sektor-sektor yang tetap tumbuh secara signifikan diantaranya dari sektor Pengelolaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur ulang Sebesar 8,56 persen, Jasa pendidikan 8,47 persen dan Real Estate menjadi 8,59 persen. Sektor yang mengalami penurunan yang cukup besar adalah pada sektor Pertambangan dan penggalian -0,02 persen, jasa keuangan dan asuransi yang turun sebelumnya dengan angka 8,87 persen turun menjadi 2,13 Persen disusul oleh sektor Pengolahan yang ikut mengalami penurunan menjadi 5.11 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 melaju dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB Kalimantan Tengah melaju dari 5,61 persen di tahun 2018, dan di tahun 2019 mencapai 6,12 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,50 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang memiliki kontribusi terbesar, mengalami peningkatan sebesar 6,97 persen. Kategori Industri Pengolahan sebagai penyumbang kontribusi terbesar kedua PDRB Kalimantan Tengah menjadi kategori dengan pertumbuhan terendah yaitu hanya mampu tumbuh sebesar 4,26 persen.

Pertumbuhan Ekonomi seluruh provinsi di Pulau Kalimantan dalam kurun waktu tahun 2015-2020 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas, dimana seluruh provinsi pada regional Kalimantan pada akhir periode tahun 2019 meningkat dari angka tahun 2015, namun pada tahun 2020 nilai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah berkontraksi hingga -1.4. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi virus Covid-19 yang berkepanjangan. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami persentase terendah diantara provinsi lainnya di Pulau Kalimantan yaitu pada angka -2.85. Namun Kalimantan Barat juga mengalami angka paling rendah yaitu -1.82. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tertinggi ada di Kalimantan

Tengah pada tahun 2020 dengan angka -1.4 persen



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS RI, 2020

Gambar 2. 42 Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2020 (Persen)

Jika dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, hanya Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu tahun 2015-2020 yang selalu diatas angka LPE nasional. Pada tahun 2015 LPE Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 7,01 persen dan nasional 4,88 persen, sedangkan tahun 2020 LPE Kalimantan Tengah mencapai -1,4 persen dan LPE nasional sebesar -2,07 persen.

Tabel 2. 20 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten/Kota PDRB	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kotawaringin Barat	10 113 252.72	10 704 711.74	11 432 688.68	12 173 280.82	12 877 922.93	13 004 133.55
Kotawaringin Timur	13 835 997.87	14 932 757.01	16 118 192.40	17 234 264.51	18 463 503.73	17 892 282.31
Kapuas	8 241 408.49	8 842 069.61	9 515 602.20	10 182 438.54	10 911 917.61	10 798 257.58
Barito Selatan	3 554 129.55	3 754 054.88	3 958 245.82	4 160 875.11	4 367 077.69	4 240 166.86
Barito Utara	5 696 534.64	6 008 577.32	6 369 617.42	6 748 596.68	7 114 706.19	6 955 410.03
Sukamara	2 243 805.86	2 381 089.90	2 530 336.18	2 686 337.80	2 848 957.20	2 905 498.92
Lamandau	2 882 153.34	3 074 911.37	3 280 863.81	3 505 611.04	3 746 506.75	3 815 647.04
Seruyan	4 943 248.29	5 196 334.78	5 465 511.08	5 750 252.31	6 042 859.74	5 908 284.83
Katingan	3 990 904.77	4 251 997.85	4 531 078.99	4 829 628.19	5 110 045.88	4 943 731.58
Pulang Pisau	2 682 572.35	2 845 265.45	3 011 275.19	3 190 169.67	3 393 285.88	3 484 581.28
Gunung Mas	2 678 716.13	2 866 189.97	3 056 181.14	3 266 084.54	3 501 688.36	3 619 286.71
Barito Timur	4 274 837.99	4 509 974.31	4 779 685.70	5 052 797.98	5 327 941.22	5 182 503.51
Murung Raya	4 684 225.04	4 953 891.01	5 244 659.43	5 538 869.35	5 868 150.19	5 722 378.50
Palangka Raya	8 286 033.41	8 859 548.23	9 479 165.59	10 156 319.93	10 884 597.34	10 594 467.68

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

PDRB ADHK Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan cenderung meningkat dari tahun 2016 – 2020. Kota Waringin Timur pada Tahun 2020 menjadi penyumbang PDRB ADHK terbesar yaitu 17.892.282,31 dibanding kabupaten/kota lain. Kotawaringin Barat menjadi terbesar kedua dengan nilai PDRB ADHK sebesar 13.004.133,55.

Kabupaten Sukamara dan Lamandau menjadi kabupaten penyumbang PDRB ADHK terendah dibanding kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, masing – masing nilainya sebesar 2.905498,92 dan 3.815.647,04. Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2020 sebagian besar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan akibat Covid 19, meskipun demikian ada Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan.

Tabel 2. 21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kotawaringin Barat	5,85	6,80	6,48	5,79	0,98
Kotawaringin Timur	7,93	7,94	6,92	7,13	-3,09
Kapuas	7,29	7,62	7,01	7,16	-1,04
Barito Selatan	5,63	5,44	5,12	4,96	-2,91
Barito Utara	5,48	6,01	5,95	5,42	-2,24
Sukamara	6,12	6,27	6,17	6,05	1,98
Lamandau	6,69	6,70	6,85	6,87	1,85
Seruyan	5,12	5,18	5,21	5,09	-2,23
Katingan	6,54	6,56	6,59	5,81	-3,25
Pulang Pisau	6,06	5,83	5,94	6,37	2,69
Gunung Mas	7,00	6,63	6,87	7,21	3,36
Barito Timur	5,50	5,98	5,71	5,45	-2,73
Murung Raya	5,76	5,87	5,61	5,94	-2,48
Palangka Raya	6,92	6,99	7,14	7,17	-2,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan cenderung menurun dari tahun 2016 – 2020. Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi menjadi yang terbesar yaitu 3.36 dibanding kabupaten/kota lain. Kabupaten Pulang Pisau menjadi terbesar kedua dengan laju pertumbuhan sebesar 2.69. Kabupaten Katingan dan Barito Selatan menjadi kabupaten yang mengalami laju pertumbuhan paling terendah dibanding kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, masing – masing nilainya sebesar -3.25 dan -2.23. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 sebagian besar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan akibat Covid 19

Tabel 2. 22 PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2019

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kotawaringin Barat	34,95	36,36	37,34	38,71	40,03	41,16
Kotawaringin Timur	30,88	32,47	34,23	36,13	37,76	39,59
Kapuas	22,27	23,68	25,19	26,89	28,57	30,41
Barito Selatan	25,78	26,93	28,16	29,42	30,65	31,92
Barito Utara	42,77	44,69	46,80	49,27	51,90	54,43
Sukamara	39,79	40,56	41,41	42,33	43,30	44,28
Lamandau	37,60	38,96	40,37	41,88	43,54	45,31
Seruyan	28,04	28,27	28,50	28,77	29,07	29,35
Katingan	23,76	24,90	26,11	27,41	28,80	30,06
Pulang Pisau	20,08	21,49	22,67	23,86	25,19	26,69
Gunung Mas	23,30	24,36	25,48	26,56	27,81	29,20
Barito Timur	36,81	37,60	38,56	39,75	40,89	41,99
Murung Raya	40,68	42,43	43,85	45,37	46,86	48,58
Palangka Raya	30,66	31,89	33,09	34,39	35,81	37,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan cenderung meningkat dari tahun 2016 – 2019. Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2019 memiliki PDRB Perkapita terbesar yaitu 54.43 dibanding kabupaten/kota lain. Kabupaten Murung Raya menjadi terbesar kedua dengan nilai PDRB Perkapita sebesar 48.58. Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi kabupaten yang memiliki PDRB Perkapita terendah dibanding kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, masing – masing nilainya sebesar 26.69 dan 41.99. Pertumbuhan PDRB Perkapita Tahun 2020 sebagian besar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan akibat Covid 19, meskipun demikian ada Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan.

2.2.2 Struktur Perekonomian

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kalimantan Tengah didominasi oleh empat kategori lapangan usaha, yakni: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Tengah.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kalimantan Tengah pada tahun 2020 dihasilkan oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 21,80 persen. Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 15,96 persen, disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan

Sepeda Motor sebesar 13,19 persen, sedangkan terdapat 8 (delapan) kategori yang mengalami kontraksi, yaitu: sektor Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan; dan Jasa Lainnya. Kontraksi terbesar terjadi pada kategori Jasa Perusahaan sebesar 13,74 persen. Sementara itu, kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 18,83 persen.

Tabel 2. 23 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Distribusi Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

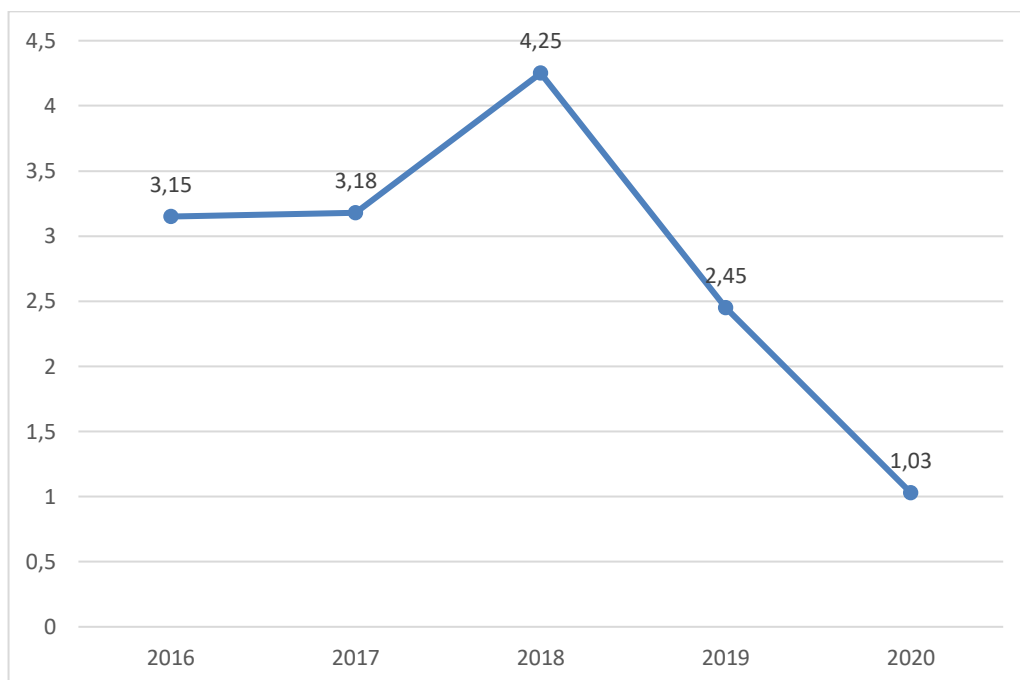
Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) & Distribusi (%)									
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.532,1	21,91	26.374,0	20,96	27.685	19,97	30.182,50	20,12	33.179,70	21,8
B. Pertambangan dan Penggalian	12.129,8	10,83	14.392,8	11,44	16.463,20	11,88	16.408,00	10,94	12.715,20	8,35
C. Industri Pengolahan	18.436,6	16,47	21.112,7	16,78	21.765,50	15,70	22.476,80	14,98	24.287,80	15,96
D. Pengadaan Listrik dan Gas	82,4	0,07	98,2	0,08	112,3	0,08	126,9	0,08	153	0,1
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	106,1	0,09	114,6	0,09	129,1	0,09	142,3	0,09	152,1	0,1
F. Konstruksi	10.952,8	9,78	12.331,4	9,80	13.507,6	9,74	15.051,2	10,02		
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.952,8	9,78	12.331,4	9,80	13.507,6	9,74	15.051,20	10,01	13.419,30	8,82
H. Transportasi dan Pergudangan	13.254,1	11,84	15.131,2	12,03	17.831,00	12,86	19.872,00	13,25	20.071,30	13,19
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.547,2	6,74	8.601,2	6,84	9.889,20	7,13	11.364,30	7,58	11.017,60	7,24
J. Informasi dan Komunikasi	2.161,4	1,93	2.346,3	1,86	2.613,30	1,89	2.904,10	1,94	2.826,40	1,86
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.096,8	0,98	1.229,5	0,98	1.376,20	0,99	1.514,7	1,01	1.653,60	1,09
L. Real Estate	3.616,6	3,23	4.147,5	3,30	4.409,90	3,18	4.793,60	3,2	5.271,60	3,46
M, N. Jasa Perusahaan	2.382,6	2,13	2.673,3	2,12	3.106,50	2,24	3.351,40	2,23	3.417,80	2,25
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	42,5	0,04	48,4	0,04	55,2	0,04	61,0	0,04	53,8	0,04
P. Jasa Pendidikan	6.933,1	6,19	7.766,3	6,17	8.864,00	6,39	9.792,50	6,53	11.153,90	7,33
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.163,6	1,93	2.390,8	1,90	2.761,4	1,99	3.072,1	2,04		
R, S, T, U. Jasa Lainnya	5.342,6	4,77	5.756,1	4,58	6.570,70	4,74	7.289,80	4,86	7.858,30	5,16
PDRB	2.163,6	1,93	2.390,8	1,90	2.756,30	1,99	3.057,90	2,04	3.433,70	2,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2020



2.2.3 Laju Inflasi

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, dan/atau menurunnya produksi, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, inflasi Provinsi Kalimantan Tengah berfluktuatif. Pada tahun 2017 laju inflasi sebesar 3,18 persen dan mengalami kenaikan menjadi 4,25 persen pada tahun 2018 dan 2,45 persen pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 kembali menurun sebesar 1,03 persen. Inflasi yang rendah dapat juga menjadi indikasi turunnya daya beli masyarakat, meskipun di sisi lain angka ini mengasumsikan rendahnya kenaikan harga. Diharapkan, pemerintah daerah terus mendorong kestabilan inflasi yang akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Gambar 2. 43 Laju Inflasi Tahunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020 (Persen)

Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari realisasi inflasi Kota Palangka Raya dan realisasi inflasi Kota Sampit. Inflasi tahunan tertinggi sepanjang 5 (lima) tahun terakhir terjadi pada tahun 2018, dimana inflasi tahunan Sampit sebesar 6,02 persen dan inflasi tahunan Kota Palangka Raya sebesar 3,68 persen sehingga inflasi Kalimantan Tengah mencapai 4,25 persen, angka tersebut masih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 8,36 persen. Sedangkan pada untuk 3 (tiga) tahun terakhir inflasi Kalimantan Tengah berkisar 2–4,5 persen sedangkan untuk tahun 2020 menurun dimana

inflasi tahunan Kota Palangkaraya sebesar 0,71 persen dan inflasi tahunan Kota Sampit sebesar 1,62 persen. Kedua kota tersebut merupakan Kota Indeks Harga Konsumen yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penghitungan laju inflasi. Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, stakeholder yang menangani pengendalian inflasi daerah harus memiliki berbagai inovasi program dan kegiatan dalam menurunkan fluktuasi harga yang terjadi dengan tetap tidak mengurangi daya beli masyarakat.

Tabel 2. 24 Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 (Persen)

Keterangan (Inflasi-yoy)	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi Tahunan Palangka Raya	1,91	3,11	3,68	2,70	0,71
Inflasi Tahunan Sampit	2,46	3,29	6,02	2,02	1,62
Inflasi Kalimantan Tengah	3,15	3,18	4,25	2,45	1,03
Inflasi Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

2.2.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan klasik dalam wilayah administrasi pemerintahan dimana fenomena tersebut dikatakan akan selalu ada selama suatu regional berdiri. Oleh karenanya, dalam setiap rumusan perencanaan pembangunan daerah selalu tercantum kebijakan terkait pengentasan kemiskinan sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Untuk mengentaskan kemiskinan dibutuhkan pemulihan kondisi ekonomi, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang membaik, diharapkan akan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat miskin, selain itu dapat tercipta.

Secara umum, angka kemiskinan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara bertahap namun konsisten. Berdasarkan kondisi tingkat kemiskinan bulan september dari tahun ke tahun, pada tahun 2014, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 6,07 persen secara konsisten menurun landai hingga akhirnya pada periode september tahun 2019 mencapai 4,81 persen.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, berdasarkan angka kemiskinan

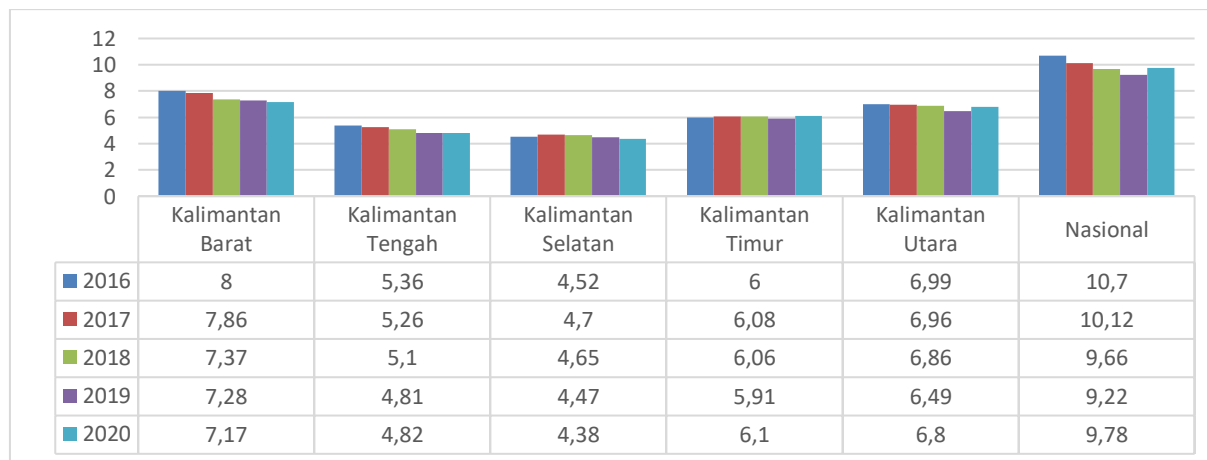
tahun 2019, tingkat kemiskinan tertinggi berada di wilayah Kabupaten Seruyan sebesar 7,19 persen. Namun, jika dilihat angka absolut jumlah penduduk miskin, sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yakni sebanyak 27,38 ribu jiwa. Dengan Adanya Penurunan angka kemiskinan menandakan sudah mulai berjalannya program-program yang mendukung pengentasan kemiskinan. Semakin tinggi angka penurunannya maka indikator keberhasilan program-program yang ada dikatakan berhasil.

Tabel 2. 25 Garis Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 serta Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dan 2020

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		Tingkat Kemiskinan		Jumlah Penduduk Miskin (000)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Kotawaringin Barat	360.942	397.883	4,11	3,59	12,76	11,46
2	Kotawaringin Timur	416.777	446.039	5,9	5,62	27,38	26,64
3	Kapuas	305.809	332.999	5,09	5,04	18,23	18,17
4	Barito Selatan	408.072	433.787	4,39	4,45	5,99	6,12
5	Barito Utara	472.552	504.430	4,95	5,17	6,46	6,78
6	Sukamara	469.353	522.601	3,16	3,23	201	2,13
7	Lamandau	430.656	479.514	3,01	3,09	2,47	2,61
8	Seruyan	454.971	504.264	7,19	6,85	14,66	14,53
9	Katingan	434.609	474.056	5,02	4,79	8,51	8,23
10	Pulang Pisau	365.674	395.989	4,24	4,09	5,39	5,21
11	Gunung Mas	430.045	438.881	4,91	4,75	5,86	5,78
12	Barito Timur	487.185	517.183	6,32	6,09	7,97	7,88
13	Murung Raya	462.334	492.693	6	5,85	7,21	7,18
14	Kota Palangka Raya	379.420	435.008	3,35	3,44	9,69	10,23
Kalimantan Tengah		438.248	485.635	4,98	4,82	134,594	132,94
Indonesia						25.144,72	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

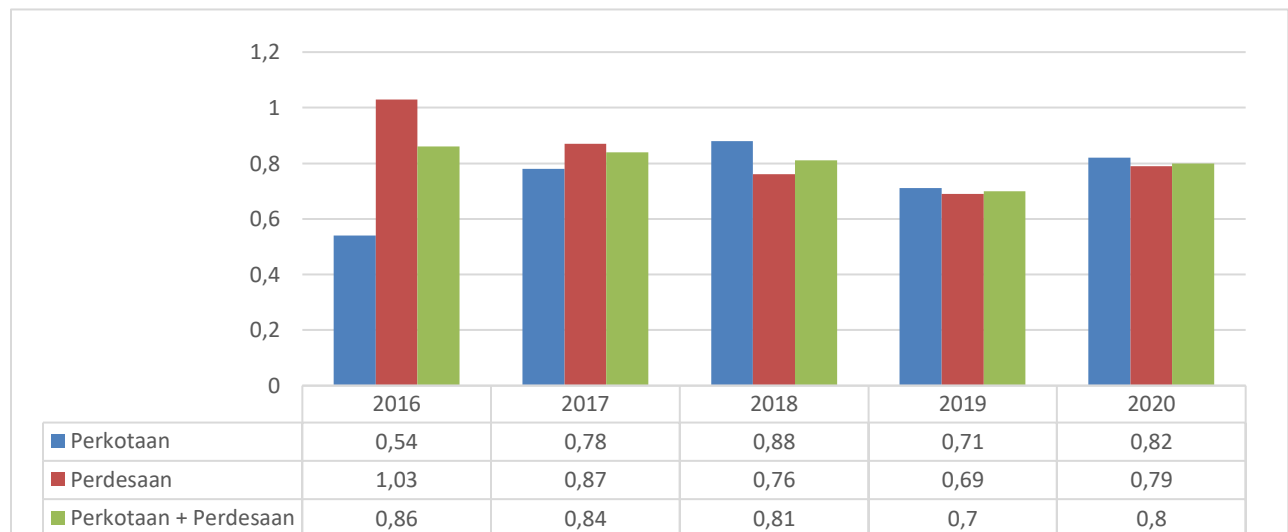
Berikut ini disajikan gambar perkembangan tingkat kemiskinan seluruh provinsi di Kalimantan periode 2015-2020.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Gambar 2. 44 Tingkat Kemiskinan di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2016-2020 (Persen)

Tingkat kemiskinan seluruh provinsi di Pulau Kalimantan pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan perbaikan dengan persentase angka yang menurun landai hingga akhir periode kecuali Provinsi Kalimantan Utara. Tingkat Kemiskinan Kalimantan Barat mengalami persentase tertinggi, sedangkan Kalimantan Selatan mengalami persentase terendah di regional Kalimantan. Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional pada periode tahun 2016-2020 selalu dibawah tingkat kemiskinan nasional. Pada Tahun 2016 tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 5,36 persen dan nasional 11,13 persen, sedangkan pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah menurun menjadi 4,82 persen dan nasional sebesar 9,78 persen. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, berdasarkan angka kemiskinan tahun 2020, tingkat kemiskinan tertinggi berada di wilayah Kabupaten Seruyan sebesar 6,85 persen. Namun, jika dilihat angka absolut jumlah penduduk miskin, sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yakni sebanyak 26,64 ribu jiwa. Indikator kemiskinan lainnya yaitu indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada perkotaan dan perdesaan Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2016–2020 dimana pada angka 0,86 di tahun 2016 dan mengalami penurunan di tiap tahunnya sampai di angka 0,8 di tahun 2020.



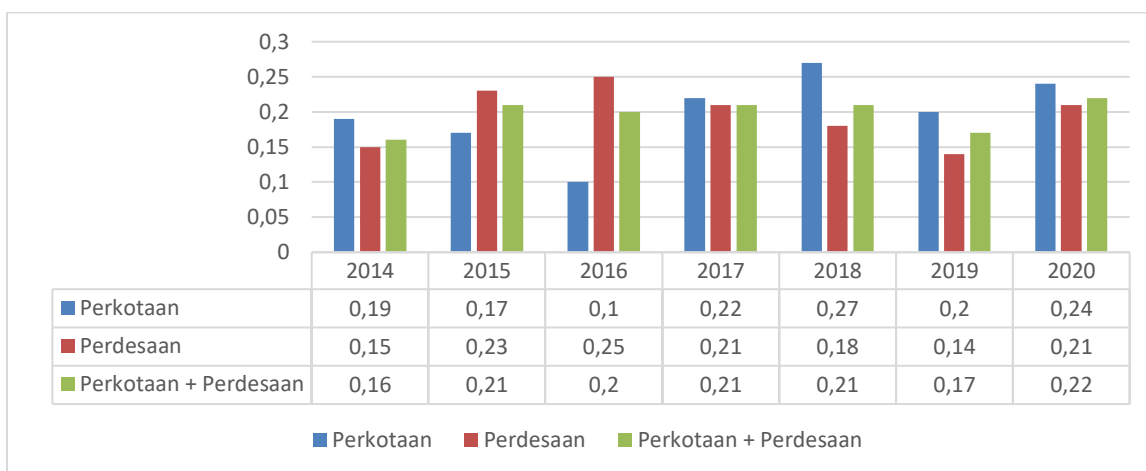
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Gambar 2. 45 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 (Persen)

Dari gambar di atas terlihat pada indeks keparahan kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan dari tahun 2014 dengan indeks 0,19, namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan indeks 0,1 di tahun 2016 menjadi 0,22 di tahun 2017. Namun selang waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2017 ke tahun 2019 indeks keparahan kemiskinan perkotaan mengalami

penurunan dari yang semula 0,27 menjadi 0,15. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan pada pedesaan juga sempat mengalami peningkatan pada tahun 2016 ke tahun 2017 dimana pada tahun 2016 indeks keparahan kemiskinan mencapai angka 0,20 meningkat menjadi 0,21 di tahun 2017. Pada 2 (dua) tahun terakhir di tahun 2018 indeks tersebut mengalami penurunan dari angka 0,21 menjadi angka 0,17 di tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan kembali mengalami kenaikan menjadi 0,22.

Dari data indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tersebut dapat diindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin masih melebar karena kembali mengalami kenaikan di tahun 2020.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Gambar 2. 46 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2020 (Persen)

Dari data indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tersebut dapat diindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin masih melebar namun sudah menurun meskipun tidak terlihat secara signifikan.

Tabel 2. 26 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota/Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kotawaringin Barat	293 436,00	319 064,00	338 230,00	334 337,00	360 942,00	397 883,00
Kotawaringin Timur	325 234,00	353 640,00	381 776,00	393 474,00	416 777,00	446 039,00
Kapuas	252 866,00	266 943,00	283 222,00	291 820,00	305 809,00	332 999,00
Barito Selatan	333 917,00	355 341,00	377 932,00	389 405,00	408 072,00	433 787,00
Barito Utara	408 241,00	420 100,00	446 807,00	450 936,00	472 552,00	504 430,00
Sukamara	384 739,00	418 026,00	427 101,00	442 086,00	469 353,00	522 601,00
Lamandau	350 294,00	380 888,00	409 912,00	411 088,00	430 656,00	479 514,00
Seruyan	357 090,00	387 592,00	415 798,00	428 539,00	454 971,00	504 264,00
Katingan	356 695,00	387 848,00	412 113,00	420 418,00	434 609,00	474 056,00
Pulang Pisau	314 673,00	335 165,00	347 878,00	349 978,00	365 674,00	395 989,00
Gunung Mas	356 866,00	365 198,00	388 415,00	388 964,00	403 045,00	438 881,00

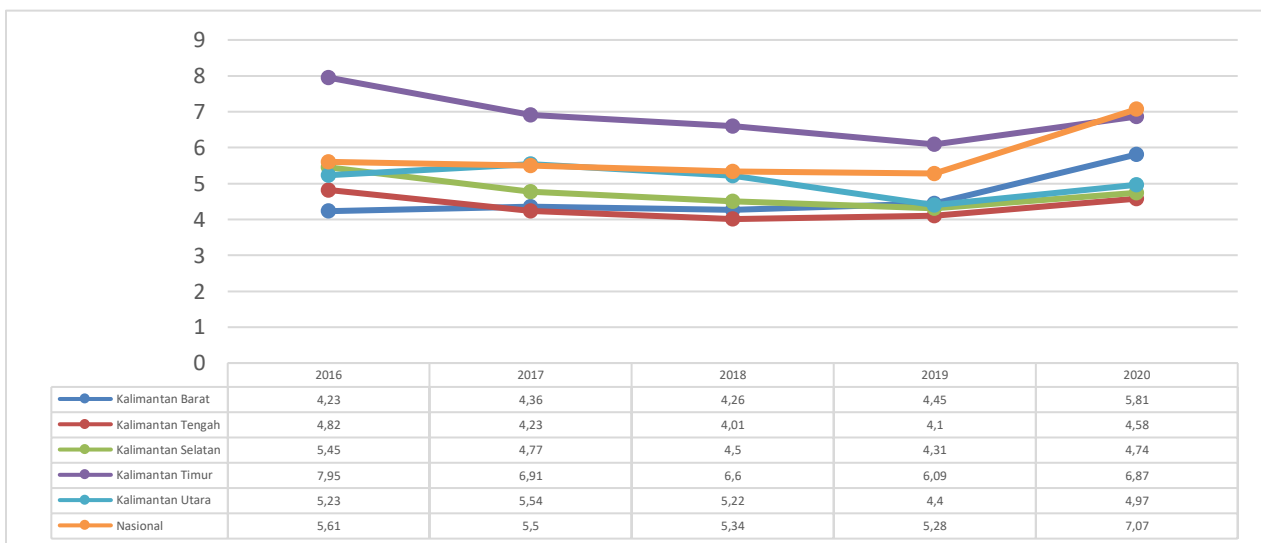
Barito Timur	415 710,00	442 068,00	467 091,00	478 510,00	487 185,00	517 183,00
Murung Raya	378 062,00	402 682,00	421 903,00	442 639,00	462 334,00	492 693,00
Palangka Raya	307 796,00	324 082,00	345 417,00	353 853,00	379 420,00	435 008,00
Kalimantan Tengah	349 727,00	373 484,00	401 537,00	413 529,00	438 248,00	485 635,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

2.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Memperhatikan angka TPT Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) tahun terakhir, perlu mendapat perhatian khusus oleh stakeholders ketenagakerjaan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan, utamanya dalam mengatasi jumlah pengangguran. Adanya penurunan angka TPT pada tahun 2017 dan 2018, hal itu berarti terdapat banyak lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, swasta dan pihak lainnya. Namun berdasarkan data BPS, Agustus 2019 TPT meningkat 0,09% dari Agustus 2018. Peningkatan ini bisa mengindikasikan bahwaterdapat penambahan jumlah angkatan kerja yang belum dapat terserap oleh lapangan pekerjaan. Jumlah angkatan kerja Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2020 sebanyak 1.381.442 jiwa, naik 7015 orang dibanding Agustus 2019. Komponen pembentuk Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 sebanyak 1.318.133 orang, turun 821 orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 63.309 orang, mengalami peningkatan sebanyak 7836 orang dibanding tahun sebelumnya.

Dilihat dari wilayah tempat tinggalnya, TPT di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di wilayah perdesaan. Pada Agustus 2020, TPT di wilayah perkotaan sebesar 5,13 persen, sedangkan TPT di wilayah perdesaan hanya 4,20 persen.



Gambar 2. 47 Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka seluruh provinsi di Pulau Kalimantan

pada periode tahun 2016-2020 berfluktuasi dengan cenderung menurun sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas, dimana seluruh provinsi regional Kalimantan pada akhir periode tahun 2020 menurun dari angka tahun 2016. Tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Tengah mengalami persentase terendah diantara provinsi lainnya di Pulau Kalimantan yaitu pada angka 4,82 persen di tahun 2020 menurun 0,24 persen di tahun 2020 menjadi 4,58 persen. Sedangkan TPT tertinggi ada di Kalimantan Timur pada angka 7,95 persen di tahun 2016 dan 6,87 persen di tahun 2020 atau menurun 1,08 persen. Namun angka TPT seluruh provinsi di Pulau Kalimantan pada periode tahun 2016-2020 berada dibawah angka nasional.

Jika dibandingkan dengan nasional, TPT di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 selalu dibawah TPT nasional. Pada tahun 2016, TPT Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 4,82 persen turun ke 4,58 persen pada tahun 2020, sementara TPT nasional tahun 2015 mencapai 5,61 persen naik menjadi 7,07 persen pada tahun 2020.

Tabel 2. 27 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
Kalimantan Tengah	4,23	4,01	4,10
Kotawaringin Barat	2,17	3,01	2,62
Kotawaringin Timur	4,92	4,55	4,47
Kapuas	5,42	4,08	5,37
Barito Selatan	4,09	4,33	4,18
Barito Utara	5,19	4,34	3,92
Sukamara	4,83	4,39	4,90
Lamandau	1,35	2,42	2,34
Seruyan	4,79	4,40	4,49
Katingan	3,81	4,78	5,45
Pulang Pisau	1,62	2,15	1,74
Gunung Mas	1,17	2,19	2,64
Barito Timur	4,68	3,50	2,89
Murung Raya	2,78	3,37	3,07
Palangka Raya	7,26	5,81	5,78

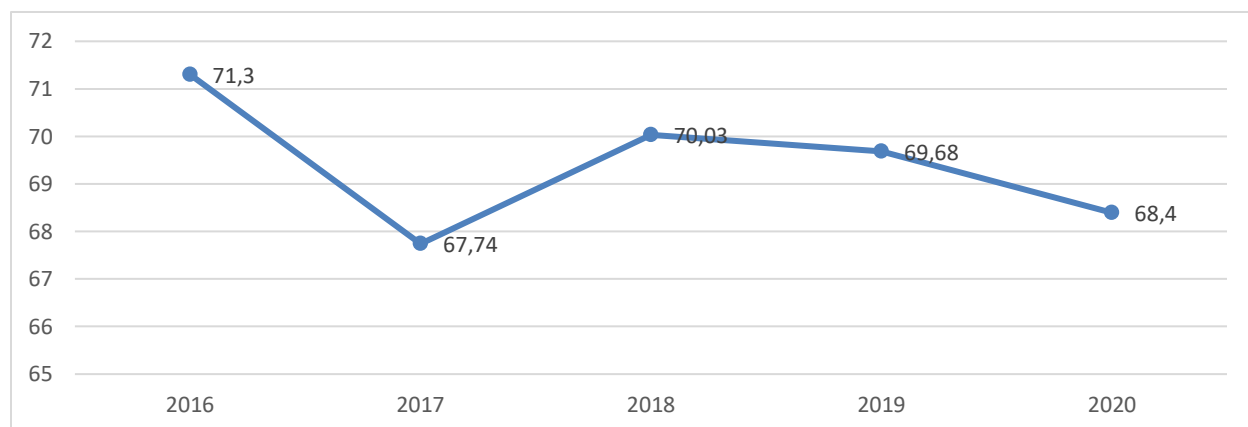
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2016 tercatat TPAK Kalimantan Tengah mencapai 71,3 turun menjadi 68,4 pada tahun 2020. Walau demikian, pada tahun 2018 sempat mengalami

peningkatan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2020 tercatat sebesar 68,4 persen, menurun sebesar 1,28 poin dibanding setahun yang lalu. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2019, TPAK laki-laki sebesar 85,84 persen sementara TPAK perempuan hanya 51,60 persen. Perkembangan TPAK Kalimantan Tengah periode 2016-2020 disajikan pada gambar di bawah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Gambar 2. 48 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

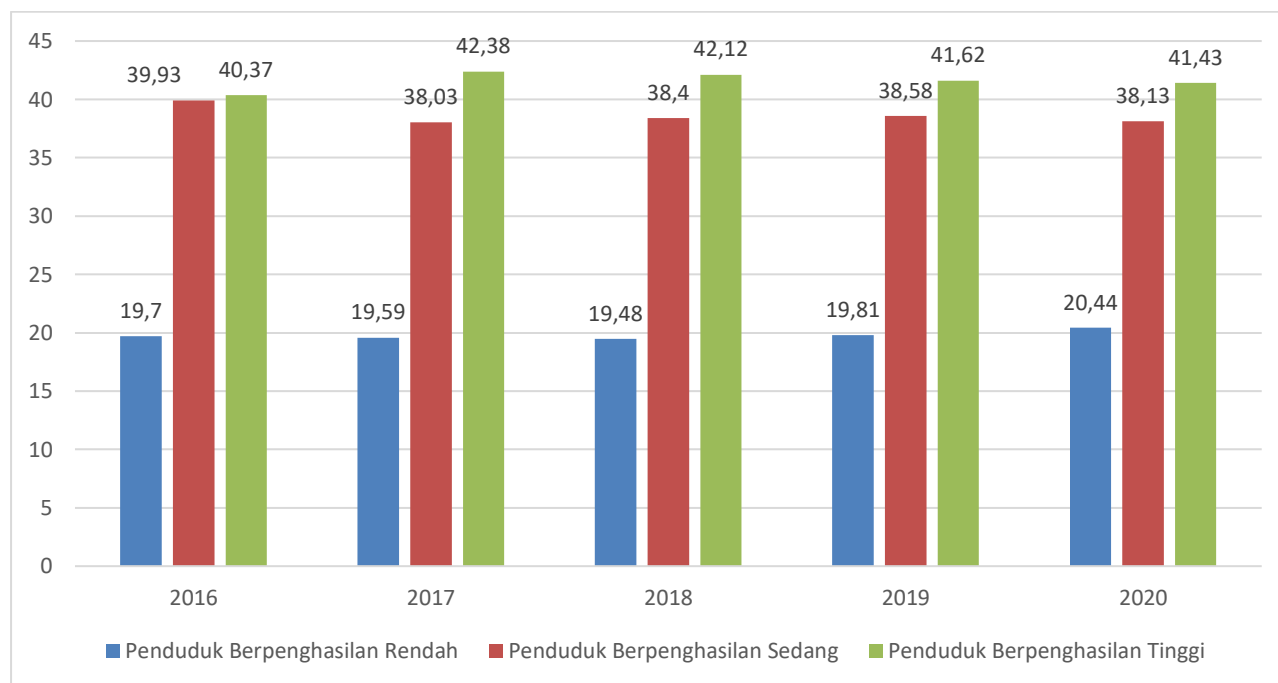
Tabel 2. 28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	2015	2017	2018	2019
Kalimantan Tengah	71,11	67,74	70,03	69,68
Kotawaringin Barat	71,96	68,44	72,28	73,43
Kotawaringin Timur	67,28	63,21	68,51	67,45
Kapuas	70,62	67,60	69,55	67,37
Barito Selatan	67,99	61,71	62,28	69,68
Barito Utara	74,29	69,05	73,97	69,79
Sukamara	71,60	73,61	74,18	73,37
Lamandau	71,76	73,00	67,93	68,65
Seruyan	74,23	72,86	74,90	71,66
Katingan	72,20	65,97	69,49	70,79
Pulang Pisau	74,48	74,72	70,98	75,31
Gunung Mas	77,44	74,87	75,76	73,78
Barito Timur	80,43	74,11	79,09	74,89
Murung Raya	71,73	68,83	69,58	66,49
Palangka Raya	65,72	62,40	62,99	64,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

2.2.7 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Data menunjukkan peningkatan distribusi pendapatan dari kategori 40% penduduk berpenghasilan rendah tahun 2019 yaitu 19,81 meningkat sebesar 0,63 persen pada tahun 2020 yaitu 20,44, sedangkan kriteria 40% penduduk berpenghasilan sedang pada tahun 2019 yaitu 38,58 menurun 0,40 persen pada tahun 2020 menjadi 38,13 dan terakhir kriteria pada 20% penduduk berpenghasilan tinggi tahun 2019 adalah 41,62 menurun sebesar 0,19 persen pada tahun 2020 menjadi 41,43. Berdasarkan distribusi pendapatan tersebut dapat dilihat ketimpangan pendapatan penduduk dari tahun 2016- 2020. Pada gambar di bawah dapat dilihat distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.



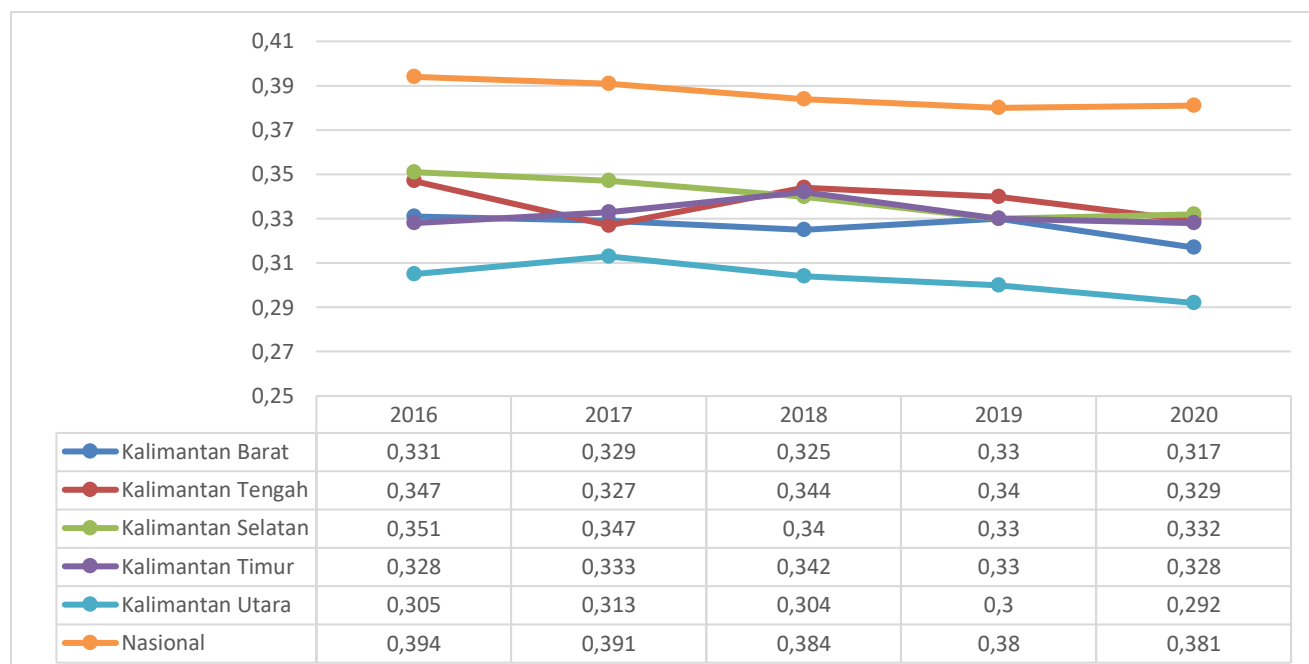
Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2020

Gambar 2. 49 Distribusi Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2015-2019

2.2.8 Indeks Gini

Distribusi pendapatan adalah ukuran yang mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah terhadap penduduknya. Distribusi pendapatan merupakan kriteria yang mengindikasikan mengenai penyebaran pembagian pendapatan/kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya dalam satu wilayah. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan, antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Melihat angka indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015- 2019 sebagaimana gambar di bawah, terjadi fluktuasi yang cenderung meningkat. Pada tahun 2016 indeks gini meningkat menjadi 0,347 dari semula 0,300 di tahun 2015. Pada tahun-tahun berikutnya mengalami fluktuasi dan pada tahun 2019 mencapai 0,340.



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2020

Gambar 2. 50 Indeks Gini Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2016-2020

Gini Ratio seluruh provinsi di Pulau Kalimantan pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas, dimana Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan berfluktuasi cenderung tetap. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur berfluktuasi cenderung meningkat dan hanya Kalimantan Utara yang berfluktuasi cenderung menurun

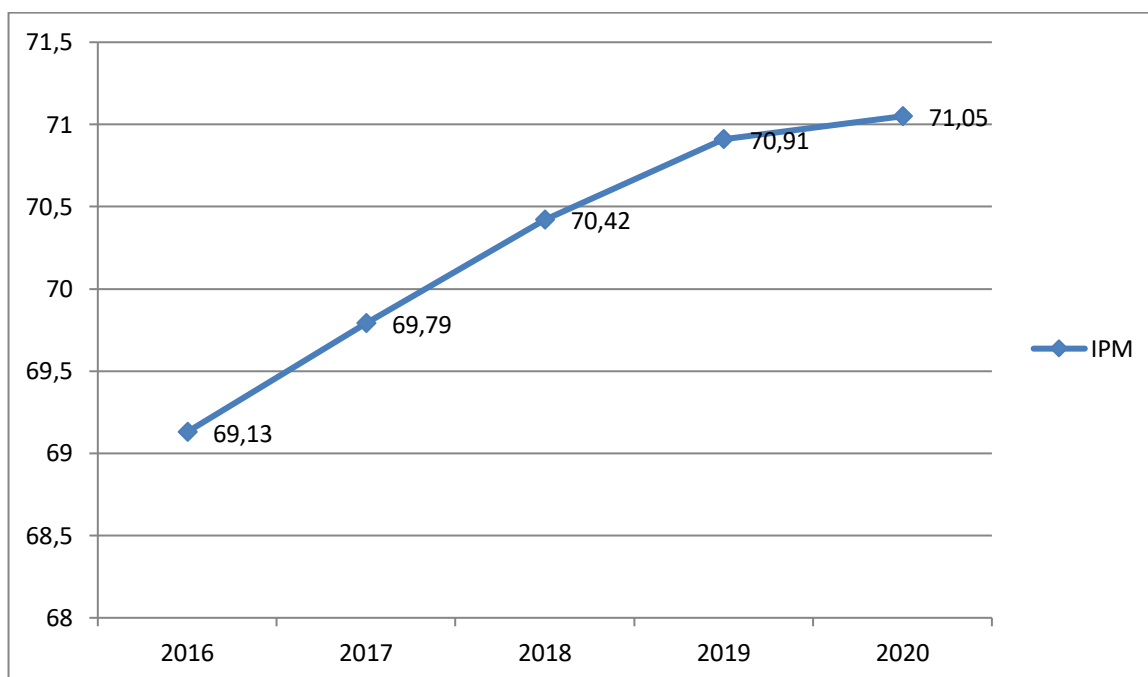
Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional, seluruh provinsi di Pulau Kalimantan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 masih dibawah Gini Ratio nasional. Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 selalu dibawah Gini Ratio nasional. Pada tahun 2016 Gini Ratio Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 0,347 dan nasional sebesar 0,394. Sementara pada tahun 2020 tercatat indeks gini Kalimantan Tengah sebesar 0,329 yang lebih rendah dibanding nasional 0,381.

2.2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah. Sebagai alat evaluasi pembangunan manusia

digunakan indeks komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah) serta ekonomi masyarakat (pengeluaran per kapita yang disesuaikan).

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2016, IPM Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 69,13 dan seiring berjalannya waktu IPM terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 71,05. Nilai IPM 71,05 berarti masuk kategori Tinggi. Peningkatan IPM yang konsisten setiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan komponen-komponen pembentuknya..



Gambar 2. 51 Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS RI, 2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh provinsi di Pulau Kalimantan pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang positif, dimana seluruh provinsi pada regional Kalimantan pada akhir periode tahun 2020 meningkat dari angka tahun 2016. IPM Kalimantan Barat mengalami persentase terendah diantara provinsi lainnya di Pulau Kalimantan yaitu 65,88 di tahun 2016 meningkat 1,78 poin di tahun 2020 menjadi 67,66. Sedangkan IPM tertinggi ada di Kalimantan Timur pada angka 74,59 di tahun 2016 dan 76,24 di tahun 2020 atau meningkat 1,65 poin.

Jika dibandingkan dengan IPM nasional, hanya Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2016-2020 yang masih diatas angka nasional. IPM di Provinsi Kalimantan Tengah juga selalu dibawah IPM nasional. Pada tahun 2016, IPM Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 69,13 persen meningkat ke 1,78 persen pada tahun 2020 menjadi 70,05 persen, sementara

IPM nasional tahun 2016 mencapai 70,18 persen meningkat menjadi 1,76 persen pada tahun 2019 menjadi 71,94 persen.

Berdasarkan data tahun 2020, dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah yang masuk kategori IPM tinggi sebanyak 7 kabupaten dan Kota Palangka Raya masuk kategori Sangat Tinggi. Sisanya termasuk pada kategori IPM Sedang. Secara rinci capaian IPM dan komponen pembentuknya menurut kabupaten/kota pada tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 29 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	IPM	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang)
1	Kotawaringin Barat	72,87	70,59	12,72	8,42	13.109
2	Kotawaringin Timur	71,31	69,85	12,84	8,13	11.854
3	Kapuas	69,48	68,74	12,92	7,59	11.015
4	Barito Selatan	70,22	67,09	12,55	8,82	11.486
5	Barito Utara	70,59	71,3	12,49	8,71	9.936
6	Sukamara	68,03	71,53	12,12	8,01	8.674
7	Lamandau	70,51	69,36	12,48	8,42	11.190
8	Seruyan	67,58	69,26	11,99	7,94	9.370
9	Katingan	68,68	65,78	12,67	8,67	10.548
10	Pulang Pisau	68,45	68,04	12,41	8,18	10.047
11	Gunung Mas	70,81	70,4	11,78	9,14	10.793
12	Barito Timur	71,39	68,22	12,83	9,21	11.319
13	Murung Raya	67,89	69,51	11,75	7,54	10.419
14	Kota Palangka Raya	80,77	73,21	14,95	11,52	14.055
Kalimantan Tengah		71,05	69,74	12,66	8,59	11.154

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2020

2.2.10 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Secara umum, pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sampai dengan tahun 2020, Angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 12,66 tahun. Ini berarti penduduk Kalimantan Tengah usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,66 tahun atau setara dengan Diploma I.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2016, rata-rata lama sekolah selama 8,13 tahun dan setelah lima tahun berselang angka tersebut beranjak naik hingga 8,59 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat usia 15 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah hingga jenjang pendidikan SMP kelas 3 semester kedua.

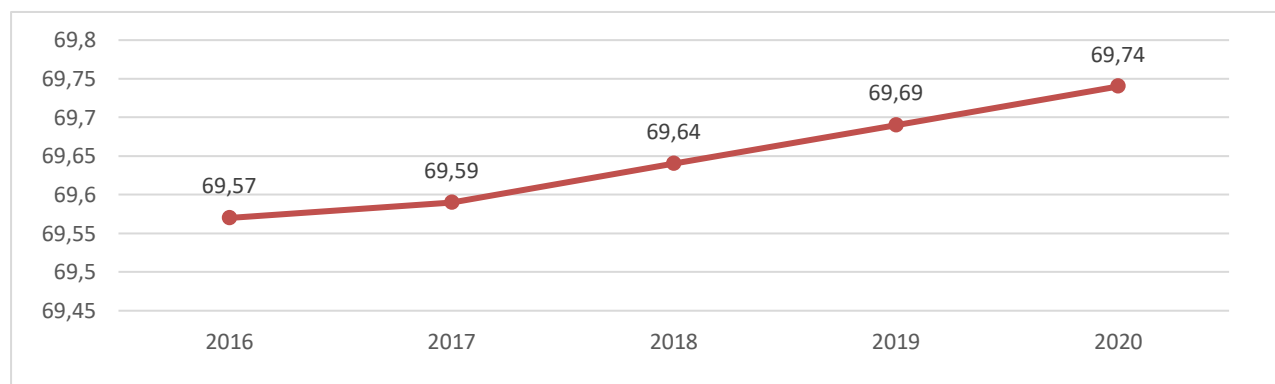
Tabel 2. 30 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019

No	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
1	2016	12,33	8,13
2	2017	12,45	8,29
3	2018	12,55	8,37
4	2019	12,57	8,51
5	2020	12,66	8,59

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2020

2.2.11 Angka Harapan Hidup

Capaian di bidang kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena perbaikan-perbaikan sarana prasarana fasilitas kesehatan diiringi dengan penambahan kuantitas maupun kualitas sumber daya kesehatan baik dokter, tenaga medis, dan lainnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pencapaian positif di bidang kesehatan ini dapat dilihat dari trend kenaikan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang semakin meningkat pada 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2016, angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 69,57 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2020 mencapai 69,74 tahun. Hal tersebut berarti bayi yang baru dilahirkan mencapai usia hidup 69-70 tahun. Dengan demikian Angka harapan hidup rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah mencapai angka 69-70 tahun dari setiap bayi yang baru dilahirkan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah yang menggambarkan kenaikan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun periode 2016-2020.



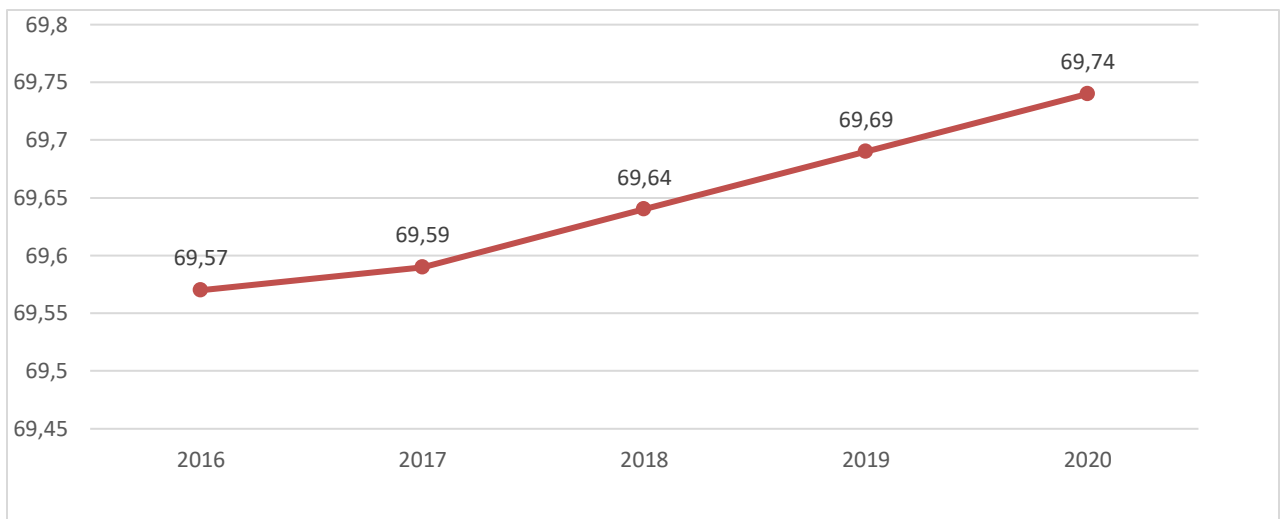
Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2020

Gambar 2. 52 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 (Tahun)

2.2.12 Angka Harapan Hidup

Capaian di bidang kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena perbaikan-perbaikan sarana prasarana fasilitas kesehatan diiringi dengan penambahan kuantitas maupun kualitas sumber daya kesehatan baik dokter, tenaga medis, dan lainnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pencapaian positif di bidang kesehatan ini dapat dilihat dari trend

kenaikan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang semakin meningkat pada 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2016, angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 69,57 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2020 mencapai 69,74 tahun. Hal tersebut berarti bayi yang baru dilahirkan mencapai usia hidup 69-70 tahun. Dengan demikian Angka harapan hidup rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah mencapai angka 69-70 tahun dari setiap bayi yang baru dilahirkan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah yang menggambarkan kenaikan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun periode 2016-2020.



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2020

Gambar 2. 53 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 (Tahun)

2.2.13 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pembangunan manusia sering dibahas mengenai perbedaan gender, dimana berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender, dimana berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Indikator makro yang dapat mengukur sejauh mana upaya pengarusutamaan gender di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks pembangunan merupakan ukuran yang dapat melihat sejauh mana kualitas pembangunan manusia dalam hal ini perempuan dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Nilai IPG Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun bila dibandingkan antara tahun 2016 dan 2020, maka IPG Kaliman Tengah mengalami penurunan yaitu dari 89,09 menjadi 89,03. Nilai IPG di bawah 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan di Kalimantan tengah masih di bawah laki-laki. Sementara itu, dibandingkan dengan nasional, IPG Provinsi Kalimantan Tengah selalu berada di bawah nilai IPG

nasional. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah. Selama periode 2016-2020, IPG nasional mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 telah mencapai 91,06.

Tabel 2. 31 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kotawaringin Barat	-	91,76	91,76	91,69	91,67
Kotawaringin Timur	-	87,73	87,74	87,91	88,12
Kapuas	-	96,59	96,26	95,51	95,35
Barito Selatan	-	93,02	92,35	92,04	91,92
Barito Utara	-	85,16	85,89	87,15	87,26
Sukamara	-	91,24	91,45	90,84	91,01
Lamandau	-	91,97	91,88	91,90	91,94
Seruyan	-	88,64	89,46	89,44	89,36
Katingan	-	85,51	85,70	85,57	85,41
Pulang Pisau	-	91,70	91,72	92,12	92,06
Gunung Mas	-	91,74	91,89	92,10	92,09
Barito Timur	-	88,36	88,41	88,76	88,74
Murung Raya	-	82,92	83,23	83,41	83,56
Kota Palangka Raya	-	94,42	94,66	94,96	95,02
KALIMANTAN TENGAH	89,07	88,91	89,13	89,09	89,03
NASIONAL	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Indikator lain yang penting untuk menggambarkan kinerja pengarusutamaan gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Melalui IDG, kita dapat melihat sejauhmana perempuan terlibat dalam bidang ekonomi dan politik. Nilai IDG Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) mengalami peningkatan. Demikian pula bila dibandingkan dengan nasional, maka IDG Kalimantan Tengah lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Tabel 2. 32 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kotawaringin Barat	-	63,31	59,72	64,11	64,53
Kotawaringin Timur	-	67,87	67,35	67,36	69,52
Kapuas	-	71,50	75,34	73,81	73,33
Barito Selatan	-	81,67	83,19	86,33	86,05
Barito Utara	-	86,20	84,52	85,35	85,02
Sukamara	-	59,78	65,77	66,33	66,02
Lamandau	-	54,13	54,98	71,06	71,26
Seruyan	-	70,13	70,07	62,83	63,2
Katingan	-	66,87	73,32	66,57	66,36
Pulang Pisau	-	70,14	74,13	70,36	70,63
Gunung Mas	-	78,74	82,73	88,91	88,22
Barito Timur	-	76,46	76,50	82,67	81,98
Murung Raya	-	66,93	67,38	68,10	68,21

Kota Palangka Raya	-	79,94	80,61	78,95	79,12
Kalimantan Tengah	78,23	79,36	77,03	83,20	82,41
Nasional	71,39	71,74	72,10	75,24	75,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Gambaran umum keadaan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain tercermin dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan rasio guru terhadap murid. Terdapat 2 (dua) jenis APS yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu persentase jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu serta Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Tabel 2. 33 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	2019			2020		
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
7-12	0.03	99.66	0.31	0.31	99.49	0.2
13-15	0.21	94.09	5.7	0.16	94.86	4.98
16-18	0.19	66.95	32.86	0.47	66.92	32.61
19-24	0.38	23.98	75.64	0.26	24.26	75.48
7-24	0.19	69.43	30.38	0.3	69.51	30.2

Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan juga perlu untuk meningkatkan kompetensi guru atau tenaga pengajarnya. Sebagian besar guru di Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki kompetensi minimal DIV/S1, namun masih banyak yang belum tersertifikasi. Banyaknya guru yang belum tersertifikasi ini salah satunya dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk biaya pelatihan bagi guru sebelum sertifikasi.

Tabel 2. 34 Jumlah Guru/Pendidik yang Berkualifikasi DIV/S1 di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

JENJANG	BELUM DIV/S1		SUDAH DIV/S1	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
PAUD	3.663	50,2	3.634	49,8
SD	3.378	14,8	696	85,2
SMP	603	6,8	822	93,2
SMA	134	3,0	402	97,0

JENJANG	BELUM DIV/S1		SUDAH DIV/S1	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
SMK	110	4,1	239	95,9
SLB	28	10,5	24	89,5

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019

Tabel 2. 35 Jumlah Guru/Pendidik yang Telah Tersertifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

JENJANG	BELUM SERTIFIKASI		SUDAH SERTIFIKASI	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
PAUD	5.940	81,4	1.357	18,6
SD	11.914	52,2	10.910	47,8
SMP	5.229	59,0	3.633	41,0
SMA	2.396	53,8	2.057	46,2
SMK	1.659	61,7	1.030	38,3
SLB	202	75,6	65	4,4

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019

Selain tenaga pendidiknyanya, akreditasi sekolah juga dapat menggambarkan kualitas dari sekolah tersebut. Semakin baik akreditasinya, maka bisa dikatakan system maupun sarana prasarana pembelajaran dalam sekolah tersebut semakin baik. Jumlah satuan pendidikan yang telah terakreditasi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.36 Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH	AKREDITASI A		AKREDITASI B		AKREDITASI C		BELUM AKREDITASI	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
PAUD	2.622	39	1,5	669	25,5	509	19,4	1.403	53,5
SD	2.634	192	7,3	956	36,3	1.320	50,1	166	6,3
SMP	834	95	11,4	298	35,7	383	45,9	58	7,0
SMA	241	58	24,0	101	42,1	72	29,8	10	4,0
SMK	137	21	15,3	51	37,2	42	30,7	23	16,8
JUMLAH	6.468	405		2.075		2.325		1.660	

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019

Tabel 2.37 Jumlah Satuan Pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Satuan Pendidikan					
	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Kapuas	518	401	120	21	18	2
Barito Selatan	93	171	62	24	5	2
Barito Utara	189	175	39	15	8	1
Kotawaringin Timur	288	369	108	22	24	5
Kotawaringin Barat	163	189	61	13	17	2
Katingan	166	209	80	22	9	2
Seruyan	141	166	66	13	6	1
Sukamara	77	50	14	5	3	-
Lamandau	131	110	41	11	11	1
Gunung Mas	141	177	59	14	4	1
Pulang Pisau	145	180	43	19	8	1
Murung Raya	212	173	65	24	2	2
Barito Timur	183	146	28	11	6	1
Kota Palangka Raya	175	118	48	27	16	3

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019

Tabel 2. 38 Jumlah Pendidik per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidik					
	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Kapuas	1.329	3.339	1.104	425	293	17
Barito Selatan	363	1.571	530	340	130	21
Barito Utara	630	1.685	578	290	181	22
Kotawaringin Timur	902	3.164	1.112	469	454	28
Kotawaringin Barat	562	1.606	745	307	321	25
Katingan	355	1.399	675	329	136	17
Seruyan	356	1.456	635	194	132	10
Sukamara	201	521	219	129	72	-
Lamandau	322	822	311	140	107	11
Gunung Mas	303	1.453	553	268	68	6
Pulang Pisau	379	1.428	469	315	118	11
Murung Raya	381	1.284	524	272	30	15
Barito Timur	454	1.449	539	264	175	7
Kota Palangka Raya	760	1.647	868	711	472	77

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019

Tabel 2. 39 Jumlah Peserta Didik per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Peserta Didik					
	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Kapuas	15.150	34.793	12.549	5.959	3.608	71
Barito Selatan	3.271	13.214	5.599	3.747	1.423	87
Barito Utara	5.119	15.160	6.380	3.820	1.788	90
Kotawaringin Timur	11.987	54.195	18.800	7.742	7.335	151
Kotawaringin Barat	8.959	30.706	11.006	5.154	4.797	96
Katingan	5.061	19.828	8.400	4.068	2.091	58
Seruyan	5.448	20.068	7.129	2.560	1.817	30
Sukamara	2.569	6.306	2.251	1.472	731	-
Lamandau	4.329	9.858	4.104	1.938	1.464	36
Gunung Mas	4.820	15.243	6.510	3.640	760	30
Pulang Pisau	5.243	13.591	5.073	3.438	844	61
Murung Raya	5.987	14.398	5.727	4.027	391	47
Barito Timur	4.510	11.117	4.458	2.665	1.556	37
Kota Palangka Raya	7.055	24.712	10.601	8.052	5.327	290

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019

Sesuai dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15, keberadaan SMK dirancang untuk mempersiapkan lulusannya bekerja di bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah kejuruan ditujukan untuk penyiapan lulusan yang siap kerja, baik bekerja secara mandiri maupun bekerja pada industri tertentu. SMK dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh sekolah, masyarakat, dan DU/DI. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja sesuai dengan bidangnya, memiliki adaptasi, dan daya saing yang tinggi.

Tabel 2.40 Jumlah SMK Berdasarkan Bidang Keahlian

No	BIDANG KEAHLIAN	JUMLAH SMK		
		NEGERI	SWASTA	TOTAL
1	Teknologi dan Rekayasa	29	9	38
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	45	15	60
3	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	1	9	10
4	Agribisnis dan Agroteknologi	63	15	78
5	Kemaritiman	14	0	14
6	Bisnis dan Manajemen	29	13	42
7	Pariwisata	11	4	15
8	Seni dan Industri Kreatif	7	1	8

No	BIDANG KEAHLIAN	JUMLAH SMK		
		NEGERI	SWASTA	TOTAL
9	Energi dan Pertambangan	6	0	6
	TOTAL	205	66	271

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.41 Jumlah SMK Berdasarkan Kompetensi Keahlian

NO	KOMPETENSI KEAHLIAN	JUMLAH SMK		
		NEGERI	SWASTA	TOTAL
1	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	4	0	4
2	Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura	29	10	39
3	Agribisnis Tanaman Perkebunan	43	5	48
4	Agribisnis Ternak Ruminansia	1	0	1
5	Agribisnis Ternak Unggas	3	0	3
6	Agrobisnis Perikanan Air Tawar	13	1	14
7	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	19	8	27
8	Alat Mesin Pertanian	1	0	1
9	Asisten Keperawatan	1	4	5
10	Bisnis Daring dan Pemasaran	7	5	12
11	Bisnis Konstruksi dan Properti	8	0	8
12	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	6	1	7
13	Farmasi Klinis dan Komunitas	0	6	6
14	Geologi Pertambangan	8	0	8
15	Keperawatan	1	0	1
16	Keperawatan Hewan	1	0	1
17	Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan	2	0	2
18	Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	1	0	1
19	Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	3	1	4
20	Multimedia	24	6	30
21	Nautika Kapal Niaga	2	0	2
22	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	16	5	21
23	Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman	1	0	1
24	Perbankan dan Keuangan Mikro	2	0	2

NO	KOMPETENSI KEAHLIAN	JUMLAH SMK		
		NEGERI	SWASTA	TOTAL
25	Perbankan Syariah	0	1	1
26	Perhotelan	3	0	3
27	Rekayasa Perangkat Lunak	4	0	4
28	Tata Boga	3	0	3
29	Tata Busana	9	1	10
30	Tata Kecantikan Rambut dan Kulit	2	1	3
31	Teknik Alat Berat	2	1	3
32	Teknik Audio Video	5	1	6
33	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	15	5	20
34	Teknik Energi Biomassa	1	0	1
35	Teknik Geomatika	2	0	2
36	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	4	0	4
37	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	14	5	19
38	Teknik Konservasi Sumber Daya Alam	1	0	1
39	Teknik Komputer dan Jaringan	21	10	31
40	Teknik Pemesinan	3	0	3
41	Teknologi Laboratorium Medik	0	1	1
42	Usaha Perjalanan Wisata	3	0	3

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Berbagai tantangan besar yang masih harus dihadapi oleh Pendidikan Kejuruan, seperti rendahnya keterserapan lulusan SMK di pasar kerja, sering dikaitkan dengan tidak sesuainya perkembangan Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan dan standar DU/DI. Tidak selarasnya Pendidikan Kejuruan dengan DU/DI dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, kesenjangan antara keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan DU/DI dengan yang dimiliki oleh lulusan SMK. Kedua, jumlah lulusan SMK di berbagai paket keahlian tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan yang dibutuhkan oleh dunia usaha/dunia industri yang membutuhkan tenaga DU/DI akan tenaga kerja. Ada paket-paket keahlian tertentu yang sedang diminati, dibuka di banyak SMK, dan menghasilkan banyak lulusan tetapi kurang terserap di pasar kerja karena pekerjaan yang relevan tidak banyak atau mulai mengalami kejenuhan. Ketiga, perkembangan SMK dan penyediaan paket keahlian masih belum berorientasi pada potensi ekonomi dan keunggulan lokal. Keempat, perkembangan SMK dan penyediaan paket keahlian masih belum dilakukan berdasarkan data proyeksi tentang peluang bisnis dan investasi di masa depan.

Berbagai kegiatan sudah dilakukan untuk menyelaraskan Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan DU/DI umumnya dapat dikategorikan menjadi: (i) pengembangan/pemetaan kompetensi; (ii) pelaksanaan pembelajaran; dan (iii) evaluasi hasil pembelajaran. Jenis kegiatan yang paling sering dilakukan diantaranya adalah Praktik Kerja Industri (Prakerin), sinkronisasi dan validasi kurikulum, guru tamu dari DU/DI serta uji kompetensi. Upaya penyelarasan juga telah diintegrasikan dalam instrumen akreditasi SMK yaitu dalam penilaian terkait standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana serta standar pengelolaan. Untuk mendukung penyelarasan proses pembelajaran di SMK dengan DU/DI.

Faktor-faktor lain yang juga berpengaruh antara lain: status SMK (negeri atau swasta), peluang dan perkembangan ekonomi lokal, ketersediaan sumberdaya manusia terutama kemampuan dan komitmen Manajemen Sekolah untuk menjadi ‘pelopor perubahan’ yang berorientasi pada pemecahan masalah. Berbagai faktor tersebut menciptakan kondisi yang berbeda bagi tiap SMK sehingga sulit untuk menentukan satu pendekatan penguatan kemitraan SMK – DU/DI yang cocok bagi semua. Apalagi hingga saat ini, dukungan luas dan sistematis dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendorong keterlibatan DU/DI dalam pengembangan Pendidikan Kejuruan belum optimal. Upaya-upaya pemerintah yang ada masih bersifat sebagai pelengkap saja yang memudahkan SMK untuk bermitra dengan DU/DI terutama jika inisiatif kuat sudah ada dari manajemen sekolah.

Peningkatan angka partisipasi sekolah paling tinggi dialami oleh penduduk yang mengenyam bangku pendidikan sekolah menengah atas dan sederajat. APS SMA sederajat umumnya lebih rendah dari jenjang sekolah dasar dikarenakan penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan hingga level SMA sederajat tidak sebanyak penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan SD maupun SMP sederajat. Faktor penyebabnya sebagian besar karena aksesibilitas pendidikan yang kurang, permasalahan biaya pendidikan serta adanya kecenderungan untuk bekerja mencari nafkah membantu keluarga. Terutama bagi masyarakat miskin dan di daerah terpencil, umur anak usia SMA sederajat sebagian harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah sehingga bisa berpotensi putus atau tidak melanjutkan sekolah di jenjang SMA

Tabel 2. 42 Angka Partisipasi Sekolah dan Rasio Guru terhadap Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI				
1.1	Angka Partisipasi Murni (7-12 tahun)	98,67	98,90	95,0*	93,53*
1.2	Angka Partisipasi Kasar (7-12 tahun)	114,00	112,48	109,9*	106,64*
1.4	Rasio Guru terhadap Murid	14	TAD	15*	12*

2	SMP/MTs				
2.1.	Angka Partisipasi Murni (13-15 tahun)	75,92	76,00	73,5*	73,11*
2.2.	Angka Partisipasi Kasar (13-15 tahun)	86,30	95,79	100,3*	100,52*
2.3.	Rasio Guru terhadap Murid	12	12	15*	12*
3	SMA/MA/SMK				
3.1.	Angka Partisipasi Murni (16-18 tahun)	52,50	53,86	56,7*	60,71*
3.2.	Angka Partisipasi Kasar (16-18 tahun)	78,44	80,38	80,7*	82,23*
3.3.	Rasio Guru terhadap Murid SMA	13	TAD	15*	13*
3.4.	Rasio Guru terhadap Murid SMK	11	14	14*	13*

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah

(*) Data Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang bersumber dari data citadik yang terkoneksi dengan Kemendikbud. Data citadik ini baru ada mulai tahun 2018

Peningkatan tenaga pendidik dan kualitas pendidikan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud nomor 022 Tahun 2016 tentang Standart Proses antara lain menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Semakin memadainya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dapat memberikan profesionalitas tenaga pendidik untuk selalu berimprovisasi.

Tabel 2. 43 Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/ Kota	2018			2019			2020		
		SD/MI	SMP/ MTs	SMA/ MA/ SMK	SD/MI	SMP/ MTs	SMA/ MA/ SMK	SD/MI	SMP/ MTs	SMA/ MA/ SMK
1	Kotawaringin Barat	1798	921	711	1999	954	749	2034	1022	813
2	Kotawaringin Timur	3425	1376	1016	3724	1468	1078	3914	1597	1126
3	Kapuas	4399	1608	1000	4734	1737	1100	4803	1836	1143
4	Barito Selatan	1754	689	623	1881	744	641	1711	775	658
5	Barito Utara	1817	684	572	2002	724	593	2053	749	595
6	Sukamara	557	289	229	604	302	234	620	313	249
7	Lamandau	881	350	281	949	406	309	664	423	324
8	Seruyan	1526	711	351	1681	765	417	1744	802	415
9	Katingan	1514	794	510	1738	868	561	1734	921	578
10	Pulang Pisau	1681	640	506	1812	675	539	1865	720	571
11	Gunung Mas	1485	570	363	1627	609	381	1689	651	390
12	Barito Timur	1589	642	494	1712	661	524	1724	713	516
13	Murung Raya	1410	606	365	1562	645	410	1598	659	423
14	Palangka Raya	2058	1151	1357	2109	1149	1397	2149	1189	1424

No	Kabupaten/ Kota	2018			2019			2020		
		SD/MI	SMP/ MTs	SMA/ MA/ SMK	SD/MI	SMP/ MTs	SMA/ MA/ SMK	SD/MI	SMP/ MTs	SMA/ MA/ SMK
Jumlah		25894	11031	8378	28134	11707	8933	28302	12370	9225

Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

Tabel 2. 44 Kondisi Bangunan Satuan Pendidikan SMA/SMK/MA

Kondisi Ruang Kelas	2018		2019		2020	
	SMA	SMK	SMA	SMK	SMA	SMK
Baik	41.81	46.11	36.93	46.56	22.97	30.66
Rusak Ringan/ Sedang	55.48	52.38	59.49	52.5	74.86	67.59
Rusak Berat/ Total	2.71	1.51	3.58	0.94	2.17	1.75

Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Sarana prasarana kesehatan yang menunjang untuk optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat sangat menentukan dalam kebijakan pembangunan dalam bidang kesehatan. Hal ini karena segala fasilitas dan infrastruktur kesehatan sangat berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, perhatian pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan menjadi perlu dan penting untuk ditindaklanjuti. Hasil analisis terhadap pelayanan wajib di bidang kesehatan menggambarkan sarana dan prasana kesehatan, tenaga medis dan para medis sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 45 Sarana dan Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

No	Fasilitas Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	20	22	19	24	28
2	Kapasitas Tempat Tidur RS	1970	2235	2368	2515	2913
3	Jumlah Puskesmas Induk	195	198	200	204	206
4	Jumlah Pustu	1063	913	1.101	1.048	1.105
5	Jumlah Poskesdes/ Polindes/ Rumah bersalin	755	943	935	956	956
6	Jumlah Dokter Gigi	116	106	107	113	123
7	Jumlah Dokter Umum	567	515	518	585	683
8	Jumlah Dokter Spesialis	197	302	91	87	122
9	Bidan	2307	3308	3.268	3.713	3.885
10	Perawat	4747	5791	5.645	6.405	6.642
11	Apoteker/Asisten Apoteker	370	466	656	1.098	722

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2021

Sarana prasarana kesehatan untuk masyarakat berupa rumah sakit, pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya yaitu 24 (dua puluh empat) buah mejadi 28 (dua puluh delapan) buah, terdiri dari RSUD pemerintah sebanyak 17 unit rumah sakit dengan jumlah

terakreditasi 16 unit rumah sakit yang belum terakreditasi RS kelas D Pratama Parenggean. Rumah Sakit Umum Pemerintah Vertikal (milik TNI dan Polri) berjumlah 2 (dua) unit Rumah Sakit dan sudah semua terakreditasi. Untuk rumah sakit umum swasta di Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 8 unit rumah sakit dan yang sudah terakreditasi sebanyak 3 (tiga) unit rumah sakit, sehingga secara kumulatif jumlah rumah sakit yang sudah terakreditasi berjumlah 78,6 persen (21 rumah sakit). Sedangkan untuk Puskesmas induk mengalami penambahan yaitu menjadi 206 dari tahun sebelumnya yang hanya 204 puskesmas.

Pada tahun 2020, jumlah dokter di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 928 orang, terdiri dari 123 dokter gigi, 683 dokter umum, dan 122 dokter spesialis. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 785 dokter. Kemudian, untuk tenaga kesehatan lainnya, seperti: bidan berjumlah 3.885 orang, perawat 6.642 orang, dan tenaga kefarmasian mencapai 722 orang.

Tabel 2. 46 Rasio Sarana dan Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Rasio	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tempat tidur rumah sakit per 1.000 jumlah penduduk	0,77	0,9	0,89	0,91	1,05
2	Dokter per 100.000 jumlah penduduk	18,43	19,77	19,81	22,3	24,7
4	Puskesmas per 30.000 jumlah penduduk	2,29	2,32	2,28	2,27	2,29
5	Bidan per 100.000 jumlah penduduk	105,6 4	126,9 7	122,8	136,2	149,6

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Rasio sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana tabel di atas menunjukkan ketersediaan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) berdasarkan jumlah penduduk. Demikian halnya dengan rasio dokter dan tenaga medis menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dan tenaga medis dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Semakin besar rasio menandakan semakin baiknya ketersediaan dan layanan sarana dan prasarana kesehatan yang ada.

Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat saling melengkapi dan sinergisme. Penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada pelayanan promotif dan preventif, sementara program JKN berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Sehingga pada penerapan SPM bidang kesehatan khususnya di kabupaten/kota ada kontribusi pembiayaan dan

pelayanan program JKN. Untuk hal tersebut, pada penerapannya tidak perlu mengalokasikan anggaran pada pelayanan- pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif yang dibiayai oleh JKN.

Tabel 2. 47 Indikator Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	AKI	160	121	165	150	140
2	AKB	8,5	7,8	7,6	6,2	7,5
3	Stunting	34,1	39,0	34,04	32,30	32,30
4	Gizi Buruk	5,6	6	5.5	1,4	2,18

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi.

Sesuai dengan target SDGs pada goal 3 (tiga) pada target 2 menyatakan mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan Angka Kematian Neonatal hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH pada tahun 2030.

Angka Kematian Bayi pada tahun 2015 sebagai target awal RPJMD sebesar 49 per 1.000 kelahiran hidup yang merupakan hasil SDKI 2012. Target AKB yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 49 per 1.000 kelahiran hidup dengan capaian sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2017 target AKB sebesar 41 per 1.000 kelahiran hidup dengan capaian 8,1 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2018 target AKB yang ditetapkan adalah 35.5 per 1000 kelahiran hidup dengan capaian sebesar 8.3 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2019 target yang ditetapkan adalah 30 per 1.000 kelahiran hidup dengan capaian sebesar 7 per 1.000 kelahiran hidup dan tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 17,75 dengan capaian 7,5 per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel diatas menggambarkan perkembangan angka kematian pada bayi yang mengalami sedikit mengalami fluktuasi namun capaian yang telah diperoleh jauh dibawah target yang telah ditentukan. Pada tahun 2015 angka kematian bayi berada pada angka 49 (SDKI 2012) per 1.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami penurunan menjadi 7,5 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Perlu menjadi catatan bahwa ada peningkatan Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi COVID 19

yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang berdampak derajat kesehatan masyarakat.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Penurunan AKI juga merupakan salah satu target SDGs yaitu Goal 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia pada tujuan ke 1 yaitu mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 KH pada tahun 2030.

Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu pada tahun 2015 sebagai target awal RPJMD sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup yang merupakan hasil SDKI 2012. Target AKI yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 320 per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian sebesar 160 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2017 target AKI sebesar 285 per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian 121 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2018 dengan target AKI sebesar 275 dengan capaian 165 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2019 dengan target 250 dengan capaian 166 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2020 dengan target 228 dengan capaian 140 per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel diatas menggambarkan trend kematian pada ibu yang menunjukkan bahwa tingkat kematian yang memperlihatkan adanya penurunan yang signifikan. Pada tahun 2016 angka kematian ibu berada pada angka 160 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami penurunan menjadi 140 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator kesehatan makro yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat secara global. Dengan adanya penurunan AKI menunjukkan bahwa adanya peningkatan derajat kesehatan di masyarakat.

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi. Di Indonesia masyarakat sering menganggap tumbuh pendek sebagai faktor keturunan (Aryastami dan Tarigan, 2017). Balita pendek mencakup dua kategori yaitu pendek dan sangat pendek, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang atau tinggi badan menurut umur balita terhadap standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) tahun 2005 yang memiliki nilai *z-score* yang berada kurang

dari -2 Standar Deviasi (SD) dikategorikan sebagai (pendek/*stunted*) atau memiliki nilai *z-score* yang berada kurang dari -3 Standar Deviasi (SD) yang dikategorikan sebagai (sangat pendek/*severely stunted*)(Antonio, W. H. O. & Weise, S, 2012). Perkembangan kasus *stunting* di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami sejumlah penurunan walaupun masih belum sampai pada target yang telah ditetapkan. Perkembangan *stunting* tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Dari gambar diatas diketahui bahwa prevalensi kasus *stunting* di Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 prevalensi *stunting* sebesar 34,1 persen, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 39 persen, ada penurunan prevalensi *stunting* pada tahun 2018 menjadi 34,04 persen, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 32,3 persen. Sedangkan capaian prevalensi *stunting* pada tahun 2020 sebesar 16,7 persen dengan catatan bahwa prevelensi *stunting* diambil dari aplikasi EPPBGM dengan tingkat keterisian dari kabupaten kota baru mencapai 59,9 persen (catatan untuk data tahun 2020 Coverage belum memadai sehingga yang digunakan sebagai baseline adalah data tahun 2019).

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO/NCHS.

Tolok ukur capaian sasaran terwujudnya peningkatan perbaikan gizi masyarakat diukur dengan indikator Prevalensi balita gizi buruk. Cara pengukuran indikator Prevalensi balita gizi buruk dengan menghitung Jumlah balita status gizi buruk dibagi jumlah seluruh balita yang ada dalam suatu wilayah dikalikan 100%. Indikator kinerja ini bermakna negatif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasinya semakin bagus kinerjanya.

Prevalensi balita gizi buruk tahun 2015 sebagai target awal RPJMD sebesar 19.6 persen. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 17.1 persen dengan capaian yang sangat signifikan yaitu 5.6 persen. Kemudian prevalensi balita gizi buruk mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 6 persen, tahun 2018 prevalensi gizi buruk turun menjadi sebesar 5.5 persen dan penurunan signifikan terjadi pada tahun 2019 sebesar 1.4 persen. Kemudian pada tahun 2020 prevalensi gizi buruk naik menjadi sebesar 2,18 persen

Persentase Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita Definisi Operasional Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat

Badan menurut Tinggi Badan menurut Umur (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -2 SD.

Untuk Mekanisme Pelaporan Pemantauan Pertumbuhan

- 1) Penimbangan dan pengukuran dilakukan dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan setiap bulan pada seluruh sasaran balita di wilayah kerja puskesmas baik di posyandu maupun di fasilitas pendidikan anak usia dini
- 2) Hasil penimbangan dan pengukuran dicatat/dientri oleh puskesmas kedalam aplikasi ePPGBM untuk mengetahui kategori status gizinya berdasarkan indeks BB/PB atau BB/TB
- 3) Menghitung persentase balita gizi kurang dengan membagi jumlah balita gizi kurang dengan jumlah balita yang mempunyai ukuran berat badan dan panjang/tinggi badan

Adapun Prevalensi wasting pada balita (%) tahun 2018 adalah 13,9% (Riskesdas 2018) dan diharapkan pada tahun 2026 menjadi 6,5%.

Tabel 2. 48 Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular Provinsi Kalimantan Tengah

No	Jenis Penyakit	2020
1	Hipertensi	351.895
2	Diabetes Militus	93.763
3	ODGJ Berat	3.830

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Penderita penyakit hipertensi menjadi jumlah penyakit tidak menular yang paling banyak di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah penyakit hipertensi mencapai 351.895 jiwa diatas penyakit diabetes militus. Jumlah penderita diabetes militus sebesar 93.763 jiwa. Untuk jumlah penderita penyakit menular Provinsi Kalimantan Tengah, penderita penyakit diare menjadi yang terbanyak. Jumlah penderita penyakit diare sebesar 21.666 jiwa dan penderita penyakit menular kusta menjadi yang terkecil dengan besar 34 jiwa.

Tabel 2. 49 Jumlah Penderita Penyakit Menular Provinsi Kalimantan Tengah

No	Jenis Penyakit	2020
1	Tuberkolosis	1.486
2	Pneumonia	1.038
3	Diare	21.666
4	Kusta	34

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Tabel 2. 50Jumlah Kasus Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Jenis Penyakit	Terkonfirmasi	Dalam Perawatan	Sembuh	Meninggal
Covid 19	9.684	1.892	7.618	269

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu selalu dilakukan pembahasan baik dari segi penanganan di bidang kesehatan, bantuan sosial, pemulihan ekonomi nasional, dan pengambilan kebijakan publik lainnya.

World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai Global Pandemic pada 11 Maret 2020, yang kemudian oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 13 April 2020 direspon dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam, dan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah Bencana Nasional.

Ditetapkannya Covid-19 sebagai Bencana Nonalam Berskala Nasional, memiliki berbagai macam konsekuensi dalam penanganannya yang harus dilakukan secara komprehensif dengan cepat dan tepat dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan *stakeholder* terkait lainnya serta masyarakat sebagai element terpenting dalam pengendalian penyebaran wabah Covid-19.

Dari table diatas sampai dapat diketahui bahwa sampai saat ini wabah Covid-19 belum mereda bahkan pertambahan dari waktu ke waktu semakin signifikan seiring dengan banyaknya spesiment yang diambil.

Pandemi Covid-19 menjadi ujian tersendiri bagi akuntabilitas pemerintah utamanya dalam rangka memberikan layanan bagi masyarakat (Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2020:64). Dalam penanganan Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, pada diktum kedua diamanatkan untuk gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-I9) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Berkaitan dengan amanat tersebut di atas maka daerah dituntut untuk dapat berperan aktif dalam penanganan dan pengendalian persebaran Covid-19, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dituntut untuk bertindak cepat dalam menentukan kebijakan strategis, untuk mengurangi potensi kerentanan terhadap terjadinya *social*

disaster (bencana sosial). Dalam perkembangannya hal yang menjadi faktor penting dalam pengendalian persebaran wabah Covid-19 adalah pola hidup masyarakat yang sampai dengan saat ini belum dapat dikendalikan dengan maksimal khususnya di wilayah daerah.

Oleh karena itu, perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi. Upaya telah dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan vaksin yang ideal untuk pencegahan infeksi SARS-CoV-2 dengan berbagai platform yaitu vaksin inaktivasi [inactivated virus vaccines, vaksin virus yang dilemahkan (live attenuated), vaksin vektor virus, vaksin asam nukleat, vaksin seperti virus (virus-like vaccine), dan vaksin subunit protein. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan. Pelayanan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1 - 2 meter, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi Pada Masa Pandemi COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan puskesmas harus melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan setempat, serta berkoordinasi dengan lintas program, dan lintas sektor terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19. Petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai dengan yang dianjurkan.

Jaminan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan maka pemerintah provinsi Kalimantan Tengah berupaya meningkatkan persentase cakupan kepesertaan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN), dengan kondisi saat ini sebesar 83% diharapkan pada tahun ke-5 menjadi 98%. Jaminan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan.

Pencapaian persentase Kepersetaan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage Kab/Kota pada tahun 2020 mencapai 87,44 persen lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 86,42 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa belum semua penduduk telah tercover oleh kepersetaan jaminan kesehatan. Mulai tahun 2019 sesuai dengan amanat Undang-Undang harus semua penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berdasarkan data dari Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) kabupaten yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) yaitu Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Lamandau, Seruyan, Sukamara, Barito Timur dan Kabupaten Sukamara. Dinyatakan UHC apabila Cakupan kepesertaan telah mencapai $\geq 95\%$ terhadap jumlah penduduk.

Di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri telah memiliki Program Jaminan Kesehatan Daerah yakni Program Kartu Kalteng Berkah (KKB). Kartu Kalteng Berkah adalah asuransi kesehatan berupa perlindungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada peserta agar memperoleh hak atas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau fasilitas kesehatan, dan sebagai wadah pemersatu Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah secara bertahap untuk mendukung amanat Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kepesertaan Kartu Kalteng Berkah adalah anggota masyarakat yang tidak termasuk Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan yaitu Masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu beserta anggotanya yang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan iuran dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kepesertaan KKB di tetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah tentang

Peserta Kartu Kalteng Berkah dalam surat keputusan (SK).

Kepesertaan Kartu Kalteng Berkah bersifat sementara dan dinamis dalam hal perlindungan sosial dan meningkatkan cakupan jaminan kesehatan menuju Jaminan Kesehatan dengan cakupan menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun sejak tahun 2021 pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah wajib membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan sebanyak 568.500 sedangkan untuk tahun 2022 pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah menyediakan pendanaan dalam rangka pembayaran untuk kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan sebanyak 600.000 Jiwa yang tersebar pada 14 Kab/kota Se-Kalimantan Tengah.

Ketersediaan Obat dan Makanan

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial di Puskesmas (40 item) sampai TW 3, capaiannya masih 57,14 % dari target capaian 95% pada tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan rata-rata di kabupaten/kota untuk pengadaan berdasarkan RKO tahun berjalan dan e-katalog di masa pandemi mengalami kendala (masalah turun tayang atau server KLPP down) sehingga terjadi kekosongan obat di faskes.

Tidak semua kabupaten/kota memiliki tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan tenaga District Food Inspector (DFI) sehingga masih banyak Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) belum memenuhi syarat Cara Pembuatan Pangan yang Baik (CPPB). Di sisi lain, masih ditemukan produk pangan yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan keamanan pangan. Selain itu, di tengah masyarakat juga masih terjadi keracunan makanan di beberapa kabupaten.

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Bina Marga

Infrastruktur yang layak dan memadai merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam suatu proses pembangunan, selain itu kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk meningkatkan mobilitas penduduk, memperlancar kegiatan ekonomi suatu daerah dan menembus keterisolasian daerah, baik pada penyelenggaraan jalan provinsi dan jalan dari aset pemerintah kabupaten/kota yang mengacu pada peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah melalui skema hibah kepada pemerintah daerah. Panjang jalan menurut kabupaten/kota dan pemerintahan yang berwenang mengelolanya di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 51 Panjang jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Yang Berwenang Mengelolanya di Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten/kota	Akhir Tahun	Pemerintah yang Berwenang Mengelola			Jumlah (Km)
		Nasional (Km)	Provinsi (Km)	Kabupaten/ Kota (Km)	
Kotawaringin Barat	2017	65,32	56,50	1.222,845	1.344,665
	2018	65,32	56,50	1.222,845	1.344,665
	2019	65,32	56,50	1.222,845	1.344,665
	2020	65,32	56,50	1.222,845	1.344,665
Kotawaringin Timur	2017	67.52	272,47	2.024,06	2.364,05
	2018	67.52	272,47	2.024,06	2.364,05
	2019	67.52	272,47	2.024,06	2.364,05
	2020	67.52	272,47	2.024,06	2.364,05
Kapuas	2017	193,96	113,50	2.144,21	2.451,67
	2018	193,96	113,50	2.144,21	2.451,67
	2019	193,96	113,50	2.144,21	2.451,67
	2020	193,96	113,50	2.144,21	2451,67
Barito Selatan	2017	102,62	34,25	1.013,53	1.150,44
	2018	102,62	34,25	1.013,53	1.150,44
	2019	102,62	34,25	1.013,53	1.150,44
	2020	102,62	34,25	1.013,53	1.150,44
Barito Utara	2017	290,60	10,58	758,14	1.059,32
	2018	290,60	10,58	758,14	1.059,32
	2019	290,60	10,58	758,14	1059,32
	2020	290,60	10,58	758,14	1.059,32
Sukamara	2017	-	154,70	512,70	667,40
	2018	-	154,70	512,70	667,40
	2019	-	154,70	512,70	667,40
	2020	-	154,70	512,70	667,40
Lamandau	2017	178,10	21,40	551,75	751,25
	2018	178,10	21,40	551,75	751,25
	2019	178,10	21,40	551,75	751,25
	2020	178,10	21,40	551,75	751,25
Seruyan	2017	118,90	151,30	1.053,48	1.323,68
	2018	118,90	151,30	1.053,48	1.323,68
	2019	118,90	151,30	1.053,48	1.323,68
	2020	118,90	151,30	1.053,48	1.323,68
Katingan	2017	219,39	68,00	740,38	1.027,77
	2018	219,39	68,00	740,38	1.027,77
	2019	219,39	68,00	740,38	1.027,77
	2020	219,39	68,00	740,38	1.027,77
Pulang Pisau	2017	121,60	140,44	1.170,67	1.432,71
	2018	121,60	140,44	1.170,67	1.432,71
	2019	121,60	140,44	1.170,67	1.432,71
	2020	121,60	140,44	1.170,67	1.432,71
Gunung Mas	2017	250,04	110,46	738,99	1.099,49
	2018	250,04	110,46	738,99	1.099,49

Kabupaten/kota	Akhir Tahun	Pemerintah yang Berwenang Mengelola			Jumlah (Km)
		Nasional (Km)	Provinsi (Km)	Kabupaten/ Kota (Km)	
	2019	250,04	110,46	738,99	1.099,49
	2020	250,04	110,46	738,99	1.099,49
Barito Timur	2017	94,77	66,02	802,87	963,66
	2018	94,77	66,02	802,87	963,66
	2019	94,77	66,02	802,87	963,66
	2020	94,77	66,02	802,87	963,66
Murung Raya	2017	148,30	14,85	919,54	1082,69
	2018	148,30	14,85	919,54	1082,69
	2019	148,30	14,85	919,54	1082,69
	2020	148,30	14,85	919,54	1082,69
Palangka Raya	2017	150,96	57,61	911,83	1.120,40
	2018	150,96	57,61	911,83	1.120,40
	2019	150,96	57,61	911,83	1.120,40
	2020	150,96	57,61	911,83	1.120,40

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2020

Dari total panjang jalan nasional dan jalan provinsi sepanjang 3.274,16 km, kondisi permukaan jalan baik pada tahun 2020 adalah sebesar 1.114,16 km, kondisi sedang 1.535,30 km, kondisi rusak ringan 355,31 km dan kondisi jalan yang rusak berat sepanjang 269,39 km. Data lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 52 Panjang Jaringan Jalan Nasional dan Provinsi Berdasarkan Kondisi Tahun 2020

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)		
		Provinsi	Nasional	Total Provinsi + Nasional
1.	Kondisi Baik	502,90	611,26	1.114,16
2.	Kondisi Sedang	500,29	1.035,01	1.535,30
3.	Kondisi Rusak Ringan	246,09	109,22	355,31
4.	Kondisi Rusak Berat	22,80	246,59	269,39
	Total Panjang Jalan	1.272,08	2.002,08	3.274,16

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, 2020

2.3.1.3.2 Cipta Karya

1. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak

Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan terkait rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Konsep sanitasi layak sejak tahun 2018 mengalami perubahan yaitu memiliki fasilitas BAB sendiri/ Bersama, kloset leher angka dan TPAT tangka septik/IPAL.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami peningkatan dari 50,97 persen pada tahun 2016

menjadi 56,22 persen tahun 2019 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 72,31 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki akses sanitasi layak. Capaian akses sanitasi layak Kalimantan Tengah tahun 2020 tersebut berada di bawah capaian nasional sebesar 79,53 persen (urutan ke-31 dari 34 provinsi).

Berikut tabel persentase menurut kabupaten/kota.

Tabel 2. 53 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kotawaringin Barat	76,56	68,19	69,24	73,46	83,58
2	Kotawaringin Timur	51,94	22,82	46,48	41,25	68,84
3	Kapuas	27,56	33,84	39,99	33,45	47,87
4	Barito Selatan	46,07	35,38	45,15	45,01	68,69
5	Barito Utara	42,90	40,52	45,22	50,74	75,43
6	Sukamara	52,52	63,99	66,89	85,59	83,55
7	Lamandau	62,61	51,54	67,07	64,94	84,04
8	Seruyan	43,89	45,31	35,78	69,63	82,66
9	Katingan	33,83	22,16	39,90	61,94	72,94
10	Pulang Pisau	39,86	26,98	46,27	50,61	59,81
11	Gunung Mas	35,86	49,71	63,28	64,72	83,72
12	Barito Timur	42,41	53,86	33,04	42,78	74,50
13	Murung Raya	27,36	24,31	31,68	27,21	50,25
14	Palangka Raya	94,99	92,64	93,37	89,77	89,29
	Kalimantan Tengah	50,97	45,46	52,63	56,22	72,31

sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2021

2. Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak

Untuk memenuhi *universal access* 100 - 0 - 100, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat dari 61,26 persen di tahun 2016 menjadi 73,27 persen di tahun 2019 dan 74,91 persen di tahun 2020. Capaian akses air minum layak tahun 2020 di Kalteng tersebut masih di bawah capaian nasional sebesar 90,21 persen (urutan ke-30 dari 34 provinsi).

Berikut dijabarkan dalam bentuk tabel persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak menurut kabupaten/kota :

Tabel 2. 54 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kotawaringin Barat	75,89	76,39	72,46	77,47	88,48
2	Kotawaringin Timur	64,52	74,56	74,65	81,46	81,30
3	Kapuas	39,42	45,58	48,73	62,44	61,10
4	Barito Selatan	50,63	46,12	46,44	59,18	66,27
5	Barito Utara	58,72	59,06	72,36	65,51	70,17
6	Sukamara	75,48	80,14	75,14	84,20	83,38

7	Lamandau	60,83	57,65	60,50	72,73	75,99
8	Seruyan	51,10	44,57	60,18	65,02	68,66
9	Katingan	60,68	68,50	65,84	77,72	80,15
10	Pulang Pisau	75,53	67,80	71,23	79,16	79,87
11	Gunung Mas	45,75	57,37	55,66	65,35	55,14
12	Barito Timur	58,23	43,62	46,67	55,61	61,41
13	Murung Raya	37,97	49,47	40,19	49,57	44,34
14	Palangka Raya	89,96	91,47	90,65	99,32	99,02
	Kalimantan Tengah	61,26	63,90	65,38	73,27	74,91

sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2021

2.3.1.3.3 Sumber Daya Air

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari 3 pilar yaitu Konservasi SDA; Pendayagunaan SDA dan table 2.36 Pengendalian Daya Rusak SDA.

Dalam melaksanakan pendayagunaan Sumber Daya Air telah terbangun Air Baku sejumlah 4 unit di Kabupaten Gunung Mas (2 unit), Kabupaten Barito Timur (1 unit) dan Kabupaten Pulang Pisau (1 unit). Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Provinsi Kalimantan tengah mengacu pada Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, terdapat 5 (lima) Wilayah Sungai (WS) yaitu:

1. WS. Jelai Kendawangan (Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Lamandau, Kab. Seruyan, dan Kab. Sukamara), kewenangan Pemerintah Pusat;
2. WS. Mentaya Katingan (Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Katingan), kewenangan Pemerintah Pusat;
3. WS. Barito-Kapuas (Kab. Kapuas, Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Barito timur, Kab. Murung Raya), merupakan kewenangan pemerintah Pusat;
4. WS Kahayan (Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kota Palangka Raya) kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
5. W.S Seruyan (Kab. Seruyan) kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dalam rangka melaksanakan konservasi SDA di Provinsi Kalimantan Tengah, telah terbangun bendung 16 buah dengan rincian pada table, sebagai berikut :

Tabel 2. 55 Data - Data Bendungan di Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Nama Daerah Irigasi	Lokasi	Luas Potensial		Luas Fungsional		Status
1	D.I Karau	Kabupaten Barito Timur	3.794	Ha	2.833	Ha	Pusat
2	D.I Tampa	Kabupaten Barito Timur	2.000	Ha	1.287	Ha	Provinsi
3	D.I Tandrahean	Kabupaten Barito Utara	500	Ha	250	Ha	Kabupaten

No	Nama Daerah Irigasi	Lokasi	Luas Potensial		Luas Fungsional		Status
4	D.I Trinsing	Kabupaten Barito Utara	687	Ha	400	Ha	Kabupaten
5	D.I Montalat	Kabupaten Barito Utara	408	Ha	300	Ha	Kabupaten
6	D.I Sekata Juri	Kabupaten Gunung Mas	500	Ha	225	Ha	Kabupaten
7	D.I Gohong Rawai	Kabupaten Gunung Mas	710	Ha	460	Ha	Kabupaten
8	D.I Hurung Bunut	Kabupaten Gunung Mas	560	Ha	410	Ha	Kabupaten
9	D.I Sekata Tewah	Kabupaten Gunung Mas	440	Ha	250	Ha	Kabupaten
10	D.I Tanjung Harapan	Kabupaten Kota Waringin Timur	600	ha	500	Ha	Kabupaten
11	D.I Kumai Kondang	Kabupaten Kota Waringin Barat	200	Ha	100	Ha	Kabupaten
12	D.I Bayat	Kabupaten Lamandau	200	Ha	100	Ha	Kabupaten
13	D.I Baruh Rintis	Kabupaten Barito Timur	131	Ha	50	Ha	Kabupaten
14	D.I Uwang	Kabupaten Barito Selatan	500	Ha	200	Ha	Kabupaten
15	D.I Jamut	Kabupaten Barito Utara	700	Ha	250	Ha	Kabupaten
16	D.I Bawang	Kabupaten Barito Utara	500	Ha	200	Ha	Kabupaten
Luas Total			12.430	Ha	7.815	Ha	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021

Untuk Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR) yang merupakan kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 1 DI yaitu DI. Tampa (Kab. Barito Timur) dan 52 DIR yaitu pada Kota Palangka Raya (1 DIR), Kab. Kotawaringin Timur (24 DIR), Kab. Seruyan (8 DIR), Kab. Katingan (7 DIR), Kab. Pulang Pisau (5 DIR) Kab. Kapuas (6 DIR) Kab. Sukamara (1 DIR), dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 56 Status Daerah Irigasi Kewenangandinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI *) (Ha)	LUAS AREAL (Ha)		
			BAKU	POTENSIAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5	6
1	D.I. Tampa	Irigasi Permukaan	2.000,00	1.800,00	442,00
2	D.I.R. Bagendang IV	Irigasi Rawa	2.565,00	2.565,00	174,00
3	D.I.R. Basawang	Irigasi Rawa	2.244,00	2.228,00	53,00
4	D.I.R. Kuin	Irigasi Rawa	2.445,00	2.445,00	932,00
5	D.I.R. Lampuyang	Irigasi Rawa	2.574,00	2.574,00	1.067,00
6	D.I.R. Bahaur I	Irigasi Rawa	2.443,00	2.443,00	708,00
7	D.I.R. Bahaur II	Irigasi Rawa	1.657,00	1.657,00	793,00
8	D.I.R. Maluku Baru	Irigasi Rawa	1.058,00	1.058,00	102,00

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI *) (Ha)	LUAS AREAL (Ha)		
			BAKU	POTENSIAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5	6
9	D.I.R. Unit Mentaren II	Irigasi Rawa	1.176,00	1.176,00	243,00
10	D.I.R. Kuala Jelai	Irigasi Rawa	1.218,00	1.218,00	180,00
11	D.I.R. Muara Plantau	Irigasi Rawa	2.042,00	1.616,00	245,00
12	D.I.R. Kalampangan/Bering Bengkel	Irigasi Rawa	2.289,00	2.009,00	219,00
13	D.I.R. Bukit Tunggal	Irigasi Rawa	2.309,00	2.309,00	1.249,00
14	D.I.R. Tumbang Nusa	Irigasi Rawa	2.135,00	2.135,00	77,00
15	D.I.R. Anjir Kalampan	Irigasi Rawa	2.325,00	2.325,00	97,00
16	D.I.R. Palampai	Irigasi Rawa	1.389,00	1.365,00	1.389,00
17	D.I.R. Handiwung	Irigasi Rawa	1.084,00	1.084,00	542,00
18	D.I.R. Pantai	Irigasi Rawa	1.184,00	1.184,00	98,00
19	D.I.R. Pulau Kaladan	Irigasi Rawa	2.568,00	2.568,00	121,00
20	D.I.R. Pendahara	Irigasi Rawa	1.754,00	1.696,00	371,00
21	D.I.R. Luwuk Kanan	Irigasi Rawa	1.303,00	1.303,00	351,00
22	D.I.R. Mendawai	Irigasi Rawa	1.217,00	1.217,00	139,00
23	D.I.R. Selat Baning	Irigasi Rawa	2.083,00	1.615,00	245,00
24	D.I.R. Luwuk Bunter	Irigasi Rawa	1.742,00	1.742,00	244,00
25	D.I.R. Camba	Irigasi Rawa	1.806,00	1.806,00	222,00
26	D.I.R. Transmigrasi/Kandan	Irigasi Rawa	1.540,00	1.540,00	102,00
27	D.I.R. Kota Besi	Irigasi Rawa	2.235,00	2.235,00	373,00
28	D.I.R. Banitan	Irigasi Rawa	1.927,00	1.927,00	141,00
29	D.I.R. Terantang Hulu	Irigasi Rawa	2.510,00	2.510,00	146,00
30	D.I.R. Mentaya Seberang / Trans	Irigasi Rawa	2.983,00	2.983,00	282,00
31	D.I.R. Bunut	Irigasi Rawa	2.948,00	2.948,00	110,00
32	D.I.R. Jaya Karet	Irigasi Rawa	1.710,00	1.710,00	119,00
33	D.I.R. Basirih Hulu	Irigasi Rawa	1.342,00	1.342,00	63,00
34	D.I.R. Jaya Kelapa	Irigasi Rawa	1.124,00	1.124,00	163,00
35	D.I.R. Basirih Hilir	Irigasi Rawa	1.360,00	1.360,00	412,00
36	D.I.R. Samuda Kota	Irigasi Rawa	1.849,00	1.849,00	219,00
37	D.I.R. Handil Sohor	Irigasi Rawa	2.165,00	2.165,00	128,00
38	D.I.R. Samuda Kecil	Irigasi Rawa	2.502,00	2.502,00	197,00
39	D.I.R. Samuda Besar	Irigasi Rawa	1.772,00	1.772,00	396,00
40	D.I.R. Sebamban	Irigasi Rawa	1.297,00	1.297,00	317,00
41	D.I.R. Sei Ijum Raya	Irigasi Rawa	1.038,00	1.038,00	176,00
42	D.I.R. Parebok	Irigasi Rawa	2.799,00	2.766,00	589,00
43	D.I.R..Serambut	Irigasi Rawa	2.874,00	2.874,00	2.874,00
44	D.I.R. Camp. Putih	Irigasi Rawa	1.984,00	1.984,00	373,00

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI *) (Ha)	LUAS AREAL (Ha)		
			BAKU	POTENSIAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5	6
45	D.I.R. Kalap Seban Mente	Irigasi Rawa	1.310,00	1.310,00	172,00
46	D.I.R. Keramat	Irigasi Rawa	1.299,00	1.299,00	82,00
47	D.I.R. Pematang Buluh	Irigasi Rawa	1.024,00	1.024,00	122,00
48	D.I.R. Seruyan I	Irigasi Rawa	2.848,00	2.848,00	241,00
49	D.I.R. Seruyan II	Irigasi Rawa	2.702,00	2.702,00	91,00
50	D.I.R. Seruyan III	Irigasi Rawa	2.283,00	2.283,00	174,00
51	D.I.R. Seruyan IV	Irigasi Rawa	2.786,00	2.786,00	433,00
52	D.I.R. Seruyan V	Irigasi Rawa	2.681,00	2.681,00	452,00
JUMLAH		101.502,00	99.997,00	19.250,00	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021

Sedangkan dalam aspek pengendalian daya rusak SDA telah terbangun pengendali Banjir berupa tanggul pengendali Banjir di kel. Bereng Bengkel Kota Palangka Raya, pengaman tebing sungai di Anjir Kalampan Kab. Pulang Pisau. Dan Bangunan Pengaman Pantai/Abrasi Pantai pada Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kab. Sukamara.

2.3.1.3.4 Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 telah dilegalisasi dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015. Pemerintah provinsi selain melaksanakan urusan penataan ruang provinsi, juga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota di wilayahnya. Sampai dengan tahun 2020 dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Tengah seluruhnya telah mempunyai Perda RTRW yang selanjutnya akan didetailkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.

Berikut dijabarkan Perda RTRW menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2. 57 Perda RTRW Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	Nomor Perda	Tanggal Perda
1	2	3	4
1	Kota Palangka Raya	No. 1 Tahun 2019	21 Maret 2019
2	Kab. Kotawaringin Timur	No. 5 Tahun 2015	29 Juni 2015
3	Kab. Barito Selatan	No. 4 Tahun 2014	9 Juni 2014
4	Kab. Sukamara	No.14 Tahun 2012	24 Juli 2012
5	Kab. Lamandau	No. 9 Tahun 2014	17 Juli 2014
6	Kab. Gunung Mas	No. 8 Tahun 2014	12 Agustus 2014
7	Kab. Barito Timur	No. 6 Tahun 2014	22 September 2014
8	Kab. Murung Raya	No. 1 Tahun 2018	29 Januari 2018
9	Kab. Kotawaringin Barat	No. 1 Tahun 2018	19 Februari 2018
10	Kab. Kapuas	No. 5 Tahun 2019	21 Maret 2019
11	Kab. Seruyan	No. 5 Tahun 2019	21 Maret 2019

12	Kab. Barito Utara	No. 3 Tahun 2019	1 September 2019
13	Kab. Katingan	No. 04 Tahun 2019	21 Maret 2019
14	Kab. Pulang Pisau	No. 01 Tahun 2019	21 Maret 2019

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, 2021

Tabel 2. 58 Perkembangan Revisi Perda dan Perkada RDTR Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator	2019	2020
Perkembangan Revisi Perda dan Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-	1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, 2021

Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelesaikan pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK) RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, dimana hasilnya adalah Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Rekomendasi Gubernur No. 188.44/313/2020, tanggal 20 Juli 2020.

Proses revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 akan dilaksanakan pada tahun 2021 diawali dengan melakukan penyusunan beberapa dokumen kelengkapan antara lain : Dokumen Teknis (Materi Teknis, Album Peta dan Naskah Akademis) dan Naskah Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diintegrasikan dengan Perda RZWP3K.

2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia. Dalam masyarakat Indonesia, perumahan beserta prasarana pendukungnya merupakan pencerminan dari jati diri manusia, baik secara perseorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya. Perumahan dan permukiman juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, sehingga perlu dibina dan dikembangkan demi kelangsungan serta peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Perumahan dan permukiman selain berfungsi sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia dan pengejawantahan dari lingkungan sosial yang tertib, juga merupakan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri perumahan sebagai penyedia lapangan kerja serta pendorong pembentukan modal yang besar. Melalui peningkatan serta pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan berperan serta secara aktif dalam pembangunan.

Bila ditinjau dari segi kewenangan berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka ada 4 sub urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sebagai berikut:

2.3.1.4.1 Perumahan

Pokok-pokok penyelenggaraan kewenangan dalam sub urusan perumahan terfokus pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. Penjelasan tentang SPM ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. SPM Dalam bidang perumahan meliputi 2 aspek sbb:

1. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
2. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

Untuk saat ini pelaksanaan SPM masih dalam tahapan perencanaan, yakni pada tahapan sinkronisasi, koordinasi dan pendataan. Untuk pelaksanaan SPM secara fisik masih belum dapat dilaksanakan karena syarat dan kondisi yang dibutuhkan belum terpenuhi, diantaranya belum ada bencana provinsi yang menyebabkan kerusakan rumah dan belum adanya program pemerintah yang mengakibatkan relokasi.

2.3.1.4.2 Kawasan Permukiman Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Permukiman kumuh kewenangan provinsi yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai total luas 760,00 hektare yang tersebar di kabupaten/kota menjadi permasalahan nyata yang harus dihadapi. Permukiman kumuh menggambarkan permukiman yang tumbuh secara spontan di perkotaan dalam lingkungan yang kurang sehat dan tidak didukung oleh Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, dan jalan akses darurat.

Tabel 2. 59 Jumlah dan Luasan Kawasan Kumuh lingkup kewenangan Provinsi Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Kumuh (Luas10-15 Ha)	Total Luas (Ha)
1	Barito Selatan	0	0*
2	Barito Timur	2	25,75
3	Pulang Pisau	0	0*
4	Kapuas	5	64,21
5	Palangka Raya	0	0*
6	Katingan	6	78,45
7	Kotawaringin Timur	3	84,82
8	Seruyan	41	410
9	Kotawaringin Barat	0*	0*

10	Sukamara	2	23
11	Lamandau	1	14,78
12	Gunung Mas	1	14,64
13	Murung Raya	1	14,37
14	Barito Utara	2	29,98
	Kalimantan Tengah	64	760,00

*Tidak ada Kawasan kumuh dengan luas 10-15 ha (kewenangan provinsi) (data agustus 2021)

Sumber: Diolah dari data Kabupaten/Kota, Disperkimtan Prov. Kalteng, 2020

Selain itu faktor lain yang juga berkontribusi dalam penetapan status kumuh adalah keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dengan jumlah RTLH mencapai 338.281 Unit (kondisi tahun 2020) atau sekitar 48,03% yang dihitung berdasarkan data BPS Susenas Maret 2020 dari total rumah tangga di Kalimantan Tengah, maka pemerintah provinsi mempunyai tugas yang tidak ringan.

Tabel 2. 60 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Layak Huni (RLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	RTLH	RLH
1	Palangka Raya	13.861	62.987
2	Kapuas	61.760	30.064
3	Katingan	18.960	24.286
4	Pulang Pisau	16.722	15.751
5	Kotawaringin Timur	55.014	67.449
6	Kotawaringin Barat	31.615	50.382
7	Seruyan	29.249	28.753
8	Sukamara	9.340	7.862
9	Lamandau	11.306	11.305
10	Gunung Mas	16.245	12.140
11	Barito Utara	16.636	16.102
12	Barito Selatan	17.826	16.992
13	Barito Timur	17.610	15.756
14	Murung Raya	22.138	6.312
	Kalimantan Tengah	338.361	366.112

Sumber: Di olah dari data BPS, 2021

Ketidakmampuan ekonomi juga menjadi alasan masyarakat untuk memilih berdomisili di kawasan kumuh dengan kondisi rumah yang tidak layak huni yang notabene dianggap sebagai kawasan yang lebih terjangkau secara finansial. Maka tantangan lain dalam mewujudkan pemenuhan hunian bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni adalah dalam hal pembiayaan perumahan yaitu rendahnya daya beli masyarakat yang disebabkan harga rumah yang tidak terjangkau. Tidak terjangkaunya harga rumah dipengaruhi berbagai hal, seperti harga lahan yang mahal, laju inflasi yang terus meningkat, pembangunan yang pesat di kawasan sekitar. Data tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa realisasi pembangunan perumahan melalui fasilitas KPR melalui BTN Cabang Palangka Raya se-Kalimantan Tengah mencapai

4.413 unit senilai Rp. 590.676 Miliar.

Tabel 2. 61 Realisasi Pembangunan Perumahan KPR Melalui BTN Cabang Palangka Raya

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2020	
		Selesai	Nilai (Ribuan Rupiah)
1	Kotawaringin Barat	309	41.844.535.992
2	Kotawaringin Timur	661	95.746.364.096
3	K a p u a s	20	2.743.800.000
4	Barito Selatan	6	742.246.000
5	Barito Utara	-	-
6	Sukamara	46	6.244.216.000
7	Lamandau	66	8.868.772.000
8	Seruyan	13	1.760.000.000
9	Katingan	45	6.013.055.000
10	Pulang Pisau	23	3.053.926.000
11	Gunung Mas	-	-
12	Barito Timur	17	2.201.327.000
13	Murung Raya	-	-
14	Palangka Raya	657	91.567.853.000
	Kalimantan Tengah	1.863	260.786.098.088

Sumber: Kab/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Bila dilihat dari sektor penjualan perumahan dengan fasilitas KPR BTN Cabang Palangka Raya, maka sejak tahun 2019-2020 terjadi 1.863 unit Rumah yang terjual dengan nilai total Rp.260.786 Milyar. Hal ini memberikan gambaran bahwa kita masih cukup jauh untuk mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih besar di Kalimantan Tengah.

Tabel 2. 62 Realisasi Penjualan Rumah yang Dibangun Perum Perumnas dan Pengembang Swasta Melalui KPR BTN Cabang Palangka Raya

No	Kabupaten/Kota	Pengembang Swasta		Perum Perumnas		Jumlah Total	
		Unit	Nilai (ribu rupiah)	Unit	Nilai (ribu rupiah)	Unit	Nilai (ribu rupiah)
1	Kotawaringin Barat	309	41 844 535 992	-	-	309	41 844 535 992
2	Kotawaringin Timur	661	95 746 364 096	-	-	661	95 746 364 096
3	K a p u a s	20	2 743 800 000	-	-	20	2 743 800 000
4	Barito Selatan	6	742 249 000	-	-	6	742 249 000
5	Barito Utara	-	-	-	-	-	-
6	Sukamara	46	6 244 216 000	-	-	46	6 244 216 000
7	Lamandau	66	8 868 772 000	-	-	66	8 868 772 000
8	Seruyan	13	1 760 000 000	-	-	13	1 760 000 000
9	Katingan	45	6 013 055 000	-	-	45	6 013 055 000
10	Pulang Pisau	23	3 053 926 000	-	-	23	3 053 926 000
11	Gunung Mas	-	-	-	-	-	-
12	Barito Timur	17	2 201 327 000	-	-	17	2 201 327 000
13	Murung Raya	-	-	-	-	-	-
14	Palangka Raya	657	91 567 853 000	-	-	657	91 567 853 000

No	Kabupaten/Kota	Pengembang Swasta		Perum Perumnas		Jumlah Total	
		Unit	Nilai (ribu rupiah)	Unit	Nilai (ribu rupiah)	Unit	Nilai (ribu rupiah)
	Kalimantan Tengah	186 3	260 786 098 088	-	-	186 3	260 786 098 088

Sumber: Kab/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

2.3.1.4.3 Prasarana dan Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang layak, sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU ini dilaksanakan pada kawasan permukiman di perkotaan dan di perdesaan yang penyediaan perumahannya dilaksanakan secara swadaya masyarakat maupun oleh Badan Usaha/Pengembang. Sampai saat ini PSU yang telah tertangani adalah berupa jalan dan drainase lingkungan. Capaian sampai tahun 2019 adalah terdiri dari jalan sepanjang 97.000 meter dan drainase sepanjang 44.000 meter.

Mengacu pada peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, maka pelaksanaan prasarana dan sarana dan utilitas umum permukiman dilakukan dengan skema hibah kepada pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena jalan dan drainase lingkungan merupakan aset dari pemerintah kabupaten/kota.

2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum, angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat dari jumlah tindak pidana yang terjadi dimana angkanya mulai dari tahun 2015 mengalami penurunan. Namun dari itu, untuk terus menciptakan kondisi yang lebih kondusif perlu adanya pengamanan khusus dalam beberapa kasus terutama yang terkait SARA mengingat pernah terjadi kejadian luar biasa di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah tindak pidana yang terdata di Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 63 Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

Kepolisian Resort	Jumlah Tindak Pidana				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kotawaringin Barat	481	289	390	308	308
Kotawaringin Timur	411	384	326	290	333
Kapuas	313	301	325	297	294
Barito Selatan	119	106	112	112	116
Barito Utara	127	175	139	151	127
Sukamara	75	38	37	41	37

Lamandau	129	158	146	114	105
Seruyan	216	147	92	95	106
Katingan	187	192	160	151	101
Pulang Pisau	135	136	109	126	124
Gunung Mas	149	85	69	64	71
Barito Timur	145	141	135	119	90
Murung Raya	61	66	62	50	49
Palangka Raya	253	403	583	444	622
Kalimantan Tengah	2.801	2.621	2.685	2.362	2.483

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Berdasarkan jumlah tindak pidana di Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah penyelesaian tindak pidana menurut kepolisian resort di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 2. 64 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019

Kepolisian Resort	Jumlah Tindak Pidana		
	2018	2019	2020
Kotawaringin Barat	319	244	255
Kotawaringin Timur	246	236	264
Kapuas	253	253	253
Barito Selatan	107	91	117
Barito Utara	121	125	128
Sukamara	27	18	24
Lamandau	65	63	55
Seruyan	76	97	94
Katingan	145	127	90
Pulang Pisau	92	107	100
Gunung Mas	58	58	58
Barito Timur	132	112	94
Murung Raya	56	47	47
Palangka Raya	334	286	311
Kalimantan Tengah	2.031	1.864	1.890

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Upaya penurunan konflik dilakukan dengan melakukan pemilihan strategi, kebijakan, dan program yang tepat dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi (mitra kerja) yang dibentuk untuk keperluan tersebut seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam pencegahan dini. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah juga telah memiliki 100 (seratus) orang aparaturnya yang telah dibekali wawasan untuk mendeteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum. Namun demikian jika konflikpun terjadi maka akan diusahakan agar cepat diselesaikan secara optimal agar tidak berdampak luas. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dimana tidak terdapat

kasus kematian yang disebabkan konflik dalam kurun waktu tahun 2016-2020 serta proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya pada tahun 2019 yaitu sebesar 73% naik dibandingkan tahun 2018 sebesar 70%.

Tabel 2. 65 Jumlah Bencana dan Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanah Longsor	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	11	8	1
2	Banjir	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	129	100	57
3	Karhutla	4,032	328	320	935	2633	850
4	Angin Kencang/ Puting Beliung	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	10	13	-
5	Gelombang Pasang atau Abrasi	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	6	-	-

Sumber : Pusdalops BPBPK Kalteng, 2021

2.3.1.6 Urusan Sosial

Dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial, Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nilai rata-rata capaian SPM Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Urusan SPM Bidang Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 adalah 74,74% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan dimuat pada subbab lain pada bab ini. Jenis pelayanan SPM Bidang Sosial di daerah provinsi terdiri atas :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti,
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti,
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti,
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandang dan Pengemis di dalam Panti,
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi.

Nilai rata-rata capaian SPM Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Urusan SPM Bidang Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah 74,74% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 66 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Provinsi		Keterangan
		Indikator Kinerja		Target 2019	Realisasi 2019	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Disabilitas Terlantar di Dalam Panti sosial	2019	100%	73,84 %	
		Persentase (%) Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti sosial				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di dalam panti sosial	2019	100%	100 %	
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti sosial	2019	100%	100%	
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandang dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di dalam Panti	2019	100%	0	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki Panti khusus untuk tuna sosial
		Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti				
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi korban bencana daerah provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah provinsi	2019	100%	100%	
		Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Provinsi		Keterangan
		Indikator Kinerja		Target 2019	Realisasi 2019	
		Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah provinsi				
Nilai rata-rata SPM Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah					74,74 %	

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), telah melakukan pelayanan dan pendampingan kepada orang-orang PMKS, berikut data PMKS yang telah dilayani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2. 67 PMKS yang Telah dilayani di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Korban bencana alam	21.160 Jiwa (5893 KK)
2	Korban bencana sosial	1.690 Jiwa (334 KK)
3	Gepeng (gembel dan pengemis)	20 orang
4	Penderita HIV/AIDS	20 orang
5	Pecandu narkoba	15 orang
6	Fakir Miskin	137.463 orang
7	Anak terlantar	750 orang
8	Anak korban kekerasan lingkungan Rumah Tangga	4 orang
9	Anak korban kekerasan lingkungan Masyarakat	8 orang
10	Anak korban kekerasan seksual	29 orang
11	Lanjut usia terlantar	265 orang
12	Komunitas Adat Terpencil	172 orang
13	Penyandang Tuna Netra	874 orang
14	Penyandang Tuna Wicara-Rungu	966 orang
15	Penyandang Tuna Daksa	1.205 orang
16	Penyandang Tuna Grahita	146 orang
17	Penyandang Cacat Fisik	317 orang
18	Tuna Susila	690 orang
19	Bekas narapidana	1.798 orang
20	Korban penyalahgunaan NAPZA	35 orang

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

2.3.2 Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan data Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021, terjadi peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas, baik yang termasuk Angkatan kerja maupun bukan Angkatan kerja. Hal yang perlu diperhatikan yaitu kenaikan jumlah angkatan kerja pada tahun 2020, dimana jumlah yang bekerja mengalami penurunan dan jumlah pengangguran mengalami kenaikan.

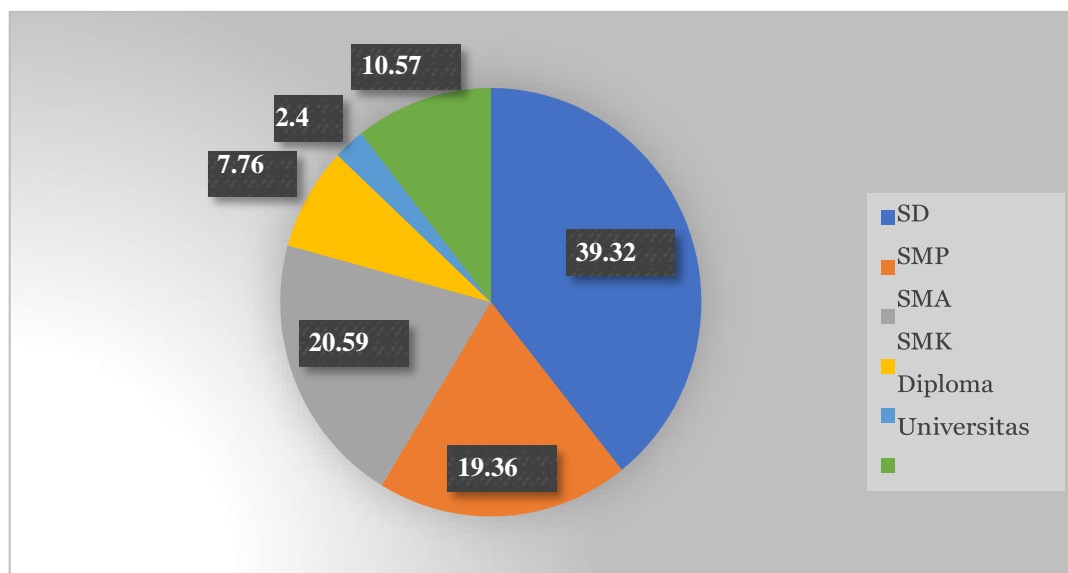
Hal ini bisa dikarenakan salah satu dampak negatif dari adanya pandemi *COVID-19*.

Tabel 2. 68
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 - 2020

Jenis Kegiatan Utama	2018	2019	2020
Angkatan Kerja	1.355.300	1.374.427	1.381.442
Bekerja	1.302.363	1.318.954	1.318.133
Pengangguran	52.937	55.473	63.309
Bukan Angkatan Kerja	589.502	609.124	638.075
Sekolah	138.482	157.452	145.995
Mengurus Rumah Tangga	398.101	398.748	420.579
Lainnya	52.919	52.924	71.501
Jumlah	1.944.802	1.983.551	2.019.517

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021

Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2019 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 522,1 ribu orang (39,32 persen), SMA sebanyak 273,5 ribu orang (20,59 persen), SMP sebanyak 257,1 ribu orang (19,36 persen) dan SMK sebanyak 103,1 ribu orang (7,76 persen). Sementara itu, penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma/Universitas) hanya sebanyak 172,2 ribu orang (12,97 persen) mencakup 31,8 ribu orang berpendidikan Diploma I/II/III (2,40 persen) dan 140,4 ribu orang berpendidikan Universitas (10,57 persen).



Sumber: BRS BPS Prov. Kalimantan Tengah, 2020

Gambar 2. 54 Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Kondisi ketenagakerjaan jika dilihat dari tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja, tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2019, penduduk Provinsi Kalimantan Tengah paling banyak bekerja pada kategori pertanian sebesar 38,01 persen, disusul oleh kategori perdagangan sebesar 15,69 persen dan kategori administrasi

pemerintahan sebesar 7,89 persen.



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Tengah, 2020

Gambar 2. 55 Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Dalam dunia pekerjaan juga terkadang bisa terjadi perselisihan yang terjadi. Hal ini bisa terjadi karena setiap pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan masing-masing yang berbeda. Perselisihan ini bisa terjadi antara sesama pekerja ataupun antara pekerja dengan pemberi kerja atau bisa juga antara perusahaan dengan masyarakat. Kondisi perselisihan kerja yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 68.a Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Prov/Kab/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Pekerja	Jumlah Kasus Selesai			Dalam Proses	Kasus Ditolak
				PB	Anjuran	Bipartit		
1	Provinsi	42	548	11	31	-	3	6 Dikembalikan 1 ke Pengawas
2	Palangka Raya	3	7	3	-	-	1	-
3	Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-	-
4	Kapuas	10	43	6	-	4	-	-
5	Gunung Mas	1	1	1	-	-	-	-
6	Barito Selatan	3	5	1	-	2	3	-
7	Barito Timur	17	20	8	9	-	-	-
8	Barito Utara	4	106	1	-	3	-	-
9	Murung Raya	6	10	6	-	-	-	-
10	Katingan	5	8	-	-	5	-	-
11	Seruyan	56	80	-	-	56	-	-
12	Kotawaringin Timur	25	35	20	5	-	-	-
13	Kotawaringin	3	7	3	-	-	1	-

	Barat							
14	Lamandau	20	31	20	-	-	-	-
15	Sukamara	2	6	2	-	-	-	-
	Jumlah	197	907	82	45	70	8	7

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yaitu dengan pemberian pelatihan teknis kepada tenaga kerja maupun para calon tenaga kerja. Pada tahun 2020 ada 62 kegiatan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh 9 OPD Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 13.896 orang. Kesembilan OPD tersebut yaitu, Dinas Pendidikan, Disdagperin, Diskop UKM, Dinas Sosial, Dinas Perkebunan, Biro Kesra, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, serta Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan.

Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) di Provinsi Kalimantan Tengah ada sebanyak 9 BLK yang terdiri dari 1 BLK Provinsi di Kabupaten Barito Selatan dan 8 BLK tersebar di 8 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Sukamara. Dari 9 BLK tersebut baru 4 BLK yang telah terakreditasi yaitu BLK Provinsi di Kabupaten Barito Selatan, BLK Kabupaten Kotawaringin Barat, BLK Kabupaten Kotawaringin Timur, dan BLK Kota Palangka Raya.

Selain peningkatan kualifikasi, tenaga kerja juga perlu dibekali dengan jaminan jiwanya. Hal ini dikarenakan terkadang terdapat kecelakaan kerja. Sehingga jika hal yang tidak diinginkan ini terjadi, para pekerja juga bisa mendapatkan bantuan untuk pengobatannya. Secara lebih lengkap data jumlah pekerja yang telah terdaftar di Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.68.b Data Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

SEKTOR/ KLUI	JUMLAH		JUMLAH TENAGA KERJA			
	WAJIB	TERDAFTAR	WAJIB		TERDAFTAR	
			WNI	WNA	WNI	WNA
1	277	277	208.131	214	195.674	124
2	199	199	21.534	74	33.918	86
3	88	88	13.356	34	14.797	20
4	106	106	4.343	1	2.076	18
5	450	448	11.217	47	4.222	41
6	559	512	8.306	53	7.463	1
7	110	130	1.884	24	4.583	0
8	329	264	6.400	1	9,904	6

9	130	128	2.285	32	1.977	0
JUMLAH	2.248	6.759	289.431	280	289.431	296

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan strategi untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Guna mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, sedangkan untuk pembangunan di bidang anak dapat diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Adapun Indikator Kinerja yang ada pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	(%)	7,6	6,5	7,58	6,34	6,34
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	(%)	87,39	88,76	94,51	80,85	80,85
3	Rasio KDRT	-	0,0834	0,0181	0,1761	8,5097	8,5097
4	Persentase Jumlah Tenaga kerja di bawah umur	(%)	10,96	7,56	11,45	0	0
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	(%)	53,55	53,61	49,19	56,6	57,6
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	(%)	100	100	100	100	100
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	78,23	79,36	77,03	83,20	82,41
8	Indek Pembangunan Gender (IPG)	-	89,07	88,91	89,13	89,09	89,03

Sumber: Dinas P3APKB, Tahun 2021

2.3.2.3 Urusan Pangan

Sejalan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, permintaan untuk pangan, bahan baku industri, perubahan lingkungan dan iklim usaha yang semakin meningkat. Disisi lain ketersediaan sumber daya lahan yang produktif semakin menyempit dengan beralihnya penggunaan lahan untuk pertanian ke non pertanian.

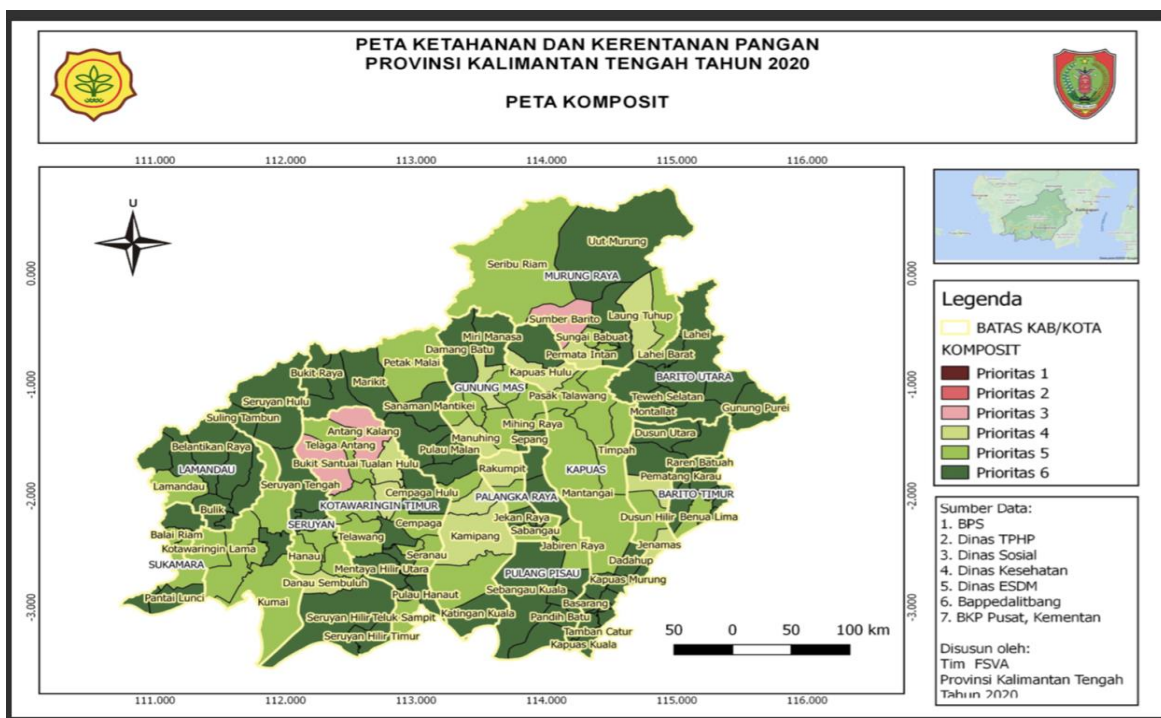
Bidang pertanian masih menjadi pilar pembangunan nasional. Di samping itu, sektor pertanian menjadi harapan dalam penyerapan tenaga kerja

serta diandalkan menjadi sumber devisa negara dari ekspor hasil produksi pertanian, dan mempunyai peran langsung dalam perekonomian nasional melalui pembentukan PDRB, penyediaan pangan dan pakan, bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, peran tidak langsung sektor pertanian dalam perekonomian nasional adalah mempunyai efek pengganda (multiplier effect) berupa keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi. Dengan demikian, pembangunan pertanian dapat memperbaiki pendapatan penduduk secara lebih merata dan berkelanjutan, serta pada akhirnya dapat memakmurkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha dalam masyarakat dalam pemenuhan pangan keluarga, masyarakat. yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Hakekat pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah Provinsi pada tahun 2020 sebesar 7,8 Ton. Penurunan cadangan pangan pokok pemerintah sebesar -83,52 Ton kurang dari target 78,3 Ton. Pada Tahun 2020 menurun -83,52 Ton dari tahun 2019 disebabkan adanya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah ke Lokasi Bencana Banjir yang berada di wilayah daerah Provinsi Kalimantan Tengah/Kota.

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana, serta melindungi petani/produsen pangan strategi sesuai dengan potensi pangan daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa, hari-hari besar lainnya.



Gambar 2. 56 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Berdasarkan analisis komposit ketahanan pangan pada tahun 2019, kecamatan dengan tingkat kerentanan tinggi dan sedang (prioritas 1 dan 2) tidak ditemukan di Provinsi Kalimantan Tengah, namun ada 3 kecamatan yang termasuk kecamatan rentan pangan (prioritas 3) yaitu kecamatan Bukit Santiaui dan Antang Kalang (Kab.Kotawaringin Timur) dan kecamatan Sumber Barito (Kab. Murung Raya), sedangkan kabupaten dengan tingkat ketahanan pangan paling baik adalah Kabupaten Kapuas

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi.

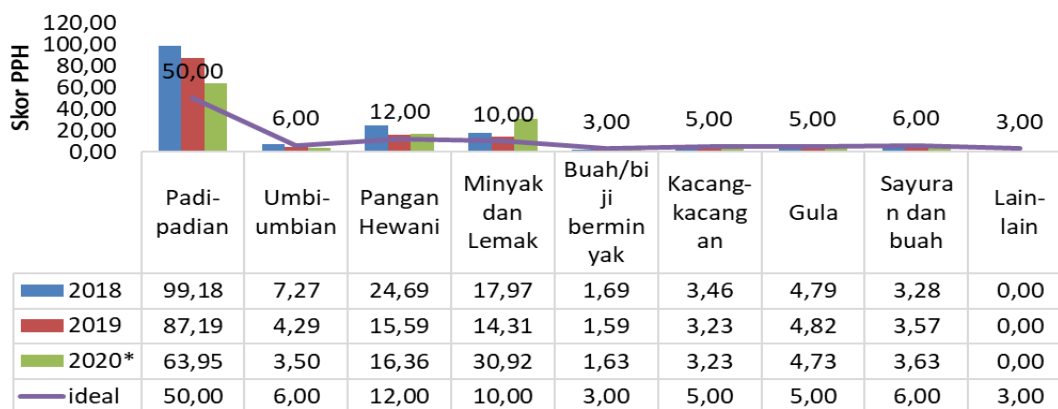
Tabel 2. 70 Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019

Nama Indikator	Satuan	Capaian				Keterangan
		2016	2017	2018	2019	
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi	Skor	87,8	89,8	82,8	83,2	Masih Tinggi Konsumsi Beras di Masyarakat

Sumber Dinas Ketahanan Pangan, 2020

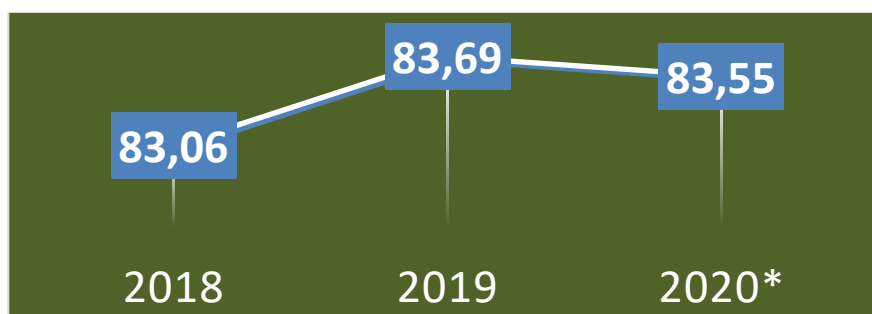
Selama 3 tahun terakhir, kondisi Ketersediaan Energi pada kelompok

umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah masih belum memenuhi standar mutu komposisi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk.



Gambar 2. 57 Perkembangan Komposisi Pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2020*
Sumber Dinas Ketahanan Pangan, 2020

Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut juga diamanatkan oleh undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH). Berkenaan dengan hal tersebut, maka ke depan diversifikasi/penganekaragaman konsumsi pangan sangat diperlukan dengan harapan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumberdaya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan akan mendorong pengembangan ragam sumber pangan, utamanya tanaman sumber karbohidrat, protein dan zat gizi mikro, serta ternak dan ikan sebagai sumber protein. Selain itu akan dapat menumbuhkan beragam usaha pengolahan pangan usaha rumah tangga, kecil, menengah dan usaha besar. Upaya penganekaragaman konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi pemerintah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.



Gambar 2. 58 Perkembangan Skor Pph Ketersediaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2020*

Perkembangan skor PPH Ketersediaan selama 3 tahun terakhir masih belum mencapai PPH Ideal (=100) artinya komposisi energi dari pangan masih belum memenuhi standar mutu pangan penduduk Kalimantan Tengah.

2.3.2.4 Urusan Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan secara umum tidak berubah dengan adanya perubahan Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah provinsi memiliki 9 kewenangan dalam urusan bidang pertanahan sebagai berikut:

1. Izin Lokasi

Izin lokasi adalah izin yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota kepada perusahaan tanah yang diberikan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan/izin prinsip penanaman modal wajib memperoleh izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal.

Perusahaan/pemohon izin lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum izin lokasi ditetapkan/diterbitkan, izin lokasi diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun apabila perolehan tanah lebih dari 50% (lima puluh persen) diluar tanah yang dimohon. Dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Tata Ruang Wilayah diperuntukan bagi penggunaan sesuai dengan rencana perencanaan modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan memuat persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.

Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak tanah, penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah

serta kemampuan tanah.. penerbitan izin lokasi di Kalteng melalui PTSP berdasarkan Pergub Kalteng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ketentuan mengenai objek dan subjek Izin Lokasi, tata cara pemberian dan jangka waktu hak dan kewajiban pemegang Izin Lokasi, dan pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi.

Tabel 2. 71 Data Izin Lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Jenis Perizinan	Luas (Ha)
1	Luas Hak Guna Usaha	1.119.810,33
2	Luas Perkembangan Perizinan (arahan lokasi, izin lokasi dan izin usaha perkebunan dan status kawasan (pelepasan kawasan hutan) serta hak kepemilikan atas tanah (hak guna usaha) perkebunan besar)	3.073.795,65

Sumber: Diolah dari data Kabupaten/Kota, Disperkimtan Prov. Kalteng, 2021

2. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaan diatur dengan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala ATR/BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atau merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya dibutuhkan dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukan. Proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda-benda di atasnya yang dilakukan melalui skema atau proses penyelenggaraan tahapannya. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di provinsi dan kab/kota sebagai berikut:

Tabel 2. 72 Data Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten	Luas Bendungan (Ha)	Luas Pengadaan Yang Telah Selesai (Ha)
1	Barito Selatan	281	281
2	Barito Timur	33,214	33,214

3	Barito Utara	126,57	81,734
4	Katingan	282,27	(dalam proses)

Sumber: Diolah dari data Kabupaten/Kota, Disperkimtan Prov. Kalteng, 2021

3. Sengketa tanah garapan

Sengketa tanah garapan merupakan perselisihan pertanahan yang terus menerus muncul antar orang perseorangan, maupun kelompok masyarakat terhadap sebidang tanah di dalam kawasan hutan yang belum dilekati dengan sesuatu atas hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang. Sengketa tanah garapan timbul akibat pengaduan masyarakat maupun inventarisasi Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan penyelesaiannya melalui mediasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat tanpa harus dilanjutkan sampai ke lembaga pengadilan berdasarkan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kasus Pertanahan dan Surat Kepala BPN perihal Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013 sebagai langkah mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Daerah.

Tabel 2. 73 Jumlah Sengketa Tanah Garapan Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten	Jumlah Sengketa Tanah Garapan
1	Barito Selatan	3 Kasus
2	Sukamara	1 Kasus
3	Pulang Pisau	1 Kasus
4	Seruyan	3 Kasus
5	Gunung Mas	4 kasus
6	Kapuas	1 Kasus

Sumber: Diolah dari data Kabupaten/Kota, Disperkimtan Prov. Kalteng, 2021

4. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Pemberian santunan terhadap tanah negara tersebut dilakukan untuk kepentingan umum dan diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, hal tersebut dapat dikualifikasi sebagai kewenangan bebas/diskresi pemerintah daerah (Perpres No. 65 Tahun 2006). Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan setelah pemberian ganti kerugian dan santunan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 5, UU No. 2 Tahun 2012). Adapun kriteria ganti kerugian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan
- b. Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai,

- disampaikan kepada lembaga pertanahan dengan berita acara
- c. Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian (appraisal) penilai menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada bekas pemilik tersebut diatas pada azasnyaharusdibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi oleh karena mereka itu umumnya tidak mampu untuk membayar harga tanahnya didalam waktu yang singkat, maka oleh Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha- usaha lain supaya pra bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu uang ganti-kerugian yang dimaksudkan itu.

Sampai tahun 2020, untuk data kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah masih dihimpun.

5. Subyek dan obyek redistribusi tanah

Redistribusi Tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya para petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah. Sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA meliputi:

- 1) Tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA; dan
- 2) Tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk di Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini ada beberapa Kabupaten yang sudah dilaksanakan redistribusi tanah melalui TORA yaitu Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, dan Kotawaringin Barat. Selain itu untuk Kabupaten/Kota yang lain masih dalam tahap inventarisasi.
- 3) Dukungan dari Pemda dalam penyelenggaraan Reforma Agraria antara lain sebagai anggota Tim Pelaksana Harian

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

- 4) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang usulan TORA yang dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan pertanahan.
- 5) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang penyelesaian legalisasi aset TORA dari hasil inventarisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).
- 6) Mendukung dalam pelaksanaan redistribusi tanah dalam bentuk penataan akses objek reforma agraria.
- 7) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung Kegiatan *Food Estate*.

6. Tanah Ulayat

Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Penentuan Keberadaan Hak Ulayat (Permenag no. 5 tahun 1999, pasal 2), yaitu:

- 1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.
- 2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Sampai saat ini untuk penetapan tanah ulayat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum pernah menetapkan luasan dari tanah ulayat dikarenakan masih dalam tahap pendataan.

7. Tanah kosong

Dalam Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 110-2111 tanggal 28 September 2003 disebutkan Tanah Kosong adalah tanah yang

dikuasai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai serta hak pengelolaan, atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya, tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku atau sebagainya; atau yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum melakukan pendataan terkait tanah kosong.

8. Penggunaan tanah

Penggunaan tanah yang sah adalah penggunaan tanah yang memiliki bukti kepemilikan kuat yang diperoleh melalui Badan Pertanahan Nasional ataupun juga melalui lembaga terkait yang berada dibawahnya. Sampai saat ini perencanaan penggunaan tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO₂ dan NO; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

a. Indeks Kualitas Air

Indeks pencemaran air digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain :

- Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air
- Ketersedian dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta factor cuaca lokal, iklim regional dan global
- Penggunaan air
- Tingkat erosi dan sedimentasi.

Nilai IKA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar 61,15 (cukup baik) dan Tahun 2019 sebesar 56,80 (kurang baik) sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 53,61 (kurang baik)

Tabel 2. 74 Nilai IKA Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2018	61.15	Cukup Baik
2	2019	56.80	Kurang Baik
3	2020	53.61	Kurang Baik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Nilai IKU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar 87,07 (sangat baik) dan Tahun 2019 sebesar 88,83 (sangat baik), sedangkan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 89,84 (sangat baik).

Tabel 2. 75 Nilai IKU Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2018	87.07	Sangat Baik
2	2019	88.83	Sangat Baik
3	2020	89.84	Sangat Baik

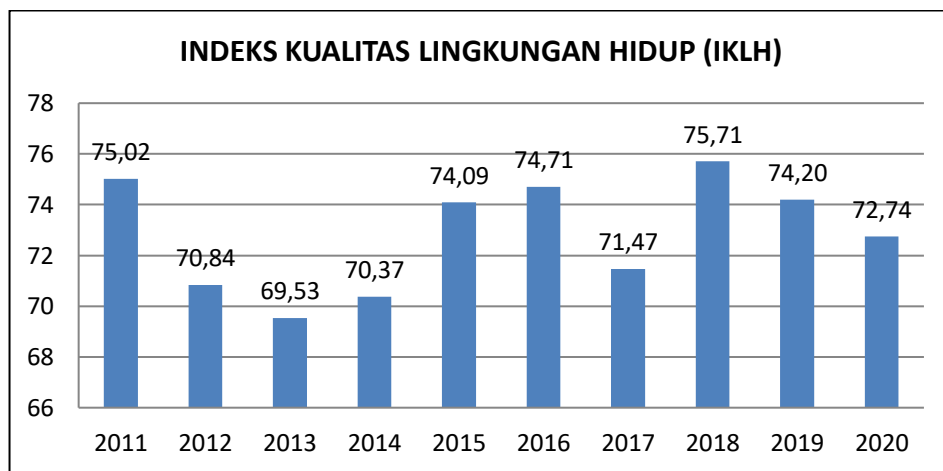
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Metode perhitungan IKTL mengkolaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. I. Nilai IKTL Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar 78,12 (baik) dan Tahun 2019 sebesar 76,27 (baik), sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 75,11 (baik)

Sebelum Tahun 2020, metode perhitungan IKLH menggunakan 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Mulai tahun 2020, terdapat penambahan indikator dan perubahan rumus IKLH. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH terbaru adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu dari Tahun 2011 Hingga Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 59 IKLH Provinsi Kalimantan Tengah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan sejak Tahun 2018. Pada tahun 2018 IKLH sebesar 75,71 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar 72.74. Penyumbang turunnya IKLH adalah dari rendahnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang semakin menurun akibat meningkatkan pencemaran sungai. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan akibat deforestasi dan alih fungsi kawasan sehingga berdampak terhadap perubahan tutupan lahan.

Tabel 2. 76 Nilai IKLH Provinsi di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kalimantan Barat	72,24	74,17	73,09	65,92	70,07
2	Kalimantan Tengah	74,71	71,47	75,71	74,20	72,74
3	Kalimantan Selatan	59,07	69,38	68,78	61,94	68,73

4	Kalimantan Timur	76,85	75,65	85,9	80,87	76,46
5	Kalimantan Utara	-	81,87	86,88	78,98	78,49
	Nasional	65,73	66,46	71,67	66,55	70,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adapun Indikator Kinerja yang ada pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 77 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Persen	99,98	99,99	99,93
2	Persentase Pasangan Berakta Nikah	Persen	21,25	28,98	35,32
3	Persentase Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	Persen	88,27	92,36	93,3
4	Persentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	Persen	76,71	80,84	83,5
5	Persentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	Persen	75,92	86,62	89,61
6	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Blanko	119.584	170.240	248.952
7	Persentase Kuantitas dan kualitas Database Kependudukan	Persen	90,26	89	95
8	Persentase DP4 Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak.	Persen	87	92	97
9	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Jumlah Lembaga	1	1	1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
10	Persentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder di Bidang Administrasi Kependudukan	Persen	84,09	90,26	95
11	Persentase Masyarakat yang Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	86,88	89	95

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2021

2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai maksud untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Adapun Indikator Kinerja yang ada pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 78 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang Berlaku	Persen	45,43	46,25	46,82	59,00
2	Persentase Lembaga Desa yang di bina dalam upaya pembangunan desa	Persen	5,44	8,16	8,53	6,30
3	Persentase Tingkat Perkembangan Desa	Persen	24,68	25,12	25,33	64,00
4	Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa	Persen	2,90	2,92	2,92	2,00
5	Persentase jumlah lembaga Ekonomi dan unit usaha masyarakat yang terbentuk	Persen	16,85	30,53	32,86	42,00
6	Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina dalam usaha meningkatkan ekonomi	Persen	0,01	0,02	0,03	0,06

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019
	Keluarga					
7	Persentase Kelembagaan Posyantek yang terbentuk	Persen	13,75	21,48	26,00	20,00
8	Jumlah terbentuknya kawasan perdesaan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan SDA (kawasan)	Kawasan	1,00	1,00	1,00	0,00

Sumber: Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2017-2019

2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Selain berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Adapun Indikator Kinerja yang ada pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 79 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	0,58	0,58	0,66	2,24	2,24
2	Rasio akseptor KB	-	78,1	79,2	79,15	79,85	79,85
3	Cakupan peserta KB aktif	orang	368.652	373.140	319.193	398.563	398.563
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	keluarga	55.110	243.211	244.060	239.740	239.740

Sumber: Dinas P3APPKB, Tahun 2021

2.3.2.9 Urusan Perhubungan

Unsur penting dalam urusan perhubungan di wilayah Kalimantan tengah adalah lalu lintas dan angkutan jalan darat dan sungai. Oleh karena itu, urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan angkutan umum, layanan pengujian kendaraan bermotor dan layanan kelancaran lalu lintas.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah sangat didukung dengan pembangunan di sektor perhubungan. Salah satu faktor penting dalam pengembangan suatu wilayah dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain yaitu pembangunan infrastruktur jaringan transportasi. Aksesibilitas antar wilayah dalam keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi kuat kaitannya dalam pemerataan pembangunan wilayah. Untuk mengatasi

kesenjangan jarak antara tempat asal dan tujuan diperlukan sarana dan prasarana sistem transportasi melalui jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan perangkutan. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi resiko yang diakibatkan dalam berlalu lintas.

1. Pelabuhan Laut

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah memiliki pelabuhan laut dan terminal umum sebagai sarana jasa perdagangan serta angkutan penumpang dan barang (ekspor, impor, maupun lokal) yang terdiri dari Pelabuhan yang ditetapkan sebagai **pelabuhan pengumpul**, yaitu:

- a. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai **pelabuhan pengumpul**, yaitu:
 - 1) Pelabuhan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; (diusulkan menjadi Pelabuhan Utama di Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur);
 - 2) Pelabuhan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 3) Pelabuhan Sukamara di Kabupaten Sukamara;
 - 4) Pelabuhan Teluk Segintung di Kabupaten Seruyan;
 - 5) Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas; dan
 - 6) Pelabuhan Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai **pelabuhan pengumpan regional**, yaitu:
 - 1) Pelabuhan Pegatan Mendawai di Kabupaten Katingan; dan
 - 2) Pelabuhan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.
- c. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai **pelabuhan pengumpan lokal**, yaitu:
 - 1) Pelabuhan Rangka Ilung di Kabupaten Barito Selatan;
 - 2) Pelabuhan Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 3) Pelabuhan Kereng Bangkirai di Kota Palangka Raya;
 - 4) Pelabuhan Kelanis di Kabupaten Barito Selatan;
 - 5) Pelabuhan Tanjung Tawas di Kabupaten Kapuas;
 - 6) Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan;
 - 7) Pelabuhan Sebuai di Kotawaringin Barat;

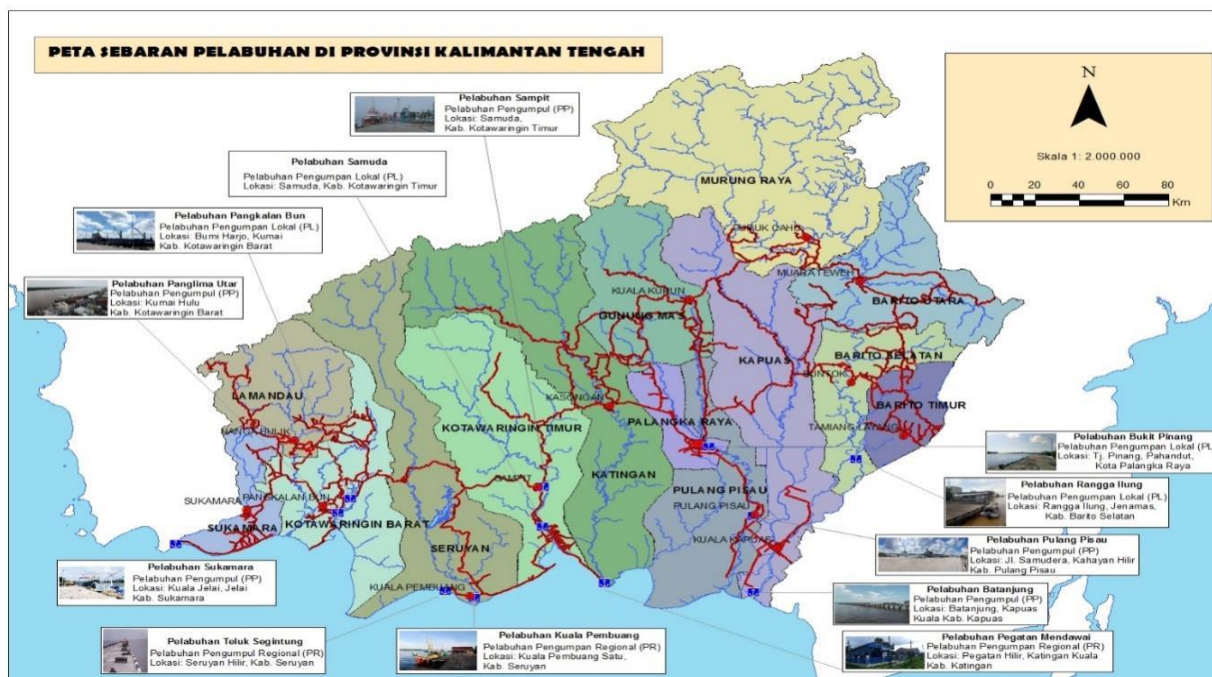
- 8) Pelabuhan Kuala Kuayan di Kotawaringin Timur;
 - 9) Pelabuhan Parenggean di Kotawaringin Timur;
 - 10) Pelabuhan Bukit Pinang di Kota Palangka Raya;
 - 11) Pelabuhan Teluk Sebangau di Kota Palangka Raya;
 - 12) Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau;
 - 13) Pelabuhan Balai Riam di Kabupaten Sukamara;
 - 14) Pelabuhan Jambi di Kabupaten Sukamara;
 - 15) Pelabuhan Pulau Nibung di Kabupaten Sukamara;
 - 16) Pelabuhan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau;
 - 17) Pelabuhan Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur;
dan
 - 18) Pelabuhan Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara.
- d. Terminal yang ditetapkan sebagai Terminal Umum, yaitu Terminal Umum Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- e. Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan **sebagai pangkalan pendaratan ikan (PPI)** adalah:
- 1) PPI Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau;
 - 2) PPI Batanjung di Kabupaten Kapuas;
 - 3) PPI Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara;
 - 4) PPI Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan;
 - 5) PPI Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 6) PPI Selat Jeruju Pagatan di Kabupaten Katingan; dan
 - 7) PPI Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Alur pelayaran nasional yang ada di Kalimantan Tengah meliputi:

- a. **Alur pelayaran Internasional:** Sampit – luar negeri.
- b. **Alur pelayaran Nasional:** Sampit – Semarang; Sampit – Surabaya; Sampit-Jakarta; Kumai - Semarang; Kumai – Surabaya; Kumai – Jakarta; Pangkalan Bun – Semarang; Pangkalan Bun – Surabaya; Pangkalan Bun - Jakarta; Sukamara – Semarang, Sukamara – Surabaya; Sukamara – Jakarta; Teluk Segintung – Semarang; Teluk Segintung – Surabaya; Teluk Segintung – Jakarta; Batanjung – Semarang; Batanjung – Surabaya; Batanjung – Jakarta; Pulang Pisau – Semarang; Pulang Pisau – Surabaya; dan Pulang Pisau – Jakarta.

Dermaga Penyeberangan Bahaur dengan panjang dermaga 117 meter lebar 8 meter konstruksi beton dengan kedalaman -10 m serta daya muat kapal 2000 dwt dengan jenis kapal ro-ro dan 1 terminal penumpang. Jalan akses dari Palangka Raya menuju Pelabuhan Penyeberangan Bahaur ± 135 km kondisi aspal dengan jarak tempuh ± 3,5 jam pendukung program strategis

nasional (psn) *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas.



Gambar 2. 60 Peta Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Tengah

2. Bandar Udara

Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa bandar udara, meliputi:

- a. **Bandar udara pengumpul skala tersier**, yaitu: Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya, dan Iskandar di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bandara Tjilik Riwut mempunyai luas lahan 288.295 (ha) dengan panjang landasan pacu sepanjang 2.500 meter lebar 45 meter, gedung terminal 29.124 m², gedung cargo 400 m², area parkir 20.520 m², kapasitas 2.625 orang serta kapasitas penumpang kedatangan 710 orang, pesawat terbesar boeing 737.900 er/a320 terletak di Palangka Raya Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bandar udara internasional.

Pengembangan Bandara Pangkalan Bun ke Sebuai untuk mendukung objek wisata Taman Nasional Tanjung Puting sebagai tujuan wisata internasional.

- b. **Bandara pengumpan**, meliputi: Haji Asan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan, Tumbang Samba di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Dirung di Kabupaten Murung Raya, Beringin di Kabupaten Barito Utara, dan Sanggu di Kabupaten Barito Selatan.

Maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan antar kabupaten/kota maupun antar provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain: Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink, Batik Air, Trigana Air/Kalstar, Susi Air, dan Aviastar. Disamping itu, untuk melayani kota-kota kecil ada juga pesawat dari MAF (*Mission Aviation Fellowship*) yang terbang untuk melayani kepentingan sosial. Selain untuk pelayanan angkutan barang dan penumpang, sejak tahun 2013 maskapai Lion Air membuka sekolah penerbangan (*flying school*) di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya.



Gambar 2. 61 Peta Bandar Udara di Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2. 80 Data Perkembangan Produksi Angkutan Udara 5 Tahun Terakhir di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pergerakan Pesawat Udara	9.256	16.265	9.879	8.482	9.427
Datang	4.628	8.132	4.938	4.240	4.714
Berangkat	4.628	8.133	4.941	4.242	4.713
Pergerakan Penumpang (Orang)	842.973	957.510	1.041.279	818.995	411.214
Datang	409.927	467.901	511.278	406.916	204.567
Berangkat	415.688	479.001	514.312	412.079	204.347
Transit	17.358	10.608	15.689	-	2.300
Jumlah Cargo (Kg)	4.745.626	5.298.832	5.724.640	5.645.241	6.651.219
Datang	3.933.823	4.540.844	4.855.636	4.622.796	5.561.674
Berangkat	811.803	757.988	869.004	1.022.445	1.089.545

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Penerbangan udara yang berangkat dan datang ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini mengindikasikan berkembangnya wilayah Kalimantan Tengah karenasemakin terbukanya aksesibilitas wilayah regional Kalimantan Tengah. Tetapi pada

tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan jumlah penerbangan dibandingkan tahun 2017, karena terjadinya bencana kabut asap. Berikut adalah data perkembangan produksi angkutan udara 5 tahun terakhir di Bandar Udara Tjlik Riwut Palangka Raya, Bandar Udara H. Asan Sampit dan Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun.

Tabel 2. 81 Data Perkembangan Produksi Angkutan Udara 5 Tahun Terakhir di Bandar Udara H. Asan Sampit Tahun 2016-2020

uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pergerakan Pesawat Udara	4.400	4.590	5.602	4.170	1.819
Datang	2.200	2.295	2.801	2.085	909
Berangkat	2.200	2.295	2.801	2.085	910
Pergerakan Penumpang (Orang)	245.980	304.017	373.776	248.493	94.904
Datang	113.665	142.188	171.403	122.131	46.720
Berangkat	109.920	137.391	168.314	126.362	48.184
Transit	22.395	24.438	34.059	13.324	3.864
Jumlah Cargo (Kg)	780.816	894.612	1.248.748	1.151.497	2.192.451
Datang	493.194	550.992	882.491	683.129	448.938
Berangkat	287.622	343.620	366.257	468.368	1.743.513

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Tabel 2. 82 Data Perkembangan Produksi Angkutan Udara 5 Tahun Terakhir di Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun Tahun 2016-2020

PRODUKSI TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
Pergerakan Pesawat Udara	5.832	7.868	7.493	7.686	3.312
Datang	2.916	3.932	3.747	3.843	1.657
Berangkat	2.916	3.936	3.746	3.843	1.655
Pergerakan Penumpang (Orang)	842.973	629.899	665.232	561.435	222.034
Datang	249.128	306.194	328.590	285.750	115.621
Berangkat	250.807	297.021	323.445	275.685	106.413
Transit	19.646	26.684	13.197	15.000	4.064
Jumlah Cargo (Kg)	1.379.202	940.771	1.377.027	1.294.197	721.301
Datang	676.113	468.671	804.640	712.961	366.272
Berangkat	703.089	472.100	572.387	581.236	355.029

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Adapun kinerja indikator lainnya pada bidang Perhubungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 83 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	PnP	135.325	433.708	486.271	374.823
2	Load Factor Angkutan Jalan	Persen	72	73	73	74

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	288	302	317	332
4	Jumlah Perusahaan Angkutan Laut	Unit	3	3	4	4
5	Jumlah Angkutan Udara (Rute Regional dan Nasional)	Armada	2	2	3	3
6	Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP)	Unit	12	12	13	13
7	Jumlah Angkutan Sungai	Unit	54	56	58	58
8	Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Type A)	Buah	1	1	2	2
9	Jumlah Bandara	Buah	10	10	10	10
10	Jumlah Dermaga Sungai	Buah	6	7	7	8
11	Jumlah Pelabuhan Laut	Buah	1	1	1	1
12	Kepemilikan KIR angkutan umum	Unit	23.317	23.559	23.813	24.080
13	Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR)	Hari	1	1	1	1
14	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp.	110.000	110.000	120.000	120.000
15	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan	Unit	346	363	382	400
16	Pemasangan Rambu Sungai	Unit	400	400	400	400
17	Pemasangan Rambu	Unit	2	2	3	3

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2020

3. Transportasi Darat

Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2 (dua) terminal tipe B yaitu Terminal Natai Suka Pangkalan Bun dan Terminal Sanggu Buntok merupakan dibawah kewenangan perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yang keberadaan sangat penting guna turun naik penumpang dan barang dan sebagai ikon daerah.

Tabel 2. 84 Data Terminal di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Nama Terminal	Jenis	Lokasi	Keterangan
1.	W. A. Gara	AKAP/ TIPE A	P. Raya	Bersifat Tetap
2.	Pangkalan Bun	AKDP/ TIPE B	KotawaringinBarat	Bersifat Tetap
3.	Buntok	AKAP/ TIPE B	BaritoSelatan	Bersifat Tetap
4.	Datah Manuah	AKDP/ TIPE C	P. Raya	-
5.	Jl. Tjilik Riwut Km.7,8	AKDP/ TIPE C	P. Raya	-
6.	Pulang Pisau	AKDP/ TIPE C	Pulang Pisau	-
7.	Kuala Kapuas	AKAP/ TIPE C	Kapuas	-
8.	Patih Rumbih	AKDP/ TIPE C	Kotawaringin Timur	-
9.	Kuala Pembuang	-	Seruyan	-
10.	Nanga Bulik	-	Lamandau	-
11.	Muara Teweh	AKAP/ TIPE C	Barito Utara	-
12.	Pasar Panas	AKAP/ TIPE C	Barito Timur	-

No.	Nama Terminal	Jenis	Lokasi	Keterangan
13.	Puruk Cahu	AKAP/ TIPE C	Murung Raya	-

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Tabel 2. 85 Data Terminal di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Nama PO	Jumlah Armada	Rata - rata Seat/Armada	Daya Angkut Seat
1	2	3	4	5
A AKDP				
1.	PT. Yessoe Travel	21	45	945
2.	CV. LOGOS	14	45	630
3.	PERUM DAMRI	12	44	528
4.	AGUNG MULYA	2	34	68
JUMLAH AKDP		49		2.171
B AKAP				
1.	PT. Yessoe Travel	9	27	243
2.	PO. HIDAYAH	5	26	130
3.	PO. DOA UMMI	13	26	338
4.	PO.KOPSIM BINTANG 9	5	16	80
5.	PO. CANDI PUTRA	5	16	80
6.	PO. YL	6	28	168
7.	PO.BARITO UTAMA	2	24	48
JUMLAH AKAP		45		1.087
JUMLAH AKAP DAN AKDP		94		3.258

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, 2020



Gambar 2. 62 Peta Terminal di Provinsi Kalimantan Tengah

2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan kinerja pembangunan daerah yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat diketahui dari ketersediaan *website* milik pemerintah daerah yang berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Adapun kinerja pada bidang komunikasi dan informatika disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 86 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019
1	Jumlah media publikasi yang digunakan	Portal	-	-	1,00
2	Jumlah aparatur yang mendapat Pelatihan teknis berbasis (TIK/Sandi/statistik)	Orang	-	-	30,00
3	Jumlah CCTV terpusat dan terintegrasi Kalimantan Tengah	Titik	11	42,00	42,00
4	Persentase pembangunan gedung kantor <i>Smart Province</i> tahap lanjutan	Persen	-	10,00	10,00
5	Jumlah pembangunan video tron	Lokasi	-	-	1,00
6	Peningkatan Perangkat jaringan Data Center	Kegiatan	-	-	3,00
7	Peningkatan Multimedia Center	Kegiatan	-	-	1,00
8	Jumlah aplikasi online layanan masyarakat yang dikembangkan	Aplikasi	-	-	3,00
9	Jumlah orang yang mendapat sosialisasi internet sehat	Orang	-	-	150,00
10	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan Internet Marketing untuk UMKM	Orang	-	-	200,00
11	Jumlah media publikasi cetak	Media Cetak	-	10,00	10,00
12	Jumlah media publikasi online	Media Online	-	-	8,00
13	Jumlah media publikasi elektronik	Media Elektronik	-	-	2,00
14	Jumlah konten informasi yang disampaikan melalui Vidiotron	Konten	-	-	201,00
15	Jumlah informasi publik yang tersedia dalam portal PPID (https://ppid.kalteng.go.id)	Informasi	-	-	965,00
16	Pusat Komunitas Kreatif (buah)	Buah	-	-	1
17	M-CAP (Mobile Capacity Acces Point)	M-CAP	-	-	1
18	Data Center	Buah	-	-	1
19	Media Center	Buah	-	-	1
20	Jumlah surat kabar nasional/local	Buah	-	-	56
21	Jumlah penyiaran radio/TV local		-	-	29
22	Web site milik pemerintah daerah (Buah)	Buah	10	-	36
23	Pameran/expo terkait Kominfo	Kali	-	-	1
24	Jumlah aplikasi E-Government	Aplikasi	-	5	0

Sumber: Lakip Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2019

2.3.2.11 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Sedangkan Usaha Mikro adalah usaha produktif yang bisa dimiliki perseorangan maupun badan usaha, dengan kekayaan paling banyak

50 juta dan omzet usaha mikro paling banyak 300 juta setahun dengan fasilitas minim dan terbatasnya jumlah karyawan. Jumlah UMKM se

Kalimantan Tengah 49.186 orang, dimana jumlah usaha yang paling banyak adalah Usaha Mikro 45.514 (posisi Oktober 2020). Jumlah UMKM setiap tahun terus bertambah. Pelaku Usaha Mikro terus berkembang yang merupakan peluang menciptakan tenaga kerja, yang otomatis juga tingkat pengangguran berkurang, maka perlu perhatian pemerintah dalam meningkatkan SDM UMKM baik pelatihan teknis maupun pendampingan agar pelaku usaha UMKM melakukan era digital dan meningkatkan kualitas produk serta pemasarannya.

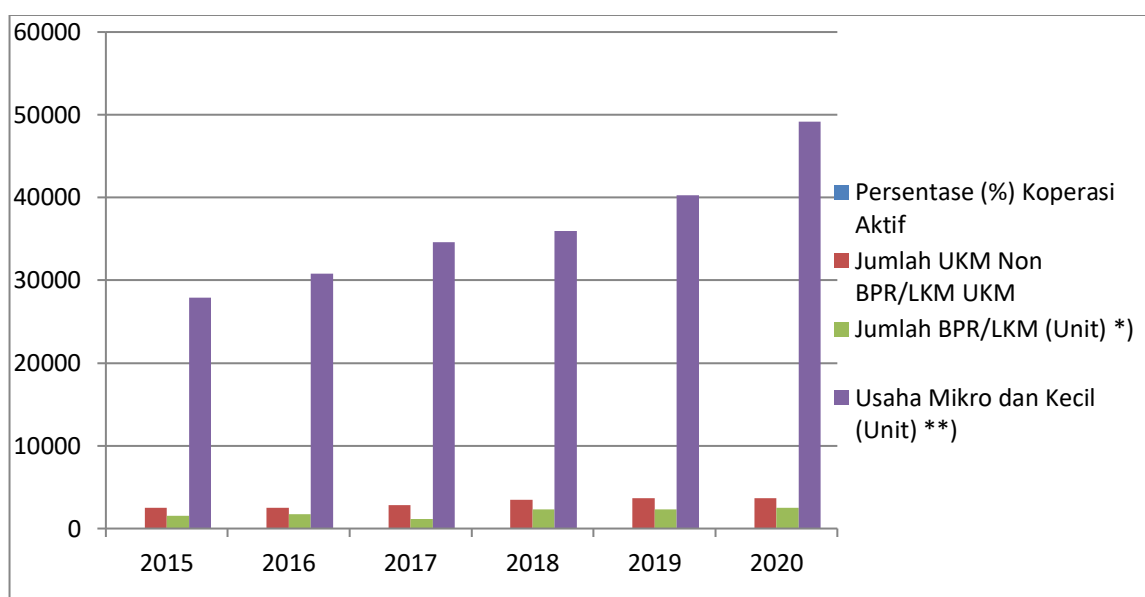
Adapun capaian kinerja pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 87 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020
1	Presentase Koperasi Aktif (%)	83,53	80,63	76,09	78,72
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit)	2.809	3.481	3.672	3.684
3	Jumlah BPR/LKM (Unit)	1.881	2.341	2.343	2.506
4	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	34.611	35.000	40.259	49.186

Sumber: Lkip Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015-2020

Berdasarkan tabel di atas persentase koperasi aktif mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan dan melebihi target yang ditentukan namun di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 80,63% namun masih melebihi target yang ditentukan sebesar 79,89% dan di tahun 2019 turun menjadi 76,09% di bawah target sebesar 81%. Untuk jumlah UKM non BPR/LKM UKM mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 3.672 unit di bawah target yang ditentukan sebesar 310.935 unit. Kemudian jumlah BPR/LKM dari tahun 2016 sampai tahun 2019 terus mengalami kenaikan melebihi target yang ditentukan. Sedangkan usaha mikro dan kecil mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 namun tidak mencapai target yang ditentukan. Tahun 2020 capaian kinerja UMKM persentase koperasi aktif sebesar 78.72%. Memiliki nilai yang rendah dibanding tahun 2017 dan 2018, namun untuk jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit), Jumlah BPR/LKM (unit), dan Usaha Mikro dan Kecil (unit) lebih besar nilainya masing – masing sebesar 3.684, 2.506 dan 49.186.



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Gambar 2. 63 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2015-2020 Provinsi Kalimantan Tengah

2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Adapun capaian kinerja yang ada pada Urusan Penanaman Modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 88 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	536	560	587	707	898
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (juta Rupiah)	67.436.739,93	150.558.642,13	24.556.548,81	12.845.045,40	6.267.595,80
	- PMDN (dlm Milyar Rp)	23.775.364,78	7.392.389,54	18.336.141,71	8.591.862,90	3.709.958,20
	- PMA (dlm juta Rp)	23.775.364,78	71.177,10	444.314,79	283.5454,50	177.639,00
3	Rasio daya serap	179,16	147,37	156,7	39,66	9,14

	tenaga kerja(%)					
4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-28,52	-68,91	148,04	-53,14	-56,82

Sumber: Lakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2020. Untuk jumlah nilai investasi berskala nasional mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2016 sebesar 67.436.739,93, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 150.558.624,13 dan melebihi target yang ditentukan sebesar 37.500.000,00. Namun pada 2018 sampai 2020 mengalami penurunan dan tidak mencapai target ditentukan. Sementara itu untuk rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan di tahun 2017 sampai tahun 2020 bahkan kurang dari target yang ditentukan. Untuk kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2016 sebesar -28,52 milyar rupiah, dan di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 63,48 milyar rupiah dan melebihi target yang ditentukan sebesar 47,69 milyar rupiah, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar -60,75 milyar rupiah dan tidak mencapai target yang ditentukan sebesar 57,55. Untuk tahun 2019 dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar -53,14 milyar rupiah dan -56,82 milyar rupiah.

Tabel 2. 89 Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing

Sektor Ekonomi	Dalam Negeri (Juta Rupiah)	Asing	
		Ribu US\$	Juta Rp
Pertanian	1.536.009	258.160,30	121.695,00
Pertambangan	49.427	39.373,60	551.230,40
Industri	284.263	22.385,00	313.390,00
Konstruksi	-	-	-
Perhotelan	-	78,80	1.103,20
Pengangkutan	-	16,80	235,20
Perumahan & Kantor	18	45,90	642,60
Perdagangan dan Reparasi	9.038	126,50	1.771,00
Jasa-jasa	12.448	-	-
Jumlah	2.846.359	89.676,00	1.255.464,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

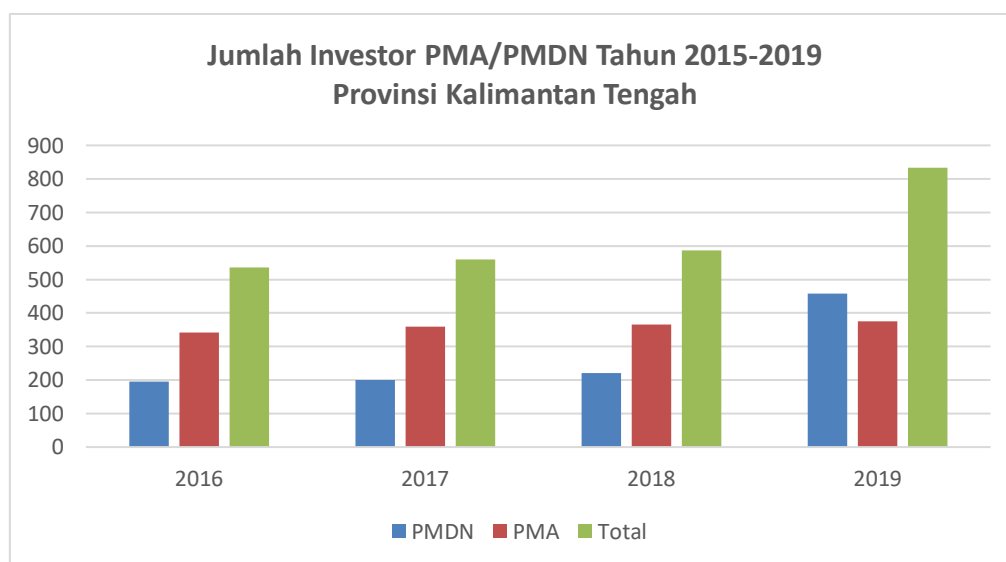
Realisasi Penanaman Modal dalam negeri dari sektor ekonomi jumlah terbesar adalah pada sektor pertanian dengan nilai 1.536.009 rupiah. Terbesar kedua pada sektor industri dengan nilai sebesar 284.263 rupiah dan nilai penanaman modal paling terkecil pada sektor konstruksi, perhotelan, dan pengangkutan. Untuk penanaman modal asing terbesar pada sektor pertambangan dengan nilai 551.230,40 rupiah. Disusul dari sektor industri sebesar 313.390,00 rupiah. Untuk nilai terkecil penanaman modal asing pada sektor pengangkutan yaitu hanya sebesar 235,20 rupiah.

Tabel 2. 90 Jumlah Investor PMA/PMDN Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2016	Jumlah Investor	195	341	536
2017	Jumlah Investor	200	360	560
2018	Jumlah Investor	221	366	587
2019	Jumlah Investor	458	375	833
2020	Jumlah Investor	650	248	898

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

Jumlah investor PMA/PMDN dari tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Tahun 2016 jumlah investor untuk nilai PMDN sebesar 195 dan PMA 341 dengan total 536. Mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 200 untuk PMDN dan 360 untuk PMA 360 dengan total 560. Tahun 2018 jumlah investor PMDN sebesar 221 dan 366 dengan total 587. Tahun 2019 jumlah investor PMDN sebesar 458 dan 375 dengan total 833. Tahun 2020 jumlah investor terus meningkat dibanding tahun sebelumnya dan nilai jumlah investor PMDN sebesar 650 dan PMA 248 dengan total 898.



Gambar 2. 64 Investor PMA/PMDN Tahun 2015-2020 Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2. 91 Jumlah Investasi PMA/PMDN Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Tengah

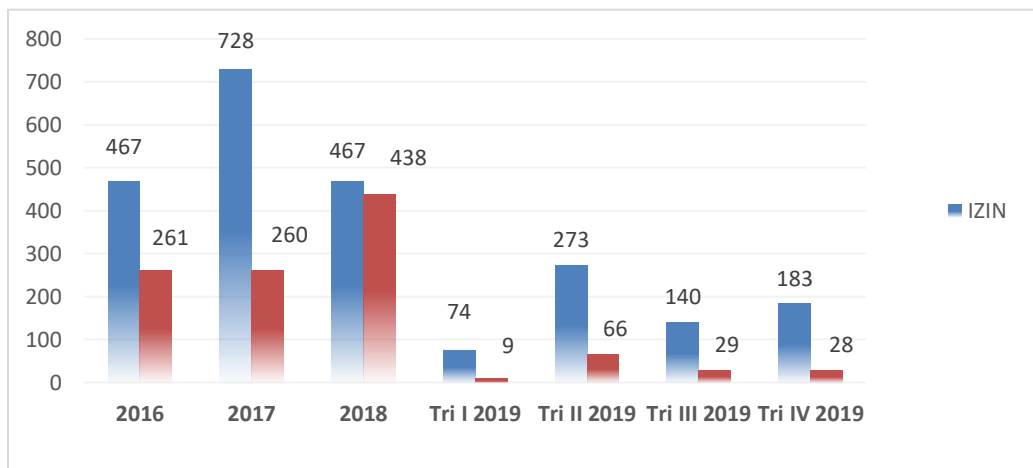
Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2016	520	152.000.000,00	520	30.984.644,31
2017	709	73.500.000,00	709	48.457.933,31
2018	791	40.000.000,00	793	24.556.548,81
2019	573	42.500.000,00	833	10.306.700,40
2020	595	45.000.000,00	898	6.267.595,80

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

Jumlah investasi PMA/PMDN dari tahun 2016 – 2020 cenderung memiliki nilai fluktuatif. Tahun 2016 persetujuan jumlah proyek dari jumlah proyek sebesar 520 dengan nilai investasi 152.000.000 dan nilai realisasi jumlah proyek sebesar 520 dengan jumlah nilai investasi sebesar 30.984.644,31. Tahun 2017 mengalami peningkatan realisasi nilai investasi menjadi sebesar 48.457.933,31 dari jumlah proyek sebesar 709. Tahun 2018 mengalami penurunan realisasi nilai investasi menjadi sebesar 24.556.548,81 dari jumlah proyek 793. Tahun 2019 terus mengalami penurunan nilai realisasi menjadi sebesar 10.306.700,40 dari jumlah proyek 833. Tahun 2020 terus mengalami penurunan nilai realisasi menjadi sebesar 6.297.595, 80 dari jumlah proyek 898



Gambar 2. 65 Jumlah Investasi PMA/PMDN Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 2. 66 Jumlah Izin Dan Non Izin Yang Diproses Selesai

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berlaku sejak Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2013 yang kemudian diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada Triwulan Pertama Tahun 2019 data jumlah Izin dan Non Izin yang selesai diproses sebanyak 83 Izin dan Non Izin. Sedangkan pada Triwulan Kedua Tahun 2019 data jumlah Izin dan Non Izin yang selesai diproses sebanyak 339 Izin dan Non Izin. Pada Triwulan Ketiga Tahun 2019 data jumlah Izin dan Non Izin yang selesai diproses sebanyak 169 Izin dan Non Izin. Sedangkan pada Triwulan Keempat Tahun 2019 data jumlah Izin dan Non Izin yang selesai diproses sebanyak 211 Izin dan Non Izin.

2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kesadaran akan pentingnya seni dan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta menciptakan iklim kondusif dan harmonis. Kemudian, pembangunan dan kemajuan di bidang olahraga, selain mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, juga dapat meningkatkan martabat dan nama baik negara/daerah dalam kancah nasional dan daerah.

Tabel 2. 92 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah klub olahraga (buah)	46	46	46	46	46	136
2	Jumlah gedung olahraga (unit)	16	16	16	16	16	16
3	Jumlah organisasi pemuda	62	66	66	66	66	66
4	Jumlah organisasi olahraga	42	42	42	42	36	36
5	Jumlah kegiatan kepemudaan	35	13	11	12	8	32

Jumlah kegiatan olahraga	60	4	4	8	7	2
Lapangan olahraga (lapangan Volly, sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)	289	1.214	1.214	1.214	3.070	3.070

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kalimantan Tengah

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda akan menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam partisipasi membangun daerah. Banyaknya jumlah organisasi olahraga (yang berada dibawah naungan KONI kabupaten/kota) menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya menciptakan pelayanan di bidang olahraga di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3.2.14 Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data memiliki peran penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Data sektoral 14 kab/kota pada tahun 2019 telah disusun dalam 1 dokumen oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3.2.15 Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Adapun capain indikator kinerja yang ada pada Urusan Kebudayaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 93 Capaian Kinerja Seni dan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian/sanggar seni (buah)	246	315	315	315
2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	2	5	5
3	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (buah)	258	695	361	361

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Tengah, Tahun 2015-2019

Urusan kebudayaan secara teknis dikoordinir oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata. Secara umum, capaian indicator urusan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 94 Capaian Kinerja Seni dan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator	Target		Realisasi	
		2019	2020	2019	2020
1	Jumlah cagar budaya yang terpelihara	1 cagar budaya	3 buah	32 cagar budaya/situs	3 buah
2	Jumlah koleksi benda museum yang terpelihara	100 koleksi	50 koleksi	115 koleksi	328 koleksi
3	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	8 festival/gelar seni	8 festival/gelar seni	15 festival/gelar seni	10 festival/gelar seni

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2020

Selama 2 (dua) tahun terakhir, indicator kebudayaan ini memang semuanya mampu mencapai bahkan melampaui target. Namun terdapat indicator yang realisasi tahun 2020 nya lebih rendah dari 2019. Hal ini dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang mengakibatkan adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak dapat dianggarkan pada tahun 2020. Kegiatan pemeliharaan cagar budaya dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal, tokoh masyarakat dan instansi terkait, seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya di Samarinda dalam kaitannya dengan koordinasi teknis pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan benda-benda budaya. Pemeliharaan koleksi benda museum merupakan bagian tugas dan fungsi UPT Museum Balanga yang wajib dilaksanakan sebagai kinerja UPT Museum Balanga. Dukungan untuk upaya pemeliharaan koleksi museum tahun 2020 ini adalah dari kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kebudayaan.

Sedangkan festival seni budaya menjadi salah satu prioritas kegiatan yang mendapatkan anggaran yang proporsional setiap tahun anggarannya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa seperti festival, gelar seni dan perlombaan, notabene merupakan unggulan dan kegiatan strategis dalam menggeliatkan sektor kebudayaan dan pariwisata melalui pertunjukan seni budaya teragendakan dan kegiatan yang sifatnya perlombaan tradisi juga memberikan peluang dan panggung bagi kebudayaan Kalimantan Tengah untuk tetap dan semakin eksis di tengah-tengah masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang patut diapresiasi yang pada tujuan akhirnya adalah

2.3.2.16 Urusan Perpustakaan

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan berupaya mewujudkan peran perpustakaan sebagai penyedia jendela informasi dalam menentaskan pendidikan dan kemiskinan antara lain dengan memantapkan kebiasaan membaca masyarakat, meningkat pelayanan berbasis IT, dan menciptakan pelayanan yang mudah diakses, aman dan nyaman. Adapun indikator kinerja yang ada pada Urusan Perpustakaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 95 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dan 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1	Jumlah buku yang di baca di perpustakaan	Eksemplar	88.223	39.916
2	Jumlah anggota perpustakaan	Orang	4.179	2.174
3	Jumlah Perpustakaan	Unit	16,00	0
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Perpustakaan	Persen	76,81	80,13
5	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	Judul	30.22	31,195

Sumber: Lakip Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2018 dan 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator kinerja yang mengalami penurunan adalah Jumlah buku yang di baca di perpustakaan dan Jumlah anggota perpustakaan. Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan meningkat dari 30.22 judul menjadi 31.195 judul pada tahun 2020. Namun mengalami penurunan pada jumlah buku yang di baca di perustakaan dari 88.223 menjadi 39.916.

Sedangkan pada tahun 2020 Jumlah Perpustakaan yang diberikan pembinaan capaiannya 0 (nol) dikarenakan memang tdk dilakukan pembinaan karena terkait Pandemi Covid-19 dan Refocusing Anggaran sehingga untuk melaksanakan pembinaan ke lapangan tidak dapat dilaksanakan.

Berkurangnya jumlah buku yang dibaca di perpustakaan bisa dikarenakan karena adanya pandemic Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk membatasi kegiatan berkumpul terutama di ruang tertutup dan kurang sirkulasi udara. Selain itu, berkurangnya minat baca di perpustakaan juga bisa diakibatkan karena factor-faktor lain, antara lain :

- a. Koleksi bacaan yang terbatas maksudnya adalah kurangnya jumlah bacaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, kebanyakan mereka yang datang pulang tanpa menemukan buku yang ingin mereka baca.
- b. Sarana dan prasarana yang terkesan kurang begitu nyaman dan indah bagi beberapa pemustaka.

c. Teknologi informasi yang lebih dominan, mengakibatkan generasi sekarang lebih cenderung menggunakan media yang sifatnya modern, dan perpustakaan jauh sekali tertinggal yang notabene menggunakan media cetak saja.

2.3.2.17 Urusan Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsip merupakan alat bukti yang sah. Adapun kinerja Urusan Kearsipan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 96 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2020

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
Jumlah SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar Kearsipan	SOPD	46	46

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah

2.3.3 Urusan Pilihan

2.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 7 (tujuh) kabupaten pesisir meliputi 13 kecamatan; yakni Kabupaten Sukamara, Kabupaten KotawaringinBarat, Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kapuas. Wilayah pesisir Kalimantan Tengah memiliki morfologi pantai kelerengan landai, sedangkan berdasarkan pelamparan satuan dasar perairan dibagi menjadi:

- Pasir; terdapat dimuara Sungai Lamandau, Teluk Kotawaringin, Tanjung Penghujan, sepanjang pantai Kotawaringin Timur, dan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
- Pasir batu; sungai bakau, diluar Kabupaten Kapuas.
- Koral batu; Tanjung Baku Teluk Kumai.
- Lumpur; hampir merata di sepanjang pantai Kalimantan Tengah (Tanjung Puting, Kabupaten Seruyan, Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas.

Kalimantan Tengah juga memiliki 11 sungai besar dan 33 sungai kecil yang bermula dari Utara dan mengalir ke Laut Jawa. Sungai Barito merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah dengan panjang mencapai 900 km dengan kedalaman berkisar 6 s/d 14 meter. Hal ini

memungkinkan pengembangan usaha Perikanan Darat yakni Penangkapan Ikan sungai dan budidaya. Selain itu, Kalimantan tengah memiliki rawa dan danau yang hampir tersebar di sebagian besar kabupaten/kota.

Dengan adanya kondisi tersebut maka, potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sub sektor perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun capaian kinerja yang ada pada Urusan Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 97 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	142.466,60	130.526,10	132.687,78	133.351,22	153.426,16
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	75.903,28	79.271,03	98.151,88	101.857,32	116.729,40
3	Jumlah produksi benih (ekor)	Ekor	60.180.000,00	60.180.000,00	61.956.430,00	41.346.660,00	43.979.500
4	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	kg/kap/tahun	47,09	47,63	48,19	53,30	54
5	Tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1
6	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)	Ha	171.679	61.362,15	61.362	61.362,24	61.362,24
7	Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)	Ha	2	2,5	1,8	2,50	2,5
8	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	Persentase	75	78	80	85	85
9	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	kelompok	22	25	30	40	53
10	Jumlah Nelayan yang Terlindungi (orang)	Orang	5.026	7.543	690	3.072	9.000
11	Jumlah Fasilitasi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (bidang)	Bidang	0	222	0	345	186
12	Jumlah Diversifikasi Usaha Keluarga Nelayan (RTP)	RTP	0	35	1100	0	0

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
13	Penguji residu produk perikanan budidaya dan serifikasi untuk kespors bidang produksi dan usaha (paket)	Paket	0	0	0	0	0
14	Laporan hasil verifikasi dan analisis perkembangan data produksi perikanan budidaya (dokumen)	Dokumen	1	1	1	2	2
15	Pameran Promosi Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Negeri yang Diikuti satker Daerah	Pameran	4	4	5	3	0
16	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan	Unit	1	0	1	1	4
17	Kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif (kawasan)	Kawasan	0	0	0	1	1
18	Jumlah hari operasional bersama speed boat pengawasan SDKP lingkup Provinsi Kalimantan Tengah (hari operasi)	Hari Koperasi	6	5	30	44	15
19	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Provinsi Kalimantan Tengah (kelompok)	kelompok	22	25	30	40	53
20	Jumlah Kasus Pelanggaran Bidang Perikanan	Kasus	5	29	11	4	0

Sumber: Lakip Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015-2019

2.3.3.2 Urusan Pariwisata

Peranan sektor pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha wisata. Kinerja Pariwisata disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 98 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.556.488	785.465
2	Jumlah SDM pariwisata yang tersertifikasi	Orang	155	156
3	Jumlah kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	Kelompok	3	3
4	Jumlah objek wisata yang dikembangkan	Obyek Wisata	3	3
5	Jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,94	1,86

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah

Pada tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja urusan Pariwisata di Kalimantan Tengah menunjukkan tren yang sangat positif dengan memperhatikan jumlah kunjungan wisatawan yang menurun dari 1.556.488 orang di tahun 2019 menjadi 785.465 orang di tahun 2020. Indikator lainnya yaitu jumlah SDM pariwisata yang tersertifikasi meningkat dari 155 orang menjadi 156 orang dan jumlah objek wisata yang dikembangkan tetap.

2.3.3.3 Urusan Pertanian

2.3.3.3.1 Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan

Melihat wilayah geografis dan sejarah sektor lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah selama ini, sektor yang paling memungkinkan untuk dikembangkan adalah sektor pertanian. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan dalam mendukung pembangunan, diantaranya menyumbang pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyediaan bahan baku industri, bahan pangan dan sumber gizi, penyerapan tenaga kerja serta pendukung bagi Bergeraknya sektor ekonomi lainnya.

Peningkatan luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, khususnya padi yang menjadi tanaman unggulan dan prioritas di Provinsi Kalimantan Tengah terus ditingkatkan dengan berbagai upaya seperti optimalisasi lahan pertanian dan peningkatan produktivitas, adalah target dalam rangka meningkatkan produksi padi sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kemampuan Kalimantan Tengah memproduksi bahan

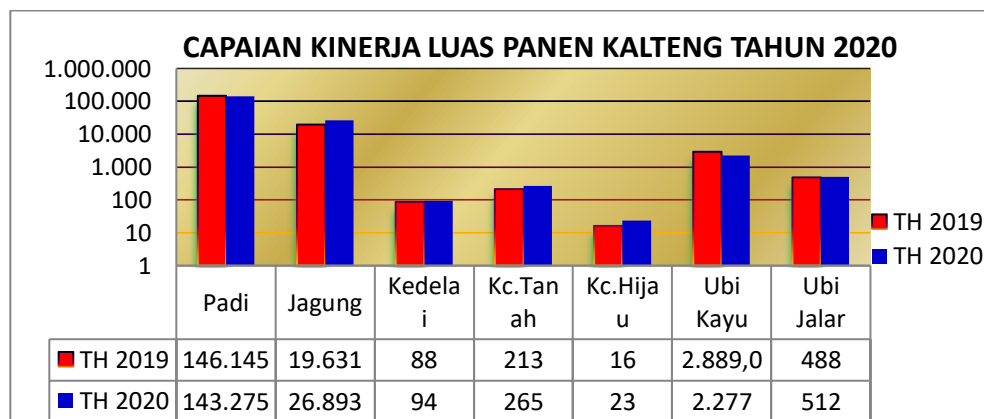
pangan pokok, khususnya beras untuk menuju swasembada beras.

Tabel 2. 99.a Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Panen		Produksi (ton)		Total Luas Panen	Total Produksi	Produktivitas Padi (ton/ha)
	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang			
2016	188.740	78.234	606.384	168.083	266.974	774.467	2,90
2017	193.489	51.480	659.944	111.958	244.969	771.902	3,15
2018	129.536	17.904	462.471	51.798	147.441	514.270	4,06
2019	121.625	24.520	374.013	69.548	146.145	443.561	3,53
2020	120.025	23.350	403.023	54.929	143.275	457.952	3,19

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalteng, 2020 & Kalteng Dalam Angka, 2020

Produktivitas padi (sawah maupun ladang) di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018, dimana mengalami penurunan dari tahun 2017. Produktivitas padi pada tahun 2017 sebesar 3,15 ton/ha dengan total produksi 771.902 ton. Pada tahun 2019 produktivitas menjadi sebesar 3,11 ton/ha dan total produksi 443.561 ton. Tahun 2020 produktivitas meningkat menjadi sebesar 3,19 dengan total produksi 457.952.



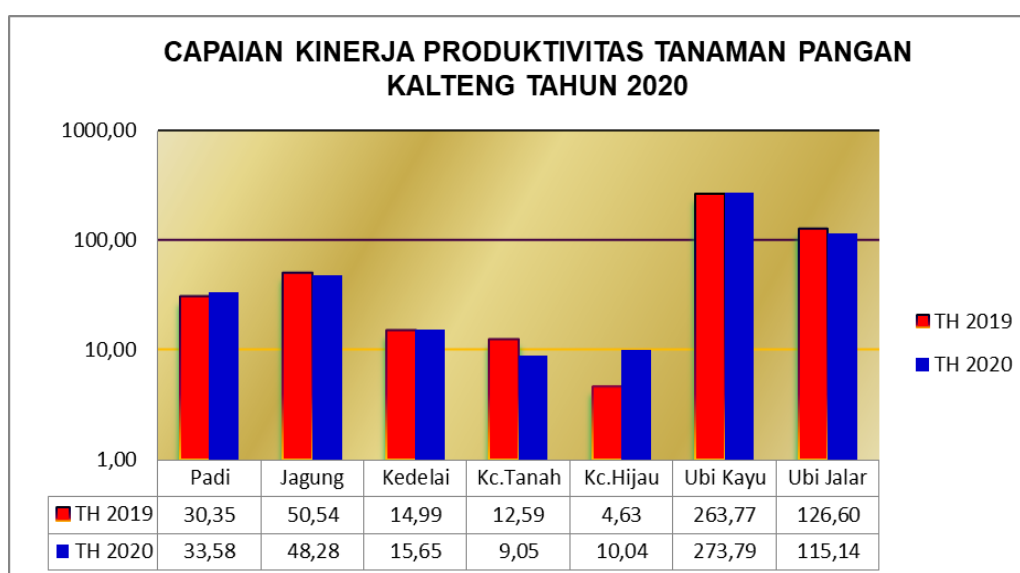
Gambar 2. 67 Jumlah Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Tahun 2019-2020 (Ha)

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng

Capaian jumlah luas panen tanaman pangan untuk padi pada tahun 2020 mencapai 143.275 Ha (50,14%), capaian masih rendah jika dibandingkan target untuk tahun 2020 dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 2,93%. Apabila dibandingkan periode akhir Tahun 2021 capaian kinerja luas panen tanaman padi tahun 2020 telah mencapai 49,61 %. Menurunnya luas panen padi pada tahun 2020 dikarenakan adanya penurunan luas panen padi di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2019 diperkirakan sebesar 146,14 ribu hektar. Hal ini terjadi

karena adanya fenomena La Nina yang berpengaruh pada curah hujan di bulan Oktober-Desember, mengakibatkan curah hujan di Oktober-Desember akan bertambah tinggi. Yang mengakibatkan terendahnya sebagian areal persawahan karena banjir.

Untuk luas panen komoditas tanaman pangan lainnya menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 terutama komoditas jagung. Luas panen jagung hibrida Kalimantan Tengah Maret-April 2020 dijamin memenuhi kebutuhan pakan ternak sebagai salah satu indikator ketersediaan Pangan Asal Hewan (PAH) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Ketersediaan jagung pakan dari kabupaten sentra produksi jagung hibrida yakni kabupaten Barito Utara dengan luas panen dari Januari s.d Maret 2020 mencapai 7.304 hektar dan provitas 7,2 ton /ha, serta dukungan luas panen dari kabupaten Barito Timur, Barito Selatan dan Kotawaringin Barat.



Gambar 2. 68 Capaian Produktivitas Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Tahun 2019 - 2020 (Ku/Ha)

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng

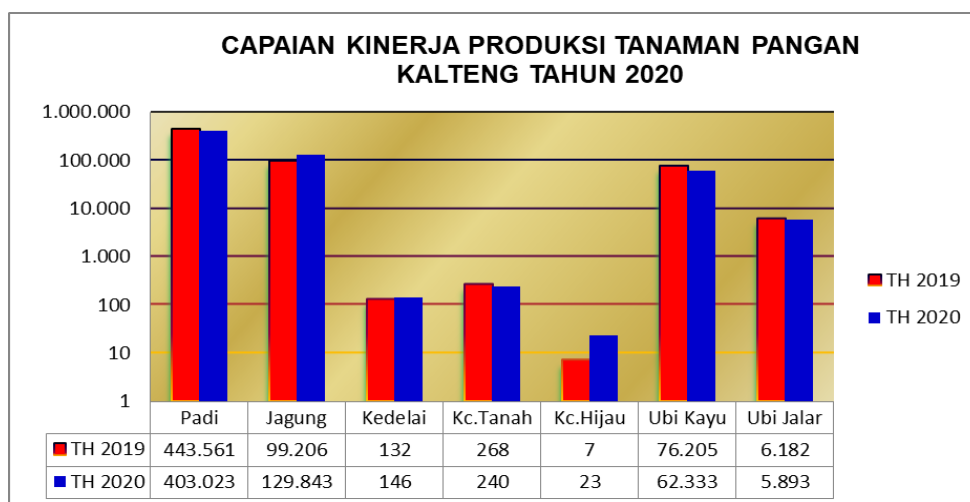
Produktivitas padi pada tahun 2020 mencapai 33,58 Ku/Ha (86,34%) dari target dan capaian untuk tahun 2020. Dibandingkan dengan capaian produktivitas tahun 2019 meningkat sebesar 11,23 % dan jika dibandingkan target Tahun 2021 telah mencapai 85.43 %. Meskipun diketahui terjadi penurunan luas panen untuk padi pada tahun 2020, namun hal itu tidak mempengaruhi produktivitasnya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti tenaga kerja petani yang efektif dan mengerti mengelola dan membudidayakan tanaman padi dengan baik serta sistem irigasi yang benar-benar dimanfaatkan secara maksimal

Untuk komoditas jagung yang juga merupakan komoditas unggulan pada tahun 2020 produktivitasnya mencapai 48,28 Ku/Ha (130,95%) dan telah melebihi target untuk tahun 2020. Namun menurun sebesar 4,67 % jika dibandingkan target tahun 2019. Penurunan ini terjadi karena ada faktor

pergeseran masa tanam jagung dikarenakan adanya perubahan iklim dan cuaca. Produktivitas kedelai pada tahun 2020 mencapai 15,65 kuintal/Ha atau 116,29 %, nilai ini telah melebihi target tahun 2020, apabila dibandingkan dengan produktivitas tahun 2019 meningkat sebesar 5,03 %. Tahun 2021 mencapai 115,10 %.

Produktivitas kacang tanah pada tahun 2020 mencapai 9,05 ku/ha (70,81 %) dari target tahun 2020, jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2019 untuk kacang tanah menurun sebesar 39,07% dan jika dibandingkan target jangka menengah (periode akhir RENSTRA tahun 2021) telah mencapai 69,08 %. Produktivitas kacang hijau pada tahun 2020 mencapai 10,04 Ku/Ha (105,80%) dari target tahun 2020. Jika dibandingkan dengan produktivitas tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 53,93% dan jika dibandingkan periode akhir RENSTRA tahun 2021 telah melebihi target yaitu sebesar 105,80%.

Produktivitas ubi kayu untuk tahun 2020 yaitu 273,79 ku/ha atau 160,45 % dan ini telah melebihi target tahun 2020, dan mengalami peningkatan sebesar 3,66 % jika dibandingkan target tahun 2019. Dibandingkan periode akhir tahun 2021 telah mencapai 158,86 %. Produktivitas ubi jalar juga telah melebihi target tahun 2020 yaitu 115,14 Ku/Ha (110,80 %) dan jika dibandingkan tahun 2019 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 9,96 %. Namun jika dibandingkan target periode akhir tahun 2021 telah melebihi target tahun 2021 yaitu sebesar 109,70%.



Gambar 2. 69 Capaian Produksi Tanaman Pangan Prov. Kalteng Tahun 2019-2020 (Ton)

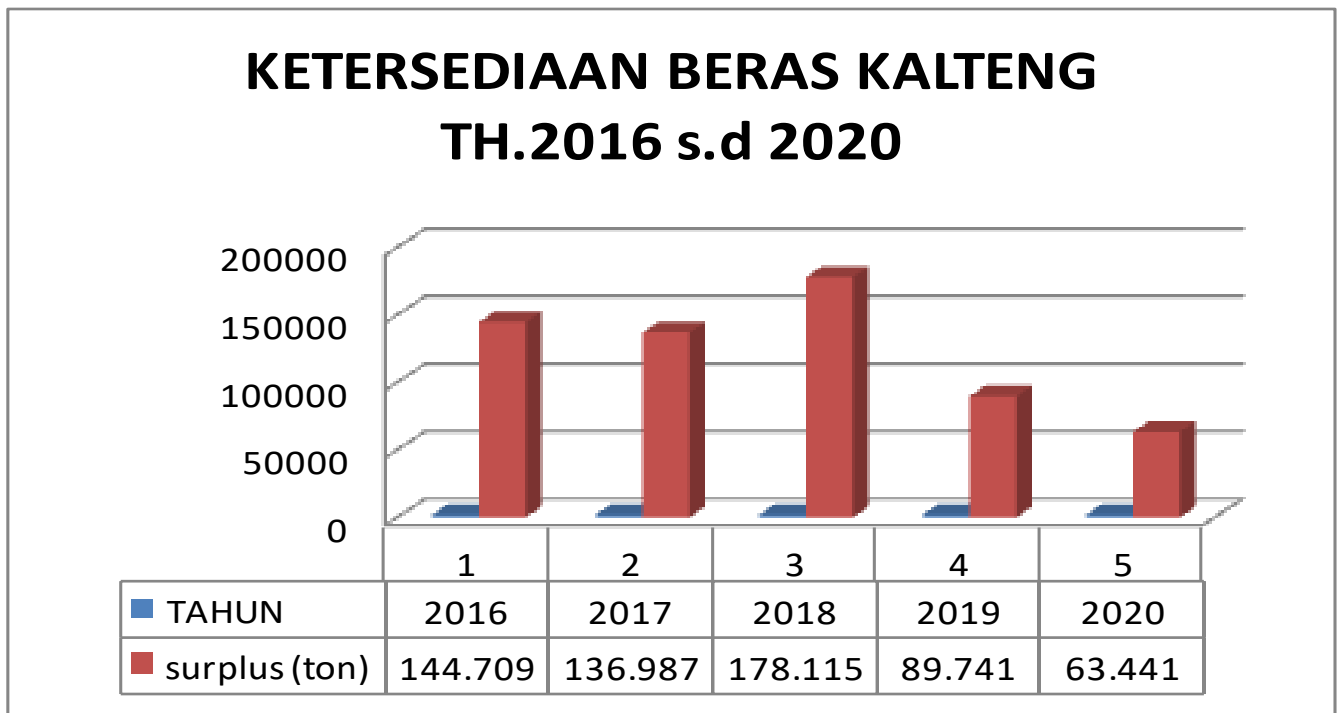
Sumber : Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Kalteng

Produksi padi pada tahun 2020 mencapai 403.023 ton (43,29 %) dari target tahun 2020, capaian produksi ini sedikit lebih tinggi 8,64 % jika dibandingkan produksi padi tahun 2019. Jika dibanding periode tahun 2021 telah mencapai 42,38%. Penurunan produksi padi dikarenakan beberapa factor yaitu luas panen dan produktivitas padi secara menyeluruh, dikarenakan

semenjak adanya larangan pembukaan lahan dengan dibakar para petani yang biasa menanam padi diladang malas untuk bertanam dan beralih ke pertanaman komoditas lain, dan Insiden cuaca ekstrim dalam bentuk angin kencang dan curah hujan intensitas tinggi yang cenderung meningkat sehingga berpotensi menurunkan produksi padi. Dampak langsung terjadi akibat deraan cuaca ekstrim adalah padi rebah, dan dalam beberapa kasus rebah-terendam.

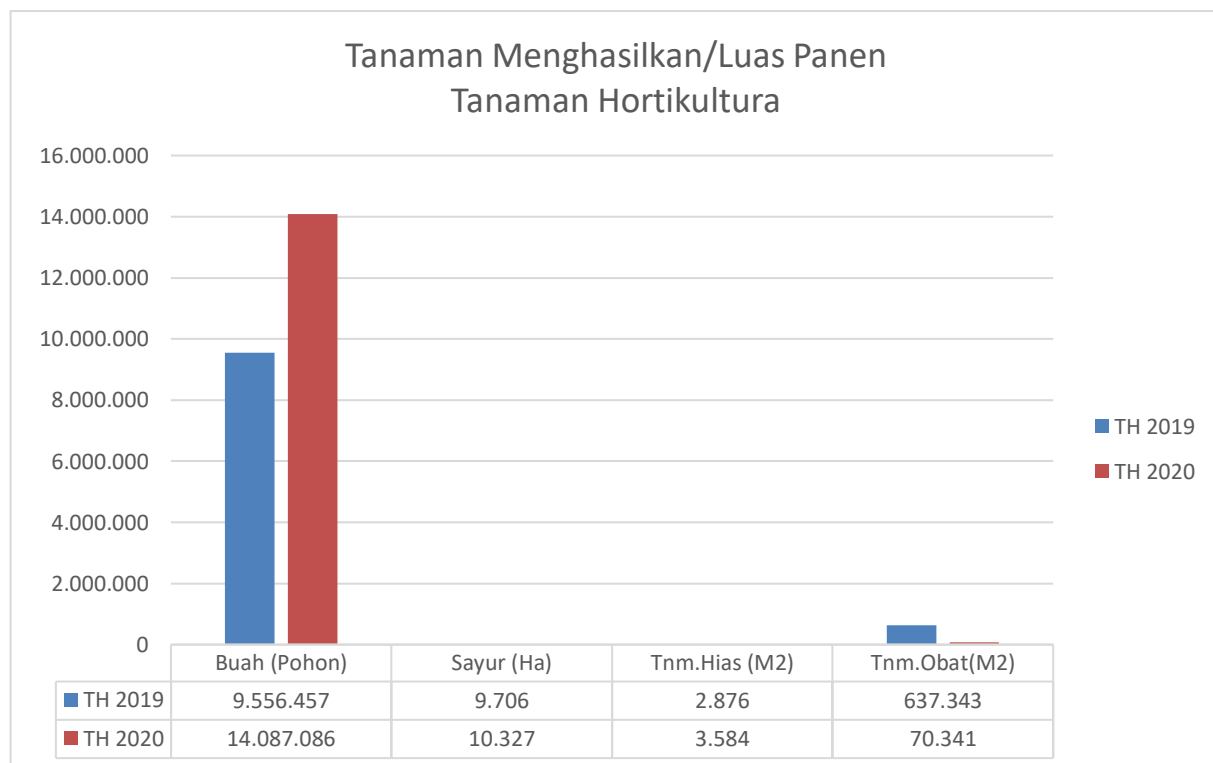
Produksi jagung pada tahun 2020 mencapai 129.843 ton/ha (1.149,13 %), hasil ini telah sangat jauh melebihi target produksi jagung tahun 2020 maupun target jangka menengah dan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2019 meningkat sebesar 22,63 %.

Produksi kedelai pada tahun 2020 mencapai 146 Ton/Ha (8,41 %) dari target tahun 2020, hasil ini meningkat sebesar 5,69 % dari produksi tahun 2019. Capaian produksi kedelai jika dibandingkan target jangka menengah periode akhir Renstra hanya mencapai 8,20 %. Peningkatan ini terjadi karena luas panen dan produktivitas jagung di beberapa Kabupaten sentra penghasil kedelai seperti Kabupaten Barito Utara, Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat mengalami peningkatan. Produksi kacang tanah, kacang hijau dan ubi jalar pada tahun 2020 mencapai 240 ton/ha (37,56 %) dari target tahun 2020 dan sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan produksi tahun 2019 yaitu sebesar 11,54 %. Untuk komoditas lainnya seperti kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar rata-rata mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah periode tahun 2021 capaian produksi cukup baik walau sebagian besar target masih belum tercapai. Penyebabnya menurunnya luas panen dan produktivitas komoditas kacang tanah, kacang hijau dan ubi jalar, terjadinya penurunan minat petani dalam bertanam komoditas kacang hijau dan kacang tanah karena rendahnya permintaan pasar, serta kualitas hasil panen yang tidak begitu baik dikarenakan sifat keasaman tanah gambut, banyak petani beralih ke pertanaman jagung dikarenakan banyaknya bantuan benih jagung dari program Pemerintah, dan kurang adanya jaminan harga dipasaran bagi komoditas dimaksud.



Sumber :Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 2. 70 Perkembangan Ketersediaan Beras Prov.Kalteng Tahun 2016 s.d Tahun 2020



Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng

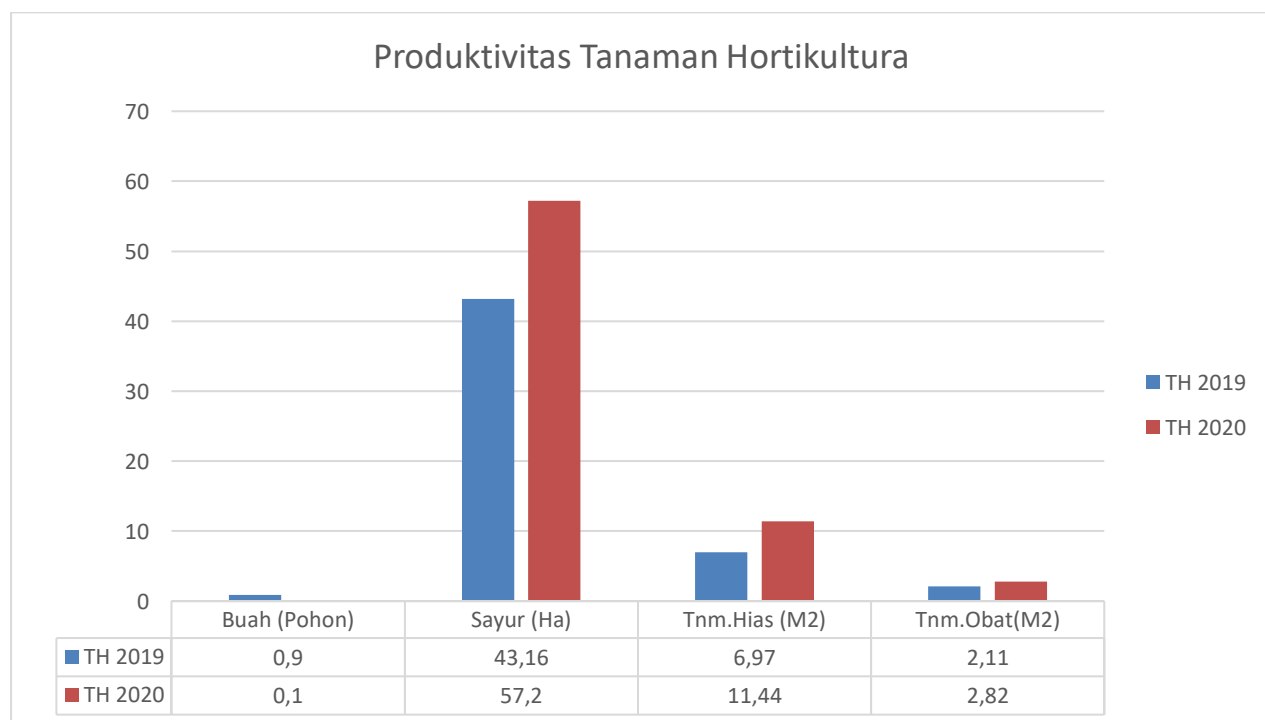
Gambar 2. 71 Capaian Jumlah Luas Panen Tanaman Hortikultura Tahun 2019 - 2020 Prov.Kalteng

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat capaian luas panen tanaman hortikultura pada tahun 2020 untuk buah-buahan adalah sebesar 14.087.086 pohon (264,46 %) melebihi target 2020 dan lebih tinggi 47,40 % jika dibandingkan target tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah telah melebihi target yakni sebesar 240,42 %. Untuk luas panen tanaman sayuran tahun 2020 mencapai 10.327 ha (61,47 %) dari target tahun

2020 dan lebih tinggi 6,39 % jika dibandingkan capaian luas panen untuk 2019. Dibandingkan dengan target jangka menengah luas panen sayuran telah mencapai 57,52 %.

Luas panen tanaman hias tahun 2020 mencapai 3.584 m², (15,33 %) dari target tahun 2020. Capaian luas panen tahun tanaman hias untuk 2020 mengalami peningkatan sebesar 24,61 % jika dibandingkan capaian luas panen sayuran untuk tahun 2019 dan apabila dibandingkan dengan periode jangka menengah telah mencapai 14,40 %.

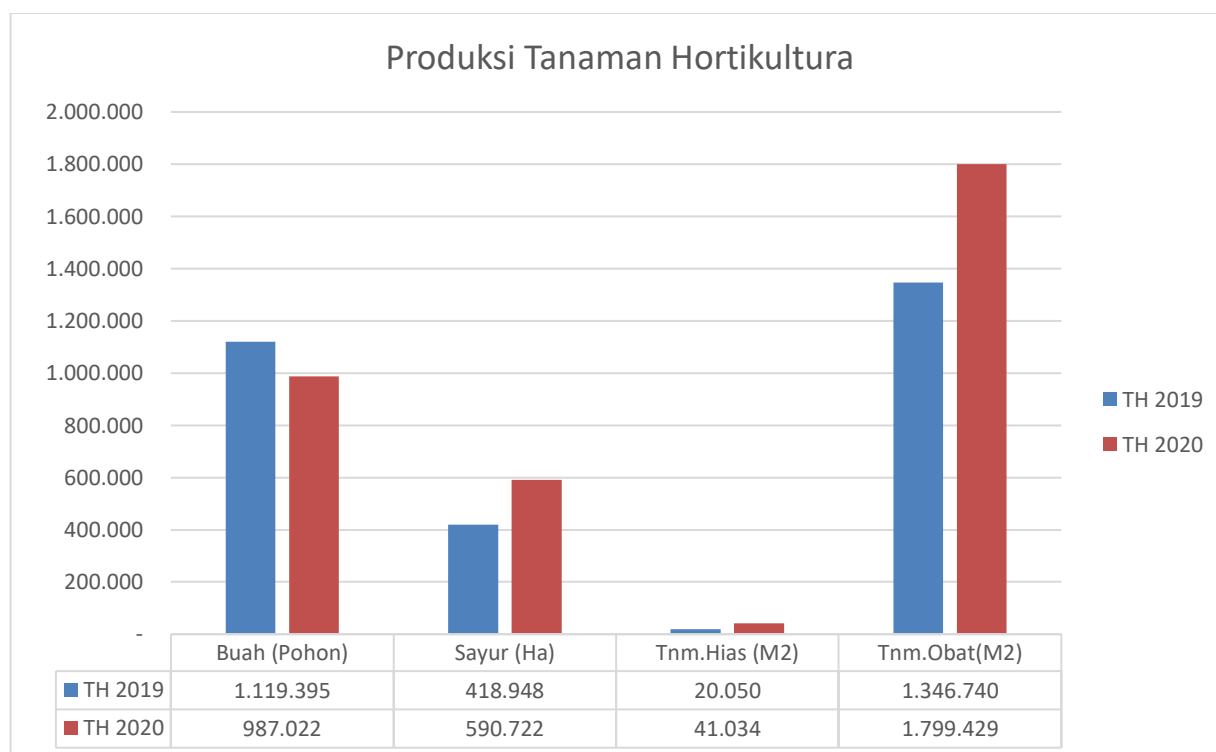
Capaian luas panen tanaman obat pada tahun 2020 adalah sebesar 70.341 m² (6,15 %) dari target untuk tahun 2020 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan luas panen pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian luas panen tanaman obat telah mencapai 5,59%. Menurunnya luas panen sayuran, tanaman hias dan tanaman obat antara lain disebabkan adanya La Nina yang menimbulkan efek intensitas curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan beberapa lahan perkebunan sayur terendam cukup lama yang berakibat busuknya sayur-sayuran yang siap dipanen, dan kurang bantuan benih sayuran lain yang diberikan kepada petani, karena selama ini bantuan benih yang diberikan terfokus kepada bawang merah dan cabai saja. Sementara meningkatnya luas panen tanaman buah tahun 2020 karena adanya peningkatan bantuan bibit pohon buah seperti durian, rambutan, jeruk, lengkeng dan matoa dari program Pemerintah yang bersumber dari dana APBD dan APBN, Adanya bantuan pupuk kandang, kompos dan pupuk lainnya bagi pertanaman buah, dan Adanya bantuan obat-obatan bagi pertanaman hortikultura.



Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng

Gambar 2. 72 Capaian Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura Prov.Kalteng Tahun 2019 - 2020

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat capaian produktivitas tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan biofarmaka pada tahun 2020 komoditas sayur, tanaman biofarmaka dan tanaman buah telah mencapai target yang ditentukan untuk tahun 2020. Rata-rata capaian produktivitas tanaman hortikultura tahun 2020 meningkat jika dibandingkan dengan produktivitas tahun 2019 kecuali tanaman buah. Dan sudah mencapai target jangka menengah jika dibandingkan dengan target jangka menengah (periode akhir RENSTRA TAHUN 2021), terkecuali komoditas buah yang belum target.



Gambar 2. 73 Capaian Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Prov.Kalteng Tahun 2019 - 2020

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat capaian produksi tanaman hortikultura pada tahun 2020 untuk buah-buahan adalah sebesar 987.022 pohon (61,39 %) melebihi target 2020 dan lebih rendah 11,82 % jika dibandingkan target tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah telah melebihi target yakni sebesar 58,90 %. Untuk produksi tanaman sayuran tahun 2020 mencapai 590.722 ha (116,50 %) dari target tahun 2020 dan lebih tinggi 41,00 % jika dibandingkan capaian produksi tanaman hias untuk 2019. Dibandingkan dengan target jangka menengah tanaman hias telah mencapai 105,91 %.

Produksi tanaman hias tahun 2020 mencapai 41.034 m² (60,18 %) dari target tahun 2020. Capaian produksi tanaman hias untuk 2020 mengalami

peningkatan sebesar 104,65 % jika dibandingkan capaian produksi tanaman hias untuk tahun 2019 dan apabila dibandingkan dengan periode jangka menengah telah mencapai 56,20 %. Capaian produksi tanaman obat pada tahun 2020 adalah sebesar 1.799.429 m² (94,13 %) dari target untuk tahun 2020. Dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan luas panen pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian luas panen tanaman obat telah mencapai 88,74%.

Tabel 2. 99 Perkembangan Surplus Beras Provinsi Kalteng Tengah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Surplus/Defisit (Ton)	Keterangan
1	2016	144.709	Surplus
2	2017	136.987	Surplus
3	2018	178.115	Surplus
4	2019	89.741	Surplus
5	2020	63.441	Surplus

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Sebagaimana program Provinsi Kalimantan Tengah di bidang perkebunan, maka ke depan pemerintah akan fokus untuk mengembangkan komoditas kopi dan kakao, dengan tujuan untuk menciptakan keragaman komoditas perkebunan yang semakin tinggi sehingga peluang usaha bidang perkebunan semakin terbuka lebar.

Pada subsektor peternakan jenis ternak yang umumnya dipelihara oleh para peternak di Kalimantan Tengah diantaranya sapi, kerbau, kambing, babi, ayam dan itik. Masing-masing hewan ternak tersebut dapat diambil manfaat dan hasilnya yaitu berupa produksi daging atau telur.

Tabel 2. 100 Populasi Ternak Utama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	Populasi Ternak Utama (ekor)				
	Sapi	Kambing	Babi	Ayam Ras Pedaging	Itik
2016	73.424	45.409	200.720	8.185.419	275.193
2017	81.993	44.258	205.551	9.877.404	275.247
2018	84.612	45.016	208.178	19.631.117	277.866
2019	86.966	45.732	224.502	21.662.076	284.210
2020*)	84.245	46.876	232.539	22.203.630	289.043

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalteng, 2020 & Kalteng Dalam Angka, 2020

Perkembangan jumlah populasi ternak utama di Kalimantan Tengah tahun 2019 yaitu ternak sapi mengalami penurunan sebesar 2,78 persen bila dibandingkan dengan populasi pada tahun 2018. Sedangkan jenis ternak lainnya (kambing, babi, ayam ras dan itik)

jumlahnya mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 101 Produksi Daging Utama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	Populasi Ternak Utama (ekor)				
	Sapi	Kambing	Babi	Ayam Ras Pedaging	Itik
2016	4.294,75	205,26	1.912,05	12.278,13	146,05
2017	4.488,31	200,11	1.566,20	18.365,79	171,58
2018	3.822,07	223,76	1.692,85	32.336,19	172,25
2019	3.786,73	215,26	1.808,70	38.138,72	155,87
2020*)	3.415,60	222,45	1.840,35	39.551,21	158,52

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalteng, 2020 & Kalteng Dalam Angka, 2020

Produksi daging utama Kalimantan Tengah adalah daging sapi, kambing, ayam ras dan babi. Produksi daging sapi pada tahun 2020 adalah sebesar 3.415,60 ton (ASEM 2020). Kebutuhan daging pada tahun 2020 adalah sebesar berdasarkan konsumsi perkapita daging sebesar 1,96 kg/perkapita/tahun (berdasarkan Data Survey Bahan Pokok, BPS Tahun 2017), sehingga Kalimantan Tengah masih defisit daging sebanyak 1.849,45 ton atau setara 11.409 ekor sapi potong.

2.3.3.3.2 Sektor Perkebunan

Sebagaimana program Provinsi Kalimantan Tengah di bidang perkebunan, maka ke depan pemerintah akan fokus untuk mengembangkan komoditas kopi dan kakao, dengan tujuan untuk menciptakan keragaman komoditas perkebunan yang semakin tinggi sehingga peluang usaha bidang perkebunan semakin terbuka lebar.

Tabel 2. 102 Luas Lahan Komoditas - Komoditas Utama Tanaman Perkebunan 2014 - 2019

No	Komoditi	2014(Ha)	2015(Ha)	2016(Ha)	2017(Ha)	2018(Ha)	2019(Ha)
1.	Karet	447.380,41	447.179,66	451.062,03	450.160,08	445.305,66	439.303,20
2.	Kelapa Sawit	1.297.886, 17	1.296.483, 35	1.597.594, 59	1.508.215, 55	1.520.936,8 3	1.572.934,3 1
3.	Kelapa	32.340,70	30.392,46	29.980,10	31.366,11	34.189,21	34.621,68
4.	Kopi	1.581,04	1.259,14	1.573,93	1.736,96	1.955,26	2.401,24
5.	Kakau	987,16	1.126,11	1.912,06	2.137,91	2.304,91	2.838,31
6.	Lada	921,61	639,75	514,1	533,45	545,00	497,65

Jumlah	1.781.097,09	1.777.080,47	2.081.636,81	1.994.150,06	2.005.236,87	2.057.191,66
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 2020, diolah

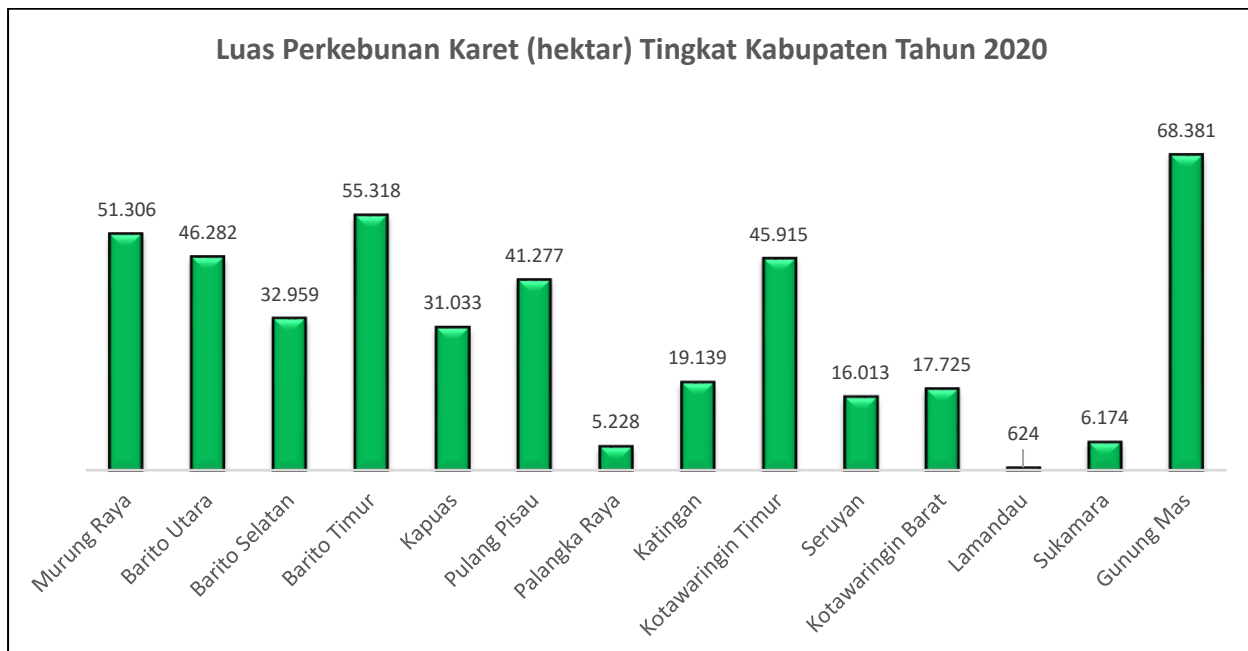
Dilihat dari Luas Areal dari beberapa komoditas yang ditampilkan terlihat jelas bahwa komoditas Kopi dan kakao merupakan komoditas yang Mengalami peningkatan dalam luas areal, Hal ini sesuai dengan program Provinsi Kalimantan Tengah di bidang perkebunan yaitu fokus pengembangan komoditas Kopi dan Kakao Sementara untuk komoditas lain cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut menciptakan keragaman komoditas perkebunan yang semakin tinggi sehingga peluang usaha bidang perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah Semakin Terbuka Lebar. Diharapkan hasil akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani pekebun khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2. 103 Produksi Komoditas – Komoditas Utama Tanaman Perkebunan 2014 - 2019

No	Komoditi	2014(Ton)	2015(Ton)	2016(Ton)	2017(Ton)	2018(Ton)	2019(Ton)
1.	Karet	145.177,06	137.366,32	145.981,33	166.300,80	167.319,05	167.679,19
2.	Kelapa Sawit	3.465.491,57	4.471.301,48	4.541.222,54	5.493.248,78	5.158.523,71	5.163.820,32
3.	Kelapa	24.353,64	14.735,83	14.698,39	15.265,23	15.696,31	15.634,44
4.	Kopi	371,01	415,8	472,22	410,22	396,83	404,66
5.	Kakau	216,6	554,99	778,61	837,53	1.369,92	1.496
6.	Lada	95,74	253,73	190,96	188,3	204,36	203,42
Jumlah		3.635.705,62	4.624.628,15	4.703.344,05	5.676.250,86	5.343.510,18	5.349.318,59

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 2020, diolah

Untuk Produktivitas beberapa Komoditas Perkebunan yang ditampilkan cenderung mengalami Penurunan terutama pada komoditas kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa perluasan areal tidak berbanding lurus dengan peningkatan produksi. Hal yang perlu dilakukan untuk peningkatan produksi adalah salah satunya dengan cara intensifikasi atau pengembangan teknologi dalam hal perawatan komoditas perkebunan sehingga didapat hasil yang maksimal. Untuk Program Unggulan Kalimantan Tengah yaitu pengembangan komoditas Kakao Produksinya terus meningkat dari tahun 2014-2019 sebesar 632,47%. Hal ini menandakan bahwa untuk pengembangan komoditas kakao berhasil di Kalimantan Tengah.



Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 2020 diolah

Gambar 2. 74 Luas Perkebunan Karet Tingkat Kabupaten Tahun 2020

Dari data sebaran luas komoditas Karet Kabupaten Katingan merupakan urutan pertama terluas perkebunan karet yaitu seluas 68.381 hektar. Nomor urut ke dua Kabupaten Barito Timur seluas 54.803 hektar, ketiga Kabupaten Murung Raya seluas 51.306 hektar, keempat Kabupaten Barito Utara seluas 46.282 hektar dan kelima Kabupaten Seruyan seluas 45.915 hektar serta keenam Kabupaten Pulang Pisau seluas 41.277 hektar. Kabupaten lainnya berada pada luas kisatan di bawah 40.000 hektar, paling kecil luas tanaman komoditas karet di Kabupaten Gunung Mas seluas 624 hektar. Tanaman komoditas karet merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat di hampir semua kabupaten yang dibudidayakan secara turun-temurun, namun pengembangannya di setiap kabupaten berbeda-beda. Banyak faktor yang memengaruhi minat pengembangan oleh masyarakat.

2.3.3.4 Urusan Kehutanan

Provinsi Kalimantan Tengah yang sebagian besar wilayahnya adalah Kawasan hutan, menjadikan sub sektor kehutanan memiliki peran penting dalam pembangunan Kalimantan Tengah. Luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini adalah 12.117.082,59 hektar (79,51 % dari luas daratan provinsi)

Tabel 2. 104 Daftar Komposisi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Status Kawasan	Luas (Ha)	%
1.	Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	1.626.144,37	10,67
2.	Hutan Lindung	1.353.592,89	8,88
3.	Hutan Produksi Tetap (HP)	3.771.891,44	24,75
4.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.277.609,82	21,51
5.	Hutan Produksi Konversi (HPK)	2.087.844,05	13,70
	Jumlah	12.117.082,59	79,51

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 (Hasil Pengolahan SK MenLHK No. SK.9415/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019)

Keberadaan kawasan Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi yang menjadi urusan konkuren antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, telah ditetapkan pengelolaannya menjadi 33 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terdiri dari 29 unit KPH Produksi dan 4 unit KPH Lindung dengan areal kelola seluas ± 8,5 juta hektar. Secara kelembagaan, saat ini telah terbentuk organisasi pengelola berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 18 UPT yang terdiri dari 16 UPT KPHP dan 2 UPT KPHL. Peran KPH selaku pengelola kawasan hutan di tingkat tapak juga dapat membuka peluang investasi melalui kerjasama pemanfaatan hutan dengan kelompok masyarakat maupun korporasi, untuk itu perlu dukungan dalam penyelenggaraan operasionalnya secara berkesinambungan.

Tabel 2. 105 Daftar Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Kalimantan Tengah

NO	UNIT KPH	LUAS WILAYAH (Ha)	JENIS KPH	KABUPATE N/KOTA	LEMBAGA PENGELOLA
1	UNIT I	UNIT I	1.060.601	KPHP	Murung Raya
2	UNIT II	UNIT II	907.043	KPHP	Murung Raya
3	Unit V	Unit V	325.220	KPHP	Barito Utara
4	Unit VI	Unit VI	178.825	KPHP	Barito Utara
5	Unit VIII	Unit VIII	113.625	KPHP	Barito Utara
6	Unit VII	Unit VII	165.886	KPHP	Barito Selatan
7	Unit XIV	Unit XIV	51.087	KPHP	Barito Timur
8	Unit IX	Unit IX	155.701	KPHL	Barito Selatan
9	Unit X	Unit X	245.005	KPHP	Kapuas
10	Unit XII	Unit XII	183.491	KPHP	Kapuas
11	Unit XI	Unit XI	273.187	KPHP	Kapuas
12	Unit XXXIII	Unit XXXIII	105.372	KPHL	Kapuas
13	Unit XXXII	Unit XXXII	185.565	KPHL	Kapuas

NO	UNIT KPH	LUAS WILAYAH (Ha)	JENIS KPH	KABUPATE N/KOTA	LEMBAGA PENGELOLA
14	Unit IV	Unit IV	7.805	KPHL	Palangka Raya
15	Unit XV	Unit XV	208.524	KPHP	Gunung Mas
16	Unit XVI	Unit XVI	294.735	KPHP	Gunung Mas
17	Unit III	Unit III	57.129	KPHP	Palangka Raya
18	Unit XIII	Unit XIII	177.710	KPHP	Gunung Mas
19	Unit XVIII	Unit XVIII	140.054	KPHP	Pulang Pisau
20	Unit XXXI	Unit XXXI	369.958	KPHP	Pulang Pisau
21	Unit XVIII	Unit XVIII	711.379	KPHP	Katingan
22	Unit XXX	Unit XXX	251.944	KPHP	Katingan
23	Unit XIX	Unit XIX	366.545	KPHP	Kotawaringin Timur
24	Unit XX	Unit XX	187.102	KPHP	Seruyan
25	Unit XXVIII	Unit XXVIII	143.681	KPHP	Kotawaringin Timur
26	Unit XXIX	Unit XXIX	196.943	KPHP	Kotawaringin Timur
27	Unit XXVII	Unit XXVII	299.959	KPHP	Seruyan
28	Unit XXI	Unit XXI	379.909	KPHP	Seruyan
29	Unit XXII	Unit XXII	202.704	KPHP	Kotawaringin Barat
30	Unit XXVI	Unit XXVI	104.539	KPHP	Kotawaringin Barat
31	Unit XXV	Unit XXV	147.520	KPHP	Sukamara
32	Unit XXIII	Unit XXIII	226.289	KPHP	Lamandau
33	Unit XXIV	Unit XXIV	91.487	KPHP	Lamandau
	Jumlah	Jumlah	8.516.524		

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 (Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2017).

Usaha bidang kehutanan masih didominasi oleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan IUPHHK- Hutan Tanaman dengan produk utama berupa hasil hutan kayu, selebihnya adalah IUPHHK-Restorasi Ekosistem dan IUPHHK-Penyimpanan dan Penyerapan Karbon yang merupakan usaha untuk melindungi dan merestorasi hutan-hutan yang rusak. Pemanfaatan hutan selain kayu meliputi Hasil Hutan Bukan Kayu (rotan, madu, gaharu, tanaman obat dan lain-lain), jasa lingkungan (wisata alam, air minum), pemanfaatan kawasan untuk mendukung ketahanan pangan (komoditas padi, tebu, jagung dan sapi) masih berpotensi untuk dikembangkan dimasa-masa mendatang baik melalui skema perizinan maupun kerjasama UPT KPH dengan masyarakat/korporasi.

Selain usaha pemanfaatan hutan yang berbasis korporasi, dalam rangka perluasan akses kelola hutan bagi masyarakat melalui program Perhutanan Sosial, sejak tahun 2016 telah terbit izin pengelolaan hutan yang dimiliki kelompok masyarakat yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Izin Usaha

Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan sebanyak 184 izin dengan menyerap anggota sebanyak 23.521 Kepala Keluarga. Potensi pengembangan perhutanan sosial di Kalimantan Tengah masih tinggi, mengingat dari 1.100.742 hektar areal indikatif yang dicadangkan baru terealisasi izin seluas 270.004 hektar (24,52 %). Disamping fasilitasi akses izin kelola masyarakat, juga perlu dukungan dalam hal pengembangan usahanya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Tabel 2. 106 Daftar Rekapitulasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Berbasis Korporasi

No	Jenis Izin	Jumlah Izin (Unit)	Luas (Ha)	Ket
1.	IUPHHK-HA	57	3.969.834,99	Aktif 51 unit, 6 unit tidak aktif (tidak ada RKT).
2.	IUPHHK-HT	33	856.085,91	Aktif 16 unit, tidak aktif 19 unit (tidak ada RKT).
3.	IUPHHK-RE	3	164.728,77	Aktif 3 unit
4.	IUPHHK-PAN/RAP Karbon	1	25.800,00	Tidak aktif
	Jumlah	94	5.016.449,67	

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Tabel 2. 107 Daftar Rekapitulasi Izin Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Perhutanan Sosial)

No	Jenis Izin	Jumlah (Unit)	Luas Areal (Ha)	Jumlah Anggota (KK)
1.	IUPHHK-HTR	51	57.640,96	7.475
2.	IUPHKm	76	78.028	8.197
3.	HPHD	56	134.233	7.394
4.	Hutan Adat	1	102	455
	Jumlah	184	270.004	23.521

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Dalam kurun waktu 2016-2020, usaha sektor kehutanan telah menghasilkan produksi hasil hutan kayu dan memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai target, berasal dari penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dikenakan atas realisasi produksi hasil hutan kayu serta Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) yang dikenakan pada perizinan baru.

Tabel 2. 108 Daftar Realisasi Produksi Kayu Bulat Tahun 2016-2020

No	Kelompok Jenis	Volume Produksi (m3)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Meranti	1.838.838,29	2.050.029,45	2.381.054,76	2.028.614,18	1.715.808,96
2.	Rimba Campuran	142.893,72	145.334,73	228.218,72	255.280,01	178.009,47

3.	Kayu Indah	14.040,85	43.498,01	8.777,45	5.059,59	2.652,71
4.	Jenis Lainnya	182,02	2.486,22	2.350,86	1.442,27	796,92
5.	Hutan Tanaman	1.241.238,94	1.178.206,61	1.215.459,48	1.192.082,77	957.724,77
	Jumlah	3.237.193,82	3.419.555,02	2.381.054,76	3.482.478,82	2.854.992,83

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2021

Tabel 2. 109 Daftar Target dan Realisasi PNB Sub Sektor Kehutanan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase
1	2016	711.045.633.928	642.464.849.007,60	78,53
2	2017	740.074.861.005	714.909.262.856,00	95,31
3	2018	816.219.054.040,35	856.893.392.216,00	104,98
4	2019	858.738.004.076	765.764.383.370	89,17
5	2020	807.745.444.099	622.184.495.335	77,03

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Pada bagian hilir usaha sub sektor kehutanan berupa pengolahan hasil hutan, tercatat sebanyak 93 unit Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IIPHHK) yang aktif dengan kapasitas izin industri sebesar 2.374.542,0000 m³/tahun komoditi kayu gergajian (sawn timber), plywood, veneer dan serpih kayu. Produksi kayu olahan sejak tahun 2016-2020 rata-rata untuk kayu gergajian 182.350.542,000 m³/tahun, veneer 122.085,3585 m³/tahun dan serpih kayu 498.472,8151 m³/tahun.

Tabel 2. 110 Daftar Rekapitulasi Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IIPHHK)

No	Kategori Berdasarkan Kapasitas	Jumlah Izin (Unit)	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)	Keterangan
1.	Dibawah 6.000 m ³ /tahun	84	323.606,0000	Sawn Timber
2.	Kapasitas 6.000 m ³ /tahun ke atas	9	2.050.936,0000	Sawn Timber, Plywood, Veneer, Serpih Kayu
	Jumlah	93	2.374.542,0000	

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2020

Tabel 2. 111 Daftar Realisasi Produksi Kayu Olahan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Volume Produksi (m ³)		
		Kayu Gergajian	Veneer	Serpih Kayu
1	2016	61.335,7972	183.971,4236	526,9400
2	2017	79.032,4591	195.340,5657	880.361,1500
3	2018	109.134.9246	137.539,8787	670.877,1489

4	2019	71.490,5537	40.76,7453	443.812,2716
5	2020	108.346,8691	157.271,9046	657.597,6823
	Rata-rata	182.350,0662	122.085,3585	498.472,8151

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2020

Secara umum realisasi capaian kinerja urusan Kehutanan tahun 2016-2020 dari 10 indikator kinerja RPJMD tersebut sudah baik, hanya saja masih ada 1 indikator yang belum sepenuhnya tercapai, yaitu indikator kinerja penurunan jumlah hotspot, yang ditargetkan berkurang sebesar 20% per tahun. Khususnya pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah hotspot akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Indikator tersebut masih harus menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Dinas Kehutanan.

Tabel 2. 112 Daftar Capaian Kinerja RPJMD Urusan Bidang Kehutanan Tahun 2016-2020

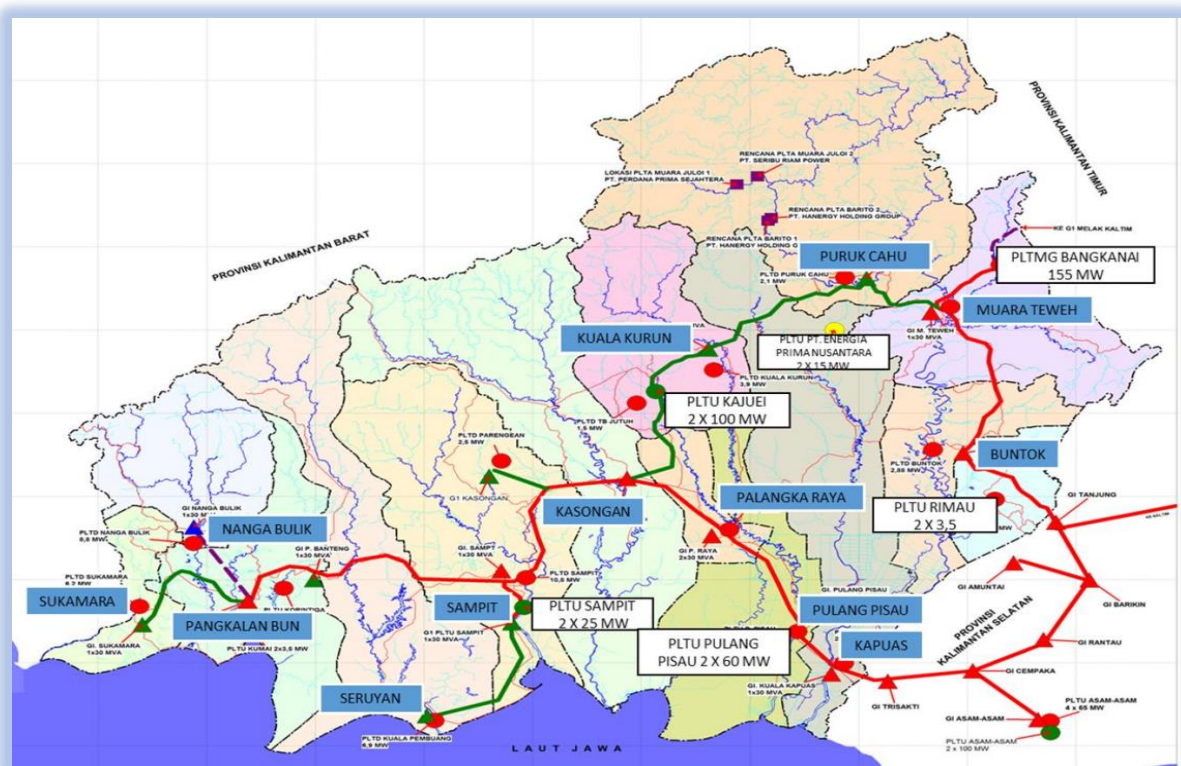
No	Indikator Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan (Persen)	78.52	95.31	104.98	89.17	77,03
2	Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat Baik (Persen)	43.00	54	67.00	62.31	78
3	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan (Persen)	0.045	0.01	0.08	0.045	1,40
4	Jumlah hot spot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20 % per tahun (Jumlah)	265	844	1,349	7060	128
5	Jumlah kasus gangguan terhadap hutan dan hasil hutan menurun 20 % per tahun (Jumlah)	36	7	11	9	7
6	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah (Persen)	25	100	100	100	100
7	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (paket kegiatan)	1	1	1	1	1
8	Pencegahan, pengendalian dan penindakan <i>illegal logging</i> (frekuensi pengamanan hutan)	2	1	1	1	-

No	Indikator Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	Penghijauan dan reboisasi (jumlah batang pohon bibit)	11,600	37,000	40,000	24,200	-
10	Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan (jumlah orang)	40	40	79	102	1.721

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2020

2.3.3.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

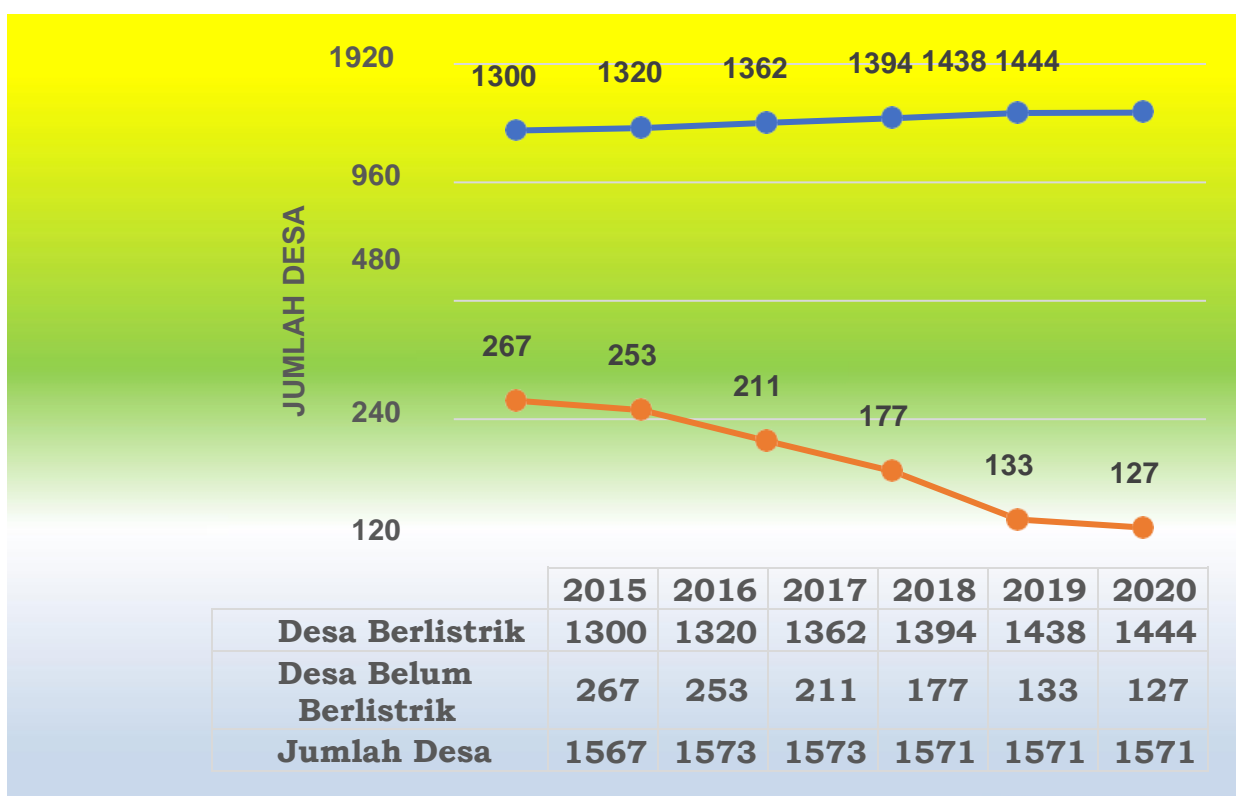
Untuk urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Pembangkit tenaga listrik yang existing PLTU Pulang Pisau (92X60 MW), PLMG Bangkanai (1X155 MW), PLTU PT. Energia Prima Nusantara (2X15 MW), PLTU PT. Rimau Elektrik (2X3,5 MW), PLTU PT. Korintiga (1X7 MW) dan PLTU PT. Exploitasi Energi Indonesia (2X7 MW) sehingga kapasitas jumlah seluruhnya sebesar 333 MW, Pembangkit Tenaga Listrik yang masih dalam proses pembangunan yaitu PLTMG Bangkanai II (144 MW), PLTU Tumbang Kajuei (200 MW) dan PLTU Sampit (50 MW) sehingga jumlah kapasitas seluruhnya sebesar 394 MW, Kebutuhan Daya Listrik Tahun 2019 Supply Interkoneksi dari KALSELTENG sebesar 640 MW dengan Daya Beban Puncak untuk kebutuhan Kalimantan Tengah Sebesar 540 MW sehingga masih surplus Daya sebesar 100 MW.



Gambar 2. 75 Interkoneksi Jaringan SUTT 150 KV Kalimantan Tengah
 Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah, 2020

Dengan selesainya masalah mandeknya pembangunan SUTT selama tahun 2011 – 2017 (6 Tahun), sehingga pembangunan jaringan SUTT 150 KV sudah terkoneksi Kalsel – Kalteng – Kalbar. Interkoneksi jalur utara PLTMG Bangkanai – PLTU Asam-asam - Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun – Kasongan – Sampit – Pangkalan Bun – Sukamara – Kalbar. Interkoneksi jalur selatan Interkoneksi jalur selatan PLTU Asam-asam – Kuala Kapuas – Pulang Pisau – Palangkaraya – Kasongan.

Untuk Rasio Elektrifikasi tahun 2015 sebesar 70,71% dan tahun 2020 Rasio Elektrifikasi sebesar 86,69%. Peningkatan Rasio Elektrifikasi sebesar 15,69%. Desa Belum Berlistrik Tahun 2015 sebanyak 267 Desa (17,04%), dan untuk Tahun 2020 sebanyak 127 Desa (8,08%), sehingga terjadi penurunan untuk Desa Belum Berlistrik sebanyak 140 Desa (8,96%). Desa Berlistrik Tahun 2015 sebanyak 1300 (82,96%) dan untuk Desa Berlistrik Tahun 2020 sebanyak 1444 (91,91%), sehingga kenaikannya sebanyak 144 Desa (8,95%)



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah, 2020

Gambar 2. 76 Kondisi Desa Berlistrik Dan Belum Berlistrik Tahun 2015-2020 Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 2. 77 Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah, 2020

Untuk capaian kinerja Subsektor Pertambangan Minerba Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2019, Peningkatan PAD sebesar Rp. 2,3 Milyar atau 626% (6 kali) dari tahun 2015, Peningkatan PNPB sebesar 1.240% dari tahun 2015, Peningkatan Jaminan Reklamasi (2.420%) dan Pascatambang (7.977%) dari tahun 2015, Tertatanya Perijinan IUP Minerba tahun 2019 menjadi 302 IUP CnC, Peningkatan produksi Batubara sebesar 37,6 Ton 2016-2019, Pengurangan Piutang PNPB sebesar 237% dari tahun 2015.

Proses penataan IUP melalui evaluasi perijinan dan penyelesaian tumpang tindih telah berjalan dengan baik sehingga pada tahun 2016 sebanyak 1007 IUP berkurang menjadi 302 IUP CnC pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah.

Tabel 2. 113 Penataan IUP Tahun 2016-2019

KOMODITAS	TAHUN			
	2016	2017	2018	2019
IUP Batubara	618	391	297	230
IUP Logam	131	69	61	39
Iup Bukan Logam & Batuan	258	62	51	33
Total	1.007	522	409	302
PKP2B	15	14	14	14
KK	5	5	5	5

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah, 2020

Adanya peningkatan produksi batubara IUP pada tahun 2015-2019, produksi batubara pada tahun 2015 sebesar 2,4 juta ton terjadi peningkatan produksi sebesar 37,6 juta ton sampai tahun 2019. Seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 114 Produksi Batubara IUP Tahun 2015-2019

TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PAD (Rp)
2015	2,4 Juta	369.245.000,-
2016	5,8 Juta	420.140.000,-
2017	8,5 Juta	439.233.800,-
2018	11,6 Juta	697.805.200,-
2019	9,3 Juta	2.308.360.000,-
TOTAL	37,6 Juta	3.865.539.000,-

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah, 2020

Untuk PAD sektor pertambangan mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2015 sebesar Rp. 369 juta menjadi sebesar 2,3 milyar pada tahun 2019 atau naik 626%. Penempatan jaminan reklamasi dari tahun 2015 sebesar 10,3 milyar meningkat menjadi 249,9 milyar pada tahun 2016-2019 atau naik 2.420% dan jaminan pasca tambang dari tahun 2015 sebesar 869,5 juta meningkat menjadi 69,3 milyar pada tahun 2019 atau naik 7.977%. seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 115 Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang Tahun 2015-2019

TAHUN	JAMINAN REKLAMASI (Rp)	JAMINAN PASCA TAMBANG (Rp)
2015	10.321.265.405,-	869.540.534,-
2016	14.524.767.645,-	1.099.940.728,-
2017	82.128.822.482,-	9.932.056.339,-
2018	116.734.449.033,-	26.871.051.040,-
2019	36.465.985.514,45,-	31.467.133.258,-
TOTAL	249.854.024.674,45	69.370.181.365,-

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah, 2020

Sementara realisasi PNBPN terus meningkat dari tahun 2015 sebesar 531 milyar menjadi 7529 triliun (2016-2019) atau naik 1.240% dan DBH dari tahun 2015 sebesar 424 milyar menjadi 5,211 triliun (tahun 2016-2019).

Tabel 2. 116 Realisasi PNBPN Tahun 2015-2019

TAHUN	PNBPN (Rp)	DBH (Rp)
2015	531 Milyar	424 Milyar
2016	951 Milyar	760 Milyar
2017	1,730 Trilyun	1,384 Trilyun
2018	2,077 Trilyun	1,661 Trilyun
2019	2,240 Trilyun	1,793 Trilyun
TOTAL	7,529 Trilyun	6,022 Trilyun

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah, 2020

Karena pencapaian-pencapaian tersebut, maka provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan penghargaan subroto award bidang kepatuhan PNPB Mineral dan Batubara tahun 2019, dan juga mendapatkan penghargaan dari kementerian keuangan Republik Indonesia tahun 2018.

2.3.3.6 Urusan Perdagangan

Kondisi umum dalam dinamika perekonomian dunia telah mewarnai perjalanan pembangunan perdagangan nasional antara lain kenaikan harga minyak mentah, krisis keuangan global, yang mempengaruhi perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting ditandainya dengan munculnya keunggulan ekonomi kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi sub sektor perdagangan eceran dalam pembentukan PDRB, penciptaan lapangan pekerjaan, terciptanya intensitas koordinasi antar fasilitator pusat dan daerah dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar dan pembinaan sektor informal.

Pengembangan perdagangan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan sistem perdagangan dalam negeri yang efisien, perlindungan terhadap konsumen dan pengembangan perdagangan luar negeri dalam rangka peningkatan ekspor serta pengendalian impor, tujuan ini sangat erat hubungannya dengan upaya memperkuat pemantapan struktur ekonomi daerah.

Adapun capaian kinerja pada Urusan Perdagangan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 117 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	6,68	11,99	12,89	13,42	13,19
2	Ekspor Bersih Perdagangan (US \$)	900.680.000	1.607.130.000	1.677.290.000	1.886.320.000	1.791.090.000

3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal/Penerbitan SIUP	3.262	4.291	2.204	8.255	8.983
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, untuk indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami fluktuasi dimana di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 6,68% dan tidak mencapai target yang ditentukan sebesar 11,7%, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2017 sampai 2019 dan melebihi target yang ditentukan sebesar 12,22% di tahun 2019. Untuk nilai ekspor bersih perdagangan mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2019 dan melebihi target yang ditentukan. Sementara itu untuk cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal/penerbitan SIUP mengalami kenaikan pada tahun 2017 namun kenaikan ini tidak mencapai target yang ditentukan sebesar 6.750, kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2.204 dan tidak mencapai target, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 8.255 melebihi target yang ditentukan yaitu 7.250. Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 8.983

2.3.3.7 Urusan Perindustrian

Perkembangan ektor industri dilaksanakan dengan tujuan memperkuat struktur ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja dan keempatan berusaha, penguatan dan pendalaman struktur industri yang terkait dengan agro industri, industri kecil dan menengah serta industri kerajinan dan rumah tangga dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pasar dalam dan luar negeri.

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan dengan mengutamakan keberpihakan pada masyarakat dan memperkuat keterkaitan serta saling mendukung antara industri dan pertanian yang ditunjang dengan sektor jasa dan kualitas SDM. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan pengembangan industri dapat lebih efisien dengan wawasan kemas depan yang dapat memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi daerah melalui nilai tambah, lapangan kerja dan nilai devisa, juga mampu memberikan kontribusi yang besar kearah

transformasi kultur, modernisasi kehidupan masyarakat dalam menunjang pembentukan suatu produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Sektor industri di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu pendukung ekonomi kerakyatan yang mendorong tumbuh dan kembangnya pelaku ekonomi lokal yang berbasis komoditi unggulan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di sektor industri diharapkan muncul pusat- pusat kekuatan baru dalam bidang industri.

Adapun capaian kinerja pada Urusan Perindustrian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 118 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	10,90	16,62	15,71	14,97	15,96
2	Pertumbuhan Industri (Unit)	5.164	5.422	7.953	8.750	8.724
3	Cakupan bina kelompok pengrajin/ jumlah tenaga kerja (orang)	16.655	16.904	27.646	29.410	26.289

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Berdasarkan tabel di atas kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai 2020 dimana pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari 10,90% di tahun 2016 menjadi 16,62%. Kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2018 sampai 2019 sebesar 15,71% dari target sebesar 16,80% dan di tahun 2019 sebesar 14,97% dari target 17,10%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 15,96% dari target 17,50%. Untuk pertumbuhan industri mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dan semua mencapai target. Dan untuk cakupan bina kelompok pengrajin/ jumlah tenaga kerja setiap tahun juga mengalami kenaikan seperti yang tertera dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

2.3.3.8 Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan serta persebaran penduduk. Perpindahan memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan

tenaga kerja untuk mengolah atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada.

Tabel 2. 119 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019
1	Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat	lahan	1.360	609	750
2	Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung (KK)	KK	0	25	143
3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan (SP)	SP	4	4	0

Sumber: Lakip Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2016-2019

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Selama periode tahun 2015 sampai dengan 2019, kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kinerja beberapa indikator seperti Jumlah LKIP PD dengan kategori minimal baik (B), dan Nilai Reformasi Birokrasi. Namun indikator kinerja lainnya hanya tersedia data capaian tahun 2019, sehingga tidak dapat dinilai perkembangannya. Capaian indikator kinerja yang ada pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kurun waktu 2015-2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 120 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019
1	Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Kategori	B	B	B	B
2	Jumlah LKIP PD dengan kategori minimal baik (B)	PD	3	13	16	22
3	Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN	Orang	371	218	482	540
4	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	56,80	59,70	59,28	59,59
5	Jumlah penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Rancangan Perda	14	31	3	9
6	Jumlah penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah	Rancangan PerGub	79	79	55	42
7	Jumlah penyusunan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah	Rancangan Kep Gub	1.252	1.309	1.285	947
8	Jumlah rancangan produk hukum	Rancangan	38	14	68	65

	daerah kabupaten / kota yang dievaluasi.	Produk Hukum Kabupaten / Kota				
9	Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan secara refresif.	Rancangan Produk Hukum Kabupaten / Kota	374	162	193	271

Sumber: *Lakip Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015-2019*

2.3.4.2 Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Adapun kinerja pada Sekretariat DPRD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 121 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019
1	Jumlah Perda Yang Dibahas Tepat Waktu	Perda	9
2	Jumlah Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Kali Reses	2
3	Penerimaan Delegasi	Kali	19

Sumber: *Lakip Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2018 dan 2019*

2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.3.5.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Adapun capaian indikator kinerja yang ada pada unsur Perencanaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 122 Capaian Kinerja Unsur Perencanaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
1	Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 (2020) dengan arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2016-2021	Persen	89,74	96,67
2	Persentase keterkaitan arah kebijakan	Persen	100,00	100,00

	dan prioritas RKPD tahun n+1 (2020) dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKP tahun n+1 (2020)			
3	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	Persen	86,24	95,70
4	Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	Persen		
5	Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	Persen	80,94	94,29
6	Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	Persen	94,78	95,86
7	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	PD	36,00	37,00

Sumber: Lakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2017-2019

2.3.5.2 Keuangan

Unsur keuangan merupakan salah satu penunjang urusan pemerintahan daerah. Kinerja unsur keuangan meliputi seluruh siklus keuangan daerah yaitu penganggaran, penatausahaan, seta akuntansi dan pelaporan. Adapun capaian kinerja yang ada pada unsur keuangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 123 Capaian Kinerja Unsur Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lamanya waktu penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah	Kategori			60 hari	60 hari	60 hari
2	Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat	Kategori			80%	80%	80%

Sumber: Lakip Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2016-2020

2.3.5.3 Kepegawaian

Kinerja kepegawaian dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 124 Capaian Kinerja Unsur Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019
1	Jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat periode	Orang	4.000

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019
	April dan Oktober, Karpeg, Masa kerja PNS		
2	Jumlah PNS Provinsi yang lulus seleksi untuk tugas belajar, penetapan dan monitoring tugas belajar dan izin belajar serta revisi perda tentang tugas belajar dan izin belajar	Orang	213
3	Jumlah PNS yang terdata secara elektronik	Orang	10.250
4	Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu	SK	14
5	Jumlah capra IPDN sesuai alokasi formasi	Orang	60

Sumber: Lakip Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2019

2.3.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2018 dan 2019, kinerja Pendidikan dan pelatihan di Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan adanya peningkatan, walaupun masih terdapat beberapa indikator yang menunjukkan penurunan. Indikator kinerja yang menunjukkan penurunan di tahun 2019 jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Persentase Peserta Diklat Teknis yang lulus Post Test, dan Persentase Peserta Diklat Fungsional yang lulus Post Test. Adapun kinerja unsur Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Tengah diwakili dengan beberapa indikator kinerja tahun 2018 dan 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 125 Capaian Kinerja Unsur Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019
1	Persentase Peserta Diklat Prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan	Persen	99
2	Persentase Peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	Persen	100
3	Persentase Peserta Diklat Teknis yang lulus Post Test	Persen	79
4	Persentase Peserta Diklat Fungsional yang lulus Post Test	Persen	72
5	Persentase terlaksananya sertifikasi profesi Alumni diklat	Persen	88
6	Persentase Rata-rata nilai hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan diklat	Persen	97

Sumber: Lakip Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2019

2.3.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Kinerja pada unsur penelitian dan pengembangan di Pemerintah daerah Kalimantan Tengah ditunjukkan dengan indikator Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah yang capaiannya mulai tahun 2017 adalah 100%.

Tabel 2. 126 Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2018

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018
Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	Persentase	100,00	100,00

Sumber: Lakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2017-2019

2.3.5.6 Unsur Pengawasan

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan keragaman. Beberapa indikator kinerja mengalami peningkatan atau perbaikan, namun indikator lainnya mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang yaitu Persentase tindak lanjut BPK-RI yang selesai, Persentase tindak lanjut ITJEN Kemendagri/Teknis lainnya yang selesai, dan Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan. Capaian indikator kinerja pada unsur pengawasan selama periode tahun 2017-2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 127 Capaian Kinerja Pengawasan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat	-	2,40	3,00	3,00
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Level	1,00	2,00	3,00	3,00
3	Persentase tindak lanjut selesai:					
	- BPK-RI	Persen	70,89	84,14	78,49	90,22



No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020
	- ITJEN Kemendagri/Teknis lainnya	Persen	97,00	87,70	52,24	58,70
	- Inspektorat	Persen	92,00	89,49	90,80	98,70
4	Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan	Persen	33,29	22,97	52,78	≤ 100
5	Persentase SKPD yang Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	Persen	36,00	44,00	58,00	≤ 100

Sumber: Lakip Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2016-2019

2.3.5.7 Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Unsur Pemerintahan Umum berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, menegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat dan juga menjaga integrasi bangsa. Adapun capaian indikator kinerja pada unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 128 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019
1	Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Kali	10,00
2	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	Orang	1.750,00
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Orang	200,00
4	Meningkatnya pemahaman ideologi bangsa, cinta tanah air dan bela negara dikalangan masyarakat	Orang	1.700,00
5	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi hijau dan peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya daerah	Orang	650,00
6	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan/	Orang	100,00



No	Indikator Kinerja	Satuan	2019
	LSM		
7	Meningkatnya penyebaran data dan informasi pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik	Kegiatan	3,00

Sumber: Lakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2019



Tabel 2. 129 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1.	Pertumbuhan PDRB ADHB	Persen	100.063,5	111.967,0	125.817,1	138.718,4	150.283,2	152.190,90
2.	Pertumbuhan PDRB ADHK	Persen	78.891,0	83.900,2	89.544,9	94.600,9	100.428,7	98.956,70
3.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,01	6,35	6,73	5,65	6,16	-1,4
4.	Laju Inflasi	Persen	4,74	3,15	3,18	4,52	2,45	1,03
5.	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,91	5,36	5,26	5,10	4,81	4,82
6.	Garis Kemiskinan	Rp.				413.529	438.248	485.635
7.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	0,89	0,86	0,84	0,81	0,7	0,8
8.	Tingkat Keparahan Kemiskinan	Persen	0,21	0,2	0,21	0,21	0,14	0,22
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,54	4,82	4,23	4,01	4,1	4,58
10.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,11	71,30	67,74	70,03	69,68	68,4
11.	Distribusi Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia							
	40% Penduduk Berpenghasilan Rendah	Persen	20,59	19,7	19,59	19,48	19,81	20,44
	40% Penduduk Berpenghasilan Sedang	Persen	38,45	39,93	38,03	38,4	38,58	38,13
	20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi	Persen	40,96	40,37	42,38	42,12	41,62	41,43
12.	Indeks Gini	Indeks	0,300	0,347	0,327	0,344	0,340	0,329
13.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	68,53	69,13	69,79	70,42	70,91	71,05
14.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,22	12,33	12,45	12,55	12,57	12,66
15.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,03	8,13	8,29	8,37	8,51	8,59
16.	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,54	69,57	69,59	69,64	69,69	69,74
17.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	89,25	89,07	88,91	89,13	89,09	89,03
18.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	77,87	78,23	79,36	77,03	83,20	82,41
II.	Aspek Pelayanan Umum							
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1.1	Pendidikan							
A.	SD/MI							

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Angka Partisipasi Murni Sekolah (7-12 tahun)	Persen	98,54	98,67	98,90	95,0	93,53	96,80
1.2	Angka Partisipasi Kasar Sekolah (7-12 tahun)	Persen	114,76	114,00	112,48	109,9	106,64	116,77
1.3	Rasio Guru terhadap Murid	Rasio	11,35	14	15	15	17	17
B.	SMP/MTs		SMP/MTs					
2.1	Angka Partisipasi Murni Sekolah (13-15 tahun)	Persen	75,76	75,92	76,00	73,5	73,11	85,82
2.2	Angka Partisipasi Kasar Sekolah (13-15 tahun)	Persen	95,94	86,30	95,79	100,3	100,52	96,59
2.3	Rasio Guru terhadap Murid	Rasio	13,47	15	15	15	18	18
C.	SMA/MA/SMK		SMA/MA/SMK					
3.1	Angka Partisipasi Murni Sekolah (16-18 tahun)	Persen	52,36	52,50	53,86	56,7	60,71	77,61
3.2	Angka Partisipasi Kasar Sekolah (16-18 tahun)	Persen	70,70	78,44	80,38	80,7	82,23	95,07
3.3	Rasio Guru terhadap Murid (SMA)	Rasio	11,52	13	TAD	15	13	13
3.4	Rasio Guru terhadap Murid (SMK)	Rasio	10,60	11	14	14	13	13
D	APS							
4.1	Kelompok Umur Sekolah (7-12) Belum Pernah Sekolah		TAD	TAD	TAD	TAD	0.03	0.31
4.2	Kelompok Umur Sekolah (7-12) Masih Sekolah		TAD	TAD	TAD	TAD	99.66	99.49
4.3	Kelompok Umur Sekolah (7-12) Tidak sekolah Lagi		TAD	TAD	TAD	TAD	0.31	0.2

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.4	Kelompok Umur Sekolah (13-15) Belum Pernah Sekolah		TAD	TAD	TAD	TAD	0.21	0.16
4.5	Kelompok Umur Sekolah (13-15) Masih Sekolah		TAD	TAD	TAD	TAD	94.09	94.86
4.6	Kelompok Umur Sekolah (13-15) Tidak sekolah Lagi		TAD	TAD	TAD	TAD	5.7	4.98
4.7	Kelompok Umur Sekolah (16-18) Belum Pernah Sekolah		TAD	TAD	TAD	TAD	0.19	0.47
4.8	Kelompok Umur Sekolah (16-18) Masih Sekolah		TAD	TAD	TAD	TAD	66.95	66.92
4.9	Kelompok Umur Sekolah (16-18) Tidak sekolah Lagi		TAD	TAD	TAD	TAD	32.86	32.61
4.10	Kelompok Umur Sekolah (19-24) Belum Pernah Sekolah		TAD	TAD	TAD	TAD	0.38	0.26
4.11	Kelompok Umur Sekolah (19-24) Masih Sekolah		TAD	TAD	TAD	TAD	23.98	24.26
4.12	Kelompok Umur Sekolah (19-24) Tidak sekolah Lagi		TAD	TAD	TAD	TAD	75.64	74.48
4.13	Kelompok Umur Sekolah (7-24) Belum Pernah Sekolah		TAD	TAD	TAD	TAD	0.19	0.3
4.14	Kelompok Umur Sekolah (7-24) Masih Sekolah		TAD	TAD	TAD	TAD	69.43	69.51
4.15	Kelompok Umur Sekolah (7-24) Tidak sekolah Lagi		TAD	TAD	TAD	TAD	30.38	30.2
E	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
5.1	SD/MI	orang	23.949	25.029	22.555	25894	28134	28302
5.2	SMP/MTS	orang	7.723	8.843	8.408	11031	11707	12370
5.3	SMA/MA/SMK	orang	5.976	7.058	6.958	8378	8933	9225
F	Kondisi Bangunan Satuan Pendidikan (SMA)							

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.1	Baik	%	29,27	30,14	30,94	41.81	36.93	22.97
6.2	Rusak Ringan/Sedang	%	62,58	62,08	60,17	55.48	59.49	74.86
6.3	Rusak Berat/Total	%	8,15	7,79	8,89	2.71	3.58	2.17
G	Kondisi Bangunan Satuan Pendidikan (SMK)							
7.1	Baik	%	38,05	38,81	39,51	46.11	46.56	30.66
7.2	Rusak Ringan/Sedang	%	54,81	54,37	52,70	52.38	52.5	67.59
7.3	Rusak Berat/Total	%	7,14	6,82	7,79	1.51	0.94	1.75
1.2.	Kesehatan							
2.1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	20	20	22	24	26	28
2.2	Kapasitas Tempat Tidur RS	Unit	1870	1970	2235	2368	2515	2913
2.3	Jumlah Puskesmas Induk	Unit	195	195	198	200	204	206
2.4	Jumlah Pustu	Unit	1063	1063	913	1045	1012	1.105
2.5	Jumlah Poskesdes/Polindes/ Rumah bersalin	Unit	640	755	943	935	956	956
2.6	Jumlah Dokter Gigi	Orang	118	116	106	116	116	123
2.7	Jumlah Dokter Umum	Orang	483	567	515	505	592	683
2.8	Jumlah Dokter Spesialis	Orang	176	197	302	350	296	122
2.9	Bidan	Orang	2505	2307	3308	3268	3473	3.885

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.10	Perawat	Orang	4652	4747	5791	5645	6198	6.642
2.11	Apoteker/Asisten Apoteker	Orang	404	370	466	656	1098	722
2.12	Tempat tidur rumah sakit per 1.000 jumlah penduduk	Rasio	0,76	0,77	0,9	0,89	0,91	1,05
2.13	Dokter per 100.000 jumlah penduduk	Rasio	18,68	18,43	19,77	19,81	22,3	24,7
2.15	Puskesmas per 30.000 jumlah penduduk	Rasio	2,34	2,29	2,32	2,28	2,27	2,29
2.16	Bidan per 100.000 jumlah penduduk	Rasio	105,64	90,46	122,8	122,8	136,2	149,6
2.17	AKI	Rasio	183	160	121	165	150	140
2.18	AKB	Rasio	8,7	8,5	7,8	7,6	6,2	7,5
2.19	Stunting	Persentase	33,3	34,1	39,0	34,04	32,30	32,30
2.20	Wasting	Persentase	13,9	11,7	10,6	13,9%	10,7	7,5
2.21	Hipertensi		70.107	80.304	84.307	97.658	266.876	351.895
2.22	Diabetes Militus		10.720	20.201	30.121	47.721	69.291	93.763
2.24	ODGJ Berat		455	721	1.031	2.165	3.077	3.830
2.25	Tuberkolosis		2.579	2.851	2.651	3.397	3.615	1.486
2.26	Pneumonia		94	596	631	677	1.598	1.038
2.27	Diare		32.694	22.732	11.263	13.143	7.967	21.666
2.28	Kusta		47	44	39	68	56	34

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.29	Covid 19							9.684
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
A	Jalan Nasional							
3.1.1	Kondisi Baik	Km	1.079,20	735,40	931,08	920,6	700,31	611,26
3.1.2	Kondisi Sedang	Km	727,25	1.007,86	872,26	711,72	970,17	1.035,01
3.1.3	Kondisi Rusak Ringan	Km	133,13	143,92	102,61	152,20	123,23	109,22
3.1.4	Kondisi Rusak Berat	Km	62,50	114,90	96,13	217,56	208,36	246,59
3.1.5	Jalan secara keseluruhan (nasional)	Km	2.002,08	2.002,08	2.002,08	2.002,08	2.002,08	2.002,08
B	Jalan Provinsi							
3.2.1	Kondisi baik	km	586,85	556,30	473,74	427,902	509,39	502,90
3.2.2	Kondisi sedang	km	370,73	406,40	373,51	248,88	247,961	500,29
3.2.3	Kondisi rusak ringan	km	123,39	113,01	266,02	326,925	300,679	246,09
3.2.4	Kondisi rusak berat	km	19,02	24,29	158,81	268,373	214,048	22,8
3.2.5	Jalan secara keseluruhan Provinsi	km	11,00	11,00	1.272,08	1.272,08	1.272,08	1.272,08
C	Revisi Perda dan Perkada							
3.3.1	Perkembangan Revisi Perda dan Perkada RDTR Kabupaten/Kota	perda	o	o	o	o	o	1
1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.1	Jumlah Kawasan Kumuh	Kawasa n	TAD	62	77	87	87	89
4.2	Luas Kawasan Kumuh	Ha	TAD	1.8940,61	7.026,79	7.491,61	7.491,61	7.850,46
4.3	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Unit	TAD	TAD	390.777	387.904	367.050	338.281
4.4	Rumah Layak Huni (RLH)	Unit	TAD	TAD	284.913	302.213	337.423	366.192
4.5	Realisasi Pembangunan Perumahan KPR Melalui BTN Cabang Palangka Raya							
4.5.1	Selesai	Unit	TAD	TAD	TAD	4.298	2.550	1.863
4.5.2	Nilai	Rp.	TAD	TAD	TAD	548.855.431	329.890.102.750	260.786.098.088
1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Jumlah Tindak Pidana	Tindak Pidana	3.919	2.801	2.621	2.685	2.362	2.483
5.2	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana	Tindak Pidana			2.286	2.031	1.864	1.890
5.3	Bencana dan Kebakaran		4.032	328	320	1.091	2.754	908
1.6.	Sosial							
	PMKS yang Telah dilayani							
6.1	Korban bencana alam	Jiwa/K K	28000	25200	25000	25200	21.160/5.893	11.349/660
6.2	Korban bencana sosial	Jiwa/K K	583	583	600	650	1.690/334	320/95
6.3	Gepeng (gembel dan pengemis)	Orang	171	171	171	20	20	196

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.4	Penderita HIV/AIDS	Orang	587	587	587	20	20	75
6.5	Pecandu narkoba	Orang	Tad	50	15	15	15	15
6.6	Fakir Miskin	Orang	83.301	83.301	80.114	81.775	137.463	131.240
6.7	Anak terlantar	Orang	3434	800	790	750	700	1194
6.8	Anak korban kekerasan lingkungan Rumah Tangga	Orang	4	5	5	6	4	5
6.9	Anak korban kekerasan lingkungan Masyarakat	Orang	Tad	Tad	Tad	8	8	47
6.10	Anak korban kekerasan seksual	Orang	9	16	22	26	29	45
6.11	Lanjut usia terlantar	Orang	100	100	100	80	85	80
6.12	Komunitas Adat Terpencil	Orang	158	238	150	172	172	108
6.13	Penyandang Disabilitas Sensorik	Orang	5	5	5	5	5	5
6.14	Penyandang Disabilitas Intelektual	Orang	10	10	10	10	10	10
6.15	Penyandang Disabilitas Mental	Orang	10	10	10	10	10	10
6.16	Penyandang Disabilitas Fisik	Orang	20	20	20	20	20	20
6.17	Tuna Susila	Orang	1212	1015	1015	690	690	133
6.18	Bekas narapidana	Orang	1798	1798	1798	1798	1.798	373
6.19	Korban penyalahgunaan NAPZA	Orang	606	50	15	35	35	20
2	Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar							

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.	Tenaga Kerja							
1.1	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Terbanyak	Orang	1 789 517	1.839.211	1.884.757	1.935.320	1.987.238	2.019.517
1.1.1	Angkatan Kerja	Orang	1 272 461	1.311.427	1.276.669	1.355.399	1.384.675	1.43.515
1.1.2	Bekerja	Orang	1 214 681	1.248.189	1.222.707	1.301.002	1.327.885	1.318.133
1.1.3	Pengangguran	Orang	57.780	63.238	53.962	54.397	56.790	63.309
1.1.4	Jumlah	Orang	1.272.461	1.311.427	1.276.669	1.355.399	1.384.675	1.381.442
	Bukan Angkatan Kerja	Orang	517.056	527.784	608.088	579.921	602.563	638.075
1.2	Sekolah	Orang	154.969	157.465	166.757	142.306	163.231	145.995
1.2.1	Mengurus Rumah Tangga	Orang	314.349	334.825	392.073	388.927	391.328	420.579
1.2.2	Lainnya	Orang	47.738	35.494	49.258	48.688	48.004	71.501
1.2.3	Jumlah	Orang	517.056	527.784	608.088	579.921	602.563	638.075
1.2.4	Total Penduduk 15+	Orang	1 789 517	1.839.211	1.884.757	1.935.320	1.987.238	2.019.517
2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	(%)	8,49	7,6	6,5	7,58	6,34	6,34
2.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	(%)	16,78	87,39	88,76	94,51	80,85	80,85
2.3	Rasio KDRT	-	0,0306	0,0834	0,0181	0,1761	8,5097	8,5097

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.4	Persentase Jumlah Tenaga kerja di bawah umur	(%)	0,53	10,96	7,56	11,45	0	0
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	(%)	53,55	53,55	53,61	49,19	56,6	57,6
2.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	(%)	100	100	100	100	100	100
2.7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	77,90	78,23	79,36	77,03	83,20	82,41
2.8	Indek Pembangunan Gender (IPG)	-	89,33	89,07	88,91	89,13	89,09	89,03
2.3.	Pangan							
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,0	87,8	89,8	82,8	83,2	83,8
3.2	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi	Skor	87,0	87,8	89,8	82,8	83,2	83,8
2.4.	Pertanahan							
4.1	Data Izin Lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Tahun 2020)							
4.1.1	Luas Hak Guna Usaha	Ha	1.093.605,10	1.104.305,82	1.115.111,25	1.126.022,40	1.137.040,33	1.173.419,82
4.1.2	Luas Perkembangan Perizinan	Ha	2.942.325,86	2.969.047,29	2.996.011,39	3.023.220,38	3.050.676,47	3.390.764,78
4.1.3	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah							
2.5.	Lingkungan Hidup							
5.1	Nilai Predikat IKLH	poin	74,09	74,71	71,47	75,71	74,20	72,74
2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.1	Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Persen	TAD	TAD	TAD	99,98	99,99	99,93
6.2	Persentase Pasangan Berakta Nikah	Persen	TAD	TAD	TAD	21,25	28,98	35,32
6.3	Persentase Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	Persen	TAD	TAD	TAD	88,27	92,36	93,3
6.4	Persentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	Persen	TAD	TAD	TAD	76,71	80,84	83,5
6.5	Persentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	Persen	TAD	TAD	TAD	75,92	86,62	89,61
6.6	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Blanko	TAD	TAD	TAD	119.584	170.240	248.952
6.7	Persentase Kuantitas dan kualitas Database Kependudukan	Persen	TAD	TAD	TAD	90,26	89	95
6.8	Persentase DP4 Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak.	Persen	TAD	TAD	TAD	87	92	97
6.9	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Jumlah Lembaga	TAD	TAD	TAD	1	1	1
6.10	Persentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder di Bidang Administrasi Kependudukan	Persen	TAD	TAD	TAD	84,09	90,26	95
6.11	Persentase Masyarakat yang Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	TAD	TAD	TAD	86,88	89	95
6.12	Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Persen	TAD	TAD	TAD	99,98	99,99	99,93
2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Persentase Desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persen	43,12	45,43	46,25	46,82	59,00	60,00

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.2	Persentase Lembaga Desa yang di bina dalam upaya pembangunan desa	Persen	4,12	5,44	8,16	8,53	6,30	13,00
7.3	Persentase Tingkat Perkembangan Desa	Persen	22,70	24,68	25,12	25,33	64,00	59,00
7.4	Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa	Persen	2,71	2,90	2,92	2,92	2,00	4,50
7.5	Persentase jumlah lembaga ekonomi dan unit usaha masyarakat yang terbentuk	Persen	12,10	16,85	30,53	32,86	42,00	43,00
7.6	Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina dalam usaha meningkatkan ekonomi keluarga	Persen	0,01	0,01	0,02	0,03	0,06	0,08
7.7	Persentase Kelembagaan Posyantek yang terbentuk	Persen	11,72	13,75	21,48	26,00	20,00	30,00
7.8	Jumlah terbentuknya kawasan perdesaan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan SDA (kawasan)	Kawasan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0
2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	0,80	0,58	0,58	0,66	2,24	2,24
8.2	Rasio akseptor KB	-	77,91	78,1	79,2	79,15	79,85	79,85
8.3	Cakupan peserta KB aktif	orang	376.606	368.652	373.140	319.193	398.563	398.563
8.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	keluarga	183.937	55.110	243.211	244.060	239.740	239.740
2.9.	Perhubungan							
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	PnP	117.984	126.356	135.325	433.708	486.271	374.823
9.2	Load Factor Angkutan Jalan	Persen	71	72	72	73	73	74
9.3	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	258	273	288	302	317	332

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.4	Jumlah Perusahaan Angkutan Laut	Unit	2	2	3	3	4	4
9.5	Jumlah Angkutan Udara (Rute Regional dan Nasional)	Armada	1	2	2	2	3	3
9.6	Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP)	Unit	11	12	12	12	13	13
9.7	Jumlah Angkutan Sungai	Unit	50	52	54	56	58	58
9.8	Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Type A dan B) (Buah	1	1	1	1	2	2
9.9	Jumlah Bandara	Buah	10	10	10	10	10	10
9.10	Jumlah Dermaga Sungai	Buah	4	5	6	7	7	8
9.11	Jumlah Pelabuhan Laut	Buah	1	1	1	1	1	1
9.12	Kepemilikan KIR angkutan umum	Unit	22.696	23.317	23.317	23.559	23.813	24.080
9.13	Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR)	Hari	1	1	1	1	1	1
9.14	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp.	110.000	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
9.15	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan	Unit	316	330	346	363	382	400
9.16	Pemasangan Rambu Sungai	Unit	400	400	400	400	400	400
9.17	Pemasangan Rambu SBNP	Unit	2	2	2	2	3	3
2.10.	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Jumlah media publikasi yang digunakan	Portal	N/A	N/A	N/A	10	1,00	1
10.2	Jumlah aparatur yang mendapat Pelatihan teknis berbasis (TIK/Sandi/statistik)	Orang	N/A	N/A	60	30	30,00	10

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10.3	Jumlah CCTV terpusat dan terintegrasi Kalimantan Tengah	Titik	N/A	N/A	11	42,00	42,00	0
10.4	Persentase pembangunan gedung kantor <i>Smart Province</i> tahap lanjutan	Persen	N/A	N/A	0	3,56	10,00	0
10.5	Jumlah pembangunan video tron	Lokasi	N/A	N/A	N/A	2	1,00	0
10.6	Peningkatan Perangkat jaringan Data Center	Kegiatan	N/A	N/A	N/A	1	3,00	1
10.7	Peningkatan Multimedia Center	Kegiatan	N/A	N/A	N/A	1	1,00	1
10.8	Jumlah aplikasi online layanan masyarakat yang dikembangkan	Aplikasi	N/A	N/A	0	1	3,00	0
10.9	Jumlah orang yang mendapat sosialisasi internet sehat	Orang	N/A	N/A	70	70	150,00	0
10.10	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan Internet Marketing untuk UMKM	Orang	N/A	N/A	125	150	200,00	0
10.11	Jumlah media publikasi cetak	Media Cetak	N/A	N/A	N/A	10,00	10,00	8
10.12	Jumlah media publikasi online	Media Online	N/A	N/A	N/A	8	8,00	17
10.13	Jumlah media publikasi elektronik	Media Elektronik	N/A	N/A	N/A	2	2,00	5
10.14	Jumlah konten informasi yang disampaikan melalui Vidiotron	Konten	N/A	N/A	N/A	150	201,00	250
10.15	Jumlah informasi publik yang tersedia dalam portal PPID (https://ppid.kalteng.go.id)	Informasi	N/A	N/A	0	861	965,00	700
10.16	Pusat Komunitas Kreatif (buah)	Buah	N/A	N/A	1	1	1	1
10.17	M-CAP (Mobile Capacity Acces Point)	M-CAP	1	1	1	1	1	1

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10.18	Data Center	Buah	N/A	N/A	1	1	1	1
10.19	Media Center	Buah	N/A	N/A	1	1	1	1
10.20	Jumlah surat kabar nasional/local	Buah	N/A	N/A	N/A	16	56	56
10.21	Jumlah penyiaran radio/TV local		N/A	N/A	N/A	29	29	29
10.22	Web site milik pemerintah daerah (Buah)	Buah	N/A	N/A	10	36	36	37
10.23	Pameran/expo terkait Kominfo	Kali	N/A	N/A	1	3	1	0
10.24	Jumlah aplikasi E-Government	Aplikasi	N/A	N/A	0	5	3	0
10.25	Jumlah SKPD/ Perangkat Daerah yang Menggunakan Jaringan Fiber Optik (FD)	SKPD	N/A	N/A	0	0	43	43
2.11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
11.1	Presentase Koperasi Aktif	Persen	75,67	76,03	83,53	80,63	76,09	78,72
11.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	2.484	2.518	2.809	3.481	3.672	3.684
11.3	Jumlah BPR/LKM	Unit	1.564	1.710	1.881	2.341	2.343	2.506
11.4	Usaha Mikro dan Kecil	Unit	27.876	30.786	34.611	35.000	40.259	49.186
2.12.	Penanaman Modal							
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Unit	473	536	560	587	707	898
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Juta Rupiah	29.081.196,71	67.436.739,93	150.558.624,13	24.556.548,81	12.845.045,40	6.267.595,80

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- PMDN	Milyar Rp	1.088.548,80	23.775.364,78	7.392.389,54	18.336.141,71	8.591.862,90	3.709.958,20
	- PMA	juta Rp	27.992.647,91	23.775.364,78	71.177,10	444.314,79	283.5454,50	177.639,00
12.4	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	179,16	179,16	147,37	156,7	39,66	9,14
12.5	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	milyar rupiah	28,52	-28,52	-68,91	148,04	-53,14	-56,82
2.13.	Kepemudaan dan Olahraga							
13.1	Jumlah klub olahraga	Buah	46	46	46	46	46	136
13.2	Jumlah gedung olahraga	Unit	16	16	16	16	16	16
13.3	Jumlah organisasi pemuda	Buah	62	66	66	66	66	66
13.4	Jumlah organisasi olahraga	Buah	42	42	42	42	36	36
13.5	Jumlah kegiatan kepemudaan	Buah	35	13	11	12	8	32
13.6	Jumlah kegiatan olahraga	Buah	60	4	4	8	7	2
13.7	Lapangan olahraga (lapangan Volly, sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)	Buah	289	1.214	1.214	1.214	3.070	3.070
2.14	Statistik							
2.15.	Persandian							
2.16.	Kebudayaan							

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16.1	Jumlah grup kesenian/sanggar seni	Buah	336	336	246	315	315	315
16.2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	1	2	2	5	5
16.3	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	490	515	258	695	361	361
2.17.	Perpustakaan							
17.1	Jumlah buku yang di baca di perpustakaan	Eksemplar	110.000	120.000	106.109	93.051	88.223	39.916
17.2	Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan (pemustaka)	Orang	5.000	5.400	4.688	4.379	4.179	2.070
17.3	Jumlah Perpustakaan	Unit	5	5	11	8	18	0
17.4	Indeks kepuasan pengunjung terhadap Perpustakaan	Persen	65,00	70,00	81,00	82,00	90,36	80,00
17.5	Jumlah Koleksi Bacaan	Judul	9.000	10.000	26.418	27.739	30.233	31,195
2.18.	Kearsipan							
18.1	Jumlah SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan	SOPD	30	35	37	46	40	46
3.	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
3.1.	Kelautan dan Perikanan							
1.1	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	130.526,10	142.466,60	130.526,10	132.687,78	133.351,22	153.426,16
1.2	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	68.693,74	75.903,28	79.271,03	98.151,88	101.857,32	116.729,40

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.3	Jumlah produksi benih	Ekor	55.620.000,00	60.180.000,00	60.180.000,00	61.956.430,00	41.346.660,00	43.979.500
1.4	Angka konsumsi ikan	kg/kap/tahun	46,35	47,09	47,63	48,19	53,30	54
1.5	Tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut	Dokumen	1	1	1	1	1	1
1.6	Jumlah luasan konservasi perairan	Ha	171.679	171.679	61.362,15	61.362	61.362,24	61.362,24
1.7	Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir	Ha	2,5	2	2,5	1,8	2,50	2,5
1.8	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku	Persen	70	75	78	80	85	85
1.9	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP	kelompok	22	22	25	30	40	53
1.10	Jumlah Nelayan yang Terlindungi	Orang	14	5.026	7.543	690	3.072	9.000
1.11	Jumlah Fasilitasi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan	Bidang	0	0	222	0	345	186
1.12	Jumlah Diversifikasi Usaha Keluarga Nelayan	RTP	0	0	35	1100	0	0
1.13	Penguji residu produk perikanan budidaya dan serifikasi untuk kespors bidang produksi dan usaha	Paket	0	0	0	0	0	0
1.14	Laporan hasil verifikasi dan analisis perkembangan data produksi perikanan budidaya	Dokumen	1	1	1	1	2	2
1.15	Pameran Promosi Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Negeri yang Diikuti satker Daerah	kali	3	4	4	5	3	0
1.16	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan	SKP	0	1	0	1	1	4

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.17	Kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif	Kawasa n	0	0	0	0	1	1
1.18	Jumlah hari operasional bersama speed boat pengawasan SDKP lingkup Provinsi Kalimantan Tengah	Hari Koperas i	5	6	5	30	44	15
1.19	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Provinsi Kalimantan Tengah	Kelomp o k	22	22	25	30	40	53
1.20	Jumlah Kasus Pelanggaran Bidang Perikanan	Kasus	15,00	5	29	11	4	0
3.2.	Pariwisata							
2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	252.901	844.826	866.074	952.389	1.556.488	785.465
2.2	Jumlah SDM pariwisata yang tersertifikasi	Orang	80	80	85	110	155	156
2.3	Jumlah kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	Kelomp o k	3	3	3	3	3	3
2.4	Jumlah objek wisata yang dikembangkan	Obyek Wisata	6	3	4	2	3	3
2.5	Jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,88	1,93	1,86	1,89	1,94	1,86
3.3.	Pertanian							
3.1	Luas Panen							
3.1.1	Padi Sawah	Ha	183.416	188.740	193.489	129.536	121.625	120.025
3.1.2	Padi Ladang	Ha	71.254	78.234	51.480	17.904	24.520	23.350

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.2	Produksi							
3.2.1	Padi Sawah	Ton	725.755	606.384	659.944	462.471	374.013	403.023
3.2.2	Padi Ladang	Ton	167.447	168.083	111.958	51.798	69.548	54.929
3.2.3	Total Luas Panen	Ton	254.670	266.974	244.969	147.441	146.145	143.275
3.2.4	Total Produksi	Ton	893.202	774.467	771.902	514.270	443.561	457.952
3.2.5	Produktivitas Padi	Ton/Ha	3,51	2,9	3,15	4,06	3,53	3,19
3.2.6	Perkembangan Surplus Beras	Ton	220.731	144.709	136.987	178.115	89.741	63.441
3.4	Kehutanan							
4.1.1	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan	Persen	123,81	78.52	95.31	104.98	89.17	77,03
4.1.2	Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat Baik	Persen	39,65	43.00	54	67.00	62.31	78
4.1.3	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	Persen	0,69	0.045	0.01	0.08	0.045	1,40
4.1.4	Jumlah hot spot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20 % per tahun	Jumlah	4,142	265	844	1,349	7060	128
4.1.5	Jumlah kasus gangguan terhadap hutan dan hasil hutan menurun 20 % per tahun	Jumlah	54	36	7	11	9	7
4.1.6	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah	Persen	18,18	25	100	100	100	100
4.1.7	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Paket Kegiatan	1	1	1	1	1	1

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.1.8	Pencegahan, pengendalian dan penindakan <i>illegal logging</i>	frekuensi pengamanaan hutan	2	2	1	1	1	-
4.1.9	Penghijauan dan reboisasi	jumlah batang pohon bibit	36,000	11,600	37,000	40,000	24,200	-
4.1.10	Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan	jumlah orang	40	40	40	79	102	1.721
3.5.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
5.1	Rasio Elektrifikasi	Persen	70,71	75,90	75,89	85,72	86,67	86,82
5.2	Penataan IUP							
5.2.1	IUP Batubara	IUP	618	618	391	297	230	226
5.2.2	IUP Logam	IUP	131	131	69	61	39	42
5.2.3	IUP Bukan Logam & Batuan	IUP	258	258	62	51	33	37
5.2.4	Total	IUP	1.007	1.007	522	409	302	305
5.2.5	PKP2B	PKP2B	15	15	14	14	14	14
5.2.6	KK	KK	5	5	5	5	5	5

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6.	Perdagangan							
6.2.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	Persen	11,64	6,68	11,99	12,89	13,42	13,19
6.2.2	Ekspor Bersih Perdagangan (US \$)	US \$	990.000.000	900.680.000	1.607.130.000	1.677.290.000	1.886.320.000	1.791.090.000
6.2.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal/ Penerbitan SIUP	SIUP	6.296	3.262	4.291	2.204	8.255	8.983
3.7.	Perindustrian							
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	16,15	10,90	16,62	15,71	14,97	15,96
7.2	Pertumbuhan Industri	Unit	5.164	5.164	5.422	7.953	8.750	8.724
7.3	Cakupan bina kelompok pengrajin/ jumlah tenaga kerja	Orang	16.655	16.655	16.904	27.646	29.410	26.289
3.8.	Transmigrasi							
8.1	Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat	Bidang	750	700	1.360	609	750	1450
8.2	Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung (KK)	KK	TAD	150	TAD	25	143	TAD
8.3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan (SP)	SP	2	3	4	4	3	TAD
4.	Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah							
4.1.	Sekretariat Daerah							
1.1	Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Kategori	B	B	B	B	B	B
1.2	Jumlah LKIP PD dengan kategori minimal baik (B)	PD	-	3	13	16	22	

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.3	Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN	Orang					540	
1.4	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	21,88	56,80	59,70	59,28	59,59	59,21
1.5	Jumlah penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Rancangan Perda	TAD	14	31	3	9	32
1.6	Jumlah penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah	Rancangan PerGub	TAD	79	79	55	124	859
1.7	Jumlah penyusunan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah	Rancangan KepGub	TAD	1.252	1.309	1.285	898	1.132
1.8	Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten / kota yang dievaluasi.	Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	14	14	14	14	14	14
1.9	Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan secara refresif.	Rancangan Produk Hukum Kabup	100	100	100	100	100	260

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		at en/ Kota						
1.10	Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kotayang tertata format dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ranca ng an Produ k Huku m Kabup at en/ Kota	360	14	14	14	14	430
1.11	Jumlah dokumen perkara hukum Litigasi yang tertangani	Doku men perkar a Litigasi	10	10	10	10	10	60
1.12	Jumlah dokumen perkara Non Litigasi yang tertangani	Doku men perkar a Non Litigasi	15	10	10	10	10	65
4.2.	Sekretariat DPRD							
2.1	Jumlah Perda Yang Dibahas Tepat Waktu	Perda	5	5	4	4	9	8
2.2	Jumlah Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Kali Reses	3	3	3	3	2	2
5.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.1.	Perencanaan							
1.1	Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 (2020) dengan arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2016-2021	Persen	tad	tad	100,00	89,74	96,67	78,28
1.2	Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 (2020) dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKP tahun n+1 (2020)	Persen	tad	tad	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	Persen	tad	tad	89,70	86,24	95,70	92,83
1.4	Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	Persen	tad	tad	89,80	tad	tad	tad
1.5	Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	Persen	tad	tad	86,10	80,94	94,29	66,38
1.6	Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	Persen	tad	tad	91,20	94,78	95,86	99,68
1.7	Jumlah PD yang target keberhaslilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	PD	tad	tad	36	36	37	38
1.8	Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/ melebihi target	Persen	tad	tad	51	45,7	47,45	36,52
5.2.	Keuangan							
2.1	Jenis & jumlah bank dan cabang	Unit	145	241	314	310	313	155
2.2	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	Buah	243	556	531	787	787	
2.3	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Buah	317	356	395	409	397	
5.3.	Kepegawaian							
3.1	Jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat	Orang	1915	1366	2342	4000	4000	3658

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	periode April dan Oktober, Karpeg, Masa kerja PNS							
3.2	Jumlah PNS Provinsi yang lulus seleksi untuk tugas belajar, penetapan dan monitoring tugas belajar dan izin belajar serta revisi perda tentang tugas belajar dan izin belajar	Orang	20	34	82	213	213	239
3.3	Jumlah PNS yang terdata secara elektronik	Orang	7000	9771	10382	10250	10250	9665
3.4	Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu	SK	10	76	18	28	28	29
3.5	Jumlah capra IPDN sesuai alokasi formasi	Orang	20	24	48	60	48	38
5.4.	Pendidikan dan Pelatihan							
4.1	Persentase Peserta DikLat Prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan	Persen	92,94	92,98	0	96,00	99	0
4.2	Persentase Peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	Persen	98,75	85,34	56,81	88,00	100	0
4.3	Persentase Peserta Diklat Teknis yang lulus Post Test	Persen	100	88,34	126,67	99,00	79	68,6
4.4	Persentase Peserta Diklat Fungsional yang lulus Post Test	Persen	100	0	31,75	98,00	72	113,27
4.5	Persentase terlaksananya sertifikasi profesi Alumni diklat	Persen	0	95,20	0	55,00	88	0
4.6	Persentase Rata - rata nilai hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan diklat	Persen	95,20	85,70	94,19	72,00	97	81,72
5.5.	Penelitian dan Pengembangan							
5.1	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	Persen	tad	tad	100,00	100,00	0	0
5.6.	Pengawasan							

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.1	Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat	tad	tad	-	2,40	3,00	3,00
6.2	Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Level	tad	tad	1,00	2,00	3,00	3,00
6.3	Persentase tindak lanjut selesai							
6.4	BPK-RI	Persen	tad	83,32	70,89	84,14	78,49	88%
6.5	ITJEN Kemendagri/ Teknis lainnya	Persen	tad	96%	97,00	87,70	52,24	90%
6.6	Inspektorat	Persen	90%	92%	92,00	89,49	90,80	93%
6.7	Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan	Persen	8%	36%	33,29	22,97	52,78	10%
6.8	% SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	Persen	tad	8,00	36,00	44,00	58,00	60%
5.7.	Pemerintahan Umum							
7.1	Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Kali	10	10	10	10	10,00	0
7.2	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	Orang	1750	1750	1750	1750	1.750,00	100
7.3	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Orang	100	100	100	200	200,00	0
7.4	Meningkatnya pemahaman ideologi bangsa, cinta tanah air dan bela negara dikalangan masyarakat	Orang	1700	1700	1700	1700	1.700,00	0
7.5	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi hijau dan peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya daerah	Orang	650	650	600	650	650,00	0
7.6	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan/ LSM	Orang	-	-	-	100	100,00	0

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.7	Meningkatnya penyebaran data dan informasi pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politk	Kegiata n	3	3	3	3	3,00	0
III. Aspek Daya Saing Daerah								
1.	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupia h/ Orang / Tahun	9.809	10.155	10.492	10.931	11.236	11.154
2.	Nilai Tukar Petani per Subsektor Pertanian							
2.1	Tanaman Pangan	Nilai	98,52	97,78	95,89	95,31	94,55	99,08
2.2	Hortikultura	Nilai	102,59	105,00	105,74	104,64	105,98	98,88
2.3	Tanaman Perkebunan Rakyat	Nilai	95,91	99,85	94,96	90,04	88,75	106,19
2.4	Peternakan	Nilai	98,52	99,04	100,10	101,18	103,09	103,31
2.5	Perikanan	Nilai	103,85	106,66	107,24	108,55	110,56	101,91
2.6	Nilai Tukar Petani Gabungan	Nilai	98,66	97,59	98,60	96,76	96,74	103,55
3.	Rasio Ketergantungan							
3.1	Jumlah Usia Produktif (15-64 tahun)	Orang	1.706.40 0	1.752.600	1.797.000	1.842.80 0	1.887.500	1.889.199
3.2	Jumlah Usia non Produktif	Orang	788.600	797.600	807.300	817.400	827.400	780.770

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.3	Rasio Ketergantungan (per 100 usia produktif)	Rasio	46,21	45,51	44,92	44,36	43,84	41,33

Sumber: Bappeda, 2020

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari standar hidup yang makin membaik yang direpresentasikan oleh capaian indikator pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Kalimantan Tengah meningkat sebesar Rp. 1.427.000 selama periode tahun 2015-2019. Jika dibandingkan dengan Nasional, Pengeluaran Perkapita Provinsi Kalimantan Tengah masih dibawah Angka Nasional.

Tabel 2. 130 Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kalimantan Tengah	10.15 5	10.49 2	10.93 1	11.23 6	11.15 4
2	Nasional	10.42 0	10.66 4	11.05 9	11.29 9	11.01 3

Sumber: BPS RI, 2020

2.4.2 Nilai Tukar Petani

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi pertaniannya. NTP akan memperlihatkan kemampuan daya beli petani di wilayah pedesaan sehingga perekonomian petani dapat dianalisis terkait kesejahteraannya.

Rata-rata NTP pada tahun 2020 menjadi 103,55. Peningkatan NTP ini terutama didorong oleh peningkatan nilai tukar pada subsektor tanaman perkebunan rakyat. Tanaman perkebunan rakyat merupakan subsektor unggulan di Kalimantan Tengah, khususnya untuk komoditas karet dan kelapa sawit. Jika dilihat perkembangannya setiap bulan, NTP selama tahun 2020 mengalami penurunan di semester pertama, namun meningkat di semester kedua. NTP tertinggi terjadi pada bulan Januari (108,11) dan terendah di bulan Juni (98,53). Penurunan nilai tukar ini merupakan efek domino dari pandemi yang terjadi di tahun 2020, sehingga memperlemah daya beli petani produsen baik untuk proses produksi maupun untuk pengeluaran konsumsi rumah

tangga.

Tabel 2. 131 Nilai Tukar Petani Subsektor Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No.	Subsektor	NT P
1	Tanaman Pangan	99,15
2	Hortikultura	97,42
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	114,22
4	Peternakan	105,25
5	Perikanan	101,24
Nilai Tukar Petani Gabungan		103,55

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2020

2.4.3 Jumlah Bank, Restoran, dan Hotel

Jumlah bank dan cabang mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan melebihi target yang ditentukan. Jumlah restoran mengalami kenaikan dari 243 buah di tahun 2015 menjadi 556 buah di tahun 2016 namun di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 531 buah namun melebihi target yang ditentukan sebesar 255 buah. Sedangkan di tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan dan melebihi target yang ditentukan. Sedangkan jumlah penginapan/hotel di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dan mencapai target yang ditentukan namun di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 397 buah dari target 409 buah.

Tabel 2. 132 Jumlah Bank, Restoran, dan Hotel di Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah bank dan cabang (Unit)	241	301	443	455
2	Jumlah restoran (Buah)	556	531	787	787
3	Jumlah penginapan/hotel (Buah)	356	395	409	397

Sumber: Bappeda, 2020

2.4.4 Rasio Ketergantungan

Salah satu analisis dalam melihat produktivitas penduduk suatu wilayah adalah dengan melihat sebaran kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki trend menurun yang berarti sebaran penduduk usia non produktif mulai berkurang jika dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Hal ini mengindikasikan

ketergantungan penduduk usia non produktif semakin berkurang yang disebabkan beberapa kemungkinan seperti pergeseran usia remaja ataupun mortalitas penduduk usia tua.

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk berdasar rentang usia dari BPS, angka rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2019 angka rasio ketergantungan yaitu sebesar 43,84 yang bisa diartikan setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung rata-rata sebanyak 43-44 penduduk usia non produktif (usia muda dan usia lanjut).

Tabel 2. 133 Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

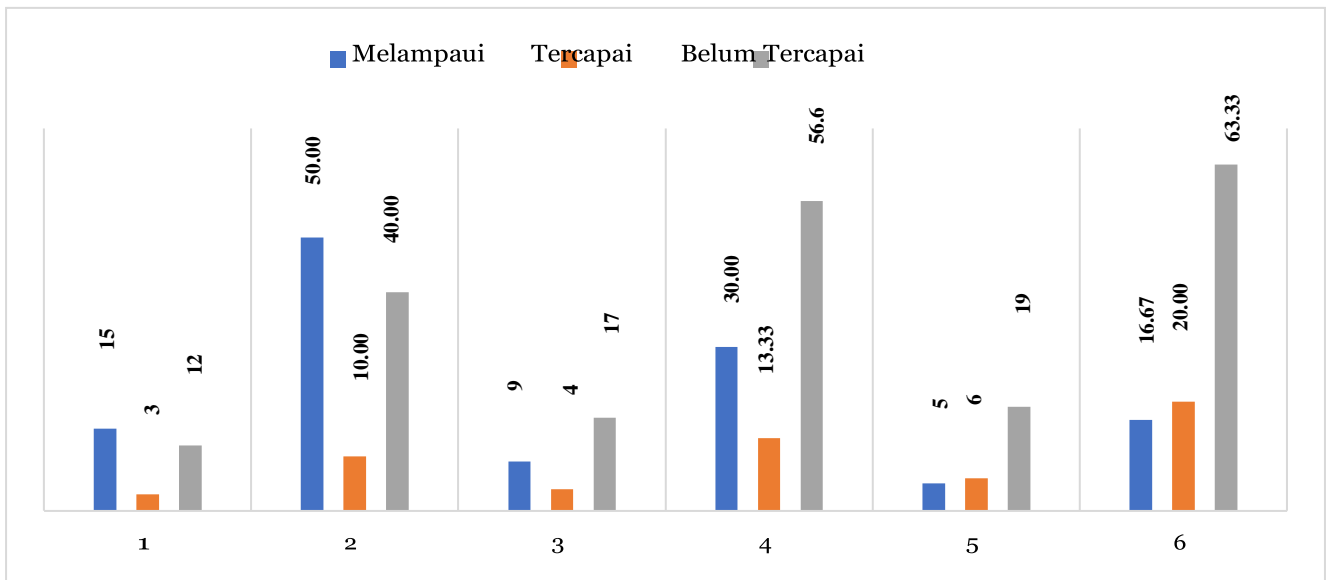
Jenis Usia	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Usia Produktif (15-64 tahun)	1.752.600	1.797.000	1.842.800	1.887.500	1.889.199
Jumlah Usia non Produktif	797.600	807.300	817.400	827.400	780.770
Rasio Ketergantungan (per 100 usia produktif)	45,51	44,92	44,36	43,84	41,33

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, (data diolah)

Rekapitulasi seluruh realisasi indikator kinerja pada 3 (tiga) aspek yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah disajikan pada tabel di bawah.

2.5 Capaian Sasaran Pembangunan Periode Lalu

Pelaksanaan pembangunan periode Tahun 2016-2021 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasaran RPJMD. Berdasarkan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2017 sampai 2019, diketahui bahwa sampai dengan tahun 2019 sebanyak 20,69 persen indikator mencapai target, sedangkan yang melampaui target sebanyak 20,00 persen, dan belum mencapai target sebesar 63,33 persen. Perkembangan pencapaian target indikator kinerja sasaran RPJMD tahun 2017 sampai dengan 2019 disajikan pada gambar di bawah. Sedangkan informasi rinci mengenai tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target dan realisasinya disajikan pada Tabel 2.87.



Sumber: hasil pengolahan data, Bappeda, 2020

Gambar 2. 78 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019

Tabel 2. 134 Capaian Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target tahunan								
				2017		2018		2019		2020	2021	Target akhir (2021)
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
Visi: Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)												
Misi pertama: Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi												
1. Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas	1. Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Kebutuhan Ruang	18	18	17,55	45	20,21	45	20,25	45	45	45
Misi kedua: Pengelolaan Infrastruktur												
2. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas	2. Meningkatnya konektivitas antardaerah	Persentase jalan mantap	47,52	59,7	68,73	67,78	59,54	75,85	70,20	83,93	92	92
		Persentase konektivitas jalan	89,4	89,8	94,87	93,2	32,88	96,6	70,37	100	100	100
	3. Meningkatnya ketercukupan	Rasio desa berlistrik (%)	74,8	81,8	82,97	85,3	88,73	89,3	91,53	94,3	100	100

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target tahunan								
				2017		2018		2019		2020	2021	Target akhir (2021)
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
	energi	Rasio elektrifikasi (%)	69,8	75,5	75,89	79,5	85,72	83,5	86,67	86,82	92,5	92,5
Misi ketiga: Pengelolaan Sumber Daya Air, daerah Pesisir & Pantai												
3. Meningkatkan pembangunan sumber daya air, daerah pesisir & pantai	4. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Produktivitas padi (kw/ha)	35,07	37,34	31,54	38,28	36,74	39,04	31,12	39,60	40,02	40,02
		Nilai Tukar Petani (NTP)	97,74	102,75	98,60	103,5	96,76	103,5	96,74	106	103,55	107,5
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,84	104,90	108,51	105,45	108,90	105,90	110,40	106,26	107	107
Misi keempat: Pengendalian Inflai, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan												

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target tahunan								
				2017		2018		2019		2020	2021	Target akhir (2021)
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	5. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Kontribusi PDRB Kalimantan Tengah dalam pembentukan PDRB Kalimantan (%)	10,85	13	11,17	14	11,29	14	11,61	15	15	15
		Laju pertumbuhan ekonomi(%)	7,01	6,5	6,74	6,5	6,12	7,0	6,02	7,0	7,5	7,5
		Tingkat kemiskinan (%)	5,91	5,3	5,26	5,02	5,10	4,8	4,81	4,5	4,3	4,3
	6. Meningkatkan daya beli masyarakat	Laju inflasi (%)	4,74	4,4 – 4,5	3,18	4,3 – 4,4	4,52	4,2 – 4,3	2,45	4,1 – 4,2	3,4	3,4
		PDRB perkapita (Juta Rp.)	40,14	43,54	44,1	45,41	52,2	47,61	55,36	49,95	52,67	52,67

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target tahunan								
				2017		2018		2019		2020	2021	Target akhir (2021)
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
B. Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten	7. Meningkatkan sektor ekonomi hijau	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB (%)	23,50	24	20,70	24,35	19,86	24,65	20,03	25	25,5	25,5
	8. Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	16,15	16,5	16,67	16,8	15,71	17,1	14,97	17,5	18	18
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,54	4,50	4,23	4,00	4,01	4,00	4,10	4,00	3,50	3,50
Misi kelima: Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah												
6. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik	9. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target tahunan								
				2017		2018		2019		2020	2021	Target akhir (2021)
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
	10. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,23	80	74,33	82	76,93	84	80,06	86	88	88
	11. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	47,52	65	59,70	70	59,29	75	59,59	80	85	85
	12. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	B	B	B (61,35)	BB	B (62,86)	BB	B (63,05)	BB	A	A
		Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah	B	B	B	BB	B	BB	B	BB	A	A

Misi keenam: Pendidikan, Kesehatan & Pariwisata

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target tahunan								
				2017		2018		2019		2020	2021	Target akhir (2021)
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	13. Meningkatnya kualitas pendidikan	IPM	68,53	69,30	69,79	70,00	70,42	70,70	70,91	71,60	72,50	72,50
		Rata-rata Lama Sekolah	8,03	8,50	8,29	8,75	8,37	9,00	8,51	9,50	10,00	10,00
		Angka Harapan Usia Sekolah	12,22	12,75	12,45	13,00	12,55	13,50	12,57	14,00	15,00	15,00
	14. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,54	70,50	69,59	70,90	69,64	71,40	69,69	72,00	72,75	72,75
8. Meningkatkan peran Sektor Pariwisata	15. Terpasarkannya industri wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	373.000	433.000	866.915	493.000	952.389	553.000	1.556.488	613.000	673.000	673.000

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target tahunan								
				2017		2018		2019		2020	2021	Target akhir (2021)
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
Misi ketujuh: Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam												
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	16. Menurunnya degradasi lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	70,37	71,5	71,47	72	75,71	72,5	74,20	73	73,5	73,5
Misi kedelapan: Pengelolaan Pendapatan Daerah												
10. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan	17. Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah (%)	36,60	30-32	32,74	32-35	31,75	35-40	35,59	40-45	45-50	45-50
		Persentase PAD terhadap total pendapatan transfer (%)	58,32	42,33	51,83	40-50	31,75	50-55	55,97	55-60	55-60	55-60

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target tahunan								
				2017		2018		2019		2020	2021	Target akhir (2021)
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
		Persentase belanja langsung terhadap APBD (%)	47,38	33,3	41,23	45-50	49,38	45-50	52,17	50-55	55-60	55-60

Sumber: Bappedalitbang, 2020 (data diolah)

2.6 Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengamanatkan seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan standar pelayanan minimal dalam perencanaan dan penganggaran. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Standar pelayanan minimal ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

2.6.1 SPM Bidang Pendidikan

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

2.6.1.1 Target Dan Capaian SPM Daerah

Data jumlah satuan Pendidikan yang terakreditasi, yaitu satuan Pendidikan yang terakreditasi menunjukkan mutu sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, karena di dalam mengasesmen akreditasi sekolah menggunakan 8 Indikator SNP yaitu, Standar Kompetensi Lulusan; Standar Isi; Standar Proses; Standar Penilaian; Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan; Standar Sarana Prasarana; Standar Pengelolaan; Standar Pembiayaan. Capaian indikator Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 78,16% pada tahun 2019 baik dalam bidang Pendidikan Menengah maupun Pendidikan Khusus.

Tabel 2. 135 Target dan Capaian SPM

Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian Tahun 2019
Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	78,16%
Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%	78,16%

Sumber: Laporan Penerapan SPM Daerah provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

2.6.1.2 Permasalahan Dan Solusi

Berdasarkan pelaksanaan SPM pada tahun 2019, beberapa permasalahan yang ditemui dan solusi yang dilakukan, disajikan pada tabel di bawah.

- a. Guru Tidak Tetap (GTT) masih belum bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan mata pelajaran sebagaimana kebutuhan yang

- tersebar di daerah- daerah;
- b. Guru PNS banyak terpusat di sekolah-sekolah di perkotaan, sehingga penyebaran guru tidak merata;
 - c. Pengangkatan Guru Tidak Tetap oleh sekolah, ditemukan tidak linier dengan kualifikasi pendidikan; dan
 - d. Rasio guru dengan siswa bagi sekolah yang ada di daerah tidak sesuai dengan standar.

2.6.2 SPM Kesehatan

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

2.6.2.1 Target Dan Pencapaian SPM Daerah

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan konkuren yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar; (iii) penrusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Indikator Kinerja untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia
2. Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
3. Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
4. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
5. Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama

Indikator Kinerja untuk pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia
2. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi
3. Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi

Tabel 2. 136 Target dan Capaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat Pelayanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2.686.252	1.589.390	59,16%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 org	80 orang	100%

Sumber: Laporan Penerapan SPM Daerah provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

2.6.2.2 Permasalahan Dan Solusi

Berdasarkan pelaksanaan SPM pada tahun 2020, beberapa permasalahan yang ditemui dan solusi yang dilakukan, disajikan pada tabel di bawah.

1. Permasalahan

- a. Frekuensi dan intensitas kejadian bencana dan KLB merupakan data prediksi berdasar data kejadian sebelumnya sehingga data sasaran pelayanan digunakan prediksi.
- b. Belum ada data sasaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Keterbatasan dalam sistem pelaporan, sarana mobilitas, dan anggaran.
- d. Tahun 2020 adanya Pandemi Covid-19

2. Solusi

- a. Penghitungan sasaran menggunakan sumber data pemetaan wilayah risiko bencana dari BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Sosial dan Data BPS.
- b. Data sasaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Pada penghitungan capaian akhir menggunakan data riil.
- d. Penguatan manajemen bencana di Kabupaten/Kota dan Provinsi
- e. Fokus untuk semua sector dalam melakukan percepatan penanganan Pandemi Covid-19 serta melakukan penyesuaian dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.

2.6.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

2.6.3.1 Target Dan Capaian SPM Daerah

1) Target 2024

a. Air Minum

- Akses Air Minum Layak: 100%
- Akses Air Minum Aman: 26%
- Akses Air Minum Perpipaian: 26,01%
- Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaian: 73,99%

b. Sanitasi

- Akses Air limbah Domestik Layak: 80%
- Akses Air Limbah Domestik Aman: 8%
- Pengelolaan Sampah Perkotaan: 83%

2) Capaian SPM 2019

a. Air Minum

- Akses Air Minum Layak: 71,69%
- Akses Air Minum Aman: 20%
- Akses Air Minum Perpipaian: 20,55%
- Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaian: 79,45%

b. Sanitasi

- Akses Air limbah Domestik Layak: 64,79%
- Akses Air Limbah Domestik Aman: 5,31%
- Pengelolaan Sampah Perkotaan: 66,80%

2.6.3.2 Realisasi

I. SPM Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan provinsi adalah:

1. Akses Air Minum curah lintas Kabupaten/kota;
2. Akses Sistem Pengolah Air Limbah Domestik (SPAL D) Regional
3. Dikarenakan belum adanya dan belum diperlukannya SPAM dan SPAL D skala regional, maka Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah hanya melakukan pembinaan dan mendukung kegiatan di kab/kota melalui program yang dihibahkan

II. Realisasi

1. Yang dilakukan Dinas PUPR Prov. Kalteng dalam mendukung SPM
2. Melakukan fasilitasi dan Pendampingan kegiatan Pamsimas
3. Melakukan fasilitasi dan Pendampingan kegiatan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
4. Pengadaan/Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kab. Kotawaringin Timur
5. Peningkatan Prasarana Transfer Depo Sampah Kota Palangka Raya

2.6.3.3 Permasalahan Dan Solusi

Berdasarkan pelaksanaan SPM pada tahun 2019, beberapa permasalahan yang ditemui dan solusi yang dilakukan, disajikan pada tabel di bawah.

1. Dalam Pencapaian SPM Provinsi terkendala dengan luas wilayah yang besar, namun jumlah penduduk masih sedikit. Sehingga Peran provinsi hanya bisa mendukung pencapaian SPM Kab/kota dan melakukan pembinaan terkait pencapaian tersebut.
2. Dinas PUPR Provinsi Kalteng kesulitan mengumpulkan data-data terkait pencapaian SPM di Kabupaten/Kota. Sehingga perlu koordinasi lebih intens dengan kabupaten/kota.

2.6.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

2.6.4.1 Target Pencapaian SPM Daerah

Jenis Pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh pemerintah. Jenis pelayanan dasar yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Adapun bencana yang dikategorikan sebagai bencana provinsi adalah bencana yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai bencana provinsi.

Target pencapaian SPM daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

Tabel 2. 137 Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	N/A
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	N/A

Sumber: Laporan Penerapan SPM Daerah provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Capaian Not Applicable (N/A) untuk jenis layanan 1 dan 2 dikarenakan tidak ada Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penetapan bencana provinsi untuk layanan 1 dan tidak ada kegiatan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan relokasi sehingga diperlukan layanan 2.

Pada tahun 2020 tidak ada bencana provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur Kalimantan Tengah, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan pendataan perumahan di lokasi rawan bencana. Mengacu pada UU

Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 140 yang berbunyi Setiap orang dilarang membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang dan di dalam Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal bahwa yang dikategorikan tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya adalah Sempadan Rel Kereta Api, Daerah Sempadan Sungai (DSS), Daerah Sutet, Kolong Jembatan, dan Permukiman Kumuh/Ilegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 melaksanakan kegiatan pendataan di lokasi rawan bencana yaitu di daerah sempadan sungai. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk menangani Kawasan Kumuh 10-15 Ha.

Pendataan dilaksanakan pada Kawasan kumuh 10-15 Ha yang berada di sempadan sungai pada 5 Kabupaten/Kota. Dengan hasil rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 138 Pendataan Kawasan Kumuh di sempadan sungai pada 5 Kabupaten/Kota

No.	Kota/ Kabupaten	Lokasi	Jumlah Rumah
1	2	3	4
1	Palangka Raya	Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut	106
2	Katingan	Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir	51
3	Gunung Mas	Kelurahan Kurun, Kecamatan Kurun	98
4	Kotawaringin Timur	Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	41
5	Seruyan	Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir	45
TOTAL			341

Sumber : Dinas Perkimtan Provinsi Kalimantan Tengah

2.6.4.2 Permasalahan Dan Solusi

Perangkat Daerah pengampu SPM Perumahan Rakyat di tingkat Provinsi yaitu Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah baru terbentuk pada awal tahun 2017 serta SPM Perumahan Rakyat untuk provinsi, baru mulai dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga untuk tingkat Provinsi Kalimantan Tengah saat ini penanganan SPM perumahan baru pada tahapan perencanaan berupa pengumpulan data-data lapangan. Ketersediaan data relatif masih belum memadai. Selain itu dari sisi kebijakan dan kondisi riil dilapangan, penerapan SPM bidang perumahan masih belum dapat sepenuhnya dilaksanakan mengingat Provinsi Kalimantan Tengah bukan termasuk Provinsi yang rawan

bencana besar yang mengakibatkan relokasi. Hal yang sama berlaku juga dengan relokasi dan fasilitasi perumahan bagi masyarakat yang terdampak kebijakan pemerintah provinsi, karena sampai saat ini belum ada rencana maupun kebijakan pembangunan yang mengakibatkan relokasi. Dengan demikian maka penerapan SPM saat ini difokuskan dalam tahapan antisipatif, yakni berupa sosialisasi, pendataan dan perencanaan.

Permasalahan yang dihadapi pada umumnya adalah terkait cakupan area pengumpulan data sehubungan luas Provinsi Kalimantan Tengah, baik berupa kawasan yang berpotensi bencana, maupun tinjauan lokasi tempat dimana akan dilakukan relokasi yang masih dalam tahap pendataan awal. Permasalahan dalam pengumpulan data untuk penerapan SPM adalah terbatasnya anggaran. Sehingga untuk tahun 2020 kegiatan pendataan hanya mampu mencakup 5 (lima) Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Tengah.

Saat ini solusi yang ditempuh adalah dengan bekerja sama dalam pendataan dengan instansi terkait seperti Bappedalitbang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah serta melalui sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang mendukung dan menunjang penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan. Adapun untuk menyikapi permasalahan anggaran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penganggaran secara bertahap untuk kebutuhan kegiatan pendataan pada kawasan rawan bencana di seluruh Kabupaten/Kota.

2.6.5 SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

2.6.5.1 Target Pencapaian SPM Daerah

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah memasukkan target SPM pada RPJMD dengan Program Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dari segi penganggaran pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 139 Target Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No.	Program		Indikator	Target	Anggaran
1.	Peningkatan Disiplin Aparatur	1.	Jumlah Trampil dan meningkatnya SDM aparatur Satpol PP	60 orang	50.000.000
		2.	Jumlah Meningkatnya kemampuan Teknis anggota Satpol PP	50 orang	80.700.000
		3.	Jumlah Meningkatnya kemampuan Teknis anggota Satpol PP	140 orang	418.750.000
2.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.	Jumlah Meningkatnya kemampuan anggota satlinmas dalam pengendalian keamanan Dan kenyamanan lingkungan	50 orang	299.000.000
		2.	Jumlah Terwujudnya Keterpaduan pemda dan masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan lingkungan	60 orang	120.000.000
3.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.	Jumlah Aman dan terkendalinya aset daerah dan pengamanan VIP Pejabat-pejabat Pemprov. Kalteng	150 orang	732.900.000
		2.	Jumlah Pelanggaran terhadap perda/pergub semakin berkurang	14 Kab./Kota	940.000.000
		3.	Jumlah Terpenuhinya data-data perda/pergub kab/kota se Kalteng	14 Kab./Kota	720.000.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Daerah provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

2.6.5.2 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 tidak terlepas dari peran serta positif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan alokasi/pagu anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 140 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019

No.	Program		Indikator	Target	Anggaran	Realisasi
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.	Jumlah Trampil dan meningkatnya SDM aparatur Satpol PP	60 orang	50.000.000	41.068.654
		2.	Jumlah Meningkatnya kemampuan Teknis anggota Satpol PP	50 orang	80.700.000	79.443.860
		3.	Jumlah Meningkatnya kemampuan Teknis anggota Satpol PP	140 orang	418.750.000	411.713.781
2.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.	Jumlah Meningkatnya kemampuan anggota satlinmas dalam pengendalian keamanandan kenyamanan lingkungan	100 orang	299.000.000	296.303.804
		2.	Jumlah Terwujudnya Keterpaduan pemdadan masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan lingkungan	50 orang	120.000.000	117.615.500
3.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.	Jumlah Aman dan terkendalinya aset daerah dan pengamanan VIP Pejabat-pejabat Pemprov. Kalteng	150 orang	732.900.000	731.801.100
		2.	Jumlah Pelanggaran terhadap perda/pergub semakin berkurang	14 Kab./Kota	940.000.000	911.737.811
		3.	Jumlah Terpenuhinya data-data perda/pergub kab/kotase Kalteng	14 Kab./Kota	720.000.000	702.249.122

Sumber: Laporan Penerapan SPM Daerah provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Tabel 2. 141 Kegiatan Satpol PP Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi
1.	Pemantauan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Kota Palangka Raya	Selasa – Jum’at, 7-10 Mei 2019	JL. Matal Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau, dan Kilometer 38-43 Bukit Batu
2.	Menindaklanjuti Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Sehubungan dengan Pencaplokan Tanah Milik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pendirian Pondok Oleh Masyarakat	Senin-Rabu, 13-15 Mei 2019	JL.Mahir Mahar Km.17 Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau
3.	Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Berupa Sebidang Tanah	Selasa, 18 Juni 2019	Jalan Mahir Mahar km. 17 Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya
4.	Pemantauan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) di Wilayah Kota Palangka Raya	Selasa, 2 Juli 2019	Jl. Tjilik Riwut, KM 16-42 Kota Palangka Raya
5.	Pemantauan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) di Wilayah Kota Palangka Raya	Rabu, 10 Juli 2019	Jl. Tjilik Riwut KM 38-42, Jalan Mahir Mahar, Kalampangan Kota Palangka Raya
6.	Pemantauan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) di Wilayah Kota Palangka Raya	Kamis-Jum’at, 18-19 Juli 2019	Jl. Tjilik Riwut Kecamatan Bukti Batu
7.	Pemantauan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) di Wilayah Kota Palangka Raya	Rabu-Rabu, 24-31 Juli 2019	Jl. Tjilik Riwut KM 38-42, dan Jalan Mahir Mahar, Kalampangan Kota Palangka Raya
8.	Pengamanan Barang Bukti Pertambangan Mineral Bukan Logam Yang Ilegal di Wilayah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh	Selasa-Kamis, 13-15 Agustus 2019	Muara Teweh

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi
9.	Patroli Pemantauan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Galian C), Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Kamis-Sabtu, 1-31 Agustus 2019	Jl. Tjilik Riwut KM 38-42
10	Melaksanakan Tugas Sebagai Tim Intel dan Buser Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya dan Sekitarnya.	Jum'at-Senin, 16 Agustus s/d 2 September 2019	Jalan G. Obos 14 dan Jalan Kalibata
11.	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah kepada pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah kota Palangka Raya yang menggunakan Kendaraan Bermotor termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.	Rabu, 25 September s/d Sabtu, 26 Oktober 2019	Jl. Tjilik Riwut KM 38-42 dan Jalan RTA Milono
12	Pemantauan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (Galian C) dan pendataan pajak alat berat di wilayah kota Palangka Raya	Senin-Jum'at, 7-11 Oktober 2019	Jl. RTA milono, Jl Trans Kalimantan Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sebangau dan Jl Tjilik Riwut Kota Palangka Raya
13	Pemantauan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (Galian C) dan pendataan pajak alat berat dan memfasilitasi pelaku usaha dalam pengurusan/pembayaran alat berat dan kendaraan bermotor	Kamis, 10 Oktober 2019	Kantor Bapenda dan Samsat Prov Kalteng Jl. RTA Milono, Jl Trans Kalimantan Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sebangau dan Jl Tjilik Riwut Kota Palangka Raya
14	Pengecekan Bukti Pembayaran Pajak Daerah, Pengecekan Jumlah Alat Berat Dan Kendaraan Operasional Di PT. GRAHA INTI JAYA Manusup Hilir Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah	Senin-Selasa, 21-22 Oktober 2019	Manusup Hilir Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi
15	Pengecekan Bukti Pembayaran Pajak Daerah, Pengecekan Jumlah Alat Berat Dan Kendaraan Operasional Di PT. AGRINDO GREEN LESTARI, di Desa Ramang Kecamatan Banama Tinggang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah	Jum'at, 15 November 2019	Desa Ramang Kecamatan Banama Tinggang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
16	Pemantauan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (Galian C) dan pendataan pajak alat berat di wilayah kota Palangka Raya	Jum'at, 26 November 2019	Jl. Tjilik Riwut KM 43
17	Penyelesaian Masalah Antara Pedagang Daging Babi dan Pengurus Musholla "AL- HUSNA" di Jalan S.Parman Kota Palangka Raya	Jum'at, 04 Desember 2019	Jl. S Parman, RT 02, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
18	Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Rapat Tanggal 28 November 2019 Terhadap Sengketa Jalan Pertamina Antara Pihak Perusahaan Dengan Warga Setempat Di Kabupaten Barito Timur	Jum'at, 15 Desember 2019	Jalan Sem, KM.0, Desa Jawaten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur

Sumber: Laporan Penerapan SPM Daerah provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

2.6.5.3 Permasalahan Dan Solusi

Berdasarkan pelaksanaan SPM pada tahun 2019, beberapa permasalahan yang ditemui dan solusi yang dilakukan, disajikan pada tabel di bawah.

a. Permasalahan

1. Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli dan Penegakan Perda/Perkada di wilayah se Kalimantan Tengah.
2. Jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP yang minim/kurang memadai.

b. Solusi

1. Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui bantuan

keuangan/hibah

2. Merencanakan penambahan personil anggota Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti pendidikan PPNS.

2.6.6 SPM Bidang Sosial

Pelaksanaan SPM Sosial Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

2.6.6.1 Indikator, Nilai SPM, Target Daerah serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional serta Realisasi

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan SPM Bidang Sosial di daerah provinsi terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti,
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti,
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti,
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandang dan Pengemis di dalam Panti,
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi.

Nilai rata-rata capaian SPM Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Urusan SPM Bidang Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah 74,74% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 142 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Provinsi	Keterangan
		Indikator Kinerja		Realisasi 2019	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Disabilitas Terlantar di Dalam Panti sosial	2019	73,18%	
		Persentase (%) Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti sosial			
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di dalam panti sosial	2019	100%	
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti			
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti sosial	2019	100%	
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Provinsi	Keterangan
		Indikator Kinerja		Realisasi 2019	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandang dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di dalam Panti	2019	0%	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki Panti khusus untuk tuna sosial
		Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti			
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi korban bencana daerah provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah provinsi	2019	100%	
		Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah provinsi			
Nilai rata-rata SPM Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah				74,74%	

Sumber: Laporan Penerapan SPM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

2.6.6.2 Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan pelaksanaan SPM pada tahun 2019, beberapa permasalahan yang ditemui dan solusi yang dilakukan, disajikan pada tabel di bawah.

a. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dijumpai dalam penyusunan SPM Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah:

1. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani.
2. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

b. Solusi

Adapun solusi yang dapat disarankan adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS.
2. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

2.7 Pandemi COVID-19 dan Dampak yang Ditimbulkannya

Sejak Maret 2020 pandemi COVID-19 juga mulai merebak di Indonesia, yang sebelumnya telah menyebar di beberapa negara di dunia. Sejak menyebarnya virus ini, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan pemerintah daerah serta masyarakat Indonesia. Upaya ini selain bertujuan untuk penanganan kesehatan akibat penyebaran COVID-19, juga untuk penanganan dampak akibat pandemi pada sektor lainnya.

Berdasarkan publikasi corona.kalteng.go.id, jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Kalimantan Tengah sebanyak 4.374 orang (4 November 2020), dengan rincian yang sedang dalam perawatan sebanyak 276 orang, sembuh 3.942 dan meninggal 156 orang. Jumlah ini tersebar di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan kematian/*Case Fatality Rate* (CFR) akibat COVID-19 sebesar 3,6%. Rumah sakit rujukan COVID-19 meliputi RSUD dr. Doris Sylvanus, RSUD Sultan Imanudin, RSUD dr. Murjani, dan

RSUD Muara Teweh.

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sejak Maret tahun ini telah berdampak negative selain pada sektor kesehatan, juga terhadap sosial dan ekonomi. Memburuknya kondisi perekonomian, sosial, dan berbagai sektor lainnya pada hampir seluruh negara di dunia akibat COVID-19, juga dialami oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini terlihat dari beberapa indikator dibawah ini.

2.7.1 Perekonomian

Perekonomian Kalimantan Tengah triwulan III-2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp38.015,2 miliar dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp24.429,3 miliar.

Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 (y-on-y) terkontraksi sebesar 3,12 persen. Dari sisi produksi, hanya 7 (tujuh) kategori yang masih mampu tumbuh positif yaitu Kategori Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Wajib Sosial; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sisanya 10 kategori terkontraksi. Kategori dengan kontraksi terbesar adalah Kategori Jasa perusahaan yang tumbuh negatif sebesar 18,16 persen. Dari sisi pengeluaran, hanya Komponen Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh positif. Komponen dengan kontraksi terbesar adalah Ekspor Barang dan Jasa dengan kontraksi sebesar 3,66 persen.

Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan III-2020 terhadap triwulan II- 2020 (q-to-q) tumbuh 1,69 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wajib Sosial yang tumbuh sebesar 26,92 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terbesar terjadi pada Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 19,52 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan III 2020 (c-to-c) terkontraksi sebesar 1,12 persen. Dari sisi produksi, Kontraksi terbesar terjadi pada Kategori Kategori Jasa Perusahaan sebesar 14,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa terkontraksi sebesar 9,06 persen.

Perekonomian seluruh provinsi di Pulau Kalimantan Triwulan III-2020 secara q-to-q sudah menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun secara y-on-y dan c-to-c masih mengalami kontraksi (kecuali Kalimantan Utara dengan pertumbuhan c-to-c positif).

2.7.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani Gabungan di Provinsi Kalimantan Tengah naik 1,18 persen, dari 102,81 (September 2020) menjadi 104,02 (Oktober 2020). Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan nilai tukar subsektor tanaman perkebunan rakyat (2,28 persen) dan peternakan (1,56 persen). NTP tertinggi terjadi di subsektor tanaman perkebunan rakyat (107,33), berikutnya peternakan (104,20), perikanan (101,16), tanaman pangan (99,83) dan hortikultura (93,63).

2.7.3 Investasi

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan indikator dari kegiatan investasi berkontraksi 2,41% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tumbuh sebesar 4,10% (yoy). Deselerasi pertumbuhan investasi disebabkan oleh masih rendahnya realisasi proyek pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah dan swasta pada triwulan II 2020. Realokasi anggaran Pemerintah untuk penanggulangan COVID-19, dan investasi yang ditunda oleh swasta dampak ketidakpastian ekonomi di tengah pandemi menjadi penyebab rendahnya realisasi proyek pada triwulan II 2020.

Pada triwulan II 2020, penyaluran kredit investasi tumbuh sebesar 6,09% (yoy), namun capaiannya lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,33% (yoy). Nominal kredit investasi pada triwulan II 2020 adalah sebesar Rp25,41 triliun. Sementara itu kredit konstruksi tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,29% (yoy) pada triwulan II 2020, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 13,65% (yoy). Lebih rendahnya penyaluran kredit investasi dan konstruksi mengindikasikan bahwa kebutuhan untuk membiayai kegiatan investasi bangunan di Kalimantan Tengah mengalami penurunan pada triwulan II 2020. Hal ini sejalan dengan melambatnya aktivitas pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan sektor konstruksi pada triwulan II 2020.

Melambatnya investasi juga terkonfirmasi dari pertumbuhan impor barang industri yang berkontraksi. Berdasarkan nominalnya, impor barang industri mengalami kontraksi sebesar 67,74% (yoy) pada triwulan II 2020, atau mencapai US\$3,04 juta (Grafik 1.12). Di samping itu, berdasarkan volumenya, impor barang industri mengalami kontraksi sebesar 52,14% (yoy) pada triwulan II 2020, lebih dalam dibandingkan triwulan I 2020 yang berkontraksi sebesar 19,14% (yoy). Volume impor barang industri di Kalimantan Tengah pada triwulan II 2020 mencapai 6,51 ribu ton.

2.7.4 Ekspor

Kinerja ekspor Kalimantan Tengah pada triwulan II 2020 tercatat mengalami kontraksi sebesar 13,38% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 9,14% (yoy). Menurunnya kinerja ekspor pada triwulan II 2020 utamanya disebabkan oleh ekspor komoditas batu bara yang mengalami penurunan pada triwulan II. Total nominal ekspor luar negeri Kalimantan Tengah pada triwulan II 2020 mencapai US\$439,02 juta. Sejalan dengan nominal ekspor luar negeri yang berkontraksi, volume ekspor luar negeri Kalimantan Tengah tercatat berkontraksi sebesar 5,84% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 27,83% (yoy). Total volume ekspor luar negeri Kalimantan Tengah pada triwulan II 2020 mencapai 4,60 juta ton. Nilai ekspor luar negeri batu bara selama triwulan II 2020 tercatat sebesar US\$242,79 juta atau berkontraksi sebesar 37,27% (yoy). Penurunan ini lebih dalam dibandingkan triwulan I 2020 yang berkontraksi sebesar 13,14% (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh relatif menurunnya permintaan batu bara Jepang pasca musim dingin di triwulan II sejalan dengan pola musimannya. Tren penurunan harga batu bara global yang masih terjadi pada triwulan II 2020 juga menjadi penyebab lemahnya ekspor batu bara.

Meskipun mengalami perbaikan dibandingkan triwulan I 2020, ekspor luar negeri komoditas CPO masih mengalami kontraksi sebesar 1,96% (yoy) pada triwulan II 2020, sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 5,79% (yoy). Masih berkontraksinya ekspor luar negeri CPO disebabkan oleh melemahnya harga komoditas CPO global di tengah masa pandemi COVID-19. Tercatat pada triwulan II 2020 harga CPO global berada pada kisaran US\$528,09/mt, atau tumbuh sebesar 10,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 30,64% (yoy).

2.7.5 Impor

Kinerja impor Kalimantan Tengah pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 11,85% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berkontraksi sebesar 9,34% (yoy). Nilai impor barang luar negeri Kalimantan Tengah pada triwulan II 2020 mencapai US\$4,24 juta, turun dari posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar US\$9,67 juta. Capaian ini mengalami kontraksi sebesar 56,12% (yoy). Sementara itu pertumbuhan volume impor luar negeri Kalimantan Tengah secara tahunan juga mengalami kontraksi sebesar 47,81% (yoy), atau sebesar 7,18 ribu ton. Terkontraksinya nominal dan volume impor pada triwulan II 2020 menunjukkan penurunan aktivitas impor secara umum di Kalimantan Tengah. Terkontraksinya kinerja impor luar negeri Kalimantan Tengah ini sejalan dengan menurunnya aktivitas investasi dan konsumsi swasta di Kalimantan Tengah pada triwulan II 2020.

Impor luar negeri triwulan II 2020 didominasi oleh bahan bakar mineral dengan pangsa 48,64%, atau secara nominal sebesar US\$3,22 juta.

Pada urutan kedua, impor pada triwulan II 2020 didominasi oleh komoditas mesin/pesawat mekanik dengan pangsa sebesar 23,72%, atau secara nominal sebesar US\$1,15 juta. Berdasarkan negara asalnya, sebagian besar barang impor Kalimantan Tengah pada triwulan II 2020 berasal dari Tiongkok, Austria, dan Malaysia dengan pangsa masing-masing sebesar 23,28%, 21,29%, dan 19,39%.

2.7.6 Kemiskinan

Pada bulan Maret 2020 penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 132,94 ribu orang atau bertambah sebanyak 1,69 ribu orang dibandingkan dengan September 2019 yang mencapai 131,24 ribu orang. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada bulan September 2019 sebesar 4,28 persen naik menjadi 4,62 persen pada Maret 2020. Hal ini menggambarkan bahwa bertambahnya orang miskin di perkotaan karena banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan selama September 2019 hingga Maret 2020. Sementara itu, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan pada September 2019 sebesar 5,17 persen turun menjadi 4,96 persen pada Maret 2020.

2.7.7 Ketenagakerjaan

Angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 1.381,4 ribu orang, naik 7 ribu orang dibanding Agustus 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 4,58 persen, naik sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2019. Penduduk bekerja di Kalimantan Tengah pada Agustus 2020 sebanyak 1.318,1 ribu orang, menurun 0,8 ribu orang dibanding Agustus 2019.

Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur naik sebesar 2,00 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu naik sebesar 3,59 persen poin. Terdapat 190,3 ribu orang yang terdampak COVID -19 atau 9,42 persen. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (9,3 ribu orang), BAK karena COVID -19 (6,2 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID -19 (10,8 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (164 ribu orang).

2.7.8 Jasa Akomodasi

Secara kumulatif, Januari-September 2020, jumlah tamu yang menginap di hotel bintang turun 44,89 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan di hotel non bintang juga turun 10,65 persen. Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang selama September 2020 naik 6,56 poin dibanding Agustus 2020, yaitu dari 37,29 persen menjadi 43,85 persen. TPK hotel non bintang juga naik 0,68 poin, dari 16,22 persen menjadi 16,90 persen. Rata-rata lama tamu menginap (RLTM) pada September 2020 di hotel

bintang mencapai 1,63 hari, sementara hotel non bintang 1,17 hari. Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada September 2020 naik 15,58 persen dibanding bulan sebelumnya, sedangkan di hotel non bintang turun 1,38 persen.



BAB

III



GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan dimasa lalu.

Analisis terhadap kinerja keuangan daerah mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, Transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari APBD. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek non fisik maupun fisik.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan. untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah. Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020. Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tepat menjadi kunci kinerja pelaksanaan APBD yang optimal.

Pengukuran pelaksanaan APBD dilakukan dalam menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dianalisis adalah periode tahun 2016-2020.

3.1.1.1 Perkembangan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan perubahan yang mendasar. hal ini dapat kita cermati pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yang semula *open list* menjadi *close list*. Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas *coverage* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang. dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan pungutan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Terhadap pungutan tersebut sesuai amanat Pasal 94 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi untuk membagikan sebagian perolehan pungutan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Di sisi lain. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal. harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar

pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup antara lain: Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD. Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini antara lain: Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir termasuk didalamnya Pendapatan atas layanan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

Selanjutnya, Dana perimbangan sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Bagi Hasil menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum menurut Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus menurut Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Alokasi target pendapatan Dana Perimbangan baik Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus setiap tahun mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Sedangkan terkait pelaksanaannya mempedomani

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kelompok Pendapatan Daerah yang terakhir adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sesuai ketentuan pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. yang meliputi hibah. dana darurat. dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Analisa kinerja pendapatan daerah guna menyajikan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. serta sebagai salah satu dasar dalam merencanakan dalam peningkatan pendapatan daerah di periode mendatang. Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016-2020 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	3.548.504.778.636	4.098.485.315.188	4.678.157.675.828	4.990.195.455.012	4.767.014.514.749.24	8%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.158.303.928.014	1.342.330.618.783	1.616.521.660.227	1.776.231.952.739	1.570.137.570.176.27	9%
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	941.491.437.531	1.091.749.859.254	1.354.700.323.529	1.438.977.522.676	1.243.223.219.389.33	8%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.680.537.670	11.521.593.491	12.549.086.070	41.568.852.809	14.374.692.453	46%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	44.908.111.542	54.057.990.742	64.096.645.397	78.920.997.801	79.366.317.748.	16%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.223.841.271	185.001.175.296	185.175.605.231	216.764.579.453	233.173.340.585.94	10%
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.878.977.521.255	2.588.405.454.988	2.904.070.685.822	3.173.404.284.485	3.103.450.065.809	14%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak	200.298.531.200	123.267.890.609	142.143.740.862	121.270.799.919	143.899.478.029	-5%
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	142.581.088.930	249.170.061.881	440.616.398.456	486.695.632.798	441.819.113.594	38%
1.2.3	Dana Alokasi Umum	1.294.850.243.000	1.574.382.856.000	1.574.382.856.000	1.603.623.745.000	1.439.305.729.000	3%

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	241.247.658.125	641.584.646.498	746.927.690.504	961.814.106.768	1.078.425.745.186	56%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	511.223.329.367	167.749.241.417	157.565.329.779	40.559.217.788	26.529.493.763.97	-46%
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.054.725.000	22.135.323.587	7.473.822.000	7.911.643.179	5.608.344.996.00	62%
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	-	-	-	-	-	
1.3.3	Penyesuaian dan Otonomi Khusus	470.760.472.454	137.389.915.250	130.921.617.400	13.636.005.000	63.222.385.000.00	50%
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	35.408.131.913	8.224.002.580	19.169.890.379	19.011.569.609	-	18%

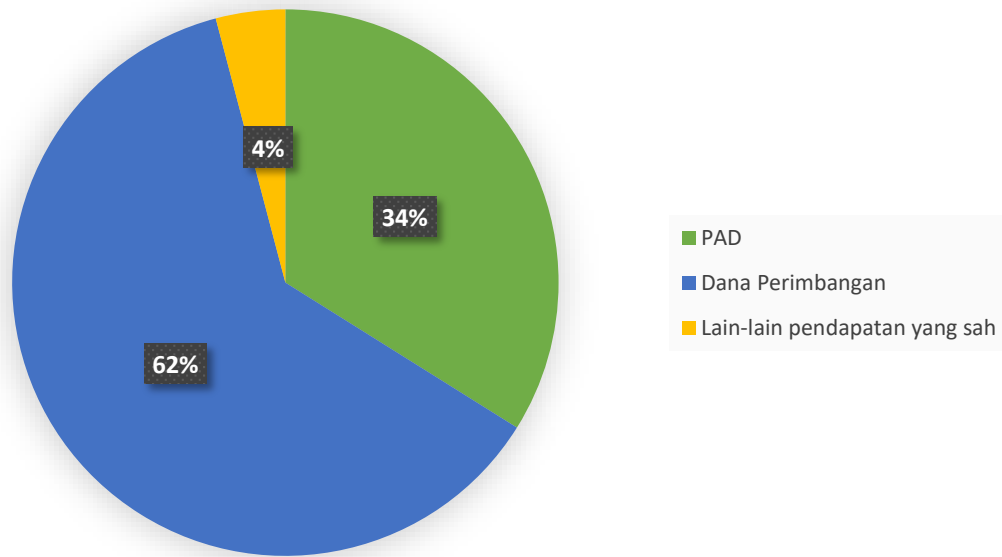
Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020. diolah

Berdasarkan tabel 3.1 diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat ditahun 2016-2019. akan tetapi mengalami penurunan dalam tahun 2020 dikarenakan terdampak oleh pandemi covid 19. Adapun rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2016-2020 ialah sebesar 8% dengan kontribusi rata-rata pertumbuhan yang paling besar dari Hasil Retribusi Daerah yaitu sebesar 46%. Adapun pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan juga sama halnya dengan realisasi pendapatan daerah. Dimana cenderung meningkat ditahun 2016-2019. akan tetapi mengalami penurunan dalam tahun 2020 dikarenakan terdampak oleh pandemi covid 19 yang rata-rata pertumbuhannya sebesar 14% pada tahun 2016-2020. dimana tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 38% dan Dana Alokasi Khusus sebesar 56%.

Pertumbuhan Bagi Hasil Bukan Pajak yang paling signifikan pada tahun 2018 yaitu terjadi kenaikan sebesar Rp191.446.336.575 dari tahun 2017. komponen yang mengalami peningkatan tersebut diantaranya Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan. Provisi Sumber Daya Hutan. Dana Reboisasi. dan Iuran Eksploitasi (royalti). Untuk Dana Alokasi Khusus terjadi peningkatan sebesar 56% atau sebesar Rp 1.078425.745.186 dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp 241.247.658.125 hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan kegiatan kesehatan. reboisasi hutan dan lahan. pendidikan dan infrastuktur daerah.

Selain dari PAD dan Pendapatan Dana Perimbangan. sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Namun Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2016-2020 rata-rata juga mengalami penurunan yang berkontraksi sebesar -46%. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2020. yaitu adanya penurunan pada dana insentif dikarenakan terjadinya dampak realokasi covid 19.

Berikut ini disajikan gambar rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020:



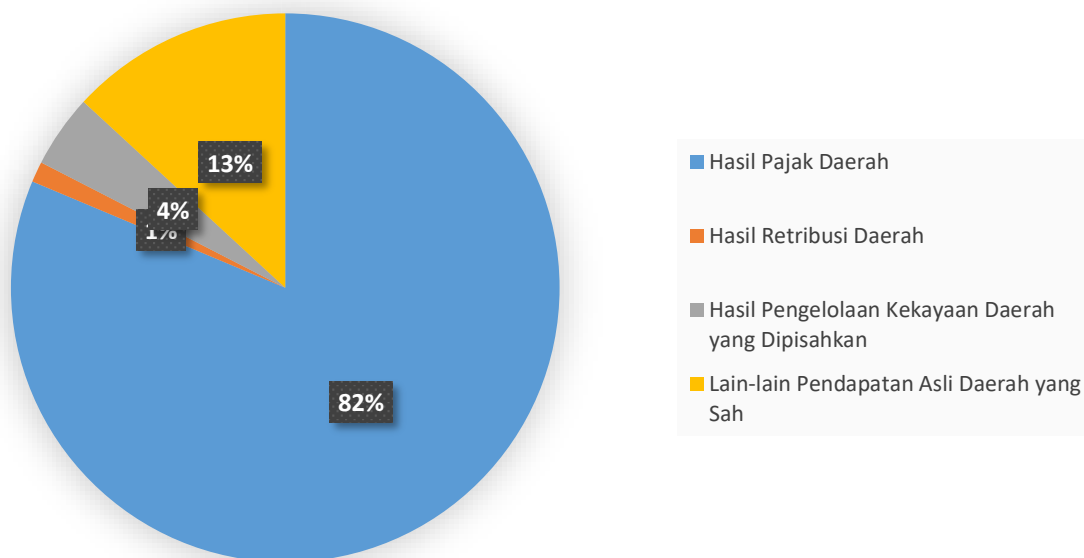
Gambar 3.1 Rata-Rata Komposisi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020. diolah

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata proporsi komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terbesar berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar 62%. Hal ini dengan proporsi PAD sebesar 34% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4% dari seluruh total pendapatan. Rincian dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terbesar berasal dari Hasil Pajak Daerah yaitu sebesar 82%. Sisanya terdiri dari Hasil Retribusi Daerah sebesar 1%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 4%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 13%.

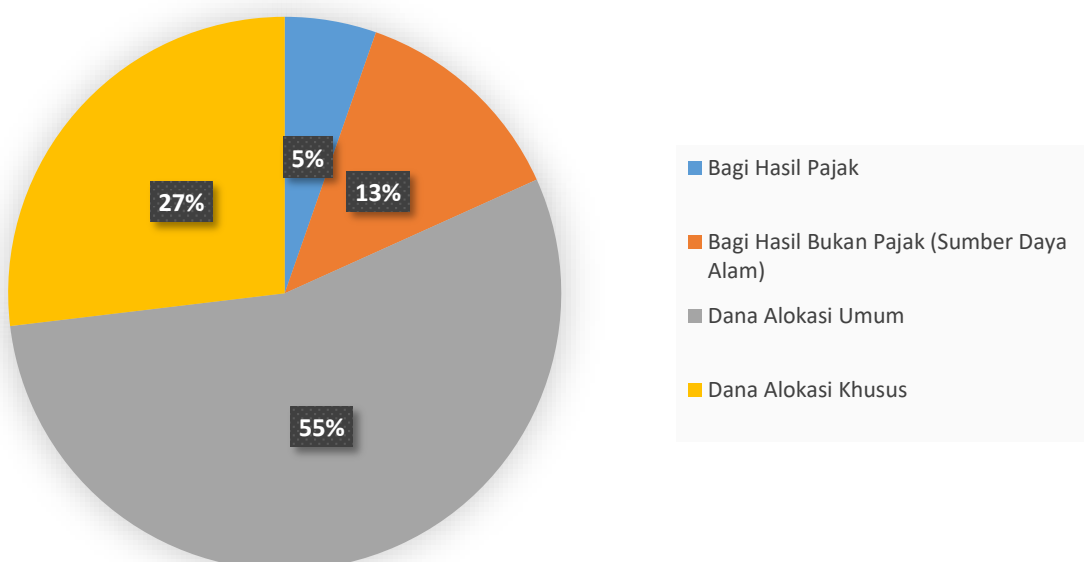


Gambar 3.2 Rata-Rata Komposisi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020. diolah

2. Dana Perimbangan

Komposisi dana perimbangan selama Tahun 2016-2020 berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 27% dan Dana Alokasi Umum sebesar 55%. sedangkan sisanya sebesar 18% merupakan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

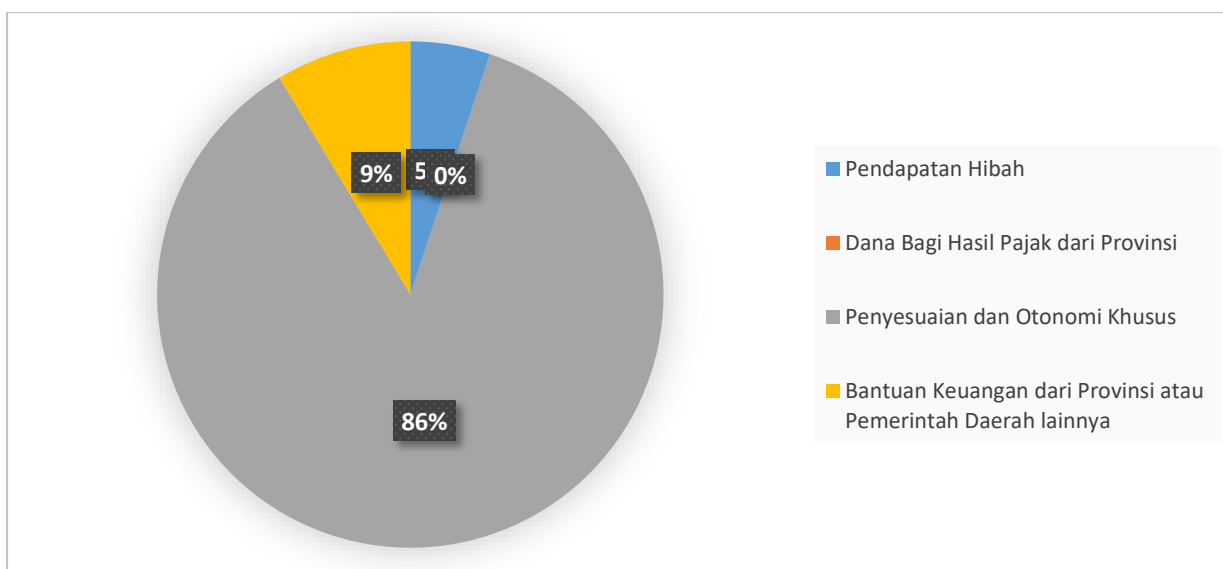


Gambar 3.3 Rata-Rata Komposisi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2016-2020

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020. diolah

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penyumbang terbesar dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 86%. Sisanya sebesar 59% berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya dan 9% adalah Pendapatan Hibah.



Gambar 3.4 Rata-Rata Komposisi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2020

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020. diolah

3.1.1.2 Perkembangan Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada

standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum komponen belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai. Belanja Bunga. Belanja Subsidi. Belanja Hibah. Belanja Bantuan Sosial. Belanja Bagi Hasil Kepada kabupaten/kota dan Pemerintah Desa. Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Lainnya. dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai. Belanja Barang dan Jasa. serta Belanja Modal.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besardialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2	BELANJA DAERAH	3.174.705.762.281	3.686.889.215.700	4.547.699.750.660	5.064.142.623.784	4.466.805.961.013	10%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.755.341.628.075	2.405.798.908.042	2.608.805.218.228	2.694.405.782.457	2.487.564.246.700	10%
2.1.1	Belanja Pegawai	502.777.468.573	1.115.423.441.290	1.168.696.271.285	1.172.914.197.451	1.236.919.219.443	33%
2.1.2	Belanja Bunga	102.500.000				0	
2.1.3	Dana Subsidi	1.163.230.000	1.161.023.500	1.151.976.000	1.122.859.000	0	-26%
2.1.4	Belanja Hibah	704.035.182.614	684.235.048.521	679.353.706.741	746.052.446.211	1.028.723.379.193	11%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	33.651.796.492	38.591.643.750	60.532.774.050	18.745.781.594	19.463.170.207	2%
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	510.062.773.526	556.674.084.247	665.060.564.912	714.590.110.368	8480.000.000	-16%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	3.548.676.870	6.723.702.489	34.009.925.240	36.597.547.983	7.580.000.000	106%

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	2.989.964.245	-	4.382.839.850	186.398.477.856	-
2.2	Belanja Langsung	1.419.364.134.206	1.281.090.307.658	1.938.894.532.432	2.369.736.841.327	1.995.301.714.314	12%
2.2.1	Belanja Pegawai	164.699.321.305	179.626.364.079	191.970.400.810	268.093.272.550	282.722.915.403	15%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	470.800.020.131	536.218.679.910	686.530.038.289	808.068.776.442	604.276.917.768	9%
2.2.3	Belanja Modal	783.864.792.770	565.245.263.669	1.060.394.093.333	1.293.574.792.335	1.108.301.881.144	17%

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020. diolah

Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode Tahun 2016-2020 bahwa pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 10%. Peningkatan tersebut diantaranya terjadi pada komponen belanja tidak langsung.

Belanja tidak langsung pada periode tahun 2016-2020 mengalami kenaikan sebesar 10%. Yang mana hal ini didominasi oleh peningkatan belanja pegawai sebesar 33% dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar 106%. Adanya peningkatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa ini terlampaui tinggi pada tahun 2020 dikarenakan adanya intruksi dari pemerintah pusat terkait realokasi anggaran bantuan untuk pemerintah baik kabupaten/kota dalam pemulihan dampak pandemi covid 19.

Belanja langsung pada periode tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhannya sebesar 12%. Dengan rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 15%. Selain itu, Belanja barang dan jasa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9% per tahun. Selanjutnya Belanja modal terjadi pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17% per tahun. belanja modal pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 495.148.829.664 dibandingkan dengan tahun 2017. Beberapa komponen belanja modal pada tahun 2017 mengakibatkan peningkatan akibat adanya peningkatan pada belanja modal bangunan gedung serta jalan dan irigasi. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 185.272.911.191 dibandingkan pada tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pengkategoruan kemampuan keuangan daerah terbagi atas:

1. di atas Rp550.000.000.000.00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
2. Rp300.000.000.000.00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000.00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
3. di bawah Rp300.000.000.000.00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.3 Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pendapatan Umum Daerah					
1	Pendapatan asli daerah	11583039280 14	13423306187 85	16165216602 27	177623195273 9	15701375701 76
2	Dana bagi hasil	20029853120 0	12326789060 9	14214374086 2	121270799919	14389947802 9
3	Dana alokasi umum	12948502430 00	15743828560 00	15743828560 00	160362374500 0	14393057290 00
	Jumlah A	26534527022 14	30399813653 94	33330482570 89	350112649765 8	31533427772 05
B	Belanja Daerah					
1	Belanja gaji dan tunjangan	12948502430 00	64929458129 8	64949547291 9	666930218735	67580406390 3
2	Tambahan Penghasilan PNS	18265168432 9	41415187448 3	48003420594 0	464723880340	49628144524 7
	Jumlah B	14775019273 29	10634464557 81	11295296788 59	113165409907 5	11720855091 50
	Kemampuan keuangan daerah	11759507748 85	19765349096 13	22035185782 30	23694723985 83	19812572680 55

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020. diolah

Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp 1.175.950.774.885 Nilai tersebut termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi. Pada Tahun 2017 sebesar Rp 1.976.534.909.613 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah Tinggi. Pada Tahun 2018 sebesar Rp 2.203.518.578.230 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah Tinggi. Tahun 2019 sebesar Rp 2.369.472.398.583 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan

keuangan daerah Tinggi. Sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp 1.981.257.268.055 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah Tinggi.

3.1.1.3 Perkembangan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Kinerja pembiayaan dilakukan dengan menganalisis komponen pembiayaan daerah, analisis tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang. Pada periode 2016-2020, realisasi pembiayaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar -20%. Penurunan tersebut paling banyak disumbang pada tahun 2015-2016 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2016 terjadi pembiayaan netto minus sebesar Rp 62.160.363.916 hal tersebut dikarenakan nilai Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan yang cukup besar diantaranya penyertaan modal sebesar Rp 40.009.989.866 serta adanya pembayaran pokok utang sebesar Rp 61.500.000.000.

Penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan yang signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 196%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 196%. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada tahun 2018

diantaranya terjadi pelampauan pendapatan sebesar Rp 263.840.528.340. realisasi belanja dibawah pagu sebesar Rp 382.949.474.702. realisasi transfer dibawah pagu sebesar Rp 46.912.674.052 dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan dibawah pagu sebesar Rp 5.000.000.000.

Berdasarkan data realisasi pada tabel di bawah. pengeluaran pembiayaan daerah tercatat pada tahun 2016-2017. Pada tahun 2017 terdapat realisasi berupa penyertaan modal (investasi) sebesar Rp154.990.000.000.00 pada PT Bank Kalimantan Tengah. Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada tabel dibawah ini yang menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
3	PEMBIAYAAN	-62.160.363.916	156.648.652.438	568.244.751.927	690.274.149.360	610.945.412.699.44	-20%
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.349.625.950	311.638.652.438	568.244.751.927	690.274.149.360	610.945.412.699.44	196%
3.1.1	Sisa lebih Prerhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	39.349.625.950	311.638.652.438	568.244.751.927	690.274.149.360	610.945.412.699.44	196%
3.1.2	Penerimaan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	101.509.989.866	154.990.000.000	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	40.009.989.866	154.990.000.000	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	61.500.000.000	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020. diolah

3.1.2 Neraca Daerah

Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yaitu neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Neraca daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan ini memberikan informasi kepada para pemangku kebijakan daerah, tentang posisi atau keadaan aset kewajiban serta ekuitas.

Aset pada periode tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4%. Pertumbuhan aset tersebut diantaranya Komponen Aset lancar mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4%. Pertumbuhan aset lancar diantaranya disebabkan rata-rata pertumbuhan posisi kas daerah sebesar 13%. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan pada SiLPA tahun berjalan tahun 2018 sebesar Rp 568.244.751.927 serta pada tahun 2019 sebesar Rp690.274.149.360. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan SiLPA yakni sebesar Rp 610.945.412.699. Komponen Piutang pendapatan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 18%. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2019 terjadi kenaikan yang signifikan pada komponen Piutang Lain-Lain PAD yang sah serta Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Pada piutang lainnya terjadi rata-rata pertumbuhannya sebesar 99% hal tersebut dikarenakan pada periode tahun 2017 terdapat koreksi nilai piutang lainnya sebesar Rp 236.976.401.453.

Aset tetap Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2016-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3%. Terdapat beberapa komponen aset yang mengalami penurunan dalam hal ini yang diantaranya tanah serta jalan, irigasi dan jaringan.

Tanah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -1%. Penurunan tersebut pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 terjadi pengurangan diantaranya Hibah

Keluar sebesar Rp 428.874.000. Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan sebesar Rp 407.252.800. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan sebesar Rp 184.906.400.000. dan Pengalihan Status Penggunaan sebesar Rp 400.000.000.

Jalan, irigasi dan jaringan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2%. hal tersebut dikarenakan tahun 2019 terjadi pengurangan sebesar Rp 2.207.468.906.053 dengan rincian Hibah sebesar Rp 2.200.708.463. Reklas antar rekening pada aset tetap sebesar Rp443.150.740.971 Reklas dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp5.651.436.737 Reklas ke Beban sebesar Rp 96.684.000 koreksi/penyesuaian sebesar Rp1.616.163.519.380 Reklas ke BM Tidak Menambah Aset Rp 358.052.950 dan Reklas ke Persediaan sebesar Rp 139.847.763.552.

Kewajiban pada periode Tahun 2016-2020 mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi kenaikan pada utang beban sebesar Rp 317.760.447.726 serta utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 67.702.314.

Ekuitas dana pada periode tahunan 2016-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4%. Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 10.715.920.803.773. Nilai ekuitas akhir didapat dari penghitungan ekuitas awal ditambah atau dikurangi surplus/defisit dan dampak kumulatif perubahan. Gambaran mengenai neraca Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET DAERAH	9.588.975.812.763	9.995.452.217.524	11.150.190.593.749	11.697.945.573.177	1.1033.816.316.776	4%
1.1	ASET LANCAR	865.363.816.649	956.914.212.928	1.343.446.461.865	1.092.246.201.178	911.615.100.626	4%
1.1.1.1	Kas Di Kas Daerah	273.589.394.043	536.439.973.055	666.128.391.376	538.378.995.565	276.735.299.340	13%
1.1.1.2	Kas Di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	590.256.332	-	-
1.1.1.4	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	38.049.258.394	31.804.778.872	18.659.002.131	33.930.446.733	60.362.374.642	26%
1.1.1.5	Kas Di Bendahara FKTP	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6	Kas Di Bendahara BOS	-	-	706.089.068	32.863.217.775	3.844.736.884	-
1.1.1.7	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	-	2.472.440.000	4.312.840.000	5.294.437.427	5.188.883.779	-
1.1.1.8	Kas Lainnya	-	-	1.647.273	108.984.109	804.681.906	-
1.1.1.9	Setara Kas	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.1.2.1	Piutang Pendapatan	32.470.056.963	38.258.364.453	50.605.724.445	81.077.842.806	50.255.029.479	18%
1.1.2.2	Piutang Lainnya	244.459.739.835	7.141.484.392	52.052.165.059	764.274.818	466.166.718	99%
1.1.2.3	Penyisihan Piutang	-	-5.724.572.477	-22.333.152.882	-18.666.526.190	-10.573.621.951	-
1.1.2.4	Beban Dibayar Dimuka	349.013.976	224.488.361	237.257.904	402.231.803	401.209.837	10%
1.1.3.1	Persediaan	279.273.257.113	346.297.256.271	573.076.497.491	417.502.039.998	524.130.339.990	22%
1.2	ASET TETAP	7.943.742.564.247	7.999.255.845.776	8.731.830.743.441	8.512.184.608.681	8.839.803.503.816	3%
1.2.1	Tanah	2.021.255.773.392	2.021.290.873.392	2.125.041.988.492	1.944.646.878.890	1.942.707.809.590	-1%
1.2.2	Peralatan Dan Mesin	509.910.969.084	636.116.207.664	977.218.872.264	1.182.638.189.144	1.421.474.858.048	30%
1.2.3	Gedung Dan Bangunan	1.033.598.255.504	1.126.936.424.822	1.976.103.496.522	2.167.446.753.821	2.299.087.026.371	25%
1.2.4	Jalan. Irigasi. Dan Jaringan	6.846.162.200.801	7.104.896.741.754	7.341.939.579.833	6.053.598.799.821	727.890.147.1182	2%
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	21.146.254.702	55.372.259.119	93.076.441.456	144.706.303.647	167.691.287.045	75%
1.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	200.076.972.006	236.864.786.399	520.556.678.675	930.414.053.053	353.261.624.986	39%

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	-2.688.407.861.243	-3.182.221.447.376	-4.302.106.313.803	-3.911.266.369.697	-4.623.320.573.409	16%
1.3	ASET LAINNYA	310.678.369.961	267.326.875.318	373.504.816.417	1.362.699.044.248	541.544.399.678	58%
1.3.1	Tagihan Jangka Panjang	2.540.180.486	1.405.710.949	131.098.189	4.563.389	10.135.189	-27%
1.3.2	Tagihan TGR	137.238.535	137.238.535	626.107.524	626.107.524	546.107.524	86%
1.3.3	Aset Tidak Berwujud	48.593.203.850	72.728.349.714	-	-	116.884.630.811	-
1.3.4	Aset Lain-Lain	275.781.752.553	219.991.796.301	326.554.251.947	1.296.845.962.541	484.374.550.329	66%
1.3.5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-26.936.220.182	-179.092.985.478	-1.197.049.821.096	-	-
2	KEWAJIBAN	339.737.822.396	159.584.928.199	260.379.769.789	284.604.817.751	317.895.513.003	8%
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	339.737.822.396	159.584.928.199	260.379.769.789	284.604.817.751	317.895.513.003	8%
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)	51.658.535	53.840.353.00	51.658.535	160.642.644	846.162	28%
2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	115.518.108.771	-	-	124.196.800	67.516.800	-
2.1.3	Utang Beban	224.168.055.089	159.531.087.846	260.305.865.882	284.282.689.154	317.760.447.726	14%

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	22.245.372	37.289.152	66.702.314	-
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Utang Dalam Negeri – Obligasi	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.2.3	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
3	EKUITAS DANA	9.249.237.990.367	9.835.867.289.325	10.889.810.823.960	11.413.340.755.426	10.715.920.803.773	4%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		9.588.975.812.763	9.995.452.217.524	11.150.190.593.749	11.697.945.573.177	11.033.816.316.776	4%

Sumber: Neraca Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020. diolah

Pada Tabel 3.5 menyajikan laporan posisi keuangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. dari laporan posisi keuangan tersebut dapat dilakukan analisa rasio keuangan. Analisa tersebut dapat mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah. analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut seperti pada tabel 3.6:

Tabel 3.6 Analisis Rasio Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Rasio Likuiditas					
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	2.55	6.00	5.16	3.84	2.87
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	1.73	3.83	2.96	2.37	1.22
B	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio total utang terhadap total asset	3.54	1.60	2.34	2.43	2.88
2	Rasio utang terhadap modal	3.67	1.62	2.39	2.49	2.96

Sumber: Hasil Analisis. 2020

1. Rasio Lancar

Rasio yang mengukur kinerja keuangan secara likuiditas. Rasio Lancar menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya pada dua belas bulan ke depan. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan Tabel 3.6. rasio lancar pada tahun 2016 adalah sebesar 2.55 dan tahun 2020 sebesar 2.87 Nilai tersebut berarti menunjukkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kemampuan membayar utang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0.88 kali.

2. Quick Rasio

Rasio yang mengukur kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid Yang termasuk sebagai Aset Cepat (*Quick Asset*) adalah Aktiva Lancar atau Aset lancar yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai dan mendekati nilai bukunya. Quick rasio pada tahun 2016 sebesar 1.73 dan tahun 2020 sebesar 1.22. Nilai tersebut berarti menunjukkan kemampuan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya cukup baik.

3. Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio yang mengukur seberapa besar aset dapat menanggung utang yang dimiliki. Besar rasio total utang terhadap total aset pada tahun 2016 sebesar 3.54 dan

pada tahun 2020 sebesar 2.88 Dengan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh utang terhadap aktiva sangat kecil.

4. Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Pada tahun 2016 rasio Utang terhadap modal pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 3.67 dan pada tahun 2020 menjadi 2.96 Dari nilai perhitungan rasio tersebut disimpulkan bahwa nilai total utang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (2016-2020)

Kinerja keuangan daerah masa lalu merupakan analisa kebijakan pengelolaan keuangan guna mengetahui gambaran kebijakan baik pendapatan, belanja maupun pengeluaran pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Hasil dari analisa tersebut dapat digunakan untuk menentukan kebijakan serapan anggaran yang dapat dioptimalkan berupa pendapatan, pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang guna terwujudnya efektifitas dalam penggunaan keuangan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Pencairan Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta untuk pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, penyertaan modal (investasi daerah), dan pembayaran pokok utang.

3.2.1 Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Efektivitas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas. Rasio ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dibandingkan dengan APBD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas realisasi APBD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas: Total Realisasi APBD} / \text{Total Anggaran APBD} \times 100\%$$

Sementara itu, kriteria efektivitas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Kriteria Efektivitas APBD

Kriteria	Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	<60

Sumber: Halim, 2012

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. sehingga semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

a) Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Berdasarkan efektivitas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016-2020, terlihat bahwa pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan sangat efektif pada tahun 2018 dengan nilai efektifitas sebesar 106%. sedangkan yang paling rendah efektifitasnya pada tahun 2020 sebesar 99%. Dimana hal ini tak lain dikarenakan adanya realokasi pemulihan dampak pandemi covid 19. Akan tetapi meskipun begitu, keseluruhan dari tahun 2016-2020 efektifitas realisasi pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah tergolong kriteria sangat efektif. Komponen yang terdapat pada pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah jika dilihat secara keseluruhan baik PAD dan Lain-lain pendapatan yang sah dari tahun 2016-2020 termasuk dalam kriteria sangat baik. Hanya pada komponen Dana Perimbangan yang menunjukkan rata-rata efektifitas dari tahun 2016-2020 dengan kriteria efektif. Hasil perhitungan efektivitas realisasi anggaran pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8 Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
		2016		2017		2018		2019		2020	
	Pendapatan Daerah	3.427.236.875.000	3.548.504.778.636	4.046.545.922.706	4.098.485.315.188	4.414.317.147.488	4.678.157.675.828	4.702.615.600.000	4.990.195.455.012	4.816.639.952.634	4.767.014.514.749
1	Pendapatan Asli Daerah	1.233.094.359.800	1.158.303.928.014	1.342.494.134.000	1.342.330.618.783	1.402.905.478.027	1.616.521.660.227	1.425.249.870.000	1.776.231.952.739	1.485.940.751.841	1.570.137.570.176
2	Dana Perimbangan	2.172.424.105.200	1.878.977.521.255	2.702.926.988.706	2.588.405.454.988	3.010.386.869.461	2.904.070.685.822	3.153.060.020.000	3.173.404.284.485	3.322.575.490.793	3.103.450.065.809
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	21.718.410.000	511.223.329.367	1.124.800.000	167.749.241.417	1.024.800.000	157.565.329.779	1.243.057.100	40.559.217.788	8.123.710.000	26.529.493.763

No	Keterangan	Realisasi					Kriteria					Kriteria Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
	Pendapatan Daerah	104%	101%	106%	106%	99%	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Efektif	Sangat efektif
1	Pendapatan Asli Daerah	94%	100%	115%	125%	106%	Efektif	Efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif
2	Dana Perimbangan	86%	96%	115%	101%	93%	Efektif	Efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Efektif	Efektif
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2354%	14914%	15375%	3263%	327%	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif

Sumber: Hasil Analisis

3.2.2 Efektivitas Serapan Belanja Daerah

Berdasarkan efektivitas serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016-2020, terlihat bahwa belanja daerah di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan sangat efektif pada tahun 2016 dengan nilai efektifitas sebesar 95.4%, sedangkan yang paling rendah efektifitasnya pada tahun 2018 sebesar 88.4%. Akan tetapi meskipun begitu, keseluruhan dari tahun 2016-2020 efektifitas serapan belanja daerah di Provinsi Kalimantan Tengah tergolong kriteria sangat efektif dengan nilai sebesar 91.1%. Nilai efektifitas terendah komponen yang terdapat pada belanja daerah ada pada Belanja Tidak Langsung dengan nilai rata-rata sebesar 89.4% yang masuk dalam kriteria cukup efektif. Hasil perhitungan efektivitas serapan belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Analisis Efektivitas Serapan Anggaran Belanja Daerah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
		2016		2017		2018		2019		2020	
	Belanja Daerah	3.328.970.710.695	3.174.705.762.281	4.155.145.316.749	3.686.889.215.700	4.977.561.899.416	4.397.966.270.469	4.977.561.899.416	4.397.966.270.469	4.772.120.280.347	4.466.805.961.013
1	Belanja Tidak Langsung	1.874.860.549.276	1.755.341.628.075	2.747.305.437.970	2.405.798.908.042	2.846.952.322.172	2.459.071.738.037	2.846.952.322.172	2.459.071.738.037	3.400.772.364.031	3.172.105.602.013
2	Belanja Langsung	1.454.110.161.419	1.419.364.134.206	1.407.839.878.779	1.281.090.307.658	2.130.609.577.244	1.938.894.532.432	2.130.609.577.244	1.938.894.532.432	2.149.287.329.503	2.026.210.619.839
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	3.243.825.471	39.349.625.950	273.589.394.043	311.638.652.438	568.244.751.927	568.244.751.927	568.244.751.927	568.244.751.927	611.326.980.587	610.945.412.699
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	101.509.989.866	101.509.989.866	164.990.000.000	154.990.000.000	5.000.000.000	-	5.000.000.000	-	-	-

No	Keterangan	Serapan					Kriteria					Kriteria Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
	Belanja Daerah	95.4%	88.7%	88.4%	89.6%	93.6%	Efektif	Cukup efektif	Cukup efektif	Cukup efektif	Efektif	Efektif
1	Belanja Tidak Langsung	93.6%	87.6%	86.4%	86.2%	93.3%	Efektif	Cukup efektif	Cukup efektif	Cukup efektif	Efektif	Cukup efektif
2	Belanja Langsung	97.6%	91%	91%	93.8%	94.3%	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	1213%	114%	100%	224%	100%	Sangat efektif	Sangat efektif	Efektif	Sangat efektif	Efektif	Sangat efektif
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	100	94%	-	-	-	Efektif	Efektif	-	-	-	-

3.2.3 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran merupakan analisa yang dapat menggambarkan suatu kebijakan yang efektif dalam penyusunan anggaran selama periode tertentu.

a) Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Proporsi realisasi belanja daerah merupakan analisa yang membandingkan anggaran belanja dengan realisasinya. hasil analisa tersebut dapat diperoleh tingkat realisasi belanja. Realisasi rata-rata pertumbuhan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 sampai 2020 sebesar 91.1%. Belanja Tidak Langsung dengan rata-rata pertumbuhan 89.4%. Sementara itu, belanja langsung memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 93.5%. Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016			2017		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
	BELANJA	3.328.970.710.695	3.174.705.762.281	95.4	4.155.145.316.749	3.686.889.215.700	88.7
A	Belanja Tidak Langsung	1.874.860.549.276	1.755.341.628.075	93.6	2.747.305.437.970	2.405.798.908.042	87.6
1	Belanja Pegawai	550.832.571.314	502.777.468.573	91.3	1.297.287.554.021	1.115.423.441.290	86.0
2	Belanja Bunga	102.500.000	102.500.000	100	-	-	-
2	Belanja Subsidi	1.163.300.000	1.163.230.000	100	1.163.300.000	1.161.023.500	99.8
3	Belanja Hibah	711.465.487.292	704.035.182.614	99	717.291.272.750	684.235.048.521	95.4
4	Belanja Bantuan Sosial	38.409.262.900	33.651.796.492	87.6	43.414.141.626	38.591.643.750	88.9
5	Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan pemerintah desa	564.248.627.770	510.062.773.526	90.4	657.682.387.073	556.674.084.247	84.6
6	Belanja Bantuan Keuangan	5.300.000.000	3.548.676.870	67.0	11.350.000.000	6.723.702.489	59.2
7	Belanja Tidak Terduga	3.338.800.000	-	-	19.116.782.500	2.989.964.245	15.6
B	Belanja Langsung	1.454.110.161.419	1.419.364.134.206	97.6	1.407.839.878.779	1.281.090.307.658	91
1	Belanja Pegawai	152.838.358.399	164.699.321.305	107.8	176.741.807.488	179.626.364.079	101.6
2	Belanja Barang dan Jasa	500.993.583.221	470.800.020.131	94	577.859.684.939	536.218.679.910	92.8
3	Belanja Modal	800.278.219.799	783.864.792.770	97.9	653.238.386.352	565.245.263.669	86.5

No	Uraian	2018			2019		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
	BELANJA	4.977.561.899.416	4.397.966.270.469	88.4	5.653.633.972.424	5.064.142.623.784	89.6
A	Belanja Tidak Langsung	2.846.952.322.172	2.459.071.738.037	86.4	3.126.107.435.072	2.694.405.782.457	86.2
1	Belanja Pegawai	1.323.289.949.798	1.168.696.271.285	88.3	1.351.362.129.610	1.172.914.197.451	86.8
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	20
2	Belanja Subsidi	1.163.300.000	1.161.023.500	99.8	1.163.300.000	1.122.859.000	96.5
3	Belanja Hibah	710.318.015.544	684.235.048.521	96.3	813.456.231.370	746.052.446.211	91.7
4	Belanja Bantuan Sosial	62.899.212.626	38.591.643.750	61.4	25.090.554.806	18.745.781.594	74.7
5	Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan pemerintah desa	711.133.164.204	556.674.084.247	78.3	885.356.082.916	714.590.110.368	80.7
6	Belanja Bantuan Keuangan	34.850.000.000	6.723.702.489	19.3	37.250.000.000	36.597.547.983	98.2
7	Belanja Tidak Terduga	3.298.680.000	2.989.964.245	90.6	12.429.136.370	4.382.839.850	35.3
B	Belanja Langsung	2.130.609.577.244	1.938.894.532.432	91.0	2.527.526.537.352	2.369.736.841.327	93.8
1	Belanja Pegawai	217.790.825.012	191.970.400.810	88.1	283.466.770.995	268.093.272.550	94.6
2	Belanja Barang dan Jasa	758.857.881.084	686.530.038.289	90.5	891.336.204.501	808.068.776.442	90.7
3	Belanja Modal	1.153.960.871.148	1.060.394.093.333	91.9	1.352.723.561.856	1.293.574.792.335	95.6

No	Uraian	2020			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		APBD	REALISASI	%	
	BELANJA	4.772.120.280.347	4.466.805.961.013	93.6	91.1
A	Belanja Tidak Langsung	3.400.772.364.031	3.172.105.602.013	93.3	89.4
1	Belanja Pegawai	1.321.557.916.743	1.206.010.313.918	91.3	88.7
2	Belanja Bunga			-	24
2	Belanja Subsidi	-	-	-	79
3	Belanja Hibah	1.063.602.486.508	1.028.723.379.193	96.7	95.8
4	Belanja Bantuan Sosial	21.652.500.000	19.463.170.207	89.9	80.5
5	Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan pemerintah desa	620.554.652.874	555.738.836.044	89.6	84.7
6	Belanja Bantuan Keuangan	35.292.000.000	8.480.000.000	24.1	53.6
7	Belanja Tidak Terduga	216.020.047.574	186.398.477.856	86.3	45.6
B	Belanja Langsung	2.149.287.329.503	2.026.210.619.839	94.3	93.5
1	Belanja Pegawai	335.673.822.525	313.631.820.928	93.4	97.1
2	Belanja Barang dan Jasa	658.285.638.237	604.276.917.767	91.8	92
3	Belanja Modal	1.155.327.868.741	1.108.301.881.143	95.9	93.6

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020. diolah

b) Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur merupakan alokasi belanja yang menggambarkan tentang belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja kebutuhan aparatur. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan pada Tabel 3.9. dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

Berdasarkan Tabel 3.10 Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur kebutuhan lebih kecil dibandingkan dengan total pengeluaran daerah. Kondisi tersebut menggambarkan porsi belanja untuk pembangunan dan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk aparatur. Pada Tahun 2016. persentase belanja kebutuhan aparatur sebesar 24.5%. Angka ini meningkat menjadi 37.9% di tahun 2017. Akan tetapi pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 menjadi sebesar 34.6%. tahun 2019 menjadi 33.8%. dan pada tahun 2020 menurun menjadi 31.8%.

Tabel 3.11 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Belanja Tidak Langsung	502.777.468.573	1.115.423.441.290	1.168.696.271.285	1.172.914.197.451	1.206.010.313.918
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	308.996.260.025	649.294.581.298	649.495.472.919	666.930.218.735	675.804.063.903
2	Belanja Tambahan Penghasilan	182.651.684.329	414.151.874.483	480.034.205.940	464.723.880.340	496.281.445.247
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasioanal KDH/Wakil KDH	7.229.400.000	8.249.400.000	10.274.582.464	10.410.000.000	10.190.000.000
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.800.864.219	43.689.085.509	28.860.341.662	30.720.044.769	22.902.396.988
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	99.260.000	38.500.000	31.668.300	130.053.607	832.407.780
B	Belanja Langsung	301.460.482.482	341.542.619.324	405.154.903.483	540.431.125.410	394.220.953.573
1	Belanja Honorarium	109.487.553.676	179.145.591.079	191.883.150.809	267.862.992.550	133.334.446.425
2	Belanja Uang Lembur	415.565.500	310.473.000			-
3	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	4.163.226.113	3.857.131.904	3.005.474.771	18.376.615.080	18.450.341.182
4	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	41.271.160.099	2.680.618.016	3.885.645.900	4.218.470.990	416.203.000
5	Belanja Perjalanan Dinas	141.524.619.456	150.520.007.208	199.642.525.379	245.729.596.683	120.510.568.133
6	Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi. dan Bimbingan Teknis PNS	4.598.357.638	5.028.798.117	6.738.106.624	4.243.450.107	998.826.699
	TOTAL	804.237.951.055	1.456.966.060.614	1.573.851.174.768	1.713.345.322.861	1.600.231.267.491

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020. diolah

**Tabel 3.12 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019**

No.	Tahun Anggaran	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	2016	804.237.951.055	3.276.215.752.147	24.5%
2	2017	1.456.966.060.614	3.841.879.215.700	37.9%
3	2018	1.573.851.174.768	4.552.699.750.660	34.6%
4	2019	1.713.345.322.861	5.064.142.623.784	33.8%
5	2020	1.600.231.267.491	5.031.024.797.057	31.8%

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020. diolah

3.2.4 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih pendapatan dengan alokasi belanja. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Analisis pembiayaan dilakukan guna memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah.

a) Analisis Penutup Defisit Riil

Analisis Penutup Defisit Riil dilakukan guna memberi gambaran masa lalu tentang defisit riil anggaran pemerintah daerah yang ditutup dengan penerimaan pembiayaan. Berdasarkan tabel di bawah, tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

terjadi peningkatan. sementara pada pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi defisit. Defisit tahun 2019 ditutup penerimaan pembiayaan sebesar Rp.690.274.149.360 dan tahun 2020 sebesar Rp6 11.326.980.587 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) periode tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

**Tabel 3.13 Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.548.504.778.637	4.098.485.315.188	4.678.157.675.828	4.990.195.455.012	4.767.014.514.749
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.661.094.311.886	3.686.889.215.700	4.547.699.750.660	5.064.142.623.784	4.466.805.961.013
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	154.990.000.000	-	-	-
	Defisit Riil	300.208.553.736	256.606.099.488	130.457.925.168	-73.947.168.772	887.410.466.751
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	39.349.625.950	311.638.652.438	568.244.751.927	690.274.149.360	611.326.980.587
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	-
B.	Total Realisasi Penerimaan	39.349.625.950	311.638.652.438	568.244.751.927	690.274.149.360	611.326.980.587
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	311.638.652.438	568.244.751.926	698.702.677.095	616.326.980.588	346.935.130.391

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020. diolah

Untuk menutup defisit riil anggaran diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Selanjutnya berdasarkan Tabel 3.14 dapat dihitung komposisi penutup defisit anggaran Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100	100	100	100	100
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020. diolah

b) Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis sisa lebih perhitungan anggaran dilakukan untuk mengetahui kinerja APBD yang lebih rasional dan terukur pada tahun tersebut. Melalui analisis ini, juga dapat diketahui dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Pada Tabel 3.15 disajikan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran yang menyajikan secara rinci sumber peolehan SiLPA.

Tabel 3.15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1	Jumlah SiLPA	311.638.652.438		568.244.751.927		698.702.677.095		611.326.980.587		346.935.130.391		
2	Pelampauan penerimaan Pendapatan Daerah	121.267.903.637	38.9	51.939.392.484	9.1	263.840.528.340	37.7	30.264.159.684	5.0	49.625.437.884	14.3	21
3	Realisasi belanja di bawah pagu	98.327.770.948	31.5	362.621.500.710	3	382.949.474.702	54.8	- 418.072.924.073	-68.4	305.314.319.333	88.0	21.78
4	Realisasi transfer di bawah pagu	55.937.177.374	17.9	105.634.600.337	18.6	46.912.674.052	6.7	- 171.418.424.564	-28.0	91.627.816.830	26.41	8.32
5	Realisasi penerimaan pembiayaan di atas pagu	36.105.800.478	11.5	38.049.258.394	6.7	-	0	-8.428.527.734	-1.4	381.567.888	0.1	3.38
6	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di bawah pagu	-	0	10.000.000.000	1.8	5.000.000.000	0.7	-	0.0	0.0	0	0.5

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020. diolah

c) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA), yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Tabel 3.13 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan dikarenakan ada realokasi pemulihan dampak pandemi covid19.

**Tabel 3.16 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan						
1	Saldo kas neraca daerah	311.638.652.437	568.244.751.927.78	689.807.969.848	611.326.980.587	346.935.130.391
Dikurangi						
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran		311.638.652.437	568.244.751.927.78	689.807.969.848	611.326.980.587	346.935.130.391

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020. diolah

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah. Kapasitas total keuangan daerah selanjutnya akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan semakin meningkat yang secara langsung akan meningkatkan kapasitas kemampuan keuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer serta Lain-Lain Pendapatan Daerah. Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah yang paling besar bersumber dari Pendapatan Transfer.

Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 sampai dengan 2026 disusun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5%. Pertumbuhan tersebut terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan rata-rata sebesar 8%. Pendapatan Transfer dengan rata-rata sebesar 3%, serta lain-lain pendapatan yang sah dengan rata-rata sebesar -6%.

Sementara itu, Belanja diproyeksikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5%. Rata-rata pertumbuhan Belanja Operasi diproyeksikan terjadi kenaikan sebesar 2% dan Belanja Modal rata-rata bertumbuh sebesar 12%. Pada komponen belanja Bantuan Tidak Terduga terjadi kenaikan pertumbuhan sebesar 16% sedangkan komponen Bantuan Transfer pada Tahun 2021 sampai Tahun 2026 dialokasikan terjadi kenaikan sebesar 7%. Lebih rinci proyeksi pendapatan dan belanja disajikan pada Tabel 3.17.

**Tabel 3.17 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026**

Kode Akun	Uraian Akun	APBD	Proyeksi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	PENDAPATAN	4.724.881.114.687	5.201.464.335.847	5.401.464.440.868	5.601.465.058.655	5.801.468.044.109	6.001.552.362.405	5%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.702.147.306.687	2.055.192.248.497	2.176.647.932.584	2.296.140.518.914	2.413.622.772.125	2.529.123.339.871	8%
1.1.1	Pajak daerah	1.356.285.867.687	1.591.549.300.247	1.709.219.582.053	1.824.816.551.187	1.911.566.665.518	1.994.513.018.821	8%
1.1.2	Retribusi daerah	25.583.249.000	44.777.233.250	45.446.664.081	46.132.830.683	71.000.000.000	100.614.755.672	35%
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	100.840.500.000	168.865.715.000	171.981.686.450	175.191.137.044	181.056.106.607	183.995.565.378	15%
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	219.437.690.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	3%
1.2	Pendapatan Transfer	3.021.218.558.000	3.145.206.837.350	3.223.751.258.284	3.304.259.289.741	3.386.780.021.984	3.471.363.772.534	3%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3.017.788.558.000	3.141.776.837.350	3.220.321.258.284	3.300.829.289.741	3.383.350.021.984	3.467.933.772.534	3%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	3.430.000.000	3.430.000.000	3.430.000.000	3.430.000.000	3.430.000.000	3.430.000.000	0%
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.515.250.000	1.065.250.000	1.065.250.000	1.065.250.000	1.065.250.000	1.065.250.000	6%
1.3.1	Hibah	1.515.250.000	1.065.250.000	1.065.250.000	1.065.250.000	1.065.250.000	1.065.250.000	6%
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	-	-	-	-
2	BELANJA	4.941.216.245.078	5.191.681.877.531	5.374.733.269.589	5.584.133.916.412	6.074.137.042.182	6.283.625.323.438	5%
2.1	Belanja operasi	3.176.586.550.220	3.096.676.139.350	3.124.327.096.679	3.200.985.523.697	3.439.540.203.243	3.566.404.439.213	2%

Kode Akun	Uraian Akun	APBD	Proyeksi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.1.1	Belanja pegawai	1.300.590.007.707	1.459.298.982.622	1.611.126.276.089	1.651.404.432.992	1.692.689.543.816	1.735.006.782.412	6%
2.1.2	Belanja barang dan jasa	1.082.730.134.771	1.108.726.292.650	1.110.260.246.965	1.138.016.753.139	1.325.517.590.796	1.400.051.638.830	5%
2.1.3	Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja hibah	772.691.312.742	517.534.282.478	382.125.478.625	390.749.242.566	400.517.973.631	410.530.922.971	-4%
2.1.6	Belanja bantuan sosial	20.575.095.000	11.116.581.600	20.815.095.000	20.815.095.000	20.815.095.000	20.815.095.000	0%
2.2	Belanja modal	913.076.407.456	1.060.771.756.997	1.265.655.395.917	1.297.296.780.815	1.574.309.622.006	1.601.421.924.032	12%
2.2.1	Belanja Modal	913.076.407.456	1.060.771.756.997	1.265.655.395.917	1.297.296.780.815	1.574.309.622.006	1.601.421.924.032	12%
2.3	Belanja tidak terduga	112.576.945.529	285.186.773.462	107.122.806.028	149.389.165.913	79.672.251.437	92.967.445.352	16%
2.3.1	Belanja tidak terduga	112.576.945.529	285.186.773.462	107.122.806.028	149.389.165.913	79.672.251.437	92.967.445.352	16%
2.4	Belanja transfer	738.976.341.873	749.047.207.722	877.627.970.965	936.462.445.988	980.614.965.496	1.022.831.514.842	7%
2.4.1	Belanja bagi Hasil	707.326.341.873	741.638.991.322	869.927.970.965	928.762.445.988	972.914.965.496	1.015.131.514.842	8%
2.4.2	Belanja bantuan Keuangan	31.650.000.000	7.408.216.400	7.700.000.000	7.700.000.000	7.700.000.000	7.700.000.000	-15%
Surplus/Defisit			9.782.458.316	26.731.171.279	17.331.142.243	(272.668.998.073)	(282.072.961.033)	-373%
3	PEMBIAYAAN DAERAH	216.335.130.391	(9.782.458.316)	(26.731.171.279)	(17.331.142.243)	272.668.998.073	282.072.961.033	-373%
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	346.935.130.391	235.018.757.035	253.868.828.721	263.268.857.757	272.668.998.073	282.072.961.033	-3%
3.1.1	Penggunaan SiLPA	346.935.130.391	235.018.757.035	253.868.828.721	263.268.857.757	272.668.998.073	282.072.961.033	-3%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali	-	-	-	-	-	-	-

Kode Akun	Uraian Akun	APBD	Proyeksi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pemberiaan Pinjaman Daerah							
3.1.6	Penerimaan Piutang	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	130.600.000.000	244.801.215.351	280.600.000.000	280.600.000.000	-	-	23%
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	114.201.215.351	150.000.000.000	150.000.000.000	-	-	23%
3.2.2	Penyertaan modal daerah	130.600.000.000	130.600.000.000	130.600.000.000	130.600.000.000	-	-	23%
3.2.3	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	-
4	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkeaan (SiLPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Sumber: Hasil analisis. 2021

1. Kemampuan PAD dapat dicapai 200 Milyar. apabila :
 - Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah mencapai minimal 5.56 %
 - Kegiatan perekonomian masyarakat dapat berjalan secara normal sebagaimana sebelum adanya pandemi
 - Peningkatan sarana prasarana (14 UPT). kuantitas dan kualitas SDM aparatur
 - Biaya operasional yang memadai sampai ke desa-desa
 - Peningkatan Kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota sampai ke pedesaan dalam hal identifikasi potensi sampai ke desa
 - Peningkatan integrasi sistem berbasis data potensi
 - Penyelarasan regulasi/kewenangan dengan pemerintah pusat
 - Membangun komitmen dengan mitra kerja dan meningkatkan pengawasan untuk menghindari kebocoran PAD
2. Apabila target PAD tidak tercapai akibat tidak terpenuhinya beberapa asumsi tersebut diatas. maka akan dilakukan Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sesuai dengan peraturan yang berlaku

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

1) Proyeksi SiLPA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Pada tahun 2020 menggunakan data PAPBD Tahun 2020. Selanjutnya, proyeksi tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mempertimbangkan pertumbuhan SiLPA pada periode tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil proyeksi, SiLPA dari periode 2021 sampai dengan 2026 diproyeksikan menurun sebesar -3%.

Tabel 3.18 Proyeksi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Uraian	APBD	Proyeksi					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	611.32 6.980.5 87	346.9 35.13 0.391	235.018. 757.035	253.868. 828.721	263.268. 857.757	272.668. 998.073	282.072 .961.03 3

Sumber: Hasil analisis. 2021

2) Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kapasitas keuangan daerah diperlukan guna mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan. Proyeksi kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan mengelompokkan penerimaan yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sudah menjadi hak daerah serta pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah sehingga dapat diketahui besaran kapasitas riil keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Proyeksi kapasitas keuangan daerah yang menggambarkan penerimaan daerah, selanjutnya dihitung kapasitas riil nya dengan mengurangi dengan pengeluaran prioritas utama. Dengan demikian, kapasitas riil keuangan daerah menggambarkan anggaran yang dapat dibelanjakan diluar dari alokasi prioritas utama. Proyeksi kapasitas keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan tahun 2020 dan 2021 dimuat pada tabel tersebut sebagai *baseline* untuk proyeksi kapasitas riil keuangan daerah tahun 2021-2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.19 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026**

No	Uraian	TAHUN 2021	Proyeksi				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	4.724.881.114.687	5.201.464.335.847	5.401.464.440.868	5.601.465.058.655	5.801.468.044.109	6.001.552.362.405
2	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	346.935.130.391	235.018.757.035	253.868.828.721	263.268.857.757	272.668.998.073	282.072.961.033
	Total penerimaan	5.071.816.245.078	5.402.281.877.531	5.655.333.269.589	5.864.733.916.412	6.074.137.042.182	6.283.625.323.438
	Dikurangi						
3	Pengeluaran Pembiayaan	130.600.000.000	244.801.215.351	280.600.000.000	280.600.000.000	0	0
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	4.941.216.245.078	5.191.681.877.531	5.374.733.269.589	5.584.133.916.412	6.074.137.042.182	6.283.625.323.438

Sumber: Hasil analisis. 2021



Kebijakan Alokasi Anggaran

Pada tahapan Rancangan Teknokratik RPJMD ini, kapasitas kemampuan keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas, yaitu:

a) Prioritas pertama

Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;

Sedangkan belanja mengikat atau *mandatory expenditure* digunakan untuk belanja pegawai Belanja dan belanja RSUD BLUD.

b) Prioritas kedua

Prioritas kedua ini dialokasikan untuk membiayai pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

c) Prioritas ketiga

Prioritas ketiga merupakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Rencana penggunaan kapasitas keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.20 Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Uraian	TAHUN 2021	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas Keuangan Daerah:	4.941.216.245.078	5.201.464.335.847	5.374.733.269.589	5.584.133.916.412	6.074.137.042.182	6.283.625.323.438
- Prioritas I	2.322.371.635.187	2.397.154.093.503	2.526.124.636.707	2.624.542.940.714	2.854.844.409.826	2.953.303.902.016
- Prioritas II	1.482.364.873.523	1.546.764.927.865	1.612.419.980.877	1.675.240.174.924	1.822.241.112.655	1.885.087.597.031
- Prioritas III	1.136.479.736.368	1.185.853.111.363	1.236.188.652.005	1.284.350.800.775	1.397.051.519.702	1.445.233.824.391

Sumber: Hasil analisis.



BAB IV



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan yang tidak bisa terlepas dari segala perubahan tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Tiap aspek didalam tata kehidupan nasional maupun skala daerah relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis. Respon yang efektif terhadap dinamika perubahan terutama untuk menghadapi tantangan potensial dan menangkap peluang sangat penting agar cita-cita dan harapan bersama untuk mewujudkan masa depan lebih baik bagi Provinsi Kalimantan Tengah kedepannya. Tantangan dan ancaman sebagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu tahap identifikasi masalah sangat berperan penting dalam proses perencanaan sebelum melakukan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan dan disepakati bersama dalam proses perencanaan sebelum melakukan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Tujuan dari rumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari PD.

Capaian pembangunan di berbagai sektor belum sepenuhnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada periode pembangunan jangka menengah Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019 lalu.

Adapun permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, sebagai berikut :

4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Terjadinya Perlambatan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami perlambatan, dimana pada tahun 2019 LPE Provinsi Kalimantan Tengah hanya mencapai 6,16 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,52 persen dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 5,64 persen. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2018 ke tahun 2019, namun LPE Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 lebih kecil sebesar 0,85 persen bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015 yang mencapai 7,01 persen. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menaikkan LPE Provinsi Kalimantan Tengah di tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, pada Tahun 2018 terjadi perlambatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah dimana LPE Provinsi Kalimantan Tengah hanya mencapai 5,65 persen, meski mengalami perlambatan. Ada sektor-sektor yang tetap tumbuh secara signifikan diantaranya dari sektor Pengelolaan Air, pengolahan Sampah dan Daur ulang Sebesar 8,09 persen, Jasa pendidikan 8,71 persen dan Real Estate menjadi 8,66 persen. Sektor yang mengalami penurunan yang cukup besar adalah pada sektor Pertambangan dan penggalan -0,02 persen, jasa keuangan dan asuransi yang turun 6,74 persen dari tahun sebelumnya dengan angka 8,88 persen turun menjadi 2,14 Persen disusul oleh sektor Pengolahan yang ikut mengalami penurunan menjadi 5.03 persen. Sedangkan

pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,16 persen dimana 3 (tiga) sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (20,03 persen); sektor industri pengolahan (14,97 persen) dan sektor perdagangan besar-eceran, reparasi mobil sepeda motor (13,27 persen).

Selain Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami perlambatan LPE, beberapa kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah juga pada tahun 2019 Laju Pertumbuhan Ekonominya mengalami penurunan, diantaranya Kotawaringin Barat, Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Seruyan, Katingan, Barito Timur dan Kota Palangkaraya.

2. Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Memperhatikan angka TPT Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) tahun terakhir, perlu mendapat perhatian khusus oleh *stakeholders* ketenagakerjaan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan, utamanya dalam mengatasi jumlah pengangguran. Adanya penurunan angka TPT pada tahun 2017 dan 2018, hal itu berarti terdapat banyak lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, swasta dan pihak lainnya. Namun berdasarkan data BPS, agustus 2019 TPT meningkat 0,09% dari agustus 2018. Peningkatan ini bisa diindikasikan bahwa terdapat penambahan jumlah angkatan kerja yang belum dapat terserap oleh lapangan pekerjaan. Jumlah angkatan kerja yang belum dapat terserap inilah yang seyogyanya bisa terdata secara lebih akurat agar bisa diberi pelatihan khusus ataupun diarahkan terhadap lapangan pekerjaan yang sesuai. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pengangguran juga berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan.

3. Distribusi Pendapatan Penduduk Belum Merata

Pemerataan pendapatan yang ditunjukkan oleh indeks gini di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2015 sampai dengan 2019 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 indeks gini meningkat menjadi 0,347 dari semula 0,300 di tahun 2015. Pada tahun-tahun berikutnya mengalami fluktuasi dan pada tahun 2019 mencapai 0,340.

4.1.2 Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

Masalah pokok pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah antara

lain sebagai berikut:

- a. Menurunnya APM untuk jenjang sekolah SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Dimana APM SMP pada tahun 2019 hanya mencapai 77,71% atau mengalami penurunan sebesar 8,05% bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 85,76%. Untuk APM SMA/MA/SMK juga demikian, dimana pada tahun 2019 hanya mencapai 53,82% atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 77,56%.
- b. Menurunnya Angka Partisipasi Kasar untuk semua jenjang pendidikan Dimana APK SD pada tahun 2015 mencapai 117,60%, namun pada tahun 2019 angkanya turun menjadi hanya 110,05%. APK SMP/MTs pada tahun 2019 hanya mencapai 88,74% atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 96,44%. Begitu juga dengan APK SMA/MA/SMK, dimana pada tahun 2019 hanya mencapai 82,27% atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 92,38%.
 - a. Cenderung menurunnya Rasio Guru terhadap Murid untuk jenjang (SD), (SMP) dan (SMK).
 - b. Belum meratanya distribusi guru antar daerah.
 - c. Kendala ketercapaian kualifikasi tenaga pendidik PAUD ini karena sebahagian besar tenaga pendidik PAUD ber-Ijazah SLTA terutama PAUD yang berada di pedesaan dan Guru-Gurunya pun merupakan Guru honorer dari masyarakat setempat yang rela dan ingin mengabdikan demi kemajuan Pendidikan Anak Usia Dini di daerahnya.
 - d. Sekolah yang minimal memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan, secara khusus SD dan SMP ini terletak di daerah pedesaan, terpencil dan sangat terpencil maka sangat sulit untuk memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan, dan juga guru-guru masih banyak yang kurang, secara khusus sekolah di daerah pedesaan, apalagi sarana dan prasarana belajarnya. Namun pada tahun 2019 sekolah SD dan SMP yang terakreditasi sebesar 65% terealisasi sebesar 65%.
 - e. Orang tua dari anak yang cacat enggan menyekolahkan anaknya karena sekolah SLB hanya berada di kabupaten/kota saja dan

sangat sulit dalam hal pendataan penduduk cacat dan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar tingkat partisipasi bersekolah atau APK sebesar 95,05%.

2. Bidang Kesehatan

Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi: Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum meliputi:

- a. Masalah Kesehatan yang disebabkan penyakit menular, tidak menular dan bencana;
- b. Pembiayaan kesehatan masih belum memenuhi kebutuhan minimal untuk meningkatkan capaian kinerja kesehatan;
- c. Jumlah distribusi dan kompetensi tenaga kesehatan masih kurang
- d. Jumlah sarana, prasarana dan peralatan kesehatan medis dan non medis masih kurang
- e. Belum optimal mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- f. Akses layanan yang terhambat karena kemampuan masyarakat yang terbatas
- g. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan masih kurang
- h. Koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program serta pihak swasta belum optimal
- i. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan belum optimal
- j. Masih banyaknya ibu hamil yang melahirkan dirumah dan ditolong oleh tenaga dukun.
- k. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman.
- l. Rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya melahirkan pada sarana kesehatan atau ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten dalam mengurangi resiko melahirkan.
- m. Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang terutama di daerah terpencil .
- n. Masih kurangnya SDM di Puskesmas untuk melakukan penjangkaran kesehatan anak sekolah.

Adapun Permasalahan kesehatan dapat diuraikan lebih detail

sebagai berikut :

- a. Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan
 - 1) Menurunnya rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 jumlah penduduk, dimana pada tahun 2017 rasionya mencapai 1,01 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 0,91.
 - 2) Masih terbentur jadwal akreditasi sarana pelayanan kesehatan rumah sakit.
 - 3) Permasalahan yang ada pada RS baru beroperasi belum siap untuk di akreditasi RS karena persyaratan dikenai pada RS yang akan memperpanjang ijin operasional.
 - 4) Belum terpenuhinya jumlah dan kualifikasi SDM terutama apoteker di RS sesuai persyaratan peraturan yang berlaku.
- b. Tenaga kesehatan
 - 1) Cenderung menurunnya rasio dokter per jumlah penduduk, dimana pada tahun 2016 rasionya mencapai 22,23 persen, namun pada tahun 2018 turun menjadi 19,81 persen, meskipun pada tahun 2020 meningkat menjadi 25,42% tetapi angka ini belum mencapai target atau standar minimal yaitu 45/100.000 penduduk serta adanya masalah penyebaran distribusi yang tidak merata.
 - 2) Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang terutama di daerah terpencil yang masih kurang. Hal ini antara lain disebabkan kurang berminatnya tenaga dokter dan dokter spesialis untuk di tempatkan di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di kabupaten; dan disisi lain ditemui masalah kurangnya kemampuan daerah untuk mendatang tenaga dokter spesialis dasar maupun spesialis penunjang untuk di tempat di rumah sakit daerah atau rumah sakit kabupaten.
- c. Kesehatan Ibu dan Bayi/Balita
 - 1) Masih tingginya angka prevalensi gizi buruk, angka stunting, angka kematian ibu dan bayi.
 - 2) Masih banyaknya ibu hamil yang melahirkan dirumah dan ditolong oleh tenaga dukun.
 - 3) Rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya melahirkan pada sarana kesehatan atau ditolong oleh

tenaga kesehatan yang kompeten dalam mengurangi resiko melahirkan.

- 4) Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman.
 - 5) Masalah pendataan juga masih menjadi kendala utama untuk prevalensi gizi buruk, angka stunting, angka kematian ibu dan bayi
- d. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Puskesmas
- 1) Belum terpenuhinya jumlah dan kualifikasi SDM terutama apoteker dan dokter gigi di Puskesmas sesuai persyaratan peraturan yang berlaku..
 - 2) Masih kurangnya SDM di Puskesmas untuk melakukan penjangkaran kesehatan anak sekolah.
 - 3) Sistem pencatatan dan pelaporan di puskesmas terkait lansia yang belum maksimal.
 - 4) Masih terbentur jadwal akreditasi sarana pelayanan kesehatan puskesmas.
 - 5) Komitmen akreditasi puskesmas masih pada level manajemen puskesmas.
 - 6) Keterbatasan anggaran untuk memenuhi persyaratan standar Puskesmas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.
 - 7) Dukungan data sarana prasarana Puskesmas yang mendukung akreditasi belum tervalidasi serta masih kurang dan memenuhi standar
 - 8) Masih banyak puskesmas yang belum ada jaringan internetnya sehingga komunikasi data dilakukan secara offline atau manual.
- e. Belum ada regulasi terkait lansia yang mendukung di kabupaten/kota sehingga dukungan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana dan kegiatan belum menjadi prioritas.
- f. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular
- 1) Adanya peningkatan jumlah penderita TB dengan Multi Drug Resistant (MDR) yang sulit disembuhkan.
 - 2) Dari seluruh penderita TB Paru yang diobati terdapat beberapa yang tidak berobat sampai sembuh dikarenakan beberapa hal,

antara lain tidak melakukan follow up pada akhir pengobatan, putus berobat di tengah “jalan”, gagal dalam pengobatan (kuman kebal obat), serta pindah ke luar daerah (propinsi lain) sebelum sembuh sehingga dimungkinkan masih ada menularan bagi masyarakat lainnya.

- 3) Pada pengobatan TB penemuan kasus tidak berjalan secara maksimal.
- 4) Kemampuan petugas untuk menjangkau seluruh masyarakat sangat terbatas sehingga ada kasus TB di masyarakat yang tidak termonitor.
- 5) Kesiapan pasien (dukungan lingkungan dan keluarga) untuk memulai pengobatan kasus TB.
- 6) Masih adanya terjadi KLB Demam Berdarah (DBD)
- 7) Masih rendahnya capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota <50% untuk indicator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi , Diabetes Melitus, Orang Terduga Tuberkulosis, dan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)
- 8) Pandemi COVID-19 menjadi permasalahan terberat yang melanda seluruh negara termasuk Indonesia. Faktor terberatnya adalah belum adanya pengetahuan khusus terkait perilaku virus penyebabnya, sehingga mengakibatkan lonjakan tak terkendali terkait kecepatan penyakit menular ini.

g. Laboratorium

- 1) Jumlah tenaga laboratorium termasuk dokter spesialis patologi klinik belum/kurang tersedia.
- 2) Instrumen yang dibutuhkan untuk akreditasi laboratorium masih banyak yang belum tersedia.
- 3) Kebutuhan alat-alat laboratorium dan reagen masih banyak yang harus dilengkapi.
- 4) Kesiapan Laboratorium kesehatan menjadi rujukan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum optimal

h. Kefarmasian

- 1) Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dan rumah sakit menunjukkan sebagian sarana masih memerlukan pembinaan untuk meningkatkan implementasi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dan rumah sakit;

- 2) Implementasi cara produksi dan distribusi yang baik di sarana kefarmasian dan alkes menunjukkan sebagian sarana masih memerlukan pembinaan untuk meningkatkan implementasi cara produksi dan distribusi yang baik;
- i. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 - 1) Banyak penduduk yang masih belum merekam data kependudukan sehingga belum bisa menjadi pesertajaminan kesehatan nasional;
 - 2) Masih banyak penduduk yang belum berminat menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN);
 - 3) Kemampuan pemerintah Kabupaten/Kota yang masih belum semua mampu untuk mencapai mencapai Universal Health Coverage (UHC)
 - 4) Dalam rangka mendukung program JKN pemerintah daerah dapat menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Provinsi 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program JKN
 - j. Sistem Rujukan Fasilitas Kesehatan yang belum terintegrasi
 - 1) Disebabkan luas wilayah dan kondisi geografis
 - 2) Rumah sakit Rujukan Regional Provinsi masih kurang
 - 3) Belum tersedianya Rumah Sakit Rujukan dengan type / kelas A.
 - 4) Baru ada satu Rumah Sakit Khusus yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - k. Pengembangan Obat Tradisional di Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1) Belum tersedianya sumber daya manusia khusus untuk obat tradisional
 - 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pada Kawasan Pusat Pengembangan Obat Tradisional bertujuan untuk Penyediaan bahan baku obat tradisional (BBOT)
 - l. Masih rendahnya kemampuan pengusaha mikro obat tradisional (UMOT) untuk menjadi pengusaha kecil obat tradisional (UKOT) dalam hal mendapatkan sertifikat dari BPOM karena keterbatasan sarana dan prasarana.
 - m. Permasalahan yang belum teratasi terkait Jaminan Kesehatan nasional (JKN), yaitu :
 - 1) Ketidaktahuan peserta JKN terhadap program Pemerintah ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap program ini.

- 2) Letak geografis dan kondisi demografi provinsi Kalimantan Tengah yang cukup beragam menyebabkan peserta JKN enggan ke FKTP dan lebih memilih bidan desa / mantri.
- 3) Masih ada masyarakat tidak mampu yang berobat dengan menggunakan SKTM (surat keterangan tidak mampu).
- 4) Tenaga kesehatan khususnya dokter, dokter gigi, farmasi, analis kesehatan masih terbatas.
- 5) Sumber listrik di area pedesaan tidak 1x24 jam sehingga pelayanan kesehatan tidak maksimal.
- 6) Tidak semua Puskesmas bisa melaporkan hasil yankes program JKN dengan P-Care dikarenakan keterbatasan sarana komputer dan jaringan internet yang tidak stabil.
- 7) Bendahara dana kapitasi notabene adalah petugas kesehatan yang minim pengetahuan untuk administrasi keuangan.
- 8) Validasi data kepesertaan sampai saat ini belum terselesaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten.
- 9) Adanya permasalahan dalam hal keterbatasan alat dan SDM yang berkualitas pada FKTP.
- 10) Pembiayaan dana operasional dan manajemen JKN di tingkat Kabupaten masih belum tersedia.
- 11) Perubahan jumlah kuota kepesertaan PBI APBD (Jamkesda Kabupaten) terkait anggaran sehingga banyak peserta lama yang harus dikeluarkan dari kepesertaan.
- 12) Ada beberapa FKTP dimana angka rujukan masih di atas 5% dikarenakan ketersediaan obat dan sumber daya manusia yang masih kurang.
- 13) Masih ada beberapa FKTP yang mengajukan klaim non kapitasi belum dapat terbayarkan dengan baik.
- 14) Terdapat FKTP yang belum tepat waktu dan belum teratur mengirimkan beberapa laporan yang telah di sepakati sebelumnya, seperti laporan buku kas bendahara dana kapitasi JKN tiap FKTP, laporan penggunaan realisasi dana kapitasi tiap FKTP dan laporan bulanan JKN tiap FKTP.
- 15) Kepesertaan di data base BPJS yang terbaru menyatakan bahwa status seorang peserta aktif namun setelah dilakukan pengecekan di FKTP menyatakan bahwa status kepesertaan BPJS nya sudah non aktif (data yang diterima dari BPJS tidak sesuai dengan lapangan).

- 16) Masih susah akses untuk membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah.
 - 17) Data jumlah kunjungan JKN rawat jalan dan rawat inap tidak sesuai rekapan data antara Puskesmas dan BPJS disebabkan data input P-Care dan Pustu terlambat..
- n. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan obat yaitu :
- 1) Masih banyaknya pelaku usaha tradisional belum memiliki izin dikarenakan untuk memperoleh izin harus memenuhi standar CPOTB terkait bangunan.
 - 2) Kebutuhan SDM untuk pengembangan Kawasan Pusat Pengembangan Obat Tradisional Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 3) Bahan baku obat tradisional masih diperoleh dari alam liar bukan dari budi daya, karena untuk bahan baku pembuatan obat tradisional harus memenuhi standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).
 - 4) Belum terbentuk Asosiasi untuk pelaku usaha obat tradisional.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pokok pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

- 1) Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan maupun rusak berat. Hal tersebut terlihat dari total panjang jalan provinsi sepanjang 1272,08 km, kondisi permukaan jalan baik pada tahun 2020 adalah 502,90 km, kondisi sedang sepanjang 500,29 km, kondisi rusak ringan sepanjang 246,09 km dan kondisi rusak berat sepanjang 22,80 km, yang diakibatkan muatan melebihi dari batas MST 8 ton, sehingga terjadi penurunan kinerja jalan. Peningkatan lintas harian rata-rata dan angkutan menuntut untuk menambah kapasitas jalan.
- 2) Belum Optimalnya pemanfaatan jalan-jalan lokal dan kabupaten yang telah ada untuk menunjang perdagangan, perkebunan, dan pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Belum optimalnya pelayanan jalan provinsi karena meningkatnya jumlah lalu lintas dan angkutan Barang yang Over Dimensi dan Over Load (ODOL).
- 4) Rendahnya kapasitas pelayanan kinerja jalan provinsi di wilayah outlet (pelabuhan, bandara, dll) yang mengakibatkan percepatan terjadinya

- kerusakan jalan.
- 5) Belum optimalnya fungsional jalan pada saat musim hujan (terjadi banjir) sehingga pelayanan jalan terganggu (tidak bisa dilewati).
 - 6) Perlunya peningkatan status jalan di beberapa ruas jalan provinsi dan kabupaten untuk mendukung kegiatan pengembangan kegiatan strategis.
 - 7) Rendahnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Penyediaan Akses Sanitasi dan Air Minum Layak.
 - 8) Belum optimalnya fungsi drainase di beberapa Wilayah Perkotaan di Kalimantan Tengah sebagai sarana pengendali genangan air.
 - 9) Belum optimalnya penataan dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 10) Luasnya wilayah Kalimantan Tengah dan jarak antar kabupaten/kota yang cukup jauh sehingga sampai saat ini belum memiliki SPAM, SPAL skala regional maupun lintas kabupaten kota. Masih kurangnya penyediaan infrastruktur dan layanan air minum dan sanitasi layak dan aman
 - 11) Masih kurangnya kualitas bangunan cagar budaya dan bangunan monument sejarah pada kawasan strategis di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai elemen fisik yang mampu berperan dalam bentuk citra dan identitas/ikon di Provinsi Kalimantan Tengah
 - 12) Terbatasnya kemampuan Pemda dalam mengelola dan memelihara Infrastruktur Keciptakarya yang sudah dibangun
 - 13) Belum optimalnya pemanfaatan air untuk irigasi dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan.
 - 14) Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Kahayan dan Sungai Seruyan sehubungan dengan belum selesainya penetapan aturan/regulasi..
 - 15) Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur air baku untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat.
 - 16) Mundurnya garis pantai di beberapa kabupaten akibat abrasi sehingga berpotensi mengancam permukiman dan infrastruktur di sekitarnya sehingga pembangunan abrasi pantai perlu dilanjutkan pembangunannya.
 - 17) Masih kurangnya infastruktur Pengendali Banjir dan Drainase Primer, kawasan perkotaan maupun persawahan;
 - 18) Belum terbentuknya Lembaga yang menangani masalah Pengelolaan

Sumber Daya Air di tingkat Kabupaten dan Provinsi, misalnya Komisi Irigasi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air .

- 19) Kurang aktifnya Lembaga yang sudah terbentuk, misalnya peran aktif Perkumpulan Petani Pemakai Air yang masih perlu pembinaan.
- 20) Perlunya memaksimalkan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan pelengkap lainnya, guna mempertahankan “FUNGSI “ infrastruktur yang sudah dibangun agar tetap terjaga kelestariannya.
- 21) Dukungan berkelanjutan kegiatan Operasi dalam menangani Pengelolaan Infrastruktur yang ada guna kelengkapan data Kinerja Jaringan dan Bangunan pelengkap untuk perencanaan penanganan di Tahun berikutnya
- 22) Kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala lahan kewenangan Provinsi belum optimal pada jaringan irigasi (saluran primer dan saluran sekunder) di 34.125 Ha
- 23) Belum optimalnya pemeliharaan pos hidrologi yang sudah tersedia.
- 24) Perencanaan Tata Ruang (RTRW) belum sepenuhnya mengakomodir kegiatan di Kawasan Budidaya Non Hutan
- 25) Masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- 26) RTRW Kabupaten/Kota belum dijabarkan operasional secara detail dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga perangkat untuk pengendalian tata ruang belum berjalan maksimal
- 27) Banyak indikasi program dalam Perda RTRWP tidak direalisasikan ke dalam program SOPD terkait
- 28) Masih banyaknya ketidaksinkronan antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota
- 29) Masih kurangnya pelatihan maupun sertifikasi terhadap tenaga-tenaga ahli konstruksi dalam peningkatan kualitas dan kapasitas dalam rangka menunjang pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah.
- 30) Pelayanan informasi di bidang jasa konstruksi masih belum dikelola dengan baik sehingga perlu dilakukan pelatihan bagi administrator.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, antara lain:

- 1) Masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH). Berdasarkan data yang di olah dari BPS, Susenas tahun 2020, jumlah RLH di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 366.112 Unit (51,97%) yang di hitung

berdasarkan 4 indikator yakni ketahanan bangunan, luasan bangunan, akses air minum dan akses sanitasi. Persentase RLH ini didapat berdasarkan rumus jumlah RLH dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%.

- 2) Masih rendahnya rasio Rumah Layak Huni (RLH). Jika di hitung berdasarkan rumusan Permendagri 86 Tahun 2017, yakni jumlah RLH dibagi jumlah penduduk. Data terakhir tahun 2020 menunjukkan angka Rasio RLH sebesar 1:7,34 jika dihitung berdasarkan indikator MDGs.
- 3) Implementasi SPM bidang Perumahan masih dalam tahapan perencanaan/pengumpulan data. Jenis layanan SPM perumahan adalah: 1.) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, 2.) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.
- 4) Masih terdapat kawasan kumuh 10-15 Ha yang menjadi kewenangan provinsi.
- 5) Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak.
- 6) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

5. Keamanan dan Ketertiban Umum

Masalah ketentraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan demokrasi masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Permasalahan keamanan dan ketertiban umum yang ditemui adalah masih tingginya jumlah tindak pidana di Provinsi Kalimantan Tengah. Data menunjukkan pada tahun 2019 jumlah tindak pidana di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 2.362 kasus.

Upaya penurunan konflik dilakukan dengan melakukan pemilihan strategi, kebijakan, dan program yang tepat dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi (mitra kerja) yang dibentuk untuk keperluan tersebut seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam pencegahan dini. Namun demikian jika konflikpun terjadi maka akan diusahakan agar cepat diselesaikan secara optimal agar tidak berdampak luas.

a. Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Beberapa permasalahan berdasarkan capaian kinerja terkait penanggulangan bencana dan kebakaran, yaitu:

- 1) Wilayah Kalimantan Tengah sebagian besar merupakan daerah rawan bencana (dataran rendah dekat DAS, Gambut), dan sebagian besar masyarakat tinggal di daerah rawan bencana tersebut
- 2) Masih kurangnya upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, terutama masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
- 3) Belum semua daerah rawan bencana mempunyai
- 4) alat system peringatan dini (EWS)
- 5) rambu petunjuk jalur evakuasi
- 6) Papan Informasi
- 7) Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang bersifat preventif BPBD Provinsi Kalimantan Tengah dan BPBD kab/Kota
- 8) Sarana prasarana, peralatan pendukung PB masih sangat minim
- 9) Masih terbatasnya bufferstock logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kalimantan Tengah
- 10) Belum semua tersusun pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah
- 11) Terbatasnya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Prov Kalteng
- 12) Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kalimantan Tengah
- 13) Masih perlu ditingkatkan peran serta masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah utamanya pada masa pra dan pasca bencana
- 14) Masih perlunya sinergi penyelenggaraan penanggulangan bencana

secara lintas sektor dan lintas wilayah

- 15) Masih perlunya sinergi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lintas sektor dan lintas wilayah

6. Bidang Sosial

Permasalahan bidang sosial, yaitu masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini disebabkan oleh: (1) Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran; (2) Belum optimalnya penanganan bencana sosial; (3) Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan *human trafficking*; (4) Belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial; (5) Masih rentan terhadap konflik sosial; dan (6) Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Selain itu, masalah lain pada bidang sosial, yaitu:

- a. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum sepenuhnya akurat *By Name By Address* (BNBA), sehingga ketepatan sasaran belum maksimal.
- b. Alokasi dana APBD untuk pembangunan kesejahteraan sosial baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se Kalimantan Tengah masih terbatas, sehingga penanganan PMKS masih tergantung pada dana APBN.
- c. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial provinsi dalam melakukan kegiatan di kabupaten/kota memerlukan proses koordinasi dalam waktu yang cukup lama, sehingga pelaksanaan kegiatan memuncak pada akhir tahun anggaran.

4.1.2.2 Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1. Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan pokok pada bidang tenaga kerja antara lain:

- a. Menurunnya Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Agustus tahun 2019 jumlah angkatan kerja hanya sebesar 1.384.675 orang, atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada february tahun 2019 yang mencapai 1.416.187 orang.
- b. Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada Agustus tahun 2019 mencapai 69,68 persen atau mengalami

penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada Agustus tahun 2018 yang mencapai 70,03 persen.

- c. Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2019 TPT di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 4,10 persen (386.761 orang) atau mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 4,01 persen.

Permasalahan pokok diatas pada umumnya disebabkan oleh:

- a. Pengangguran banyak didominasi lulusan SMK akibat *missmatch* (tidak sesuai) dengan kebutuhan industri atau perusahaan.
- b. Kesempatan kerja terbatas.
- c. Masih tingginya penduduk yang bekerja di sektor informal.
- d. Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja.
- e. Banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia.
- f. Kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri.
- g. Proporsi penduduk bekerja yang tergolong pekerja rentan/ *vulnerable employment* cukup tinggi lebih dari 50 persen.
- h. Penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam per minggu lebih tinggi dibanding laki-laki.
- i. Pencari kerja lebih memilih bekerja di perkotaan dibanding perdesaan.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, yaitu:

- a. Menurunnya Indeks Pembangunan Gender. Pada tahun 2019 hanya mencapai 89,09 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 89,13 persen. Selain itu, Nilai IPG Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2015-2019 selalu di bawah nilai capaian IPG nasional.
- b. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya partisipasi perempuan di lembaga swasta yaitu hanya mencapai 80,85 persen pada tahun 2019, atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 94,51 persen.
- c. Masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap

- perempuan.
- d. Kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender.
 - e. Kultur masyarakat yang berkembang, yaitu budaya patriarki yang merupakan kekuasaan oleh laki-laki terhadap perempuan.
 - f. Menurunnya persentase perangkat daerah yang memiliki sistem data gender dan anak. Data mencatat bahwa pada tahun 2018 presentase perangkat daerah yang memiliki sistem data gender dan anak mencapai 27,91 persen, namun pada tahun 2019 turun menjadi 18,60 persen.
 - g. Masih banyaknya pernikahan anak di usia dini. Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan tertinggi kedua dalam lingkup provinsi se-nasional.
 - h. Pola penanganan dalam hal penegakan hukum sulit mendapatkan keterangan dari korban karena adanya faktor budaya patriarki.
 - i. Adanya kesulitan dalam mengidentifikasi kasus karena masih adanya persepsi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.
 - j. Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai *gender machinery* di daerah belum optimal.
 - k. Keterbatasan akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan.
 - l. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dalam peformulaan dan pelaksanaan kebijakan.
 - m. Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan anggaran. Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar perangkat daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah.

3. Bidang Pangan

Pada bidang pangan ditemui beberapa permasalahan layanan, meliputi:

a. Ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan. Beberapa masalah dalam stabilisasi harga pangan pokok adalah: (1) beberapa komoditi pangan hasil budidaya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang disebabkan antara lain adalah karena berbagai keterbatasan penerapan hasil kajian/rekomendasi teknis budidaya spesifikasi lokasi dengan aplikasi lapangan untuk petani pelaku usaha budidaya, teknis bertani, permodalan, fenomena perubahan iklim, dukungan dan komitmen pihak terkait untuk membangun ketahanan pangan wilayah sampai dengan tingkat rumah tangga; dan (2) harga pangan strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional khususnya menjelang puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal di kota Palangka Raya pada beberapa komoditas mengalami kenaikan namun masih dalam batas yang wajar, seperti kenaikan bawang merah, cabe merah dan daging sapi. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan untuk konsumsi masyarakat saat menjelang puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal.

b. Kerawanan pangan di sejumlah daerah di kabupaten.

Hasil analisis FSVA provinsi tahun 2019 menunjukkan bahwa kecamatan yang cenderung lebih rentan terhadap kerawanan pangan (prioritas 3) ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Santuai dan Antang Kalang (Kabupaten Kotawaringin Timur) dan Kecamatan Sumber Barito (Kabupaten Murung Raya). Kerawanan pangan di ketiga kabupaten ini sangat berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, kerentanan pangan dan aksesibilitas menuju daerah yang terisolasi.

c. Masyarakat masih bertumpu pada 1 (satu) jenis makanan

dalam hal ini beras.

Penganekaragaman pangan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu gizi makanan dengan pola konsumsi yang lebih beragam. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat yang hanya bertumpu pada konsumsi beras saja antara lain keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga; keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi; pengaruh globalisasi industri pangan siap saji berbasis bahan impor; prinsip budaya local; serta lambatnya perkembangan dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal.

- d. Penggunaan pestisida dan bahan kimia (pengawet) pada produk pangan. Pangan yang aman merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Adapun penyebab penggunaan pestisida dan bahan pengawet pada produk pangan baik segar maupun olahan antara lain: kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan terutama pada produk pangan segar; kemudahan dalam memperoleh pestisida dan bahan pengawet (dijual bebas); standar keamanan pangan untuk buah dan sayur impor belum diterapkan; belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida dan bahan pengawet; tidak adanya kepastian hukum yang mengatur penggunaan bahan berbahaya pada produk pangan segar dan olahan sehingga tidak memberikan efek jera pada pelaku.

4. Bidang Pertanahan

Indikator yang menunjukkan masalah dalam pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program yang dilakukan untuk cakupan layanan urusan pemerintahan bidang pertanahan provinsi belum menyeluruh sehingga data capaian kinerja yang diperoleh belum maksimal.

5. Bidang Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan mendasar pada bidang lingkungan hidup, yaitu:

- a. Tingginya alih fungsi lahan yang menyebabkan deforestasi dan banjir Berbagai kegiatan investasi di Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan serta aktifitas masyarakat menyebabkan tekanan terhadap laju perubahan tutupan lahan di Kalimantan Tengah. Hasil analisis spasial terhadap perubahan tutupan lahan dari Tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa luasan areal tutupan lahan Hutan Lahan Kering Primer berkurang seluas -5.502,17 Ha, tutupan lahan Hutan Lahan Kering Sekunder 43.667,50 Ha, sedangkan areal perkebunan bertambah seluas +146.411,56 Ha selama 1 tahun. Berubahan tutupan lahan ini berdampak terhadap penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKTLH Pada Tahun 2018 sebesar 78,12 sedangkan pada Tahun 2019 turun menjadi 76,27. Indeks Kualitas Tutupan Lahan untuk Tahun 2015 sampai tahun 2017 tidak dapat dievaluasi dengan kondisi IKTL Tahun 2018 dan 2019 karena rumus perhitungannya mengalami perubahan. Dampak lingkungan yang terjadi akibat perubahan lahan ini adalah peningkatan pada saat hujan sehingga mengakibatkan volume air limpasan meningkat dan berdampak pada banjir di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Selain dampak banjir, perubahan tutupan lahan ini mengakibatkan peningkatan erosi. Tanah yang ikut terbawa aliran hujan akan masuk ke badan air, sehingga berdampak terhadap pendangkalan alur pelayaran di beberapa Sungai di Kalimantan Tengah.
- b. Kerusakan Fungsi Ekosistem Gambut
Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 35 unit KHG dengan luas 4.733.540 ha sesuai SK Menteri LHK No. n SK. 130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017.KHG tersebar di 11 kabupaten/kota dan KHG terluas berada di KHG S. Katingan - S. Sebangau, yaitu 862.240 ha (18,21%). Sedangkan kabupaten yang memiliki dataran gambut terluas adalah Kabupaten Pulang Pisau seluas 933.815 ha atau 19,75% dari total luas gambut di Kalimantan Tengah. Secara umum 35 unit KHG memiliki tutupan lahan yang didominasi oleh hutan rawa

seluas 851.134 ha, semak belukar seluas 774.730 ha, dan hutan mangrove primer seluas 297.315 ha.

Di Provinsi Kalimantan Tengah telah terindikasi adanya kerusakan ekosistem gambut yang didominasi oleh kerusakan ringan dengan luasan 1.906.740 ha (89,71%) pada fungsi Budidaya Ekosistem gambut dan 2.467.182 ha (94,64%) pada fungsi lindung ekosistem Gambut. Area yang mengalami kerusakan (rusak berat) pada fungsi budidaya ekosistem gambut 28.204 ha dan pada fungsi lindung ekosistem gambut 18.385 ha. Sedangkan area yang tidak rusak masing-masing seluas 14.508 ha (FBEG) dan 2.497 ha (FLEG).

- c. Pencemaran air akibat buangan limbah domestik, industri dan pertanian

Faktor pemicu terjadinya penurunan kualitas air di Kalimantan Tengah adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya usaha/kegiatan industri pengolahan dan ekstraktif, rendahnya anggaran pengawasan serta masih minimnya sarana pengolahan limbah domestik dari rumah tangga di perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk akan memicu pada peningkatan volume limbah domestik dan menjadi penyebab peningkatan beban pencemaran di sungai.

Selain itu yang mempengaruhi penurunan kualitas air adalah limbah dari pabrik pengolahan kelapa sawit, pertambangan, penggunaan pupuk & pestisida. Data tahun 2019 menunjukkan ada 104 unit pabrik pengolahan TBS kelapa sawit dengan kapasitas 6.488 ton per jam dan 2 unit pengolahan CPO menjadi minyak goreng dengan kapasitas 3.000 ton per jam. Pabrik pengolahan ini tersebar di hampir semua kabupaten. Penggunaan pupuk di perkebunan besar kelapa sawit akan mempengaruhi kualitas air baik air tanah ataupun air permukaan. Saat ini ada telah tertanam lebih dari 1,7 juta ha oleh tanaman kelapa sawit dan karet. Penggunaan pupuk nitrogen dan fosfor yang tidak hati-hati akan dapat mencemari sumber air dan perairan. Demikian juga limbah pengolahan pertambangan baik yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan ataupun pertambangan rakyat dapat mempengaruhi kualitas air. Akibat dari tekanan terhadap penurunan kualitas air yang cukup tinggi, berdampak pada

penurunan kualitas air, hal ini ditunjukkan dari nilai IKA (Indeks Kualitas Air). Parameter Kualitas Air, yang diukur dalam penentuan IKA adalah TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan *Total Coliform*. Nilai IKA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar 61,15 (cukup baik) dan Tahun 2019 sebesar 56,80 (kurang baik).

d. Rendahnya pengelolaan persampahan

Perkembangan perkotaan di Kalimantan Tengah cukup signifikan karena banyaknya aktivitas ekonomi dan pemerintahan yang terkonsentrasi di kota provinsi ataupun kabupaten/kota. Konsekuensi dari konsentrasi penduduk di perkotaan ini tentunya akan menimbulkan dampak lingkungan. Penduduk Kalimantan Tengah tahun 2019 mencapai 2.605.274 jiwa dengan 498.688 rumah tangga. Konsentrasi penduduk terbesar terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, Kotawaringin Barat dan Palangka Raya. Kepadatan penduduk masih sangat kecil yaitu 17 jiwa per km². Kabupaten terpadat adalah Palangka Raya dengan nilai 115 jiwa per km².

Berdasarkan data proyeksi penduduk dari BPS di atas, dan asumsi jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 0,7 kg/orang/hari maka jumlah sampah di Kalimantan Tengah perhari yang dihasilkan pada tahun 2018 sebanyak 1.862,25 ton/hari sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 1.900,40 ton/hari.

Permasalahan sampah ini berdampak pada terbentuknya kawasan- kawasan kumuh di perkotaan. Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah (Disperkimtan) terdapat 111 kawasan kumuh yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan luasan mencapai 7.871,45 Ha. Terkait dengan masalah persampahan, pada periode tahun 2018-2019 hanya ada 2 (dua) dari 14 kabupaten/kota yang mampu memperoleh penghargaan ADIPURA untuk klasifikasi kota kecil, yaitu Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di perkotaan masih belum maksimal dan terlaksana dengan baik.

6. Bidang Perhubungan

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada bidang perhubungan, yaitu:

- a. Belum adanya Pelabuhan Utama di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang langsung dapat melakukan kegiatan ekspor impor barang, mengingat saat ini Pelabuhan yang ada hanya Pelabuhan Pengumpul, Pengumpuan dan Lokal.
- b. Bandar Udara yang ada belum optimal dalam pemberian pelayanan jasa transportasi udara.
 - 1) Bandar Udara Tjilik Riwut merupakan bandar udara yang berada di Palangka Raya yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, guna menunjang bandar udara menjadi bandara udara internasional. Sebagai embarkasi dan debarkasi angkutan haji serta pendukung program *food estate* diperlukan perpanjangan Landasan Bandar Udara Tjilik Riwut sepanjang 500 meter dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter lebar 45 meter
 - 2) Bandar Udara Iskandar merupakan bandar udara milik angkatan udara jangka panjang tidak bisa dikembangkan lagi dikarenakan keterbatasan lahan (ujung landasan bandara terdapat jalan dan jurang dan mulai padat penduduk) sehingga perlu dikembangkan ke daerah yang strategis ke sebuai guna mendukung objek wisata taman nasional tanjung puting sebagai tujuan wisata internasional, wisata pantai bogam raya, serta situs sejarah Kerajaan Kutaringin.
 - 3) Kondisi saat ini Bandara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya masih dalam proses pembangunan, diharapkan dukungan anggaran pusat (APBN) dalam penyelesaiannya mengingat Bandara Tira Tangka Balang merupakan salah satu Bandara penopang Ibukota Negara Baru di Provinsi Kalimantan Timur.
 - 4) Bandara sebuai diharapkan dapat melayani ekspor dan impor bagi 5 kabupaten *hinterland* yaitu Sukamara, Lamandau, Seruyan, Ketapang Dan Kayong Utara (kabupaten baru).
 - 5) Melihat dari kondisi Bandar Udara yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat perlu dikembangkan kedepan dan mengingat Bandar Udara masih berada di bawah Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara dalam hal pembangunan dan pengembangannya

- c. Penurunan jumlah penumpang dan barang ASDP di Kalimantan Tengah. Dari data yang diperoleh pada tahun 2019 terdapat penurunan jumlah angkutan barang yang meliputi angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Kalimantan Tengah yakni 2,5% dari target capaian yang telah ditetapkan yaitu 10% per tahun. Penurunan ini terjadi akibat dari seiring bertambahnya jalan atau angkutan jalan dengan aksesibilitas yang mudah, murah dan cepat mengakibatkan pengguna angkutan sungai berpindah ke angkutan jalan serta tingginya target yang telah ditetapkan. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Bahaur menjadi pelabuhan regional diharapkan mampu untuk menjadi pelabuhan outlet untuk mengangkut hasil panen berupa padi, singkong, dll guna menunjang program strategis nasional (*food estate*) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas.
- d. Hingga saat ini keberadaan terminal tipe B yaitu di Terminal Natai Suka Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat dan Terminal Sanggu Buntok Kabupaten Barito Selatan belum tertata dengan baik (kurang menarik) sehingga perlu adanya rehabilitasi/perbaikan dan pembangunan terminal mengingat terminal ini juga merupakan ikon daerah yang dapat memberikan pelayanan yang baik dan nyaman buat masyarakat yang menggunakan.
- e. Belum adanya pembangunan jalur kereta api di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah baik untuk kepentingan mobilitas orang maupun barang.
- f. Masih kurangnya fasilitas keselamatan jalan dibandingkan panjang jalan dan jumlah kebutuhan.
- g. Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai 11 (sebelas sungai) besar terdapat beberapa dermaga sungai yang kondisinya rusak perlu Rehabilitasi/Pembangunan Dermada Sungai guna memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang untuk turun naik dan bongkar muat barang.
- h. Belum adanya Rencana Aksi Keselamatan (RAK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (akan disusun Peraturan Gubernur Kalimantan

Tengah Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Keselamatan (RAK).

7. Bidang Komunikasi dan Informatika

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada bidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian yaitu:

- a. Pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi masih belum memberikan hasil signifikan terhadap kebutuhan masyarakat, hal ini terkait kurang dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- b. Belum Optimalnya tata kelola Komunikasi dan Informasi di Kalimantan Tengah antara lain :
 - 1) Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia TIK
 - 2) Tata kelola GSP, Media Center dan Data Center
 - 3) Tata Kelola *e-Government* yang Integrasi ke Aplikasi SPBE
- c. Belum optimalnya tata kelola Statistik Sektoral antara lain;
 - 1) Tugas sebagai walidata, terkait masih belum terbentuknya forum data.
 - 2) Pengembangan satu data Indonesia di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
 - 3) Penguatan Kelembagaan.
- d. Perlunya peningkatan / pengembangan Infrastruktur persandian dan diklat Sumber Daya Manusia (Sandiman) serta pengamanan sistem informasi.
- e. Kurang optimalnya penerapan *e-Government* sebagaimana telah diatur dalam Pepres 9 Tahun 2018 tentang SPBE.

8. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Proses penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Kalimantan Tengah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Wilayah geografis Kalimantan Tengah yang sangat luas, dengan pemukiman penduduk yang terpencar dan konektivitas/mobilisasi sangat terbatas;
- b. Pemahaman substansi masyarakat dan aparat pada materi administrasi kependudukan masih rendah. Sosialisasi berbagai kebijakan di bidang administrasi kependudukan ke berbagai kalangan belum maksimal. Pemahaman masyarakat tentang pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil umumnya masih sering terjadi adanya kerancuan, meskipun keduanya ada keterkaitan tetapi masing-masing merupakan

- domain yang berbeda. Pendaftaran penduduk lebih ditekankan kegiatan administratif untuk identifikasi penduduk menurut domisili, sedangkan pencatatan sipil menekankan kepada aspek hukum yang menentukan status keperdataan seseorang atas peristiwa yang dialaminya;
- c. Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan keberadaan pengaturan atas perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya memerlukan proses transisional, dengan disertai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat sasaran melalui berbagai media sosialisasi. Di tingkat operasional, standarisasi prosedur penggunaan kegiatan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi masih belum optimal;
 - d. Perubahan peraturan dan kebijakan di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebabkan perubahan mendasar pada sistem dan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perubahan Peraturan Perundang-undangan Administrasi Kependudukan tentang sistem pelayanan yang cepat, mudah dan bebas dari pungutan belum disosialisasikan secara optimal;
 - e. Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Pada umumnya masyarakat menganggap prosedur pengurusan dokumen kependudukan masih panjang (berbelit-belit), kurang transparan (masih dipenuhi dengan pengaturan yang tidak jelas), dan pelayanan yang dilakukan belum memperhatikan prinsip pelayanan yang baik (mudah, murah, cepat, berkeadilan, dan ramah terhadap pelanggan);
 - f. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan tertib administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota masih rendah. Standar Kompetensi dan jenjang karir SDM yang berkaitan dengan pengelolaan dan perencanaan TIK masih belum diatur secara tegas, dengan adanya SDM yang ditugaskan menangani TIK untuk tertib administrasi kependudukan, tetapi tidak sesuai dengan kompetensinya. SDM pengelola SIAK (petugas/operator) di Kabupaten/Kota umumnya seringkali pindah/mutasi tanpa pertimbangan kompetensi yang menggantikannya, dimana SDM yang sudah dilatih dalam pemanfaatan TIK untuk tertib administrasi kependudukan dipindah ke unit lain dan pegawai yang menggantikannya belum memahami apa yang mesti

- diperbuat;
- g. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan kelengkapan sarana pendukungnya di Kabupaten/Kota dan Kecamatan, menyebabkan rendahnya dan tidak meratanya penetrasi penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Peralatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kecamatan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2011-2012 dan berumur lebih dari 9 tahun telah banyak mengalami kerusakan. Masih terdapat kecamatan yang belum mempunyai server dan perangkat KTP-El, sehingga menyulitkan penduduk untuk melakukan perekaman KTP-El. Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan hibah peralatan pencetakan dan perekaman KTP-El kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, namun jumlah dan jenisnya belum mencukupi peralatan yang dibutuhkan;
 - h. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan masih rendah. Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk kesadaran wajib melaporkan setiap perubahan status kependudukannya dan sebagian penduduk belum memiliki dokumen administrasi kependudukan;
 - i. Rendahnya penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Provinsi Kalimantan Tengah karena masih ada beberapa Kabupaten yang baru melaksanakan penerbitan KIA pada tahun 2019 yang bersumber dari dana DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan APBD Kabupaten/Kota; dan
 - j. Pelayanan administrasi kependudukan akan semakin terhambat dengan tidak dianggarkan lagi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan mulai Tahun Anggaran 2022.

9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Beberapa permasalahan yang dihadapi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu:

- a. Menurunnya persentase lembaga desa yang dibina dalam upaya pembangunan desa. Data tahun 2019 menunjukkan persentase lembaga desa yang dibina dalam upaya pembangunan desa hanya mencapai 6,30 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai

- 8,53 persen.
- b. Menurunnya persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa. Pada tahun 2019 hanya mencapai 2,00 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 2,92 persen.
 - c. Menurunnya Persentase Kelembagaan Posyantek yang terbentuk, dimana pada tahun 2018 mencapai 26 persen dan pada tahun 2019 turun menjadi 20 persen.
 - d. Belum sepenuhnya perangkat daerah yang terkait baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan sinergis secara optimal.
 - e. Masih banyaknya pelaku usaha di desa yang masih belum mengetahui dan memahami arti penting dari BUMDes itu sendiri.

10. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pokok pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi. Data tahun 2017 mencatat rasio pemakaian kontrasepsi mencapai 0,787, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 0,771.

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi:

- a. Aspek Kelembagaan Koperasi dan UMKM
 - 1) Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat disebabkan oleh faktor manajemen koperasi yang belum profesional dan belum semua koperasi di Kalimantan Tengah berkinerja baik
 - 2) Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar.
 - 3) Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan dengan secara menyeluruh oleh Gerakan Koperasi.
 - 4) Masih adanya Komunitas yang belum dimanfaatkan oleh Usaha Mikro dan Kecil.
 - 5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 - 6) Masih kurangnya jumlah koperasi sehat.
 - 7) Pemahaman Masyarakat tentang Koperasi masih kurang.

- 8) Banyaknya Koperasi yang menyalahgunakan ketentuan
 - 9) UMKM yang tidak berbadan usaha (NIB) masih sangat mendominasi
- b. Aspek Sumber Pembiayaan
- 1) Pada umumnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih belum memanfaatkan sepenuhnya pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non Bank.
 - 2) Kurangnya tanggungjawab dan pemahaman Koperasi dan UMKM terhadap bantuan hibah yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 - 3) Banyaknya Koperasi yang tidak aktif mempengaruhi penyaluran fasilitas
 - 4) Sanksi hukum tidak tegas dan tidak jelas terhadap Koperasi yang melakukan tindak pidana maupun Perdata.
 - 5) Bantuan perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM belum di Monitor dan dievaluasi lebih lanjut
 - 6) Minimnya/kurangnya informasi dari Perbankan terkait kredit
- c. Akses Pemasaran
- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro melalui pameran-pameran baik tingkat lokal maupun nasional, Promosi Kabupaten dengan Provinsi, promosi bazar Usaha Mikro.
 - 2) Mutu produk Koperasi dan Usaha Mikro belum memenuhi standar pasar.
 - 3) Produk unggulan lokal belum berdaya saing.
 - 4) Tidak tercapainya target produksi dalam pemasaran.
 - 5) Kualitas produk belum berdaya saing
 - 6) Masih terbatasnya jejaring usaha dan Pemasaran KUMKM
 - 7) Belum adanya sistem pemasaran bersama produk Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil.
- d. Aspek SDM dan Pelaku Usaha Mikro dan/Koperasi
- 1) Kurangnya jiwa wirausaha pelaku Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
 - 2) Kurangnya pengetahuan anggota tentang tata cara berkoperasi yang benar.
 - 3) Kurangnya standar kompetensi bagi pengelola gerakan Koperasi.
 - 4) Rendahnya Kewirausahaan dan Kompetensi Kapasitas SDM Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
 - 5) Rendahnya SDM Pengelola Koperasi dan UMKM
- e. Aspek Manajemen Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

- 1) Masih kurangnya aspek kemampuan SDM pelaku Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya.
 - 2) Kurang optimalnya penguasaan manajemen pengelolaan Retail koperasi.
 - 3) Pengelolaan Manajemen KSP/USP-Koperasi/KJKS/UJKS masih belum optimal.
 - 4) Kurangnya pemanfaatan Informasi Teknologi dalam pengelolaan manajemen Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
 - 5) Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
- f. Aspek Penguasaan Teknologi, Desain produk, Sertifikasi produk dan lain-lain.
- 1) Masih kurangnya kemampuan SDM Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam mendiversifikasi produknya.
 - 2) Terbatasnya informasi tentang kemajuan teknologi yang bisa dikerjakan oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
 - 3) Terbatasnya informasi teknologi yang dimiliki oleh Pelaku Usaha usaha
 - 4) Belum optimal Pemanfaatan IT sebagai salah satu sarana pemasaran dan pengembangan produk.
 - 5) Masih kurangnya inovasi yang mendukung kewirausahaan.
- g. Numenklator Dinas yang menbidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota tidak sama dengan Provinsi, sehingga kurangnya sinergitas pelaksanaan program pembangunan Koperasi dan UMKM.
- h. Masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi dan komitmen dari para pembina koperasi, baik dinas yang menbidangi Koperasi dan UMKM Provinsi maupun Kabupaten/Kota

12. Bidang Penanaman Modal

Masalah pokok penanaman modal di Kalimantan Tengah adalah menurunnya jumlah investasi PMA/PMDN. Nilai investasi berskala nasional belum optimal, yang ditunjukkan dengan data tahun 2019. Dari target Rp.42.500.000 juta, yang terealisasi hanya sebesar Rp. 10.306.700,40 juta. Selain itu, ditemui juga beberapa masalah lain yaitu:

- a. Terbatasnya infrastruktur/ sarana/ prasarana yang menunjang penanaman modal di daerah.

- b. Inventarisasi potensi unggulan daerah belum maksimal.
- c. Belum adanya konektivitas jaringan website secara online internal dan antar Dinas / Badan Instansi Perizinan dan Non Perizinan serta dengan Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah.
- d. Belum optimalnya strategi promosi dan pemanfaatan digitalisasi sarana promosi penanaman modal.
- e. Belum optimalnya pengawasan terhadap PMDN/PMA terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan kewajiban terhadap masyarakat sekitar.

13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan bidang kepemudaan dan olahraga di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Peserta pelatihan belum tepat sasaran, hal ini terlihat dari jumlah peserta pelatihan masih belum bisa menjangkau keterwakilan semua OKP yang ada.
- b. Tidak adanya skala prioritas dalam menentukan cabang olahraga yang akan dilaksanakan, sehingga cabang olahraga yang dilaksanakan dari tahun ke tahun tidak berubah.
- c. Sangat terbatasnya event olahraga masyarakat yang dapat dilaksanakan, sehingga belum mengakomodir semua kebutuhan masyarakat.
- d. Belum siapnya para atlet PPLP dan PPLP-D mengikuti event nasional maupun regional hal ini disebabkan oleh siklus regenerasi. Siklus Regenerasi adalah beberapa atlet PPLP/PPLPD merupakan atlet yang baru masuk pembinaan, sedangkan atlet yang lama sudah melewati batas usia untuk menjadi atlet PPLP/PPLPD, jadi faktor pengalaman atlet juga berpengaruh dalam perolehan medali.
- e. Apresiasi dan penghargaan yang masih rendah bagi olahragawan, pembina dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.
- f. Ketersediaan anggaran menjadi faktor utama dalam pengembangan atlet PPLP/PPLPD. Hal ini terlihat dari berkurangnya anggaran untuk pembinaan atlet yang menyebabkan cabor yang dibina berkurang.

14. Bidang Kebudayaan

Permasalahan bidang kebudayaan di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Menurunnya jumlah grup kesenian/sanggar seni, dari yang semula 336 buah pada tahun 2016, turun menjadi 315 buah di tahun 2018.
- b. Pengembangan kawasan seni budaya masih belum tuntas dilengkapi untuk fasilitasnya, sehingga belum secara optimal menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seni budaya.
- c. Pembinaan terhadap pelaku seni dan komunitas seni budaya yang belum berkelanjutan.
- d. Generasi muda belum sepenuhnya menaruh perhatian dan ketertarikan terhadap pemanfaatan budaya.
- e. Inisiatif masyarakat dalam mendukung kegiatan pelestarian seni dan budaya masih relatif rendah.
- f. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih harus ditingkatkan agar mampu bersaing dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kebudayaan dan pariwisata.
- g. Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk mendukung pengembangan di 14 kabupaten/kota.
- h. Aset/fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah belum secara signifikan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, seperti Museum Balanga, Betang Eka Tingang Nganderang, panggung teater terbuka dan gedung pameran tertutup di kawasan UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah.
- i. Belum optimalnya sarana informasi, interpretasi dan apresiasi terhadap atraksi-atraksi wisata (alam, heritage dan buatan manusia).

15. Bidang Perpustakaan

Permasalahan bidang perpustakaan di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

- a. Menurunnya jumlah buku yang dibaca di perpustakaan. Pada tahun 2019 jumlahnya hanya mencapai 88.223 ekslemplar, atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada

- tahun 2018 yang mencapai 106.109 eksemplar.
- b. Menurunnya jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan. Data mencatat bahwa pada tahun 2018 jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan mencapai 4.688 pemustaka, namun pada tahun 2019 turun menjadi hanya 4.179 pemustaka.
 - c. Jumlah bahan pustaka yang kurang memadai atau kurang lengkap, dari terbitan buku yang semakin berkembang disetiap edisi maupun judul buku-buku yang baru. Serta di tahun 2019 tidak ada pengadaan koleksi bahan pustaka, dianggarkan di tahun 2019 untuk bahan pustaka digital e-library dalam kegiatan rilis/*launcing* aplikasi I-Kalteng.
 - d. Masih kurangnya pelatihan pustakawan terhadap pengembangan dan penguasaan berbasis teknologi/IPTEK dan sistem seleksi serta pengolahan buku perpustakaan.
 - e. Dari penerbitan literatur dari kabupaten dan kota ditemui beberapa kendala, yaitu: data yang diinginkan tidak siap diakhir tahun dan sebagian data tidak ada terbitan katalognya, kurangnya SDM pengelola di daerah, kurangnya koordinasi Kerjasama, serta kurangnya pemahaman tentang biografi literatur maupun ahli media yang dibutuhkan.
 - f. Kurangnya komputer untuk penelusuran bahan pustaka yaitu Katalog Online (OPAC) yang jaringannya terjadi gangguan. Perlengkapan sarana dan prasaran serta koleksi bahan pustaka perlu dilakukan revitalisasi karena sebagian besar kurang layak untuk dipakai lagi.
 - g. Peluncuran aplikasi I-Kalteng berbasis buku digital (E-Book) masih menemui beberapa permasalahan, yaitu sebagian besar masyarakat belum mengetahui dan memahami cara mengakses sehingga perlu dilakukan sosialisasi terutama bagi pelajar; kurang dapat menjawab kebutuhan bahan pemustaka yang didominasi kaum pelajar/mahasiswa; dan koleksi bahan pustaka masih bersifat kategori umum.
 - h. Dalam pameran *Quality Expo* kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya SDM pustakawan dalam mengikuti pelaksanaan pameran dan Dispursip hanya menampilkan bahan koleksi pustaka, tetapi tidak menampilkan keunggulan I-Kalteng yang

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kurangnya promosi akan pengguna I-Kalteng.

- i. Dalam memberikan pelayanan pada pemustaka untuk penelusuran peminjaman dan pengembalian buku terjadi gangguan sistem aplikasi Inliss yang tidak tersambung dikarenakan perangkat server, gangguan listrik yang tidak stabil, server telah lama, dan perawatan server tidak pernah dilakukan.
- j. Belum maksimalnya koleksi bahan pustaka yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- k. Rendahnya informasi dari penerbit tentang bahan pustaka yang terbaru (judul-judul baru).

16. Bidang Kearsipan

Permasalahan bidang kearsipan di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Penelusuran, akusisi, dan penerapan arsip terutama di 14 (empat belas) kabupaten hanya 3 (tiga) kabupaten yang terealisasi karena minimnya anggaran, serta membutuhkan waktu perjalanan yang cukup lama, kondisi jalan yang tidak nyaman, dan koordinasi antara provinsi dan kabupaten memerlukan waktu yang sesuai dengan situasi disana.
- b. Pendataan dan penataan arsip masih menemui permasalahan yaitu:
 - 1) Masih kurangnya tenaga arsiparis. Di perangkat daerah lain belum ada arsiparis/petugas khusus pengelola kearsipan.
 - 2) Koordinasi bagian kearsipan di setiap perangkat daerah masih kurang dan data yang dikumpulkan hanya Sebagian. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip.
 - 3) Tempat penyimpanan yang tidak memadai.
 - 4) Jaringan yang kurang mendukung di kabupaten.

4.1.2.3 Urusan Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi:

- a. Terbatasnya keterbatasan bibit dan benih unggul
- b. Belum optimalnya penanggulangan hama dan penyakit ikan
- c. Kecenderungan peningkatan harga pakan pabrikan untuk usaha

budidaya

- d. Armada penangkapan ikan masih didominasi oleh kapal kecil
- e. Regulasi aturan penangkapan ikan yang selalu berubah
- f. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan
- g. Sistem promosi yang berinovasi dan modern
- h. Masih banyak UKM yang belum mempunyai izin
- i. Inovasi peningkatan produk hasil perikanan yang belum berkembang
- j. Mutu produk perikanan yang masih rendah
- k. Kelembagaan yang berpihak kepada pelaku usaha masih rendah
- l. Pengembangan iptek yang dibutuhkan dunia usaha belum optimal
- m. Belum optimalnya dukungan SDM dan infrastruktur sarana dan prasarana

2. Bidang Pariwisata

Permasalahan terkait pariwisata di Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Kurang optimalnya pengelolaan potensi produk wisata Kalimantan Tengah baik objek wisatanya, SDM pariwisata, dan hasil kerajinan tangan yang digunakan sebagai ciri khas oleh-oleh sebuah destinasi.
- b. Event-event seni budaya dan komunitas masih kurang variatif dan sedikit.
- c. Pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah yang belum optimal dengan membuat terobosan-terobosan kreatif untuk mendatangkan wisatawan.
- d. Tidak terintegrasinya promosi wisata se-Kalimantan.

3. Bidang Pertanian

Permasalahan pokok terkait pertanian di Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

- 1) Produksi dan mutu hasil pertanian masih rendah

Berdasarkan data capaian Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (komoditas Utama) mengalami penurunan dikarenakan produktivitas yang masih rendah, secara umum untuk kebutuhan konsumsi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah tercukupi, bahkan melebihi (surplus), walaupun pada beberapa

komoditas tertentu tanaman pangan seperti : Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau terdapat fluktuasi produksi. Hal ini disebabkan karena:

- a) Lahan pangan di Kalimantan Tengah di dominasi oleh tanah gambut, dimana tanah memiliki keasaman yang tinggi, sehingga perlu mendapat input yang cukup besar. Apabila input organik terlalu banyak, dapat mengakibatkan kerusakan struktur tanah yang pada akhirnya membuat tanah menjadi marginal. Untuk itu perlu adanya perbaikan struktur tanah dengan pupuk organik agar dapat meningkatkan kesuburan tanah. Benih tanaman pangan juga menjadi penentu dalam peningkatan mutu dan produksi hasil pertanian. Permasalahan saat ini yaitu tingkat penggunaan benih unggul yang masih rendah di tingkat petani. Hal ini disebabkan karena harga benih relatif tinggi sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar petani.
 - b) Masih banyak petani yang menggunakan varietas lokal, sehingga produktivitasnya masih rendah. Hal ini terkait dengan kebiasaan petani yang kurang intensif dalam pemeliharaan tanaman apabila menggunakan varietas lokal.
- 2) Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas.
 - 3) Keterbatasan penyuluh bidang pertanian dan peternakan Sumber daya manusia bidang pertanian menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan mutu pertanian, tetapi kondisi yang terjadi saat ini jumlah penyuluh bidang pertanian masih kurang dan tidak sebanding beban kerja (minimal 1 orang PPL pada 1 desa), masih didominasi generasi tua, dan umumnya tingkat pendidikan rendah serta penguasaan teknologi informasi terbatas.
 - 4) Lahan cadangan pertanian cenderung berkurang
Lahan sawah beririgasi teknis, dikonversi secara terus-menerus untuk penggunaan non pertanian dan pertanian lain (perkebunan). Tekanan penduduk yang makin kuat menyebabkan kebutuhan akan lahan untuk pemukiman/perumahan terus meningkat, demikian juga pembangunan jalan raya dan tol. Di wilayah-wilayah

perkebunan kelapa sawit, lahan sawah juga dikonversi menjadi kebun sawit yang dapat memberikan pendapatan yang lebih baik bagi petani dibanding sawah

- 5) Keterbatasan skill SDM bidang pertanian dan peternakan
Sumber daya manusia bidang pertanian menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan mutu pertanian, tetapi kondisi yang terjadi saat ini jumlah penyuluh bidang pertanian masih kurang dan tidak sebanding beban kerja (minimal 1 orang PPL pada 1 desa), masih didominasi generasi tua, dan umumnya tingkat pendidikan rendah serta penguasaan teknologi informasi terbatas.
- 6) Anomali perubahan iklim
Terjadinya perubahan iklim saat ini sangat berpengaruh terhadap produksi pertanian, di mana akibat anomaly perubahan iklim ini terjadi degradasi sumber daya lahan dan air (penurunan tingkat kesuburan tanah); pergeseran musim dan pola tanam; terjadinya banjir, kemarau panjang dan kekeringan serta ledakan serangan organisme pengganggu tanaman di berbagai wilayah.
- 7) Masih kurangnya *supply* daging sapi
Kalimantan Tengah masih defisit daging sebanyak 1.849,45 ton atau setara 11.409 ekor sapi potong. Hal ini berdasarkan data produksi dan kebutuhan daging sapi tahun 2020.

b. Sektor Perkebunan

Pada sektor perkebunan yang menjadi permasalahan meliputi:

- 1) Kesesuaian Tata Ruang Areal Perkebunan
Terkait dengan kesesuaian tata ruang areal perkebunan saat ini terdapat areal kebun masyarakat di dalam kawasan hutan yang cukup luas terutama kebun karet dan kelapa sawit, hal ini ditemui disebagian besar kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Tengah.
- 2) Produksi dan produktivitas komoditas perkebunan rendah
Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan disebabkan oleh:
 - a) Kualitas bibit yang belum memenuhi standar kualitas yang baik, sumber tidak jelas/bukan bibit unggul khususnya untuk jenis kelapa sawit, karet dan kelapa.

- b) Intensitas pemeliharaan rendah, karena pengetahuan budidaya petani yang minim, kemampuan pembiayaan untuk pemeliharaan yang kurang.
 - c) Kesulitan mendapatkan pupuk karena harga mahal, ketersediaan, banyak pupuk diserap untuk tanaman pangan;
 - d) Sebagian tanaman berumur tua/kurang produktif khususnya sawit, karet, kelapa, dan kopi.
 - e) Hama OPT yang belum dapat terkendali sepenuhnya untuk seluruh jenis komoditas.
- 3) Nilai tambah, daya saing dan jaringan pemasaran
- a) Seluruh produk komoditas petani belum memberikan nilai tambah yang maksimal karena hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.
 - b) Kualitas bahan olahan karet rakyat (Bokar) belum memenuhi standar permintaan pabrik sebab kandungan KKK masih rendah.
- 4) Pola Kemitraan petani kebun belum maksimal
- Program kemitraan yang sudah berjalan yaitu pola inti plasma dan kebun kemitraan. Namun implementasi kerjasama inti plasma masih perlu penyempurnaan materi perjanjian terkait bagi hasil yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dimana sebagian besar petani belum memiliki kerja sama kemitraan dalam pemasaran pada seluruh komoditas, baru pada sawit plasma dan kebun kemitraan. Meskipun beberapa pihak telah mulai menginisiasi kerja sama kemitraan untuk pengembangan komoditas dan/atau peningkatan nilai tambah misalnya Sertifikasi RSPO pada kebun sawit masyarakat dan pengembangan serah wangi kerja sama investor dengan petani kebun dalam optimalisasi lahan.
- 5) Alih fungsi lahan pertanian tradisional/rakyat menjadi perkebunan milik swasta. Terdapat fenomena perubahan perkebunan masyarakat menjadi areal perkebunan perusahaan khususnya sawit teridentifikasi di seluruh wilayah.
- 6) Kelembagaan

- a) Penyuluh perkebunan masih kurang, karena penyuluh yang ada di lapangan masih merangkap komoditas seluruh pertanian dan lebih fokus ke dalam komoditas pangan. Sehingga untuk komoditas perkebunan masih membutuhkan jumlah yang cukup.
- b) Kelembagaan Kelompok Tani dan SDM petani secara umum masih sangat perlu ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya.

4. Bidang Kehutanan

Permasalahan utama pembangunan bidang kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai hasil pemetaan masalah dan akar masalah, teridentifikasi 4 (empat) permasalahan pokok yaitu :

- a. Degradasi dan deforestasi, yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, ancaman penurunan keanekaragaman hayati, lahan kritis, dan degradasi Daerah Aliran Sungai.
- b. Akses kelola perhutanan sosial bagi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat masih rendah, disebabkan areal yang dicadangkan belum optimal realisasi perizinannya dan kegiatan penyuluhan kehutanan belum optimal dalam mendukung pengembangan usahanya.
- c. Pengelolaan Hutan belum optimal disebabkan peran yang dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) yang mengelola Kawasan hutan di tingkat tapak dipandang masih perlu di tingkatkan kinerjanya.
- d. Kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah belum optimal, disebabkan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan belum dioptimalkan pengembangannya.

5. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yaitu :

- a. Belum optimalnya budaya hemat energi.
- b. Banyaknya desa yang belum teraliri listrik.
- c. Rendahnya rasio elektrifikasi.
- d. Belum terkoneksinya seluruh kabupaten/kota/kecamatan pada interkoneksi kalsel-kalteng-kalbar.
- e. Banyaknya daerah yang belum terkoneksi listrik untuk mendukung program food estate.
- f. Banyaknya potensi sumber daya alam yang belum

tereksploitasi.

- g. Kurangnya pemanfaatan energi berkelanjutan

6. Bidang Perdagangan

Permasalahan bidang perdagangan yaitu:

- a. Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri
Tingginya biaya distribusi dan logistik, kurangnya promosi dan kerjasama perdagangan antar pihak swasta dengan swasta, swasta dengan pemerintah serta pemerintah dengan pemerintah, terjadi fluktuasi harga barang pokok dan penting dan belum optimalnya kinerja peningkatan ekspor non-migas
- b. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga
Maraknya produk yang beredar tidak sesuai dengan standard dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait barang beredar dan tertib niaga
- c. Belum optimalnya standarisasi mutu barang
Keterbatasan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi) serta belum optimalnya pengembangan mutu barang

7. Bidang Perindustrian

Permasalahan bidang perindustrian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Kalimantan Tengah, yaitu:

- a. Belum optimalnya pengembangan industri berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri
Belum sepenuhnya terealisasi pembangunan perwilayahan industri baik Kawasan Industri maupun Sentra Industri berwawasan lingkungan yang akan menawarkan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Kalimantan Tengah
- b. Belum optimalnya penerapan sistem informasi dan perumusan kebijakan pengembangan industri
Hal ini karena belum optimalnya sistem informasi dan data industri serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini baik dari sisi ketersediaan akses internet di daerah maupun pengetahuan pelaku usaha industri yang membutuhkan peran serta pemerintah daerah dalam

mengatasinya.

- c. Belum optimalnya penerapan standardisasi, desain produk dan teknologi industri

Masih banyak produk IKM yang belum memenuhi standarisasi serta masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM karena kurangnya penerapan teknologi industri pada IKM

- d. Belum optimalnya struktur industri (hulu-antara-hilir)

Masih terpaku pada produk tertentu (setengah jadi) sehingga perlu upaya pengembangan lebih lanjut yang dibarengi dengan perluasan pangsa pasar, peningkatan inovasi, serta efisiensi proses produksi.

8. Bidang Transmigrasi

Permasalahan bidang transmigrasi yang terjadi beberapa tahun terakhir di Kalimantan Tengah, yaitu:

- a. Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta.
- b. Lahan yang telah dibagikan kepada transmigran, bahkan ada yang sudah bersertifikat tetapi diklaim penduduk setempat. Hal ini seharusnya tidak akan terjadi karena ketentuan membuka lokasi transmigrasi lokasi tersebut hasil clear and clean dengan bukti pernyataan penyerahan lahan dari penduduk setempat, dan kepada penduduk yang lahannya terkena diprioritaskan menjadi warga transmigran. Namun pada kenyataannya setelah dibuka dan mereka menjadi warga transmigran masih mengklaim kepemilikan tersebut.
- c. Dengan perubahan kebijakan pemerintah terdapat lokasi yang sudah lebih sepuluh tahun yang lalu dibuka lahan mereka menjadi hutan lindung/hutan produksi.

4.1.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sekretariat Daerah

Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2019, maka permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kebijakan *One Map Policy* atau Kebijakan Satu Peta belum dapat dilaksanakan secara baik dan optimal.
- b. Pembentukan Desa masih menemui berbagai kendala dalam

- pelaksanaannya.
- c. Terbatasnya pelaksana yang menangani kajian hukum terhadap kebijakan daerah kabupaten/kota.
 - d. Data/dokumen yang masuk pada Biro Hukum untuk waktu penyelesaian terkadang sangat sedikit disebabkan terlambatnya pihak-pihak yang bersangkutan terlambat menyampaikan pada Biro Hukum.
 - e. Kegiatan penyusunan tupoksi kelembagaan berdasarkan perubahan Perda Kelembagaan sudah dapat terlaksana, tetapi Keputusan Kepala Badan/Dinas/Unit Kerja yang mengatur uraian tugas dari Pejabat Eselon II, III, IV, JFU dan JFT belum maksimal karena masih kurangnya pemahaman tentang penyusunan tupoksi yang baik dan benar sehingga pelaksanaan kegiatan masih jauh dari target yang diharapkan.
 - f. Pengembangan industri kecil menengah di Kalimantan Tengah terkendala lemahnya jiwa kewirausahaan, akses permodalan terbatas, kemampuan manajemen maupun teknis relatif rendah.
 - g. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang cukup berarti. Pemetaan terhadap kondisi alih fungsi lahan pertanian dan faktor penyebabnya perlu dilakukan sebagai basis perumusan rencana aksi pengendaliannya dan penguatan ketahanan pangan.
 - h. Terbatasnya sarana perangkat keras (*hardware*) guna menunjang pelaksanaan tugas operasional kehumasan dan keprotokolan baik berupa perangkat multi media, komputer dan perangkat audio visual lainnya.
 - i. Kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin seperti perjalanan dinas dalam daerah KDH/WKDH, rapat koordinasi unsur Muspida (Forkopimda), pemeliharaan rutin dan penyediaan BBM mobil Jabatan dan mobil operasional serta penyediaan makanan dan minuman tamu/rapat masih belum optimal dikarenakan realisasi kegiatan tersebut menyesuaikan dengan intensitas kegiatan pimpinan dan pelayanan tamu-tamu pemda tidak bisa diprediksi secara pasti sehingga anggaran tersebut tidak harus habis.
 - j. Rendahnya partisipasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengikuti kompetisi Sinovik tahun 2019.
 - k. Masih kurangnya pemahaman tentang penyusunan proposal

ataupun pembangunan inovasi pelayanan publik.

2. Sekretariat DPRD

Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun 2019, maka permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kurang optimalnya koordinasi dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dengan pihak-pihak terkait seperti DPRD, kepala daerah, kepala perangkat daerah, dan unsur masyarakat.
- b. Sosialisasi program-program/kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bidang masing-masing komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat secara intensif tidak terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat kurang mengetahui mekanisme baik hukum maupun administrasi tindak lanjut DPRD terhadap aspirasi masyarakat.

4.1.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan

Berdasarkan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Tahun 2019, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
- b. Penataan data base dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik.
- c. Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi lingkup pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan instansi vertikal lainnya sebagai penyedia/sumber data.

2. Keuangan

Berdasarkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2020, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau membuat akses pelayanan memakan waktu lama karena jarak tempuh antar daerah yang cukup jauh sehingga membutuhkan biaya operasional yang tinggi.
- b. Masih perlu untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

- c. Perlu adanya pembaharuan dan pembenahan database objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada unit pelaksana teknis (UPT).

Berdasarkan capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Tahun 2020, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Terbatasnya sara pendukung berupa peralatan kerja terutama gedung kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah yang belum representatif, sehingga berdampak pada kenyamanan serta kelancaran tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal.
- b. Belum optimalnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota khususnya dalam rangka penyampaian Rancangan APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu untuk dievaluasi.
- c. Masih ada aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang belum memiliki legalitas kepemilikan (Sertifikat).
- d. Pengguna barang belum melaksanakan sensus BMD dalam rangka pemutakhiran data pada Aplikasi BMD.
- e. PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diaplikasikan pada SIPD belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga masih menggunakan aplikasi SIMDA.

3. Kepegawaian

Permasalahan terkait kepegawaian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

- a. Penetapan UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dimana setiap angkatan Jabatan Pimpinan Tinggi harus melalui seleksi JPT.
- b. Penetapan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pengalihan tenaga guru SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi.

- c. Perencanaan pembentukan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tunjangan Kinerja dan Disiplin PNS.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan terkait pendidikan dan pelatihan yang terjadi beberapa tahun terakhir di Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

- a. Belum sepenuhnya Fungsi Kediklatan terpusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah. Maknanya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum menjadi pusat diklat terpadu bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.
- b. Koordinasi kebijakan diklat 1 (satu) pintu tidak berjalan optimal, khususnya pada Diklat Teknis dan Fungsional.
- c. Penetapan Kebutuhan Diklat belum didukung oleh kegiatan survei dan pengolahan data AKD secara ilmiah.
- d. Kemampuan SDM penyelenggara kediklatan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan tengah masih perlu peningkatan.
- e. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk kegiatan diklat secara standar.

4.1.2.6 Unsur Pengawasan

Berdasarkan capaian kinerja Inspektorat yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kelemahan SPIP (APIP) antara lain Keterbatasan SDM dan Keterbatasan Sarana dan Prasarana.
- b. Tidak ekonomis, efisien, dan efektif dalam menjalankan sistem/prosedur;
- c. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat melaksanakan audit kinerja, dikarenakan seluruh Perangkat Daerah belum menyusun penilaian resiko (Risk Register).
- d. Evaluasi SAKIP dan Penilaian Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB) Sudah dilaksakan akan tetapi Saran dan Rekomendasi yang sudah sampaikan hanya ada beberapa Perangkat Daerah yang menanggapi dan menindaklanjuti sebagai upaya perbaikan kinerja dan pertimbangan atau feedback dalam penyusunan Laporan di tahun berikutnya.

- e. Terdapat hasil pemeriksaan yang belum tuntas disebabkan beberapa hal, seperti:
 - 1) Adanya mutasi/pensiun/meninggal dunia auditor sehingga kesulitan dalam proses penyelesaian tindaklanjut.
 - 2) Adanya aparatur yang belum memahami akan pentingnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan.
 - 3) Aparat/pejabat yang diperiksa belum memahami bentuk tindak lanjut yang harus diselesaikan.
 - 4) Untuk rekomendasi hasil temuan Itjen Kemendagri, terdapat kendala terkait tindak lanjut yang harus dilaksanakan karena terkait dengan kebijakan dan prosedur perangkat daerah.
- f. Laporan akuntabilitas kinerja masih dianggap sebagai pemenuhan pelaporan saja karena masih banyak kekurangan terutama dari segi perencanaan dan evaluasi pencapaian target kinerja untuk IKU.
- g. Masih terdapat aparatur pada perangkat daerah yang belum memahami akan pentingnya penyusunan Indikator Kinerja Utama sehingga dalam memproses/menginput data tidak sesuai aturan yang berlaku.
- h. Ruang lingkup pengawasan semakin luas sedangkan kebutuhan dana yang ditetapkan tidak mencakup semua pengawasan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait alokasi APBD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2021.

4.1.2.7 Unsur Pemerintahan Umum

Beberapa permasalahan yang ditemui oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

- a. Pendidikan politik masyarakat masih rendah.
- b. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun.
- c. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan pada aspek daya saing diantaranya:

- a. Menurunnya Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Untuk Konsumsi Makanan. Berdasarkan data diketahui pengeluaran konsumsi makanan perkapita mengalami

penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yakni 54,77 persen ditahun 2017 dan 50,66 persen di tahun 2019.

b. Menurunnya Nilai Tukar Petani

NTP Provinsi Kalimantan Tengah turun 0,63 poin, dari 108,11 persen (Januari 2020) menjadi 107,48 persen (Februari 2020). Hal ini dipengaruhi oleh penurunan nilai tukar subsektor tanaman pangan (0,86 poin), tanaman perkebunan rakyat (0,84 poin), hortikultura (0,51 poin), dan perikanan (0,08 poin). Sedangkan Indeks harga yang diterima petani (*It*) turun 0,09 poin sedangkan indeks harga yang dibayar petani (*Ib*) naik 0,53 poin.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan jangka menengah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Penentuan isu strategis pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek baik internal maupun eksternal, antara lain:

- a. Permasalahan pembangunan
- b. Isu atau kebijakan internasional dan nasional
- c. Isu atau kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Telaah kebijakan daerah sekitar yang terkait dengan pembangunan Kalimantan Tengah
- e. Telaah KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

4.2.1 Isu Internasional (SDG's)

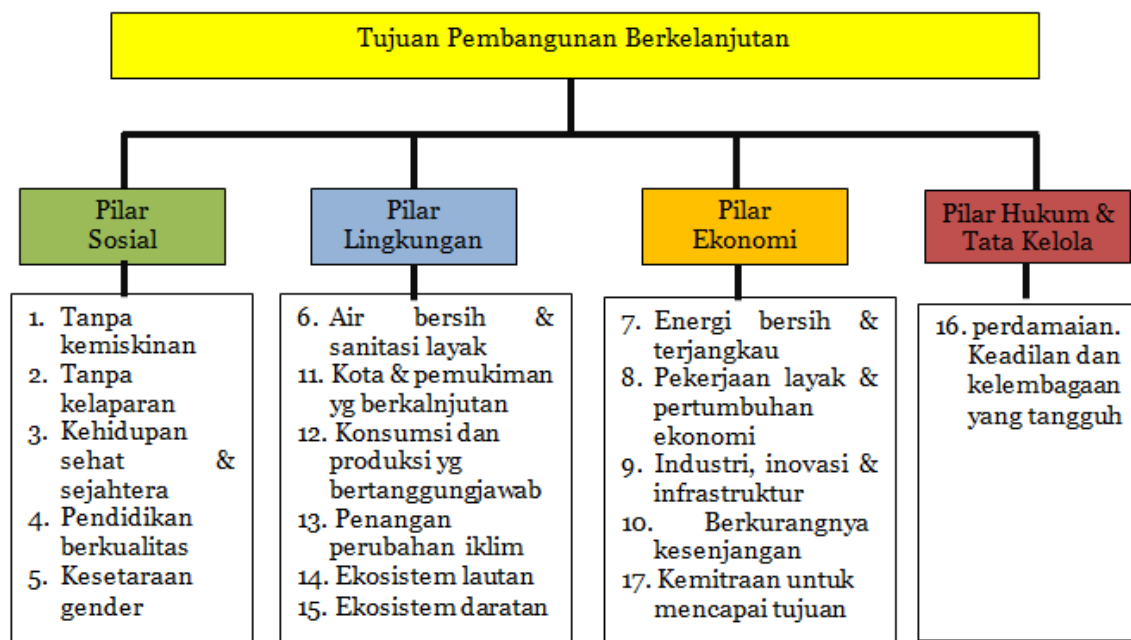
Melenium Development Goals atau biasa kita kenal dengan MDG`s merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap gagal. Melalui deklarasi MDGs isu yang dibangun dan harus dicapai pada tahun 2015 adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Menindak lanjuti hal tersebut, munculah Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara. Semenjak ditetapkan pada bulan September 2015, di dalam Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, TPB/SDGs menjadi Agenda Global 2030, yang

dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 goals dan 124 target yang telah diintegrasikan dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

Ketujuhbelas goals tersebut yaitu :

- a. Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.
- b. Tanpa Kelaparan: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan.
- c. Kehidupan sehat dan sejahtera: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
- d. Pendidikan Berkualitas: Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- e. Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- f. Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- g. Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan modern.
- h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- i. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
- j. Berkurangnya Kesenjangan: Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
- k. Kota dan Komunitas Berkelanjutan: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- m. Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- n. Ekosistem Laut: Melestarikan dan memanfaatkan secara

- berkelanjutan sumber daya kelautan dan Samudra untuk pembangunan berkelanjutan.
- o. Ekosistem Darat: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
 - p. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
 - q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



Gambar 4. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten / Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian

penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

Revolusi industri merupakan titik tolak perubahan industry secara fundamental dikenal dengan revolusi industry 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Revolusi 1.0 atau revolusi pertama dimulai pada akhir abad ke 18 dengan ditandai ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Kala itu, industry diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Pada revolusi industry pertama, proses industry yang awalnya membutuhkan tenaga manusia dan hewan, digantikan dengan mesin uap tersebut. Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad 20 dimana pada tahap ini listrik menggantikan peran tenaga uap dan air menjadi sumber utama industry. Pada tahap ini berkembangnya jumlah program manajemen yang memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selain itu dikembangkan juga produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati pada 1870.

Revolusi industry 3.0 ditengarai muncul perdana pada awal tahun 1970. Dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Revolusi industry generasi ketiga ini ditandai dengan kemunculan pengontrol logika terprogram pertama (PLC), yakni model 084-969. Sistem otomatisasi berbasis computer ini membuat mesin industry tidak lagi dikendalikan manusia. Dampaknya adalah biaya produksi menjadi lebih murah, namun isu tenaga kerja tentunya masih menjadi masalah pada tahap ini.

Sedangkan revolusi industry 4.0 yang terakhir dan sekaligus yang kita alami saat ini diprakarsai oleh Prof. Klaus Schwab, ekonom terkenal dari Jerman yang mengenalkan konsep Revolusi Industri 4.0 dalam bukunya “The Fourth Industrial Revolution”. Beliau menegaskan bahwa revolusi industry 4.0 telah mengubah kerja manusia secara fundamental. Pada saat ini industry telah menyentuh virtual, konektivitas manusia, mesin, dan data. Berdasarkan analisis McKinsey Global Institute, Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar dan luas, terutama pada sektor lapangan kerja, di mana robot dan mesin akan menghilangkan banyak lapangan kerja di dunia. Untuk itu era revolusi industri ini harus disikapi oleh pelaku industry dengan bijak dan hati-hati. Sebagai contoh berikut merupakan bidang-bidang yang memperoleh terobosan berkat kemajuan teknologi

1) Robot Kecerdasan Buatan; 2) Teknologi Nano, 3) Bioteknologi; 4) Teknologi Kuantum, 5) Blokhain; 6) Teknologi Berbasis Internet; dan 7) Printer 3D.

Di satu sisi, era industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun demikian, di sisi lain, revolusi industri ini juga akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil-alih oleh robot. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Untuk itu pemerintah perlu menyikapi perubahan ini dengan tepat melalui penyusunan strategi yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus menciptakan lapangan yang lebih luas. Pemerintah Indonesia saat ini tengah melaksanakan langkah-langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional yang telah ditetapkan untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat. Salah satu visi penyusunan Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

4.2.2 Isu Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 memiliki visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan

Terpercaya.

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya, visi dan misi ini dijabarkan kedalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Pada perencanaan tahunan, ketujuh agenda ini menjadi prioritas nasional (PN). Tujuh agenda pembangunan pada RPJMN tahun 2020-2024 meliputi:

1. Agenda 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Agenda 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Agenda 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Agenda 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Agenda 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Agenda 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Agenda 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

4.2.3 Analisa Persebaran Corona Virus

Pada awal Tahun 2020 telah merebak wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berawal dari Cina. Virus ini telah tersebar ke hampir seluruh negara di dunia. Pada 2 Maret 2020 virus ini mulai ditemukan di Indonesia dan sampai saat ini masih terus menyebar. Sejak merebaknya COVID-19 di Indonesia, beberapa daerah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 atau COVID-19. Kebijakan ini diambil untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran COVID-19.

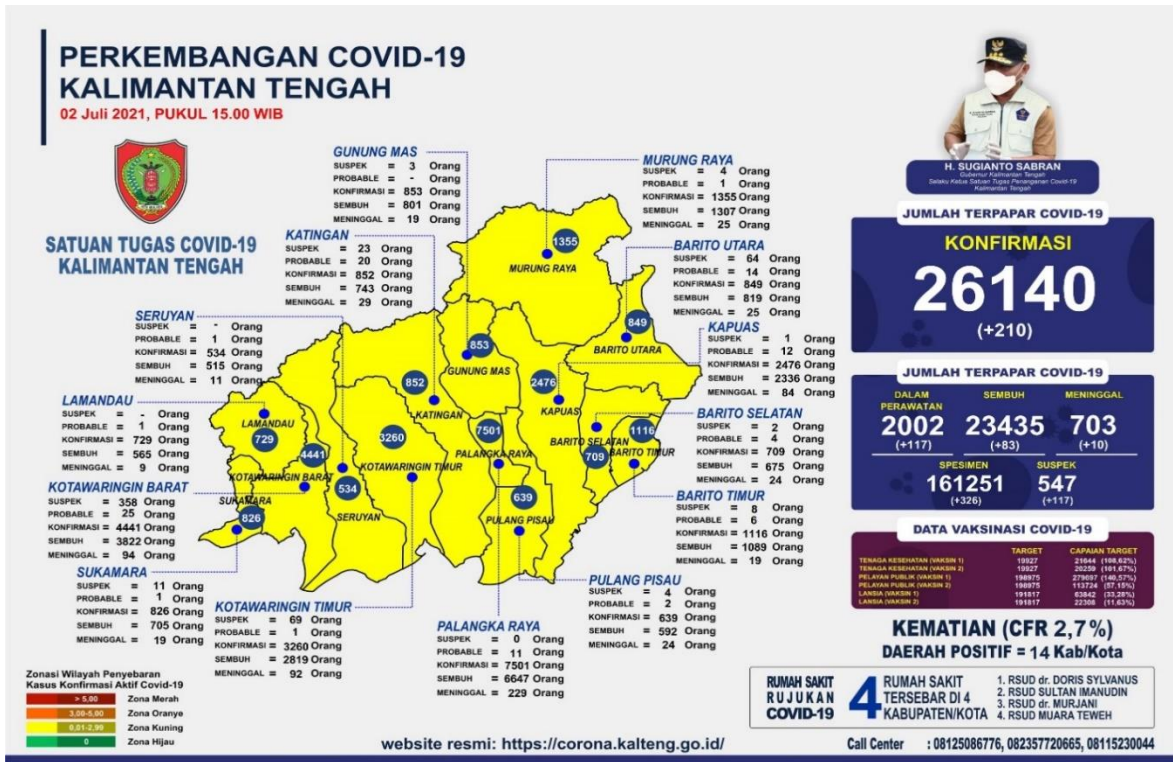
Pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh provinsi dan menyerang tidak saja aspek kesehatan namun juga berdampak ke aspek sosial, ekonomi, keuangan dan yang lainnya. Berbagai permasalahan muncul dan menyebabkan Pemerintah dan pemerintah daerah mengambil kebijakan dan langkah konkrit termasuk aspek pendanaan untuk percepatan penanganan

COVID-19 antara lain dengan melakukan realokasi dan refocusing APBN dan APBD Tahun 2020. Merespon berbagai dampak dari kondisi luar biasa ini, maka pemerintah pusat dan daerah telah mengambil berbagai langkah nyata. Penerapan jaringan pengaman sosial antara lain bantuan sembako, dan bantuan langsung tunai (BLT); Kartu Pra Kerja untuk para korban PHK, pemberian insentif perpajakan, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian APBD yang diutamakan untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di daerah masing-masing.

Berdasarkan data satgas penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah kasus positif covid-19 di provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 bulan juli terus bertambah dan akumulasi kasus positif bertambah 210 orang sehingga total mencapai 26140 orang. Sementara untuk pasien sembuh bertambah 83 orang sehingga total 23435 orang dan yang meninggal dunia mencapai 703 orang. Kota Palangka Raya masih tetap tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Jumlah positif Covid 19 sebanyak 7501 orang.

Berdasarkan gambar dibawah dapat dilihat bahwa data sebaran pasien positif Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pada beberapa Kabupaten/Kota antara lain:

- Palangka Raya: 7501 jiwa
- Pulang Pisau: 639 jiwa
- Barito Timur: 1116 jiwa
- Barito Selatan: 709 jiwa
- Kapuas: 2476 jiwa
- Barito Utara: 849 jiwa
- Murung Raya: 1355 jiwa
- Gunung Mas: 853 jiwa
- Katingan: 852 jiwa
- Seruyan: 534 jiwa
- Lamandau: 729 jiwa
- Kotawaringin Barat: 4441 jiwa
- Sukamara: 826 jiwa
- Kotawaringin Timur: 3260 jiwa



Gambar 4. 2 Perkembangan Covid-19 Di Provinsi Kalimantan Tengah

Guna memitigasi dampak Covid-19, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menjalankan berbagai protokol kesehatan melalui menerapkan 3T, yaitu: Trace (penelusuran), Testing (tes spesimen), dan Treatment (perawatan). Sementara itu, masyarakat juga turut berpartisipasi dengan melakukan 3M, yakni Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan. Selain itu, kebijakan pembatasan mobilitas baik antarwilayah maupun antarnegara juga ditempuh banyak negara untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yang cepat. Kebijakan pembatasan mobilitas tersebut diterapkan dengan tingkatan yang berbeda-beda antar daerah sesuai dengan intensitas penyebaran Covid-19.

4.2.4 Isu Regional Kalimantan Tengah

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005- 2025 yang telah disepakati adalah:

“KALIMANTAN TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL”

Indikasi terwujudnya kondisi masa depan bersama tersebut ditandai oleh hal-hal sebagaimana diuraikan berikut ini.

Tingkat kemajuan dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur

dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Lebih tinggi pendapatan rata-rata dan pemerataannya, maka suatu daerah dapat dikatakan lebih makmur dan lebih maju. Daerah yang maju pada umumnya juga merupakan daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

Selain itu dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya tersusun dan tertata serta berfungsi dengan baik, sehingga aktivitas perekonomian dapat berlangsung secara efisien dengan produktivitas yang tinggi.

Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya yang terlembaga secara sistemik.

Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila tingkat pendidikan penduduknya semakin tinggi. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang berada di daerah yang bersangkutan.

Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, termasuk derajat kesehatan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas SDM yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, Daerah yang maju juga ditandai dengan Lembaga politik dan

kemasyarakatan serta hukum yang fungsional secara mantap. Daerah yang maju juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan dan pertahanan. Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan bukan hanya Kalimantan Tengah yang maju, tetapi juga mandiri. Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian.

Kemandirian ini bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu daerah dalam NKRI maupun masyarakat bangsa-bangsa.

Kemandirian suatu Daerah tercermin pada kemampuan memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan sosial dan ekonomi tetapi memiliki daya tahan dan daya suai yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial dan perekonomian. Wujud riil dari kemandirian ini adalah ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh modal sosial yang melembaga dalam sikap dan perilaku sehari-harinya.

Dengan demikian, kemajuan dan kemandirian suatu Daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemajuan dan kemandirian juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau masyarakat suatu Daerah mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun keamanan dan pertahanan.

Kalimantan Tengah yang ingin dibangun bukan hanya sebagai

masyarakat dan Daerah yang maju dan mandiri, tetapi juga adalah Kalimantan Tengah yang adil. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat di Kalimantan Tengah mempunyai hak, baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat di Kalimantan Tengah mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, serta perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian Kalimantan Tengah yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender, dan wilayah.

Adapun misi pembangunan daerah Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil adalah sebagai berikut:

1) Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.

Ketersediaan sarana dan prasarana umum adalah komponen yang sangat menentukan daya saing wilayah Kalimantan Tengah. Ketersediaan sarana dan prasarana umum akan meningkatkan tingkat pengembalian investasi sehingga minat berinvestasi dapat ditingkatkan dan direalisasikan secara lebih baik. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka komponen biaya dari usaha baru maupun usaha yang telah berdiri dapat diturunkan sehingga daya saing produk / jasa yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Bagi masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana umum merupakan faktor vital dalam peningkatan kenyamanan hidup.

- 2) **Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.**

Derajat kemajuan dan kemandirian Daerah Kalimantan Tengah akan berpusat dari potensi dan kekayaan alamnya. Berkembangnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan merupakan pondasi bagi transformasi struktur perekonomian dan kemandirian daerah Kalimantan Tengah.

- 3) **Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.**

Misi ini diperlukan untuk meningkatkan akselerasi perkembangan dunia usaha di Propinsi Kalimantan Tengah. Dengan kapasitas pengusaha lokal yang masih relatif rendah, maka upaya peningkatan penanaman modal dari luar daerah dan luar negeri di usaha-usaha yang berbasis potensi dan keunggulan wilayah merupakan langkah tepat untuk peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah. Bila kondisi ini terwujud, maka ragam pilihan usaha akan berkembang sehingga memungkinkan jumlah dan jenis usaha skala kecil dan menengah dapat berkembang lebih cepat.

- 4) **Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.**

Bertambahnya jumlah, jenis dan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi akan berpengaruh pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian perlu dicatat bahwa perkembangan lebih lanjut akan sulit terwujud jika usaha-usaha tersebut tidak berbasis pada potensi dan keunggulan wilayah serta tidak memiliki keterkaitan usaha yang kuat, baik antar usaha maupun antar wilayah. Usaha yang tidak berbasis pada potensi dan keunggulan wilayah akan sulit dalam mencari bahan baku, dan bilapun mampu berkembang, justru akan menyerap daya beli masyarakat ke luar Daerah Kalimantan Tengah. Dengan dasar berpikir seperti ini, maka perkembangan usaha yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah akan mampu menarik daya beli dari luar wilayah melalui ekspor hasil usahanya. Dampak

pengganda (multiplier) dari usaha ini akan dapat lebih ditingkatkan jika kemitraan antar usaha dan antar daerah dapat dibangun sesuai prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku umum.

- 5) Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.**

Kapasitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh budaya belajarnya. Hal yang sama juga berlaku bagi lembaga; kapasitasnya akan dapat ditingkatkan secara berkesinambungan bila lembaga tersebut mampu menjadi learning organization. Berdasarkan kondisi seperti ini, maka pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang harus dapat mewujudkan budaya belajar bagi peserta didiknya. Selain itu, lembaga pendidikan pada semua pada semua jenis, jalur dan jenjang harus mampu menjadi learning organization agar selalu mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi idealnya secara lebih berhasil dan berdaya guna. Dengan cara seperti ini, kecepatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dapat lebih ditingkatkan. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, penuntasan wajib belajar, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta aspek lain dari pendidikan harus diprioritaskan.

- 6) Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.**

Sehat dan berumur panjang merupakan faktor utama pembentuk kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan semua peluang yang dihadapi untuk peningkatan kesejahteraannya. Dengan terwujudnya masyarakat berparadigma sehat ini, upaya peningkatan kesehatan akan semakin mudah karena masyarakat akan lebih aktif dalam upaya untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan ibu hamil serta anggota keluarganya, kualitas kesehatan bayi dan balitanya, kesehatan lingkungan, serta pengendalian dan pencegahan penyakit menular.

7) Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Pelayanan publik dan pelayanan aparatur pemerintahan yang responsif dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, juga merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi seperti ini, kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan, khususnya pelayanan yang paling dasar. Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan relevansi kebijakan dengan aspirasi masyarakat dan untuk percepatan pembudayaan pertanggungjawaban kinerja.

8) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentraman dan ketertiban akan dapat diciptakan secara lebih efektif saat masyarakat berdaya dan berfungsi optimal dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya. Berdasarkan kondisi seperti ini potensi modal sosial di masyarakat harus dapat direalisasikan untuk menjamin kelangngan keberfungsian masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.

9) Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.

Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan harus dapat direspon secara cepat dan tepat. Oleh karena itu sejak mulai sekarang perlu dibangun suatu kemitraan yang sistematis antar para pihak, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat setempat, serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat agar pencegahan dan kecepatan penanggulangan permasalahan sosial kemasyarakatan dapat ditingkatkan secara signifikan.

10) Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Unit sosial terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Pemampuan keluarga merupakan salah satu pilihan dalam strategi pembangunan manusia. Keluarga yang fungsional, mampu menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi psikologi dan sosial, akan menentukan kapasitas anggota keluarga tersebut. Peningkatan kemampuan belajar, etos kerja dan semangat juang, serta kondisi kesehatannya tetap dimulai dari keluarga. Selain itu, dalam upaya pencegahan (antisipasi) kemiskinan, maka peningkatan kualitas keluarga menjadi sangat vital dan strategis. Peningkatan kualitas kependudukan akan meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Berdasarkan kondisi seperti itu, dalam misi ini juga perlu diupayakan pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kualitas hubungan industrial. Hal ini sedemikian karena sangat terkait dengan upaya peningkatan pendapatan perkapita dan mengurangi kerentanan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Pengurangan pada pengangguran harus disebut secara eksplisit agar koordinasi kegiatan antar satuan kerja menjadi semakin vital sehingga percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

11) Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.

Alam dan ekosistem tempat manusia hidup memberikan manfaat yang luar biasa bagi peradaban manusia. Alam dan ekosistem tersebut merupakan pinjaman dari anak cucu kita. Lingkungan hidup harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana tanpa mengganggu kelestariannya sepanjang waktu.

12) Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Ruang dan unit-unit wilayah harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kata produktivitas yang ada dalam misi ini mengisyaratkan bahwa ruang yang belum termanfaatkan dapat ditingkatkan pemanfaatannya sesuai dengan aturan hukum

yang berlaku dan tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, keterkaitan antar unit wilayah dikembangkan dan dikendalikan untuk mengurangi biaya-biaya sosial dan ekonomi serta dampak negatif yang mungkin muncul di tahun-tahun yang akan datang.

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk tercapainya masyarakat Kalimantan Tengah yang maju mandiri dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. **Tercukupinya sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah, yang ditunjukkan oleh:**
 - a. Meningkatnya ketepatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
 - b. Meningkatnya peran serta masyarakat dan atau swasta dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
 - c. Meningkatnya kinerja pelayanan bidang sarana dan prasarana umum.
2. **Terwujudnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, yang ditandai oleh:**
 - a. Terwujudnya pemenuhan akan kebutuhan dan ketahanan pangan.
 - b. Terwujudnya peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang mampu berdaya saing nasional dan internasional.
 - c. Terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan.

- d. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
 - e. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya.
 - f. Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil dan terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan.
 - g. Terwujudnya peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- 3. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, yang ditunjukkan oleh:**
- a. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas investasi dengan memperkuat kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi.
 - b. Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal.
 - c. Terwujudnya daya saing pariwisata dengan peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata secara optimal.
- 4. Terwujudnya peningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, yang ditunjukkan oleh:**
- a. Meningkatnya jumlah pembukaan usaha baru, penyerapan tenaga kerja khususnya UKM dan koperasi yang berbasis potensi dan keunggulan daerah.
 - b. Meningkatnya perkembangan dan daya saing usaha-usaha yang telah berdiri.
 - c. Berkembangnya usaha sentra/klaster, Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Sentra Produksi – Koperasi (KSP/USP- Kop) dan jasa konsultansi pengembangan bisnis UKM dan koperasi.
 - d. Terwujudnya kinerja pelayanan perijinan dan pengawasan perijinan serta fasilitasi pengembangan UKM.
 - e. Terwujudnya stabilitas perekonomian wilayah Kalimantan

Tengah.

- f. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - 1. Modernisasi Koperasi
 - 2. Melahirkan Wirausaha Baru (*New Enterpreuner*).
 - g. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - 1. UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*)
 - 2. Digitalisasi Koperasi dan UMKM.
- 5. Terbangun dan berkembangnya budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, yang ditunjukkan oleh:**
- a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan di semua jenjang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
 - b. Meningkatnya kualitas pendidikan non formal, budaya pembelajaran, keperpustakaan dan kearsipan.
 - c. Terwujudnya kualitas, kuantitas, kesejahteraan, dan penyebaran tenaga pendidik secara adil.
 - d. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan, penelitian dan pengembangan teknologi dan informasi pendidikan.
 - e. Terlembaganya keragaman budaya untuk peningkatan kualitas hidup bangsa yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 6. Terwujudnya masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan, yang ditunjukkan oleh:**
- a. Terwujudnya kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan tenaga kesehatan.
 - b. Terwujudnya sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat.
 - c. Terwujudnya kualitas pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini.
 - d. Terwujudnya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan pengembangan sistem jaminan kesehatan

- terutama bagi penduduk miskin.
- e. Terkendalinya peredaran obat dan makanan serta ketersediaan obat.
 - f. Terwujudnya upaya kesehatan masyarakat dan peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas hingga kedaerah terpencil.
 - g. Terwujudnya peningkatan upaya kesehatan perorangan.
- 7. Terwujudnya pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah, yang ditunjukkan oleh:**
- a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
 - c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur negara di lingkungan Pemerintah Provinsi.
 - d. Terlaksananya tata pemerintahan yang baik.
 - e. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya manusia aparatur.
 - f. Terwujudnya profesionalisme aparat pemerintah daerah.
 - g. Meningkatnya kapasitas keuangan pemerintah daerah.
 - h. Meningkatnya kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 8. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditunjukkan oleh:**
- a. Terwujudnya perkembangan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan serta berkembangnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan.
 - b. Terwujudnya kebijakan pemerintah yang profesional dalam penanganan permasalahan ketertiban dan ketentraman umum.
 - c. Terwujudnya disiplin dan ketertiban dalam penyampaian aspirasi masyarakat.
 - d. Terwujudnya kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
- 9. Terwujudnya kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan**

penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan, yang ditunjukkan oleh:

- a. Terwujudnya efektivitas penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Terwujudnya berbagai bentuk kemitraan dan aktualisasi potensi kapital sosial yang melembaga dalam penanggulangan masalah sosial.
- c. Terwujudnya inisiatif, prakarsa dan kebijakan antisipatif terhadap bencana alam dan sosial.
- d. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

10. Terwujudnya peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, yang ditunjukkan oleh:

- a. Terwujudnya kualitas manajemen pelayanan kependudukan dan keluarga kecil dan berkualitas.
- b. Terwujudnya distribusi alokasi penduduk yang seimbang antar kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Terwujudnya pembangunan bidang ketenagakerjaan, perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja produktif, dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur, baik di perdesaan maupun perkotaan.
- e. Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- f. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta perlindungan tenaga kerja.

11. Terwujudnya fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan, yang ditunjukkan oleh:

- a. Terwujudnya kapasitas sarana, prasarana dan teknologi yang memadai dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya wadah koordinasi pengendalian lingkungan yang

- bersifat lintas sektoral dan lintas pelaku yang berkelanjutan.
- c. Terwujudnya kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan lingkungan hidup.
- d. Terwujudnya pola pemanfaatan sumber daya alam yang aman dan ramah lingkungan.
- e. Terwujudnya keberdayaan perusahaan, masyarakat dalam menyeimbangkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara serasi.

12. Terwujudnya optimalisasi produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang ditunjukkan oleh:

- a. Terwujudnya tertib hukum tata ruang dan pertanahan.
- b. Terwujudnya tertib administrasi tata ruang dan pertanahan.
- c. Terwujudnya tertib penggunaan tata ruang dan pertanahan.
- d. Terwujudnya pemeliharaan tata ruang dan pertanahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan tahap terakhir dari periode RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah (tahap ke-4). Pelaksanaan arah kebijakan tahap ke-4 RPJPD akan tercermin dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju, dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan pada masa yang akan datang. Prioritas pembangunan tahap keempat RPJPD, sebagai berikut:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian

- ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
 4. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
 5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
 6. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
 7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
 8. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
 9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
 10. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
 12. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

4.2.5 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 mempunyai kebijakan dan strategi yang dijabarkan sebagai berikut :

A. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
3. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
4. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;
5. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
6. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
7. Pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi terdiri atas:

1. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara PKN, PKW, dan PKL;
2. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; dan
3. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif serta berdaya dukung terhadap pengembangan potensi provinsi.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan

potensi provinsi terdiri atas:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi antarmoda baik darat, laut maupun udara;
2. Mendorong pengembangan prasarana utama untuk menjangkau kawasan- kawasan terpencil;
3. Meningkatkan pengembangan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman;
4. Meningkatkan pengembangan akses telekomunikasi ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman;
5. Mengembangkan jaringan prasarana air bersih untuk kawasan permukiman; dan
6. Mengembangkan sistem prasarana persampahan pada kawasan perkotaan.

Strategi perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan dalam rangka mendukung pengembangan pertanian terdiri atas:

1. Menetapkan kawasan yang memiliki potensi agribisnis dan agroindustri;
2. Mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri serata minapolitan atau sentra produksi perikanan;
3. Mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian;
4. Meningkatkan jaringan prasarana air bersih pada kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan;
5. Meningkatkan jaringan prasarana energi untuk mendukung kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan;
6. Mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan;
7. Mengembangkan pelabuhan laut yang menunjang distribusi hasil pertanian; dan
8. Mengembangkan kawasan andalan laut serta kawasan pantai yang berpotensi untuk pengembangan perikanan tambak sebagai

sentra produksi perikanan.

Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan terdiri atas:

1. Mengembangkan kawasan pertanian dalam rangka mendukung lumbung pangan;
2. Menetapkan Kawasan yang berpotensi sebagai lumbung pangan;
3. Mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan lumbung pangan;
4. Mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian;
5. Mengalokasikan ruang untuk pengembangan gudang/depo pangan;
6. Meningkatkan jaringan prasarana pengairan pada kawasan pertanian; dan
7. Mengembangkan Jaringan distribusi pemasaran hasil pertanian.

Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi terdiri atas:

1. Mengembangkan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi;
2. Meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi;
3. Menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi;
4. Merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna; dan
5. Mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik.

Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi terdiri atas:

1. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
2. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian dan energi;
3. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralsir,

menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

4. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan terhambatnya perwujudan pembangunan yang berkelanjutan; dan
5. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.

Strategi pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi terdiri atas :

1. Menetapkan lokasi-lokasi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan teknologi;
2. Meningkatkan prasarana dan sarana pada kawasan strategis provinsi
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi budaya pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan budaya;
4. Menumbuhkembangkan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat melalui pelestarian budaya lokal;
5. Melestarikan seni dan budaya Dayak seperti musik, tarian, lagu, upacara adat, seni kerajinan dan olahraga tradisonal;
6. Menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung;
7. Menegaskan dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan; dan
8. Mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan.

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan terdiri atas:

1. Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
2. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
3. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif didalam dan sekitar kawasan; dan
4. Memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Arahan peraturan zonasi pada kawasan strategis Pengembangan

Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare meliputi :

- a. Pelestarian hutan dan lahan gambut pada kawasan yang berfungsi lindung dengan tindakan tegas terhadap pembalakan liar dan kebakaran, dan jika sudah terjadi degradasi hutan dilakukan rehabilitasi;
- b. Mempertahankan hutan yang masih baik;
- c. Mempertahankan kawasan penyangga budidaya terbatas antara kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ditentukan dengan pembatas hidrologis;
- d. Pengembangan kawasan budidaya untuk masyarakat lokal yang terpisah secara hidrologis dari kubah-kubah gambut dan tidak memiliki nilai keanekaragaman hayati serta tidak memiliki kandungan gambut yang berarti;
- e. Peruntukan jenis pertanian yang dapat dikembangkan meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Pengembangan pertanian yang mengacu pada peraturan sektoral pertanian; dan
- g. Wilayah pantai yang rusak parah dapat dipertimbangkan sebagai tempat budidaya perairan (tambak) yang semi-intensif.

Sejalan dengan sedang dilakukannya proses revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2035, maka strategi dan kebijakan tersebut di atas akan mengalami penyesuaian pada saat RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang baru disahkan.

4.2.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penelaahan KLHS dan penyusunan RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Sebagai daerah yang pada saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah wajib melakukan telaah dokumen KLHS. KLHS diaplikasikan pada

kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) yang telah dirumuskan (*tol for assesing decisions*). Pelaksanaan KLHS dapat beradaptasi dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan proses pengambilan keputusan strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB Kalimantan Tengah berisikan 17 (Tujuh Belas) tujuan yang meliputi :

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan pemukiman berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13. Penanganan perubahan iklim
14. Ekosistem lautan
15. Ekosistem daratan
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki komitmen terhadap Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau dikenal dengan nama Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diwujudkan melalui Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs).

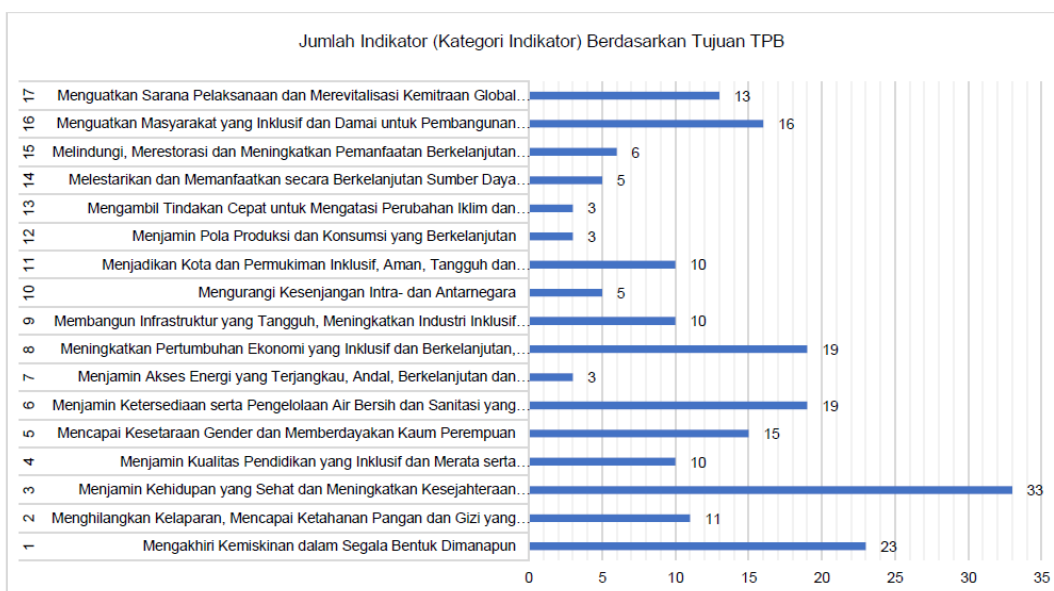
Jumlah indikator TPB berdasarkan urusan dan kewenangannya sebanyak 319, indikator di bagi dalam 4 kewenangan, yakni meliputi :

1. Jumlah indikator yang menjad kewenangan 308 pusat
2. Jumlah indikator yang menjad kewenangan 235 provinsi
3. Jumlah indikator yang menjad kewenangan 220

kabupaten

- 4 Jumlah indikator yang menjad kewenangan 222 kota

Selain kewenangan ada beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah kekhususan indikator, kondisi geografis dan ketentuan indikator RPJMD. Dari 235 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi, ada 204 indikator yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, dan 31 indikator tidak ada di wilayah kajian antara lain, panjang pembangunan jalan tol, panjang pembangunan jalur kereta api, jumlah kawasan metropolitasn dan lain-lain, jumlah indikator TPB di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :



Gambar 4. 3 Jumlah Indikator (Kategori Indikator) Berdasarkan Tujuan TPB

Hasil identifikasi dan analisis capaian indikator TPB dibagi ke dalam 4 kategori, yakni:

Kategori A Indikator RPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Kategori B Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional

Kategori C Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

Kategori D Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

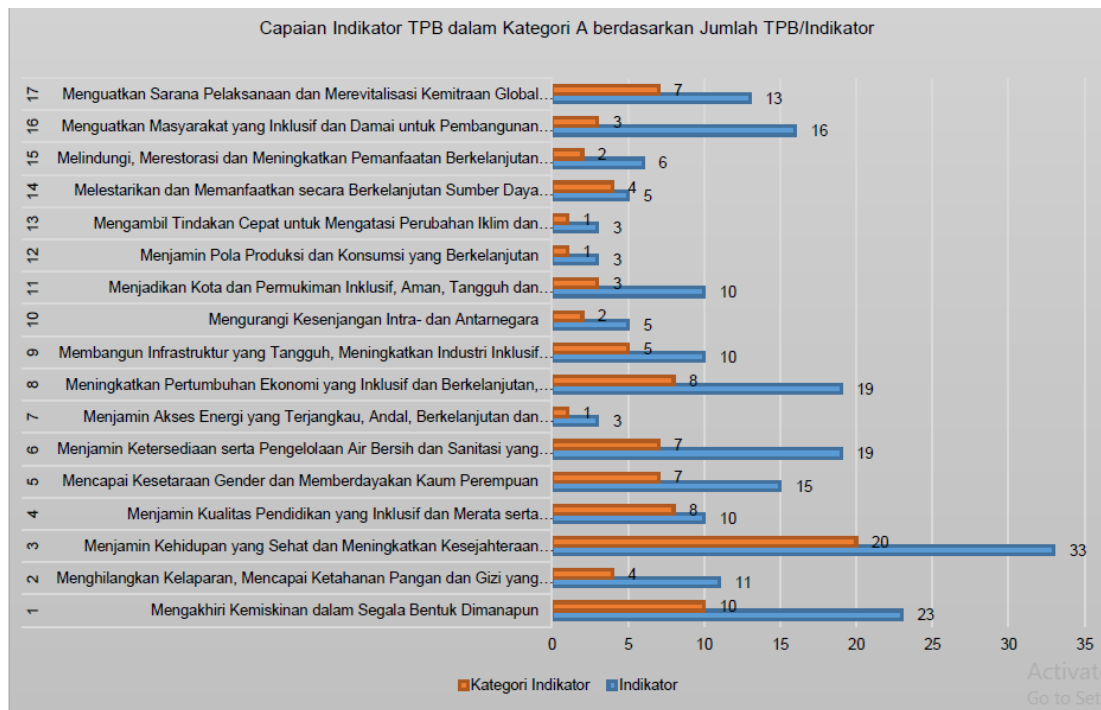
Dari total 2014 indikator TPB yang relevan di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 95 Indikator (46,57%) sudah dilaksanakan dan

telah mencapai target yang ditetapkan, 60 Indikator (29,41%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, 21 Indikator (10,29%) belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dan sebanyak 8 indikator (13,73%) tidak ada data. Rincian pelaksanaan TPB di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Kriteria Indikator TPB

No	Kriteria	Jumlah Indikator	Pencapaian (%)
1	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target	96	47,06
2	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target	59	28,93
3	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target	21	10,29
4	Data tidak tersedia	28	13,73
Total indikator yang menjadi urusan dan kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah		204	100,00

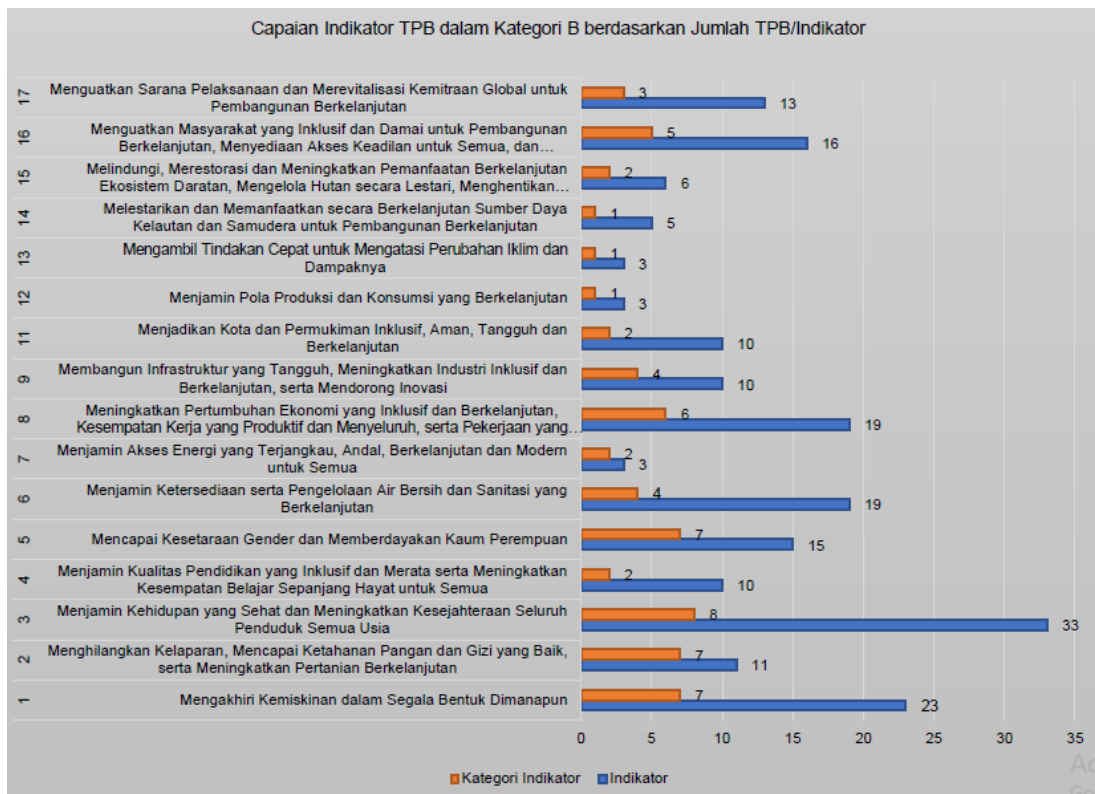
Indikator-indikator yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan sudah mencapai target nasional sesuai dengan RPJMD tahun 2020. Jumlah indikator tersebut dijabarkan pada gambar berikut ini :



Gambar 4. 4 Capaian Indikator TPB dalam Kategori A berdasarkan Jumlah TPB/Indikator

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dengan jumlah indikator paling banyak adalah “Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia”, dengan jumlah 20 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dari 33 target indikator, sedangkan ada 3 yang merupakan tujuan dengan jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional paling sedikit yaitu 1 indikator yaitu TPB nomor 7,12, dan 13.

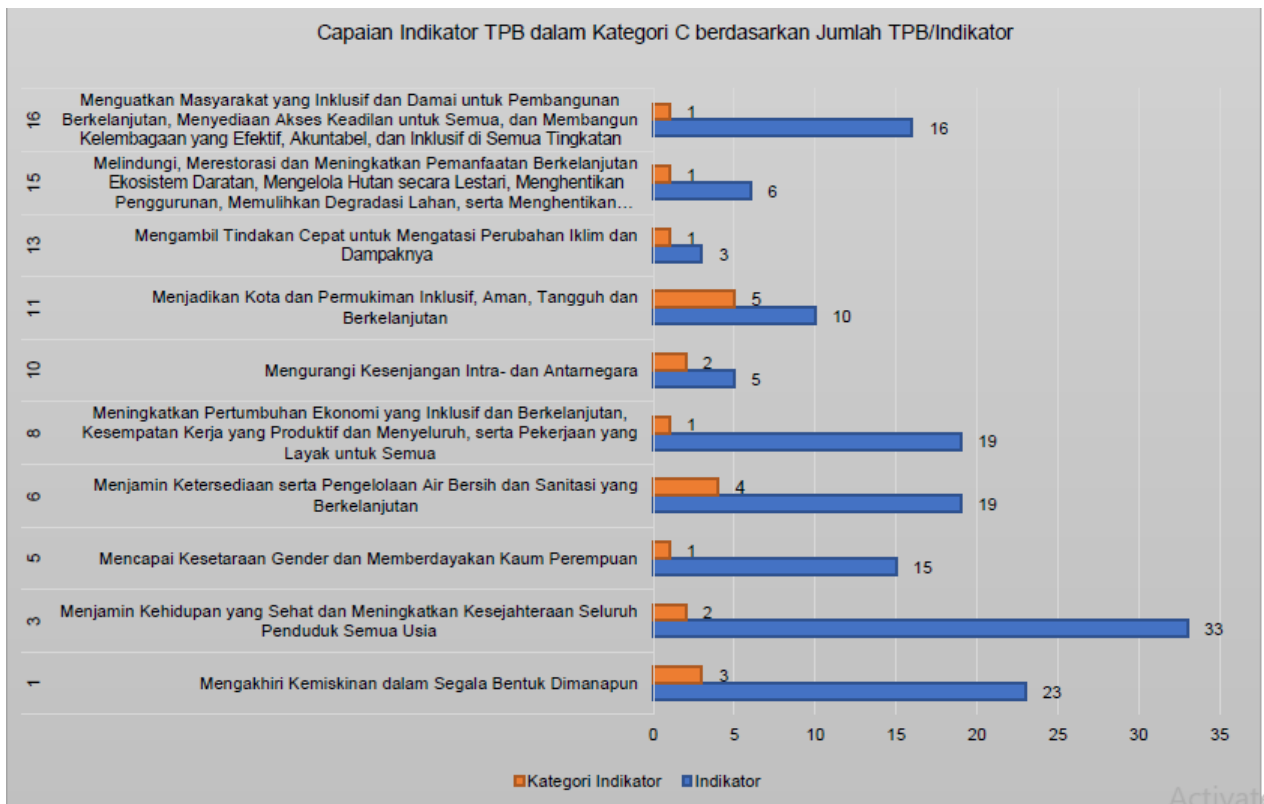
Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori sudah dilaksanakan namun belum mencapai target RPJMD. Indikator pada kategori ini terdapat pada hampir seluruh tujuan, dengan jumlah indikator pada setiap tujuan ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 4. 5 Capaian Indikator TPB dalam Kategori B berdasarkan Jumlah TPB/Indikator

Berdasarkan grafik diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki pekerjaan untuk menyelesaikan sebanyak 62 (enam puluh dua) indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target. Indikator yang belum mencapai target paling banyak adalah pada tujuan “Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia”. Selain karena indikatornya belum mencapai target, tujuan ini juga memiliki indikator terbanyak. Meskipun demikian, indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target RPJMD artinya di masa yang akan datang akan memerlukan upaya tambahan agar target dapat tercapai.

Sedangkan capain indikator kategori C berdasarkan TPB yakni dengan indikator dengan kategori berdasarkan capaian TPB adalah indikator yang belum dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan dan belum memenuhi target.

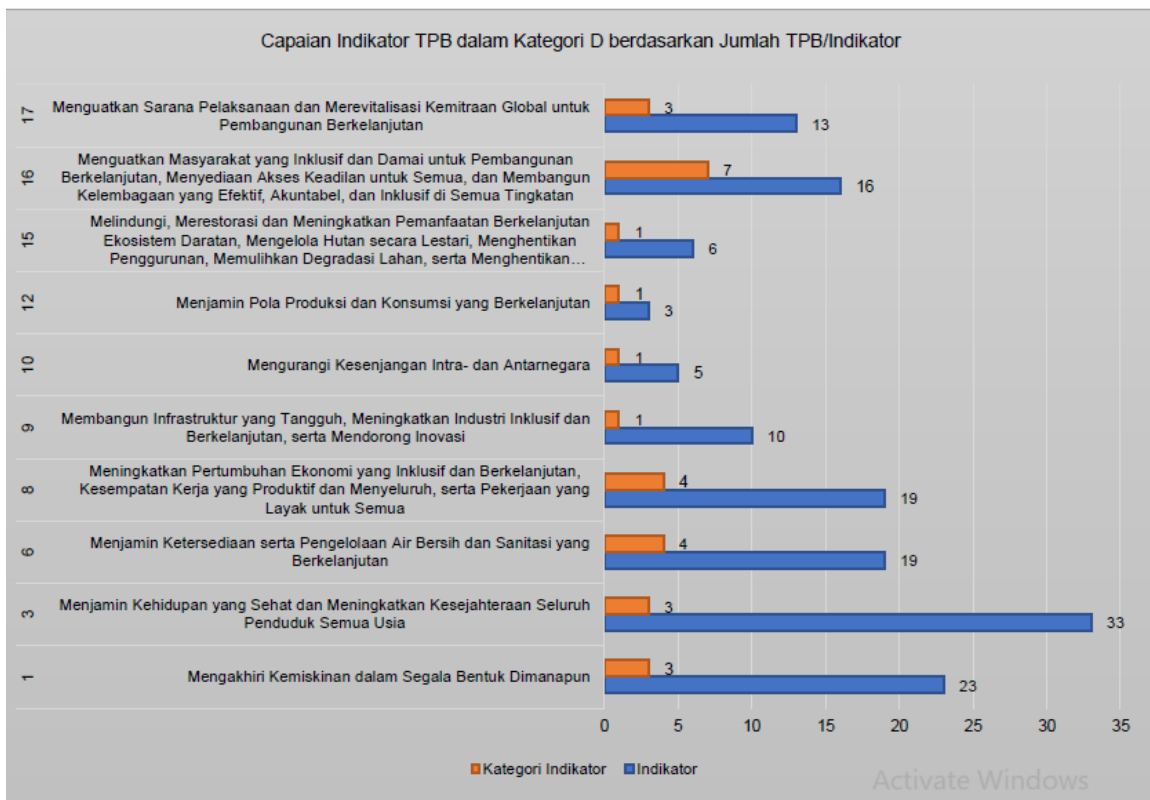


Gambar 4. 6 Capaian Indikator TPB dalam Kategori C berdasarkan Jumlah TPB/Indikator

Jumlah tujuan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 10 (sepuluh) tujuan dengan indikator sebanyak 21 (dua puluh satu). Indikator dengan kategori C ini harus dilaksanakan indikatornya dengan implementasinya pada program dan kegiatan yang dilaksanakan tiap OPD.

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan 21 (dua puluh satu) indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target RPJMD. Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target terbanyak adalah pada indikator “Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.

Capaian indikator kategori D berdasarkan TPB yakni kategori ini adalah indikator yang belum memiliki data. Berikut merupakan rincian dari jumlah indikator yang belum memiliki data pada setiap TPB pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 4. 7 Capaian Indikator TPB dalam Kategori D berdasarkan Jumlah TPB/Indikator

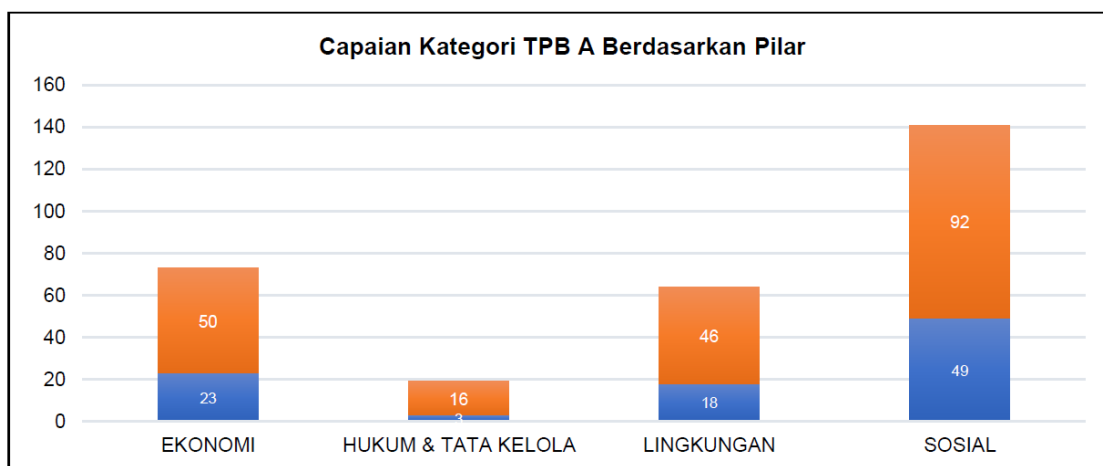
Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 28 (dua puluh delapan) indikator TPB yang belum memiliki data dari 10 (sepuluh) tujuan. Indikator dengan kategori D tersebut merupakan tanggung jawab OPD pada Provinsi Kalimantan Tengah. Ketersediaan data merupakan hal penting yang seharusnya dipenuhi OPD agar dalam pengambilan kebijakan maupun perencanaan akan sesuai dengan kondisi wilayah, tepat guna dan tepat sasaran.

Capaian TPB berdasarkan pilar menunjukkan bahwa Pilar Sosial merupakan TPB dengan capaian tertinggi dalam pemenuhan target yang ditetapkan (kategori A) kemudian pilar ekonomi dan pilar lingkungan. Sedangkan TPB dengan kategori B tertinggi dicapai oleh Pilar Sosial dengan capaian sebanyak 31 indikator. TPB dengan Indikator C tertinggi adalah Pilar Lingkungan Dan TPB dengan Indikator D tertinggi adalah Pilar Eknomi.

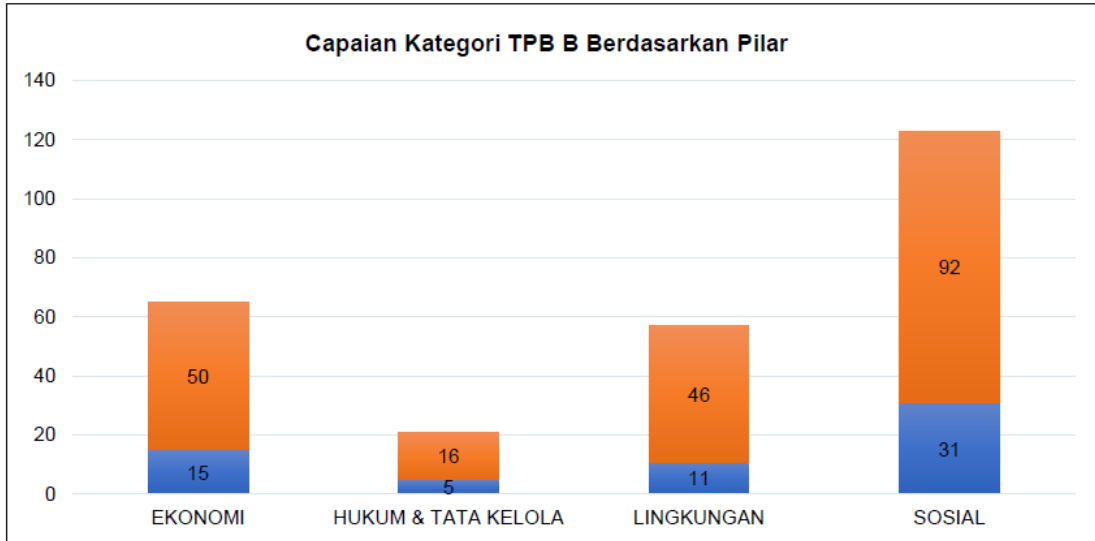
Tabel 4. 2 Capaian TPB berdasarkan TPB

Pilar	A	B	C	D	Total Indikator
Ekonomi	23	15	3	9	50
Hukum dan Tata Kelola	3	5	1	7	16
Lingkungan	18	11	11	6	46
Sosial	49	31	6	6	92
Total Kategori	93	62	21	28	204

Capaian indikator kategori A berdasarkan pilar dengan kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 93 dari total 204 indikator. Indikator TPB terbanyak yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional yaitu pada pilar sosial sebesar 49 indikator. Sedangkan indikator paling rendah yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional adalah pilar hukum dan tata kelola sebesar 3 indikator dari target 16 indikator. Pilar ekonomi sebanyak 23 indikator dan pilar lingkungan sebanyak 18 indikator.

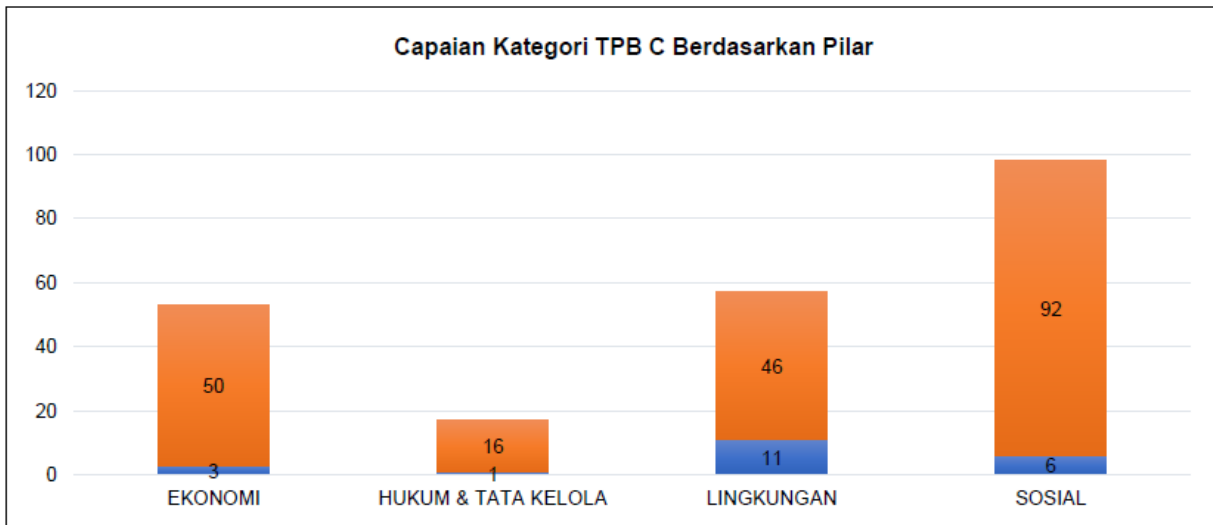
**Gambar 4. 8 Capaian Kategori TPB A Berdasarkan Pilar**

Capaian indikator kategori B berdasarkan pilar dengan kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 62 indikator dari total 204 indikator. Indikator TPB terbanyak kategori B adalah pada pilar sosial sejumlah 31 dari total 92 indikator. Yang terendah yaitu pilar hukum dan tata kelola sebanyak 5 indikator dari total 16 indikator.



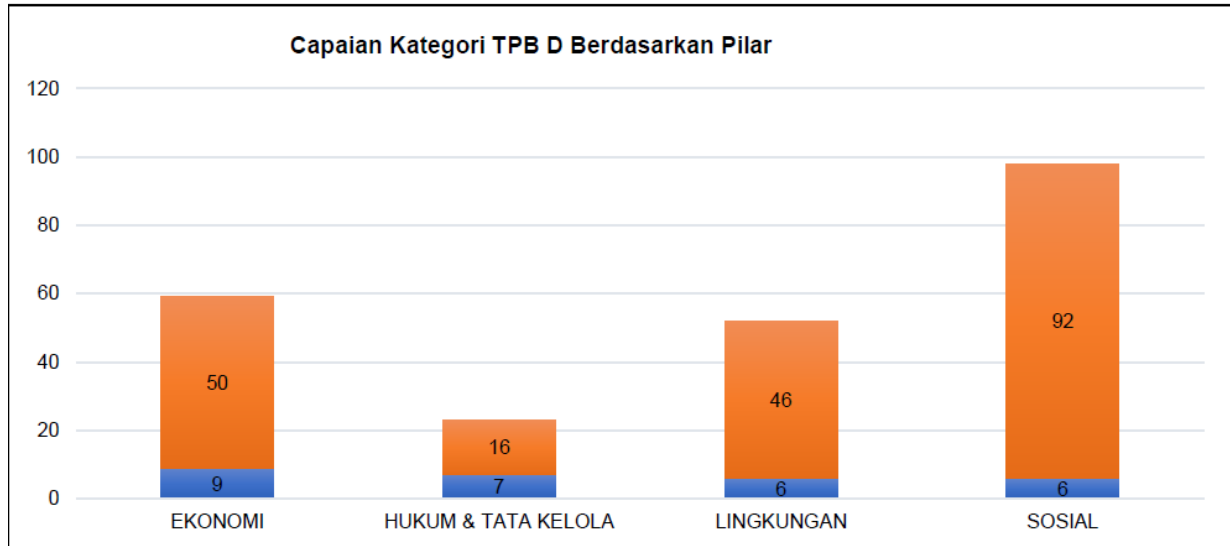
Gambar 4. 9 Capaian Kategori TPB B Berdasarkan Pilar

Capaian indikator kategori C berdasarkan pilar dengan kategori indikator yang belum dilaksanakan dan juga belum mencapai target nasional adalah 21 indikator dari jumlah total 204 indikator. Indikator TPB terbanyak yang masuk dalam kategori C adalah pilar lingkungan yaitu 11 indikator dan yang paling sedikit pada pilar hukum dan tata kelola sebanyak 1 indikator. Capaian indikator dalam kategori C berdasarkan pilar dapat dilihat pada gambar berikut.



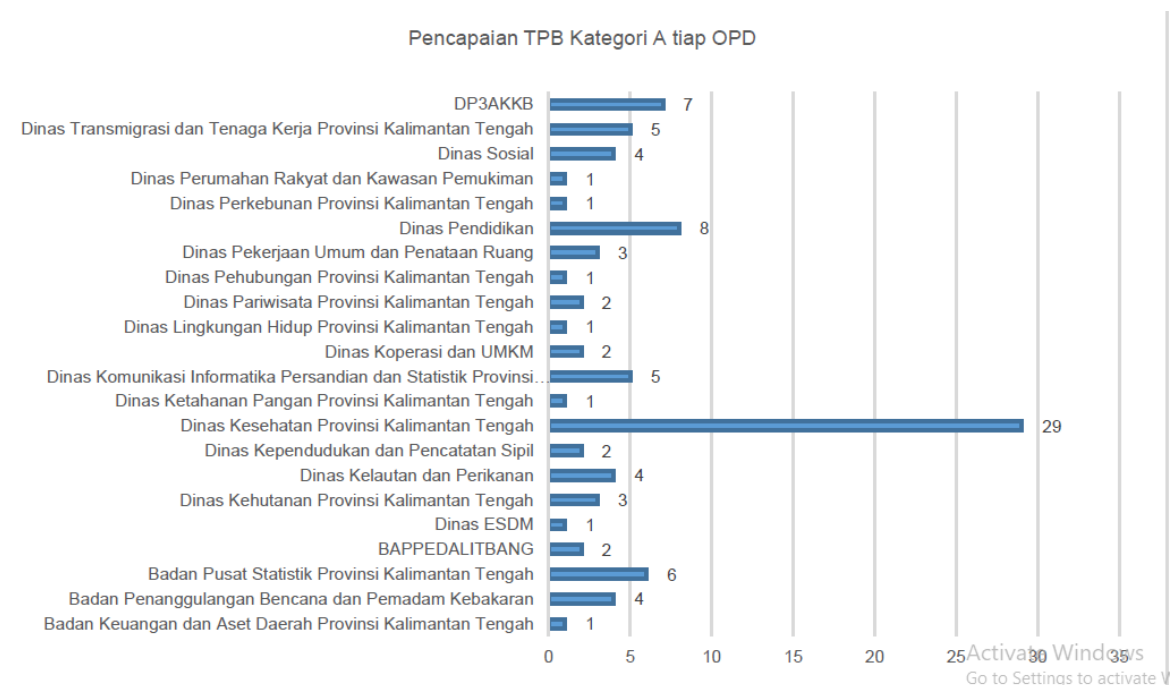
Gambar 4. 10 Capaian Kategori TPB C Berdasarkan Pilar

Capaian indikator kategori D berdasarkan pilar dengan kategori TPB D adalah indikator yang belum memiliki data yaitu sebanyak 28 indikator dari total 204 indikator. Indikator terbanyak yang belum ada data adalah pilar ekonomi yaitu sebanyak 9 dari total 50 indikator. Indikator yang paling sedikit mengalami ketiadaan data adalah pilar sosial yaitu 6 indikator dari total 92 indikator.

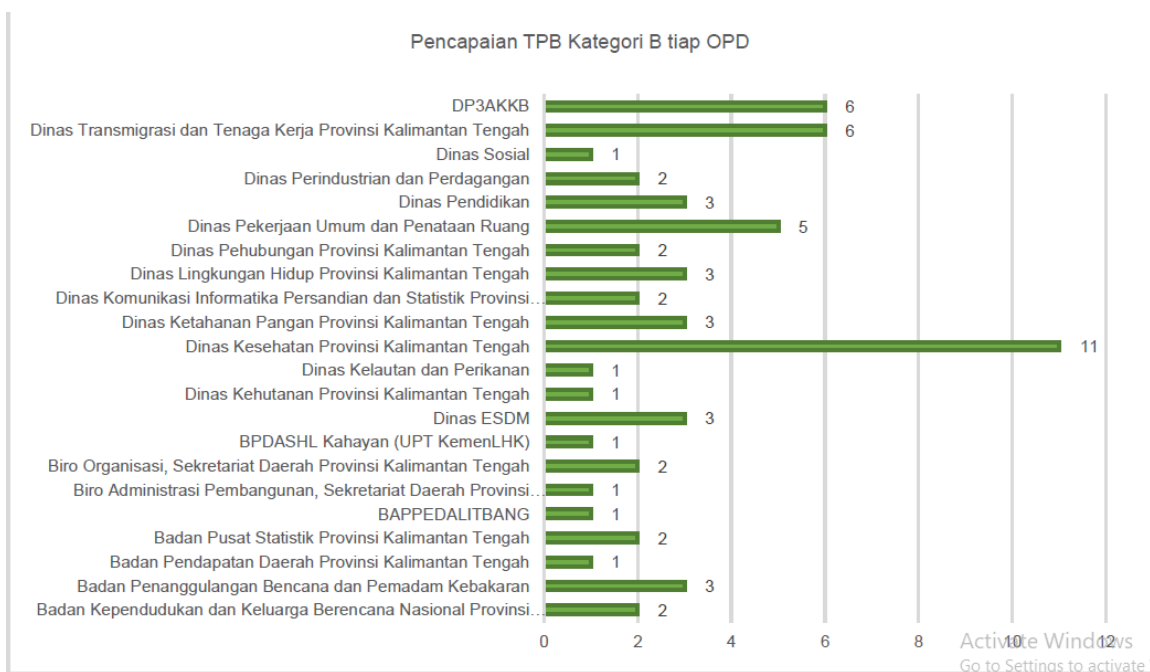


Gambar 4. 11 Capaian Kategori TPB D Berdasarkan Pilar

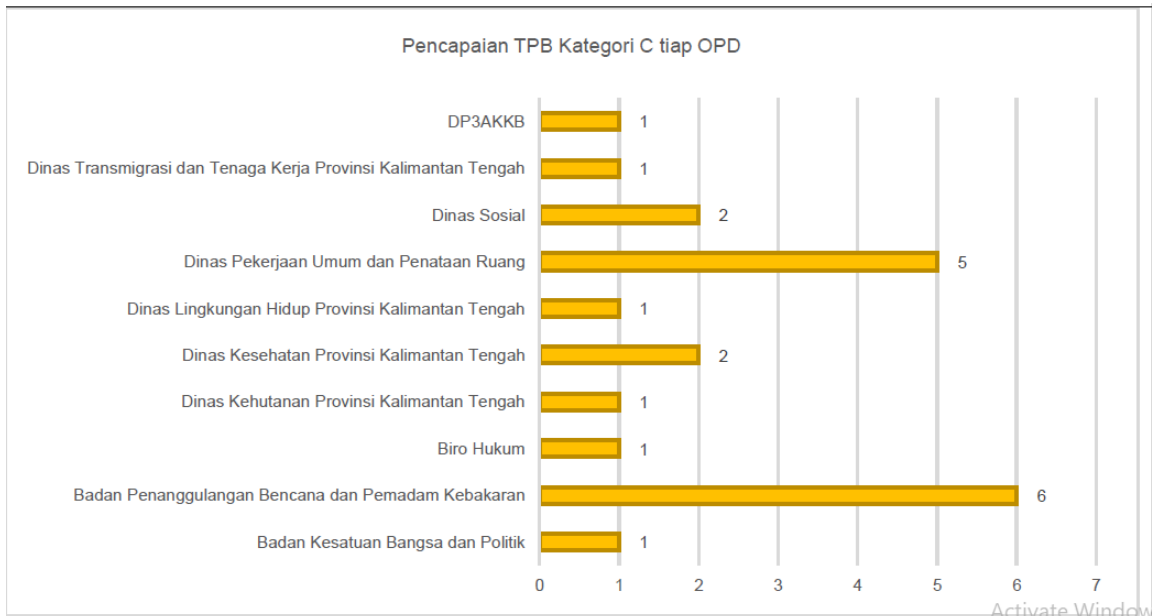
Capaian TPB berdasarkan Perangkat Daerah merupakan bagian yang menjelaskan mengenai kondisi capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap OPD. Kondisi capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap OPD berfokus kepada jumlah indikator TPB yang menjadi kewenangan OPD. Dari jumlah indikator tersebut, diidentifikasi jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, jumlah indikator yang belum melaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan jumlah indikator yang tidak/belum memiliki data. Hasil kondisi capaian dan analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya, menjadi bahan dalam mengidentifikasi isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan urusan yang ditangani oleh masing-masing OPD dan menjadi fokus utama yang harus dilaksanakan oleh setiap OPD. Berikut ini merupakan ringkasan capaian per Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibagi berdasarkan beberapa kategori yaitu :



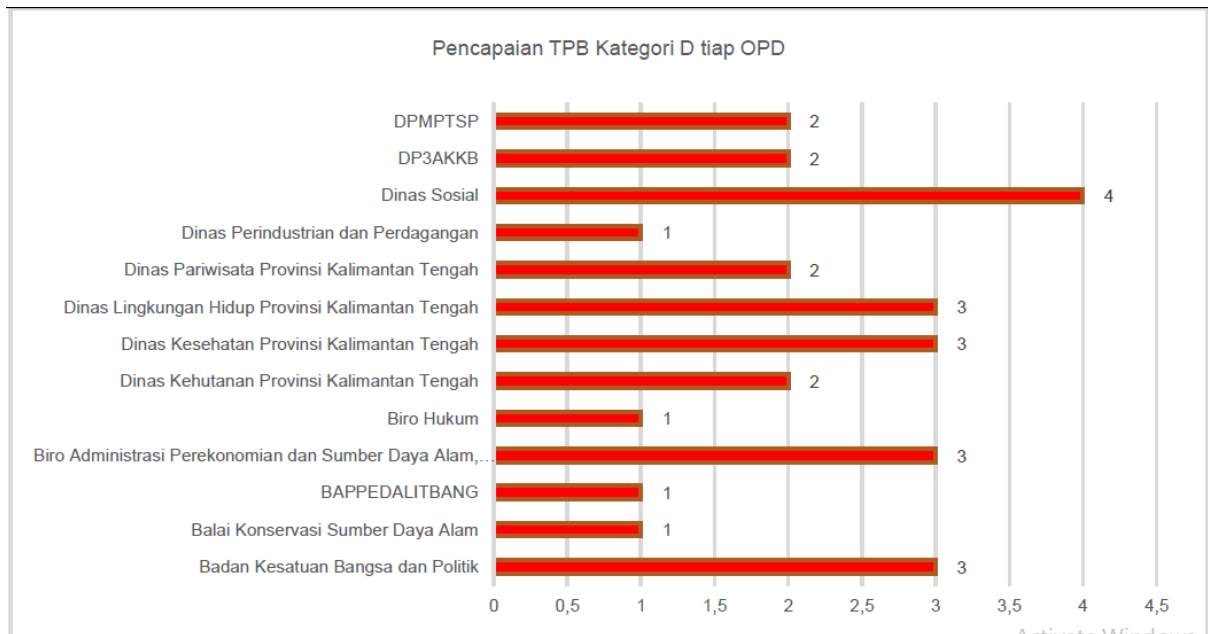
Gambar 4. 12 Capaian Kategori TPB A tiap OPD



Gambar 4. 13 Capaian Kategori TPB B tiap OPD



Gambar 4. 14 Capaian Kategori TPB C tiap OPD



Gambar 4. 15 Capaian Kategori TPB D tiap OPD

4.2.7 Isu Regional Daerah Sekitar

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1. Kalimantan Kalimantan Barat

Berdasarkan permasalahan dan permasalahan utama serta identifikasi

lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis, sebagai berikut :

- a. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terlalu luas sehingga menyulitkan dalam pelayanan dan pengalokasian anggaran
- b. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar termasuk di daerah perbatasan
- c. Kualitas regulasi, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang relatif rendah yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat
- d. Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- e. Masih rendahnya kesejahteraan penduduk
- f. Terjadinya kesenjangan ekonomi dimasyarakat
- g. Keberagaman penduduk Kalimantan Barat yang rentan akan terjadinya konflik sosial
- h. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- i. Belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang

2. Kalimantan Timur

Berikut adalah isu strategis yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam masa pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan:

a. Peningkatan daya saing sumber daya manusia

Peningkatan daya saing sumber daya manusia perlu dilakukan melalui penyediaan Lembaga pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan tenaga sektor pertanian dalam arti luas dan dan industri hilir pengolahan. Selain itu, juga dilakukan penurunan kesenjangan kualitas Lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, baik melalui peningkatan jumlah maupun pemenuhan kualitas dan standar kompetensi tenaga pendidik. Kesejahteraan tenaga pendidik menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam lima tahun mendatang, melalui pemberian tunjangan dan hal lain yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan peningkatan daya saing.

Peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja dengan orientasi industri pertanian dan hasil pertanian dalam arti luas, serta menumbuhkan kewirausahaan baru, menjadi bagian penting dalam menjawab

lemahnya daya saing. Keadilan pendidikan ini juga disertai dengan keadilan kesehatan dan jaminan sosial, agar setiap warga Kalimantan Timur dapat memperoleh kesejahteraan yang berkeadilan. Pengintegrasian nilai keagamaan dan nilai budaya dalam Lembaga pendidikan juga menjadi agenda utama dalam memenuhi sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kelompok-kelompok khusus, seperti perempuan, disabilitas, warga miskin, serta pemuda, menjadi fokus perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia lima tahun mendatang.

b. Percepatan transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal

Mengingat semakin langka dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, serta semakin menurunnya harga pasar komoditi tersebut, menjadikan masa depan Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dilakukan melalui optimasi produktivitas Kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang diiringi dengan pengembangan industry hilir pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah. Menggerakkan ekonomi alternatif non-kayu sebagai produk unggulan kehutanan, yang disertai dengan penguatan pada pengembangan industri pengolahannya, dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi Kalimantan Timur. Selain itu, pengurangan kemungkinan kehilangan pendapatan pada jalur distribusi dan perdagangan hasil pertanian dalam arti luas, menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah. Pengembangan sentra perikanan modern dan pariwisata pada Kawasan danau Jempang, Semayang dan Melintang di Daerah Aliran Sungai Mahakam, dan

kawasan sepanjang pesisir timur, dapat menjadi potensi yang besar dalam memberikan kontribusi perekonomian makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

c. Peningkatan Aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta pada memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan di Kalimantan Timur. Ketersediaan perumahan yang layak huni, air baku dan air minum bersih, serta listrik, dan disertai dengan infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas perhubungan pelayarah, menjadi perhatian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, dikuatkan oleh infrastruktur yang memadai, menjadi denyut nadi tranformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur.

d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Kalimantan Timur masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produkvitas hasil pertanian. Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK. Dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana di Kalimantan Timur, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, diantaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, Desa Tangguh bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

e. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja baik secara administratif maupun sosial. Sebagai Provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot karena memiliki peluang terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dan kebocoran pendapatan daerah. Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum IV yang baik, dan memperkuat profesionalitas pemerintahan. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah/zona bebas korupsi. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan melihat berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting untuk diprioritaskan.

f. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi SPM untuk urusan wajib terutama pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan social. Berdasarkan capaian Pembangunan Kalimantan Timur, masih banyak urusan wajib yang belum diselesaikan dengan baik dikarenakan keterbatasan sumberdaya. Selain itu, belum seluruh kementerian teknis menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan SPM. Sementara di daerah, Kalimantan Timur juga menghadapi masalah dan isu strategis dalam penerapan SPM sebagai berikut :

- 1) Kapasitas daerah dalam tahap persiapan rencana pencapaian SPM belum dipetakan secara menyeluruh;
- 2) Kapasitas Daerah dalam pengintegrasiaan rencana dan dokumen perencanaan SPM masih dihadapkan pada permasalahan lemahnya pemahaman aparatur daerah;
- 3) Kapasitas daerah dalam pembelanjaan penerapan SPM masih

dihadapkan pada terbatasnya kemampuan keuangan daerah;

- 4) Kapasitas daerah dalam tahap penyampaian informasi masih dihadapkan pada kurangnya data dan informasi terkait pencapaian indikator-indikator kinerja SPM.

3. Kalimantan Selatan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di daerah, dan dengan memperhatikan beberapa Isu strategis internasional, nasional dan regional, maka isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh terhadap daerah pada masa-masa mendatang, serta merupakan hal yang akan ditangani dalam jangka waktu lima tahun kedepan, terdiri atas :

a. Kualitas sumber daya manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan, yang diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 65,2 (2010) menjadi 67,63 (2014) dengan kategori sedang (dari 4 kategori IPM, yaitu Sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah). Angka IPM Kalimantan Selatan dimaksud berada di bawah angka IPM nasional yang telah mencapai 68,9 (2014).

Kondisi IPM Kalimantan Selatan masih relatif jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Selain berada di bawah angka Nasional, jika dilihat dari posisinya maka provinsi ini juga berada diposisi 25 secara nasional. Secara regional posisinya juga berada di bawah provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.

Tertinggalnya angka IPM tersebut terutama disebabkan oleh indikator Angka Harapan Hidup masyarakat Kalimantan Selatan yang pada Tahun 2014 posisinya masih jauh berada di bawah secara nasional, yaitu sebesar 67,47 tahun dibandingkan dengan angka rata-rata nasional yang sudah mencapai 70,59 tahun. disamping angka Angka Rata-rata Lama Sekolah yang juga masih perlu ditingkatkan, karena sebagian besar penduduk yang bekerja hanya memiliki pendidikan SD atau sederajat mencapai 33,42 % dan bahkan yang tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD mencapai 19,01 %.

Kondisi pencapaian indikator kesehatan dan pendidikan tersebut, antara lain disebabkan oleh faktor sosial budaya masyarakat yang relatif kurang mendukung terhadap akselerasi pencapaian IPM

Kalimantan Selatan. Pada sisi lain sejalan dengan berjalannya MEA, maka tingkat keterampilan penduduk usia kerja, juga harus mendapatkan perhatian khusus kedepannya, masyarakat kalsel dapat bersaing secara nasional dan ASEAN.

b. Daya saing perekonomian daerah

Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2011 berada di posisi 8 secara nasional dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,97 %, di atas angka nasional yang hanya mencapai 6,49 %. Namun dengan terjadinya krisis perekonomian global, yang mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan Kalsel dimana perlambatan ini terjadi sejak tahun 2012 dan terus berlanjut sampai dengan tahun 2015 yang kemudian hanya tumbuh sebesar 3,84 % atau berada di bawah angka nasional yang mencapai 4,79 %, dengan posisi menurun menjadi ke 27 secara nasional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh merosotnya harga komoditas ekspor Kalsel, yang didominasi komoditas sektor pertambangan dan perkebunan, sedangkan sektor pertambangan merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kalsel. Isu peningkatan pertumbuhan perekonomian, seiring dengan perlunya transformasi perubahan struktur perekonomian daerah kedepannya juga menjadi isu penting dalam sektor perekonomian. Selain kondisi perlambatan perekonomian ini, memerlukan perhatian yang serius kedepannya, untuk dapat tumbuh lebih baik lagi, perlu perhatian juga terhadap indikator kemiskinan dan pengangguran, karena kondisi yang ada sekarang telah mulai berdampak terhadap adanya peningkatan angka kemiskinan dan angka pengangguran pada tahun 2015.

c. Kualitas dan Kuantitas Lingkungan

Kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Selatan memerlukan perhatian yang serius, jika dilihat dari indikator angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di posisi 22 secara nasional (walaupun posisi ini telah mengalami perbaikan dari sebelumnya di posisi 24). Indeks ini diukur dari: (a) Tutupan Lahan yang sebelumnya hanya mencapai 39,24 menjadi 41,62; (b) Kualitas Air dari 8,70 menjadi 26,69; (c) Kualitas Udara dari 97,11 menjadi 98,46. Tutupan lahan yang disebabkan oleh pembukaan lahan dari sektor pertambangan, kualitas air disebabkan oleh meningkatnya pencemaran

oleh limbah domestik dan akibat aktifitas perekonomian lainnya, sedangkan kualitas udara terutama disebabkan oleh dampak dari kebakaran hutan dan lahan.

d. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

Perkembangan perekonomian dan sosial masyarakat yang telah berkembang pesat, belum sejalan dengan tingkat percepatan pelayanan infrastruktur perekonomian dan dasar yang tersedia. Untuk itu perlu segera peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan infrastruktur perekonomian seperti ketersediaan energi listrik dan tingkat pelayanan perhubungan.

Ketersediaan energi listrik jauh berada di bawah dari tingkat kebutuhan untuk kegiatan sosial dan ekonomi yang ada, apalagi jika dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi kedepannya, sedangkan perhubungan udara (kondisi kepadatan dan pelayanan bandara), perhubungan darat (tingkat kepadatan lalu lintas yang sudah menurunkan waktu tempuh) dan perhubungan laut (belum mempunyai pelabuhan laut yang representative, yang dapat menghubungkan provinsi ini dengan kapal-kapal besar).

Untuk pelayanan Infrastruktur dasar seperti air bersih, jalan, listrik perdesaan yang memerlukan perhatian serius agar pemerataan kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi. Selain itu pelayanan infrastruktur ini belum merata antar daerah, sehingga isu pemerataan pelayanan infrastruktur juga penting, selain peningkatan pelayanan terhadap daerah yang sudah terlayani.

e. Kinerja Pemerintahan Daerah

Kondisi kinerja pemerintahan daerah provinsi Kalimantan Selatan, secara umum sudah relatif baik, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa indikator, seperti: Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah telah mencapai WTP dalam beberapa tahun terakhir ini, Indikator Kinerja Akuntabilitas (LAKIP) telah mencapai nilai B++ dari sebelumnya pada nilai C. Indikator Kinerja Ketepatan Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran (APBD), selalu Tepat Waktu, Indikator Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah terus mengalami peningkatan Kemandirian dimaksud dapat dilihat dari rasio PAD terhadap Dana Perimbangan yang terus meningkat yaitu pada tahun 2010 dari 54,08 % (PAD) : 44,89% (Dana Perimbangan) menjadi 63,36% (PAD) : 29,12% (Dana Perimbangan) pada tahun 2015.

Namun demikian dengan adanya perlambatan perekonomian Kalimantan Selatan telah berdampak terhadap penurunan Pendapatan Daerah, untuk itu isu tentang peningkatan kapasitas fiskal merupakan salah satu pekerjaan penting bagi pemerintah provinsi, agar pembangunan daerah tetap dapat berlanjut sebagaimana yang diharapkan. Secara umum pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, kedepannya perlu lebih meningkatkan kinerjanya lagi, agar pemerintah provinsi ini lebih akuntabel, transparan dan profesional, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah.

4.2.7.1 Isu Perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah dan Daerah Sekitar

Permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Tengah dan daerah sekitar seperti Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara merupakan masalah yang belum dapat diatasi secara maksimal hingga sekarang ini. Salah satu isu masalah dalam perekonomian yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.

Tabel 4. 3 Isu Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dan Daerah Sekitarnya

<i>Indikator Makro</i>	<i>Tahun</i>	<i>Kalimantan Tengah</i>	<i>Kalimantan Barat</i>	<i>Kalimantan Timur</i>	<i>Kalimantan Selatan</i>	<i>Kalimantan Utara</i>
<i>Laju Pertumbuhan</i>	2018	5,61	5,07	2,64	5,08	5,36
	2019	6,12	5,09	4,74	4,08	6,9
<i>Ekonomi PDRB</i>	2020	-1,40	-1,82	-2,85	-1,81	-1,11
	2018	52,11	38,81	174,16	41,3	130,55
<i>Perkapita</i>	2019	55,26	41,85	175,25	42,8	139,08
	2020	54,96	41,68	160,11	41,9	138,18
	2018	4,25	2,24	3,24	2,63	5
<i>Inflasi</i>	2019	2,45	2,64	1,66	4,01	1,47
	2020	1,03	2,46	0,78	1,68	1,32
	2018	5,17	7,77	6,06	4,54	7,09
<i>Kemiskinan</i>	2019	4,98	7,49	5,91	4,55	6,63
	2020	4,82	7,17	6,64	4,38	6,8
	2018	4,01	4,26	6,41	4,5	5,11
<i>TPT</i>	2019	4,1	4,45	5,94	4,31	4,49

2020	4,58	5,81	6,87	4,74	4,97
------	------	------	------	------	------

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Dari data diatas memberikan informasi kondisi makro ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi lain di pulau Kalimantan. Indikator ekonomi makro digambarkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Inflasi, Kemiskinan, dan TPT tiga tahun terakhir. Jika dilihat dari masing-masing indikator makro, dapat diketahui bahwa di tahun 2020 terjadi penurunan pada setiap provinsi. Hal ini disebabkan Penyebaran COVID-19 yang meluas berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lebih rendah dari pertumbuhan 2019 melalui beberapa jalur. COVID-19 menurunkan permintaan agregat serta mengganggu proses produksi dan penawaran agregat yang kemudian menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia pada 2020.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 sebesar 5,61 persen kemudian meningkat 6,12 persen di tahun 2019. Bila diurutkan, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 seluruh provinsi di pulau Kalimantan dari yang tertinggi ke yang terendah adalah Kalimantan utara dengan laju pertumbuhan sebesar 6,9 persen kemudian di posisi kedua provinsi Kalimantan Tengah dengan laju pertumbuhan 6,12. Kalimantan selatan dengan laju pertumbuhan sebesar 4,08 persen berada di posisi terakhir.

Namun, terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Dari data diatas menunjukkan pertumbuhan yang negative. Bukan hanya provinsi-provinsi yang ada di pulau Kalimantan tetapi juga di seluruh Indonesia. Provinsi Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan -1,4 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang negative ini masih lebih rendah dari pada Kalimantan timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan yang masing-masing bertumbuh -1,82 persen, -2,85 persen dan -1,81 persen.

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi otomatis menyebabkan penurunan pendapatan per kapita masyarakat. Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya 55,26 juta turun menjadi 54,96 juta pada tahun 2020. Penurunan pendapatan per kapita masyarakat akan menyebabkan berkurangnya konsumsi masyarakat yang pada akhirnya menurunkan inflasi.

Pertumbuhan laju ekonomi yang negative di tahun 2020 ternyata

tidak mempengaruhi pelonjakan penduduk miskin di provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah mampu menurunkan angka kemiskinan 0,16 persen dari tahun sebelumnya menjadi 4,82 persen. Selain Kalimantan Tengah, Tiga Provinsi lain juga berhasil menurunkan angka kemiskinan. Namun, penurunan angka kemiskinan tidak dialami oleh provinsi Kalimantan Timur. Disisi lain Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan dimana angka TPT Kalimantan Tengah naik sebesar 0,48 persen.

4.2.8 Isu Strategis Kalimantan Tengah

Isu strategi merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategi lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategi juga dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang disinkronkan dengan visi-misi dan program unggulan Kepala Daerah terpilih. Hasil perumusan isu strategis akan menghasilkan alternatif isu strategis dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun alternatif isu strategis Kalimantan Tengah antara lain :

1. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan
2. Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah
3. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 4.0
4. Pembangunan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5. Pengembangan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Tengah
6. Pelestarian Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan
7. Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
8. Perwujudan Ketentraman dan Ketertiban Berbasis Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat yang Berkeadilan
9. Pemekaran Wilayah
10. Penurunan Angka *Stunting*
11. Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan
12. Corporate Education dalam Manajemen ASN
13. Tumpang Tindih Lahan

Berikut adalah deskripsi isu strategis yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya oleh Provinsi Kalimantan Tengah dalam masa pelaksanaan pembangunan 5 (lima tahun kedepan):

1. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi alam yang menjanjikan untuk mengembangkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pengembangan sumber daya alam potensial dapat diarahkan untuk agribisnis yang bertujuan untuk agroindustri maupun ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Pemerintah mencanangkan pengembangan kawasan lumbung pangan (*food estate*) di eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Kawasan food estate di Kalimantan Tengah akan digarap di lahan seluas 168.000 ha. Pada 2020 dikerjakan seluas 30.000 ha sebagai model percontohan. Lahan ini akan ada di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 ha dan Kabupaten Kapuas 20.000 ha.

Selain pengembangan pertanian dalam arti luas, potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah namun belum optimal dikembangkan yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan daya saing pariwisata perlu dilakukan dengan strategi yang tepat baik dari aspek pengelolaan destinasi wisata, pemasaran pariwisata, dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menghidupkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Upaya pengembangan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengatasi kondisi makro ekonomi yang memburuk akibat pandemi COVID-19. Pengembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah harus bertransformasi dari ketergantungan kepada sektor eksploitasi SDA menjadi sektor industri pengolahan lanjutan dari produk-produk SDA dan juga mengembangkan sektor jasa dalam arti lebih luas untuk peningkatan ekonomi lokal dan regional. Ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 (y-on-y) terkontraksi sebesar 3,12 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020, maka ekonomi Kalimantan Tengah triwulan III-2020 sebesar tumbuh 1,69 persen. Ini menunjukkan bahwa secara berlahan perekonomian dapat membaik dan diharapkan pada tahun

depan dapat bertumbuh lebih normal.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda Provinsi Kalimantan Tengah dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 yaitu penyediaan jaring pengaman sosial dan penguatan dunia usaha. Penguatan dunia usaha tidak hanya ditujukan untuk pengusaha besar dan sedang, namun juga usaha kecil termasuk koperasi dan UKM. Berbagai kemudahan atau insentif diberikan oleh Pemerintah untuk menghidupkan kembali dunia usaha. Kedepannya, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah diharapkan dapat mengembangkan usaha yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.

Hal yang tak kalah penting dalam mendukung kebijakan perekonomian dan investasi yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif, promosi yang tepat sasaran, dan kerjasama investasi. Kebijakan penanaman modal di Kalimantan Tengah masih perlu dibenahi untuk mengatasi masalah menurunnya realisasi investasi.

Selain itu, transformasi ekonomi dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital merupakan kebijakan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia, melalui penerapan revolusi industri 4.0 pengembangan sektor keuangan melalui teknologi finansial (fintech) dan memperluas perdagangan berbasis digital. Dalam perkembangan ekonomi digital, semua aktivitas dan transaksi yang menggunakan berbagai platform internet akan tercatat dan terkoleksi sebagai himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tak berstruktur (big data). Big data merupakan aset baru yang harus dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai dasar merencanakan pengembangan inovasi produk dan inovasi distribusi serta kebijakan pemerintah di masa depan. Penguasaan big data dan kemampuan menganalisa big data haruslah dianggap sebagai sebuah aset yang menjadi modal untuk mengefisienkan proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Kemampuan memiliki dan memanfaatkan big data menjadi prioritas di era globalisasi.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan sejak lama dengan berbagai pendekatan atau strategi. Dalam pelaksanaannya, upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterpaduan dan dilakukan secara terus-menerus. Tingkat

kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun dan pada September 2019 mencapai 4,81 persen. Tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah berada pada posisi kedua terendah di Pulau Kalimantan setelah Provinsi Kalimantan Selatan.

Walau cukup rendah, namun kemiskinan di Kalimantan Tengah tetap harus diwaspadai terutama setelah adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia tahun 2020. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Maret 2020 mencapai 132,94 ribu orang (4,82 persen) atau berkurang 1,65 ribu orang (-1,23 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2019 yang berjumlah 134,59 orang (4,98 persen). Meski terjadi penambahan penduduk miskin jika dibandingkan dengan September 2019, namun banyaknya orang miskin pada Maret 2020 ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Maret 2019.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2019 – Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 2,72 ribu orang (5,6 persen) dari 48,56 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 51,28 ribu orang pada Maret 2020. Sedangkan orang miskin di daerah perdesaan berkurang 4,37 ribu orang (5,08 persen) dari 86,04 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 81,66 ribu orang pada Maret 2020. Hal ini menggambarkan bahwa bertambahnya orang miskin di perkotaan karena banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan selama Maret 2019 hingga Maret 2020.

Kemiskinan tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan, yang umumnya dapat dilihat dari gini rasio. Pada bulan Maret 2020, ketimpangan pengeluaran antar penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,329. Angka ini naik sebesar 0,006 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio bulan September 2019 yang sebesar 0,335.

Masalah kemiskinan tidak lepas dari pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2020 sebesar 4,58 persen. Angka ini naik sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2019. Peningkatan TPT banyak disumbang oleh dampak pandemi COVID-19.

Dampak lanjutan dari masalah kemiskinan dan pengangguran adalah timbulnya masalah sosial seperti penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) dan angka kriminalitas yang meningkat. Kondisi ini memerlukan penanganan yang komprehensif untuk pembangunan pada tahun-tahun berikutnya, agar dapat memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 4.0 (e-government)

Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dukungan sumber daya aparatur yang bersih, professional dan dapat merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan. Penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, diharapkan dapat mewujudkan *good governance*.

Setelah adanya gerakan reformasi Tahun 1998, paradigma yang berkembang dalam pemerintahan Indonesia adalah tuntutan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya dan terdapatnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan hal tersebut, maka timbulah istilah *clean and good governance* di Indonesia, sehingga terciptanya kehidupan yang madani yang berorientasi pada era digitalisasi modern. *Good governance* memiliki makna tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan *clean and good governance* terutama dari segi akuntabilitas dan transparansi publik, maka dibutuhkan suatu langkah kebijakan yang terarah dalam perubahan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui pemanfaatan Information and Communication Technologies (ICT) yaitu *e-government* atau Pemerintahan Elektronik. Sehingga tujuan penyelenggaraan *e-government* adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

E-government merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk

mendapatkan kemudahan akses informasi publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Kebijakan dan strategi tersebut diatur dalam Perpres SPBE Nomor 95 Tahun 2018 dan Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data. Untuk itu, sosialisasi *e-government* perlu dilakukan secara konsisten, berkesinambungan dan insentif kepada masyarakat dikarenakan masyarakat belum mengerti apa dan bagaimana aplikasi e-government serta manfaat yang dapat mereka ambil.

4. Pembangunan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Salah satu unsur penting dalam pembangunan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan, sehingga perlu terus dilakukan peningkatan kualitas. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di sebuah wilayah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 sebesar 70,91, berarti masuk kategori Tinggi. Walau demikian, masih terdapat 5 kabupaten yang berada pada kategori Sedang yang perlu mendapat perhatian.

Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting terlebih untuk pendidikan dan kesehatan yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah terkait pelayanan dasar dan harus diberikan kepada masyarakat yang berhak secara minimal sesuai standar pelayanan minimal.

Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi yang diperkirakan akan berakhir pada tahun 2037, namun bonus demografi ini tidak diperoleh secara otomatis, tetapi memerlukan prasyarat utama yaitu tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam hal ini setidaknya terdapat tiga jalur yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas SDM yakni (1) membenahi kualitas SMK dengan cara merevitalisasi 5000 SMK dan diharapkan dapat mengatasi lebih dari 60% masalah SMK, (2) Membenahi melalui jalur Politeknik dan vokasi. Suka tidak suka pemerintah harus menambah kapasitas politeknik, karena jika tidak ditambah 1,8 juta lulusan SMK akan lari ke jobseeker, harapannya lima tahun kedepan akan terbangun 500 politeknik baru (3) melalui jalur pelatihan.

Pembangunan manusia di Kalimantan Tengah juga diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Perwujudan keluarga berkualitas juga termasuk di dalamnya upaya pembinaan dan pembangunan pemuda dan olah raga.

5. Pengembangan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Tengah

Infrastruktur wilayah merupakan pendukung pembangunan di berbagai aspek. Sampai dengan tahun 2019, masih banyak ditemui kekurangan pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah. Selain itu, dengan kondisi infrastruktur yang sudah ada saat ini, masih ditemui belum optimalnya kualitas pelayanan. Pemenuhan kebutuhan dan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah untuk mendukung aktivitas masyarakat, pelayanan umum/publik, dan daya saing daerah perlu diprioritaskan untuk pembangunan jangka menengah yang akan datang di Kalimantan Tengah.

Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Tengah yang cukup luas (nomor 2 terluas setelah Provinsi Papua) menyebabkan pentingnya sarana dan prasarana untuk konektivitas wilayah. Keterhubungan antar dan intra wilayah baik melalui jalur darat, udara, maupun ASDP masih perlu ditingkatkan cakupan dan kualitas pelayanannya. Demikian juga dengan pelayanan infrastruktur strategis lainnya seperti air bersih, air limbah, dan listrik, membutuhkan perhatian agar dapat dirasakan pelayanannya secara merata keseluruh wilayah.

Rencana Pembangunan Pelabuhan Utama di Provinsi Kalimantan Tengah direncanakan untuk pembangunan Pelabuhan Utama di Teluk Sampit, Teluk Kumai dan Teluk Sangiang.

Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api di Kalimantan Tengah :

1. Sistem Jaringan Jalur Kereta Api utama Provinsi meliputi :
 - a. Jalur kereta api Puruk Cahu – Batanjung melalui Bangkuang (PSN);
 - b. Jalur kereta api Puruk Cahu - Kuala Kurun - Rabambang - Palangkaraya - Pulang Pisau – Kuala Kapuas;
 - c. Jalur kereta api Rabambang - Tumbang Samba - Sampit - Kuala Pembuang - Teluk Segintung;
 - d. Jalur kereta api Tumbang Samba - Rantau Pulut - Nanga Bulik - Pangkalan Bun - Kumai.
 - e. Jalur Kereta Api Kudangan – Nanga Bulik – Kumai.
2. Sistem jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota berdasarkan Raperpres Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang Meliputi jalur Kereta

Api dengan:

- a. Prioritas tinggi, Ruas Jalan Kereta Api Palangka Raya – Banjarmasin;
 - b. Prioritas sedang, Ruas Jalan Kereta Api Muara Teweh – Buntok – Tanjung;
 - c. Prioritas Rendah, Ruas Jalan Kereta Api Buntok – Palangka Raya, Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun, Pangkalan Bun – Sanggau.
3. Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kalimantan Tengah meliputi : Stasiun Kota Palangkaraya, perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Kuala Kapuas, Batanjung (Kabupaten Kapuas), Kuala Kurun, Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (Kabupaten Lamandau), Kuala Pembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut (Kabupaten Seruyan), Tumbang Samba (Kabupaten Katingan).

Pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur wilayah harus dilakukan secara terpadu dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Seringkali pembangunan ataupun pengembangan infrastruktur wilayah membutuhkan biaya yang besar, yang jika hanya mengandalkan APBD provinsi maka tidak akan mencukupi untuk percepatan pembangunan. Untuk itu perlu didorong peran serta masyarakat dan/atau swasta dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur.

Sebagai upaya yang dapat mendukung kegiatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dapat dilakukan dengan cara *Multy Years Contract* (MYC) sehingga dapat meringankan beban daerah. Dengan sistem pembayaran ini, pemerintah dapat melaksanakan target percepatan pembangunan dengan skema sumber dana baik yang berasal dari APBD, bantuan pihak swasta maupun Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap.

6. Pelestarian Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan daerah tidak terlepas dari aktivitas untuk mengisi atau memanfaatkan ruang. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan seringkali menemui masalah kepentingan ekonomi yang berbenturan dengan lingkungan hidup ataupun sosial budaya. Pembangunan wilayah yang identik dengan aktivitas pemanfaatan ruang tentu harus

mempedomani rencana tata ruang, baik struktur maupun pola ruang. Selain itu, pembangunan juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, aspek sosial dan kelembagaan untuk keberlanjutan hidup manusia pada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara serasi, selaras, seimbang dan lestari demi terjaminnya keberlanjutan pembangunan daerah harus menjadi syarat penting dalam pembangunan terutama dalam pembangunan fisik dan infrastruktur wilayah.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, maka keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam perlu terus dipelihara dan dimanfaatkan. Upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan penyempurnaan atas pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA sehingga diharapkan pengelolaan sumber daya berbasis lahan dapat lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu, pemanfaatan dan pendayagunaan SDA diharapkan dapat dilakukan dengan mengacu kepada hasil pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan. Bila ditemui adanya kesalahan pengelolaan oleh pemegang izin, maka pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal lain yang penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah penerapan pembangunan rendah emisi. Kegiatan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Tengah perlu dilakukan untuk meminimalkan kegiatan manusia yang menimbulkan perubahan penggunaan lahan hutan menjadi bukan hutan. Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diharapkan dapat dilakukan secara bersamaan dan bersinergi untuk pembangunan jangka menengah kedepan.

7. Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak awal tahun 2020 masih berlangsung sampai saat ini. Selain berdampak buruk pada aspek kesehatan, pandemi COVID-19 telah membuat kehidupan sosial, ekonomi, keuangan dan aspek lainnya memburuk. Kondisi ini ditandai dengan memburuknya indikator makro seperti laju pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sampai

minus, meningkatnya jumlah penduduk miskin, tutupnya berbagai usaha dan banyaknya pekerja yang mengalami PHK menyebabkan pengangguran, bertambahnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terhambatnya proses belajar mengajar, distribusi barang dan orang yang terhambat karena kebijakan pembatasan mobilitas untuk membatasi penyebaran COVID-19, dan berbagai kondisi lainnya.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil berbagai kebijakan yang selaras dengan kebijakan Pemerintah. Kebijakan tersebut diutamakan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak sosial dan ekonomi. Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan tatanan baru pemerintahan menuju new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru, dilakukan melalui beberapa inovasi, antara lain:

1. Layanan Prima Bebas COVID-19.

Penerapan layanan publik dengan mengutamakan protocol kesehatan, tanpa mengurangi kenyamanan dan kecepatan layanan menuju kehidupan normal baru.

2. Aman dan Nyaman Bebas COVID-19

Dalam melakukan pelayanan public perlu memperhatikan standar protocol kesehatan tanpa terkecuali di restoran, dengan tetap jaga jarak dan melakukan pengecekan suhu tubuh pengunjung, mewajibkan penggunaan masker dan mencuci tangan sebelum masuk dan sesudahnya. Melakukan penyemprotan meja dan kursi, membungkus alat peralatan makan yang akan digunakan, memberikan pembatas transparan diatas meja, mengurangi kapasitas pengunjung dan jarak kursi tempat duduk pengunjung. Tidak melakukan sjamuan prasmanan, pelayanan menggunakan masker dan sarung tangan serta stiker dan spanduk anjuran/himbauan protokol kesehatan.

3. Belanja Aman Bebas COVID-19

Usaha memutus rantai penyebaran dan paparan virus ditempat umum, khususnya pasar modern, pengunjung diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan, pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan sebelum masuk dan setelah keluar dari

mal, tidak menyentuh langsung pinggiran/pegangan eskalator dan melakukan penyemprotan.

Diperlukan upaya yang tepat dengan skala prioritas dalam meminimalisir dampak lanjutan penyebaran COVID 19 terhadap perekonomian daerah. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha dan Pemerintah, yaitu:

- a. Menjaga daya beli masyarakat;
- b. Pemberdayaan UMKM melalui penciptaan permintaan oleh pemerintah daerah;
- c. Pengendalian inflasi daerah;
- d. Mendorong pemanfaatan teknologi dalam perdagangan; dan
- e. Subsidi pendapatan kepada tenaga kerja.

8. Perwujudan Ketentraman dan Ketertiban Berbasis Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat yang Berkeadilan

Hidup di tengah masyarakat yang heterogen menuntut adanya toleransi, harmonisasi, dan kerukunan, sehingga dapat tercipta ketentraman dan ketertiban. Dalam rangka mempertahankan wilayah yang tentram dan tertib, dibutuhkan keterlibatan dan kemitraan antara pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Pemberdayaan atau penguatan kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan atau peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan perlu dilakukan secara terpadu.

Nilai-nilai budaya, agama, dan falsafah NKRI menjadi pilar yang menopang kehidupan bermasyarakat. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat dilakukan sejak usia dini baik di lingkungan formal seperti sekolah maupun informal. Dengan demikian masyarakat Kalimantan Tengah tidak saja dibangun secara fisik namun juga batin dan rohaninya untuk menjadi manusia yang berdaya saing.

9. Pemekaran Wilayah

Akhir-akhir ini isu pemekaran daerah kembali muncul dan merupakan topik pembahasan yang cukup hangat di tengah masyarakat serta menjadi perhatian serius bagi pemerintahan daerah. Isu pemekaran daerah telah menjadi isu krusial, dimana masyarakat Kalimantan Tengah ada yang pro dan ada yang kontra. Ada beberapa

alasan yang mendasari pemekaran wilayah yaitu :

- a. Luas Wilayah, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua atau setara satu setengah kali Pulau Jawa. Secara administratif mempunyai luas \pm 153.564,50 km², dengan luas wilayah tersebut, maka rentang kendali pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi luas pula. Kemudian keadaan ini kalau kita cermati, terdapat desa dan kecamatan yang ada di beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah sulit dijangkau dalam waktu singkat, dimana daerahnya terisolasi dan jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Sebagai salah satu contoh perbandingan kewilayahan yaitu luas Kecamatan Seribu Riam di Kabupaten Murung Raya, dengan seluas 7.023 km² atau sama dengan satu setengah kali luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai luas 3.186 km²
- b. Terbatasnya Aksesibilitas dan Konektivitas infrastruktur telah mengakibatkan lambannya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini antara lain masih ada desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal, dan berdasarkan data dari BPS masih ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, walaupun dari sisi potensi Sumber Daya Alam (SDA) Provinsi Kalimantan Tengah relatif kaya.
- c. Wilayah Kalimantan Tengah mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa, akan tetapi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang didapatkan masyarakat di wilayahnya dan ini menimbulkan disparitas sosial ekonomi yaitu ketimpangan kesejahteraan antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga ada keinginan yang kuat untuk meningkatkan kewenangan dan kemandirian untuk pengelolaan potensi lokal yang ada di daerah masing- masing, yaitu dengan membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB), baik provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Kebijakan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang, memberi peluang dilakukannya pemekaran maupun penggabungan daerah. Secara yuridis formal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 33 Ayat (1) memberikan jaminan bahwa dimungkinkannya Pembentukan daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah

kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah.

Dengan demikian, aspirasi masyarakat untuk membentuk sebuah Daerah Otonom Baru bukanlah sesuatu yang salah dan berlebihan. Akan tetapi aspirasi dilatarbelakangi oleh kondisi luas wilayah dan realitas sosial, politik, ekonomi, serta berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang belum sepenuhnya mampu mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka dipandang penting untuk melakukan perencanaan wilayah dengan melakukan penataan ulang daerah otonomi yang ada yaitu dengan menyusun Rencana Penataan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau Desain Penataan Daerah, dan ini dapat dilakukan dalam bentuk mengidentifikasi wilayah mana saja yang berpotensi dimekarkan atau dibentuk menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan tahapan waktu pemekarannya, kemudian memetakan jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ideal. Rencana Penataan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau Desain Penataan Daerah Otonom ini diharapkan dapat memprediksi secara ilmiah jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ideal di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Penataan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau Desain Penataan Daerah Kalimantan Tengah yang berisi pemikiran konseptual tentang penataan daerah otonom di wilayah Kalimantan Tengah, maka dokumen ini dapat dijadikan rumusan kebijakan, telaahan, pertimbangan dan sebagai dasar pijakan bagi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dalam menyusun agenda dan langkah-langkah strategis dalam upaya mewujudkan pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Tengah.

10. Penurunan Angka Stunting

Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak stunting mempunyai Intelligence

Quotient (IQ) lebih rendah dibandingkan rata – rata IQ anak normal (Kemenkes RI, 2018). Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Stunting pada balita dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Retardasi pertumbuhan atau stunting pada anak-anak di Indonesia terjadi sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis dan penyakit infeksi dan memengaruhi 30% dari anak-anak usia dibawah lima tahun.

Dilihat dari sisi isu, stunting menjadi isu penting pembangunan karena tiga hal. Pertama, stunting adalah salah satu dari dua isu kesehatan terpopuler di Google Trends. Kedua, dari sisi tata kelola, kantor Sekretariat Wakil Presiden memegang komando kolaborasi 23 kementerian/lembaga dalam hal pencegahan stunting. Ketiga, solusi stunting memerlukan detail kebijakan yang pelik dan tidak instan (Meilissa, 2019).

Tingkat Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Tengah masih termasuk 10 (sepuluh) tertinggi di Indonesia. Sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka pencapaian penurunan Stunting yang merupakan salah satu Prioritas Nasional, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Penilaian Kinerja 5 (lima) Kabupaten/Kota Lokus Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah. Kementerian Kesehatan menetapkan 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lokus prioritas untuk tahun 2021, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara, sehingga diharapkan kepada Kabupaten/Kota lokus baru untuk wajib memprioritaskan program dan anggaran penurunan Stunting. Dan pada tahun 2022 seluruh 14 Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi Lokus Stunting.

Penilaian Kinerja tahunan ini diharapkan menjadi ajang pembelajaran dan daya saing, yang dapat memberikan motivasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerjanya dalam penanganan Stunting. Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2021 adalah proses penilaian

kemajuan kinerja Kabupaten/Kota lokus dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Perbaikan ini dilakukan melalui 8 (delapan) aksi konvergensi/integrasi dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.

Ada beberapa kendala penyelenggaran percepatan pencegahan Stunting antara lain:

- a. Belum efektifnya prgram-program pencegahan stunting.
- b. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi.
- c. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana.
- d. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program.
- e. Masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait *stunting*, dan berbagai upaya.

11. Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan

Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala.

Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan fungsi dari faktor yang memungkinkan (pendapatan, jumlah anggota keluarga, pendidikan, dan sebagainya), faktor yang mempengaruhi (pengetahuan, perilaku, dan sebagainya), faktor keterjangkauan (jarak dan atau waktu ke fasilitas pelayanan), dan tingkat kesehatan yang dirasakan. Terkait dengan transportasi, hal ini berarti bahwa cakupan pelayanan kesehatan sangat tergantung pada keterjangkauan (jarak/waktu) masyarakat terhadap suatu fasilitas/sarana pelayanan kesehatan.

Salah satu isu strategis yang masih dihadapi dalam pembangunan

kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan jarak rumah sakit atau Puskesmas terlalu jauh dari permukiman masyarakat. Ketidakterjangkauan ini juga bisa disebabkan keterbatasan transportasi sehingga memberikan implikasi pada pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat tidak optimal.

12. Corporate Education dalam Manajemen ASN

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menuju Smart ASN di Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah memelopori penerapan Kalimantan Tengah Corporate University.

Corporate university atau CU diartikan sebagai unit instansi yang memiliki fungsi pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, agar dapat mengimbangi perkembangan bisnis dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang membedakan *corporate university* dengan pusat pelatihan lainnya adalah *corporate university* merupakan sebuah program pelatihan yang komprehensif membantu pegawai melakukan tugasnya dengan baik; CU membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang. *Corporate university* juga memiliki empat fungsi terintegrasi, yakni *training center*, *leadership accelerator*, *strategy platform*, dan *learning network*.

- a. **Training center.** CU menyediakan pelatihan kepada pimpinan serta pegawai tetap dalam organisasi, dengan tujuan mencapai keunggulan operasional terkait proses dan standar organisasi.
- b. **Leadership accelerator.** Fungsi ini menargetkan bagi manajemen tengah dan atas untuk memelihara budaya kepemimpinan yang menyeluruh dalam organisasi. Dengan mempertemukan kelompok pimpinan yang variatif, dapat terjalin *network* yang saling menghubungkan para peserta, bahkan setelah program pelatihan usai.
- c. **Strategy platform.** CU menyediakan manajemen tingkat atas dengan konten yang berhubungan secara langsung dengan strategi organisasi. Tujuannya adalah mengaitkan pengembangan profesional dengan tantangan tertentu, serta menerapkan proses

belajar dalam penyusunan strategi.

- d. **Learning network.** Fokus fungsi ini adalah menciptakan budaya dan kesempatan belajar yang konsisten di luar lingkup kelas atau kursus. Sasaran fungsi ini adalah segenap jajaran pegawai di seluruh tingkatan manajemen untuk memperkuat keterampilan fungsional, teknis, dan manajerial.

13. Tumpang Tindih Lahan

Isu terkait tata ruang terkait pertanahan terjadi di Riau, Jambi, Sumatera Utara, Papua, termasuk di Kalimantan Tengah. Persoalan tumpang tindih lahan terjadi akibat tidak selarasnya penataan Ruang sejak dulu hingga masa kini. Meskipun, perda Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 telah terbit namun masalah tumpang tindih tanah tetap ada. Penataan Tata Ruang semakin rumit karena banyaknya kawasan pemukiman yang masuk dalam kawasan hutan, menimbulkan agenda pembangunan sulit berjalan.

Masyarakat yang memiliki lahan lebih cenderung terfokus pada pengurusan sertifikat kepemilikan tapi tidak melakukan optimalisasi asset alias pendayagunaan lahannya. Kondisi itu bukan hanya membuat penguasaan lahan menghasilkan produktivitas, namun juga rawan terjadi klaim-klaim kepemilikan oleh mafia tanah terhadap lahan yang kosong dan belum dikelola.

Isu tumpang tindih lahan perlu kerjasama semua pihak agar permasalahan lahan dapat terselesaikan. Terutama agar kepentingan masyarakat adat juga dapat dilindungi. Sebab, adanya status hukum yang jelas atas kepemilikan atau pemanfaat lahan, akan menghasilkan kepastian hukum dan kemanfaatan serta keadilan.



BAB V



VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Sebelum menjabarkan mengenai Visi RPJMD, sebelumnya akan ditelaah Visi Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tercantum dalam **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Tengah** periode 2005-2025. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 20 yang sudah direncanakan. Adapun Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Tahun Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 adalah **“Kalimantan Tengah Yang Maju, Mandiri Dan Adil”**.

Substansi Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah di atas menjadi pijakan dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih agar Sasaran Pokok RPJPD di tahun berkenaan dapat dijabarkan menjadi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah sesuai dengan periode kepala daerah terpilih. Dimana kurun waktu RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah tahun pertama (I) Tahun 2005-2010, RPJM Daerah tahun kedua (II) Tahun 2011 - 2015, RPJM Daerah tahun ketiga (III) Tahun 2016-2020, dan RPJM Daerah tahun keempat (IV) Tahun 2021-2025.

Dalam upaya mewujudkan Kalimantan Tengah yang “Maju, Mandiri dan Adil” tersebut, membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya yang terjadi pada periode perencanaan. Oleh karena itu, penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan akan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut ini adalah tema pembangunan atau arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan periode Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah:

Periode Pertama, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2010 merupakan tahap awal untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Adil. Berdasarkan kondisi dan konteks potensi dan permasalahan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka visi pembangunan pada periode perencanaan 5 (lima) tahun pertama ini adalah **“Membuka Isolasi Menuju Kalimantan Tengah Yang Sejahtera Dan Bermartabat”**. Dalam 5 (lima) tahun pertama ini, prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.

2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangkapeningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Periode kedua, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 – 2015, ditujukan untuk melanjutkan **“pembukaan keterisolasian dan**

mengembangkan kemandirian dan ketahanan perekonomian daerah untuk menghadapi era kesalingtergantungan dan ketidakpastian yang semakin tinggi di masa-masa yang akan datang". Dalam 5 (lima) tahun kedua ini, prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
6. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
8. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
9. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.

11. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
12. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.

Periode ketiga, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2020, ditujukan untuk lebih **“memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat”**.

Dalam 5 (lima) tahun ketiga ini, prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

8. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
9. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
11. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
12. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.

Periode keempat, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2025, ditujukan untuk **“mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju, dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam 5 (lima) tahun keempat ini, prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
4. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.

6. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
10. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
12. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.



Gambar 5. 1 Pondasi Dalam Pencapaian Visi

Dengan mempertimbangan arahan pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah khususnya periode keempat RPJMD tahun 2021 – 2025, serta Visi Kepala Daerah Terpilih maka, Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

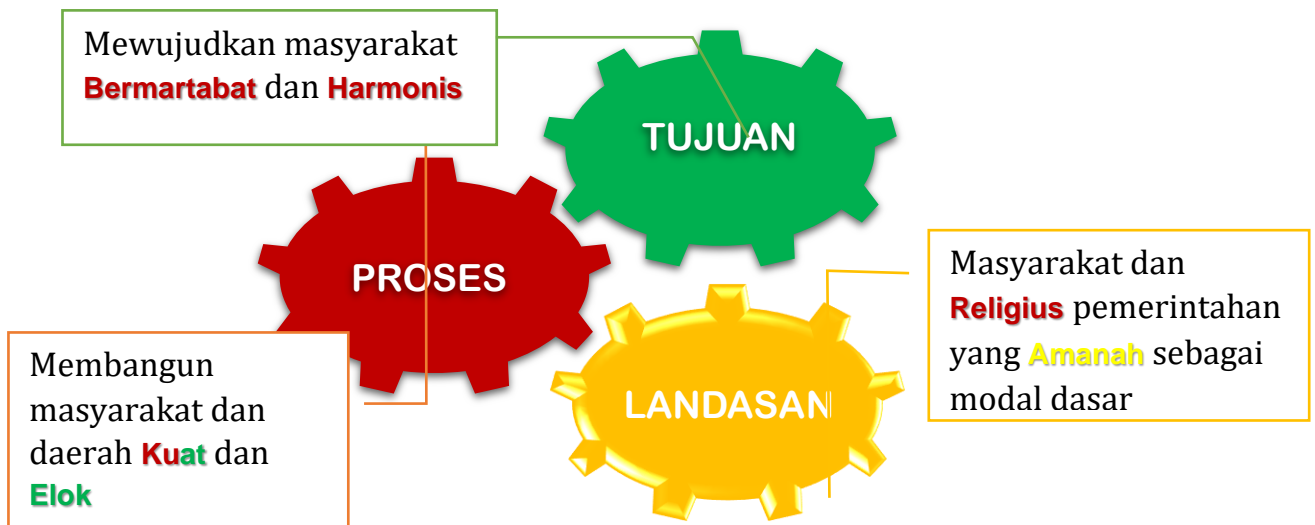
Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam Misi Pembangunan. Berikut

ini pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 1 Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1	Bermartabat	Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang
2	Elok	Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green kalteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.
3	Religius	Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun publik demi Kalteng yang berkarakter.
4	Kuat	Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin. Kalteng sehat, mandiri, Tangguh, dan maju dalam berbagai sector.
5	Amanah	Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.
6	Harmonis	Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Setelah memahami pokok-pokok visi diatas, maka untuk mempermudah pengoprasionalan masing-masing pokok visi tersebut, dijelaskan dalam ilustrasi kerangka kerja sebagai berikut.



Gambar 5. 2 Kerangka Kerja Operasional Pokok Visi

Berdasarkan gambar di atas, maka kerangka kerja pokok visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pembangunan Kalimantan Tengah Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah lima tahun kedepan dilandaskan pada penguatan religiusitas masyarakat dan pemerintahan yang amanah. Dua komponen ini menjadi modal dasar pembangunan Kalimantan Tengah kedepan. Dengan religiusitas masyarakat yang kuat yang terimplementasi dalam peningkatan kesolehan personal maupun sosial serta aparatur pemerintahan yang amanah yang terimplementasi dalam peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melayani masyarakat serta didukung dengan Sistem Tatakelola Pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip *good corporate governance (GCG)*, inilah yang akan menjadi modal dasar Kalimantan Tengah membangun daerah dan masyarakat dalam lima tahun kedepan.

Dengan modal masyarakat yang religius dan pemerintahan yang amanah, maka akan mempermudah dan mempercepat proses pembangunan masyarakat dan daerah yang kuat dan elok. Masyarakat yang kuat tercerminkan dari kuat secara ekonomi, sehat, sejahtera lahir dan batin sedangkan masyarakat yang elok tercermin dari perilaku masyarakat yang ramah. Sementara daerah yang kuat adalah Kalimantan Tengah yang mandiri, tangguh, dan maju dalam segala sektor, sedangkan Kalimantan

Tengah yang elok adalah makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green Kalteng (Kalteng Hijau).

Dengan masyarakat, pemerintah, dan daerah yang kuat, maka akan terwujud Kalimantan Tengah yang bermartabat yaitu Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang, serta terwujud Kalimantan Tengah yang harmonis yaitu hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

5.2. Misi

Misi merupakan cara secara umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Kalimantan Tengah, maka ditetapkan misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2025 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

Percepatan pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah membutuhkan sebuah terobosan strategi yang tepat dalam era industrialisasi 4.0 dan era digital ekonomi. Dalam era ini pelaku ekonomi tidak hanya menganalkan pada modal berupa uang, mesin, dan sumberdaya manusia biasa. pertumbuhan produktivitas di era ini dibutuhkan kemampuan kreatifitas dan inovasi pelaku usaha. Untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah kedepan diperlukan upaya menumbuhkan kemampuan kreativitas dan meningkatkan kemampuan inovasi pelaku industri agar mampu tumbuh dan bersaing.

Pelaku usaha dibidang industri diharapkan mampu mengubah budaya hidup mereka yang berorientasi pada keuntungan semata menjadi berorientasi kepuasan pelanggan (*service of excellent*) dan kerjasama ekonomi (*sharing ekonomi*), agar terbentuk kerja sama yang menguntungkan dalam jangka panjang. Pelaku usaha industri yang baik adalah individu yang memiliki kemampuan mengambil tantangan, berkompetisi, menyusun strategi bisnis dan memiliki keinginan yang kuat dalam pencapaian tujuan bisnis.

Selain meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktifitas, namun pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah tetap berwawasan lingkungan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang. Pembangunan berkelanjutan mengandung arti sudah tercapainya keadilan sosial dari generasi ke generasi. Dilihat dari pengertian lainnya, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 1, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka menopang aktivitas ekonomi yang produktif dan kreatif;
- b) Menuntaskan infrastruktur kelistrikan melalui pemanfaatan biodiesel, tenaga surya, dan energi alternative lainnya;
- c) Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, industry kreatif, kredit usaha rakyat (KUR) melalui pendampingan, promosi, dan pemasaran produk;
- d) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berorientasi perluasan ketenagakerjaan dibidang manufaktur, termasuk pengembangan sentra industry pengolahan tapioca dan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA);
- e) Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sector pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan kelautan;
- f) Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (*ecotourism*) melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan, optimalisasi promosi potensi wisata dalam Kalteng;
- g) Merawat dan melestarikan hutan rawa gambut;
- h) Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk

penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;

- i) Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah provinsi;

2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana. Beberapa bencana yang sudah pernah terjadi, seperti bencana Tanah Longsor, Banjir, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung dan Gelombang genangan air pasang ROB), Kegagalan Teknologi, Epidemik dan Wabah Penyakit maupun bencana sosial. Dalam rangka penguatan dan ketangguhan daerah perlu adanya antisipasi dampak bencana berupa investasi menghadapi bencana baik pada tataran siaga bencana, tanggap bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Investasi bencana sangat diperlukan guna mitigasi risiko dan meminimalisir dampak bencana. Bencana tidak mungkin kita hindari dan kerugian akibat bencana tidak bisa dikesampingkan. Namun demikian, semakin siap dalam menghadapi bencana maka risiko yang timbul bisa diminimalisir. Kesiapan menghadapi bencana juga menjadikan proses pemulihan pasca bencana semakin cepat. Pada akhirnya ketahanan pasca bencana akan menguat.

Pengutan ketahanan Daerah merupakan cara untuk menunjukkan bahwa daerah atau negara dalam upaya penguatan masyarakat (*community building*), pengembangan wawasan kebangsaan, dan pembangunan nasional harus menyasar pada aset dan modal sosial masyarakat. Aset dan modal sosial ini fokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat masyarakat lokal Kalimantan Tengah. Potensi tersebut akan maksimal bila strategi dan pendekatan yang digunakan adalah *community building*.

Community building yang dimaksud adalah sebuah pendekatan dalam mengatasi masalah dan menciptakan peluang pengembangan bagi komunitas lokal dalam mengantisipasi perubahan dan ancaman perubahan global. Implementasinya adalah dengan membangun komunitas mulai level keluarga; para keluarga saling belajar untuk saling bergantung dan bekerja bersama untuk hal-hal tertentu yang dapat menciptakan kesadaran diri yang baru terkait dengan aset mereka, baik kolektif maupun individual. Dalam

prosesnya, kerja bersama antar keluarga akan menciptakan modal sosial, kekeluargaan dan kemanusiaan. Modal tersebut akan menyediakan landasan baru bagi masa depan yang lebih menjanjikan. Melalui kerja bersama tersebut, para keluarga yang terikat sebagai kesatuan komunitas kemudian bisa membangun koneksi kembali (*reconnection*) dengan cita-cita (wawasan) kebangsaan untuk menghadapi persaingan dan ancaman globalisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 2, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- b) Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan termasuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak *covid-19*;
- c) Mempercepat pengembangan Kawasan *food estate* dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan lokal.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance), pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tata kelolah pemerintahan yang baik merujuk pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia (sosial). Tata kelolah pemerintahan yang baik (Good governance) menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporasi atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar.

Tatakelola pemerintahan yang baik, mempunyai tolak ukur atau indikator keberhasilan sebagai berikut: (a) **Transparansi** merupakan proses

keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini; (b) **Partisipasi** merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan; (c) **Akuntabilitas** didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu; (d) **Koordinasi** adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

Dalam upaya menjalankan sistem Tatakelola Pemerintahan yang Baik, diperlukan adanya reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap

sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 3, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Membentuk birokrasi pemerintahan yang inovatif, transparan, dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi yang berdampak positif bagi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan public (smart government);
- b) Mendorong budaya birokrasi pemerintahan yang responsive terhadap kebutuhan warga melalui pelayanan terpadu dan perluasan partisipasi public;
- c) Menjamin kepastian hukum dan reformasi birokrasi yang berorientasi penguatan iklim investasi yang efektif dan efisien melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menuju penyelenggaraan mall pelayanan public;
- d) Mendorong kemudahan berinvestasi melalui jaminan rasa aman, proses perijinan yang mudah dan birokrasi pemerintahan yang tangkas.
- e) Menciptakan Kalteng sebagai zona bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), narkoba, konflik dan ekstrimisme dengan memperkuat nilai-nilai agama dan kearifan local;
- f) Memantapkan kolaborasi dan kebersamaan lintas sectoral antara pemerintah, dunia usah, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada perwujudan Kalteng yang aman, tertib, dan Tangguh dari berbagai tantangan global
- g) Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk

penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

Faktor manusia merupakan sumber daya sebagai titik sentral berpikir, perencanaan, perekayasa, perancang bangunan dan pelaksana ataupun penyelenggara pembangunan dan atau pelaku pembangunan. Pembangunan Sumber Daya Manusia adalah suatu proses peningkatan kesehatan, pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat. Pengertian pembangunan sumber daya manusia baik secara makro maupun secara mikro. Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal.

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia memiliki peran penting dalam tujuan pembangunan. Pembangunan tenaga kerja diarahkan terhadap peningkatan kualitas para pencari kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, pendidikan adalah hal yang penting, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan efek yang positif terhadap pembangunan terkhusus pembangunan bidang ekonomi

Berdasarkan laporan UNDP dalam rangka menghadapi abad global dan milenial ini diperlukan pemikiran kembali yang mendasar atas kebijakan dan manajemen pembangunan sumberdaya manusia dengan 5 prioritas, yakni (1) menempatkan persoalan kualitas dan hak azasi manusia sebagai inti kebijakan dan aksi internasional, (2) melindungi keamanan dan kerawanan sumber daya manusia yang mengalami krisis ekonomi, (3) meningkatkan

posisi interaksi dari negara-negara miskin dalam aktivitas global, (4) memperpendek ketimpangan di antara dan di dalam negara masing-masing, serta (5) menyiapkan tatanan global yang diperlukan untuk era melinial.

Untuk itu pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain: peningkatan kualitas kehidupan, akses pendidikan dan jaminan kesehatan di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka misi 4, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui dukungan bantuan sosial fungsi pendidikan untuk warga Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) Menyediakan layanan pendidikan prioritas bagi wilayah terisolir dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- c) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- d) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan serta sarana dan prasana pendukung beserta pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah yang masih kekurangan serta meningkatnya status gizi masyarakat;
- e) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja;
- f) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Pembinaan nilai-nilai religius atau keimanan sangat penting bagi masyarakat heterogen. Kalimantan Tengah yang heterogen tentu memiliki landasan filosofis yang kuat tentang kehidupan beragama. Nilai-nilai religius yang terkandung dalam setiap sikap dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara seharusnya menjadi perekat dalam menjalani kehidupan di tengah

heterogenitas masyarakat Kalimantan Tengah yang memang dikenal memiliki keanekaragaman dalam hal suku, agama, ras serta golongan. Keanekaragaman ini patutlah menjadi kekayaan yang memberi warna bagi kehidupan masyarakat dan bukan menjadi sumber perpecahan dan konflik. Kalimantan Tengah sudah belajar banyak mengenai konflik horizontal dengan berbagai isu yang berkembang, sehingga sudah saatnya untuk merancang suatu strategi dan model kehidupan masyarakat yang tenteram dan nyaman di tengah heterogenitas dan pluralisme bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, pembinaan nilai luhur yang terkandung dalam agama dan budaya perlu dilakukan melalui berbagai upaya, seperti melalui proses pendidikan agama, latihan dan pembiasaan dan peneladanan. Dalam konteks sosio kultural, pendidikan merupakan proses untuk membudayakan nilai-nilai.

Selain meningkatkan peran religiusitas masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal prosem pembangunan Kalimantan Tengah juga memperhatikan aspek-aspek kesetaraan gender. World Bank menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan komponen pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan secara efektif. Dalam konteks itulah jika negara kita mau membangun pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan masalah secara khusus yang berkaitan dengan kesetaraan gender (World Bank, 2001). Oleh sebab itu, kebijakan yang berwawasan gender sangat diperlukan, maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indikator atau pertimbangan keseimbangan peran dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan pendekatan ini pula setiap pelaksanaan program akan selalu menunjukkan bentuk kesetaraan, keadilan, demokratis dan transparansi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 5, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pengembangan rumah ibadah dan pusat-pusat kebudayaan;
- b) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);

- c) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- d) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- e) Memperluas partisipasi perempuan yang berorientasi kesetaraan gender;
- f) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

Sebagai upaya untuk memastikan bahwa misi jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan Pokok-pokok visi, maka dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. 2 Keterkaitan Pokok-pokok Visi dengan Misi Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2026

No	Pokok-pokok Visi	Misi
1	Bermartabat	Misi 4: Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
		Misi 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2	Elok	Misi 2: Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
		Misi 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
3	Religius	Misi 5: Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender
4	Kuat	Misi 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan

		Berwawasan Lingkungan
		Misi 2: Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
5	Amanah	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
6	Harmonis	Misi 4: Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sedangkan sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Misi tahun 2021-2026 sebagai berikut

Tabel 5. 3 Indikator Tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

NO	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2021)	TAHUN					KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VISI: Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)											
1	1	Merpercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan	1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif Serta Pemerataan Pembangunan Melalui Konektivitas Antar Wilayah	1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	3,57 %	5,60 %	5,70 %	5,80 %	5,90 %	6,00 %	6,00 %
				1.1.2 Indeks Ketimpangan (Indeks Williamson)	0,16 %	0,149 %	0,143 %	0,138 %	0,132 %	0,127 %	0,127 %
				1.1.3 Indeks Gini	0.329 Angka	0.228 Angka	0.222 Angka	0.216 Angka	0.210 Angka	0.204 Angka	0.204 Angka
			1.2 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	1.2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,74 Poin	74,30 Poin	74,53 Poin	74,75 Poin	74,97 Poin	75,16 Poin	75,16 Poin
2	2	Memperkuat Ketahanan Daerah Dalam	2.1 Meningkatkan Tingkat Kondusifitas	2.1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (ID)	74,91 %	75,00 %	75,50 %	76,00 %	76,50 %	76,50 %	76,50 %

NO	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2021)	TAHUN					KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Mengantisipasi Perubahan Global	Daerah melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan pengurangan Kemiskinan Masyarakat	2.1.2 Prosentase Penduduk Miskin	5,16 %	4,96 %	4,81 %	4,66 %	4,41 %	4,36 %	4,36 %
			Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Ancaman Bencana dan Budaya serta Kerentanan Pangan	2.2.1 Indeks Resiko Bencana	131 Angka	130 Angka	129 Angka	128 Angka	127 Angka	126 Angka	126 Angka
3		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi Yang Inovatif dan Responsif	3.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai

NO	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2021)	TAHUN					KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4		4 Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing	4.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	4.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,05 %	72,36 %	72,89 %	73,42 %	73,95 %	74,48 %	74,48 %
				4.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	4,58 %	4,10 %	4,00 %	3,90 %	3,70 %	3,50 %	3,50 %
5		5 Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender	5.1 Meningkatkan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Sosial Budaya Bermasyarakat	5.1.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,82 %	77,97 %	78,02 %	78,07 %	78,12 %	78,17 %	78,17 %
			5.2 Meningkatkan Kesetaraan Gender.	5.2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,03 %	89,07 %	89,09 %	89,11 %	89,13 %	89,15 %	89,15 %

Tabel 5. 4 Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Tahun					Kondisi Akhir (2026)	
						2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)												
1	Merpercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan											
		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif Serta Pemerataan Pembangunan Melalui Konektivitas Antar Wilayah		Pertumbuhan Ekonomi	3,57 %	5,60 %	5,70 %	5,80 %	5,90 %	6,00 %	6,00 %	
					Indeks Ketimpangan (Indeks Williamson)	0,16 %	0,149 %	0,143 %	0,138 %	0,132 %	0,127 %	0,127 %
					Indeks Gini	0.329 Angka	0.228 Angka	0.222 Angka	0.216 Angka	0.210 Angka	0.204 Angka	0.204 Angka
			Meningkatnya Ketercukupan Energi	Rasio Elektrifikasi	86,82 Angka	91,2 Angka	93,39 Angka	95,58 Angka	97,77 Angka	100 Angka	100 Angka	

No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Tahun					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Meningkatnya Ketercukupan Energi	Rasio Desa Berlistrik	92,55 Angka	95,03 Angka	96,27 Angka	97,51 Angka	98,75 Angka	100 Angka	100 Angka
			Meningkatnya Ketercukupan Energi	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)	7%	9 %	12 %	15 %	18 %	20 %	20 %
			Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Jalan Provinsi	0,34 Angka	0,34 Angka	0,36 Angka	0,38 Angka	0,39 Angka	0,39 Angka	0,39 Angka
			Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio konektivitas sektor transportasi	0,85 Angka	0,86 Angka	0,87 Angka	0,88 Angka	0,89 Angka	0,9 Angka	0,9 Angka
			Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Persentase Desa Bersinyal	67%	71 %	79 %	87 %	92 %	98 %	98 %

No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Tahun					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	270004 Ha	345.000 Ha	385.000 Ha	425.000 Ha	465.000 Ha	505.000 Ha	505.000 Ha
			Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver	81 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit	330 Unit	410 Unit	410 Unit
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	15,96%	16,00 %	16,10 %	16,20 %	16,30 %	16,40 %	16,40 %
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri	Kontribusi Sektor pertanian, perkebunan,	21,80%	23,4 %	24,3 %	25,2 %	26,1 %	27 %	27 %

No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Tahun					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB							
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB	13,22%	13,50 %	14,00 %	15,00 %	16,00 %	18,00 %	18,00 %
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	773359 Orang	820.457 Orang	845.070 Orang	870.422 Orang	896.535 Orang	923.431 Orang	923.431 Orang

No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Tahun					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	Realisasi penanaman modal (dalam juta)	6267959 Juta	7.980.00 0 Juta	8.300.00 0 Juta	8.650.00 0 Juta	9.100.00 0 Juta	9.630.00 0 Juta	9.630.00 0 Juta
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBI)	107 Angka	108,25 Angka	109,50 Angka	110,75 Angka	112 Ang ka	113,25 A ngka	113,25 A ngka
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,19%	13,50 %	13,60 %	13,70 %	13,80 %	13,90 %	13,90 %

No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Tahun					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,74 Poin	74,30 Poin	74,53 Poin	74,75 Poin	74,97 Poin	75,16 Poin	75,16 Poin
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,61 Poin	59,50 Poin	59,60 Poin	59,70 Poin	59,80 Poin	59,90 Poin	59,90 Poin
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,84 Poin	87,14 Poin	87,24 Poin	87,34 Poin	87,44 Poin	87,54 Poin	87,54 Poin
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas lahan (IKL)	72,33 Poin	73,66 Poin	74,33 Poin	74,99 Poin	75,66 Poin	76,06 Poin	76,06 Poin
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	65,04 Poin	70,48 Poin	71,08 Poin	71,67 Poin	72,28 Poin	72,88 Poin	72,88 Poin
		Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Provinsi		Kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan RTRW	78%	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %	88 %

No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Tahun					Kondisi Akhir (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Memperkuat Ketahanan Daerah Dalam Mengantisipasi Perubahan Global										
		Meningkatkan Tingkat Kondusifitas Daerah melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan pengurangan Kemiskinan Masyarakat		Indeks Demokrasi Indonesia (ID)	74,91 %	75,00 %	75,50 %	76,00 %	76,50 %	76,50 %	76,50 %
				Prosentase Penduduk Miskin	5,16%	4,96%	4,81%	4,66%	4,41%	4,36%	4,36%
			Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	7:10.000 per 1.000 penduduk	9:10.000 per 1.000 penduduk	9:10.000 per 1.000 penduduk	10:10.000 per 1.000 penduduk	10:100.000 per 1.000 penduduk	11:10.000 per 1.000 penduduk	11:10.000 per 1.000 penduduk
			Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teratasi	80%	80 %	82 %	82 %	83 %	85 %	85 %

No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Tahun					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Menurunnya Kemiskinan Di Pedesaan dan Perkotaan	Persentase penduduk miskin pedesaan	5,38%	5,30 %	5,25 %	5,20 %	5,10 %	5,00 %	5,00 %
			Menurunnya Kemiskinan Di Pedesaan dan Perkotaan	Persentase penduduk miskin perkotaan	4,86%	4,80 %	4,75 %	4,70 %	4,65 %	4,60 %	4,60 %
			Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	Persentase rumah layak huni	54,41%	59,93 %	65,46 %	70,98 %	71,28 %	71,58 %	71,58 %
			Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	Persentase akses air minum layak	85,85%	90,56 %	95,28 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	Persentase akses sanitasi layak	69%	72 %	76 %	80 %	85 %	90 %	90 %

No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Tahun					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Ancaman Bencana dan Budaya serta Kerentanan Pangan		Indeks Resiko Bencana	131 Angka	130 Angka	129 Angka	128 Angka	127 Angka	126 Angka	126 Angka
			Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah Serta Antisipasi Penanganan Terhadap Bencana Kerawanan Pangan dan Pandemi								
			Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah Serta Antisipasi Penanganan								

No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Tahun					Kondisi Akhir (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Terhadap Bencana Kerawanan Pangan dan Pandemi								
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi										
		Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi Yang Inovatif dan Responsif		Indeks Reformasi Birokrasi	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	85%	87 %	88 %	90 %	92 %	94 %	94 %
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Profesionalisme ASN	74,69%	75,5 %	76 %	78 %	78 %	79 %	79 %

No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Tahun					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	63,50%	69,21 %	71,68 %	74,79 %	78,69 %	84,82 %	84,82 %
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kajian Kelitbangan	2 Kajian	2 Kajian	4 Kajian	4 Kajian	4 Kajian	5 Kajian	5 Kajian
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Inovasi Digital Daerah	64,53%	79,43 %	79,61 %	81,11 %	83,27 %	83,27 %	83,27 %
			Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	A Predikat	A Predikat	A Predikat
			Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Opini BPK	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai

No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Tahun					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing										
		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,05 %	72,36 %	72,89 %	73,42 %	73,95 %	74,48 %	74,48 %
					Tingkat Pengangguran Terbuka	4,58 %	4,10 %	4,00 %	3,90 %	3,70 %	3,50 %
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Indeks Pendidikan	0,638 Indeks	0,657 Indeks	0,677 Indeks	0,682 Indeks	0,687 Indeks	0,692 Indeks	0,692 Indeks
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Indeks kesehatan	0,765 Indeks	0,769 Indeks	0,772 Indeks	0,776 Indeks	0,781 Indeks	0,786 Indeks	0,786 Indeks
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan,	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	74,06 Angka Indeks	78 Angka Indeks	80 Angka Indeks	81 Angka Indeks	82 Angka Indeks	82,50 Angka Indeks	82,50 Angka Indeks

No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Tahun					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kesehatan dan Ketenagakerjaan	an							
5	Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender										
		Meningkatkan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Sosial Budaya Bermasyarakat.		Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,82 %	77,97 %	78,02 %	78,07 %	78,12 %	78,17 %	78,17 %
			Meningkatnya Kualitas Beribadah	Nilai Toleransi	76,52 Angka	76,65 Angka	76,7 Angka	76,8 Angka	76,9 Angka	77 Angka	77 Angka
			Meningkatnya Kualitas Beribadah	Nilai Kesetaraan	78,37 Angka	78,49 Angka	78,55 Angka	78,61 Angka	78,67 Angka	78,73 Angka	78,73 Angka
			Meningkatnya Kualitas Beribadah	Nilai Kerjasama	78,57 Angka	78,71 Angka	78,78 Angka	78,85 Angka	78,92 Angka	78,99 Angka	78,99 Angka

No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Tahun					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,76%	56,76 %	57,26 %	58,76 %	58,26 %	58,76 %	58,76 %
		Meningkatkan Kesetaraan Gender.		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,03 %	89,07 %	89,09 %	89,11 %	89,13 %	89,15 %	89,15 %
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	79,67%	81,90 %	81,92 %	81,94 %	81,96 %	81,98 %	81,98 %



BAB VI

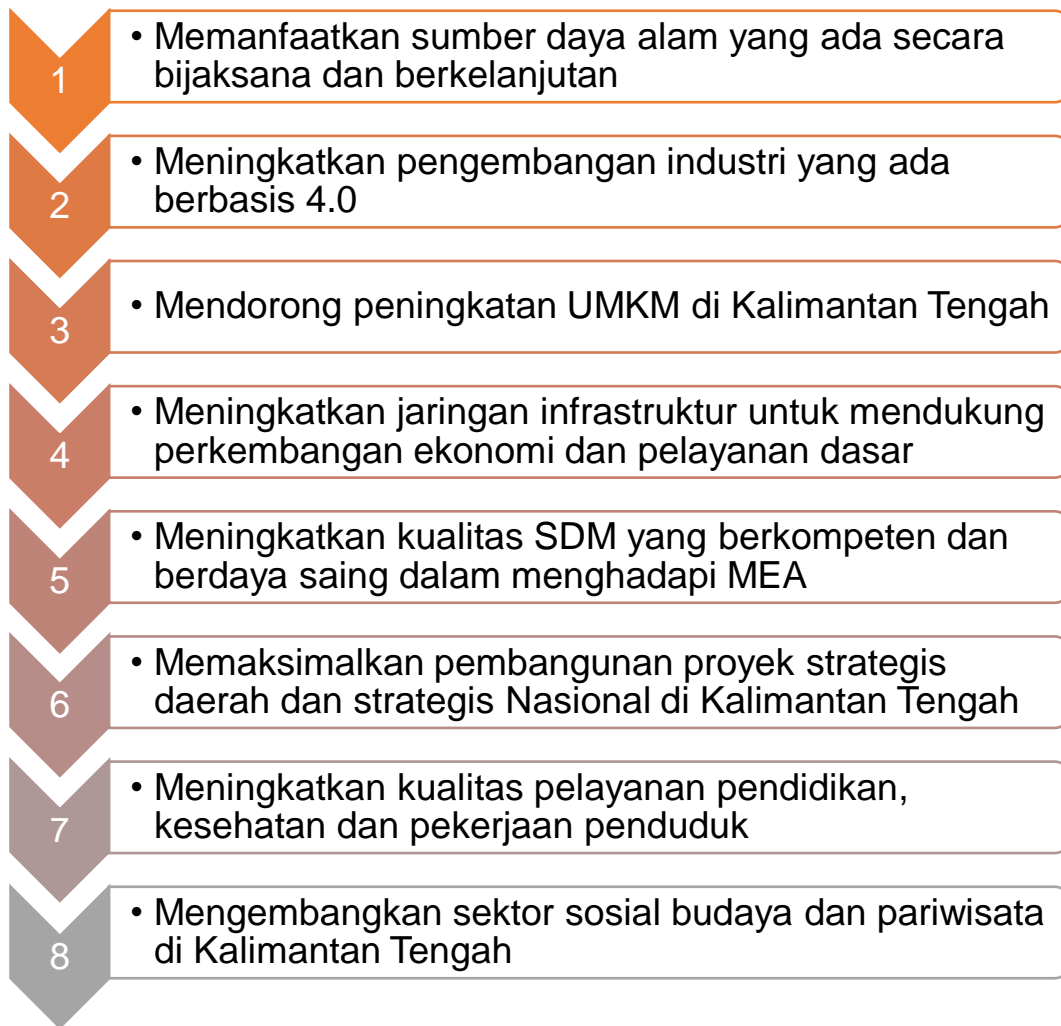
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan misi, yang telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pada bagian sebelumnya tidak akan mudah diimplementasi secara baik, tepat, dan efisien tanpa ada arahan teknis implementasi lebih detail dan rinci dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Agar visi dan misi, yang telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan perencanaan yang lebih bersifat teknis yang berupa Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.

6.1 Strategi Umum Pembangunan

Strategi Umum Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 merupakan manifestasi dari semangat, nilai dan harapan tulus Gubernur dan Wakil Gubernur guna mewujudkan visi dan misi akan dilakukan 7 strategi umum, sebagai berikut:

STRATEGI UMUM PEMBANGUNAN



Kedelapan strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026, sebagai kelanjutan dari periode pembangunan sebelumnya, dengan penegasan mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata.

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Ada Secara Berkelanjutan

Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pemenuhan kebutuhan penduduk saat ini tidak mengorbankan kebutuhan penduduk di masa mendatang.

- Tidak melampaui daya dukung lingkungan (ekosistem).
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan menyalurkan kebutuhan manusia dan kemampuan mengolah dengan ketersediaan sumber daya alam.

Sumber daya alam dapat berkelanjutan jika sumber daya alam yang dikelola tergolong sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tidak tergolong pada sumber daya yang berkelanjutan karena pada periode tertentu sumber daya tersebut akan habis. Sumber daya alam yang akan habis hanya dapat dihemat dalam penggunaannya sehingga dapat memperpanjang umur kegunaan dari sumber daya tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan pertimbangannya tidak hanya pada aspek ekonomi dan kesejahteraan petani, melainkan mencakup kelestarian sumber daya alam dan hubungannya dengan lingkungan yang terdapat di sekitarnya.

2. Meningkatkan pengembangan industri yang ada berbasis 4.0

Era revolusi industri 4.0 memiliki sisi positif bagi penguatan ekonomi apabila negara siap menghadapinya. Meski demikian, hal ini juga dapat mengancam generasi muda produktif yang tidak inovatif. Secara garis besar, revolusi industri 4.0 membawa gagasan mengenai kekuatan teknologi mutakhir dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah “cyber physical system”. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya

Dalam Revolusi Industri 4.0, setidaknya ada lima teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu: *Internet of Things*, *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Cloud Computing* dan *Additive Manufacturing* bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sesungguhnya, tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini.

3. Mendorong peningkatan UMKM di Kalimantan Tengah

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya

ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional.

Adapun manfaat Usaha Mikro Kecil Menengah yakni bagi perekonomian nasional antara lain: Membuka Lapangan Pekerjaan, Menjadi Penyumbang Terbesar Nilai Produk Domestik Bruto, Salah satu Solusi efektif bagi permasalahan Ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah. Sedangkan manfaat UMKM bagi perekonomian daerah adalah meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat khususnya perempuan, mendapatkan pengalaman berwirausaha, memperkecil angka pengangguran di desa, pemererat rasa kebersamaan, mengembangkan potensi masyarakat, mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya, serta menumbuhkan rasa ingin maju dan sebagainya.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tangguh di tengah krisis ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia masih terhambat sejumlah persoalan yakni UMKM lemah dalam segi permodalan dan segi manajerial (kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia serta teknologi); serta masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM, misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih antar institusi. Pemerintah telah memberikan upayaupaya pemberdayaan berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk semakin menguatkan sektor UMKM ini. Namun upaya pemberdayaan tersebut belum memberikan hasil yang maksimal dan membawa daya ungkit (leverage) yang kuat bagi para pelaku UMKM pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

4. Meningkatkan jaringan infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi

Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan. Untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga

merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Dengan meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengantar pemerintah Indonesia untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik investasi dan partisipasi swasta di skala yang terukur dalam proyek infrastruktur.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta melalui skema regular maupun *Multy Years Contract* baik bersumber dari APBD maupun dari KPBU, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata. Infrastruktur juga memiliki pengaruh penting dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja.

Sifat dan jenis infrastruktur yang diperlukan suatu daerah dipengaruhi oleh karakteristik alam dan pola persebaran penduduk yang khas pada daerah tersebut. Infrastruktur bukan hanya diperlukan untuk meningkatkan daya saing demi mendorong lebih banyak kegiatan investasi, produksi dan perdagangan, tetapi juga untuk mempercepat pemerataan pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan. Selain itu, keberadaan infrastruktur juga sangat diperlukan agar proses pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Proses pembangunan yang disertai dengan perkembangan teknologi yang cepat mengharuskan adanya pendekatan yang benar-benar tepat dalam program pengembangan SDM.

5. Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dan berdaya saing dalam menghadapi MEA

Globalisasi adalah potret di mana antar negara saling ketergantungan ekonomis dalam memperkokoh ekonomi sosial dunia. Perbincangan mengenai globalisasi mulai dibicarakan pada tahun 1980-an. Pada era globalisasi adanya penghapusan seluruh hambatan terhadap arus modal dan jasa. Salah satu yang sudah berjalan masa ini adalah integrasi ekonomi negara kawasan Asia Tenggara yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Perdagangan barang dan jasa berdasarkan pada

paham liberalisasi perdagangan, oleh karena itu tidak ada lagi hambatan-hambatan biaya yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memproteksi barang dan jasa dalam negeri. Tidak ada kata lain bagi negara-negara anggota ASEAN selain menyiapkan diri dan meningkatkan daya saing barang dan jasa dalam negerinya, termasuk Indonesia.

Salah satu strategi pemerintah dalam menghadapi MEA adalah dengan menunjang kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Keberadaan UMKM menjadi satu pondasi penting untuk menunjang kemajuan perekonomian di suatu negara atau daerah. Beberapa sektor usaha yang hingga saat ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia dihasilkan UMKM. Perlu diketahui bahwa saat ini kinerja UMKM Indonesia masih relatif rendah dibandingkan UMKM di beberapa negara tetangga, meskipun tingkat pembangunan ekonominya sama. Berdasarkan analisa literatur, data sekunder dan pemangku usaha lainnya dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi daya saing UMKM.

Di tengah terpaan arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM Indonesia harus bisa memiliki daya saing secara global. Kemampuan daya saing G 190 UMKM di era perdagangan bebas, sangat ditentukan oleh tingkat produktivitas dan inovasi perusahaan. Beberapa faktor sangat berpengaruh pada tingkat produktivitas dan inovasi perusahaan, yaitu kualitas sumber daya manusia (human resource), budaya perusahaan, latar belakang pendidikan pemilik dan pekerja serta karakter pemangku kepentingan dalam perusahaan.

Beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yakni : Pertama melalui peningkatan capacity building UMKM. Capacity building adalah upaya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peningkatan capacity bulding bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap UMKM. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: memberikan pelatihanpelatihan kepada lembaga pelaku usaha, dalam meningkatkan kemampuan kredit UMKM, Pendirian Pusat Pengembangan Pendamping UKM untuk melakukan pelatihan dan akreditasi UMKM, meningkatkan teknologi informasi agar akses informasi lebih mudah, melakukan riset untuk memberikan informasi bagaimana mengembangkan UMKM. Penelitian tersebut disesuaikan dengan daerah

masing-masing. Peningkatkan daya saing UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Upaya kedua yaitu melalui teknologi informasi TI. Teknologi informasi adalah seperangkat untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi secara elektronik. Melalui pemanfaatan TI tersebut UMKM dapat memasuki pasar global. Pemanfaatan TI ini melalui membuka toko virtual dengan menjual produk secara online dengan modal internet atau dikenal dengan ecommerce bagi pemangku usaha dapat melakukan jual beli secara mudah. Mulai dari proses pemesanan melalui perangkat lunak, melakukan transaksi mejadi lebih cepat dan hemat tanpa harus membuka toko atau gudang penyimpanan. Dengan begitu biaya transaksi juga bisa diturunkan. Manfaat *E-commerce* bagi pemangku usaha, yaitu:

1. Dengan adanya *e-commerce* pelaku UMKM dapat menjual produk kepada konsumen lebih menyeluruh dibandingkan harus mempunyai toko secara offline. Dikarenakan mereka memiliki toko online sehingga semua orang bisa mengakses toko tersebut di mana saja dan kapan saja.
2. Dengan adanya *e-commerce* perusahaan tidak perlu membuka toko offline.
3. Biaya pengiriman informasi ke pelanggan lebih efektif tanpa harus menyampaikan informasi melalui jasa paket.

6. Memaksimalkan pembangunan proyek strategis daerah dan nasional di Kalimantan Tengah

Pemerintah telah menetapkan proyek-proyek yang masuk kategori proyek strategis daerah dan Strategis nasional, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan proyek strategis, diperlukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Terkait hal ini Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Adapun proyek-

proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional itu antara lain, proyek pembangunan infrastruktur jalan tol; proyek jalan nasional atau strategis nasional non-tol; proyek sarana dan prasarana kereta api antarkota; proyek kereta api dalam kota; proyek revitalisasi bandara; pembangunan bandara baru; proyek pembangunan bandara strategis lain; pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas; program satu juta rumah; pembangunan kilang minyak; proyek pipa gas atau terminal LPG; proyek energi asal sampah; proyek penyediaan infrastruktur air minum; proyek penyediaan sistem air limbah komunal; pembangunan tanggul penahan banjir; proyek pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) dan sarana penunjang; proyek bendungan; program peningkatan jangkauan *broadband*; proyek infrastruktur IPTEK strategis lainnya; pembangunan kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus; proyek pariwisata; proyek pembangunan smelter; dan proyek pertanian dan kelautan.

Terdapat dua proyek strategi nasional di yang dilakukan di Kalimantan Tengah yakni pembangunan proyek sarana prasarana Kereta Api Puruk Cahu – Batanjung melalui Bangkuang. Selain pembangunan sarana prasarana kereta api juga terdapat pengembangan food estate di Kalimantan Tengah. Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan. Food estate menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2020-2024. Tanah yang digunakan untuk food estate adalah eks proyek lahan gambut (PLG). Salah satu alasan pemerintah mengembangkan eks PLG yaitu sebagai perluasan lahan penghasil cadangan pangan nasional.

7. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan penduduk

Pemerintah Kalimantan Tengah berkomitmen untuk menyediakan fasilitas kesehatan berkualitas untuk semua dan memperkuat layanan kesehatan perdesaan. Peningkatan gerakan bersama; program perbaikan status gizi mikro pada ibu hamil, program layanan pra-nikah terpadu, program perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih. Sedangkan untuk peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, dapat ditempuh beberapa langkah antara lain; peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, KB, dan kehamilan; pengembangan lingkungan rumah sehat dan bersih.

Sementara kuat secara intelektual, tercermin dari tingkat kecerdasan intelektual atau yang sering juga disebut sebagai IQ (*intelligence quotient*) adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan manusia. Tingkat pendidikan, kemampuan teknis, pengalaman kerja, dan *soft skill* menjadi faktor penentu untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kalimantan Tengah.

Pendidikan merupakan salah satu jalan keluar dari jebakan kemiskinan. Keyakinan ini bukan tanpa alasan karena pendidikan bisa menjadi pintu awal bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan lebih baik dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin masih kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas.

Dalam upaya mewujudkan Masyarakat Kalteng Kuat, maka diperlukan program prioritas sebagai berikut:

- ✓ Mempercepat pengembangan kawasan food estate sebagai penunjang cadangan logistic strategis untuk pertahanan negara, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan local;
- ✓ Mempercepat program afirmatif dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana;
- ✓ Memperluas kuantitas dan kualitas penerima beasiswa Kalteng Berkah yang selama ini telah berjalan;
- ✓ Memastikan fasilitas dan layanan akses kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat melalui perawatan khusus secara gratis bagi pasien kurang mampu.
- ✓ Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*) dalam rangka Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan dan Memperkuat Ekonomi Daerah melalui pengembangan Koperasi dan UMKM

8. Mengembangkan sektor sosial budaya dan pariwisata di Kalimantan Tengah

Sektor Pariwisata dan sektor sosial budaya merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang

sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas.

Pengembangan Sektor budaya dan Pariwisata yang baik dapat menjadi daya tarik untuk mendatangkan wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisata tersebut. Hal ini juga berdampak berupa keuntungan bagi masyarakat daerah. Dari hasil transaksi wisatawan dapat mengangkat dan mengembangkan taraf hidup masyarakat dan negara dari devisa wisatawan asing yang menukarkan mata uangnya dengan Rupiah. Kedepannya apabila pariwisata Indonesia dikelola lebih baik maka akan menjadi aset Negara dalam pertumbuhan ekonomi.

Pulau Kalimantan merupakan pulau yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan keberagaman budaya serta berbagai suku. Pengelolaan industri pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dengan memanfaatkan keaneka ragaman adat budaya secara arif dan bijaksana dalam rangka proses pembangunan yang berkelanjutan. Wilayah Kalimantan Tengah didominasi oleh hutan hujan tropis menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan di wilayah ini, hal tersebut dikarenakan terdapat banyak fauna dan flora yang khas seperti orang utan dan anggrek. Selain keindahan alam, Kalimantan Tengah juga terkenal dengan wisata budaya dan kuliner. Kebudayaan khas Kalimantan Tengah seperti masyarakat adat dayak lengkap dengan rumah betang tentu menjadi sebuah daya tarik sendiri untuk dikunjungi

6.2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang akan dicapai. Rumusan Strategi Umum selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa Arah Kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembangunan tahunan (*milestone*) Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2026.

Berikut ini akan dipaparkan Strategi Pembangunan berdasarkan misi yang merupakan penjabaran dari visi pembangunan Daerah Kalimantan Tengah periode tahun 2021 – 2026 yaitu:



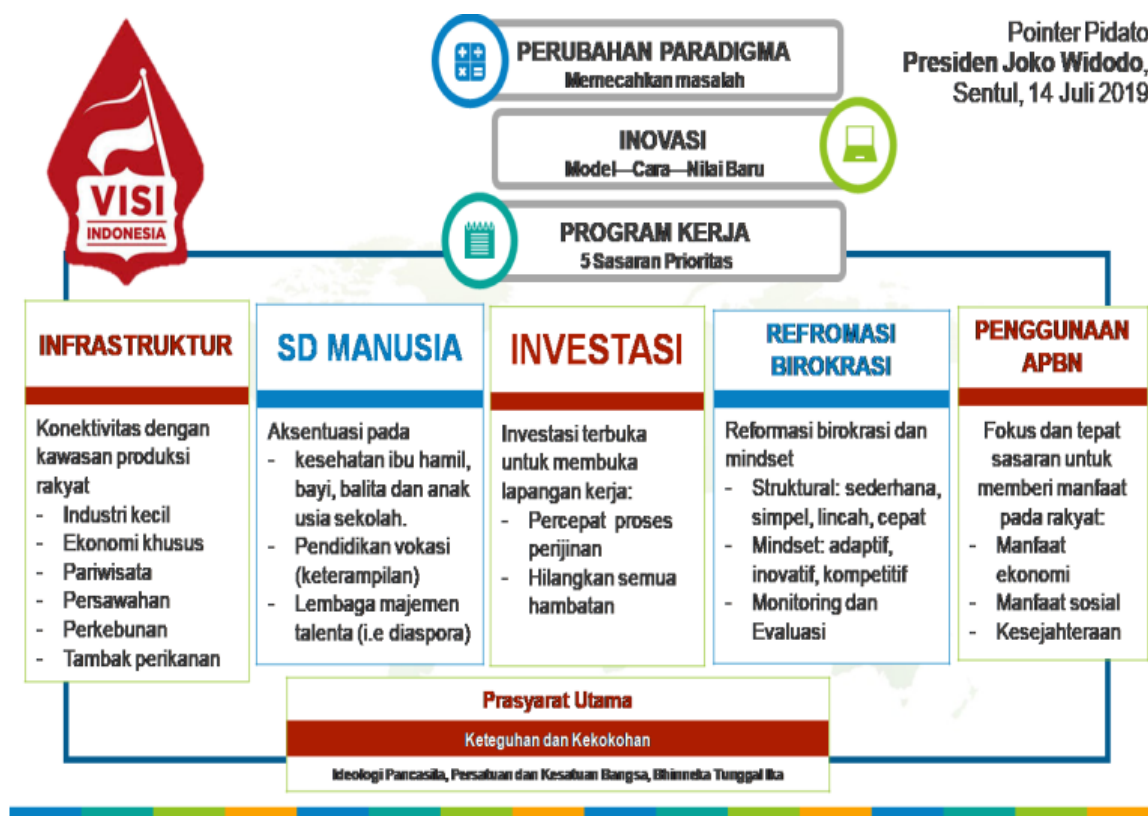
Gambar 6. 1 Visi Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Periode Tahun 2021 – 2026

6.3. Arah Kebijakan

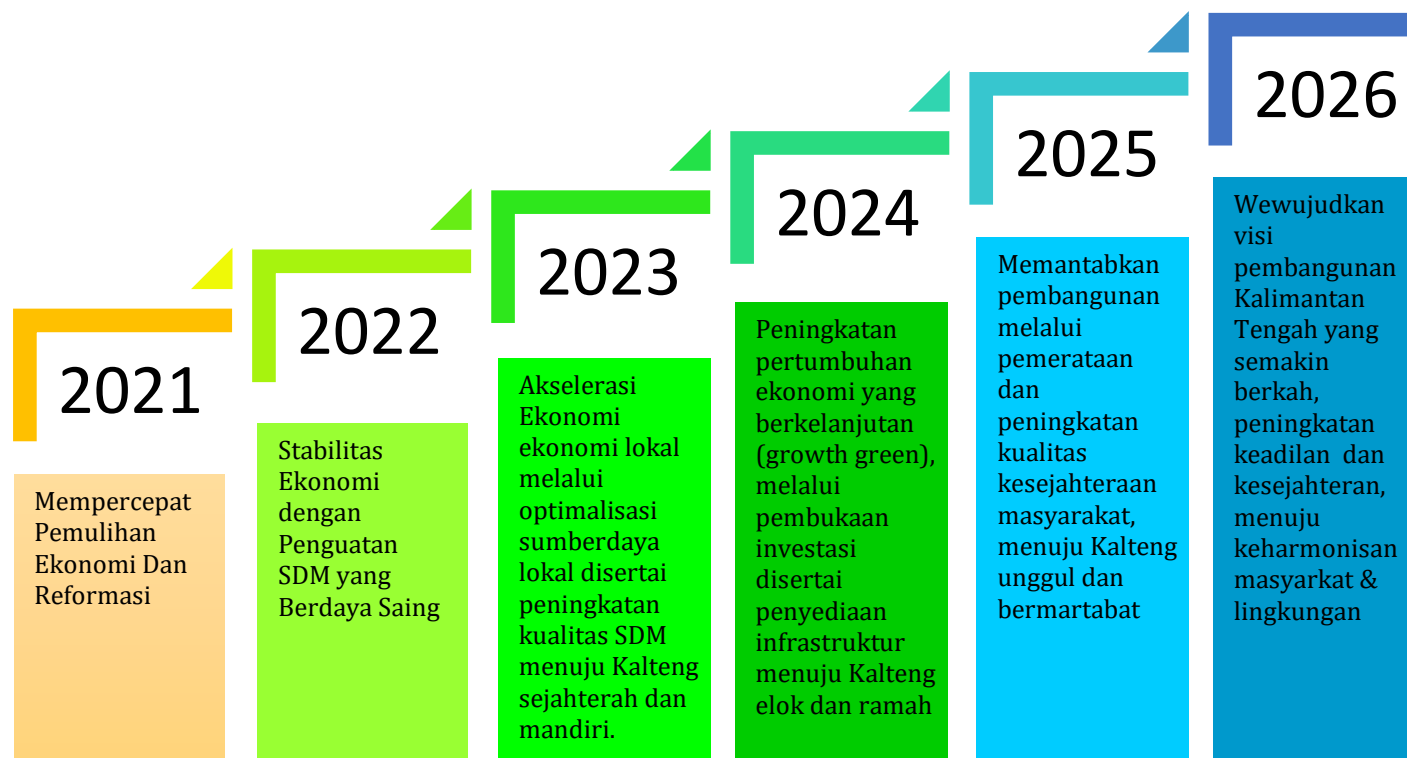
6.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan pada strategi pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah proses perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Proses perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selain didasarkan pada strategi pembangunan daerahnya, perlu juga memperhatikan dan bersinergi dengan dengan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2020-2024.

Sasaran prioritas pembangunan nasional tahun 2019-2024 yaitu: infrastruktur untuk koneksitas kawasan produksi rakyat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, membuka investasi untuk menyerap lapangan keraj, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang tetap sasaran. Lima Sasaran Prioritas nasional di atas akan menjadi dasar untuk perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini



Gambar 6. 2 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019-2024



Keterangan:

Tema RKPD 2021 : Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial

Tema RKPD 2022 : Stabilitas Ekonomi dengan Penguatan SDM yang Berdaya Saing

Tema RKPD 2023 : Akselerasi Ekonomi ekonomi lokal melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas SDM

Tema RKPD 2024 : Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (growth green) melalui investasi dan infrastruktur

Tema RKPD 2025 : Pemantapan kuliatas pertumbuhan melalui pemerataan dan kesejahteraan menuju kalteng unggul dan bermartabat

Tema RKPD 2026 : Peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan keharmonisan masvarakat dan lingkungan

Gambar 6. 3 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Arah kebijakan di atas merupakan target indikatif menuju tercapainya Visi Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di akhir periode perencanaan tahun 2026. Secara teknokratik, arah kebijakan tahunan ini sinergis dengan tema rencana Pembangunan Tahunan (RKPD) setiap tahun berkenaan. Selain itu, arah kebijakan tahunan ini juga disesuaikan dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Keselarasan Arah Kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal akan menjamin keserasian pembangunan antar level maupun antara daerah.

Tabel 6.1a Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan pengembangan industri yang ada berbasis 4.0	1 Peningkatan produktivitas disertai dengan Penguatan Daya Saing produk industri pengolahan	x	x	x	x	x
		2 Peningkatan penggunaan teknologi industri	x	x	x	x	x
		3 Peningkatan produktivitas disertai dengan penguatan daya saing produk agro dan mina industri	x	x	x	x	x
		4 Peningkatan penggunaan teknologi pada agro dan mina industri	x	x	x	x	x
		5 Peningkatan produksi dan produktivitas pertambangan dan penggalian yang berkelanjutan	x	x	x	x	x
		6 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM (melalui Reformasi Koperasi, Pengawasan dan Transformasi UMKM informasi menjadi Formal)	x	x	x	x	x
		7 Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	x	x	x	x	x
		8 Pengembangan destinasi dan promosi wisata	x	x	x	x	x
		9 Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur Pariwisata	x	x	x		
		10 Peningkatan Akselerasi dan integrasi industry kepariwisataan	x	x	x	x	x
		11 Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif	x	x	x	x	x
		12 Peningkatan kenyamanan pelayanan dan efisiensi dalam perijinan berinvestasi	x	x	x	x	
		13 Peningkatan promosi dan informasi peluang investasi	x	x	x	x	x
2	Memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara bijaksana dan berkelanjutan	14 Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	x	x	x	x	x
		15 Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	x	x	x	x	x
		16 Optimalisasi pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	x	x	x	x	x
		17 Peningkatan akses pengelolasn hutan oleh masyarakat	x	x	x	x	x

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Memaksimalkan pembangunan proyek strategis daerah dan nasional di Kalimantan Tengah	18 Pengembangan Infrastruktur Kelistrikan	x	x	x	x	x
		19 Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	x	x	x	x	x
		20 Penguatan Kerjasama dengan semua pihak dalam Pengarustamaan Prinsip Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	x	x	x	x	x
		21 Peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	x	x	x	x	x
		22 Pengelolaan Sumber Daya Air	x	x	x	x	x
		23 Peningkatan pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan dokumen RTRW	x	x	x	x	x
		24 Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim	x	x	x	x	x
		25 Peningkatan restorasi dan pengelolaan lahan gambut	x	x	x	x	x
		26 Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan	x	x	x	x	x
4	Mendorong peningkatan UMKM di Kalimantan Tengah	27 Pengurangan laju deforestasi	x	x	x	x	x
		28 Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu	x	x	x	x	x
		29 Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan	x	x	x	x	x
		30 Memperluas dan meningkatkan kualitas BUMDesa	x	x	x	x	x
		31 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah rentan terhadap akses (wilayah 3T: Tertinggal, Terluar, Terdalam)	x	x	x	x	x
5	Meningkatkan jaringan infrastruktur untuk mendukung	32 Meningkatkan pembangunan, Pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa	x	x	x	x	x
		33 Menjunjung tinggi norma, agama, budaya, dan adat istiadat lokal	x	x	x	x	x
		34 Edukasi dan Pencegahan Konflik Berbasis Masyarakat.	x	x	x	x	x
		35 Mendukung sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial	x	x	x	x	x

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar	36	Pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS dalam upaya penanganan PMKS	x	x	x	x	x
		37	Pengembangan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum	x	x	x	x	x
		38	Pembangunan infrastruktur sanitasi	x	x	x	x	x
		39	Pengembangan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan dan perkotaan termasuk kawasan kumuh serta pengentasan rumah tidak layak huni	x	x	x	x	x
		40	Peningkatan <i>Early Warning System</i> , kesadaran masyarakat terhadap bencana dan penguatan kelembagaan bencana dan pandemi	x	x	x		
		41	Peningkatan Ketahanan Daerah menghadapi Bencana dan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	x	x	x	x	x
6	Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dan berdaya saing dalam menghadapi MEA	42	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	x	x	x	x	x
		43	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan pengawasan masyarakat	x	x	x	x	x
		44	Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	x	x	x	x	x
		45	Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	x	x	x	x	x
		46	Evaluasi Produk-Produk Regulasi daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan merugikan kepentingan umum serta tidak menghargai kebinekaan.	x	x	x	x	x
		47	Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	x	x	x	x	x

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		48 Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan <i>up to date</i> melalui Pelayanan Informasi.	x	x	x	x	x
		49 Peningkatan penanganan <i>Complaint Handling System</i> .	x	x	x	x	x
		50 Inovasi Pelayanan Publik Berbasis TIK Untuk mewujudkan pelayanan yang Cepat, Efektif, Efisien, Responsif, Transparan, dan Akuntabel	x	x	x	x	x
7	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan penduduk	51 Meningkatkan status kesehatan keluarga	x	x	x	x	x
		52 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	x	x	x	x	x
		53 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan balita	x	x	x	x	x
		54 Penyediaan pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas	x	x	x	x	x
		55 Perluasan akses dan Penguatan Fasilitas Kesehatan	x	x	x	x	x
		56 Pemenuhan dan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.	x	x	x	x	x
		57 Peningkatan RSUD, RS Khusus dan RSUD Rujukan	x	x	x	x	x
		58 Peningkatan akses terhadap pendidikan Menengah dan Tinggi	x	x	x	x	x
		59 Peningkatan akses pendidikan Menengah Kejuruan	x	x	x	x	x
		60 Peningkatan kualitas, profesionalisme, kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan	x	x	x	x	x
		61 Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan	x	x	x	x	x
		62 Peningkatan mutu teknologi informasi dan komunikasi pendidikan	x	x	x	x	x
		63 Peningkatan rata-rata lama sekolah	x	x	x	x	x
		64 Peningkatan kualitas , kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	x	x	x	x	x
		65 Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja	x	x	x	x	x
		66 Mengembangkan kapasitas BLK yang intensif	x	x	x	x	x
		67 Pengembangan market place profesi milleneal melalui Milleneal Job Center (MJC)	x	x	x	x	x

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Mengembangkan sektor Sosial Budaya dan Pariwisata di Kalimantan Tengah	68 Menggali, menumbuhkan dan mengembangkan serta memupuk modal sosial dalam mewujudkan kepedulian sosial	x	x	x	x	x
		69 Revitalisasi nilai-nilai seni dan budaya lokal serta Pengembangan sektor Pariwisata	x	x	x	x	x
		70 Pengarusutamaan gender	x	x	x	x	x
		71 Peningkatan kualitas hidup perempuan	x	x	x	x	x

Tabel 6.2b Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi: Kalimantan Tengah Makin Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)			
Misi 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan			
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	1 Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah	1 Meningkatkan pengembangan industri yang ada berbasis 4.0	1 Peningkatan produktivitas disertai dengan Penguatan Daya Saing produk industri pengolahan
			2 Peningkatan penggunaan teknologi industri
			3 Peningkatan produktivitas disertai dengan penguatan daya saing produk agro dan mina industri
			4 Peningkatan penggunaan teknologi pada agro dan mina industri
			5 Peningkatan produksi dan produktivitas pertambangan dan penggalian yang berkelanjutan
			6 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM (melalui Reformasi Koperasi, Pengawasan dan Transformasi UMKM informasi menjadi Formal)
			7 Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
			8 Pengembangan destinasi dan promosi wisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			9 Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur Pariwisata
			10 Peningkatan Akselerasi dan integrasi industry kepariwisataan
			11 Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif
			12 Peningkatan kenyamanan pelayanan dan efisiensi dalam perijinan berinvestasi
			13 Peningkatan promosi dan informasi peluang investasi
	2 Meningkatnya Ketercukupan Energi	2 Memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara bijaksana dan berkelanjutan	14 Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita
	3 Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat		15 Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat
16 Optimalisasi pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
2 Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	4 Meningkatnya konektivitas wilayah	3 Memaksimalkan pembangunan proyek strategis daerah dan nasional di Kalimantan Tengah	17 Peningkatan akses pengelolasn hutan oleh masyarakat
	5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		18 Pengembangan Infrastruktur Kelistrikan
			19 Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
			20 Penguatan Kerjasama dengan semua pihak dalam Pengarustamaan Prinsip Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			21 Peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			22 Pengelolaan Sumber Daya Air
	6 Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Provinsi		23 Peningkatan pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan dokumen RTRW
	7 Meningkatnya pembangunan rendah karbon		24 Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim
			25 Peningkatan restorasi dan pengelolaan lahan gambut
			26 Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan
			27 Pengurangan laju deforestasi
Misi 2: Memperkuat ketahanan Daerah dan Mengantisipasi Perubahan Global			
3 Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat	8 Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan	4 Mendorong peningkatan UMKM di Kalimantan Tengah	28 Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu
			29 Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan
			30 Memperluas dan meningkatkan kualitas BUMDesa
			31 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah rentan terhadap akses (wilayah 3T : Tertinggal, Terluar, Terdalam)
			32 Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa
	9 Meningkatnya ketertiban dan	5 Meningkatkan jaringan infrastruktur untuk	33 Menjunjung tinggi norma, agama, budaya, dan adat istiadat lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	ketentraman masyarakat	mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar	34 Edukasi dan Pencegahan Konflik Berbasis Masyarakat.
	10 Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).		35 Mendukung sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial
	11 Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi.		36 Pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS dalam upaya penanganan PMKS
			37 Pengembangan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum
			38 Pembangunan infrastruktur sanitasi
			39 Pengembangan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan dan perkotaan termasuk kawasan kumuh serta pengentasan rumah tidak layak huni
4 Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan	12 Meningkatnya Kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana dan pandemi	40 Peningkatan <i>Early Warning System</i> , kesadaran masyarakat terhadap bencana dan penguatan kelembagaan bencana dan pande	
		41 Peningkatan Ketahanan Daerah menghadapi Bencana dan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi			
5 Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi	13 Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	6 Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dan	42 Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			43 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
yang inovatif dan responsif	14 Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat	berdaya saing dalam menghadapi MEA	Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan pengawasan masyarakat
			44 Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
			45 Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
			46 Evaluasi Produk-Produk Regulasi daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan merugikan kepentingan umum serta tidak menghargai kebinekaan.
			47 Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah
			48 Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan <i>up to date</i> melalui Pelayanan Informasi.
			49 Peningkatan penanganan <i>Complaint Handling System</i> .
			50 Inovasi Pelayanan Publik Berbasis TIK Untuk mewujudkan pelayanan yang Cepat, Efektif, Efisien, Responsif, Transparan, dan Akuntabel
Misi 4: Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing			
6 Meningkatkan kualitas SDM	15 Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan dan pekerjaan penduduk	7 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan penduduk	51 Meningkatkan status kesehatan keluarga
			52 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
			53 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan balita

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			54 Penyediaan pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas
			55 Perluasan akses dan Penguatan Fasilitas Kesehatan
			56 Pemenuhan dan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.
			57 Peningkatan RSUD, RS Khusus dan RSUD Rujukan
			58 Peningkatan akses terhadap pendidikan Menengah dan Tinggi
			59 Peningkatan akses pendidikan Menengah Kejuruan
			60 Peningkatan kualitas, profesionalisme,
			61 kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan
			62 Peningkatan mutu teknologi informasi dan komunikasi pendidikan
			63 Peningkatan rata-rata lama sekolah
			64 Peningkatan kualitas , kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
			65 Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja
			66 Mengembangkan kapasitas BLK yang intensif
			67 Pengembangan market place profesi milleneal melalui Milleneal Job Center (MJC)

Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan		
Misi 5: Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender							
7	Meningkatkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial budaya bermasyarakat.	16	Meningkatnya kualitas beribadah	8	Mengembangkan sektor Sosial Budaya dan Pariwisata di Kalimantan Tengah	68	Menggali, menumbuhkan dan mengembangkan serta memupuk modal sosial dalam mewujudkan kepedulian sosial
		17	Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan			69	Revitalisasi nilai-nilai seni dan budaya lokal serta Pengembangan sektor Pariwisata
8	Meningkatkan kesetaraan gender	18	Meningkatnya pemberdayaan perempuan			70	Pengarusutamaan gender

6.3.2. Arah Kebijakan Kewilayahan

Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antarsektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan pada :

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah termasuk rencana daerah otonom baru dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi melalui peningkatan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara PKN, PKW, dan PKL, pengembangan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada dan mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif serta berdaya dukung terhadap pengembangan potensi provinsi.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi antarmoda baik darat, laut maupun udara, mendorong pengembangan prasarana utama untuk menjangkau kawaskawasan terpencil, peningkatan pengembangan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman, peningkatan pengembangan akses telekomunikasi ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman, pengembangan jaringan prasarana air bersih untuk kawasan permukiman dan pengembangan sistem prasarana persampahan pada kawasan perkotaan.
3. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian melalui penetapan kawasan yang memiliki potensi agribisnis dan agroindustri, pengembangan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri serata minapolitan atau sentra produksi perikanan, peningkatan jaringan prasarana air bersih pada kawasan agribisnis dan agroindustri serta

- minapolitan atau sentra produksi perikanan, pengembangan jaringan distribusi pemasaran hasil agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan dan mengembangkan pelabuhan laut yang menunjang distribusi hasil pertanian.
4. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan melalui pengembangan kawasan pertanian dalam rangka mendukung lumbung pangan, menetapkan kawasan yang berpotensi sebagai lumbung pangan, pengembangan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan lumbung pangan, mengalokasikan ruang untuk pengembangan gudang/depo pangan, meningkatkan jaringan prasarana pengairan pada kawasan pertanian dan pengembangan jaringan distribusi pemasaran hasil pertanian.
 5. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi melalui pengembangan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi, peningkatan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi, menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi, merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna dan mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik.
 6. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi melalui penyelenggaraan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah, melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian dan energi, mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan terhambatnya perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.
 7. Pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi melalui penetapan lokasi-lokasi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan,

dan teknologi, penetapan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung, penegasan dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan, mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan.

8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara melalui penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan, pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan, pengembangan kegiatan budi daya secara selektif didalam dan sekitar kawasan.

9. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai paru-paru dunia

Heart of Borneo (HoB) merupakan inisiatif untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi di Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan inisiatif HoB adalah untuk mempertahankan dan memelihara keberlanjutan manfaat salah satu kawasan hutan hujan terbaik yang masih tersisa di Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Untuk di Indonesia HoB dikenal dengan istilah Jantung Kalimantan yakni bagian kawasan HoB yang berada di wilayah negara Indonesia seluas sekitar 265.000 km² (26,5 juta ha). Kawasan Strategis Heart of Borneo (HoB) di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 3,02 Ha (18%) meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara. Kawasan Hob kaya akan sumber daya yang tidak dapat pulih khususnya mineral, seperti emas dan batubara. Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan terhadap Kawasan HoB antara lain :

- a. Menterjemahkan kebijakan dan arahan nasional ke dalam konteks local (HoB).
 - b. Mengintegrasikan dan mensinergikan program berbasis sector ke dalam pembangunan pada tingkat provinsi dan kabupaten.
10. Program atau inisiatif Heart of Borneo dikembangkan tidak hanya untuk tujuan-tujuan konservasi semata, namun lebih penting lagi bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan HoB, sehingga ke depan kabupaten-kabupaten lain ditargetkan juga menjadi wilayah strategis HoB. Lingkungan dan keanekaragaman hayati

merupakan pilar-pilar program HoB selain sosial ekonomi dan pengembangan institusi. Oleh karena itu, kerjasama lintas sektoral dan peran serta aktif pemerintah propinsi dan kabupaten di kawasan HoB menjadi sangat penting. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat lokal, yaitu masyarakat lokal yang berinteraksi langsung dengan sumberdaya alam di kawasan HoB, harus menjadi bagian pokok dalam pembangunan di kawasan HoB.

6.3.2.1 Implementasi Visi RPJPD kedalam Tahapan Keempat RPJMD (Periode 2021-2026) serta Keterkaitannya dalam Kewilayahan

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Provinsi yang maju, mandiri dan adil diimplementasikan kedalam 4 (empat) tahapan 5 (lima) tahunan RPJMD yaitu tahap pertama (2005-2010), tahap kedua (2011-2015), tahap ketiga (2016-2021) dan tahap keempat (2021-2025). Dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah telah memasuki periode untuk tahap keempat (2021-2025) dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama, kedua dan ketiga, maka pembangunan tahap keempat ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju, dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

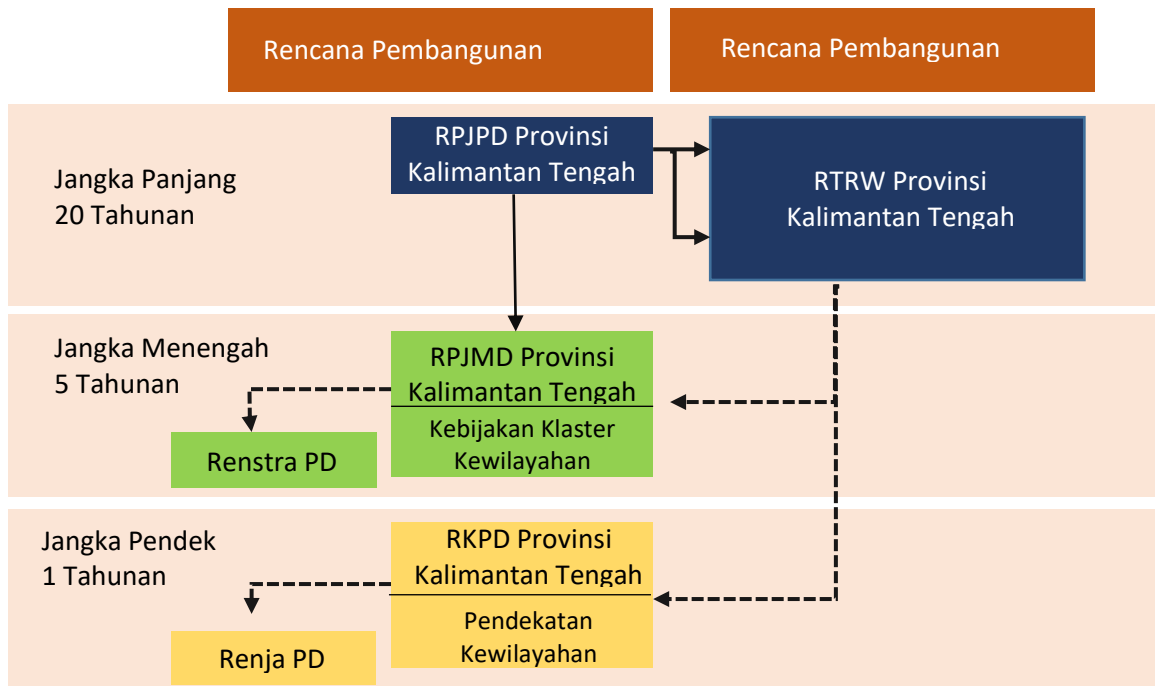
Pada tahap keempat, tingkat kemajuan dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Lebih tinggi pendapatan rata-rata dan pemerataannya, maka suatu daerah dapat dikatakan lebih makmur dan lebih maju. Daerah yang maju pada umumnya juga merupakan daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya yang terlembaga secara sistemik.

Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada

umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila tingkat pendidikan penduduknya semakin tinggi. Hal itu tercermin pada tingkat Pendidikan terendah serta tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang berada di daerah yang bersangkutan. Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, termasuk derajat kesehatan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas SDM yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, Daerah yang maju juga ditandai dengan Lembaga politik dan kemasyarakatan serta hukum yang fungsional secara mantap. Daerah yang maju juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan dan pertahanan.

Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan bukan hanya Kalimantan Tengah yang maju, tetapi juga mandiri. Kemandirian suatu Daerah tercermin pada kemampuan memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan sosial dan ekonomi tetapi memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial dan perekonomian. Wujud riil dari kemandirian ini adalah ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh modal sosial yang melembaga dalam sikap dan perilaku sehari-harinya.

Kalimantan Tengah yang ingin dibangun bukan hanya sebagai masyarakat dan Daerah yang maju dan mandiri, tetapi juga adalah Kalimantan Tengah yang adil. Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat di Kalimantan Tengah mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, serta perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian Kalimantan Tengah yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antarindividu, gender, dan wilayah



Gambar 6. 4 Sinkronisasi RPJPD, RTRW kedalam tahap Keempat Pembangunan RPJMD hingga Dokumen Perencanaan Tahunan

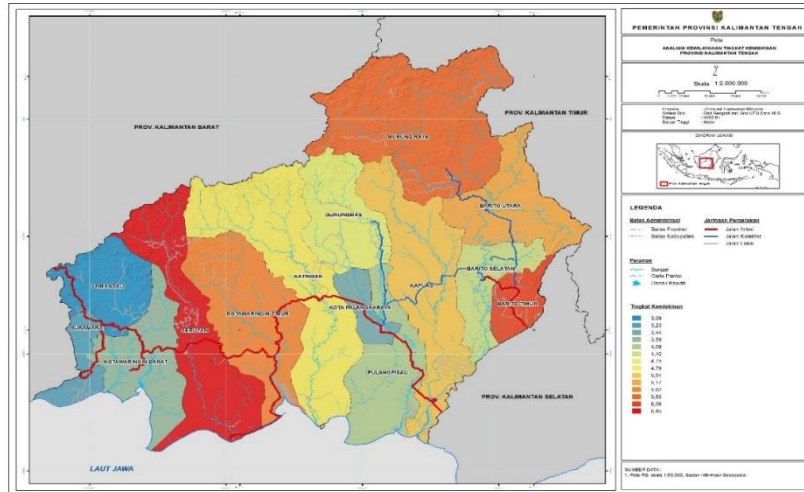
Sebagai wujud pengharmonisasian arahan rencana pembangunan daerah dalam RPJPD dan arahan rencana spasial dalam RTRW, klaster wilayah merupakan kebijakan kewilayahan prioritas untuk mengintegrasikan rencana pembangunan (RPJPD) sesuai dengan prioritas lokasinya (RTRW). Kedudukan Klaster Wilayah dalam Kebijakan Kewilayahan RPJMD merupakan penghubung arahan rencana pembangunan dalam RPJPD sesuai dengan prioritas lokasi dalam RTRW pada tahapan keempat RPJMD (periode 2021-2026) sehingga arahan rencana pembangunan RPJPD, RPJMD dan RTRW dapat bersinergi hingga ke lokasinya. Selain itu Kebijakan Kewilayahan dalam RPJMD bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya.

6.3.2.2 Prioritas Penanganan Kewilayahan

Tujuan utama dari kebijakan kewilayahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan pemerataan pembangunan ekonomi. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, didapatkan prioritas lokasi penanganan kewilayahan dengan fokus pada tiga permasalahan antara lain

A. Prioritas Penanganan Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu prioritas permasalahan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan di Kalimantan Tengah permasalahan kemiskinan diprioritaskan untuk daerah berikut:



Gambar 6. 5 Peta Sebaran Kondisi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah

Prioritas pertama:

1. Kabupaten Seruyan
2. Kabupaten Barito Timur Kabupaten Murung Raya
3. Kabupaten Kotawaringin Timur
4. Kabupaten Barito utara

Prioritas Kedua:

1. Kabupaten Kapuas
2. Kabupaten Katingan
3. Kabupaten Gunung Mas
4. Kabupaten Barito Selatan
5. Kabupaten Pulang Pisau

Prioritas Ketiga:

1. Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kota Palangka Raya
3. Kabupaten Sukamara
4. Kabupaten Lamandau

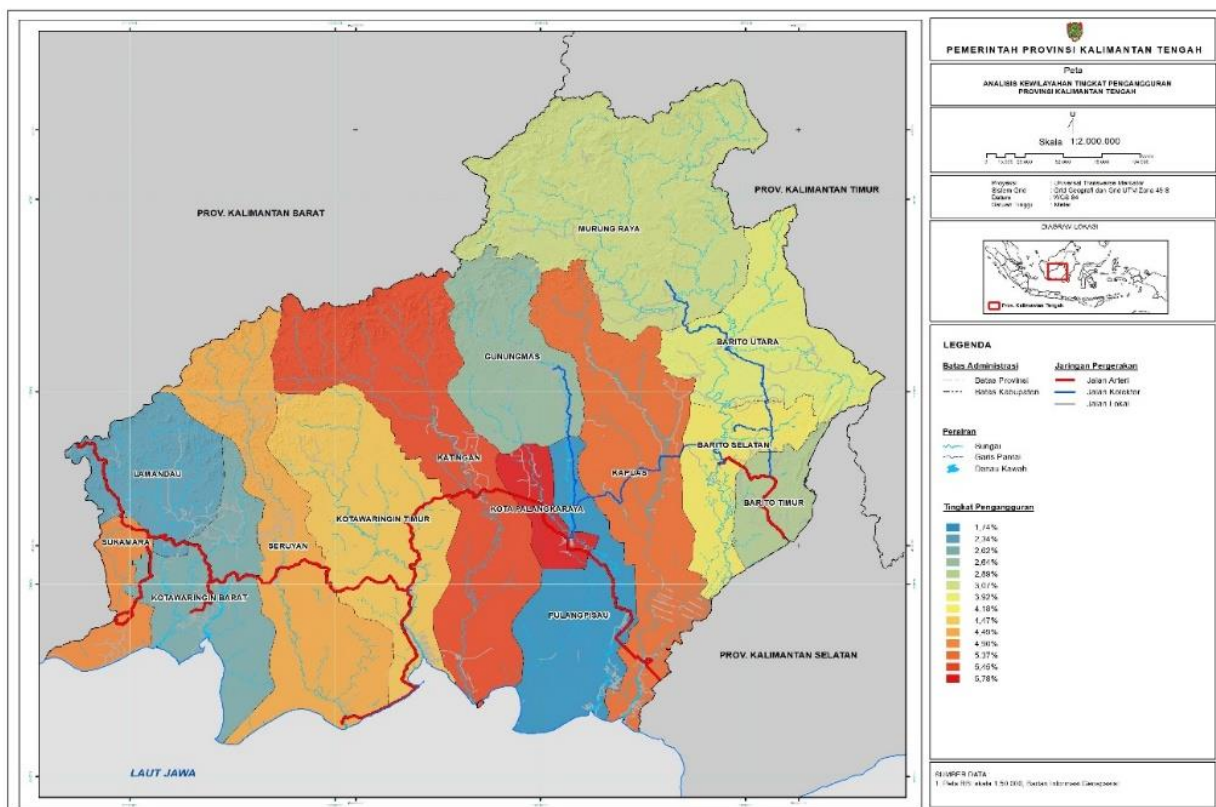
Pada wilayah dengan prioritas pertama dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan pendapatan Masyarakat Miskin melalui peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi potensial.
2. Pengendalian harga dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
3. Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan kemiskinan.
4. Optimalisasi *updating* data DTKS guna meningkatkan ketepatan pemberian bantuan social
5. Peningkatan program perlindungan sosial (pendidikan dan Kesehatan)
6. Penguatan Kelembagaan Tim TKPK.

B. Prioritas Penanganan Pengangguran

Permasalahan pembangunan daerah yang juga turut diperhatikan adalah kondisi pengangguran. Dimana *multiplier effect* yang ditimbulkan oleh pengangguran sangat banyak mulai masyarakat yang kehilangan pekerjaan, menurunnya daya beli, mendorong masyarakat masuk dalam jurang kemiskinan hingga mendorong peningkatan permasalahan social lainnya seperti meningkatkan kriminalitas serta konflik social lainnya.

Prioritas wilayah penanganan pengangguran di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:



Gambar 6. 6 Peta Sebaran Pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah

Prioritas Pertama:

1. Kota Palangka Raya
2. Kabupaten Katingan
3. Kabupaten Kapuas
4. Kabupaten Sukamara
5. Kabupaten Seruyan

Prioritas Kedua:

1. Kabupaten Waringin Timur
2. Kabupaten Barito Selatan
3. Kabupaten Barito Utara

4. Kabupaten Murung Raya
5. Kabupaten Barito Timur

Prioritas Ketiga

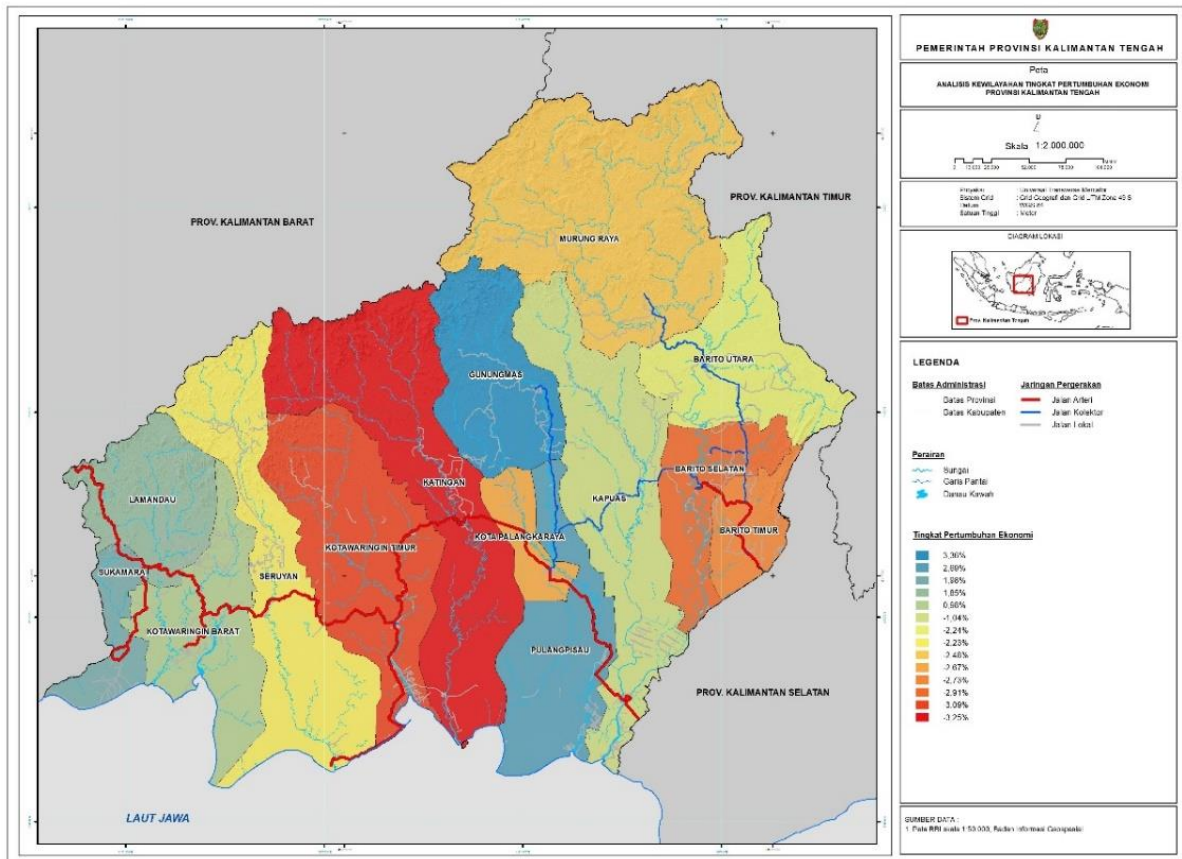
1. Kabupaten Gunung Mas
2. Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Kabupaten Lamandau
4. Kabupaten Pulang Pisau

Upaya untuk mengatasi permasalahan pengangguran daerah pada wilayah prioritas dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya:

1. Pengembangan sektor prioritas yang dapat menyerap tenaga kerja secara besar.
2. Optimalisasi program pengembangan UMKM potensial
3. Pengembangan ekonomi kreatif
4. Optimalisasi pelatihan kerja dengan pengembangan balai latihan kerja.
5. Optimalisasi kurikulum berbasis kewirausahaan serta sinkronisasi kurikulum dengan dunia kerja.

C. Prioritas Penanganan Pembangunan Ekonomi

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia semenjak awal tahun 2020 telah membuat guncangan cukup besar terhadap berbagai sektor mulai kesehatan hingga perekonomian. Di seluruh wilayah di Indonesia tidak terkecuali didaerah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami guncangan ekonomi terlihat terjadi kontraksi ekonomi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam 2 tahun ini fokus untuk melakukan stabilisasi dan pemulihan ekonomi dalam program kerjanya. Wilayah yang dapat menjadi prioritas dalam penanganan Pembangunan ekonomi adalah wilayah berikut:



Gambar 6. 7 Peta Sebaran Kondisi Ekonomi

Prioritas Pertama:

1. Kabupaten Katingan
2. Kabupaten Kotawaringin Timur
3. Kabupaten Barito Selatan
4. Kabupaten Barito Timur
5. Kota Palangka Raya

Prioritas Kedua:

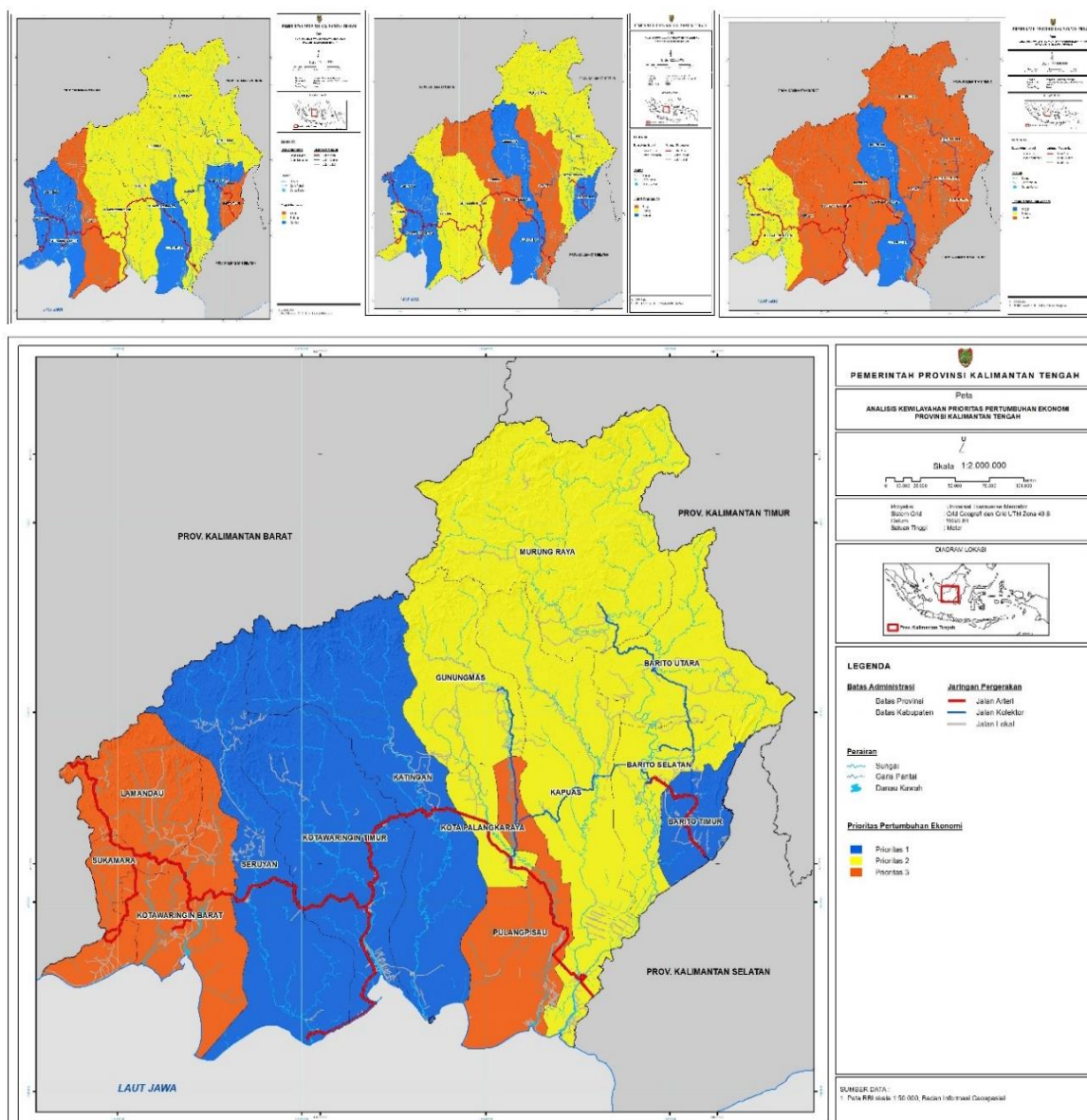
1. Kabupaten Murung Raya
2. Kabupaten Barito Utara
3. Kabupaten Seruyan
4. Kabupaten Kapuas
5. Kabupaten Kotawaringin Barat

Prioritas Ketiga:

1. Kabupaten Lamandau
2. Kabupaten Sukamara
3. Kabupaten Pulang Pisau
4. Kabupaten Gunung Mas

Wilayah-wilayah prioritas utama dalam penanganan pembangunan ekonomi adalah Kabupaten atau Kota yang saat ini kondisi perekonomiannya mengalami kontraksi cukup dalam. Upaya penanganan pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya :

1. Pemulihan konsumsi masyarakat dengan jalan meningkatkan pemberian dan ketepatan bantuan sosial khususnya bagi masyarakat miskin yang terdampak.
2. Pemberian stimulus ekonomi kepada pelaku usaha potensial yang menjadi motor penggerak ekonomi. Berupa keringanan bunga pinjaman serta stimulus keringanan pajak untuk mendorong peningkatan investasi.
3. Meningkatkan belanja pemerintah khususnya belanja modal dan jasa.
4. Stimulus ekspor baik antar daerah maupun luar negeri untuk memperbaiki kondisi net ekspor daerah.



Gambar 6. 8 Prioritas Pembangunan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan pemetaan tingkat kondisi Kemiskinan, Pengangguran, serta kondisi pertumbuhan ekonomi dari kabupaten dan kota di provinsi

Kalimantan Tengah dengan membagi dalam tiga kategori didapatkan prioritas pembangunan ekonomi adalah di wilayah berikut:

Prioritas pertama

1. Kota Palangka Raya
2. Kabupaten Barito Timur
3. Kabupaten Katingan
4. Kabupaten Kotawaringi Timur
5. Kabupaten Seruyan

Prioritas Kedua

1. Kabupaten Kapuas
2. Kabupaten Barito Selatan
3. Kabupaten Barito Utara
4. Kabupaten Gunung Mas
5. Kabupaten Murung Raya

Prioritas Ketiga

1. Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kabupaten Sukamara
3. Kabupaten Lamandau
4. Kabupaten Pulang Pisang

6.3.2.3 Penetapan Klaster Kewilayahan

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang beragam mulai dari pertanian hingga industri. Prioritas pembangunan klaster dapat dijabarkan sebagai berikut:

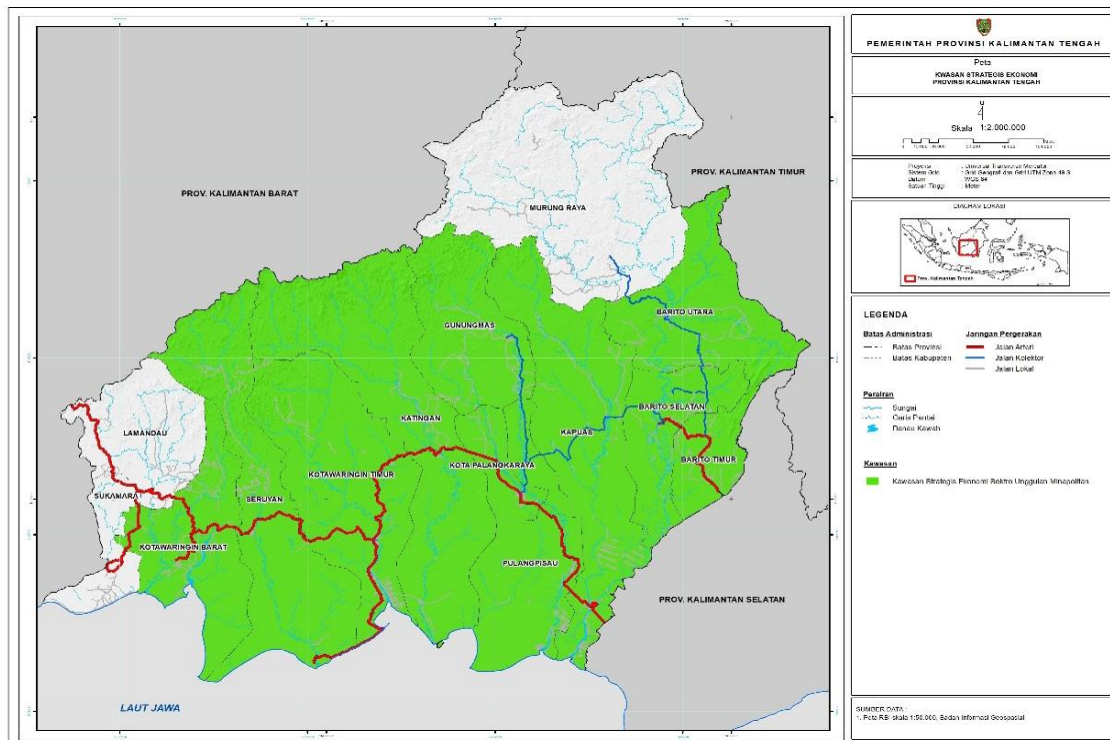
A. Klaster Pertanian Minapolitan

Kawasan Strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan dikembangkan di beberapa berikut:

1. Kabupaten Kapuas,
2. Kabupaten Pulang Pisau,
3. Kabupaten Katingan,
4. Kabupaten Barito Selatan,
5. Kabupaten Barito Timur,
6. Kabupaten Kotawaringin Barat,
7. Kota Palangka Raya,
8. Kabupaten Kotawaringin Timur,
9. Kabupaten Gunung Mas,

10. Kabupaten Barito Utara, dan

11. Kabupaten Seruyan.



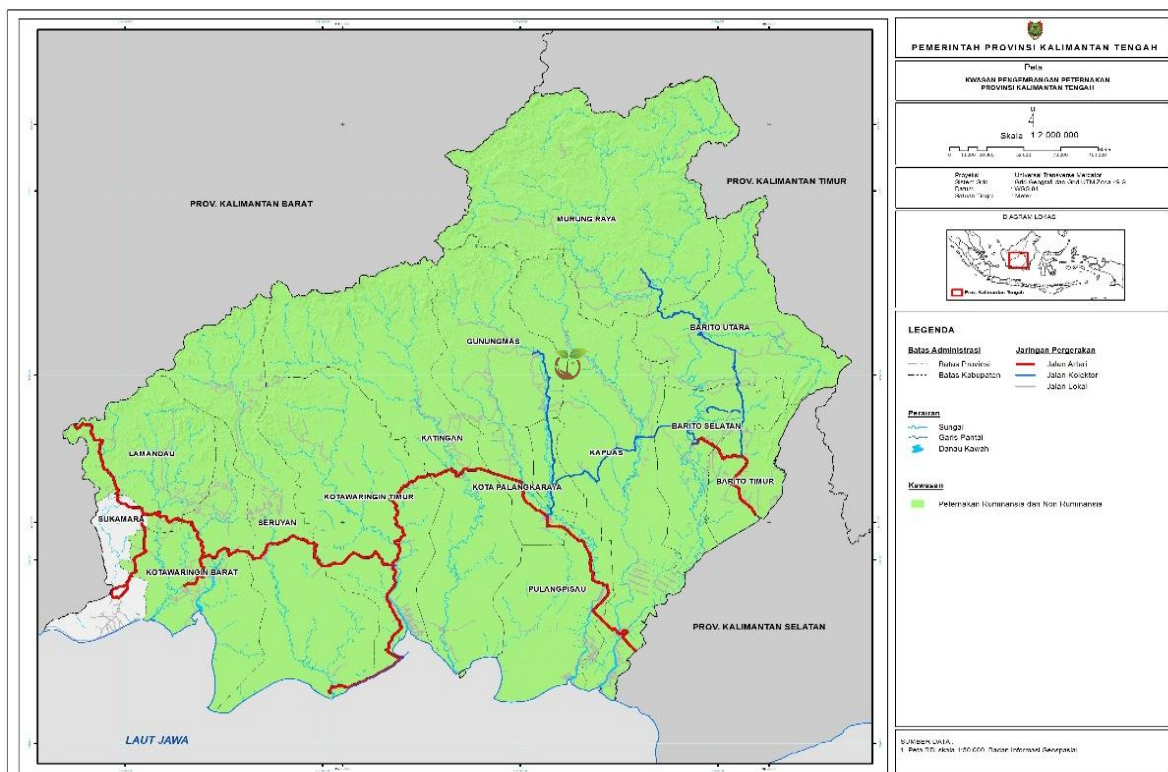
Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 6. 9 Kluster Sektor Unggulan Pertanian Minapolitan Provinsi

B. Kluster Kawasan Peternakan

Kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya diwilayah berikut:

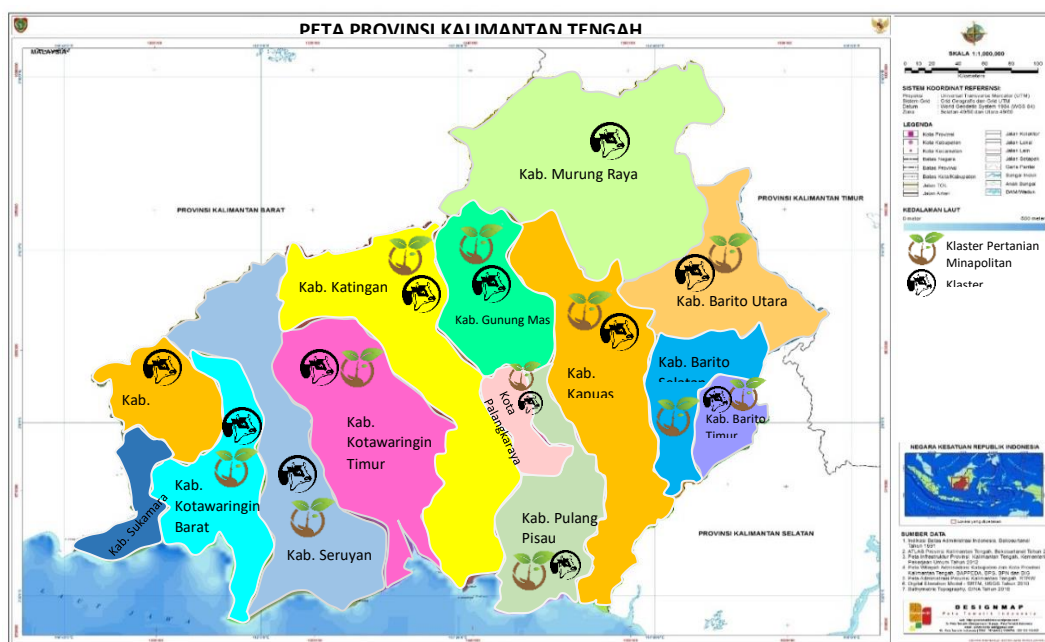
1. Kabupaten Pulang Pisau,
2. Kabupaten Kapuas,
3. Kabupaten Katingan,
4. Kabupaten Gunung Mas,
5. Kabupaten Seruyan,
6. Kabupaten Kota Waringin Timur,
7. Kabupaten Kotawaringin Barat,
8. Kabupaten Lamandau,
9. Kabupaten Barito Timur,
10. Kabupaten Barito Selatan,
11. Kabupaten Barito Utara,
12. Kabupaten Murung Raya dan
13. Kota Palangka Raya



Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 6. 10 Kluster Sektor Unggulan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan persebaran kluster minapolitan dan peternakan dapat digambarkan kluster kedua komoditas tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 6. 11 Kluster Pertanian Minapolitan dan Peternakan di Provinsi Kalimantan Tengah

6.3.2.4 Kawasan Strategis Prioritas Pembangunan Ekonomi

A. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Tengah

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa (Provinsi Kalimantan Barat), Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat), Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (Provinsi Kalimantan Barat), Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito (Provinsi Kalimantan Tengah), Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (Provinsi Kalimantan Tengah), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin (Provinsi Kalimantan Selatan), dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur). Untuk mewujudkan pengembangan KSN secara efisien dan efektif, diperlukan suatu proses perencanaan untuk setiap KSN secara baik dan benar. Selanjutnya, Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, pemerintah pusat mengadakan Proyek Strategis Nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara proyeknya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Landasan hukum PSN adalah Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No 58 tahun 2017, Peraturan Presiden No 58 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020. Berdasarkan Perpres tersebut di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2 Proyek Strategis Nasional, yaitu: Kereta Api Puruk Cahu – Batanjung melalui Bangkuang dan Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*).

1. Kereta Api Puruk Cahu – Batanjung melalui Bangkuang

Jalur Kereta Api Puruk Cahu – Batangjung melalui Bangkuang yang merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) tersebut akan menggabungkan lima

kabupaten di Kalimantan Tengah. Kelima kabupaten tersebut adalah Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur dan Kapuas. Selain itu, rel kereta juga akan menghubungkan lokasi-lokasi pertambangan di pedalaman Barito yang terletak di bagian Timur Utara Kalimantan Tengah dengan pelabuhan di bagian selatan (Laut Jawa).

Pembangunan jalur kereta di Kalimantan Tengah ditargetkan mulai berjalan tahun 2019, namun karena ada kendala, maka prosesnya tertunda. Salah satu kendala dalam perealisasi proyek ini adalah perbedaan nomenklatur yang kini telah disesuaikan.

Fokus awal pemanfaatan rel kereta ini adalah untuk angkutan Sumber Daya Alam (SDA), yang kedepannya juga akan diarahkan sebagai angkutan penumpang. Berdasarkan target PSN, rel kereta api di Kalimantan Tengah sudah bisa beroperasi pada tahun 2024.

2. Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate)

Pembangunan sektor pertanian dan kelautan perikanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan daerah. Sejak dulu hingga sekarang pertanian serta kelautan dan perikanan memegang peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional dan daerah. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penyediaan bahan pangan, penyediaan bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, pencapaian PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sumber devisa negara, sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat perdesaan, dan pelestarian lingkungan. Peran ini akan bertambah di masa yang akan datang dengan berkembangnya teknologi dan berkurangnya sumberdaya tak terbarukan, terutama dalam hal penyediaan pangan dan energi. Sesuai kondisi kesuburan tanah, jenis lahan dan kesesuaian lahan serta sosial budaya, maka sebagian besar lahan non kawasan hutan khususnya lahan budidaya, umumnya diusahakan untuk budidaya tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura.

Sebagaimana arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Maka salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagai langkah antisipasi

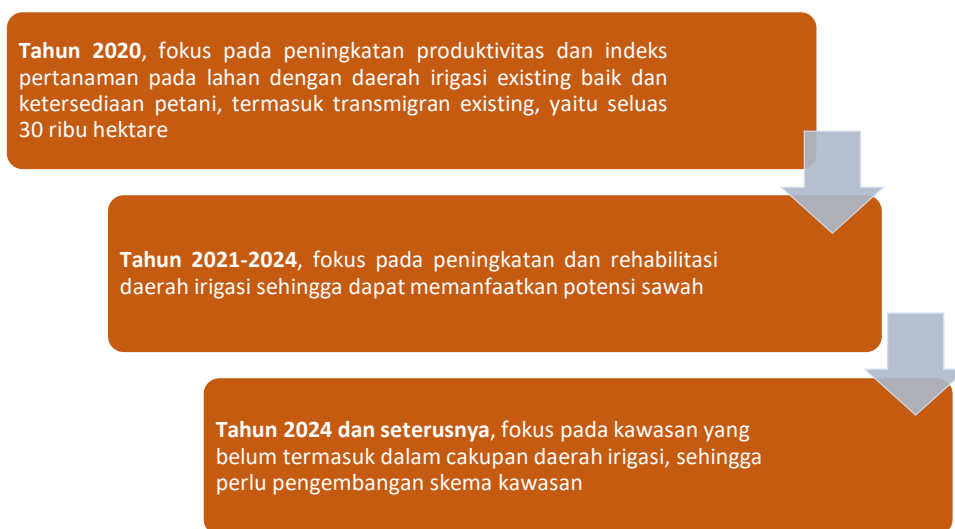
menghadapi adanya krisis pangan telah dilaksanakan Program Food Estate atau lumbung pangan baru. Food Estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan. Pengembangan kawasan tanaman pangan skala luas (food estate) di lahan rawa Kalimantan Tengah merupakan program terobosan peningkatan produksi pangan, mengingat meluasnya dampak COVID-19, bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan serta perubahan iklim. Pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah juga memiliki keunggulan komparatif, seperti potensi sumberdaya lahan yang sesuai cukup luas, sumberdaya air dan iklim yang sesuai, serta modal sosial budaya yang mendukung.

Visi pengembangan food estate di Kalimantan Tengah adalah “Terwujudnya kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah untuk penguatan cadangan pangan nasional dan mendukung pengembangan Ibu Kota Negara”. Tujuan yang akan dicapai melalui pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut: 1) Terlaksananya penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah untuk kawasan sentra produksi pangan yang berkelanjutan; 2) Meningkatnya produksi, indeks pertanaman dan produktivitas pangan melalui pertanian presisi; 3) Terbangunnya sistem logistik, pengolahan dan nilai tambah, distribusi dan pemasaran berbasis digital; 4) Terbangunnya korporasi petani yang mampu dan berdayaguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani; 5) Meningkatnya daya dukung ekosistem hutan dan gambut untuk mendukung keberlanjutan kawasan sentra produksi pangan.

Pemerintah telah menetapkan wilayah Kalimantan Tengah tepatnya Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dengan Area of Interests (AOI) seluas 165.319,12 hektare sebagai lokasi Program Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate). Ini merupakan langkah pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang. Program jangka panjang itu berupa langka penyediaan lahan baru, rehabilitas lahan yang ada dengan meningkatkansarana untuk mendukung produktivitas lahan, terutama

dari sisi pengairan dan drainase. Program ini merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan di suatu kawasan yang dikembangkan di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah.

Pengembangan lahan rawa sebagai lahan pangan masa kini dan masa depan melalui intensifikasi dinilai sangat strategis dan prospektif dalam menopang ketahanan pangan, apalagi saat ini kontribusi lahan rawa pada pangsa produksi pangan daerah masih rendah. Pengembangan kawasan tanaman pangan skala luas (*food estate*) di lahan rawa merupakan program terobosan peningkatan produksi pangan, mengingat bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan serta perubahan iklim. Pengembangan kawasan *food estate* berbasis korporasi petani di lahan rawa juga memiliki keunggulan komparatif, seperti potensi sumberdaya lahan yang sesuai cukup luas, sumberdaya air dan iklim yang sesuai, serta modal sosial budaya yang mendukung.

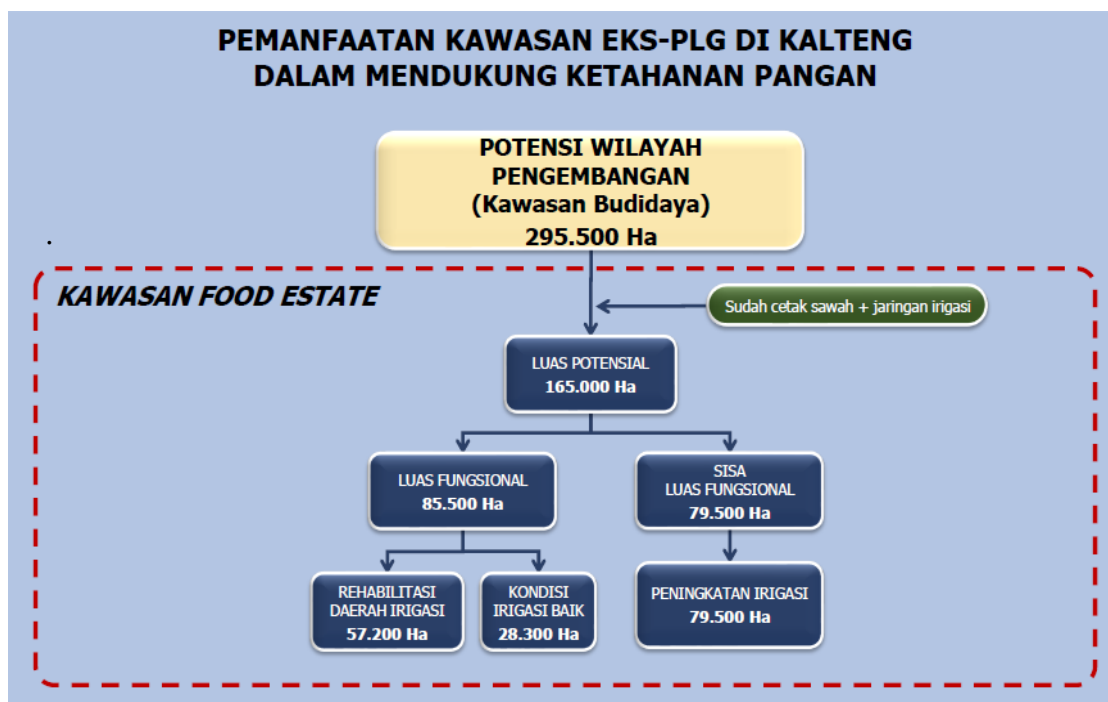


Gambar 6. 12 Tahapan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan di Kalimantan Tengah Tahun 2020-2026

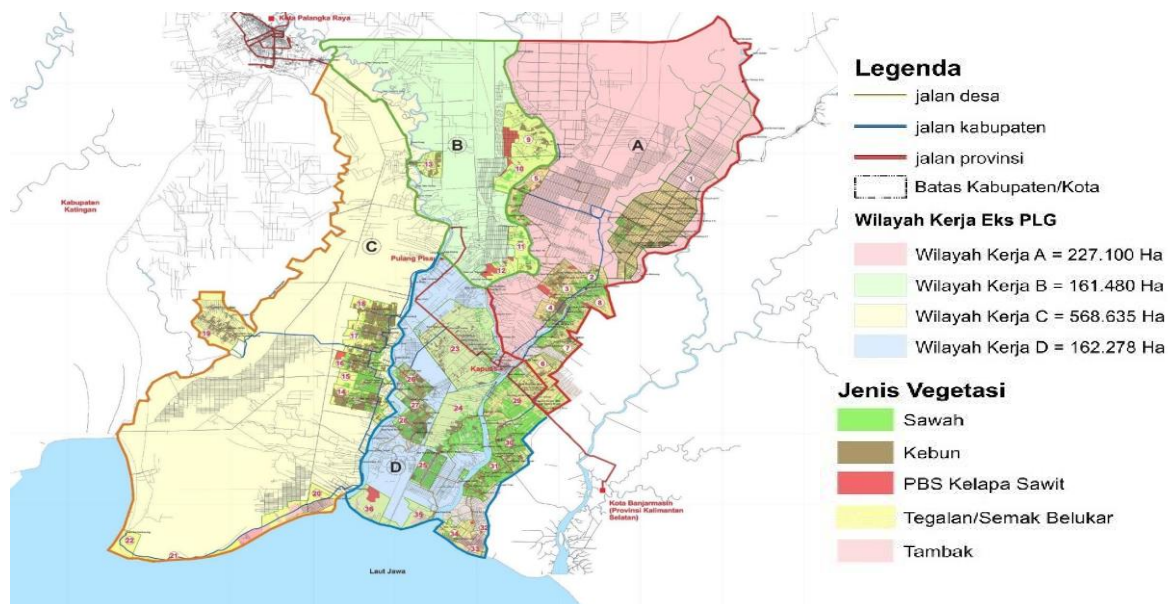
“Rencana Induk Pengembangan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 serta *Grand Design* Pengembangan Kawasan *Food Estate* Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa” yang telah disusun oleh Bappenas dan Kementerian Pertanian sebagai arahan dan acuan dalam membangun sinergi, koordinasi, dan saling melengkapi, yang sekaligus berperan dalam menentukan arah kebijakan, program, dan acuan teknis dalam mengembangkan kawasan *food estate*. Pengembangan *food estate* focus utamanya adalah memproduksi bahan pangan beras sebagai makanan pokok, kemudian diikuti dengan palawija dan sayuran, produk pangan

hewani baik ternak dan perikanan dan bahan pangan lainnya. Dengan demikian areal-areal sawah existing akan tetap diusahakan untuk pengembangan padi dan palawija/sayuran sepanjang memiliki tingkat kesesuaian, kecuali berada pada kawasan atau zona lindung dan diperkirakan adanya kendala lingkungan yang sulit diatasi.

Pengembangan kawasan *food estate* di lahan rawa akan dilaksanakan di lahan Eks PLG (Proyek Lahan Gambut) Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau seluas 770.600 ha yang dihasilkan dari penapisan berbagai kriteria dalam penyusunan peta AOI (*area of interest*), namun dalam perjalanannya lokasi tersebut akan dikembangkan juga di luar Eks PLG yang termasuk ke dalam Kabupaten Kapuas, yang memiliki irigasi baik. Secara bertahap pengembangan kawasan *food estate* pada tahun 2020 sudah dilakukan di lahan sawah existing seluas sekitar 30.000 ha, yaitu berada di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 ha, Kabupaten Kapuas 20.000 ha, baik yang berada di eks PLG maupun di luar PLG, demikian juga untuk pengembangan komoditas singkong yang ada di Kabupaten Gunung Mas.



Gambar 6. 13 Pemanfaatan Kawasan EKS-PLG di Kalimantan Tengah



Sumber data : Kementerian PUPR, 2020

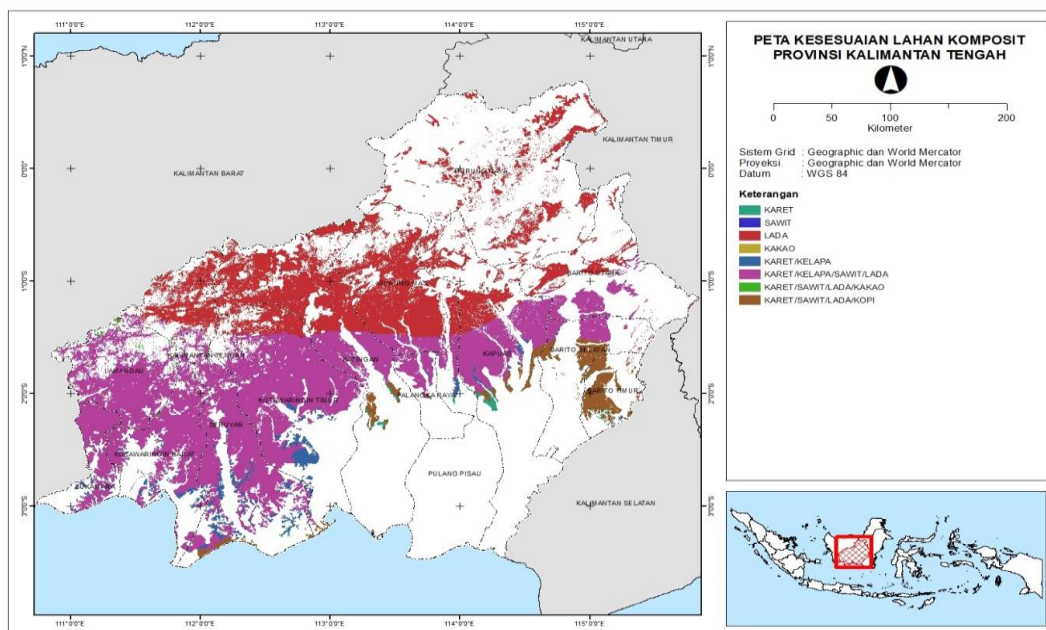
**Gambar 6.14 Peta Kawasan Food Estate Di Lahan Ex-PLG
Provinsi Kalimantan Tengah**

Pada sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah, komoditas unggulan yang potensial untuk dikembangkan adalah tanaman pangan dalam hal ini padi dan peternakan di samping juga komoditas pendukung lainnya yaitu komoditas hortikultura. Untuk tahun 2022 sampai 2026 selain di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau dan Gunung Mas, ke depan juga akan dilakukan pengembangan Kawasan Komoditas padi food estate di Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan pada lahan rawa pasang surut seluas 16.000 Ha. Selain itu pada wilayah timur (Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur dan Murung Raya) akan dilakukan pengembangan komoditas jagung serta kampung hortikultura mengingat wilayah timur ini potensial untuk pengembangan komoditas hortikultura. Untuk pengembangan kawasan food estate selain komoditas tanaman pangan dan hortikultura, juga direncanakan untuk peternakan sapi potong di Pantai Lunci Kabupaten Sukamara meliputi pembukaan/pengembangan kawasan peternakan sapi potong dengan model ranch mini yang terintegrasi dengan perkebunan sawit. Dengan pemanfaatan lahan seluas 50.000 Ha dan di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 900 Ha dengan dukungan perkebunan sawit di area sekitarnya, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan ternak sapi potong. Tahapan dan langkah strategis yang harus dilakukan untuk mendukung kegiatan ini, adalah :

- Pembukaan lahan dengan mekanisasi untuk pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT).

- Pembiakan dilakukan dengan system ranch mini dengan pemberian pakan kombinasi (pemanfaatan padang penggembalaan, pemberian hijauan pakan unggul dan pakan olahan limbah sawit).
- Pembangunan Pabrik Pakan Skala Kecil sampai menengah.
- Pembentukan kelompok-kelompok peternak yang melibatkan masyarakat lokal.
- Pengadaan bibit ternak sapi potong

Dukungan Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) dan Kandang Percontohan di Kawasan Food Estate Kalteng di Kabupaten Pulang Pisau bertujuan agar peternak yang telah mengembangkan usaha peternakan baik itik, sapi dan ternak lainnya di kawasan ini mendapatkan pelayanan kesehatan hewan yang memadai. Sementara kandang percontohan dapat dijadikan role mode kandang ternak yang baik sekaligus dijadikan tempat penampungan ternak yang didatangkan melalui Pelabuhan Bahaur Kabupaten Pulang Pisau. Untuk mendukung kegiatan ini, tahapan langkah strategis yang harus dilakukan adalah Pembangunan Puskesmas, Pembangunan kandang percontohan di areal Puskesmas dan Penyiapan tenaga teknis serta adminisitratif dengan melibatkan stakeholder lain seperti Balai Karantina.



Sumber : RIPBUN Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 6.15 Peta Komposit Kesesuaian Lahan Komoditas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk sektor perkebunan sebagaimana peta Komposit Kesesuaian Lahan Komoditas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, ada 5 (lima)

komoditas unggulan, dimana jika dilihat dari peta komposit kesesuaian lahan yang ada maka arah pengembangan 5 (lima) tahun ke depan untuk komoditas karet, kelapa, dan kelapa sawit ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau, Seruyan dan Katingan; komoditas Kopi dan Kakao akan dikembangkan di wilayah kabupaten Barito Timur, Barito Selatan dan Kota Palangka Raya sedangkan komoditas karet rencana pengembangan di wilayah Kapuas dan Kota Palangka Raya

Selain pengembangan sektor pertanian, untuk sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah juga potensial untuk dikembangkan. Provinsi Kalimantan Tengah dengan 7 kabupaten di pesisir memiliki panjang garis pantai 703,91 Km, di mana usaha tambak untuk budidaya air payau di Kalimantan Tengah secara eksisting seluas 8.314,94 ha, potensi tambak untuk budidaya air payau 54.149,65 ha dan rencana pengembangan tambak budidaya air payau seluas 45.834,71 ha.

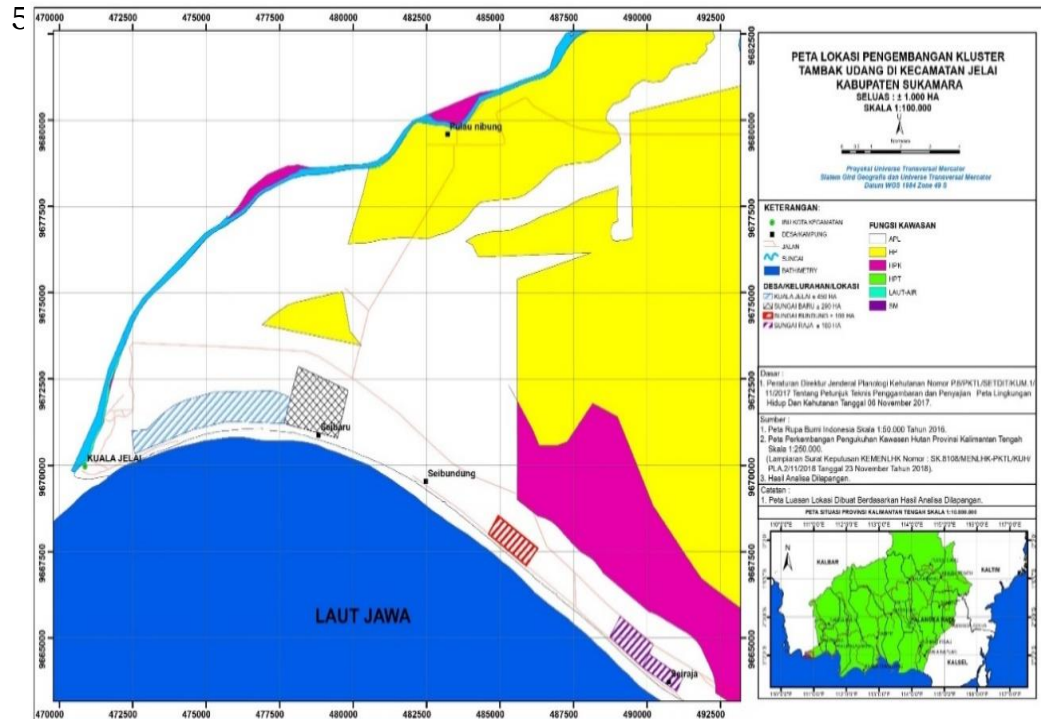
Dengan kondisi eksisting yang ada, maka rencana pembangunan untuk jangka menengah di sektor kelautan dan perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan mengembangkan kawasan Shrimp Estate di 6 (enam) kabupaten pesisir. Fokus utama pengembangan kawasan shrimp estate berada di Kabupaten Sukamara. Kabupaten Sukamara memiliki panjang garis pantai 77,48 km, eksisting usaha budidaya tambak seluas 832 ha, rencana pengembangan 2.000 ha dengan potensi lahan tambak seluas 2.832 ha. Potensi tambak di Kabupaten Sukamara berada di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai Lunci.

Kecamatan Jelai tambak eksisting seluas 227 ha dengan rencana pengembangan seluas 1.328 ha dan potensi lahan tambak seluas 1.555 ha sedangkan Kecamatan Pantai Lunci tambak eksisting seluas 605 ha dan potensi lahan tambak seluas 1.277 ha.

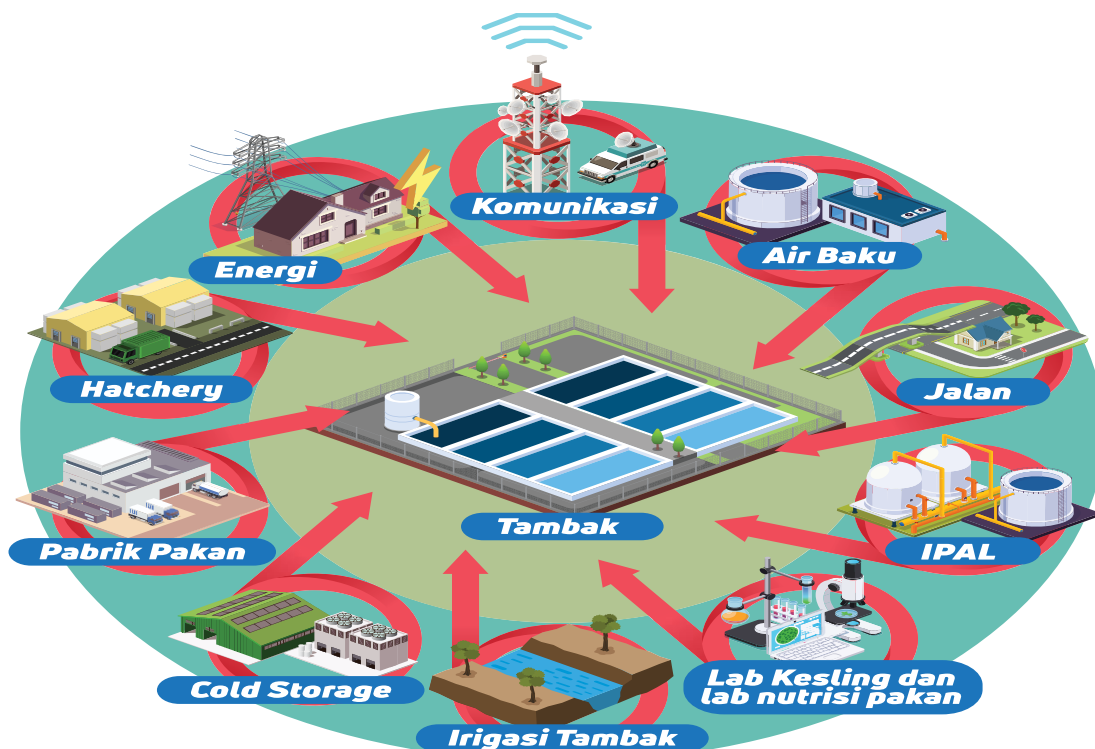
Sasaran Pengembangan Kawasan Tambak Udang Vaname di Kabupaten Sukamara:

1. Termanfaatnya lahan dengan terbangunnya Kawasan tambak udang vaname sebanyak 5 klaster dengan luas 26 ha
2. Terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dan ketersediaan listrik dan jaringan

3. Penyerapan tenaga kerja perikanan dengan berwirausaha tambak udang vaname dapat meningkatkan keterampilan dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
4. Memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan nasional, juga Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Tengah



Gambar 6.16 Pola Integrasi Pengembangan Kawasan terpadu Budidaya Tambak Udang Vaname Di Kabupaten Sukamara



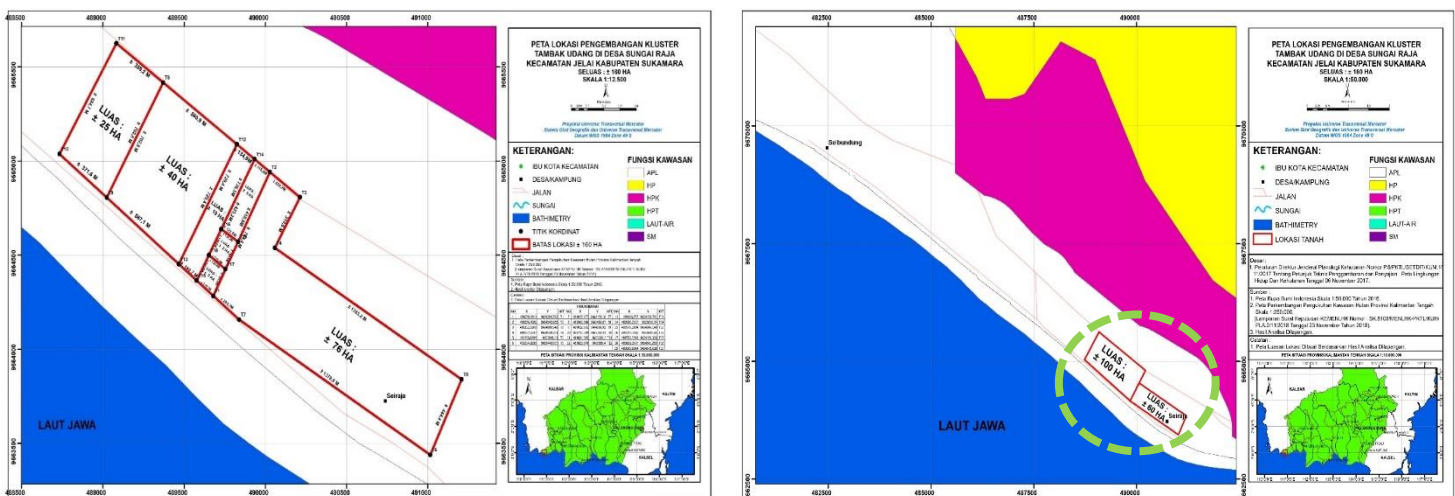
Gambar 6. 17 Pengembangan Kluster Tambak Udang di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara

KONDISI TEKNIS Mendukung PROGRAM SHRIMP ESTATE DI KABUPATEN SUKAMARA



NO.	INDIKATOR	BATAS TOLERANSI	SATUAN	EKSISTING SUKAMARA
1.	Salinitas	15 - 25	ppt	17 - 26 /MS
2.	pH	07-Aug		6 (Pengapuran)/MS
3.	Kandungan Oksigen (DO)	04-Jul	ppm	5 MS
4.	Suhu	26 - 32	°C	26-32 MS
5.	Kecerahan	30 - 50	cm	30-50 MS
6.	Ukuran Benur	PL : 8 - 10	hari	8 MS
7.	Tinggi Permukaan Air	80 - 120	cm	100 MS
8.	4 Kincir	1500 - 2500	M ²	4 MS
9.	Padat Tebar	70 - 100	M ²	100 MS
10.	Pemberi Pakan Otomatis (Auto Feeder)	1 / Kolam Produksi		Manual
11.	Vegetasi	Pepohonan Galam		
12.	Tekstur Tanah	Pasir dan Gambut		

Gambar 6. 18 Kondisi Teknis Mendukung Program Shrimp Estate Di Kabupaten Sukamara



Gambar 6.19 Rencana Pembangunan Tambak Udang Vaname Tahap I Lokasi Di Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara

B. Rencana Pembangunan Industri (RPIP) Provinsi Kalimantan Tengah

1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional

Visi pembangunan Industri Nasional adalah **“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”**, dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

- a. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;

- b. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
- c. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- d. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan, atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. meningkatkan persebaran pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

2. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan industri unggulan daerah dan kontribusinya dalam perekonomian daerah;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja daerah ke dalam sektor industri;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas produk melalui penguasaan teknologi dan inovasi;
- d. meningkatkan pemasaran dalam dan luar negeri;
- e. meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor industri;
- f. meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung industri maju; dan
- g. meningkatkan kemitraan antar pelaku industri, khususnya antara industri kecil, industri menengah dan industri besar serta meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan.

3. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Tengah

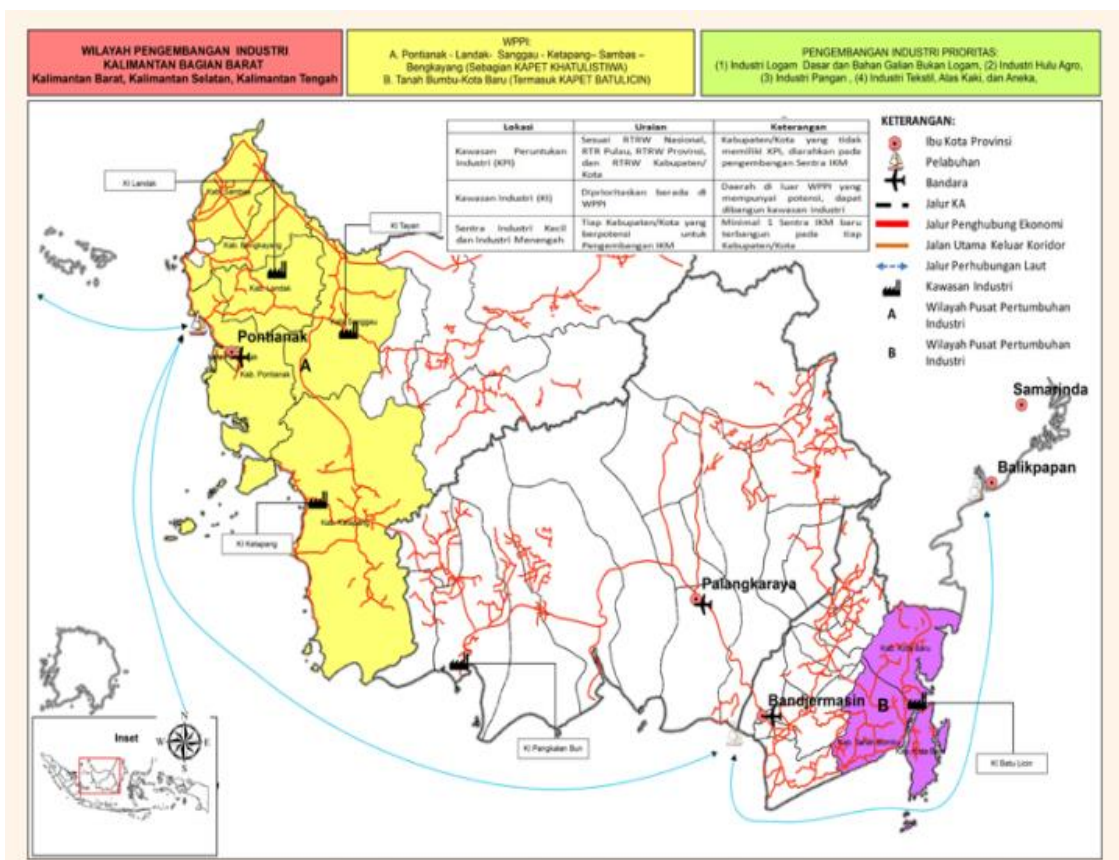
- a. meningkatnya pertumbuhan sektor industri sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga meningkat;

- b. meningkatnya pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor produk industri;
- c. meningkatnya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
- f. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
- g. meningkatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Tujuan pengembangan perwilayahan industri adalah percepatan penyebaran dan pemerataan industri di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan RIPIN, Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Kalimantan Bagian Barat yang terdiri dari Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan

Mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) Tahun 2015-2035, maka ditentukan 9 (sembilan) Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

- 1) Industri pengolahan ikan;
- 2) Industri pengolahan tanaman pangan;
- 3) Industri pengolahan buah-buahan;
- 4) Industri pengolahan kelapa sawit (Industri Oleofood dan Industri Oleokimia);
- 5) Industri pengolahan kayu;
- 6) Industri pengolahan rotan; dan
- 7) Industri pengolahan karet.
- 8) Industri pengolahan besi dan baja
- 9) Industri pengolahan logam bukan besi



Sumber: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035

Gambar 6. 20 Perwilayahan Industri Pada WPI Kalimantan Bagian Barat

Dalam RIPIN dijelaskan bahwa pembangunan Kawasan industri diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Terkait Provinsi Kalimantan Tengah belum masuk dalam WPPI dan prioritas pembangunan industri, hal ini tidak menghalangi dalam perencanaan, pembangunan dan pengembangan Kawasan industri di Kalimantan Tengah yang menjadi pendukung WPPI Kalimantan bagian barat serta menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Pengembangan Kawasan industri di Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Kawasan Industri (KI) Tanjung Kalap di Kabupaten Kotawaringin Barat,
2. Kawasan Industri (KI) Surya Borneo di Kabupaten Kotawaringin Barat,
3. Kawasan Industri (KI) Sebuai di Kotawaringin Barat
4. Kawasan Industri (KI) Segintung di Kabupaten Seruyan,
5. Kawasan Industri (KI) Batanjung di Kabupaten Kapuas,
6. Kawasan Industri (KI) Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau,
7. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 diketahui industri Prioritas Nasional sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 6. 3 Daftar Prioritas Berdasarkan RIPIN 2015-2035

No	Industri Prioritas	Jenis Industri
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan
		Industri Pengolahan Susu
		Industri Bahan Penyegar
		Industri Pengolahan Minyak Nabati
		Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran
		Industri Tepung
		Industri Gula Berbasis Tebu
2	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Farmasi dan Kosmetik
		Industri Alat Kesehatan
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Tekstil
		Industri Kulit dan Alas Kaki
		Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu
		Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan Barang dari Karet
4	Industri Alat Transportasi	Industri Kendaraan Bermotor
		Industri Kereta Api
		Industri Perkapalan
		Industri Kedirgantaraan
5	Industri Elektronika dan Telematika/ ICT	Industri Elektronika
		Industri Komputer
		Industri Peralatan Komunikasi
6	Industri Pembangkit Energi	Industri Alat Kelistrikan
7	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Industri Mesin dan Perlengkapan
		Industri Komponen
		Industri Bahan Penolong
		Jasa Industri
8	Industri Hulu Agro	Industri Oleofood
		Industri Oleokimia
		Industri Kemurgi
		Industri Pakan
		Industri Barang dari Kayu
9	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar
		Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar Bukan Besi
		Industri Logam Mulia, Tanah Jarang (Rare Earth), dan Bahan Bakar Nuklir
		Industri Bahan Galian Non Logam
		Industri Petrokimia Hulu
10	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	Industri Kimia Organik
		Industri Pupuk
		Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik
		Industri Karet Alam dan Sintetik
		Industri Barang Kimia Lainnya

Sumber: Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2040

Produk potensial sektor industri Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kajian potensi daerah, masukan dari Pemerintah Kabupaten Kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada Industri Prioritas Nasional dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.4 Jenis Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Industri Prioritas RIPIN	Industri Unggulan Provinsi	Rencana Lokasi (Kabupaten/Kota)
1	Industri Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan Ikan 2. Industri Pengolahan Tanaman Pangan 3. Industri Pengolahan Buah-Buahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotawaringin Barat 2. Kotawaringin Timur 3. Seruyan 4. Lamandau 5. Sukamara 6. Barito Selatan 7. Kapuas 8. Pulang Pisau 9. Palangka Raya
2	Industri Hulu Agro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan Kelapa Sawit (Industri Oleofood dan Industri Oleokimia) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotawaringin Barat 2. Kotawaringin Timur 3. Barito Selatan 4. Barito Utara 5. Barito Timur 6. Pulang Pisau 7. Kapuas 8. Katingan 9. Seruyan 10. Lamandau 11. Sukamara 12. Gunung Mas
3	Industri Aneka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan Kayu 2. Industri Pengolahan Karet 3. Industri Pengolahan Rotan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barito Selatan 2. Barito Utara 3. Barito Timur 4. Murung Raya 5. Pulang Pisau 6. Palangka Raya 7. Katingan 8. Kapuas
4	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan Logam 2. Industri Pengolahan Bukan Logam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotawaringin Timur 2. Lamandau 3. Seruyan 1. Katingan 2. Kapuas 3. Kotawaringin Barat

Sumber: Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2040

Tabel 6.5 Rencana Pembangunan Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2040

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan		
		1. Ikan Awet (beku, kering, dan asap) dan Fillet	1. Ikan Awet (beku, kering, dan asap) dan Fillet	1. Ikan Awet (beku, kering, dan asap) dan Fillet
		2. Aneka Olahan Ikan dan hasil laut (olahan ikan gabus, olahan udang, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya)	2. Aneka Olahan Ikan dan hasil laut (olahan ikan gabus, olahan udang, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya)	2. Aneka Olahan Ikan dan hasil laut (olahan ikan gabus, olahan udang, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya)
		3. Pengolahan pakan ternak	3. Pengolahan pakan ternak	3. Pengolahan pakan ternak
		Industri Pengolahan Tanaman Pangan		
		1. Industri tepung dari umbi-umbian sebagai substitusi untuk mengurangi ketergantungan pada terigu/gandum	1. Industri tepung dari umbi-umbian sebagai substitusi untuk mengurangi ketergantungan pada terigu/gandum	1. Industri tepung dari umbi-umbian sebagai substitusi untuk mengurangi ketergantungan pada terigu/gandum
		2. Industri pangan darurat	2. Industri pangan darurat	2. Industri pangan darurat
		3. Industri granulated composit flour	3. Industri granulated composit flour	3. Industri granulated composit flour
		Industri Pengolahan Buah-Buahan		
		1. Buah dalam kaleng	1. Buah dalam kaleng	1. Buah dalam kaleng
		4. Aneka olahan buah-buahan (sari buah, sirup buah, keripik, manisan buah dan selai)	1. Aneka olahan buah-buahan (sari buah, sirup buah, keripik, manisan buah dan selai)	1. Aneka olahan buah-buahan (sari buah, sirup buah, keripik, manisan buah dan selai)
2	Industri Hulu Agro	Industri Oleofood Berbasis Kelapa Sawit		
		1. Palm Fatty Acid Disstilate (PFAD)	1. Olein	Specialty fats bahan tambahan pangan
		2. Coco butter substitute	2. Stearin	
3. Margarin	3. Gliserol			
4. Shortening	4. Specialty fats (coco butter substitute)			
5. Other specialty fats	5. Tocopherol			
	6. Betacaroten			
	7. Asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit			
	Industri Oleokimia Berbasis Kelapa Sawit			
	1. Asam lemak nabati	1. Asam lemak nabati	1. Asam lemak nabati	
	2. Fatty alcohols	2. Fatty alcohols	2. Fatty alcohols	
	3. Fatty anime	3. Fatty anime	3. Fatty anime	

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
		4. Methyl ester sulfonat (biosurfactant) 5. Biolubricant (rolling oils) 6. Gliserin yang berbasis kimia 7. Minyak atsiri 8. Isopropil palmitat 9. Asam stearat (stearic acid)	4. Methyl esters 5. Biolubricant (rolling oils) 6. Gliserin yang berbasis kimia 7. Minyak atsiri 8. Isopropil palmitat 9. Asam stearat (stearic acid) 10. Plastik bio berbasis limbah industri sawit	4. Methyl esters 5. Biolubricant (rolling oils) 6. Gliserin yang berbasis kimia 7. Minyak atsiri 8. Isopropil palmitat 9. Asam stearat (stearic acid) 10. Plastik bio berbasis limbah industri sawit 11. Polimer untuk turunan minyak sawit
3	Industri Aneka	Industri Pengolahan Kayu		
		1. Industri komponen berbasis kayu (wood working, laminate dan dfinger joint) 2. Kerajinan ukir-ukiran dari kayu 3. Moulding kayu 4. Industri Furniture 5. Aneka produk berbasis limbah kayu 1. Industry wood chip	2. Industri komponen berbasis kayu (wood working, laminate dan dfinger joint) 3. Kerajinan ukir-ukiran dari kayu 4. Moulding kayu 5. Industri Furniture 6. Aneka produk berbasis limbah kayu 1. Industry wood chip	2. Industri komponen berbasis kayu (wood working, laminate dan dfinger joint) 3. Kerajinan ukir-ukiran dari kayu 4. Moulding kayu 5. Industri Furniture 6. Aneka produk berbasis limbah kayu Industry woodchip
		Industri Pengolahan Karet		
		1. Crumb rubber 2. Karet untuk keperluan umum	1. Diversifikasi crumb rubber 2. Diversifikasi produk karet untuk keperluan umum 3. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik)	1. Diversifikasi crumb rubber 2. Diversifikasi produk karet untuk keperluan umum 3. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik)
Industri Pengolahan Rotan				
		1. Kerajinan anyaman dari rotan 2. Furniture kombinasi rotan dan kayu 3. Miniatur/hiasan dari rotan	1. High tech furniture rotan bersertifikat industri hijau 2. High tech furniture kombinasi rotan dan kayu bersertifikat industri hijau 3. Diversifikasi kerajinan rotan	1. High tech furniture rotan bersertifikat industri hijau 2. High tech furniture kombinasi rotan dan kayu bersertifikat industri hijau 3. Diversifikasi kerajinan rotan

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
4	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri pengolahan besi dan baja		
		1. Iron Ore Pellet; 2. Sponge iron; 3. Pig Iron dan Besi Cor; 4. Industri pengolahan biji besi berupa smelter 5. Kebutuhan baja untuk alat dan mesin pertanian	1. Iron Ore Pellet; 2. Sponge iron; 3. Pig Iron dan Besi Cor; 4. Industri pengolahan biji besi berupa smelter 5. Kebutuhan baja untuk alat dan mesin pertanian	1. Iron Ore Pellet; 2. Sponge iron; 3. Pig Iron dan Besi Cor; 4. Industri pengolahan biji besi berupa smelter 5. Kebutuhan baja untuk alat dan mesin pertanian
		Industri Pengolahan Logam Bukan Besi		
		1. Alumina SGA (smelter grade alumina) 2. Industri pemurnian timbal-seng (smelter timbal-seng) 3. Industri pemurnian/smelter logam bukan besi	1. Alumina SGA (smelter grade alumina) 2. Industri pemurnian timbal-seng (smelter timbal-seng) 3. Industri pemurnian/smelter logam bukan besi Aluminium, aluminium alloy, billet dan slab	1. Alumina SGA (smelter grade alumina) 2. Industri pemurnian timbal-seng (smelter timbal-seng) 3. Industri pemurnian/smelter logam bukan besi Aluminium, aluminium alloy, billet dan slab

Sumber: Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2040



Sumber: Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2040

Gambar 6. 21 Zonasi Pengembangan Potensi Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah

C. Strategi Pengembangan BUMD di Provinsi Kalimantan Tengah

1) Permasalahan BUMD di Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggaraan pemerintahan yang saat ini sudah mulai berubah dengan diimplementasikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berimplikasi di dalam penyelenggaraan penerbitan perijinan dan batas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Manajemen perusahaan dalam menghadapi situasi pada masa sekarang ini, dituntut untuk menjalankan manajemen strategik dengan tepat guna. Salahsatu alasan perlunya manajemen strategik disebabkan oleh orientasi bisnis yang berubah-ubah dengan cepat sehingga perlu diantisipasi oleh manajemen perusahaan. Dengan demikian memerlukan sasaran dan arah yang jelas bagi para anggotanya, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Sementara itu ketangguhan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarnya, ditentukan oleh dinamika perusahaan yang bersangkutan dan interaksi yang terjadi baik antara perusahaan dengan lingkungannya maupun antara satuan-satuan kerja di dalam perusahaan. Perusahaan akan mampu mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan apabila kekuatan perusahaan melebihi kelemahan yang dimiliki. Dalam konteks bisnis perusahaan harus mampu mengeksplorasi peluang bisnis dan mengatasi ancaman bisnis yang mengitarinya. Sementara itu BUMD sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan masyarakat dan sumber pendapatan daerah, tentunya menempatkan manajemen strategi tepat guna yang handal guna menunjang strategi usaha dan pengembangan perusahaan daerah yang baik, agar pelayanan masyarakat dan optimalisasi potensi ekonomi daerah dapat selalu terjaga guna meningkatkan produktivitas perusahaan.

Pendekatan strategik manajemen dapat memberikan kekuatan kepada perusahaan dengan suatu aksi yang konsisten. Suatu proses manajemen strategik yang sehat akan membantu menjamin pengambilan keputusan dalam pembentukan perusahaan atau pengembangan semua bagian-bagian dari perusahaan bekerja sesuai dengan tujuan dan maksud yang sama. Tanpa dipedomani oleh manajemen strategik pembentukan perusahaan daerah dan pengembangan unit-unit usaha perusahaan seringkali cenderung menuju arah

yang berbeda. Melalui pendekatan manajemen strategik dapat pula mendorong pengambil kebijakan perusahaan untuk lebih aktif dan menyadari potensi sumberdaya ekonomi pada lingkungan mereka, guna meningkatkan produktivitas perusahaan.

Untuk itu diperlukan suatu model pendekatan manajemen strategik, dalam pengambilan keputusan pembentukan badan usaha dan pengembangan strategi usaha yang handal, guna meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan hal ini merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan karenanya diperlukan suatu kajian yang khusus guna mengungkapkan permasalahan ini, agar tujuan perusahaan dapat dicapai.

2) Strategi dan Rencana Pengembangan BUMD Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah

a) Strategi Umum

Berdasarkan pembahasan diatas, masalah strategi usaha dan manajemen strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan merupakan permasalahan yang serius yang harus dihadapi oleh sebuah perusahaan.

Beberapa permasalahan yang dapat dihadapi sebuah perusahaan Daerah sehubungan dengan masalah strategi usaha dan manajemen strategik, diantaranya :

1. Potensi sumberdaya ekonomi apa yang dapat dikembangkan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan dan pengembangan badan usaha milik daerah.
2. Model strategi pengembangan usaha yang bagaimanana untuk meningkatkan potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan menjadi BUMD di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Model arah kebijakan dan strategi pengembangan BUMD yang bagaimana, agar dapat mengembangkan potensi ekonomi daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

4. Terbentuknya suatu model pengembangan BUMD Provinsi Kalimantan Tengah yang efektif dan efisien.

Dari informasi di atas, diharapkan diperoleh tujuan sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui potensi sumberdaya ekonomi apa yang dapat dikembangkan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan dan pengembangan badan usaha milik daerah.
2. Ingin mengetahui model strategi pengembangan usaha yang bagaimanana untuk meningkatkan potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan menjadi BUMD di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Ingin mengetahui model arah kebijakan dan strategi pengembangan BUMD yang bagaimana, agar dapat mengembangkan potensi ekonomi daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.
4. Ingin mengetahui terbentuknya suatu model pengembangan BUMD Provinsi Kalimantan Tengah yang efektif dan efisien.
5. Kegunaan yang diharapkan dari hal-hal tersebut di atas adalah :
6. Sebagai bahan masukan dalam membuat perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mengembangkan model BUMD yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Sebagai bahan analisis dan masukan kritis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyempurnakan kebijakan model strategik pengembangan BUMD Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Dapat memberikan bahan masukan bagi manajemen perusahaan daerah dalam menyusun, menerapkan dan mengembangkan model manajemen strategik tepat guna di BUMD Provinsi Kalimantan Tengah.

b) Rencana Pengembangan BUMD

Pengembangan model strategi pengembangan Perusahaan Daerah, akan mendukung proses penyusunan model strategi pengembangan BUMD Kalimantan Tengah yang dapat ditempuh melalui :

1. Pemilihan Bidang Usaha Unggulan untuk Perusahaan Daerah. Saat ini terdapat 3 (tiga) BUMD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

yakni Bank Kalteng, PT. Jamkrida dan PD. Banama Tingang Makmur. Bank Kalteng memiliki core bisnis jasa keuangan perbankan yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demikian pula PT. Jamrida khusus jasa layanan keuangan (penjaminan kredit UMKM) non perbankan dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terdapat satu perusahaan daerah pemerintah Kalimantan Tengah yang hingga kini masih belum terlihat hasil signifikan dalam dukungan pendapatan daerah yakni PD. Banama Tingang Makmur. Saat ini usaha yang sedang berjalan adalah jasa perhotelan (Hotel Dandang Tingang). Usaha-usaha lain masih akan diupayakan agar dapat mendukung peningkatan pendapatan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah

2. Penyusunan model strategi Pengembangan perusahaan Daerah. Pemilihan model strategik pengembangan BUMD merupakan salah satu proses pemilihan bidang-bidang apa saja yang layak untuk menjadi perusahaan daerah yang potensial untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BUMD Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kekuatan untuk mengembangkan usaha dan membentuk BUMD baru dengan diversifikasi usaha baru, memungkinkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih tinggi, dan juga memungkinkan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Jika pengembangan BUMD Provinsi Kalimantan Tengah tersebut memilih strategi konsentrasi, perusahaan BUMD dapat tumbuh melalui integrasi (integration) horizontal maupun vertikal, baik secara internal melalui sumber-dayanya sendiri atau secara eksternal dengan menggunakan sumberdaya dari luar. Pertumbuhan melalui konsentrasasi dapat dicapai melalui integrasi vertikal dengan cara backward integration (mengambil alih fungsi supplier) atau dengan cara forward integration (mengambil alih fungsi distributor). Hal ini merupakan strategi utama untuk pengembangan BUMD yang memiliki posisi kompetitif pasar yang kuat (high market share) dalam perusahaan yang berdaya tarik tinggi.

Agar dapat meningkatkan kekuatan bisnisnya atau posisi kompetitifnya, BUMD harus melaksanakan upaya meminimalkan biaya dan operasi yang tidak efisien untuk mengontrol kualitas serta distribusi produk. Intergrasi vertikal dapat dicapai melalui sumberdaya internal maupun eksternal yang dimiliki BUMD. Jika pengembangan BUMD Provinsi Kalimantan Tengah tersebut memilih strategi diversifikasi, perusahaan dapat tumbuh melalui konsentrasi atau diversifikasi konglomerasi baik secara internal melalui pengembangan perusahaan-perusahaan baru, maupun melalui akuisisi dari BUMD yang sudah ada digabung agar secara ekonomis menguntungkan dan dapat tumbuh secara sehat.

Strategi pengembangan BUMD melalui diversifikasi umumnya dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki kondisi competitive position sangat kuat tetapi nilai daya tarik industrinya sangat rendah. BUMD tersebut berusaha memanfaatkan kekuatannya untuk membuat produk baru secara efisien karena perusahaan ini sudah memiliki kemampuan manufaktur dan pemasaran yang baik. Prinsipnya adalah untuk menciptakan sinergi dengan harapan bahwa BUMD dua perusahaan secara bersama-sama dapat menciptakan lebih banyak keuntungan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Strategi pertumbuhan BUMD Provinsi Kalimantan Tengah melalui integrasi horizontal adalah suatu kegiatan untuk memperluas perusahaan BUMD dengan cara membangun di lokasi lain, dan meningkatkan jenis produk serta jasa. Jika BUMD Provinsi Kalimantan Tengah yang ada pada saat ini merupakan perusahaan yang sangat atraktif artinya maka dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas dan dapat meningkatkan PAD bagi PEMDA, dengan cara memanfaatkan keuntungan economic of scale baik produksi maupun pemasaran. Sementara jika BUMD Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini berada dalam moderate attractive industry strategi yang diterapkan dalam pengembangannya adalah mempertahankan keadaan yang ada pada saat ini.

BUMD Kalimantan Tengah dapat memperluas pasar, pengembangan fasilitas produksi, dan pengembangan teknologi melalui pengembangan

internal maupun eksternal melalui akuisisi dan joint venture dengan perusahaan lain yang sejenis dalam lingkungan BUMD sehingga perusahaan BUMD akan semakin kokoh dan kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan eksternal.

6.4 Program Pembangunan Daerah

6.4.1 Program prioritas I: Belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan Dasar

Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan seperti:

- a) Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c) Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- d) Pemenuhan kewajiban belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- e) Pemenuhan Belanja Pegawai atas Belanja Gaji dan Tunjangan dan rencana pemberian Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

6.4.2. Program Prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari “Makin BERKAH” yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Janji Politik pada saat kampanye: Makin BERKAH. Makin BERKAH merupakan 6 (enam) cita-cita pasangan **Gubernur H. Sugianto Sabran** dan **Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, S.sos., MM.** Kalimantan Tengah Periode 2021-2026. Enam cita-cita

tersebut akan diwujudkan melalui pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. Makin BERKAH merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 yaitu: **Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis**. Keenam cita-cita tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjelasan lebih detail mengenai sembilan bhakti tersebut sebagaimana berikut:

Berkah #1

Kalteng Bermartabat

Kalteng Unggul, Berdaya Saing, Dan Cemerlang

Kalimantan Tengah Bermartabat, memfokuskan padapencapaian meningkatnya daya saing daerah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi dan kearifan budaya lokal dalam rangka meneguhkan Kalteng yang *Belom Bahadat* (hidup beradat).

Belom Bahadat” adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila telah mampu melaksanakan perilaku hidup “*Belom Bahadat*”, maka akan teraktualisasi akan wujud “*Belom Penyang Hinje Simpei*” yaitu hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama”.

Hadat sebenarnya tidak lain dari salah satu wujud produk kebudayaan suatu masyarakat untuk membuat masyarakatnya beradab, bahadat atau manusiawi. Selain sebagai wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas perilaku dari manusia dalam masyarakat, *hadat* juga adalah salah satu wujud

kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya.

Idea atau gagasan sentral *hadat* jadinya terletak pada upaya memanusiawikan diri sendiri sebagai manusia, kehidupan dan masyarakat. Bagaimana memperadabkan tutur kata, perilaku warga masyarakat, guna menciptakan masyarakat yang beradab sehingga kalau dilihat dari tujuan ini hadat, pertama-tama adalah gagasan, ide, prinsip dasar, yang dijemakan dalam ketentuan-ketentuan yang diterima sebagai suatu konsensus sosial dengan mana kemudian antara hidup masyarakat diatur, termasuk bagaimana berperilaku di hadapan sesama, lingkungan, alam semesta dan Sang Pencipta, agar menjadi masyarakat yang **bermartabat**.

Dalam upaya mewujudkan Kalteng Bermartabat, maka diperlukan program prioritas sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menebus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir.
- ✓ Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit *Belom Bahadat* (hidup beradat) dalam berkompetisi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing tinggi dan berreputasi cemerlang.

Berkah #2

Kalteng Elok

Kalteng Indah, Hijau, dan Ramah

Kalimantan Tengah Elok, merupakan manifestasi dari konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang melakukan upaya dan perencanaan dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan serta keindahan lingkungan.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada semua sektor, melalui mengembangkan strategi dan kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan berkelanjutan tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan pertumbuhan hijau, yakni meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, juga secara signifikan mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan dampak ekologis, agar bermanfaat bagi generasi masa depan.

Pendekatan Kalimantan Tengah Hijau ini muncul dari pemahaman nilai ekonomi dan sosial yang tinggi dari aset alam, yang harus dilindungi untuk menjamin kelangsungan hidup semua makhluk yang bergantung padanya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan melalui kebijakan cerdas yang mendorong investasi hijau, teknologi efisien yang inovatif dan praktik yang berkelanjutan. Pertumbuhan hijau juga mendukung masyarakat Kalimantan Tengah dalam mempertimbangkan secara hati-hati berbagai tujuan dan target fisik, sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah.

Selain fokus pada keelokan fisik atau wilayah, Kalimantan Tengah juga memfokuskan pada aspek keelokan masyarakatnya yang terlihat dari keramahannya. Sifat ramah dan terbuka masyarakat Kalimantan Tengah kepada orang lain secara tidak langsung juga menjadi daya tarik tersendiri bagi orang lain untuk berkunjung. Keramahan dan keterbukaan masyarakat berdampak besar pada sektor ekonomi khususnya investasi dan pariwisata. Dengan begitu, sudah sepatutnya menjaga sikap ramah masyarakat kepada orang lain dan meningkatkannya secara terus menerus, karena sifat ramah inilah dapat berdampak secara universal bagi daerah Kalimantan Tengah.

Dalam upaya mewujudkan Kalteng Elok baik secara wilayah maupun masyarakatnya, maka diperlukan program prioritas sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan sertifikasi lahan masyarakat adat dan pengembangan ekonomi hijau;

- ✓ Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata lintas kabupaten atau kota, termasuk menjadikan lahan gambut dan hutan rawa terbesar di Indonesia sebagai ecotourism berkelas dunia.

Berkah #3

Kalteng Relegius

Kalteng Berkarakter Religius

Kalimantan Tengah berkarakter relegius, merupakan merupakan karakter masyarakat yang taat kepada ajaran agama dan keyakinannya. Sebuah bentuk pengabdian atau kepasrahan manusia sebagai makhluk kepada Sang Pencipta atau Pencipta makhluk. Di Indonesia walaupun negara kita tidak menganut paham teokrasi atau negara berdasarkan agama, nilai karakter ini sangat penting bahkan yang pertama harus ditanamkan, sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Hal ini sejalan dengan dasar falsafah negara kita, yakni Pancasila. Dalam Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi nilai karakter utama yang posisinya berada di tengah-tengah sila lainnya. Artinya penerapan semua nilai karakter yang terdapat pada keempat sila tersebut harus berlandaskan pada nilai karakter sila pertama ini.

Karakter pembangunan daerah Kalimantan Tengah ini yang membedakannya dengan sistem pembangunan ekonomi modern sekuler, yang memisahkan nilai agama dalam sistem pembangunannya. Karena dalam sistem pembangunan sekuler agama dianggap tidak rasional dan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Kondisi ini yang menyebabkan hubungan antara agama dengan pembangunan selalu berkonflik karena tolak ukur standar kebenarannya memang berbeda.

Nilai karakter religius memiliki beberapa nilai yang mencerminkan dimensi hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Nilai-nilai tersebut terdiri dari cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan

kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. Nilai karakter religius dalam penerapannya harus mendorong masyarakat agar dapat terus meningkatkan hubungan yang harmonis kepada Tuhannya, manusia, serta alam semesta.

Dalam upaya mewujudkan Masyarakat Kalteng Berkarakter Relegius, maka diperlukan program prioritas sebagai berikut:

- ✓ Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat sebagai pilar pembentukan karakter masyarakat Kalteng melalui program:
- ✓ memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dalam rangka perjalanan wisata religi misalnya para kyai dan ustadz naik haji dan umroh ke Mekkah, pendeta ziarah rohani ke Yerusalem, Hindu Kaharingan ke India;
- ✓ meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru ngaji, sekolah minggu dan guru spiritual di berbagai agama dan keyakinan masing-masing.

Berkah #4

Kalteng Kuat

Kalteng Produktif, Sehat, dan Pintar

Kalimantan Tengah Kuat, merupakan suatu kondisi masyarakat yang kuat secara ekonomi, kuat secara fisik, dan kuat secara intelektual. Kuat secara ekonomi, merupakan masyarakat yang mampu atau berdaya dari sisi produsen atau mampu melakukan atau terlibat proses produksi khususnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya lokal, sehingga mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan. Produktifitas itulah yang berimplikasi pada tingkat pendapatan masyarakat. Dari pendapatan itulah akan tercipta kekuatan dari sisi konsumsi, artinya masyarakat mempunyai daya beli untuk menggerakkan perekonomian di Kalimantan Tengah, .

Sedangkan kuat secara fisik, tercermin dari tingkat kesehatan masyarakat, termasuk juga ketahanan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi

seperti Covid 19. Pemerintah Kalimantan Tengah berkomitmen untuk menyediakan fasilitas kesehatan berkualitas untuk semua dan memperkuat layanan kesehatan perdesaan. Peningkatan gerakan bersama; program perbaikan status gizi mikro pada ibu hamil, program layanan pra-nikah terpadu, program perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih. Sedangkan untuk peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, dapat ditempuh beberapa langkah antara lain; peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, KB, dan kehamilan; pengembangan lingkungan rumah sehat dan bersih.

Sementara kuat secara intelektual, tercermin dari tingkat kecerdasan intelektual atau yang sering juga disebut sebagai IQ (*intelligence quotient*) adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan manusia. Tingkat pendidikan, kemampuan teknis, pengalaman kerja, dan *soft skill* menjadi faktor penentu untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kalimantan Tengah.

Pendidikan merupakan salah satu jalan keluar dari jebakan kemiskinan. Keyakinan ini bukan tanpa alasan karena pendidikan bisa menjadi pintu awal bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan lebih baik dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin masih kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas.

Dalam upaya mewujudkan Masyarakat Kalteng Kuat, maka diperlukan program prioritas sebagai berikut:

- ✓ Mempercepat pengembangan kawasan food estate sebagai penunjang cadangan logistic strategis untuk pertahanan negara, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan local;
- ✓ Mempercepat program afirmatif dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana;
- ✓ Memperluas kuantitas dan kualitas penerima beasiswa Kalteng Berkah yang selama ini telah berjalan;

- ✓ Memastikan fasilitas dan layanan akses kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat melalui perawatan khusus secara gratis bagi pasien kurang mampu.
- ✓ Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*) dalam rangka Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan dan Memperkuat Ekonomi Daerah melalui pengembangan Koperasi dan UMKM

Berkah #5

Kalteng Amanah

Kalteng Jujur, Profesional, Kreatif dan Inovatif,

Kalimantan Tengah Amanah merupakan elemen kunci dan mendasar dalam Kalteng Makin Berkah, dimana pemerintahan yang bersih dan anti korupsi menjadi sebuah komitmen mendasar. Secara umum, potensi anti korupsi ditemukan dalam dua kelompok besar, yaitu dalam penggunaan uang negara baik dari segi pendapatan maupun pembelanjaan, serta dalam penentuan kebijakan termasuk perizinan, dan juga penempatan jabatan. Kalimantan Tengah Amanah, merupakan cerminan aparatur birokrasi yang bersikap maupun bertindak secara jujur, profesional, kreatif dan inovatif yang dilandasi dengan nilai-nilai akhlak yang baik (*ahlakulkarimah*).

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa mengimbangi tuntutan global yang penuh persaingan, oleh karena itu, dalam mengemban tugas ada tuntutan yang tak bisa dihindari di antaranya, seorang ASN harus menguasai bidang tugas masing-masing agar dapat bekerja secara profesional. Yakni mengutamakan sikap perilaku dalam bekerja, sikap perilaku merupakan kunci sukses dalam berorganisasi, melalui sikap perilaku yang positif dapat menumbuhkan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman, sehingga kerjasama dapat terjalin dengan baik. Terkait dengan peningkatan pelayanan masyarakat, bagi yang bertugas di bidang pelayan umum dan berhadapan langsung dengan masyarakat, harus menunjukkan sikap perilaku yang terbuka, jujur, ramah dan simpatik. Ini merupakan modal bekerja yang profesional.

Dalam upaya mewujudkan Birokrasi Kalteng Amanah, maka diperlukan program prioritas sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan SDM aparatur birokrasi yang inovatif demi pelayanan public yang cepat dan tepat.
- ✓ Membuka ruang seluas-luasnya kepada kalangan professional untuk menduduki jabatan public sesuai kapasitas dan kompetensinya;
- ✓ Mengoptimalkan penerapan e-government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public secara efektif dan efisien;
- ✓ Meningkatkan kapasitas SDM aparatur birokrasi pemerintahan melalui Pendidikan dan pelatihan khusus;
- ✓ Meningkatkan insentif khusus bagi ketua RT/RW, Kepala DEsa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang penuh dedikasi dan loyalitas.

Berkah #6

Kalteng Harmonis

Kalteng yang Toleran, Beretika, Rukun

Kalimantan Tengah Harmonis merupakan masyarakat yang hidup dengan rukun,damai,tentram dan tidak ada masalah (konflik). Pemerintah daerah Kalimantan Tengah mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, serta agama, agar tercipta keharmonisan dalam masyarakat Kalteng. Tujuan harmonis ini difokuskan pada penguatan literasi sosial berbasis tradisi dan kearifan lokal, antara lain: dialog antarbudaya dan penguatan harmoni sosial, inventarisasi data budaya dan kearifan lokal serta mendukung festival desa adat. Kegiatan-kegiatan tersebut akan menguatkan toleransi, etika berwarganegara, kesadaran multicultural, pluralisme dan kemajemukan serta kerukunan antar umat beragama, suku maupun antargolongan.

Dalam upaya mewujudkan Masyarakat Kalteng yang harmonis, maka diperlukan program prioritas sebagai berikut:

- ✓ Memperkuat falsafah Huma Betang dalam kehidupan beragama, berbudaya dan bermasyarakat melalui pemberdayaan budayawan dan tokoh-tokoh adat;
- ✓ Menerbitkan peraturan dan hukum adat sebagai instrument untuk meneguhkan peradaban masyarakat yang tertib;
- ✓ Mengedepankan hukum adat dan pendekatan kebudayaan dalam mengatasi persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat;
- ✓ Memperkuat kelembagaan adat sebagai agen kebudayaan yang terkonsolidasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pembangunan berdimensi kearifan lokal.

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. BERKAH merupakan intisari dari semangat dan Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Dengan demikian Program Prioritas meliputi Perangkat Daerah pendukung yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 6.6 Integrasi BERKAH ke dalam Program Perangkat Daerah

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD		
	<p>Berkah #1:</p> <p>Kalteng Bermartabat. Kalteng Unggul, Berdaya Saing, Dan Cemerlang</p> <p>Prioritas Pembangunan</p> <p>1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat</p>	<p>Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menebus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir.</p>	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan		
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan		
			Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan		
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
			<p>Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit <i>Belom Bahadat</i> (hidup beradat) dalam berkompetisi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing tinggi dan berreputasi cemerlang.</p>	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Berkah #2:	Meningkatkan sertifikasi lahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
	<p>Kalteng Elok. Kalteng Indah, Hijau, dan Ramah</p> <p>Prioritas Pembangunan</p> <p>2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok</p>	<p>masyarakat adat dan pengembangan ekonomi hijau;</p>	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Kehutanan

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
			Hayati Dan Ekosistemnya	
			Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Dinas Kehutanan
		Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata lintas kabupaten atau kota, termasuk menjadikan lahan gambut dan hutan rawa terbesar di Indonesia sebagai ecotourism berkelas dunia.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program pengelolaan hutan	Dinas Kehutanan
			Program konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Dinas Kehutanan
	Berkah #3 Kalteng Religius. Masyarakat berkarakter Religius	Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat sebagai pilar pembentukan karakter masyarakat	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
	<p>Prioritas Pembangunan</p> <p>3. Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius</p>		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dalam rangka perjalanan wisata religi misalnya para kyai dan ustadz naik haji dan umroh ke Mekkah, pendeta ziarah rohani ke Yerusalem, Hindu dan hindu Kaharingan ke India	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru ngaji, sekolah minggu dan guru spiritual di berbagai agama dan keyakinan masing-masing.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
	<p>Berkah #4</p> <p>Kalteng Kuat. Produktif, Sehat dan Cerdas</p> <p>Prioritas Pembangunan</p> <p>4. Mempercepat pengembangan kawasan food estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat</p>	<p>Mempercepat pengembangan kawasan food estate sebagai penunjang cadangan logistic strategis untuk pertahanan negara, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan local;</p>	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Dinas Perkebunan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
			Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
			Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
		Mempercepat program afirmatif dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana;	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
			Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Biro Perekonomian
			Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
			Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
		Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas (<i>Scaling Up</i>) dalam rangka Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan dan Memperkuat Ekonomi Daerah melalui pengembangan Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Memperluas kuantitas dan kualitas penerima beasiswa Kalteng Berkah yang selama ini telah berjalan;	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Memastikan fasilitas dan layanan akses kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat melalui perawatan khusus secara gratis bagi pasien kurang mampu.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei
			Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Penanganan Warga Negara Migran	Dinas Sosial

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
			Korban Tindak Kekerasan	
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Berkah #5: Kalteng Amanah. Jujur, Profesional, Kreatif, dan Inovatif	Peningkatan SDM aparatur birokrasi yang inovatif demi pelayanan public yang cepat dan tepat.	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
			Program Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung
			Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan
			Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
			Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
	Prioritas Pembangunan 5. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah	Membuka ruang seluas-luasnya kepada kalangan professional untuk menduduki jabatan public sesuai kapasitas dan kompetensinya;	Program Pemerintahan Dan Otonomi Khusus	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Program Administrasi Umum	Biro Umum
		Mengoptimalkan penerapan e-government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public secara efektif dan efisien;	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Program Pengembangan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Meningkatkan kapasitas SDM aparatur birokrasi pemerintahan melalui Pendidikan dan pelatihan khusus;	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
		Meningkatkan insentif khusus bagi ketua RT/RW, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang penuh dedikasi dan loyalitas.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Berkah #6 Kalteng Harmoni. Masyarakat Toleran, Beretika, Rukun. Prioritas Pembangunan 6. Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni	Memperkuat falsafah Huma Betang dalam kehidupan beragama, berbudaya dan bermasyarakat melalui pemberdayaan budayawan dan tokoh-tokoh adat;	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Menerbitkan peraturan dan hukum adat sebagai instrument untuk meneguhkan peradaban masyarakat yang tertib;	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Memperkuat kelembagaan adat sebagai agen kebudayaan yang terkonsolidasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pembangunan berdimensi kearifan lokal.	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pembinaan Sejarah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pelestarian Koleksi NAsional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Tabel 6.7 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Kalimantan Tengah
“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
MISI I : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI YANG PRODUKTIF, KREATIF, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN															
T - 1	1.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	3,57 %	5,60 %		5,70 %		5,80 %		5,90 %		6,00 %		6,00 %	
		1.1.2 Indeks Ketimpangan (Indeks Williamson)	0,16 %	0,149 %		0,143 %		0,138 %		0,132 %		0,127 %		0,127 %	
		1.1.3 Indeks Gini	0.329 Angka	0.228 Angka		0.222 Angka		0.216 Angka		0.210 Angka		0.204 Angka		0.204 Angka	
S - 1	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	15,96%	16,00 %		16,10 %		16,20 %		16,30 %		16,40 %		16,40 %	
		Kontribusi Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	21,80%	23,4 %		24,3 %		25,2 %		26,1 %		27 %		27 %	
		Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB	13,22%	13,50 %		14,00 %		15,00 %		16,00 %		18,00 %		18,00 %	
		Jumlah kunjungan wisatawan	773359 Orang	820.457 Orang		845.070 Orang		870.422 Orang		896.535 Orang		923.431 Orang		923.431 Orang	
		Realisasi penanaman modal (dalam juta)	626795 9 Juta	7.980.000 00 Juta		8.300.000 00 Juta		8.650.000 00 Juta		9.100.000 00 Juta		9.630.000 00 Juta		9.630.000 00 Juta	
		Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBI)	107 Angka	108,25 Angka		109,50 Angka		110,75 Angka		112 Angka		113,25 Angka		113,25 Angka	

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,19%	13,50 %		13,60 %		13,70 %		13,80 %		13,90 %		13,90 %			
4	1	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jenis dan jumlah bank dan cabang	300 Unit	300 Unit	700.598.500	315 Unit	714.610.470	318 Unit	728.972.739	320 Unit	816.197.253	321 Unit	851.227.178	321 Unit	Sekretariat Daerah
4	1	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	55 Unit	55 Unit	700.000.000	56 Unit	714.000.000	57 Unit	728.350.000	59 Unit	815.500.000	60 Unit	850.500.000	60 Unit	Sekretariat Daerah
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana perdagangan di Kalteng meliputi pasar, gudang, distributor dan pedagang besar (sarana perdagangan)	2.035 Unit	2.239 Unit	76.200.000	2.462 Unit	77.724.000	2.709 Unit	79.286.100	2.979 Unit	88.773.000	3.277 Unit	92.583.000	3.277 Unit	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah kegiatan pemantauan terhadap Bapokting (kegiatan)	260 Kegiatan	260 Kegiatan	288.800.000	260 Kegiatan	294.576.000	260 Kegiatan	300.496.400	260 Kegiatan	336.452.000	260 Kegiatan	350.892.000	260 Kegiatan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perizinan dan pendaftaran perusahaan yang terlayani dengan baik (%)	100 %	100 %	-	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pengawasan (pelaku Usaha)	98 Orang	103 Orang	500.000.000	108 Orang	510.000.000	113 Orang	520.250.000	119 Orang	582.500.000	122 Orang	607.500.000	663 Orang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah contoh/sampel komoditi ekspor yang akan di uji (sampel)	1.568 sampel	1.646 sampel	310.030.000	1.728 sampel	316.230.600	1.815 sampel	322.586.215	1.905 sampel	361.184.950	1.950 sampel	376.686.450	10.612 sampel	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah UUT (alat ukur) yang dikalibrasi (alat)	550 Alat	578 Alat	70.070.000	607 Alat	71.471.400	637 Alat	72.907.835	669 Alat	81.631.550	680 Alat	85.135.050	3.271 Alat	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi Kalimantan Tengah	50 Unit	50 Unit	1.940.000.000	50 Unit	1.978.800.000	50 Unit	2.018.570.000	50 Unit	2.260.100.000	50 Unit	2.357.100.000	300 Unit	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Presentase Izin Usaha Industri yang terfasilitasi	100 %	100 %	-	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Industri Kalteng yang menggunakan aplikasi SIINAS (Kab/Kota)	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100.000.000	14 Kab/Kota	102.000.000	14 Kab/Kota	104.050.000	14 Kab/Kota	116.500.000	14 Kab/Kota	121.500.000	14 Kab/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan populasi peternakan	3.05 %	3.15 %	26.596.935.000	3.20 %	27.128.873.700	3.25 %	27.674.110.868	3.30 %	30.985.429.275	3.35 %	32.315.276.025	3.35 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan	0.10 %	0.12 %	377.260.000	0.14 %	384.805.200	0.16 %	392.539.030	0.18 %	439.507.900	0.20 %	458.370.900	0.20 %	Dinas Perkebunan

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase benih/bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat (%)	85 %	89 %	3.500.000.000	91 %	3.570.000.000	93 %	3.641.750.000	95 %	4.077.500.000	97 %	4.252.500.000	97 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan NTP sub sektor perkebunan	0.08 %	0.08 %	840.000.000	0.08 %	856.800.000	0.08 %	874.020.000	0.09 %	978.600.000	0.09 %	1.020.600.000	0.09 %	Dinas Perkebunan
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	presentase peningkatan vaksin hewan	40 %	60 %	1.075.000.000	70 %	1.096.500.000	80 %	1.118.537.500	90 %	1.252.375.000	100 %	1.306.125.000	100 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tertanggulangi akibat bencana (%)	75 %	75 %	600.000.000	80 %	612.000.000	80 %	624.300.000	82 %	699.000.000	85 %	729.000.000	85 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	70 %	70 %	170.000.000	75 %	173.400.000	80 %	176.885.000	82 %	198.050.000	85 %	206.550.000	85 %	Dinas Perkebunan
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase mediasi gangguan usaha perkebunan	80 %	80 %	140.000.000	80 %	142.800.000	80 %	145.670.000	82 %	163.100.000	85 %	170.100.000	85 %	Dinas Perkebunan

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha pertanian yang sudah terlayani dengan baik (%)	100 %	100 %	-	100 %	510.000.000	100 %	520.250.000	100 %	582.500.000	100 %	607.500.000	100 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang Memperoleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) (%)	50 %	50 %	600.000.000	55 %	612.000.000	55 %	624.300.000	60 %	699.000.000	60 %	729.000.000	60 %	Dinas Perkebunan
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah koperasi sektor perkebunan yang mendapat pendampingan	10 Unit	10 Unit	125.000.000	10 Unit	127.500.000	10 Unit	130.062.500	10 Unit	145.625.000	50 Unit	151.875.000	50 Unit	Dinas Perkebunan
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang mendapat pendampingan	85 %	85 %	1.075.000.000	90 %	1.096.500.000	90 %	1.118.537.500	95 %	1.252.375.000	95 %	1.306.125.000	95 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	25	2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	0 Lokasi	2 Lokasi	450.000.000	4 Lokasi	459.000.000	5 Lokasi	468.225.000	6 Lokasi	524.250.000	7 Lokasi	546.750.000	7 Lokasi	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun)	130.526,1 Ton	133.137,62 Ton	13.444.646.800	137.131,72 Ton	13.713.539.736	141.244,64 Ton	13.989.154.995	145.481,98 Ton	15.663.013.522	149.486,44 Ton	16.335.245.862	149.486,44 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	107,00 NTN/NTBi	108,25 NTN/NTBi	1.006.793.000	109,50 NTN/NTBi	1.026.928.860	110,75 NTN/NTBi	1.047.568.117	112 NTN/NTBi	1.172.913.845	113,25 NTN/NTBi	1.223.253.495	113,25 NTN/NTBi	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	119.876,05 Ton	128.008,34 Ton	2.416.894,600	136.140,63 Ton	2.465.232,492	144.272,92 Ton	2.514.778.831	152.405,21 Ton	2.815.682.209	160.537,50 Ton	2.936.526.939	160.537,50 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah kebutuhan benih (ekor)	67.630 Ekor	69.820 Ekor	1.019.000,000	72.010 Ekor	1.039.380,000	74.200 Ekor	1.060.269.500	76.390 Ekor	1.187.135.000	78.580 Ekor	1.238.085.000	78.580 Ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan UU yang berlaku (%)	85 %	85 %	307.503,000	85 %	313.653,060	85 %	319.956.872	90 %	358.240,995	90 %	373.616,145	90 %	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kelompok masyarakat pengawasan (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok)	40 Kelompok	45 Kelompok	135.000,000	48 Kelompok	137.700,000	52 Kelompok	140.467.500	58 Kelompok	157.275,000	60 Kelompok	164.025,000	60 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	49,63 Kg/Kap/Tahun	55,81 Kg/Kap/Tahun	7.884,000	57,62 Kg/Kap/Tahun	8.041,680	59,43 Kg/Kap/Tahun	8.203,302	61,23 Kg/Kap/Tahun	9.184,860	63,04 Kg/Kap/Tahun	9.579,060	63,04 Kg/Kap/Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	34.450 Ton	34.761,84 Ton	127.116,000	35.073,68 Ton	129.658,320	35.385,52 Ton	132.264.198	35.697,36 Ton	148.090,140	36.009,20 Ton	154.445,940	36.009,20 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,1 %	3,2 %	15.000,000	3,30 %	15.300,000	3,40 %	15.607,500	3,50 %	17.475,000	3,60 %	18.225,000	3,60 %	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%)	11.77 %	12.00 %	20.000.000	12.35 %	20.400.000	13.15 %	20.810.000	14.00 %	23.300.000	15.75 %	24.300.000	15.75 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Wirausaha (Unit)	64.087 Unit	71.495 Unit	20.928.000	78.644 Unit	21.346.560	86.508 Unit	21.775.584	95.158 Unit	24.381.120	104.674 Unit	25.427.520	104.674 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	60.415 Unit	48.000 Unit	77.072.000	57.800 Unit	78.613.440	69.360 Unit	80.193.416	83.232 Unit	89.788.880	83.232 Unit	93.642.480	83.232 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	0 %	9.99 %	20.000.000	9.99 %	20.400.000	9.99 %	20.810.000	9 %	23.300.000	9.99 %	24.300.000	9.99 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Rasio Kewirausahaan	0 %	5.09 %	20.000.000	5.52 %	20.400.000	5.98 %	20.810.000	6.49 %	23.300.000	7.03 %	24.300.000	7.03 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Unit)	3.672 Unit	4.200 Unit	15.000.000	4.242 Unit	15.300.000	4.285 Unit	15.607.500	4.328 Unit	17.475.000	4.371 Unit	18.225.000	4.371 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang di dampingi (Unit)	1.364 Unit	480 Unit	15.000.000	480 Unit	15.300.000	480 Unit	15.607.500	480 Unit	17.475.000	480 Unit	18.225.000	480 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Lembaga keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USPKop/KJKS) (Unit)	365 Unit	2000 Unit	105.000.000	2.584 Unit	107.100.000	2.609 Unit	109.252.500	2.634 Unit	122.325.000	2.659 Unit	127.575.000	2.659 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif (%)	78.63 %	83.21 %	117.500.000	83.71 %	119.850.000	84.21 %	122.258.750	84.71 %	136.887.500	85.71 %	142.762.500	85.71 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pertumbuhan Koperasi (unit)	182 Unit	50 Unit	50.000.000	50 Unit	51.000.000	50 Unit	52.025.000	50 Unit	58.250.000	50 Unit	60.750.000	50 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase koperasi yang memiliki kategori sehat/Berkualitas (%)	16.50 %	17.50 %	56.435.400	19.00 %	57.564.108	21.50 %	58.721.034	25.00 %	65.747.241	27.50 %	68.569.011	27.50 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Koperasi berprestasi tingkat provinsi dan nasional (unit)	11 Unit	12 Unit	145.564.600	12 Unit	148.475.892	12.00 Unit	151.459.966	12 Unit	169.582.759	12 Unit	176.860.989	12 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih (Orang)	880 Orang	240 Orang	2.428.964.000	240 Orang	2.477.543.280	240 Orang	2.527.337.042	240 Orang	2.829.743.060	240 Orang	2.951.191.260	240 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%)	0,83 %	1,75 %	209.000.000	2,00 %	213.180.000	2,25 %	217.464.500	2,25 %	243.485.000	2,25 %	253.935.000	2,25 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi Modern (Unit)	0 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	204.000.000	3 Unit	208.100.000	3 Unit	233.000.000	3 Unit	243.000.000	3 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Kontribusi Koperasi di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%)	1,45 %	1,50 %	25.000.000	1,65 %	25.500.000	1,85 %	26.012.500	2,00 %	29.125.000	2,25 %	30.375.000	2,25 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	773.359 Orang	820.457 Orang	825.000.000	845.070 Orang	2.841.500.000	870.422 Orang	2.858.412.500	896.535 Orang	2.961.125.000	923.431 Orang	3.002.375.000	923.431 Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang di promosikan (%)	80 %	85 %	140.000.000	90 %	3.142.800.000	95 %	3.145.670.000	100 %	3.163.100.000	100 %	3.170.100.000	100 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tempat wisata yang terkelola	85 %	90 %	75.000.000	92.5 %	3.765.000.000	95 %	3.780.375.000	97.5 %	3.873.750.000	100 %	3.911.250.000	100 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan	80 %	80 %	125.000.000	81 %	127.500.000	81 %	130.062.500	82 %	145.625.000	82 %	151.875.000	82 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan yang Terbit Tepat Waktu	618 Dokumen	595 Dokumen	395.458.200	595 Dokumen	403.367.364	595 Dokumen	411.474.257	595 Dokumen	460.708.803	595 Dokumen	480.481.713	595 Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersedianya dokumen peta potensi Investasi	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	591.045.200	2 Kabupaten/Kota	602.866.104	2 Kabupaten/Kota	614.982.531	2 Kabupaten/Kota	688.567.658	2 Kabupaten/Kota	718.119.918	2 Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	269.158.800	4 Kegiatan	274.541.976	4 Kegiatan	280.059.731	4 Kegiatan	313.570.002	4 Kegiatan	327.027.942	4 Kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	618 Unit	700 Unit	193.506.500	700 Unit	197.376.630	752 Unit	201.343.513	807 Unit	225.435.073	867 Unit	235.110.398	867 Unit	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (juta Rupiah)	7.420.000 Juta Rupiah	7.980.000 Juta Rupiah	193.506.500	8.300.000 Juta Rupiah	197.376.630	8.650.000 Juta Rupiah	201.343.513	9.100.000 Juta Rupiah	225.435.073	9.630.000 Juta Rupiah	235.110.398	9.630.000 Juta Rupiah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PMDN dalam Juta Rupiah	5.194.000 Juta Rupiah	5.586.000 Juta Rupiah	193.506.500	5.810.000 Juta Rupiah	197.376.630	6.055.000 Juta Rupiah	201.343.513	6.370.000 Juta Rupiah	225.435.073	6.741.000 Juta Rupiah	235.110.398	6.741.000 Juta Rupiah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PMA dalam US \$ Ribu	152.465.75 US \$ Ribu	163.972.60 US \$ Ribu	193.506.500	170.547.95 US \$ Ribu	197.376.630	177.739.73 US \$ Ribu	201.343.513	186.986.30 US \$ Ribu	225.435.073	197.876.71 US \$ Ribu	235.110.398	197.876.71 US \$ Ribu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi Investasi	40 %	7,55 %	100.000.000	4,01 %	102.000.000	4,22 %	104.050.000	5,20 %	116.500.000	5,82 %	121.500.000	5,82 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Informasi data Perizinan berusaha yang dikelola dengan baik	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	150.000.000	5 Kabupaten/Kota	153.000.000	5 Kabupaten/Kota	156.075.000	5 Kabupaten/Kota	174.750.000	5 Kabupaten/Kota	182.250.000	5 Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	32	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Usulan kawasan transmigrasi yang direkomendasikan (kawasan)	5 Kawasan	7 Kawasan	100.000.000	8 Kawasan	546.800.000	9 Kawasan	553.770.000	10 Kawasan	596.100.000	11 Kawasan	613.100.000	11 Kawasan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan permukiman baru atau pemenuhan daya tampung (SP)	1 SP	1 SP	80.000.000	1 SP	551.900.000	1 SP	558.972.500	1 SP	601.925.000	1 SP	619.175.000	6 SP	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Permukiman transmigrasi dalam pembinaan (SP)	2 SP	2 SP	200.000.000	2 SP	541.700.000	2 SP	548.567.500	1 SP	590.275.000	1 SP	607.025.000	1 SP	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan (%)	77,03 %	90 %	3.477.847.500	90 %	3.547.404.450	90 %	3.618.700.324	100 %	4.051.692.338	100 %	4.225.584.713	100 %	Dinas Kehutanan

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2022		2023		2024		2025		2026							
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp			
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Kawasan Hutan KPH yang difasilitasi pemanfaatannya (hektar)	0 Ha	30.000 Ha	30.767.010.220	40.000 Ha	31.382.350.424	50.000 Ha	32.013.074.134	60.000 Ha	35.843.566.906	70.000 Ha	37.381.917.417	250.000 Ha	Dinas Kehutanan		
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (Persen)	0,98 %	0,97 %	3.841.740.000	0,94 %	3.918.574.800	0,91 %	3.997.330.470	0,88 %	4.475.627.100	0,86 %	4.667.714.100	0,86 %	Dinas Kehutanan		
S - 2		Meningkatnya Ketercukupan Energi	Rasio Elektrifikasi	86,82 Angka	91,2 Angka		93,39 Angka		95,58 Angka		97,77 Angka		100 Angka		100 Angka				
			Rasio Desa Berlistrik	92,55 Angka	95,03 Angka		96,27 Angka		97,51 Angka		98,75 Angka		100 Angka		100 Angka		100 Angka		
			Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)	7%	9%		12%		15%		18%		20%		20%		20%		
3	29	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Desa Berlistrik	92,55 %	95,03 %	1.573.250.000	96,27 %	1.604.715.000	97,51 %	1.636.966.625	98,75 %	1.832.836.250	100 %	1.911.498.750	100 %	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	29	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi (%)	86,82 %	91,2 %	50.000.000	93,39 %	51.000.000	95,58 %	52.025.000	97,77 %	58.250.000	100 %	60.750.000	100 %	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	29	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase perusahaan pengelolaan kegeologian yang taat aturan	80 %	82 %	-	85 %	3.833.263.550	87 %	3.982.608.239	90 %	4.332.078.813	90 %	4.481.486.003	90 %	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	29	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah pertimbangan teknis ijin usaha	379 Dokumen	382 Dokumen	20.000.000	386 Dokumen	20.400.000	391 Dokumen	20.810.000	397 Dokumen	23.300.000	404 Dokumen	24.300.000	404 Dokumen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
3	29	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) (%)	7 %	9 %	-	12 %	5.366.568.970	15 %	5.575.651.534	18 %	6.064.910.338	20 %	6.274.080.404	20 %	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
S - 3		Meningkatnya konektivitas wilayah	Rasio Konektivitas Jalan Provinsi	0,34 Angka	0,34 Angka		0,36 Angka		0,38 Angka		0,39 Angka		0,39 Angka		0,39 Angka		
			Rasio konektivitas sektor transportasi	0,85 Angka	0,86 Angka		0,87 Angka		0,88 Angka		0,89 Angka		0,9 Angka		0,9 Angka		
			Persentase Desa Bersinyal	67%	71 %		79 %		87 %		92 %		98 %		98 %		
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan Irigasi (%)	8,79 %	19.21 %	72.727.325.000	37.93 %	39.200.000.000	54.19 %	40.000.000.000	70.44 %	62.000.000.000	75.86 %	62.543.042.656	75.86 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan Ditingkatkan (unit)	1 Unit	2 Unit	2.000.000.000	3 Unit	2.000.000.000	4 Unit	3.000.000.000	5 Unit	3.500.000.000	6 Unit	3.500.000.000	6 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	50 %	70 %	10.837.167.300	72 %	10.933.550.646	75 %	11.153.293.576	78 %	12.487.829.905	90 %	13.023.788.270	90 %	Dinas Perhubungan
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase terminal bus Tipe B sesuai pelayanan standard	42 %	45 %	500.000.000	50 %	510.000.000	52 %	520.250.000	60 %	582.500.000	70 %	607.500.000	70 %	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase fasilitas perlengkapan sungai	10 %	20 %	6.453.360.148	25 %	3.825.000.151	30 %	5.110.475.154	45 %	5.716.750.172	50 %	5.954.250.180	50 %	Dinas Perhubungan
2	15	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rasio konektivitas sektor transportasi	0 %	0 %	-	5 %	1.224.000.000	6 %	40.000.000	7 %	50.000.000	8 %	60.000.000	8 %	Dinas Perhubungan
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio konektivitas jalan provinsi	0.34 %	0.34 %	782.217.363.500	0.36 %	769.140.000.000	0.38 %	780.000.000.000	0.39 %	804.382.492.907	0.39 %	804.215.428.701	0.39 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
S - 4		Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat.		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	270004 Ha	345.000 Ha		385.000 Ha		425.000 Ha		465.000 Ha		505.000 Ha		505.000 Ha	
				Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver	81 Unit	150 Unit		200 Unit		260 Unit		330 Unit		410 Unit		410 Unit	
3	28	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver(unit)	81 Unit	150 Unit	9.472.075.000	200 Unit	9.661.516.500	260 Unit	9.855.694.038	330 Unit	11.034.967.375	410 Unit	11.508.571.125	410 Unit	Dinas Kehutanan
3	28	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat (hektar)	270.004 Ha	345.000 Ha	22.016.352.000	385.000 Ha	22.456.679.040	425.000 Ha	22.908.014.256	465.000 Ha	25.649.050.080	505.000 Ha	26.749.867.680	505.000 Ha	Dinas Kehutanan

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
T - 2	1.2 Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	1.2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,74 Poin	74,30 Poin		74,53 Poin		74,75 Poin		74,97 Poin		75,16 Poin		75,16 Poin			
S - 1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,61 Poin	59,50 Poin		59,60 Poin		59,70 Poin		59,80 Poin		59,90 Poin		59,90 Poin			
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,84 Poin	87,14 Poin		87,24 Poin		87,34 Poin		87,44 Poin		87,54 Poin		87,54 Poin			
		Indeks Kualitas lahan (IKL)	72,33 Poin	73,66 Poin		74,33 Poin		74,99 Poin		75,66 Poin		76,06 Poin		76,06 Poin			
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	65,04 Poin	70,48 Poin		71,08 Poin		71,67 Poin		72,28 Poin		72,88 Poin		72,88 Poin			
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran lingkungan	1 Dokumen	2 Dokumen	485.000.000	1 Dokumen	494.700.000	1 Dokumen	504.642.500	1 Dokumen	565.025.000	2 Dokumen	589.275.000	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,74 Poin	74,3 Poin	430.000.000	74,53 Poin	438.600.000	74,75 Poin	447.415.000	74,97 Poin	500.950.000	75,16 Poin	522.450.000	75,16 Poin	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	68,75 %	76 %	651.398.581	77 %	664.426.553	78 %	677.780.224	79 %	758.879.347	80 %	791.449.276	80 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah dokumen profil Kehati	0 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	61.200.000	1 Dokumen	62.430.000	1 Dokumen	69.900.000	1 Dokumen	72.900.000	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton)	1.406.674,627 Ton	1.407.074,727 Ton	200.000.000	1.407.274,777 Ton	204.000.000	1.407.474,827 Ton	208.100.000	1.407.674,877 Ton	233.000.000	1.407.874,927 Ton	243.000.000	1.407.874,927 Ton	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 MHA	2 MHA	60.000.000	2 MHA	61.200.000	2 MHA	62.430.000	2 MHA	69.900.000	2 MHA	72.900.000	2 MHA	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan (Kegiatan)	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	204.000.000	2 Kegiatan	208.100.000	2 Kegiatan	233.000.000	2 Kegiatan	243.000.000	2 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	1 Penghargaan	2 Penghargaan	305.000.000	2 Penghargaan	311.100.000	2 Penghargaan	317.352.500	2 Penghargaan	355.325.000	2 Penghargaan	370.575.000	2 Penghargaan	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup (%)	83,33 %	85 %	40.000.000	86 %	40.800.000	87 %	41.620.000	88 %	46.600.000	89 %	48.600.000	89 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	17.215,61 Ton	17.911,12 Ton	4.375.000.000	18.090,23 Ton	4.462.500.000	18.271,13 Ton	4.552.187.500	18.636,55 Ton	5.096.875.000	18.822,92 Ton	5.315.625.000	18.822,92 Ton	Dinas Lingkungan Hidup
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (hektar)	123 Ha	1.000 Ha	33.245.626.380	1.100 Ha	33.910.538.908	1.200 Ha	34.592.074.248	1.300 Ha	38.731.154.733	1.400 Ha	40.393.436.052	6.000 Ha	Dinas Kehutanan
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Penurunan Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Setiap Tahun (hektar)	317.749 Ha	299.000 Ha	53.064.080.600	285.000 Ha	54.125.362.212	268.000 Ha	55.213.175.864	252.000 Ha	61.819.653.899	234.000 Ha	64.472.857.929	234.000 Ha	Dinas Kehutanan
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan per Tahun (persen)	0 %	80 %	8.351.700.000	80 %	8.518.734.000	80 %	8.689.943.850	85 %	9.729.730.500	90 %	10.147.315.500	90 %	Dinas Kehutanan

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
3	28	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Konservasi/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang dikelola (Hektar)	0 Ha	58.341 Ha	460.500.000	58.501 Ha	469.710.000	58.700 Ha	479.150.250	58.853 Ha	536.482.500	58.982 Ha	559.507.500	58.982 Ha	Dinas Kehutanan
3	28	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah dokumen pengelolaan DAS wilayah Kalimantan Tengah (Dokumen)	0 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	663.000.000	1 Dokumen	676.325.000	1 Dokumen	757.250.000	1 Dokumen	789.750.000	5 Dokumen	Dinas Kehutanan
S - 2		Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Provinsi		Kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan RTRW	78%	80%		82%		84%		86%		88%		88%	
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	5 Unit	7 Unit	61,147,200,000	8 Unit	101,899,800,000	9 Unit	95,679,000,000	10 Unit	118,929,000,000	11 Unit	123,179,000,000	11 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Tersedianya Bangunan UPTPPD yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	11 Unit	11 Unit	3,820,377,983	12 Unit	4,571,000,000	13 Unit	5,321,000,000	14 Unit	6,071,000,000	14 Unit	6,821,000,000	14 Unit	Badan Pendapatan Daerah
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan dikelola dengan baik (unit)	5 Unit	6 Unit	36.600.000.000	7 Unit	13.000.000.000	8 Unit	15.000.000.000	9 Unit	15.000.000.000	10 Unit	15.000.000.000	10 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	3	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terselenggaranya penataan ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	78 %	80 %	2.902.661.000	82 %	3.000.000.000	84 %	3.500.000.000	86 %	4.000.000.000	88 %	4.000.000.000	88 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PAGU MISI I					1.219.439.418.312,00		1.214.703.125.966,00		1.230.054.474.901,00		1.334.486.104.477,00		1.353.156.566.725,00				
MISI II : MEMPERKUAT KETAHANAN DAERAH DAN MENGANTISIPASI PERUBAHAN GLOBAL																	
T - 1	2.1 Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat	2.1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (ID)	74,91 %	75,00 %		75,50 %		76,00 %		76,50 %		76,50 %		76,50 %			
		2.1.2 Prosentase Penduduk Miskin	5,16%	4,96%		4,81%		4,66%		4,41%		4,36%		4,36%			
S - 1	Meningkatnya ketertiban dan ketentrangan masyarakat	Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	7:10.000 per penduduk	9:10.000 per penduduk		9:10.000 per penduduk		10:10.000 per penduduk		10:100.000 per penduduk		11:10.000 per penduduk		11:10.000 per penduduk			
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	1.722 Lembaga	1.730 Lembaga	2.576.554.778	1.740 Lembaga	2.628.085.874	1.750 Lembaga	2.680.905.247	1.760 Lembaga	3.001.686.316	1.770 Lembaga	3.130.514.055	1.770 Lembaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
8	1	2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang)	200 Orang	200 Orang	969.914.900	200 Orang	989.313.198	200 Orang	1.009.196.453	200 Orang	1.129.950.859	200 Orang	1.178.446.604	200 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	78,24 Nilai/Angka	78,25 Nilai/Angka	5.578.172.250	78,5 Nilai/Angka	5.689.735.695	78,75 Nilai/Angka	5.804.088.226	79 Nilai/Angka	6.498.570.671	79,25 Nilai/Angka	6.777.479.284	79,25 Nilai/Angka	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	10	4	PROGRAM Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Garapan (%)	30 %	40 %	158.297.500	50 %	161.463.450	60 %	164.708.549	70 %	184.416.588	80 %	192.331.463	80 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	6	PROGRAM Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat di sertifikat	3000 Ha	3000 Ha	397.202.500	3000 Ha	405.146.550	3000 Ha	413.289.201	3000 Ha	462.740.913	3000 Ha	482.601.038	20.000 Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	5	2	PROGRAM Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi	100 %	100 %	600.000.000	100 %	612.000.000	100 %	1.560.779.392	100 %	699.000.000	100 %	729.000.000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
S - 2	Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan	Persentase penduduk miskin pedesaan	5,38%	5,30 %		5,25 %		5,20 %		5,10 %		5,00 %		5,00 %			
		Persentase penduduk miskin perkotaan	4,86%	4,80 %		4,75 %		4,70 %		4,65 %		4,60 %		4,60 %			
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Berkembang	737 Desa	767 Desa	-	797 Desa	306.000.000	817 Desa	312.150.000	837 Desa	349.500.000	867 Desa	364.500.000	867 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang bekerjasama (Mou, perjanjian Kerjasama, Laporan)	0 Desa	7 Desa	55.034.850	9 Desa	56.135.547	11 Desa	57.263.761	13 Desa	64.115.600	15 Desa	66.867.343	15 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Aparatur Desa Terlatih	320 Orang	650 Orang	969.686.332	1010 Orang	989.080.059	1380 Orang	1.008.958.628	1770 Orang	1.129.684.577	2170 Orang	1.178.168.893	2170 Orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat	11 kegiatan	11 kegiatan	206.190.000.000	12 kegiatan	210.313.800.000	13 kegiatan	214.540.695.000	14 kegiatan	240.211.350.000	16 kegiatan	250.520.850.000	16 kegiatan	Sekretariat Daerah
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Toleransi	76,52 Angka	76,65 Angka	200.000.000	76,70 Angka	204.000.000	76,80 Angka	208.100.000	76,90 Angka	233.000.000	77,00 Angka	243.000.000	77,00 Angka	Sekretariat Daerah
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Kesetaraan	78,37 Angka	78,49 Angka	350.000.000	78,55 Angka	357.000.000	78,61 Angka	364.175.000	78,67 Angka	407.750.000	78,73 Angka	425.250.000	78,73 Angka	Sekretariat Daerah
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Kerjasama	78,57 Angka	78,71 Angka	150.000.000	78,78 Angka	153.000.000	78,85 Angka	156.075.000	78,92 Angka	174.750.000	78,99 Angka	182.250.000	78,99 Angka	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
S - 3	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teratasi	80%	80 %		82 %		82 %		83 %		85 %		85 %			
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkat kemampuannya	60 %	70 %	812.784.854	75 %	829.040.551	75 %	845.702.641	80 %	946.894.355	85 %	987.533.598	85 %	Dinas Sosial
1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	80 %	85 %	183.787.850	85 %	187.463.607	90 %	191.231.258	90 %	214.112.845	95 %	223.302.238	95 %	Dinas Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teratasi	80 %	80 %	6.032.124.463	82 %	6.152.766.952	82 %	6.276.425.504	85 %	7.027.424.999	85 %	7.329.031.223	85 %	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial (KPM)	50.041 KPM	50.500 KPM	310.919.250	51.000 KPM	317.137.635	52.000 KPM	323.511.480	53.000 KPM	362.220.926	54.000 KPM	377.766.889	55.000 KPM	Dinas Sosial
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	70 %	70 %	1.665.094.000	80 %	1.698.395.880	85 %	1.732.530.307	90 %	1.939.834.510	95 %	2.023.089.210	95 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
S - 4	Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi	Persentase rumah layak huni	54,41%	59,93 %		65,46 %		70,98 %		71,28 %		71,58 %		71,58 %			
		Persentase akses air minum layak	85,85%	90,56 %		95,28 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		Persentase akses sanitasi layak	69%	72 %		76 %		80 %		85 %		90 %		90 %			
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	85,85 %	90,56 %	3.600.000.000	95,28 %	4.000.000.000	100 %	8.000.000.000	100 %	25.000.000.000	100 %	25.000.000.000	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%)	69 %	72 %	2.800.000.000	76 %	2.800.000.000	80 %	6.000.000.000	85 %	6.500.000.000	90 %	6.500.000.000	90 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan (meter)	1.000 m	2.000 m	11.130.000.000	3.000 m	5.650.000.000	4.000 m	10.000.000.000	5.000 m	11.000.000.000	6.000 m	12.000.000.000	6.000 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi (kawasan)	2 Kawasan	3 Kawasan	59.039.645.000	4 Kawasan	91.686.045.000	5 Kawasan	71.096.845.000	6 Kawasan	70.000.000.000	7 Kawasan	70.000.000.000	7 Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	100 %	100 %	200.000.000	100 %	225.000.000	100 %	240.000.000	100 %	250.000.000	100 %	260.000.000	100 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani	1 Kawasan	1 Kawasan	1.037.819.000	1 Kawasan	1.058.575.380	1 Kawasan	11.079.850.670	1 Kawasan	11.209.059.135	1 Kawasan	11.260.950.085	1 Kawasan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Pebaikan Rumah Layak Huni	N.A	90 Unit	4.292.864.000	135 Unit	5.720.000.000	140 Unit	6.000.000.000	145 Unit	6.300.000.000	150 Unit	6.600.000.000	90 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase terselenggaranya penyediaan PSU Perumahan	80 %	85 %	6.624.991.000	88 %	17.000.000.000	94 %	21.000.000.000	98 %	22.000.000.000	100 %	22.000.000.000	100 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	4	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat Sertifikasi dan Registrasi	40 Orang	60 Orang	-	60 Orang	200.000.000	80 Orang	210.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	3	1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	530 Orang	830 Orang	3.904.300.000	1.080 Orang	3.500.000.000	1.330 Orang	3.500.000.000	1.730 Orang	7.000.000.000	2.130 Orang	7.000.000.000	2.130 Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
T - 2		2.2 Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan	2.2.1 Indeks Resiko Bencana	131 Angka	130 Angka		129 Angka		128 Angka		127 Angka		126 Angka		126 Angka		
S - 1		Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah serta antisipasi penanganan terhadap bencana dan pandemi	Tingkat Indeks ketahanan daerah	3,2 Angka	3,30 Angka		3,40 Angka		3,50 Angka		3,60 Angka		3,70 Angka		3,70 Angka		
			Kontribusi Penguatan Cadangan pangan daerah (Persentase)	5,05 Angka	50,5 %		60,5 %		70,5 %		80,5 %		90,5 %		90,5 %		
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %	100 %	278.676.800	100 %	474.300.000	100 %	483.832.500	100 %	541.725.000	100 %	564.975.000	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %	135.000.000	100 %	545.700.000	100 %	556.667.500	100 %	623.275.000	100 %	650.025.000	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan	100 %	100 %	350.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.440.000.000	100 %	1.728.000.000	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100 %	100 %	225.000.000	100 %	650.000.000	100 %	780.000.000	100 %	936.000.000	100 %	1.123.200.000	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Terselenggaranya fungsi kelembagaan	12 Bulan	12 Bulan	171.323.200	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	720.000.000	12 Bulan	864.000.000	12 Bulan	1.036.800.000	12 Bulan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tersedianya SDM terampil	10 Orang	10 Orang	100.000.000	10 Orang	750.000.000	10 Orang	750.000.000	10 Orang	750.000.000	10 Orang	750.000.000	50 Orang	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	0 %	0 %	-	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 %	100 %	240.167.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.440.000.000	100 %	1.728.000.000	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	5,05 %	50,5 %	874.845.000	60,5 %	892.341.900	70,5 %	910.276.223	80,5 %	1.019.194.425	90,5 %	1.062.936.675	90,5 %	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	83,8 %	88,3 %	225.000.000	90,4 %	229.500.000	91 %	234.112.500	91 %	262.125.000	92 %	273.375.000	92 %	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan daerah rawan pangan (%)	28,57 %	2 %	50.000.000	2 %	51.000.000	2 %	52.025.000	2 %	58.250.000	2 %	60.750.000	2 %	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	88 %	90 %	90.000.000	90,5 %	91.800.000	91 %	93.645.000	91,5 %	104.850.000	92 %	109.350.000	92 %	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	337,665 Ton	32,000 Ton	15.000.000	34,167 Ton	15.300.000	36,334 Ton	15.607.500	38,500 Ton	17.475.000	40,668 Ton	18.225.000	40,668 Ton	Dinas Ketahanan Pangan
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (orang)	175 Orang	175 Orang	1.062.060.250	200 Orang	1.083.301.455	200 Orang	1.105.073.690	200 Orang	1.237.300.191	200 Orang	1.290.403.204	200 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor barang dan jasa Kalteng (juta US\$)	2.427,42 juta US\$	2.618,76 juta US\$	205.000.000	2.810,10 juta US\$	209.100.000	3.001,44 juta US\$	213.302.500	3.192,78 juta US\$	238.825.000	3.250 juta US\$	249.075.000	3.250 juta US\$	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Impor barang dan Jasa Kalteng (juta US\$)	48,1 juta US\$	52,91 juta US\$	167.500.000	58,2 juta US\$	170.850.000	64,03 juta US\$	174.283.750	70,43 juta US\$	195.137.500	75 juta US\$	203.512.500	75 juta US\$	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah kegiatan promosi produk unggulan Kalteng (kegiatan)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	-	5 Kegiatan	510.000.000	7 Kegiatan	520.250.000	10 Kegiatan	582.500.000	12 Kegiatan	607.500.000	39 Kegiatan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PAGU MISI II					323.957.184.027,00	372.339.566.368,00		383.951.232.710,00		434.952.477.836,00		448.856.738.691,00					
MISI III : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MEALUI REFORMASI BIROKRASI																	
T-1			3.1 Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	3.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	CC Nilai	B Nilai		B Nilai		BB Nilai		BB Nilai		A Nilai		A Nilai	
S-1			Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predikat		BB Predikat		BB Predikat		A Predikat		A Predikat		A Predikat	
				Opini BPK	WTP Nilai	WTP Nilai		WTP Nilai		WTP Nilai		WTP Nilai		WTP Nilai		WTP Nilai	
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindakanjult Hasil Pengawasan Selesai: BPK RI	50 %	60 %	100.000.000	65 %	178.500.000	70 %	182.087.500	75 %	203.875.000	80 %	212.625.000	80 %	Inspektora t
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindakanjult Hasil Pengawasan Selesai: ITJEN Kemendagn/Teknis Lainnya	50 %	60 %	75.000.000	65 %	290.700.000	70 %	296.542.500	75 %	332.025.000	80 %	346.275.000	80 %	Inspektora t

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Selesai: Inspektorat	70 %	70 %	6.572.371.000	75 %	6.197.898.420	80 %	6.322.464.026	85 %	7.078.972.215	90 %	7.382.790.765	90 %	Inspektora t
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan	50 %	45 %	238.000.000	40 %	242.760.000	35 %	247.639.000	30 %	277.270.000	25 %	289.170.000	25 %	Inspektora t
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP Nilai	WTP Nilai	75.000.000	WTP Nilai	663.000.000	WTP Nilai	676.325.000	WTP Nilai	757.250.000	WTP Nilai	789.750.000	WTP Nilai	Inspektora t
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP	50 %	60 %	285.000.000	70 %	66.300.000	80 %	67.632.500	85 %	75.725.000	90 %	78.975.000	90 %	Inspektora t
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Level 3	Level 3	1.000.000.000	Level 3	2.015.520.000	Level 3	2.056.028.000	Level 3	2.302.040.000	Level 3	2.400.840.000	Level 3	Inspektora t
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat 3	Tingkat 3	150.000.000	Tingkat 3	270.300.000	Tingkat 3	275.732.500	Tingkat 3	308.725.000	Tingkat 3	321.975.000	Tingkat 3	Inspektora t
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP Nilai	WTP Nilai	1,626,973,585	WTP Nilai	1,700,000,000	WTP Nilai	1,800,000,000	WTP Nilai	2,100,000,000	WTP Nilai	2,180,000,000	WTP Nilai	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Keterlaksanaan (%)	100%	100%	3,545,456,244	100%	3,575,878,426	100%	3,581,913,237	100%	3,925,880,751	100%	4,104,502,242	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA	6,33 %	6,33 %	86.529.995	6,33 %	88.260.595	6,33 %	90.034.460	6,33 %	100.807.444	6,33 %	105.133.944	6,33 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA terhadap APBD	6,33 %	6,33 %	177.611.212	6,33 %	181.163.436	6,33 %	184.804.466	6,33 %	206.917.062	6,33 %	215.797.623	6,33 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja pendidikan (20%)	30,96 %	30,96 %	1.182.947.177	30,96 %	1.206.606.121	30,96 %	1.230.856.538	30,96 %	1.378.133.461	30,96 %	1.437.280.820	30,96 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja kesehatan (10%)	10,03 %	10,03 %	765.449.790	10,03 %	780.758.786	10,03 %	796.450.506	10,03 %	891.749.005	10,03 %	930.021.495	10,03 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	2.809.710.524	Tepat Waktu	2.865.904.734	Tepat Waktu	2.923.503.800	Tepat Waktu	3.273.312.760	Tepat Waktu	3.413.798.287	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	1.034.427.616.789	14 Kab/Kota	1.095.809.156.924	14 Kab/Kota	1.213.476.459.429	14 Kab/Kota	1.222.660.416.062	14 Kab/Kota	1.264.124.414.400	14 Kab/Kota	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Dokumen Jasa Administrasi Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	4.654.303.580	4 Dokumen	4.747.389.652	4 Dokumen	4.842.802.875	4 Dokumen	5.422.263.671	4 Dokumen	5.654.978.850	4 Dokumen	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
4	1	8	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Dokumen Data Pelaporandan Data Capaian Realisasi Keuangan dan Pembangunan yang tepat waktu	100 %	100 %	2.098.406.400	100 %	2.140.374.528	100 %	2.183.391.859	100 %	2.444.643.456	100 %	2.549.563.776	100 %	Sekretariat Daerah
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen hasil Perencanaan pembangunan daerah (dokumen)	20 Dokumen	20 Dokumen	2.891.160.000	20 Dokumen	3.458.983.200	20 Dokumen	3.528.501.980	20 Dokumen	3.950.701.400	20 Dokumen	4.120.259.400	20 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (dokumen)	13 Dokumen	13 Dokumen	499.000.000	13 Dokumen	1.120.980.000	13 Dokumen	1.143.509.500	13 Dokumen	1.280.335.000	13 Dokumen	1.335.285.000	13 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	87 %	90 %	2.377.511.000	95 %	2.935.061.220	100 %	2.994.050.196	100 %	3.352.300.315	100 %	3.496.175.865	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase optimalisasi penerimaan pendapatan daerah (%)	100 %	100 %	12.561.064.801	100 %	12.812.286.097	100 %	13.069.787.925	100 %	14.633.640.493	100 %	15.261.693.733	100 %	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026						
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio kemandirian keuangan daerah (%)	36 %	40 %	13.558.080.823	42.3 %	13.829.242.439	44.2 %	14.107.183.096	46.4 %	15.795.164.159	47.5 %	16.473.068.200	47.5 %	Badan Pendapatan Daerah	
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	indeks kepuasan pelayanan (%)	85 %	90 %	850.000.000	91.2 %	867.000.000	93.1 %	884.425.000	94.5 %	990.250.000	95.2 %	1.032.750.000	95.2 %	Badan Pendapatan Daerah	
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah dokumen peraturan daerah dan peraturan DPRD	100 %, 1 Tahun	100 %, 1 Tahun	30.123.283.900	100 %, 1 Tahun	30.725.749.578	100 %, 1 Tahun	31.343.276.898	100 %, 1 Tahun	35.093.625.744	100 %, 1 Tahun	36.599.789.939	100 %, 1 Tahun	Sekretariat DPRD	
S - 2			Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	85%	87 %		88 %		90 %		92 %		94 %		94 %		
				Indeks Profesionalisme ASN	74,69%	75,5 %		76 %		78 %		78 %		79 %		79 %		
				Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	63,50%	69,21 %		71,68 %		74,79 %		78,69 %		84,82 %		84,82 %		
				Jumlah Kajian Kelitbangan	2 Kajian	2 Kajian		4 Kajian		4 Kajian		4 Kajian		5 Kajian		5 Kajian		
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN	75 %	75.5 %	2.078.720.000	76 %	2.120.294.400	77.7 %	2.162.908.160	78 %	2.421.708.800	78.5 %	2.525.644.800	78.5 %	Badan Kepegawaian Daerah	
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (orang)	200 Orang	300 Orang	50.000.000	400 Orang	51.000.000	500 Orang	52.025.000	600 Orang	58.250.000	700 Orang	60.750.000	700 Orang	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	200 Orang	200 Orang	52.498.000	300 Orang	53.547.960	400 Orang	54.624.169	500 Orang	61.160.170	600 Orang	63.785.070	700 Orang	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (Tema:Protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang diseminasikan sesuai strategi komunikasi	70 %	75 %	1.850.000.000	80 %	1.887.000.000	85 %	1.924.925.000	90 %	2.155.250.000	95 %	2.247.750.000	95 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh dinas provinsi dan Kab/Kota sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi komunikasi publik	70 %	75 %	1.211.100.000	80 %	1.235.322.000	85 %	1.260.149.550	90 %	1.410.931.500	95 %	1.471.486.500	95 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase mitra strategis Pemda termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	75 %	80 %	16.516.840.635	85 %	16.847.177.448	90 %	17.185.772.681	95 %	19.242.119.340	100 %	20.067.961.372	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemda	70 %	75 %	1.250.000.000	80 %	1.275.000.000	85 %	1.300.625.000	90 %	1.456.250.000	95 %	1.518.750.000	95 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Statistik Sektoral	100 %	100 %	30.000.000	100 %	30.600.000	100 %	31.215.000	100 %	34.950.000	100 %	36.450.000	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengamanan informasi	100 %	100 %	205.400.000	100 %	209.508.000	100 %	213.718.700	100 %	239.291.000	100 %	249.561.000	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	65,00 %	68 %	85.000.000	70,35 %	400.000.000	73,11 %	400.000.000	75,65 %	400.000.000	78,25 %	400.000.000	78,25 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	66,67 %	70,42 %	90.000.000	73 %	250.000.000	76,47 %	250.000.000	81,73 %	250.000.000	91,38 %	250.000.000	91,38 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Instansi/Lembaga yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	1 Instansi/Lembaga	2 Instansi/Lembaga	176.000.000	5 Instansi/Lembaga	400.000.000	7 Instansi/Lembaga	400.000.000	10 Instansi/Lembaga	400.000.000	15 Instansi/Lembaga	400.000.000	15 Instansi/Lembaga	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyediaan data kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	100 %	100 %	94.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan diklat	80 %	80 %	677.348.400	85 %	690.895.368	85 %	704.781.010	90 %	789.110.886	90 %	822.978.306	90 %	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peserta Pelatihan Jabatan fungsional sosial kultural yang lulus post test	80 %	80 %	70.375.000	85 %	71.782.500	85 %	73.225.188	90 %	81.986.875	90 %	85.505.625	90 %	
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test	75 %	75 %	1.009.995.000	80 %	1.030.194.900	80 %	1.050.899.798	85 %	1.176.644.175	85 %	1.227.143.925	85 %	
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	80 %	80 %	17.527.816.005	85 %	17.878.372.325	85 %	18.237.692.553	90 %	20.419.905.646	90 %	21.296.296.446	90 %	

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset yang diimplementasikan	35 %	40 %	1.339.917.000	45 %	2.386.715.340	50 %	2.434.683.639	60 %	2.726.003.305	65 %	2.842.999.155	65 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	1	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Jumlah fasilitasi pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	9 Kegiatan	9 Kegiatan	3.226.410.400	9 Kegiatan	3.674.218.398	9 Kegiatan	3.865.000.000	9 Kegiatan	4.196.533.759	9 Kegiatan	4.376.642.504	9 Kegiatan	Sekretariat Daerah
4	1	7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pengadaan Tepat Waktu	0 %	20 %	753.000.000	50 %	768.060.000	75 %	783.496.500	100 %	877.245.000	100 %	914.895.000	100 %	Sekretariat Daerah
4	1	7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	0 %	100 %	1.410.000.000	100 %	1.438.200.000	100 %	1.467.105.000	100 %	1.642.650.000	100 %	1.713.150.000	100 %	Sekretariat Daerah
4	1	2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik	100 %	100 %	1.217.457.000	100 %	1.241.806.140	100 %	1.266.764.009	100 %	1.418.337.405	100 %	1.479.210.255	100 %	Sekretariat Daerah
4	1	5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum	100 %	100 %	2.066.830.450	100 %	2.108.167.059	100 %	2.150.537.083	100 %	2.407.857.474	100 %	2.511.198.997	100 %	Sekretariat Daerah
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan administrasi pemerintahan G2G yang diimplementasikan	65 %	65 %	50.000.000	75 %	51.000.000	80 %	52.025.000	85 %	58.250.000	90 %	60.750.000	90 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2022		2023		2024		2025		2026						
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik G2B yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	65 %	70 %	4.274.091.667	75 %	4.359.573.500	85 %	4.447.192.380	90 %	4.979.316.792	95 %	5.193.021.375	95 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	80 %	85 %	60.650.000	90 %	61.863.000	95 %	63.106.325	98 %	70.657.250	100 %	73.689.750	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
5	7	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jumlah layanan informasi dan promosi	30 Orang	50 Orang	614.460.500	100 Orang	626.749.710	150 Orang	639.346.150	200 Orang	715.846.483	250 Orang	746.569.508	250 Orang	Badan Penghubung	
5	7	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jumlah yang mendapat fasilitasi layanan penghubung	1.000 Orang	2.000 Orang	466.170.000	2.100 Orang	475.493.400	2.200 Orang	485.049.885	2.300 Orang	543.088.050	2.400 Orang	566.396.550	2.400 Orang	Badan Penghubung	
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	794.308.559.174	100 %	810.194.730.357	100 %	826.478.055.821	100 %	925.369.471.438	100 %	965.084.899.396	100 %	Dinas Pendidikan
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	26.053.471.200	100 %	26.574.540.624	100 %	27.108.636.784	100 %	30.352.293.948	100 %	31.654.967.508	100 %	Dinas Kesehatan
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	43.063.819.500	100 %	43.925.091.810	100 %	44.807.900.028	100 %	50.169.345.058	100 %	52.322.535.833	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	11.472.563.000	100 %	11.702.014.260	100 %	11.937.201.802	100 %	13.365.535.895	100 %	13.939.164.045	100 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	9.711.126.000	100 %	10.500.000.000	100 %	12.600.000.000	100 %	15.120.000.000	100 %	18.144.000.000	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya	0 %	30 %	249.798.500	45 %	254.794.470	50 %	259.915.339	75 %	291.015.253	85 %	303.505.178	85 %	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penduduk miskin perdesaan	5,38 %	5,3 %	340.000.000	5,25 %	346.800.000	5,2 %	353.770.000	5,1 %	396.100.000	5 %	413.100.000	5 %	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penduduk miskin perkotaan	4,86 %	4,8 %	161.884.600	4,75 %	165.122.292	4,7 %	168.440.926	4,65 %	188.595.559	4,60 %	196.689.789	4,6 %	Dinas Sosial
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %	1.330.737.950	100 %	5.437.352.709	100 %	5.546.632.837	100 %	6.210.309.712	100 %	6.476.846.609	100 %	Dinas Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	102.000.000	1 Unit	104.050.000	1 Unit	116.500.000	1 Unit	121.500.000	1 Unit	Dinas Sosial

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2022		2023		2024		2025		2026						
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah TMP yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	80.000.000	1 Unit	81.600.000	1 Unit	83.240.000	1 Unit	93.200.000	1 Unit	97.200.000	1 Unit	Dinas Sosial	
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	22.250.167.533	100 %	22.695.170.884	100 %	23.151.299.318	100 %	25.921.445.176	100 %	27.033.953.553	100 %	Dinas Sosial
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	18.257.399.000	100 %	18.622.546.980	100 %	18.996.823.660	100 %	21.269.869.835	100 %	22.182.739.785	100 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	11.066.681.398	100 %	11.236.536.646	100 %	11.462.369.000	100 %	12.833.887.444	100 %	13.384.698.064	100 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	8.087.690.000	100 %	8.249.443.800	100 %	8.415.241.445	100 %	9.422.158.850	100 %	9.826.543.350	100 %	Dinas Ketahanan Pangan
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	8.771.609.419	100 %	8.947.041.607	100 %	9.126.859.600	100 %	10.218.924.973	100 %	10.657.505.444	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	5.766.502.000	100 %	5.881.832.040	100 %	6.000.045.331	100 %	6.717.974.830	100 %	7.006.299.930	100 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	9.929.422.040	100 %	10.128.010.481	100 %	10.331.563.633	100 %	11.567.776.677	100 %	12.064.247.779	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	12.670.530.552	100 %	13.250.708.363	100 %	13.517.021.619	100 %	15.134.387.493	100 %	15.783.932.021	100 %	Dinas Perhubungan
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	11.762.374.698	100 %	11.997.622.192	100 %	12.238.750.873	100 %	13.703.166.523	100 %	14.291.285.258	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	8.685.417.000	100 %	8.859.125.340	100 %	9.037.176.389	100 %	10.118.510.805	100 %	10.552.781.655	100 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	11.342.195.800	100 %	11.569.039.716	100 %	11.801.554.730	100 %	13.213.658.107	100 %	13.780.767.897	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	10.914.200.506	100 %	11.132.484.516	100 %	11.356.225.626	100 %	12.715.043.589	100 %	13.260.753.615	100 %	Dinas Pemuda dan Olahraga
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	11.709.598.000	100 %	11.943.789.960	100 %	12.183.836.719	100 %	13.641.681.670	100 %	14.227.161.570	100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	16.426.50 1.600	100 %	16.755.03 1.632	100 %	17.091. 774.91 5	100 %	19.136.8 74.364	100 %	19.958.1 99.444	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	14.674.27 3.000	100 %	14.967.75 8.460	100 %	15.268. 581.05 7	100 %	17.095.5 28.045	100 %	17.829.2 41.695	100 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	62.782.89 4.300	100 %	64.038.55 2.186	100 %	65.325. 601.51 9	100 %	73.142.0 71.860	100 %	76.281.2 16.575	100 %	Dinas Kehutanan
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	17.229.07 1.000	100 %	17.573.65 2.420	100 %	17.926. 848.37 6	100 %	20.071.8 67.715	100 %	20.933.3 21.265	100 %	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	14.418.19 5.000	100 %	14.706.55 8.900	100 %	15.002. 131.89 8	100 %	16.797.1 97.175	100 %	17.518.1 06.925	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	137.313.5 57.145	100 %	140.314.7 85.300	100 %	143.13 4.837.3 58	100 %	160.261. 494.975	100 %	167.139. 670.725	100 %	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	15.755.19 1.000	100 %	16.070.29 4.820	100 %	16.393. 276.23 6	100 %	18.354.7 97.515	100 %	19.142.5 57.065	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	23.406.430.459	100 %	23.874.559.068	100 %	24.354.390.893	100 %	27.268.491.485	100 %	28.438.813.008	100 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	10.231.073.000	100 %	10.435.694.460	100 %	10.645.431.457	100 %	11.919.200.045	100 %	12.430.753.695	100 %	Badan Kepegawaian Daerah
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	52.319.049.100	100 %	53.365.430.082	100 %	54.437.970.589	100 %	60.951.692.202	100 %	63.567.644.657	100 %	Sekretariat DPRD
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	23.825.288.000	100 %	23.042.093.760	100 %	23.505.194.664	100 %	26.317.685.520	100 %	27.447.199.920	100 %	Inspektora t
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	145.000.000.000	100 %	147.900.000.000	100 %	150.872.500.000	100 %	168.925.000.000	100 %	176.175.000.000	100 %	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	25.690.909.000	100 %	26.305.176.780	100 %	26.833.859.255	100 %	30.044.638.185	100 %	31.334.107.635	100 %	RSJ Kalawa Atei
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	22.399.623.000	100 %	22.847.615.460	100 %	23.306.807.732	100 %	26.095.560.795	100 %	27.215.541.945	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	32.730.307.000	100 %	33.384.913.140	100 %	34.055.884.434	100 %	38.130.807.655	100 %	39.767.323.005	100 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	77.881.122.569	100 %	79.438.745.020	100 %	81.035.308.033	100 %	90.731.507.793	100 %	94.625.563.921	100 %	Badan Pendapatan Daerah
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	12.932.549.595	100 %	13.191.200.587	100 %	13.456.317.854	100 %	15.066.420.278	100 %	15.713.047.758	100 %	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	124,300,477,250	100 %	129,322,566,745	100 %	132,371,451,665	100 %	148,351,264,959	100 %	155,568,057,446	100 %	Sekretariat Daerah
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	8.171.884.500	100 %	8.335.322.190	100 %	8.502.845.822	100 %	9.520.245.443	100 %	9.928.839.668	100 %	Badan Penghubung
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	15.712.129.000	100 %	16.026.371.580	100 %	16.348.470.225	100 %	18.304.630.285	100 %	19.090.236.735	100 %	Dinas Perkebunan
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	7.841.573.600	100 %	7.998.405.072	100 %	8.159.157.317	100 %	9.135.433.233	100 %	9.527.511.907	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
S - 3	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan masyarakat	Indeks Inovasi Digital Daerah	64,53%	79,43 %		79,61 %		81,11 %		83,27 %		83,27 %		83,27 %			
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengimplemetasikan /replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	100 %	100 %	100.000.000	100 %	102.000.000	100 %	104.050.000	100 %	116.500.000	100 %	121.500.000	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
PAGU MISI III				3.080.101.484.615,00	3.194.019.304.678,00	3.356.288.061.870,00	3.622.746.908.344,00	3.770.392.266.861,00									
MISI IV : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING																	
T - 1	4.1. Meningkatkan kualitas SDM	4.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,05 %	72,36 %		72,89 %		73,42 %		73,95 %		74,48 %		74,48 %			
		4.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	4,58 %	4,10 %		4,00 %		3,90 %		3,70 %		3,50 %		3,50 %			
S - 1	Meningkatnya kulaitas pendidikan, kesehatan dan pekerjaan penduduk	Indeks Pendidikan	0,638 Indeks	0,657 Indeks		0,677 Indeks		0,682 Indeks		0,687 Indeks		0,692 Indeks		0,692 Indeks			
		Indeks kesehatan	0,765 Indeks	0,769 Indeks		0,772 Indeks		0,776 Indeks		0,781 Indeks		0,786 Indeks		0,786 Indeks			
		Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	74,06 Angka Indeks	78 Angka Indeks		80 Angka Indeks		81 Angka Indeks		82 Angka Indeks		82,50 Angka Indeks		82,50 Angka Indeks			
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang berakreditasi Minimal B (%)	64,48 %	70 %	194.566.266.518	80 %	198.457.591.849	90 %	202.446.200.312	95 %	226.669.700.494	100 %	236.398.013.820	100 %	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Terakreditasi (%)	31,27 %	45 %	85.609.157.268	50 %	87.321.340.413	55 %	89.076.328.137	60 %	99.734.668.217	65 %	104.015.126.081	65 %	
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Lulusan SMK yang lulus Sertifikasi Uji Kompetensi Keahlian (%)	70 %	75 %	108.957.109.250	77 %	111.136.251.435	79 %	117.667.534.674	81 %	126.935.032.277	83 %	132.382.887.739	83 %	
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Bimtek implementasi Kurikulum 2013 dan Muatan Lokal	200 Orang	250 Orang	3.457.466.190	300 Orang	3.526.615.514	350 Orang	3.597.493.571	400 Orang	4.027.948.111	450 Orang	4.200.821.421	450 Orang	Dinas Pendidikan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang Bersertifikasi	42,46 %	55,36 %	100.000.000	66,50 %	102.000.000	77,67 %	104.050.000	86,63 %	116.500.000	100 %	121.500.000	100 %	Dinas Pendidikan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV	96,33 %	97 %	926.339.600	99 %	944.866.392	100 %	963.856.354	100 %	1.079.185.634	100 %	1.125.502.614	100 %	Dinas Pendidikan
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase perizinan dan pengawasan pendirian USB (Unit Sekolah Baru)	70 %	75 %	19.268.600.000	80 %	19.653.972.000	85 %	20.048.978.300	90 %	22.447.919.000	95 %	23.411.349.000	95 %	Dinas Pendidikan
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Karya Tulis	50 Buah	64 Buah	-	78 Buah	510.000.000	92 Buah	520.250.000	106 Buah	582.500.000	120 Buah	607.500.000	120 Buah	Dinas Pendidikan
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Umur harapan hidup	69,84 Tahun	69,99 Tahun	45.819.836.050	70,19 Tahun	46.736.232.771	70,44 Tahun	47.675.539.410	70,74 Tahun	53.380.108.998	71,09 Tahun	55.671.100.801	71,09 Tahun	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya layanan kesehatan di rumah sakit jiwa kalawa atei melalui penyediaan sarana prasarana (persentase)	70 %	70 %	2.221.336.000	75 %	2.405.741.400	80 %	2.454.092.085	85 %	2.747.734.050	90 %	2.865.662.550	90 %	RSJ Kalawa Atei
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terakreditasinya RS	Paripurna	Paripurna	65.774.718.316	Paripurna	66.409.404.180	Paripurna	67.744.102.990	Paripurna	75.849.956.735	Paripurna	79.105.319.685	Paripurna	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Umur harapan hidup	69,84 Tahun	69,99 Tahun	6.058.027.750	70,19 Tahun	6.179.188.305	70,44 Tahun	6.303.377.874	70,74 Tahun	7.057.602.329	71,09 Tahun	7.360.503.716	71,09 Tahun	Dinas Kesehatan
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pelatihan/workshop/bimtek	80 %	80 %	9.613.442.539	85 %	11.807.419.020	90 %	12.044.724.991	90 %	13.485.924.665	95 %	14.064.719.715	95 %	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi (Persentase)	30 %	30 %	-	40 %	1.020.000.000	45 %	1.040.500.000	50 %	1.165.000.000	55 %	1.215.000.000	55 %	RSJ Kalawa Atei
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Umur harapan hidup	69,84 Tahun	69,99 Tahun	66.908.000	70,19 Tahun	68.246.160	70,44 Tahun	69.617.774	70,74 Tahun	77.947.820	71,09 Tahun	81.293.220	71,09 Tahun	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Umur harapan hidup	69,84 Tahun	69,99 Tahun	103.330.000	70,19 Tahun	105.396.600	70,44 Tahun	107.514.865	70,74 Tahun	120.379.450	71,09 Tahun	125.545.950	71,09 Tahun	Dinas Kesehatan
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Indeks Perencanaan Tenaga Kerja	9,4 Angka Indeks	9,5 Angka Indeks	35.000.000	9,6 Angka Indeks	600.000.000	9,7 Angka Indeks	620.000.000	9,75 Angka Indeks	640.000.000	9,8 Angka Indeks	665.000.000	9,8 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Indeks Penduduk dan Tenaga Kerja	7,33 Angka Indeks	7,45 Angka Indeks	233.500.000	7,77 Angka Indeks	1.050.000.000	7,88 Angka Indeks	1.255.000.000	7,99 Angka Indeks	1.450.000.000	8 Angka Indeks	1.550.000.000	8 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Indeks Pelatihan dan Kompetensi Kerja	11,04 Angka Indeks	11,43 Angka Indeks	50.000.000	12,06 Angka Indeks	2.200.000.000	12,38 Angka Indeks	3.350.000.000	12,50 Angka Indeks	3.500.000.000	12,62 Angka Indeks	3.650.000.000	12,62 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Indeks Produktifitas Tenaga Kerja	5,85 Angka Indeks	6,07 Angka Indeks	50.000.000	6,29 Angka Indeks	1.750.000.000	6,40 Angka Indeks	1.850.000.000	6,55 Angka Indeks	1.950.000.000	6,61 Angka Indeks	2.050.000.000	6,61 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Indeks Kesempatan Kerja	12,88 Angka Indeks	13,1 Angka Indeks	35.000.000	13,32 Angka Indeks	632.520.000	13,43 Angka Indeks	639.203.000	13,5 Angka Indeks	679.790.000	13,55 Angka Indeks	696.090.000	13,55 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indeks Hubungan Industrial	3,5 Angka Indeks	4 Angka Indeks	50.000.000	4,24 Angka Indeks	710.000.000	4,35 Angka Indeks	720.250.000	4,7 Angka Indeks	782.500.000	4,82 Angka Indeks	807.500.000	4,82 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indeks Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	9,26 Angka Indeks	9,48 Angka Indeks	50.000.000	9,52 Angka Indeks	510.000.000	9,56 Angka Indeks	520.250.000	9,60 Angka Indeks	582.500.000	9,64 Angka Indeks	607.500.000	9,64 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indeks Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00 Angka Indeks	10,00 Angka Indeks	125.000.000	10,00 Angka Indeks	857.000.000	10,00 Angka Indeks	864.175.000	10,00 Angka Indeks	907.750.000	10,00 Angka Indeks	925.250.000	10,00 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Indeks Kondisi Lingkungan Kerja	6,76 Angka Indeks	6,98 Angka Indeks	200.000.000	7,20 Angka Indeks	557.000.000	7,30 Angka Indeks	564.175.000	7,41 Angka Indeks	607.750.000	7,47 Angka Indeks	625.250.000	7,47 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	77,19 %	80,70 %	1.872.950.000	84,21 %	1.910.409.000	87,71 %	1.948.804.475	92,98 %	2.181.986.750	100 %	2.275.634.250	100 %	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cakupan pembinaan olahraga	51,42 %	71,42 %	7.277.184.494	85,71 %	7.422.728.184	100 %	7.571.910.466	100 %	8.477.919.936	100 %	8.841.779.160	100 %	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase cakupan pembinaan kepramukaan (%)	100 %	100 %	3.000.000.000	100 %	3.060.000.000	100 %	3.121.500.000	100 %	3.495.000.000	100 %	3.645.000.000	100 %	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan (pemustaka)	25.675 Orang	26.675 Orang	195.947.500	27.675 Orang	199.866.450	28.675 Orang	203.883.374	29.675 Orang	228.278.838	31.000 Orang	238.076.213	31.000 Orang	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Buku yang dibaca di perpustakaan (eksemplar)	39.916 Eksamplar	120.000 Eksamplar	152.825.000	146.000 Eksamplar	155.881.500	147.000 Eksamplar	159.014.413	150.000 Eksamplar	178.041.125	155.000 Eksamplar	185.682.375	155.000 Eksamplar	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Lembaga/Perpustakaan yang diberikan Pembinaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	n/a Lembaga/Perpustakaan	5 Lembaga/Perpustakaan	200.816.500	14 Lembaga/Perpustakaan	204.832.830	24 Lembaga/Perpustakaan	208.949.568	34 Lembaga/Perpustakaan	233.951.223	44 Lembaga/Perpustakaan	243.992.048	54 Lembaga/Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pengunjung terhadap perpustakaan	80,13 %	70 %	148.411.000	80 %	151.379.220	95 %	154.421.646	100 %	172.898.815	100 %	180.319.365	100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Koleksi Bacaan yang tersedia di perpustakaan (judul)	31.145 judul	30.000 judul	199.500.000	32.000 judul	203.490.000	35.000 judul	207.579.750	50.000 judul	232.417.500	60.000 judul	242.392.500	70.000 judul	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Total Fertility rate (TFR)	2,1 %	2,1 %	198.477.300	2,06 %	202.446.846	2 %	206.515.631	1,96 %	231.226.055	1,96 %	241.149.920	1,96 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)	5,36 %	5,36 %	136.994.500	5,36 %	139.734.390	5,18 %	142.542.777	5 %	159.598.593	5,01 %	166.448.318	5,01 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32 Indeks (Skala 1-100)	60,32 Indeks (Skala 1-100)	147.287.500	60,32 Indeks (Skala 1-100)	150.233.250	62,44 Indeks (Skala 1-100)	153.252.644	64,55 Indeks (Skala 1-100)	171.589.938	64,55 Indeks (Skala 1-100)	178.954.313	64,55 Indeks (Skala 1-100)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
																dan Keluarga Berencana	
PAGU MISI IV					556.901.431.275,00		579.051.787.709,00		596.325.589.081,00		662.341.306.553,00		690.767.864.774,00				
MISI V : MENEGUHKAN KALTENG YANG BERIMAN, BERBUDAYA DAN BERKESETARAAN GENDER																	
T - 1	5.1 Meningkatkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial budaya bermasyarakat.	5.1.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,82 %	77,97 %		78,02 %		78,07 %		78,12 %		78,17 %		78,17 %			
S - 1	Meningkatnya kualitas keharmonisan umat beragama	Nilai Toleransi	76,52 Angka	76,65 Angka		76,7 Angka		76,8 Angka		76,9 Angka		77 Angka		77 Angka			
		Nilai Kesetaraan	78,37 Angka	78,49 Angka		78,55 Angka		78,61 Angka		78,67 Angka		78,73 Angka		78,73 Angka			
		Nilai Kerjasama	78,57 Angka	78,71 Angka		78,78 Angka		78,85 Angka		78,92 Angka		78,99 Angka		78,99 Angka			
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Persen)	75 %	75 %	198.514.000	80 %	202.484.280	85 %	206.553.817	90 %	231.268.810	95 %	241.194.510	95 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,76%	56,76 %		57,26 %		58,76 %		58,26 %		58,76 %		58,76 %	
S - 2																	
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Peningkatan Kebudayaan Unggulan	0,05 %	0,05 %	5.073.000.000	0,05 %	5.174.460.000	0,05 %	5.278.456.500	0,05 %	5.910.045.000	0,05 %	6.163.695.000	0,05 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	0,021 Pagelaran seni dan budaya	0,022 P agelaran seni dan budaya	-	0,023 P agelaran seni dan budaya	3.060.000.000	0,024 P agelaran seni dan budaya	3.121.500.000	0,025 Pa gelaran seni dan budaya	3.495.000.000	0,026 P agelaran seni dan budaya	3.645.000.000	0,026 Pa gelaran seni dan budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase Peningkatan Pemingkatan Sejarah	2 %	2 %	-	2 %	-	2 %	2.601.250.000	2 %	2.912.500.000	2 %	3.037.500.000	2 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase Peningkatan Pemerhati Cagar Budaya	2 %	2 %	575.000.000	2 %	586.500.000	2 %	598.287.500	2 %	669.875.000	2 %	698.625.000	2 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah Kuno yang Terlestarikan (Naskah)	0 Naskah	1 Naskah	59.500.000	1 Naskah	60.690.000	1 Naskah	61.909.750	1 Naskah	69.317.500	1 Naskah	72.292.500	5 Naskah	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD menerapkan arsip secara baku sesuai standar kearsipan	95 %	96 %	104.233.000	97 %	106.317.660	98 %	108.454.437	99 %	121.431.445	100 %	126.643.095	100 %	
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	95 %	96 %	92.524.000	97 %	94.374.480	98 %	96.271.222	99 %	107.790.460	100 %	112.416.660	100 %	
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase Peningkatan Komunitas Museum	5 %	5 %	1.900.000.000	5 %	1.938.000.000	5 %	1.976.950.000	5 %	2.213.500.000	5 %	2.308.500.000	5 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
T - 2		5.2. Meningkatkan kesetaraan gender		5.2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,03 %	89,07 %		89,09 %		89,11 %		89,13 %		89,15 %		89,15 %	
S - 1		Meningkatnya pemberdayaan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender	79,67%	81,90 %		81,92 %		81,94 %		81,96 %		81,98 %		81,98 %	

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah (orang)	20 Orang	25 Orang	1.283.531.350	30 Orang	1.309.201.977	35 Orang	1.335.514.370	40 Orang	1.495.314.023	44 Orang	1.559.490.590	44 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan (%)	85 %	85 %	732.330.621	87,5 %	746.977.233	90 %	761.990.011	92,5 %	853.165.173	95 %	889.781.705	95 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah peserta Pelatihan Usaha Perempuan (orang)	30 Orang	35 Orang	157.547.750	40 Orang	160.698.705	45 Orang	163.928.434	50 Orang	183.543.129	60 Orang	191.420.516	60 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Hasil Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	9 Dokumen	11 Dokumen	218.245.000	12 Dokumen	222.609.900	13 Dokumen	227.083.923	14 Dokumen	254.255.425	14 Dokumen	265.167.675	14 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	4 Kab/Kota	6 Kab/Kota	360.341.370	8 Kab/Kota	367.548.197	10 Kab/Kota	374.935.195	12 Kab/Kota	419.797.696	14 Kab/Kota	437.814.765	14 Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)	50 %	50 %	527.592.211	55 %	589.622.435	60 %	601.472.690	65 %	673.441.311	70 %	702.344.371	70 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Total Fertility rate (TFR)	2,1 %	2,1 %	198.477.300	2,06 %	202.446.846	2 %	206.515.631	1,96 %	231.226.055	1,96 %	241.149.920	1,96 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Awal	Proyeksi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (Target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026				
				2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
																dan Keluarga Berencana
PAGU MISI V				11.282.359.302,00	14.619.484.867,00	17.514.557.849,00	19.610.244.972,00	20.451.886.387,00								
PAGU RPJMD TAHUNAN				5.191.681.877.531,00	5.374.733.269.588,00	5.584.133.916.411,00	6.074.137.042.182,00	6.283.625.323.438,00								

Tabel 6.7 Penyeragaman Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024	INDIKATOR	TARGET		RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM		2020	2024	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			BAB 2 MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS									
A Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan												
1	pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan	porsi EBT dalam bauran energi nasional (7. 2.1*)	13,40%	20%	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
		penyediaan energi nasional	287,2 MTOE	375,9 MTOE	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	89,01	91,2	93,39	95,58	97,77	100
		kapasitas terpasang pembangkit EBT	14,5 GW	37,3 GW		Rasio Desa Berlistrik (%)	93,79	95,03	96,27	97,51	98,75	100
		produksi biodiesel	7,7 juta kilo liter	10,8 juta kilo liter	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase perusahaan pengelolaan kegologian yang taat aturan	80	82	85	87	90	90
		produksi bioetanol	0,8 juta kilo liter	2,7 juta kilo liter	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) (%)	7	9	12	15	18	20
		intensitas energi primer (7.3.1*)	421SBM/Rp. Milliar	404 SBM/Rp. Milliar	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Jumlah pertimbangan teknis ijin usaha	379	382	386	391	397	404
		intensitas energi final	225 SBM/Rp. Milliar	213 SBM/Rp. Milliar								
		domestic market obligation (DMO) Batubara	44,90%	50.8%								

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024	INDIKATOR	TARGET		RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET						
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM		2020	2024	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		domestik market obligation (DMO) gas untuk industri	27%	31%									
		TKDN sektor pembangkit EBT	30%	40%									
2	peningkatan kuantitas/ ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	produktivitas air	US\$4/m3	US\$5,4/m3									
		luas lahan tutupan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi**	65 juta ha	65 juta ha	Program Pengelolaan Hutan	Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (hektar)	448	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	
		memenuhi air untuk irigasi	0,90 kg/m3	1,12 kg/m3									
		memenuhi air untuk domestik dan kawasan industri	20 m3/detik	90 m3/detik									
		memenuhi air untuk energi (PLTA/M/MH)	5.774 MW	8.304 MW									
		koefisien limpasan	0,5-0,6	0,4									
		kapasitas tampungan air**	57,33m3/kapita	63.93 m3/kapita									
3	peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	skor pola pangan harapan (2.2.2 (c))	93,3	96,3	PERTANIAN								

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024	INDIKATOR	TARGET		RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM		2020	2024	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		angka kecukupan energi (AKE) (2.1.2 (a))	2.100 kkal/hari	2.100 kkal/hari	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	presentase peningkatan vaksin hewan	50	60	70	80	90	100
		angka kecukupan protein (AKP)	57 gram/kapita/hari	57 gram/kapita/hari	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan populasi peternakan	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30	3,35
		prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/ PoU)	6,4	5,38		Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
		prevelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (food insecurity experience scale/FIES)	5,21	4,05	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase benih/bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat (%)	87	89	91	93	95	97
		konsumsi ikan (2.2.2(c))	58,3 kg/kapita/tahun	60,9 kg/kapita/tahun		Persentase peningkatan NTP sub sektor perkebunan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
		konsumsi daging	7,1 kg/kapita/tahun	9,7 kg/kapita/tahun	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tertanggulangi	75	75	80	80	82	85

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024	INDIKATOR	TARGET		RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM		2020	2024	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
						akibat bencana (%)						
		konsumsi sayur dan buah	260,2 gram/kapita/tahun	316,3 gram/kapita/tahun		Persentase mediasi gangguan usaha perkebunan (%)	80	80	80	80	82	85
		jumlah fortifikasi dan biofortifikasi	1 varietas unggul baru	1 varietas unggul baru		Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	70	70	75	80	82	85
		produksi beras (gabah kering giling)	59,63 juta ton	67,12 juta ton	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian yang sudah terlayani dengan baik (%)	100	100	100	100	100	100
		nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*)	Rp 36.19 juta/tenaga kerja	Rp. 45,44 juta/tenaga kerja		Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang Memperoleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) (%)	50	50	50	50	50	50
		jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*)	30 varietas unggul tanaman baru dan 10 galur hewan ternak	30 varietas unggul tanaman baru dan 10 galur hewan ternak	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang mendapat pendampingan	85	85	90	90	95	95
		tingkat adopsi teknologi pertanian oleh petani	80%	95%		Jumlah koperasi sektor perkebunan yang mendapat pendampingan	10	10	10	10	10	10

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024	INDIKATOR	TARGET		RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM		2020	2024	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*)	3.100 akses	3.100 akses								
		global food security index	56,9	64,1								
4	peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan	konservasi kawasan kelautan (14.5.1*)	22,0 juta ha	24,5 juta ha	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
		pengelola WPP (14.2.1(b))	11 unit	11 unit	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	0	2	4	5	6	7
		integrasi rencana tata ruang (RTRW) dan rencana zonasi (RZ) serta penyelesaian perencanaan tata ruang laut dan zonasi pesisir	0 RTRW RZ	10 RTRW RZ	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	130.526,10	133.136,62	137.130,72	141.244,64	145.244,64	149.486,44
		pemetaan bathimetri prioritas skala 1:50.000	63%	100%		Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	107	108,25	109,5	110,75	112	113,25
		proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman (14.4.1*)	64%	80%	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	119.876,05	128,008,34	136,140,63	144,272,92	152,405,21	160,537,50

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024	INDIKATOR	TARGET		RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM		2020	2024	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		produksi ikan	15,5 juta ton	19,6 juta ton		Jumlah kebutuhan benih (ekor)	67,630	69,820	72,010	74,200	76,390	78,580
		produksi rumput laut	15,8 juta ton	20,0 juta ton	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	85	85	85	85	90	90
		produksi garam	3,0 juta ton	3,8 juta ton		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok)	40	45	48	52	58	60
		jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan (14.b.1(a))	34 provinsi	34 provinsi	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	49,63	55,81	57,62	59,43	61,23	63,04
						Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	34,450,00	34,761,84	35,073,68	35,385,52	35,697,36	36,009,20
						Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,1	3,2	3,30	3,40	3,50	3,60
		jumlah hasil riset yang	5 hasil riset	10 hasil riset								

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024	INDIKATOR	TARGET		RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM		2020	2024	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian				PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							
1	penguatan kewirausahaan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM)	rasio kewirausahaan nasional	3,55-3,80	3,75-4,15%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan di Kalteng meliputi pasar, gudang, distributor dan perdagangan besar (sarana perdagangan)	2,035	2,239	2,462	2,709	2,979	3,277
		indeks motivasi berusaha	11,48	12,55	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk	Jumlah kegiatan promosi produk unggulan Kalteng (kegiatan)	2	3	5	7	10	12
		pertumbuhan wirausaha baru	3%	5%	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor barang dan jasa Kalteng (juta US\$)	2.427,42	2.618,76	2.810,10	3.001,44	3.192,78	3,25
		presentase UMKM yang melakukan kemitraan	7%	10%		Nilai Impor barang dan Jasa Kalteng (juta US\$)	48,1	52,91	58,2	64,03	70,43	75
		rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (8.10.1(b))	19,75%	22%	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah kegiatan pemantauan terhadap Bapokting (kegiatan)	260	260	260	260	260	260
		proporsi IKM dengan pinjaman/kredit (9.3.2*)	2,35%	5%	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perizinan & pendaftaran perusahaan yang	100	100	100	100	100	100

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024	INDIKATOR	TARGET		RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM		2020	2024	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
						terfasilitasi dg baik (%)						
		pertumbuhan volume usaha koperasi	20%	25%	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha yg mendapat pengawasan (pelaku Usaha)	98	103	108	113	119	122
						Jumlah contoh/ sampel komoditi ekspor yg akan diuji (sampel)	1,568	1,646	1,728	1,815	1,905	1,95
						Jumlah UUT (alat ukur) yg dikalibrasi (alat)	550	578	607	637	669	680
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi Kalimantan Tengah	50	50	50	50	50	50
					Program Pengendalian Izin	Presentase Izin Usaha Industri yang terfasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Industri Kalteng yang menggunakan aplikasi SIINAS (Kab/Kota)	14	14	14	14	14	14
		jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) diluar jawa yang beroperasi	10 sentra	50 sentra (kumulatif 2020-2024)	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							
		proporsi nilai tambah IKM terhadap total	18,50%	20%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	Persentase Kontribusi UMKM di Kalteng	46,33	12,00	12,35	13,15	14,00	15,75

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024	INDIKATOR	TARGET		RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET							
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			2020	2024										
		nilai tambah industri (9.3.1*)			Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	terhadap pertumbuhan PDRB (%)								
						Jumlah Wirausaha (Unit)	70,342	71,495	78,644	86,508	95,158	104,674		
						Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	66,67	48	57,8	69,36	83,232	83,232		
						Persentase Pertumbuhan Wirausaha	9,76	9,99	9,99	9,99	9	9,99		
						Persentase Rasio Kewirausahaan	5,09	5,09	5,52	5,98	6,49	7,03		
					Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Unit)	3,672	4,2	4,242	4,285	4,328	4,371		
						Jumlah UMKM yang di dampingi (Unit)	370	480	480	480	480	480		
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Lembaga keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USP-Kop/KJKS) (Unit)	2,543	2	2,584	2,609	2,634	2,659		
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	76,19	83,21	83,71	84,21	84,71	85,71		
						Pertumbuhan Koperasi (Unit)	82	50	50	50	50	50		
					Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Presentase koperasi yang memiliki kategori	16,51	17,50	19,00	21,50	25,00	27,50		

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024	INDIKATOR	TARGET		RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM		2020	2024	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
						sehat/Berkualitas (%)						
						Koperasi berprestasi tingkat provinsi dan nasional (unit)	12	12	12	12	12	12
					Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih (Orang)	390	240	240	240	240	240
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset (%)	1,50	1,75	2,00	2,25	2,25	2,25
						Koperasi Modern (Unit)	-	2	2	3	3	3
						Persentase Kontribusi Koperasi di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%)	3,15	1,50	1,65	1,85	2,00	2,25
		kontribusi usaha sosial	1,90% PDB	2,50% PDB								
2	peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialiasasi	pertumbuhan PDB pertanian	3,77-3,79%	3,90-4,03%	PARIWISATA							
		kontribusi PDB kemaritiman	6,50%	7,80-9,00%	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase Peningkatan Kebudayaan Unggulan	5%	5%	5%	5%	5%	5%

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024	INDIKATOR	TARGET		RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM		2020	2024	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		pertumbuhan PDB industri (9.2.1(a))	5,00-5,40%	5,93-8,35%	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Presentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	2,1%	2,2%	2,3%	2,4%	2,5%	2,6%
		kontribusi PDB industri (9.2.1*)	19,82-19,85%	20,06-21,28%	Program Pembinaan Sejarah	Presentase Peningkatan Pemeringkatan Sejarah	2%	2%	2%	2%	2%	2%
					Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Presentase Peningkatan Pemerhati Cagar Budaya	2%	2%	2%	2%	2%	2%
					Program Pengelolaan Permuseuman	Presentase Peningkatan Komunitas Museum	5%	5%	5%	5%	5%	5%
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	354,414	419,172	484,404	549,636	614,868	680,100
					Program Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang di promosikan (%)	80	85	90	95	100	100
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase tempat wisata yang dikelola	85	90	92,5	95	97,5	100
		pertumbuhan PDB subsektor industri non migas	5,58-6,00%	6,11-8,36%	PENANAMAN MODAL							
		pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman	8,09-8,22%	8,57-8,79%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan (%)	80	80	81	81	82	82
		kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*)	4,80%	5,50%		Jumlah Perizinan yang Terbit Tetap Waktu (Dokumen)	618	595	595	595	595	595

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024	INDIKATOR	TARGET		RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM		2020	2024	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		destinasi pariwisata prioritas	10 destinasi	10 destinasi	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	4	4	4	4	4	4
		revitalisasi destinasi	0 destinasi	1 destinasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tersedianya dokumen peta potensi Investasi	2	2	2	2	2	2
		destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis taman nasional	12 klaster	12 klaster	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	618	700	700	752	807	867
		destinasi wisata bahari	8 destinasi	8 destinasi		Jumlah nilai investasi berskala nasional (juta Rupiah)	7.420.000	7.980.000	8.300.000	8.650.000	9.100.000	9.630.000
		nilai tambah ekonomi kreatif	Rp. 1.305- Rp.1.307 triliun	Rp. 1.840- 1.890 triliun		PMDN dalam juta Rupiah	5.194.000	5.586.000	5.810.000	6.055.000	6.370.000	6.741.000
		pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi	7,26- 7,54%	7,54-8,78%		PMA dalam US \$ Ribu	152.465,75	163.972,60	170.547,95	177.739,73	186.986,30	197.876,71
		pertumbuhan investasi (PMTB)	7,0-7,3%	6,95-8,94%		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Investasi	40	7,55	4,01	4,22	5,20	5,82
		peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (ranking EoDB)	menuju 40	menuju 35	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah informasi data yang dikelola dengan baik	5	5	5	5	5	5
		realisasi PMA dan PMDN	Rp. 872,6 - Rp. 878,5 triliun	Rp. 1.353,5- Rp.1.506,4 triliun								
		kontribusi PMDN terhadap	46,2- 46,3%	49,1-49,6%								

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024	INDIKATOR	TARGET		RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM		2020	2024	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		total realisasi PMA dan PMDN										
		kontribusi realisasi PMA dan PMDN sektor manufaktur	37,30%	56,7-61,0%								
		Capex BUMN	Rp.528,4-565,1 triliun	Rp.744,7-814,0 triliun								
		jumlah kawasan industri (KI) yang difasilitasi di luar jawa	5 KL dan 8 KEK industri	16 KL dan 8 KEK indusrti								
		jumlah kawasan industri halal	2 kawasan	3 kawasan								
		jumlah daerah tertib ukur (DTU)	10 DTU	10 DTU								



BAB VII



KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, maka dialokasikan anggaran untuk belanja sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD. Kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan menurut struktur belanja daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Hal ini berarti program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

a) Prioritas I

Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;

Sedangkan belanja mengikat atau *mandatory expenditure* digunakan untuk belanja pegawai Belanja dan belanja RSUD BLUD.

b) Prioritas II

Prioritas kedua ini dialokasikan untuk membiayai pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

c) Prioritas ketiga

Prioritas ketiga merupakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Rencana penggunaan kapasitas keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel bab 3 sebelumnya.

Adapun kerangka pendanaan dalam rangka pelaksanaan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Tengah

Kode Akun	Uraian Akun	APBD	Proyeksi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	Belanja	5.426.439.660.497	4,941,216,245,078	5,155,883,092,882	5,374,733,269,589	5,584,133,916,412	6,074,137,042,182	6,283,625,323,438
5.1	Belanja operasi	3.399.245.091.307	3,176,586,550,220	2,957,067,841,779	3,124,327,096,679	3,200,985,523,697	3,439,540,203,243	3,566,404,439,213
5.1.01	Belanja pegawai	1.321.557.916.761	1,300,590,007,707	1,571,830,513,258	1,611,126,276,089	1,651,404,432,992	1,692,689,543,816	1,735,006,782,412
5.1.02	Belanja barang dan jasa	1.053.924.816.712	1,082,730,134,771	1,083,180,728,746	1,110,260,246,965	1,138,016,753,139	1,325,517,590,796	1,400,051,638,830
5.1.03	Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja hibah	1.002.622.357.834	772,691,312,742	281,241,504,775	382,125,478,625	390,749,242,566	400,517,973,631	410,530,922,971
5.1.06	Belanja bantuan sosial	21.140.000.000	20,575,095,000	20,815,095,000	20,815,095,000	20,815,095,000	20,815,095,000	20,815,095,000
5.2	Belanja modal	1.155.327.868.741	913,076,407,456	1,120,511,239,283	1,265,655,395,917	1,297,296,780,815	1,574,309,622,006	1,601,421,924,032
5.2.1	Belanja Modal	1.155.327.868.741	913,076,407,456	1,120,511,239,283	1,265,655,395,917	1,297,296,780,815	1,574,309,622,006	1,601,421,924,032
		216.020.047.574	112,576,945,529	256,708,247,021	107,122,806,028	149,389,165,913	79,672,251,437	92,967,445,352
5.3	Belanja tidak terduga	216.020.047.574	112,576,945,529	256,708,247,021	107,122,806,028	149,389,165,913	79,672,251,437	92,967,445,352
5.3.1	Belanja tidak terduga	655.846.652.875	738,976,341,873	821,595,764,799	877,627,970,965	936,462,445,988	980,614,965,496	1,022,831,514,842
5.4	Belanja transfer	620.554.652.875	707,326,341,873	813,895,764,799	869,927,970,965	928,762,445,988	972,914,965,496	1,015,131,514,842
5.4.01	Belanja bagi Hasil	35.292.000.000	31,650,000,000	7,700,000,000	7,700,000,000	7,700,000,000	7,700,000,000	7,700,000,000
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	5.426.439.660.497	4,941,216,245,078	5,155,883,092,882	5,374,733,269,589	5,584,133,916,412	6,074,137,042,182	6,283,625,323,438

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020, diolah

7.2 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Program dimaksud merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Program tersebut pada bagian ini dibuat untuk masa lima tahun bagi masing-masing perangkat daerah. Masing-masing program dilengkapi dengan target indikator kinerja untuk menunjukkan sejauh mana capaian rencana pembangunan akan dicapai.

Secara lengkap program-program perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang berakreditasi Minimal B (%)	64,48 %	70 %	194.566.266.518	80 %	198.457.591.849	90 %	202.446.200.312	95 %	226.669.700.494	100 %	236.398.013.820	100 %	Dinas Pendidikan
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Terakreditasi (%)	31,27 %	45 %	85.609.157.268	50 %	87.321.340.413	55 %	89.076.328.137	60 %	99.734.668.217	65 %	104.015.126.081	65 %	Dinas Pendidikan
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Lulusan SMK yang lulus Sertifikasi Uji Kompetensi Keahlian (%)	70 %	75 %	108.957.109.250	77 %	111.136.251.435	79 %	117.667.534.674	81 %	126.935.032.277	83 %	132.382.887.739	83 %	Dinas Pendidikan
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Bimtek implementasi Kurikulum 2013 dan Muatan Lokal	200 Orang	250 Orang	3.457.466.190	300 Orang	3.526.615.514	350 Orang	3.597.493.571	400 Orang	4.027.948.111	450 Orang	4.200.821.421	450 Orang	Dinas Pendidikan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang	42,46 %	55,36 %	100.000.000	66,50 %	102.000.000	77,67 %	104.050.000	86,63 %	116.500.000	100 %	121.500.000	100 %	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Bersertifikasi															
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV	96,33 %	97 %	926.339.600	99 %	944.866.392	100 %	963.856.354	100 %	1.079.185.634	100 %	1.125.502.614	100 %	Dinas Pendidikan
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase perizinan dan pengawasan pendirian USB (Unit Sekolah Baru)	70 %	75 %	19.268.600.000	80 %	19.653.972.000	85 %	20.048.978.300	90 %	22.447.919.000	95 %	23.411.349.000	95 %	Dinas Pendidikan
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Karya Tulis	50 Buah	64 Buah	-	78 Buah	510.000.000	92 Buah	520.250.000	106 Buah	582.500.000	120 Buah	607.500.000	120 Buah	Dinas Pendidikan
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Umur harapan hidup	69,84 Tahun	69,99 Tahun	45.819.836.050	70,19 Tahun	46.736.232.771	70,44 Tahun	47.675.539.410	70,74 Tahun	53.380.108.998	71,09 Tahun	55.671.100.801	71,09 Tahun	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya layanan kesehatan di rumah sakit jiwa kalawa atei melalui penyediaan sarana prasarana (persentase)	70 %	70 %	2.221.336.000	75 %	2.405.741.400	80 %	2.454.092.085	85 %	2.747.734.050	90 %	2.865.662.550	90 %	RSJ Kalawa Atei
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terakreditasinya RS	Paripurna	Pari-purna	65.774.718.316	Paripurna	66.409.404.180	Paripurna	67.744.102.990	Paripurna	75.849.956.735	Paripurna	79.105.319.685	Paripurna	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Umur harapan hidup	69,84 Tahun	69,99 Tahun	6.058.027.750	70,19 Tahun	6.179.188.305	70,44 Tahun	6.303.377.874	70,74 Tahun	7.057.602.329	71,09 Tahun	7.360.503.716	71,09 Tahun	Dinas Kesehatan
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pelatihan/worksop/bimtek	80 %	80 %	9.613.442.539	85 %	11.807.419.020	90 %	12.044.724.991	90 %	13.485.924.665	95 %	14.064.719.715	95 %	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi	30 %	30 %	-	40 %	1.020.000.000	45 %	1.040.500.000	50 %	1.165.000.000	55 %	1.215.000.000	55 %	RSJ Kalawa Atei

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		MANUSIA KESEHATAN	(Persentase)														
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Umur harapan hidup	69,84 Tahun	69,99 Tahun	66.908.000	70,19 Tahun	68.246.160	70,44 Tahun	69.617.774	70,74 Tahun	77.947.820	71,09 Tahun	81.293.220	71,09 Tahun	Dinas Kesehatan
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Umur harapan hidup	69,84 Tahun	69,99 Tahun	103.330.000	70,19 Tahun	105.396.600	70,44 Tahun	107.514.865	70,74 Tahun	120.379.450	71,09 Tahun	125.545.950	71,09 Tahun	Dinas Kesehatan
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan Irigasi (%)	8,79 %	19,21 %	72.727.325.000	37,93 %	39.200.000.000	54,19 %	40.000.000.000	70,44 %	62.000.000.000	75,86 %	62.543.042.656	75,86 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	85,85 %	90,56 %	3.600.000.000	95,28 %	4.000.000.000	100 %	8.000.000.000	100 %	25.000.000.000	100 %	25.000.000.000	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan Ditingkatkan (unit)	1 Unit	2 Unit	2.000.000.000	3 Unit	2.000.000.000	4 Unit	3.000.000.000	5 Unit	3.500.000.000	6 Unit	3.500.000.000	6 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%)	69 %	72 %	2.800.000.000	76 %	2.800.000.000	80 %	6.000.000.000	85 %	6.500.000.000	90 %	6.500.000.000	90 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan (meter)	1.000 m	2.000 m	11.130.000.000	3.000 m	5.650.000.000	4.000 m	10.000.000.000	5.000 m	11.000.000.000	6.000 m	12.000.000.000	6.000 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi (kawasan)	2 Kawasan	3 Kawasan	59.039.645.000	4 Kawasan	91.686.045.000	5 Kawasan	71.096.845.000	6 Kawasan	70.000.000.000	7 Kawasan	70.000.000.000	7 Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	5 Unit	7 Unit	61,147,200,000	8 Unit	101,899,800,000	9 Unit	95,679,000,000	10 Unit	118,929,000,000	11 Unit	123,179,000,000	11 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Tersedianya Bangunan UPTPPD yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	11 Unit	11 Unit	3,820,377,983	12 Unit	4,571,000,000	13 Unit	5,321,000,000	14 Unit	6,071,000,000	14 Unit	6,821,000,000	14 Unit	Badan Pendapatan Daerah
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan dikelola dengan baik (unit)	5 Unit	6 Unit	36.600.000.000	7 Unit	13.000.000.000	8 Unit	15.000.000.000	9 Unit	15.000.000.000	10 Unit	15.000.000.000	10 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio konektivitas jalan provinsi	0.34 %	0.34 %	782.217.363.500	0.36 %	769.140.000.000	0.38 %	780.000.000.000	0.39 %	804.382.492.907	0.39 %	804.215.428.701	0.39 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	3	1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	530 Orang	830 Orang	3.904.300.000	1.080 Orang	3.500.000.000	1.330 Orang	3.500.000.000	1.730 Orang	7.000.000.000	2.130 Orang	7.000.000.000	2.130 Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terselenggaranya penataan ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	78 %	80 %	2.902.661.000	82 %	3.000.000.000	84 %	3.500.000.000	86 %	4.000.000.000	88 %	4.000.000.000	88 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program	100 %	100 %	200.000.000	100 %	225.000.000	100 %	240.000.000	100 %	250.000.000	100 %	260.000.000	100 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni														
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani	1 Kawasan	1 Kawasan 1.037.819.000	1 Kawasan 1.058.575.380	1 Kawasan 11.079.850.670	1 Kawasan 11.209.059.135	1 Kawasan 11.260.950.085	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Pebaikan Rumah Layak Huni	N.A	90 Unit 4.292.864.000	135 Unit 5.720.000.000	140 Unit 6.000.000.000	145 Unit 6.300.000.000	150 Unit 6.600.000.000	150 Unit	150 Unit	150 Unit	150 Unit	660 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase terselenggara nya penyediaan PSU Perumahan	80 %	85 %	6.624.991.000	88 %	17.000.000.000	94 %	21.000.000.000	98 %	22.000.000.000	100 %	22.000.000.000	100 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat Sertifikasi dan Registrasi	40 Orang	60 Orang	-	60 Orang	200.000.000	80 Orang	210.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi	100 %	100 %	600.000.000	100 %	612.000.000	100 %	1.560.779.392	100 %	699.000.000	100 %	729.000.000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %	100 %	278.676.800	100 %	474.300.000	100 %	483.832.500	100 %	541.725.000	100 %	564.975.000	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %	135.000.000	100 %	545.700.000	100 %	556.667.500	100 %	623.275.000	100 %	650.025.000	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan	100 %	100 %	350.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.440.000.000	100 %	1.728.000.000	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100 %	100 %	225.000.000	100 %	650.000.000	100 %	780.000.000	100 %	936.000.000	100 %	1.123.200.000	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																	an
1	5	3	PROGRAM PENANGGULAN BENCANA	Terselenggaranya fungsi kelembagaan	12 Bulan	12 Bulan	171.323.200	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	720.000.000	12 Bulan	864.000.000	12 Bulan	1.036.800.000	12 Bulan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
1	5	3	PROGRAM PENANGGULAN BENCANA	Tersedianya SDM terampil	10 Orang	10 Orang	100.000.000	10 Orang	750.000.000	10 Orang	750.000.000	10 Orang	750.000.000	10 Orang	750.000.000	50 Orang	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
1	5	3	PROGRAM PENANGGULAN BENCANA	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	0 %	0 %	-	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 %	100 %	240.167.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.440.000.000	100 %	1.728.000.000	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkatkan kemampuannya	60 %	70 %	812.784.854	75 %	829.040.551	75 %	845.702.641	80 %	946.894.355	85 %	987.533.598	85 %	Dinas Sosial
1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	80 %	85 %	183.787.850	85 %	187.463.607	90 %	191.231.258	90 %	214.112.845	95 %	223.302.238	95 %	Dinas Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teratasi	80 %	80 %	6.032.124.463	82 %	6.152.766.952	82 %	6.276.425.504	85 %	7.027.424.999	85 %	7.329.031.223	85 %	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial (KPM)	50.041 K PM	50.500 K PM	310.919.250	51.000 K PM	317.137.635	52.000 K PM	323.511.480	53.000 K PM	362.220.926	54.000 K PM	377.766.889	55.000 K PM	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir miskin yang meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan keberfungsian sosialnya	0 %	30 %	249.798.500	45 %	254.794.470	50 %	259.915.339	75 %	291.015.253	85 %	303.505.178	85 %	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penduduk miskin perdesaan	5,38 %	5,3 %	340.000.000	5,25 %	346.800.000	5,2 %	353.770.000	5,1 %	396.100.000	5 %	413.100.000	5 %	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penduduk miskin perkotaan	4,86 %	4,8 %	161.884.600	4,75 %	165.122.292	4,7 %	168.440.926	4,65 %	188.595.559	4,60 %	196.689.789	4,6 %	Dinas Sosial
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %	1.330.737.950	100 %	5.437.352.709	100 %	5.546.632.837	100 %	6.210.309.712	100 %	6.476.846.609	100 %	Dinas Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	102.000.000	1 Unit	104.050.000	1 Unit	116.500.000	1 Unit	121.500.000	1 Unit	Dinas Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah TMP yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	80.000.000	1 Unit	81.600.000	1 Unit	83.240.000	1 Unit	93.200.000	1 Unit	97.200.000	1 Unit	Dinas Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Indeks Perencanaan Tenaga Kerja	9,4 Angka Indeks	9,5 Angka Indeks	35.000.000	9,6 Angka Indeks	600.000.000	9,7 Angka Indeks	620.000.000	9,75 Angka Indeks	640.000.000	9,8 Angka Indeks	665.000.000	9,8 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Indeks Penduduk dan Tenaga Kerja	7,33 Angka Indeks	7,45 Angka Indeks	233.500.000	7,77 Angka Indeks	1.050.000.000	7,88 Angka Indeks	1.255.000.000	7,99 Angka Indeks	1.450.000.000	8 Angka Indeks	1.550.000.000	8 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Indeks Pelatihan dan Kompetensi Kerja	11,04 Angka Indeks	11,43 Angka Indeks	50.000.000	12,06 Angka Indeks	2.200.000.000	12,38 Angka Indeks	3.350.000.000	12,50 Angka Indeks	3.500.000.000	12,62 Angka Indeks	3.650.000.000	12,62 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Indeks Produktifitas Tenaga Kerja	5,85 Angka Indeks	6,07 Angka Indeks	50.000.000	6,29 Angka Indeks	1.750.000.000	6,40 Angka Indeks	1.850.000.000	6,55 Angka Indeks	1.950.000.000	6,61 Angka Indeks	2.050.000.000	6,61 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Indeks Kesempatan Kerja	12,88 Angka Indeks	13,11 Angka Indeks	35.000.000	13,32 Angka Indeks	632.520.000	13,43 Angka Indeks	639.203.000	13,51 Angka Indeks	679.790.000	13,55 Angka Indeks	696.090.000	13,55 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indeks Hubungan Industrial	3,5 Angka Indeks	4 Angka Indeks	50.000.000	4,24 Angka Indeks	710.000.000	4,35 Angka Indeks	720.250.000	4,71 Angka Indeks	782.500.000	4,82 Angka Indeks	807.500.000	4,82 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
						ks		Indeks		Indeks		s		Indeks			dan Transmigrasi
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indeks Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	9,26 Angka Indeks	9,48 Angka Indeks	50.000.000	9,52 Angka Indeks	510.000.000	9,56 Angka Indeks	520.250.000	9,60 Angka Indeks	582.500.000	9,64 Angka Indeks	607.500.000	9,64 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indeks Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00 Angka Indeks	10,00 Angka Indeks	125.000.000	10,00 Angka Indeks	857.000.000	10,00 Angka Indeks	864.175.000	10,00 Angka Indeks	907.750.000	10,00 Angka Indeks	925.250.000	10,00 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Indeks Kondisi Lingkungan Kerja	6,76 Angka Indeks	6,98 Angka Indeks	200.000.000	7,20 Angka Indeks	557.000.000	7,30 Angka Indeks	564.175.000	7,41 Angka Indeks	607.750.000	7,47 Angka Indeks	625.250.000	7,47 Angka Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah (orang)	20 Orang	25 Orang	1.283.531.350	30 Orang	1.309.201.977	35 Orang	1.335.514.370	40 Orang	1.495.314.023	44 Orang	1.559.490.590	44 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																	Keluarga Berencana
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan (%)	85 %	85 %	732.330.621	87,5 %	746.977.233	90 %	761.990.011	92,5 %	853.165.173	95 %	889.781.705	95 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan (orang)	30 Orang	35 Orang	157.547.750	40 Orang	160.698.705	45 Orang	163.928.434	50 Orang	183.543.129	60 Orang	191.420.516	60 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																a Berencana
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Hasil Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	9 Dokumen	11 Dokumen 218.245.000	12 Dokumen 222.609.900	13 Dokumen 227.083.923	14 Dokumen 254.255.425	14 Dokumen 265.167.675	14 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	4 Kab/Kota	6 Kab/Kota 360.341.370	8 Kab/Kota 367.548.197	10 Kab/Kota 374.935.195	12 Kab/Kota 419.797.696	14 Kab/Kota 437.814.765	14 Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																	a Berencana
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)	50 %	50 %	527.592.211	55 %	589.622.435	60 %	601.472.690	65 %	673.441.311	70 %	702.344.371	70 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	337,665 Ton	32,000 Ton	15.000.000	34,167 Ton	15.300.000	36,334 Ton	15.607.500	38,500 Ton	17.475.000	40,668 Ton	18.225.000	40,668 Ton	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	5,05 %	50,5 % 874.845.000	60,5 % 892.341.900	70,5 % 910.276.223	80,5 % 1.019.194.425	90,5 % 1.062.936.675	90,5 %	Dinas Ketahanan Pangan					
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	83,8 %	88,3 % 225.000.000	90,4 % 229.500.000	91 % 234.112.500	91 % 262.125.000	92 % 273.375.000	92 %	Dinas Ketahanan Pangan					
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan daerah rawan pangan (%)	28,57 %	2 % 50.000.000	2 % 51.000.000	2 % 52.025.000	2 % 58.250.000	2 % 60.750.000	2 %	Dinas Ketahanan Pangan					
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	88 %	90 % 90.000.000	90,5 % 91.800.000	91 % 93.645.000	91,5 % 104.850.000	92 % 109.350.000	92 %	Dinas Ketahanan Pangan					
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Garapan (%)	30 %	40 % 158.297.500	50 % 161.463.450	60 % 164.708.549	70 % 184.416.588	80 % 192.331.463	80 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																Pertanahan
2	106	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat di sertifikat	3000 Ha	3000 Ha	397.202.500	3000 Ha	405.146.550	3000 Ha	413.289.201	3000 Ha	462.740.913	3000 Ha	482.601.038	20.000 Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
2	112	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran lingkungan	1 Dokumen	2 Dokumen	485.000.000	1 Dokumen	494.700.000	1 Dokumen	504.642.500	1 Dokumen	565.025.000	2 Dokumen	589.275.000	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
2	113	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,74 Poin	74,3 Poin	430.000.000	74,53 Poin	438.600.000	74,75 Poin	447.415.000	74,97 Poin	500.950.000	75,16 Poin	522.450.000	75,16 Poin	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	1	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah dokumen profil Kehati	0 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	61.200.000	1 Dokumen	62.430.000	1 Dokumen	69.900.000	1 Dokumen	72.900.000	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton)	1.406.674,627 Ton	1.407.074,727 Ton	200.000.000	1.407.274,777 Ton	204.000.000	1.407.474,827 Ton	208.100.000	1.407.674,877 Ton	233.000.000	1.407.874,927 Ton	243.000.000	1.407.874,927 Ton	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	68,75 %	76 %	651.398.581	77 %	664.426.553	78 %	677.780.224	79 %	758.879.347	80 %	791.449.276	80 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 MHA	2 MHA	60.000.000	2 MHA	61.200.000	2 MHA	62.430.000	2 MHA	69.900.000	2 MHA	72.900.000	2 MHA	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	1	8	LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH														
2	1	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan (Kegiatan)	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	204.000.000	2 Kegiatan	208.100.000	2 Kegiatan	233.000.000	2 Kegiatan	243.000.000	2 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	1 Penghargaan	2 Penghargaan	305.000.000	2 Penghargaan	311.100.000	2 Penghargaan	317.352.500	2 Penghargaan	355.325.000	2 Penghargaan	370.575.000	2 Penghargaan	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup (%)	83,33 %	85 %	40.000.000	86 %	40.800.000	87 %	41.620.000	88 %	46.600.000	89 %	48.600.000	89 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	17.215,61 Ton	17.911,12 Ton	4.375.000.000	18.090,23 Ton	4.462.500.000	18.271,13 Ton	4.552.187.500	18.636,55 Ton	5.096.875.000	18.822,92 Ton	5.315.625.000	18.822,92 Ton	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
2	1 2	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	65,00 %	68 %	85.000.000	70,35 %	400.000.000	73,11 %	400.000.000	75,65 %	400.000.000	78,25 %	400.000.000	78,25 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	1 2	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	66,67 %	70,42 %	90.000.000	73 %	250.000.000	76,47 %	250.000.000	81,73 %	250.000.000	91,38 %	250.000.000	91,38 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	1 2	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Instansi/Lembaga yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	1 Instansi/Lembaga	2 Instansi/Lembaga	176.000.000	5 Instansi/Lembaga	400.000.000	7 Instansi/Lembaga	10 Instansi/Lembaga	400.000.000	15 Instansi/Lembaga	400.000.000	15 Instansi/Lembaga	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	1 2	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyediaan data kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	100 %	100 %	94.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	1 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	1	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Berkembang	737 Desa	767 Desa	-	797 Desa	306.000.000	817 Desa	312.150.000	837 Desa	349.500.000	867 Desa	364.500.000	867 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang bekerjasama (Mou, perjanjian Kerjasama, Laporan)	0 Desa	7 Desa	55.034.850	9 Desa	56.135.547	11 Desa	57.263.761	13 Desa	64.115.600	15 Desa	66.867.343	15 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Aparatur Desa Terlatih	320 Orang	650 Orang	969.686.332	1010 Orang	989.080.059	1380 Orang	1.008.958.628	1770 Orang	1.129.684.577	2170 Orang	1.178.168.893	2170 Orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	1.722 Lembaga	1.730 Lembaga	2.576.554.778	1.740 Lembaga	2.628.085.874	1.750 Lembaga	2.680.905.247	1.760 Lembaga	3.001.686.316	1.770 Lembaga	3.130.514.055	1.770 Lembaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Total Fertility rate (TFR)	2,1 %	2,1 %	198.477.300	2,06 %	202.446.846	2 %	206.515.631	1,96 %	231.226.055	1,96 %	241.149.920	1,96 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)	5,36 %	5,36 %	136.994.500	5,36 %	139.734.390	5,18 %	142.542.777	5 %	159.598.593	5,01 %	166.448.318	5,01 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32 Indeks (Skala 1-100)	60,32 Indeks (Skala 1-100)	147.287.500	60,32 Indeks (Skala 1-100)	150.233.250	62,44 Indeks (Skala 1-100)	153.252.644	64,55 Indeks (Skala 1-100)	171.589.938	64,55 Indeks (Skala 1-100)	178.954.313	64,55 Indeks (Skala 1-100)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		SEJAHTERA (KS)		100)		100)		100)		100)		100)		100)		indungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	1 5	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	50 %	70 %	10.837.167.300	72 %	10.933.550.646	75 %	11.153.293.576	78 %	12.487.829.905	90 %	13.023.788.270	90 %	Dinas Perhubungan
2	1 5	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase terminal bus Tipe B sesuai pelayanan standard	42 %	45 %	500.000.000	50 %	510.000.000	52 %	520.250.000	60 %	582.500.000	70 %	607.500.000	70 %	Dinas Perhubungan
2	1 5	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase fasilitas perlengkapan sungai	10 %	20 %	6.453.360.148	25 %	3.825.000.151	30 %	5.110.475.154	45 %	5.716.750.172	50 %	5.954.250.180	50 %	Dinas Perhubungan
2	1 5	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rasio konektivitas sektor transportasi	0 %	0 %	-	5 %	1.224.000.000	6 %	40.000.000	7 %	50.000.000	8 %	60.000.000	8 %	Dinas Perhubungan
2	1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (orang)	200 Orang	300 Orang 50.000.000	400 Orang 51.000.000	500 Orang 52.025.000	600 Orang 58.250.000	700 Orang 60.750.000	700 Orang	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
2	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	200 Orang	200 Orang 52.498.000	300 Orang 53.547.960	400 Orang 54.624.169	500 Orang 61.160.170	600 Orang 63.785.070	700 Orang	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	1 6	2		keterbukaan informasi komunikasi publik												
2	1 6	2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase mitra strategis Pemda termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	75 %	80 % 16.516.840.635	85 %	16.847.177.448	90 %	17.185.772.681	95 %	19.242.119.340	100 %	20.067.961.372	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	1 6	2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemda	70 %	75 % 1.250.000.000	80 %	1.275.000.000	85 %	1.300.625.000	90 %	1.456.250.000	95 %	1.518.750.000	95 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	1 6	3		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase layanan administrasi pemerintahan	65 %	65 % 50.000.000	75 %	51.000.000	80 %	52.025.000	85 %	58.250.000	90 %	60.750.000	90 %	Dinas Komunikasi, Informa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	1	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Lembaga keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USPKop / KJKS) (Unit)	365 Unit	2000 Unit	105.000.000	2.584 Unit	107.100.000	2.609 Unit	109.252.500	2.634 Unit	122.325.000	2.659 Unit	127.575.000	2.659 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif (%)	78.63 %	83.21 %	117.500.000	83.71 %	119.850.000	84.21 %	122.258.750	84.71 %	136.887.500	85.71 %	142.762.500	85.71 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pertumbuhan Koperasi (unit)	182 Unit	50 Unit	50.000.000	50 Unit	51.000.000	50 Unit	52.025.000	50 Unit	58.250.000	50 Unit	60.750.000	50 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase koperasi yang memiliki kategori sehat/Berkualitas (%)	16.50 %	17.50 %	56.435.400	19.00 %	57.564.108	21.50 %	58.721.034	25.00 %	65.747.241	27.50 %	68.569.011	27.50 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Koperasi berprestasi tingkat provinsi dan nasional (unit)	11 Unit	12 Unit	145.564.600	12 Unit	148.475.892	12.00 Unit	151.459.966	12 Unit	169.582.759	12 Unit	176.860.989	12 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	1	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih (Orang)	880 Orang	240 Orang 2.428.964.000	240 Orang 2.477.543.280	240 Orang 2.527.337.042	240 Orang 2.829.743.060	240 Orang 2.951.191.260	240 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
2	1	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/oms et(%)	0,83 %	1,75 % 209.000.000	2,00 % 213.180.000	2,25 % 217.464.500	2,25 % 243.485.000	2,25 % 253.935.000	2,25 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
2	1	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi Modern (Unit)	0 Unit	2 Unit 200.000.000	2 Unit 204.000.000	3 Unit 208.100.000	3 Unit 233.000.000	3 Unit 243.000.000	3 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
2	1	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Kontribusi Koperasi di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%)	1,45 %	1,50 % 25.000.000	1,65 % 25.500.000	1,85 % 26.012.500	2,00 % 29.125.000	2,25 % 30.375.000	2,25 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
2	1	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan	11.77 %	12.00 % 20.000.000	12.35 % 20.400.000	13.15 % 20.810.000	14.00 % 23.300.000	15.75 % 24.300.000	15.75 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PDRB (%)															
2	1 7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Wirausaha (Unit)	64.087 Unit	71.495 Unit	20.928.000	78.644 Unit	21.346.560	86.508 Unit	21.775.584	95.158 Unit	24.381.120	104.674 Unit	25.427.520	104.674 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1 7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	60.415 Unit	48.000 Unit	77.072.000	57.800 Unit	78.613.440	69.360 Unit	80.193.416	83.232 Unit	89.788.880	83.232 Unit	93.642.480	83.232 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1 7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	0 %	9.99 %	20.000.000	9.99 %	20.400.000	9.99 %	20.810.000	9 %	23.300.000	9.99 %	24.300.000	9.99 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1 7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Rasio Kewirausahaan	0 %	5.09 %	20.000.000	5.52 %	20.400.000	5.98 %	20.810.000	6.49 %	23.300.000	7.03 %	24.300.000	7.03 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1 7	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Unit)	3.672 Unit	4.200 Unit	15.000.000	4.242 Unit	15.300.000	4.285 Unit	15.607.500	4.328 Unit	17.475.000	4.371 Unit	18.225.000	4.371 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				2022		2023		2024		2025		2026						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																	dan Menengah	
2	178			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang di dampingi (Unit)	1.364 Unit	480 Unit	15.000.000	480 Unit	15.300.000	480 Unit	15.607.500	480 Unit	17.475.000	480 Unit	18.225.000	480 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
2	182			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersedianya dokumen peta potensi Investasi	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	591.045.200	2 Kabupaten/Kota	602.866.104	2 Kabupaten/Kota	614.982.531	2 Kabupaten/Kota	688.567.658	2 Kabupaten/Kota	718.119.918	2 Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	183			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	269.158.800	4 Kegiatan	274.541.976	4 Kegiatan	280.059.731	4 Kegiatan	313.570.002	4 Kegiatan	327.027.942	4 Kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	184	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan	80 %	80 % 125.000.000	81 %	127.500.000	81 %	130.062.500	82 %	145.625.000	82 %	151.875.000	82 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2	184	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan yang Terbit Tepat Waktu	618 Dokumen	595 Dokumen 395.458.200	595 Dokumen	403.367.364	595 Dokumen	411.474.257	595 Dokumen	460.708.803	595 Dokumen	480.481.713	595 Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2	185	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	618 Unit	700 Unit 193.506.500	700 Unit	197.376.630	752 Unit	201.343.513	807 Unit	225.435.073	867 Unit	235.110.398	867 Unit	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2	185	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (juta Rupiah)	7.420.000 0 Juta Rupiah	7.980.000 0 Juta Rupiah	8.300.000 0 Juta Rupiah	197.376.630	8.650.000 0 Juta Rupiah	201.343.513	9.100.000 Juta Rupiah	225.435.073	9.630.000 Juta Rupiah	235.110.398	9.630.000 0 Juta Rupiah	Dinas Penanaman Modal dan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PMDN dalam Juta Rupiah	5.194.000 0 Juta Rupiah	5.58 6.00 0 0 Juta Rupiah	193.506. 500	5.81 0.00 0 0 Juta Rupiah	197.376. 630	6.05 5.00 0 0 Juta Rupiah	201.343. 513	6.370 .000 Juta Rupiah	225.435. 073	6.741 .000 Juta Rupiah	235.110. 398	6.741.000 0 Juta Rupiah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PMA dalam US \$ Ribu	152.465. 75 US \$ Ribu	163. 972. 60 U S \$ Ribu	193.506. 500	170. 547. 95 U S \$ Ribu	197.376. 630	177. 739. 73 U S \$ Ribu	201.343. 513	186.9 86.30 US \$ Ribu	225.435. 073	197.8 76.71 US \$ Ribu	235.110. 398	197.876. 71 US \$ Ribu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi Investasi	40 %	7,55 %	100.000. 000	4,01 %	102.000. 000	4,22 %	104.050. 000	5,20 %	116.500. 000	5,82 %	121.500. 000	5,82 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	186	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Informasi data Perizinan berusaha yang dikelola dengan baik	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	150.000.000	153.000.000	156.075.000	174.750.000	182.250.000	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
2	192	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	77,19 %	80,70 %	1.872.950.000	1.910.409.000	1.948.804.475	2.181.986.750	2.275.634.250	84,21 %	87,71 %	92,98 %	100 %	100 %	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	193	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	Persentase cakupan pembinaan olahraga	51,42 %	71,42 %	7.277.184.494	7.422.728.184	7.571.910.466	8.477.919.936	8.841.779.160	85,71 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	194	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase cakupan pembinaan kepramukaan (%)	100 %	100 %	3.000.000.000	3.060.000.000	3.121.500.000	3.495.000.000	3.645.000.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
2	202	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Statistik Sektoral	100 %	100 %	30.000.000	30.600.000	31.215.000	34.950.000	36.450.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persand

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab								
				2022		2023		2024		2025		2026													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
																	ian dan Statistik								
2	2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																						
2	2	1	2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengamanan informasi	100 %	100 %	205.400.000	100 %	209.508.000	100 %	213.718.700	100 %	239.291.000	100 %	249.561.000	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik							
2	2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																						
2	2	2	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Peningkatan Kebudayaan Unggulan	0,05 %	0,05 %	5.073.000.000	0,05 %	5.174.460.000	0,05 %	5.278.456.500	0,05 %	5.910.045.000	0,05 %	6.163.695.000	0,05 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							
2	2	2	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	0,021 Pa	0,022 Pa	gelaran seni dan budaya	gelaran seni dan budaya	3.060.000.000	0,023 Pa	gelaran seni dan budaya	gelaran seni dan budaya	3.121.500.000	0,024 Pa	gelaran seni dan budaya	gelaran seni dan budaya	3.495.000.000	0,025 Pa	gelaran seni dan budaya	gelaran seni dan budaya	3.645.000.000	0,026 Pa	gelaran seni dan budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2	2	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase Peningkatan Peningkatan Sejarah	2 %	2 %	-	2 %	-	2 %	2.601.250.000	2 %	2.912.500.000	2 %	3.037.500.000	2 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																	ta
2	2 2	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase Peningkatan Pemerhati Cagar Budaya	2 %	2 % 575.000.000	2 %	2 % 586.500.000	2 %	2 % 598.287.500	2 %	2 % 669.875.000	2 %	2 % 698.625.000	2 %	2 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2 2	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase Peningkatan Komunitas Museum	5 %	5 % 1.900.000.000	5 %	5 % 1.938.000.000	5 %	5 % 1.976.950.000	5 %	5 % 2.213.500.000	5 %	5 % 2.308.500.000	5 %	5 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	2 3	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan (pemustaka)	25.675 Orang	26.675 Orang 195.947.500	27.675 Orang 199.866.450	28.675 Orang 203.883.374	29.675 Orang 228.278.838	31.000 Orang 238.076.213	31.000 Orang						Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	2 3	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Buku yang dibaca di perpustakaan (eksemplar)	39.916 Eksampul	120.000 Eksampul 152.825.000	146.000 Eksampul 155.881.500	147.000 Eksampul 159.014.413	150.000 Eksampul 178.041.125	155.000 Eksampul 185.682.375	155.000 Eksampul						Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	2 3	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Lembaga/Perpustakaan yang diberikan Pembinaan Perpustakaan Berbasis Inklkusi Sosial	n/a Lembaga/Perpustakaan	5 Lembaga/Perpustakaan 200.816.500	14 Lembaga/Perpustakaan 204.832.830	24 Lembaga/Perpustakaan 208.949.568	34 Lembaga/Perpustakaan 233.951.223	44 Lembaga/Perpustakaan 243.992.048	54 Lembaga/Perpustakaan						Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
2	2	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pengunjung terhadap perpustakaan	80,13 %	70 %	148.411.000	80 %	151.379.220	95 %	154.421.646	100 %	172.898.815	100 %	180.319.365	100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	2	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Koleksi Bacaan yang tersedia di perpustakaan (judul)	31.145 judul	30.000 judul	199.500.000	32.000 judul	203.490.000	35.000 judul	207.579.750	50.000 judul	232.417.500	60.000 judul	242.392.500	70.000 judul	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	2	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah Kuno yang Terlestarikan (Naskah)	0 Naskah	1 Naskah	59.500.000	1 Naskah	60.690.000	1 Naskah	61.909.750	1 Naskah	69.317.500	1 Naskah	72.292.500	5 Naskah	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	2	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
2	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD menerapkan arsip secara baku sesuai standar kearsipan	95 %	96 %	104.233.000	97 %	106.317.660	98 %	108.454.437	99 %	121.431.445	100 %	126.643.095	100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	2	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	95 %	96 %	92.524.000	97 %	94.374.480	98 %	96.271.222	99 %	107.790.460	100 %	112.416.660	100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	2	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
3	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	0 Lokasi	2 Lokasi	450.000.000	4 Lokasi	459.000.000	5 Lokasi	468.225.000	6 Lokasi	524.250.000	7 Lokasi	546.750.000	7 Lokasi	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun)	130.526,1 Ton	133.137,62 Ton	137.131,72 Ton	137.131,72 Ton	137.131,72 Ton	141.244,64 Ton	13.989.154.995	145.481,98 Ton	15.663.013.522	149.486,44 Ton	16.335.245.862	149.486,44 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	107,00 NTN/NTBi	108,25 NTN/NTBi	109,50 NTN/NTBi	109,50 NTN/NTBi	109,50 NTN/NTBi	110,75 NTN/NTBi	1.047.568.117	112 NTN/NTBi	1.172.913.845	113,25 NTN/NTBi	1.223.253.495	113,25 NTN/NTBi	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	119.876,05 Ton	128.008,34 Ton	136.140,63 Ton	136.140,63 Ton	136.140,63 Ton	144.272,92 Ton	2.514.778.831	152.405,21 Ton	2.815.682.209	160.537,50 Ton	2.936.526.939	160.537,50 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah kebutuhan benih (ekor)	67.630 Ekor	69.820 Ekor	72.010 Ekor	72.010 Ekor	72.010 Ekor	74.200 Ekor	1.060.269.500	76.390 Ekor	1.187.135.000	78.580 Ekor	1.238.085.000	78.580 Ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan UU yang berlaku (%)	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	319.956.872	90 %	358.240.995	90 %	373.616.145	90 %	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				2022		2023		2024		2025		2026						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
3	2	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kelompok masyarakat pengawasan (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok)	40 Kelompok	45 Kelompok	135.000.000	48 Kelompok	137.700.000	52 Kelompok	140.467.500	58 Kelompok	157.275.000	60 Kelompok	164.025.000	60 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	2	5	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	49,63 Kg/Kap/Tahun	55,81 Kg/Kap/Tahun	7.884.000	57,62 Kg/Kap/Tahun	8.041.680	59,43 Kg/Kap/Tahun	8.203.302	61,23 Kg/Kap/Tahun	9.184.860	63,04 Kg/Kap/Tahun	9.579.060	63,04 Kg/Kap/Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	5	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	34.450 Ton	34.761,84 Ton	127.116.000	35.073,68 Ton	129.658.320	35.385,52 Ton	132.264.198	35.697,36 Ton	148.090.140	36.009,20 Ton	154.445.940	36.009,20 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	5	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,1 %	3,2 %	15.000,000	3,30 %	15.300,000	3,40 %	15.607,500	3,50 %	17.475,000	3,60 %	18.225,000	3,60 %	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
3	2	6	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	773.359 Orang	820.457 Orang	825.000.000	845.070 Orang	2.841.500.000	870.422 Orang	2.858.412.500	896.535 Orang	2.961.125.000	923.431 Orang	3.002.375.000	923.431 Orang	Dinas Kebudayaan dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																	Pariwisata
3	2 6	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang di promosikan (%)	80 %	85 %	140.000.000	90 %	3.142.800.000	95 %	3.145.670.000	100 %	3.163.100.000	100 %	3.170.100.000	100 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2 6	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tempat wisata yang dikelola	85 %	90 %	75.000.000	92.5 %	3.765.000.000	95 %	3.780.375.000	97.5 %	3.873.750.000	100 %	3.911.250.000	100 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2 7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
3	2 7	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan populasi peternakan	3.05 %	3.15 %	26.596.935.000	3.20 %	27.128.873.700	3.25 %	27.674.110.868	3.30 %	30.985.429.275	3.35 %	32.315.276.025	3.35 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	2 7	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan	0.10 %	0.12 %	377.260.000	0.14 %	384.805.200	0.16 %	392.539.030	0.18 %	439.507.900	0.20 %	458.370.900	0.20 %	Dinas Perkebunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3	2	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase benih/bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat (%)	85 %	89 %	3.500.000.000	91 %	3.570.000.000	93 %	3.641.750.000	95 %	4.077.500.000	97 %	4.252.500.000	97 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	2	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan NTP sub sektor perkebunan	0.08 %	0.08 %	840.000.000	0.08 %	856.800.000	0.08 %	874.020.000	0.09 %	978.600.000	0.09 %	1.020.600.000	0.09 %	Dinas Perkebunan
3	2	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	presentase peningkatan vaksin hewan	40 %	60 %	1.075.000.000	70 %	1.096.500.000	80 %	1.118.537.500	90 %	1.252.375.000	100 %	1.306.125.000	100 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	2	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tertanggulangi akibat bencana (%)	75 %	75 %	600.000.000	80 %	612.000.000	80 %	624.300.000	82 %	699.000.000	85 %	729.000.000	85 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3	2	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	70 %	70 %	170.000.000	75 %	173.400.000	80 %	176.885.000	82 %	198.050.000	85 %	206.550.000	85 %	Dinas Perkebunan
3	2	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase mediasi gangguan usaha perkebunan	80 %	80 %	140.000.000	80 %	142.800.000	80 %	145.670.000	82 %	163.100.000	85 %	170.100.000	85 %	Dinas Perkebunan
3	2	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha pertanian yang sudah terlayani dengan baik (%)	100 %	100 %	-	100 %	510.000.000	100 %	520.250.000	100 %	582.500.000	100 %	607.500.000	100 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	2	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang Memperoleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) (%)	50 %	50 %	600.000.000	55 %	612.000.000	55 %	624.300.000	60 %	699.000.000	60 %	729.000.000	60 %	Dinas Perkebunan
3	2	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah koperasi sektor	10 Unit	10 Unit	125.000.000	10 Unit	127.500.000	10 Unit	130.062.500	10 Unit	145.625.000	50 Unit	151.875.000	50 Unit	Dinas Perkebunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		perkebunan yang mendapat pendampingan															
3	27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	85 %	85 %	1.075.000.000	90 %	1.096.500.000	90 %	1.118.537.500	95 %	1.252.375.000	95 %	1.306.125.000	95 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan (%)	77,03 %	90 %	3.477.847.500	90 %	3.547.404.450	90 %	3.618.700.324	100 %	4.051.692.338	100 %	4.225.584.713	100 %	Dinas Kehutanan
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Kawasan Hutan KPH yang difasilitasi pemanfaatannya (hektar)	0 Ha	30.000 Ha	30.767.010.220	40.000 Ha	31.382.350.424	50.000 Ha	32.013.074.134	60.000 Ha	35.843.566.906	70.000 Ha	37.381.917.417	250.000 Ha	Dinas Kehutanan
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (hektar)	123 Ha	1.000 Ha	33.245.626.380	1.100 Ha	33.910.538.908	1.200 Ha	34.592.074.248	1.300 Ha	38.731.154.733	1.400 Ha	40.393.436.052	6.000 Ha	Dinas Kehutanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Penurunan Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Setiap Tahun (hektar)	317.749 Ha	299.000 Ha	53.064.080.600	285.000 Ha	54.125.362.212	268.000 Ha	55.213.175.864	252.000 Ha	61.819.653.899	234.000 Ha	64.472.857.929	234.000 Ha	Dinas Kehutanan
3	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan per Tahun (persen)	0 %	80 %	8.351.700.000	80 %	8.518.734.000	80 %	8.689.943.850	85 %	9.729.730.500	90 %	10.147.315.500	90 %	Dinas Kehutanan
3	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (Persen)	0,98 %	0,97 %	3.841.740.000	0,94 %	3.918.574.800	0,91 %	3.997.330.470	0,88 %	4.475.627.100	0,86 %	4.667.714.100	0,86 %	Dinas Kehutanan
3	2	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Konservasi/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang dikelola (Hektar)	0 Ha	58.341 Ha	460.500.000	58.501 Ha	469.710.000	58.700 Ha	479.150.250	58.853 Ha	536.482.500	58.982 Ha	559.507.500	58.982 Ha	Dinas Kehutanan
3	2	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan	81 Unit	150 Unit	9.472.075.000	200 Unit	9.661.516.500	260 Unit	9.855.694.038	330 Unit	11.034.967.375	410 Unit	11.508.571.125	410 Unit	Dinas Kehutanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver(unit)														
3	2 8	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat (hektar)	270.004 Ha	345.000 Ha	22.016.352.000	385.000 Ha	22.456.679.040	425.000 Ha	22.908.014.256	465.000 Ha	25.649.050.080	505.000 Ha	26.749.867.680	505.000 Ha	Dinas Kehutan an
3	2 8	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah dokumen pengelolaan DAS wilayah Kalimantan Tengah (Dokumen)	0 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	663.000.000	1 Dokumen	676.325.000	1 Dokumen	757.250.000	1 Dokumen	789.750.000	5 Dokumen	Dinas Kehutan an
3	2	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL														
3	2 9	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase perusahaan pengelolaan kegeologian yang taat aturan	80 %	82 %	-	85 %	3.833.263.550	87 %	3.982.608.239	90 %	4.332.078.813	90 %	4.481.486.003	90 %	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	2 9	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah pertimbangan teknis ijin usaha	379 Dokumen	382 Dokumen	20.000.000	386 Dokumen	20.400.000	391 Dokumen	20.810.000	397 Dokumen	23.300.000	404 Dokumen	24.300.000	404 Dokumen	Dinas Energi dan Sumber

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
																	Daya Mineral
3	2	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) (%)	7 %	9 %	-	12 %	5.366.568.970	15 %	5.575.651.534	18 %	6.064.910.338	20 %	6.274.080.404	20 %	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	2	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Desa Berlistrik	92,55 %	95,03 %	1.573.250.000	96,27 %	1.604.715.000	97,51 %	1.636.966.625	98,75 %	1.832.836.250	100 %	1.911.498.750	100 %	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	2	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi (%)	86,82 %	91,2 %	50.000.000	93,39 %	51.000.000	95,58 %	52.025.000	97,77 %	58.250.000	100 %	60.750.000	100 %	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	3	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
3	3	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perizinan dan pendaftaran perusahaan yang terlayani dengan baik (%)	100 %	100 %	-	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	3	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Jumlah sarana perdagangan di Kalteng	2.035 Unit	2.239 Unit	76.200.000	2.462 Unit	77.724.000	2.709 Unit	79.286.100	2.979 Unit	88.773.000	3.277 Unit	92.583.000	3.277 Unit	Dinas Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PERDAGANGAN	meliputi pasar, gudang, distributor dan perdagangan besar (sarana perdagangan)													Perindustrian	
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah kegiatan pemantauan terhadap Bapokting (kegiatan)	260 Kegiatan	260 Kegiatan	288.800.000	260 Kegiatan	294.576.000	260 Kegiatan	300.496.400	260 Kegiatan	336.452.000	260 Kegiatan	350.892.000	260 Kegiatan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor barang dan jasa Kalteng (juta US\$)	2.427,42 juta US\$	2.618,76 juta US\$	205.000.000	2.810,10 juta US\$	209.100.000	3.001,44 juta US\$	213.302.500	3.192,78 juta US\$	238.825.000	3.250 juta US\$	249.075.000	3.250 juta US\$	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Impor barang dan Jasa Kalteng (juta US\$)	48,1 juta US\$	52,91 juta US\$	167.500.000	58,2 juta US\$	170.850.000	64,03 juta US\$	174.283.750	70,43 juta US\$	195.137.500	75 juta US\$	203.512.500	75 juta US\$	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pengawasan (pelaku Usaha)	98 Orang	103 Orang	500.000.000	108 Orang	510.000.000	113 Orang	520.250.000	119 Orang	582.500.000	122 Orang	607.500.000	663 Orang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN	Jumlah contoh/sampel komoditi ekspor yang	1.568 sampel	1.646 sampel	310.030.000	1.728 sampel	316.230.600	1.815 sampel	322.586.215	1.905 sampel	361.184.950	1.950 sampel	376.686.450	10.612 sampel	Dinas Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				2022		2023		2024		2025		2026						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																	Perindustrian	
3	306		KONSUMEN	akan di uji (sampel)														Perindustrian
3	306		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah UUT (alat ukur) yang dikalibrasi (alat)	550 Alat	578 Alat	70.070.000	607 Alat	71.471.400	637 Alat	72.907.835	669 Alat	81.631.550	680 Alat	85.135.050	3.271 Alat		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	307		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah kegiatan promosi produk unggulan Kalteng (kegiatan)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	-	5 Kegiatan	510.000.000	7 Kegiatan	520.250.000	10 Kegiatan	582.500.000	12 Kegiatan	607.500.000	39 Kegiatan		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	312		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi Kalimantan Tengah	50 Unit	50 Unit	1.940.000.000	50 Unit	1.978.800.000	50 Unit	2.018.570.000	50 Unit	2.260.100.000	50 Unit	2.357.100.000	300 Unit		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	313		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Presentase Izin Usaha Industri yang terfasilitasi	100 %	100 %	-	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	314		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI	Jumlah Industri Kalteng yang menggunakan aplikasi	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100.000.000	14 Kab/Kota	102.000.000	14 Kab/Kota	104.050.000	14 Kab/Kota	116.500.000	14 Kab/Kota	121.500.000	14 Kab/Kota		Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		NASIONAL	SIINAS (Kab/Kota)													strian	
3	3	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														
3	3	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Usulan kawasan transmigrasi yang direkomendasikan (kawasan)	5 Kawasan	7 Kawasan	100.000.000	8 Kawasan	546.800.000	9 Kawasan	553.770.000	10 Kawasan	596.100.000	11 Kawasan	613.100.000	11 Kawasan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	3	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan permukiman baru atau pemenuhan daya tampung (SP)	1 SP	1 SP	80.000.000	1 SP	551.900.000	1 SP	558.972.500	1 SP	601.925.000	1 SP	619.175.000	6 SP	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Permukiman transmigrasi dalam pembinaan (SP)	2 SP	2 SP	200.000.000	2 SP	541.700.000	2 SP	548.567.500	1 SP	590.275.000	1 SP	607.025.000	1 SP	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1		SEKRETARIAT DAERAH														
4	1	2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan	100 %	100 %	1.217.457.000	100 %	1.241.806.140	100 %	1.266.764.009	100 %	1.418.337.405	100 %	1.479.210.255	100 %	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	1	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	peningkatan pelayanan publik	9 Kegiatan	9 Kegiatan 3.226.410.400	9 Kegiatan	9 Kegiatan 3.674.218.398	9 Kegiatan	9 Kegiatan 3.865.000.000	9 Kegiatan	9 Kegiatan 4.196.533.759	9 Kegiatan	9 Kegiatan 4.376.642.504	9 Kegiatan	Sekretariat Daerah
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat	11 kegiatan	11 kegiatan 206.190.000.000	12 kegiatan	12 kegiatan 210.313.800.000	13 kegiatan	13 kegiatan 214.540.695.000	14 kegiatan	14 kegiatan 240.211.350.000	16 kegiatan	16 kegiatan 250.520.850.000	16 kegiatan	Sekretariat Daerah
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Toleransi	76,52 Angka	76,65 Angka 200.000.000	76,70 Angka	76,70 Angka 204.000.000	76,80 Angka	76,80 Angka 208.100.000	76,90 Angka	76,90 Angka 233.000.000	77,00 Angka	77,00 Angka 243.000.000	77,00 Angka	Sekretariat Daerah
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Kesetaraan	78,37 Angka	78,49 Angka 350.000.000	78,55 Angka	78,55 Angka 357.000.000	78,61 Angka	78,61 Angka 364.175.000	78,67 Angka	78,67 Angka 407.750.000	78,73 Angka	78,73 Angka 425.250.000	78,73 Angka	Sekretariat Daerah
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Kerjasama	78,57 Angka	78,71 Angka 150.000.000	78,78 Angka	78,78 Angka 153.000.000	78,85 Angka	78,85 Angka 156.075.000	78,92 Angka	78,92 Angka 174.750.000	78,99 Angka	78,99 Angka 182.250.000	78,99 Angka	Sekretariat Daerah
4	1	5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum	100 %	100 % 2.066.830.450	100 %	100 % 2.108.167.059	100 %	100 % 2.150.537.083	100 %	100 % 2.407.857.474	100 %	100 % 2.511.198.997	100 %	Sekretariat Daerah
4	1	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jenis dan jumlah bank dan cabang	300 Unit	300 Unit 700.598.500	315 Unit	315 Unit 714.610.470	318 Unit	318 Unit 728.972.739	320 Unit	320 Unit 816.197.253	321 Unit	321 Unit 851.227.178	321 Unit	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
4	1	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	55 Unit	55 Unit	700.000.000	56 Unit	714.000.000	57 Unit	728.350.000	59 Unit	815.500.000	60 Unit	850.500.000	60 Unit	Sekretariat Daerah
4	1	7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pengadaan Tepat Waktu	0 %	20 %	753.000.000	50 %	768.060.000	75 %	783.496.500	100 %	877.245.000	100 %	914.895.000	100 %	Sekretariat Daerah
4	1	7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	0 %	100 %	1.410.000.000	100 %	1.438.200.000	100 %	1.467.105.000	100 %	1.642.650.000	100 %	1.713.150.000	100 %	Sekretariat Daerah
4	1	8	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Dokumen Data Pelaporandan Data Capaian Realisasi Keuangan dan Pembangunan yang tepat waktu	100 %	100 %	2.098.406.400	100 %	2.140.374.528	100 %	2.183.391.859	100 %	2.444.643.456	100 %	2.549.563.776	100 %	Sekretariat Daerah
4	2		SEKRETARIAT DPRD														
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN	Jumlah dokumen peraturan daerah dan	100 %, 1 Tahun	100 %, 1 Tahun	30.123.283.900	100 %, 1 Tahun	30.725.749.578	100 %, 1 Tahun	31.343.276.898	100 %, 1 Tahun	35.093.625.744	100 %, 1 Tahun	36.599.789.939	100 %, 1 Tahun	Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		FUNGSI DPRD	peraturan DPRD														
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	1	PERENCANAAN															
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen hasil Perencanaan pembangunan daerah (dokumen)	20 Dokumen	20 Dokumen	2.891.160.000	20 Dokumen	3.458.983.200	20 Dokumen	3.528.501.980	20 Dokumen	3.950.701.400	20 Dokumen	4.120.259.400	20 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (dokumen)	13 Dokumen	13 Dokumen	499.000.000	13 Dokumen	1.120.980.000	13 Dokumen	1.143.509.500	13 Dokumen	1.280.335.000	13 Dokumen	1.335.285.000	13 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	87 %	90 %	2.377.511.000	95 %	2.935.061.220	100 %	2.994.050.196	100 %	3.352.300.315	100 %	3.496.175.865	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																	bangan
5	2			KEUANGAN													
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA	6,33 %	6,33 %	86.529.995	6,33 %	88.260.595	6,33 %	90.034.460	6,33 %	100.807.444	6,33 %	105.133.944	6,33 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA terhadap APBD	6,33 %	6,33 %	177.611.212	6,33 %	181.163.436	6,33 %	184.804.466	6,33 %	206.917.062	6,33 %	215.797.623	6,33 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja pendidikan (20%)	30,96 %	30,96 %	1.182.947.177	30,96 %	1.206.606.121	30,96 %	1.230.856.538	30,96 %	1.378.133.461	30,96 %	1.437.280.820	30,96 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja kesehatan (10%)	10,03 %	10,03 %	765.449.790	10,03 %	780.758.786	10,03 %	796.450.506	10,03 %	891.749.005	10,03 %	930.021.495	10,03 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	2.809.710.524	Tepat Waktu	2.865.904.734	Tepat Waktu	2.923.503.800	Tepat Waktu	3.273.312.760	Tepat Waktu	3.413.798.287	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	1.034.427.616.78	14 Kab/Kota	1.095.809.156.92	14 Kab/Kota	1.213.476.459.42	14 Kab/Kota	1.222.660.416.06	14 Kab/Kota	1.264.124.414.40	14 Kab/Kota	Badan Keuangan dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			DAERAH		9		4		9		2		0		Aset Daerah	
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Dokumen Jasa Administrasi Keuangan	4 Dokumen	4.654.303.580	4 Dokumen	4.747.389.652	4 Dokumen	4.842.802.875	4 Dokumen	5.422.263.671	4 Dokumen	5.654.978.850	4 Dokumen	Badan Pendapatan Daerah
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP Nilai	1,626,973,585	WTP Nilai	1,700,000,000	WTP Nilai	1,800,000,000	WTP Nilai	2,100,000,000	WTP Nilai	2,180,000,000	WTP Nilai	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Keterlaksanaan (%)	100%	3,545,456,244	100%	3,575,878,426	100%	3,581,913,237	100%	3,925,880,751	100%	4,104,502,242	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase optimalisasi penerimaan pendapatan daerah (%)	100 %	12.561.064.801	100 %	12.812.286.097	100 %	13.069.787.925	100 %	14.633.640.493	100 %	15.261.693.733	100 %	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio kemandirian keuangan daerah (%)	36 %	13.558.080.823	42.3 %	13.829.242.439	44.2 %	14.107.183.096	46.4 %	15.795.164.159	47.5 %	16.473.068.200	47.5 %	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	indeks kepuasan pelayanan (%)	85 %	850.000.000	91.2 %	867.000.000	93.1 %	884.425.000	94.5 %	990.250.000	95.2 %	1.032.750.000	95.2 %	Badan Pendapatan Daerah
5	3		KEPEGAWAIAN													
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN	75 %	2.078.720.000	76 %	2.120.294.400	77.7 %	2.162.908.160	78 %	2.421.708.800	78.5 %	2.525.644.800	78.5 %	Badan Kepegawaian Daerah
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan diklat	80 %	80 %	677.348.400	85 %	690.895.368	85 %	704.781.010	90 %	789.110.886	90 %	822.978.306	90 %	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peserta Pelatihan Jabatan fungsional sosial kultural yang lulus post test	80 %	80 %	70.375.000	85 %	71.782.500	85 %	73.225.188	90 %	81.986.875	90 %	85.505.625	90 %	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test	75 %	75 %	1.009.995.000	80 %	1.030.194.900	80 %	1.050.899.798	85 %	1.176.644.175	85 %	1.227.143.925	85 %	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	80 %	80 %	17.527.816.005	85 %	17.878.372.325	85 %	18.237.692.553	90 %	20.419.905.646	90 %	21.296.296.446	90 %	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
5	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset yang diimplementasikan	35 %	40 %	1.339.917.000	45 %	2.386.715.340	50 %	2.434.683.639	60 %	2.726.003.305	65 %	2.842.999.155	65 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	7	PENGELOLAAN PENGHUBUNG															
5	7	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jumlah layanan informasi dan promosi	30 Orang	50 Orang	466.170.000	100 Orang	475.493.400	150 Orang	485.049.885	200 Orang	543.088.050	250 Orang	566.396.550	250 Orang	Badan Penghubung
5	7	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jumlah yang mendapat fasilitasi layanan penghubung	1.000 Orang	2.000 Orang	614.460.500	2.100 Orang	626.749.710	2.200 Orang	639.346.150	2.300 Orang	715.846.483	2.400 Orang	746.569.508	2.400 Orang	Badan Penghubung
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	1	INSPEKTORAT DAERAH															
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Selesai: BPK RI	50 %	60 %	100.000.000	65 %	178.500.000	70 %	182.087.500	75 %	203.875.000	80 %	212.625.000	80 %	Inspektorat
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindakanlanjut Hasil Pengawasan	50 %	60 %	75.000.000	65 %	290.700.000	70 %	296.542.500	75 %	332.025.000	80 %	346.275.000	80 %	Inspektorat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Selesai: ITJEN Kemendagn/Teknis Lainnya	70 %	70 %	6.572.371.000	75 %	6.197.898.420	80 %	6.322.464.026	85 %	7.078.972.215	90 %	7.382.790.765	90 %	Inspektoralat
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Selesai: Inspektorat	50 %	45 %	238.000.000	40 %	242.760.000	35 %	247.639.000	30 %	277.270.000	25 %	289.170.000	25 %	Inspektoralat
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan	WTP Nilai	WTP Nilai	75.000.000	WTP Nilai	663.000.000	WTP Nilai	676.325.000	WTP Nilai	757.250.000	WTP Nilai	789.750.000	WTP Nilai	Inspektoralat
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	50 %	60 %	285.000.000	70 %	66.300.000	80 %	67.632.500	85 %	75.725.000	90 %	78.975.000	90 %	Inspektoralat
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP	Level 3	Level 3	1.000.000.000	Level 3	2.015.520.000	Level 3	2.056.028.000	Level 3	2.302.040.000	Level 3	2.400.840.000	Level 3	Inspektoralat
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN	Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat 3	Tingkat 3	150.000.000	Tingkat 3	270.300.000	Tingkat 3	275.732.500	Tingkat 3	308.725.000	Tingkat 3	321.975.000	Tingkat 3	Inspektoralat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		DAN ASISTENSI	Tengah														
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8	1	2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang)	200 Orang	200 Orang	969.914.900	200 Orang	989.313.198	200 Orang	1.009.196.453	200 Orang	1.129.950.859	200 Orang	1.178.446.604	200 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	78,24 Nilai/Angka	78,25 Nilai/Angka	5.578.172.250	78,5 Nilai/Angka	5.689.735.695	78,75 Nilai/Angka	5.804.088.226	79 Nilai/Angka	6.498.570.671	79,25 Nilai/Angka	6.777.479.284	79,25 Nilai/Angka	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Persen)	75 %	75 %	198.514.000	80 %	202.484.280	85 %	206.553.817	90 %	231.268.810	95 %	241.194.510	95 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan	175 Orang	175 Orang	1.062.060.250	200 Orang	1.083.301.455	200 Orang	1.105.073.690	200 Orang	1.237.300.191	200 Orang	1.290.403.204	200 Orang	Badan Kesatuan Bangsa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (orang)														dan Politik
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	70 %	70 % 1.665.094.000	80 %	80 % 1.698.395.880	85 %	85 % 1.732.530.307	90 %	90 % 1.939.834.510	95 %	95 % 2.023.089.210	95 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X																	
X	X	X															
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 % 100 % 794.308.559.174	100 %	100 % 810.194.730.357	100 %	100 % 826.478.055.821	100 %	100 % 925.369.471.438	100 %	100 % 965.084.899.396	100 %		Dinas Pendidikan
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 % 100 % 26.053.471.200	100 %	100 % 26.574.540.624	100 %	100 % 27.108.636.784	100 %	100 % 30.352.293.948	100 %	100 % 31.654.967.508	100 %		Dinas Kesehatan
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Presentase Keterlaksanaan	100 % 100 % 43.063.819.500	100 %	100 % 43.925.091.810	100 %	100 % 44.807.900.028	100 %	100 % 50.169.345.058	100 %	100 % 52.322.535.833	100 %		Dinas Pekerjaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																	Umum dan Penataan Ruang	
X	X X	1	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	11.472.563.000	100 %	11.702.014.260	100 %	11.937.201.802	100 %	13.365.535.895	100 %	13.939.164.045	100 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	X X	1	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	9.711.126.000	100 %	10.500.000.000	100 %	12.600.000.000	100 %	15.120.000.000	100 %	18.144.000.000	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
X	X X	1	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	22.250.167.533	100 %	22.695.170.884	100 %	23.151.299.318	100 %	25.921.445.176	100 %	27.033.953.553	100 %	Dinas Sosial
X	X X	1	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	18.257.399.000	100 %	18.622.546.980	100 %	18.996.823.660	100 %	21.269.869.835	100 %	22.182.739.785	100 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	11.066.681.398	100 %	11.236.536.646	100 %	11.462.369.000	100 %	12.833.887.444	100 %	13.384.698.064	100 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	8.087.690.000	100 %	8.249.443.800	100 %	8.415.241.445	100 %	9.422.158.850	100 %	9.826.543.350	100 %	Dinas Ketahanan Pangan
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	8.771.609.419	100 %	8.947.041.607	100 %	9.126.859.600	100 %	10.218.924.973	100 %	10.657.505.444	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	5.766.502.000	100 %	5.881.832.040	100 %	6.000.045.331	100 %	6.717.974.830	100 %	7.006.299.930	100 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 % 9.929.422.040	100 %	10.128.010.481	100 %	10.331.563.633	100 %	11.567.776.677	100 %	12.064.247.779	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 % 12.670.530.552	100 %	13.250.708.363	100 %	13.517.021.619	100 %	15.134.387.493	100 %	15.783.932.021	100 %	Dinas Perhubungan	
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 % 11.762.374.698	100 %	11.997.622.192	100 %	12.238.750.873	100 %	13.703.166.523	100 %	14.291.285.258	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 % 8.685.417.000	100 %	8.859.125.340	100 %	9.037.176.389	100 %	10.118.510.805	100 %	10.552.781.655	100 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 % 11.342.195.800	100 %	11.569.039.716	100 %	11.801.554.730	100 %	13.213.658.107	100 %	13.780.767.897	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																Satu Pintu	
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	10.914.200.506	100 %	11.132.484.516	100 %	11.356.225.626	100 %	12.715.043.589	100 %	13.260.753.615	100 %	Dinas Pemuda dan Olahraga
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	11.709.598.000	100 %	11.943.789.960	100 %	12.183.836.719	100 %	13.641.681.670	100 %	14.227.161.570	100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	16.426.501.600	100 %	16.755.031.632	100 %	17.091.774.915	100 %	19.136.874.364	100 %	19.958.199.444	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	14.674.273.000	100 %	14.967.758.460	100 %	15.268.581.057	100 %	17.095.528.045	100 %	17.829.241.695	100 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	62.782.894.300	100 %	64.038.552.186	100 %	65.325.601.519	100 %	73.142.071.860	100 %	76.281.216.575	100 %	Dinas Kehutanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	17.229.071.000	100 %	17.573.652.420	100 %	17.926.848.376	100 %	20.071.867.715	100 %	20.933.321.265	100 %	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	14.418.195.000	100 %	14.706.558.900	100 %	15.002.131.898	100 %	16.797.197.175	100 %	17.518.106.925	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	137.313.557.145	100 %	140.314.785.300	100 %	143.134.837.358	100 %	160.261.494.975	100 %	167.139.670.725	100 %	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	15.755.191.000	100 %	16.070.294.820	100 %	16.393.276.236	100 %	18.354.797.515	100 %	19.142.557.065	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	23.406.430.459	100 %	23.874.559.068	100 %	24.354.390.893	100 %	27.268.491.485	100 %	28.438.813.008	100 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	10.231.073.000	100 %	10.435.694.460	100 %	10.645.431.457	100 %	11.919.200.045	100 %	12.430.753.695	100 %	Badan Kepegawaian Daerah
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	52.319.049.100	100 %	53.365.430.082	100 %	54.437.970.589	100 %	60.951.692.202	100 %	63.567.644.657	100 %	Sekretariat DPRD
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	23.825.288.000	100 %	23.042.093.760	100 %	23.505.194.664	100 %	26.317.685.520	100 %	27.447.199.920	100 %	Inspektorat
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	145.000.000.000	100 %	147.900.000.000	100 %	150.872.500.000	100 %	168.925.000.000	100 %	176.175.000.000	100 %	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	25.690.909.000	100 %	26.305.176.780	100 %	26.833.859.255	100 %	30.044.638.185	100 %	31.334.107.635	100 %	RSJ Kalawa Atei
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	22.399.623.000	100 %	22.847.615.460	100 %	23.306.807.732	100 %	26.095.560.795	100 %	27.215.541.945	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			PROVINSI													
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 % 32.730.307.000	100 %	100 % 33.384.913.140	100 %	100 % 34.055.884.434	100 %	100 % 38.130.807.655	100 %	100 % 39.767.323.005	100 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 % 77.881.122.569	100 %	100 % 79.438.745.020	100 %	100 % 81.035.308.033	100 %	100 % 90.731.507.793	100 %	100 % 94.625.563.921	100 %	Badan Pendapatan Daerah
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 % 12.932.549.595	100 %	100 % 13.191.200.587	100 %	100 % 13.456.317.854	100 %	100 % 15.066.420.278	100 %	100 % 15.713.047.758	100 %	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 % 124,300,477,250	100 %	100 % 129,322,566,745	100 %	100 % 132,371,451,665	100 %	100 % 148,351,264,959	100 %	100 % 155,568,057,446	100 %	Sekretariat Daerah
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 % 8.171.884.500	100 %	100 % 8.335.322.190	100 %	100 % 8.502.845.822	100 %	100 % 9.520.245.443	100 %	100 % 9.928.839.668	100 %	Badan Penghubung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			PROVINSI														
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 % 15.712.129.000	100 %	100 % 16.026.371.580	100 %	100 % 16.348.470.225	100 %	100 % 18.304.630.285	100 %	100 % 19.090.236.735	100 %	100 %	Dinas Perkebunan
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 % 7.841.573.600	100 %	100 % 7.998.405.072	100 %	100 % 8.159.157.317	100 %	100 % 9.135.433.233	100 %	100 % 9.527.511.907	100 %	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 7.3 REKAPITULASI PROGRAM RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026

NO.	KODE			PROGRAM	PAGU				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	969.686.332	989.080.059	1.008.958.628	1.129.684.577	1.178.168.893
2	4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	30.123.283.900	30.725.749.578	31.343.276.898	35.093.625.744	36.599.789.939
3	4	1	5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.066.830.450	2.108.167.059	2.150.537.083	2.407.857.474	2.511.198.997
4	2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	225.000.000	2.077.000.000	2.104.675.000	2.272.750.000	2.340.250.000
5	1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.330.683.000	6.778.575.380	17.079.850.670	17.509.059.135	17.860.950.085
6	4	1	8	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.098.406.400	2.140.374.528	2.183.391.859	2.444.643.456	2.549.563.776
7	4	1	7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.163.000.000	2.206.260.000	2.250.601.500	2.519.895.000	2.628.045.000
8	5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.078.720.000	2.120.294.400	2.162.908.160	2.421.708.800	2.525.644.800
9	4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	206.890.000.000	211.027.800.000	215.269.045.000	241.026.850.000	251.371.350.000
10	3	28	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	460.500.000	469.710.000	479.150.250	536.482.500	559.507.500
11	5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.377.511.000	2.935.061.220	2.994.050.196	3.352.300.315	3.496.175.865
12	2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	333.500.000	5.000.000.000	6.455.000.000	6.900.000.000	7.250.000.000
13	2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	105.000.000	107.100.000	109.252.500	122.325.000	127.575.000
14	2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	520.458.200	530.867.364	541.536.757	606.333.803	632.356.713

NO.	KODE			PROGRAM	PAGU				
					2022	2023	2024	2025	2026
15	5	7	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.080.630.500	1.102.243.110	1.124.396.035	1.258.934.533	1.312.966.058
16	2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	575.000.000	586.500.000	598.287.500	669.875.000	698.625.000
17	2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	59.500.000	60.690.000	61.909.750	69.317.500	72.292.500
18	3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	140.000.000	3.142.800.000	3.145.670.000	3.163.100.000	3.170.100.000
19	3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	80.000.000	551.900.000	558.972.500	601.925.000	619.175.000
20	8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	198.514.000	202.484.280	206.553.817	231.268.810	241.194.510
21	2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	147.287.500	150.233.250	153.252.644	171.589.938	178.954.313
22	2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	434.000.000	442.680.000	451.577.000	505.610.000	527.310.000
23	2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.576.554.778	2.628.085.874	2.680.905.247	3.001.686.316	3.130.514.055
24	1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	103.330.000	105.396.600	107.514.865	120.379.450	125.545.950
25	1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	812.784.854	829.040.551	845.702.641	946.894.355	987.533.598
26	2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	158.000.000	161.160.000	164.399.000	184.070.000	191.970.000
27	2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	651.398.581	664.426.553	677.780.224	758.879.347	791.449.276

NO.	KODE			PROGRAM	PAGU				
					2022	2023	2024	2025	2026
28	8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.062.060.250	1.083.301.455	1.105.073.690	1.237.300.191	1.290.403.204
29	2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	136.994.500	139.734.390	142.542.777	159.598.593	166.448.318
30	2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	897.500.000	915.450.000	933.848.751	1.045.587.501	1.090.462.501
31	2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	2.601.250.000	2.912.500.000	3.037.500.000
32	2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	360.341.370	367.548.197	374.935.195	419.797.696	437.814.765
33	1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	113.815.890.366	115.551.378.351	117.873.734.485	131.977.799.783	137.642.083.036
34	4	1	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.226.410.400	3.674.218.398	3.865.000.000	4.196.533.759	4.376.642.504
35	1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.330.737.950	5.437.352.709	5.546.632.837	6.210.309.712	6.476.846.609
36	2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.000.000	51.000.000	52.025.000	58.250.000	60.750.000
37	2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	40.000.000	40.800.000	41.620.000	46.600.000	48.600.000
38	1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	183.787.850	187.463.607	191.231.258	214.112.845	223.302.238
39	1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.260.000.000	4.770.000.000	5.240.500.000	5.905.000.000	6.603.000.000
40	1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	36.600.000.000	13.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
41	1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	64.967.577.983	106.470.800.000	101.000.000.000	125.000.000.000	130.000.000.000
42	2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	-	306.000.000	312.150.000	349.500.000	364.500.000
43	4	1	2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.217.457.000	1.241.806.140	1.266.764.009	1.418.337.405	1.479.210.255

NO.	KODE			PROGRAM	PAGU				
					2022	2023	2024	2025	2026
44	2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	90.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
45	1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	240.167.000	1.000.000.000	1.200.000.000	1.440.000.000	1.728.000.000
46	2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	85.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
47	1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.026.339.600	1.046.866.392	1.067.906.354	1.195.685.634	1.247.002.614
48	2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.428.964.000	2.477.543.280	2.527.337.042	2.829.743.060	2.951.191.260
49	3	28	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	31.488.427.000	32.118.195.540	32.763.708.294	36.684.017.455	38.258.438.805
50	5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.339.917.000	2.386.715.340	2.434.683.639	2.726.003.305	2.842.999.155
51	2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	35.000.000	632.520.000	639.203.000	679.790.000	696.090.000
52	2	11	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	60.000.000	61.200.000	62.430.000	69.900.000	72.900.000
53	2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.283.531.350	1.309.201.977	1.335.514.370	1.495.314.023	1.559.490.590
54	2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	167.500.000	170.850.000	174.283.750	195.137.500	203.512.500
55	2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	90.000.000	91.800.000	93.645.000	104.850.000	109.350.000
56	2	7	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	200.000.000	557.000.000	564.175.000	607.750.000	625.250.000

NO.	KODE			PROGRAM	PAGU				
					2022	2023	2024	2025	2026
57	3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	442.503.000	451.353.060	460.424.372	515.515.995	537.641.145
58	2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.484.741.667	4.574.436.500	4.666.373.705	5.224.724.042	5.448.961.125
59	2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	104.233.000	106.317.660	108.454.437	121.431.445	126.643.095
60	3	29	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	3.833.263.550	3.982.608.239	4.332.078.813	4.481.486.003
61	5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.172.429.829	5.275.878.426	5.381.913.237	6.025.880.751	6.284.502.242
62	3	28	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	650.000.000	663.000.000	676.325.000	757.250.000	789.750.000
63	1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.800.000.000	2.800.000.000	6.000.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000
64	1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.130.000.000	5.650.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000	12.000.000.000
65	1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.600.000.000	4.000.000.000	8.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
66	2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	150.000.000	153.000.000	156.075.000	174.750.000	182.250.000
67	3	29	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	-	5.366.568.970	5.575.651.534	6.064.910.338	6.274.080.404
68	3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	132.748.004.700	135.402.964.794	138.124.298.890	154.651.425.476	161.288.825.711
69	2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	176.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
70	2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	20.930.438.635	21.349.047.408	21.778.121.400	24.383.961.010	25.430.482.942
71	2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	60.000.000	61.200.000	62.430.000	69.900.000	72.900.000

NO.	KODE			PROGRAM	PAGU				
					2022	2023	2024	2025	2026
72	3	25	2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	450.000.000	459.000.000	468.225.000	524.250.000	546.750.000
73	3	29	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.623.250.000	1.655.715.000	1.688.991.625	1.891.086.250	1.972.248.750
74	5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.044.104.169.067	1.105.679.240.248	1.223.544.912.074	1.233.933.599.465	1.275.881.425.419
75	3	29	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	20.000.000	20.400.000	20.810.000	23.300.000	24.300.000
76	2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	6.453.360.148	3.825.000.151	5.110.475.154	5.716.750.172	5.954.250.180
77	5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	26.969.145.624	27.508.528.536	28.061.396.021	31.419.054.652	32.767.511.933
78	1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	389.132.533.036	396.915.183.697	409.190.063.123	453.339.400.988	472.796.027.640
79	3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.435.894.600	3.504.612.492	3.575.048.331	4.002.817.209	4.174.611.939
80	3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	14.451.439.800	14.740.468.596	15.036.723.112	16.835.927.367	17.558.499.357
81	2	15	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-	1.224.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000
82	2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.900.000.000	1.938.000.000	1.976.950.000	2.213.500.000	2.308.500.000
83	2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.375.000.000	4.462.500.000	4.552.187.500	5.096.875.000	5.315.625.000
84	2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	94.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
85	2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	218.245.000	222.609.900	227.083.923	254.255.425	265.167.675
86	3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.000.000	102.000.000	104.050.000	116.500.000	121.500.000
87	1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	72.727.325.000	39.200.000.000	40.000.000.000	62.000.000.000	62.543.042.656

NO.	KODE			PROGRAM	PAGU				
					2022	2023	2024	2025	2026
88	2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	15.000.000	15.300.000	15.607.500	17.475.000	18.225.000
89	1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	180.000.000	183.600.000	187.290.000	209.700.000	218.700.000
90	1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	510.000.000	520.250.000	582.500.000	607.500.000
91	2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.277.184.494	7.422.728.184	7.571.910.466	8.477.919.936	8.841.779.160
92	3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	372.500.000	379.950.000	387.586.250	433.962.500	452.587.500
93	2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	591.045.200	602.866.104	614.982.531	688.567.658	718.119.918
94	1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.904.300.000	3.500.000.000	3.500.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
95	2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.872.950.000	1.910.409.000	1.948.804.475	2.181.986.750	2.275.634.250
96	2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	3.000.000.000	3.060.000.000	3.121.500.000	3.495.000.000	3.645.000.000
97	3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	200.000.000	541.700.000	548.567.500	590.275.000	607.025.000
98	2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5.073.000.000	5.174.460.000	5.278.456.500	5.910.045.000	6.163.695.000
99	2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	3.060.000.000	3.121.500.000	3.495.000.000	3.645.000.000
100	1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	3.457.466.190	3.526.615.514	3.597.493.571	4.027.948.111	4.200.821.421
101	1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	59.039.645.000	91.686.045.000	71.096.845.000	70.000.000.000	70.000.000.000
102	1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	200.000.000	225.000.000	240.000.000	250.000.000	260.000.000
103	1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000

NO.	KODE			PROGRAM	PAGU				
					2022	2023	2024	2025	2026
104	5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19.285.534.405	19.671.245.093	20.066.598.549	22.467.647.582	23.431.924.302
105	3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	75.000.000	3.765.000.000	3.780.375.000	3.873.750.000	3.911.250.000
106	2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	30.000.000	30.600.000	31.215.000	34.950.000	36.450.000
107	2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	200.000.000	204.000.000	208.100.000	233.000.000	243.000.000
108	3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	910.000.000	928.200.000	946.855.000	1.060.150.000	1.105.650.000
109	3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
110	3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.075.000.000	1.096.500.000	1.118.537.500	1.252.375.000	1.306.125.000
111	2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	874.026.000	891.506.520	909.424.052	1.018.240.292	1.061.941.592
112	2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	430.000.000	438.600.000	447.415.000	500.950.000	522.450.000
113	2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	198.477.300	202.446.846	206.515.631	231.226.055	241.149.920
114	1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	19.268.600.000	19.653.972.000	20.048.978.300	22.447.919.000	23.411.349.000
115	3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	510.000.000	520.250.000	582.500.000	607.500.000
116	2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	305.000.000	311.100.000	317.352.500	355.325.000	370.575.000

NO.	KODE			PROGRAM	PAGU				
					2022	2023	2024	2025	2026
117	3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	150.000.000	153.000.000	156.075.000	174.750.000	182.250.000
118	8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	969.914.900	989.313.198	1.009.196.453	1.129.950.859	1.178.446.604
119	2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	202.000.000	206.040.000	210.181.000	235.330.000	245.430.000
120	3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	825.000.000	2.841.500.000	2.858.412.500	2.961.125.000	3.002.375.000
121	2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.099.845.000	1.121.841.900	1.144.388.723	1.281.319.425	1.336.311.675
122	1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	15.671.470.289	19.006.607.325	19.388.602.865	21.708.526.994	22.640.223.431
123	2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	55.034.850	56.135.547	57.263.761	64.115.600	66.867.343
124	1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	600.000.000	612.000.000	1.560.779.392	699.000.000	729.000.000
125	8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.665.094.000	1.698.395.880	1.732.530.307	1.939.834.510	2.023.089.210
126	2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	157.547.750	160.698.705	163.928.434	183.543.129	191.420.516
127	1	4	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	200.000.000	210.000.000	250.000.000	300.000.000
128	2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	200.000.000	204.000.000	208.100.000	233.000.000	243.000.000

NO.	KODE			PROGRAM	PAGU				
					2022	2023	2024	2025	2026
129	8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.578.172.250	5.689.735.695	5.804.088.226	6.498.570.671	6.777.479.284
130	1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.624.991.000	17.000.000.000	21.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000
131	3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	76.200.000	77.724.000	79.286.100	88.773.000	92.583.000
132	3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.340.000.000	4.426.800.000	4.515.770.000	5.056.100.000	5.273.100.000
133	3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	26.974.195.000	27.513.678.900	28.066.649.898	31.424.937.175	32.773.646.925
134	1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	782.217.363.500	769.140.000.000	780.000.000.000	804.382.492.907	804.215.428.701
135	2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11.337.167.300	11.443.550.646	11.673.543.576	13.070.329.905	13.631.288.270
136	1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.902.661.000	3.000.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
137	6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.345.371.000	7.639.158.420	7.792.690.526	8.725.117.215	9.099.585.765
138	2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	205.400.000	209.508.000	213.718.700	239.291.000	249.561.000
139	2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	30.000.000	30.600.000	31.215.000	34.950.000	36.450.000
140	2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	158.297.500	161.463.450	164.708.549	184.416.588	192.331.463
141	3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.200.000.000	1.224.000.000	1.248.600.000	1.398.000.000	1.458.000.000

NO.	KODE			PROGRAM	PAGU				
					2022	2023	2024	2025	2026
142	4	1	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.400.598.500	1.428.610.470	1.457.322.739	1.631.697.253	1.701.727.178
143	3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.940.000.000	1.978.800.000	2.018.570.000	2.260.100.000	2.357.100.000
144	3	32	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100.000.000	546.800.000	553.770.000	596.100.000	613.100.000
145	2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	485.000.000	494.700.000	504.642.500	565.025.000	589.275.000
146	2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	35.000.000	600.000.000	620.000.000	640.000.000	665.000.000
147	5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.390.160.000	4.579.963.200	4.672.011.480	5.231.036.400	5.455.544.400
148	3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
149	3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	600.000.000	1.122.000.000	1.144.550.000	1.281.500.000	1.336.500.000
150	1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.062.602.350	1.083.854.397	1.105.637.745	1.237.931.738	1.291.061.856
151	2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	92.524.000	94.374.480	96.271.222	107.790.460	112.416.660
152	2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	527.592.211	589.622.435	601.472.690	673.441.311	702.344.371
153	2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	732.330.621	746.977.233	761.990.011	853.165.173	889.781.705
154	6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.150.000.000	2.285.820.000	2.331.760.500	2.610.765.000	2.722.815.000
155	2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	269.158.800	274.541.976	280.059.731	313.570.002	327.027.942
156	2	10	6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	397.202.500	405.146.550	413.289.201	462.740.913	482.601.038
157	1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.032.124.463	6.152.766.952	6.276.425.504	7.027.424.999	7.329.031.223

NO.	KODE			PROGRAM	PAGU				
					2022	2023	2024	2025	2026
158	1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	66.908.000	68.246.160	69.617.774	77.947.820	81.293.220
159	3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	288.800.000	294.576.000	300.496.400	336.452.000	350.892.000
160	3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	880.100.000	897.702.000	915.744.050	1.025.316.500	1.069.321.500
161	X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.896.865.425.938	1.937.304.457.238	1.978.579.203.677	2.216.477.541.838	2.314.830.191.697
TOTAL PAGU					5.191.681.877.531	5.374.733.269.588	5.584.133.916.411	6.074.137.042.182	6.283.625.323.438
TOTAL PROGRAM					150 Program	160 Program	161 Program	161 Program	161 Program



BAB VIII



KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

8.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari

rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di masa kini maupun yang akan datang. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan. IKU diambil dari indikator tujuan RPJMD, sedangkan IKD merupakan indikator sasaran dari RPJMD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,57 %	5,60 %	5,70 %	5,80 %	5,90 %	6,00 %	6,00 %
2	Indeks Ketimpangan (Indeks Williamson)	0,16 %	0,149 %	0,143 %	0,138 %	0,132 %	0,127 %	0,127 %
3	Indeks Gini	0.329 Angka	0.228 Angka	0.222 Angka	0.216 Angka	0.210 Angka	0.204 Angka	0.204 Angka
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,74 Poin	74,30 Poin	74,53 Poin	74,75 Poin	74,97 Poin	75,16 Poin	75,16 Poin
5	Indeks Demokrasi Indonesia (ID)	74,91 %	75,00 %	75,50 %	76,00 %	76,50 %	76,50 %	76,50 %
6	Prosentase Penduduk Miskin	5,16 %	4,96%	4,81 %	4,66 %	4,41 %	4,36 %	4,36 %
7	Indeks Resiko Bencana	131 Angka	130 Angka	129 Angka	128 Angka	127 Angka	126 Angka	126 Angka
8	Indeks Reformasi Birokrasi	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,05 %	72,36 %	72,89 %	73,42 %	73,95 %	74,48 %	74,48 %
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,58 %	4,10 %	4,00 %	3,90 %	3,70 %	3,50 %	3,50 %
11	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,82 %	77,97 %	78,02 %	78,07 %	78,12 %	78,17 %	78,17 %
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,03 %	89,07 %	89,09 %	89,11 %	89,13 %	89,15 %	89,15 %

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Elektrifikasi	86,82 Angka	91,2 Angka	93,39 Angka	95,58 Angka	97,77 Angka	100 Angka	100 Angka
2	Rasio Desa Berlistrik	92,55 Angka	95,03 Angka	96,27 Angka	97,51 Angka	98,75 Angka	100 Angka	100 Angka
3	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)	7%	9 %	12 %	15 %	18 %	20 %	20 %
4	Rasio Konektivitas Jalan Provinsi	0,34 Angka	0,34 Angka	0,36 Angka	0,38 Angka	0,39 Angka	0,39 Angka	0,39 Angka
5	Rasio konektivitas sektor transportasi	0,85 Angka	0,86 Angka	0,87 Angka	0,88 Angka	0,89 Angka	0,9 Angka	0,9 Angka
6	Persentase Desa Bersinyal	67%	71 %	79 %	87 %	92 %	98 %	98 %
7	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	270004 Ha	345.000 Ha	385.000 Ha	425.000 Ha	465.000 Ha	505.000 Ha	505.000 Ha
8	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver	81 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit	330 Unit	410 Unit	410 Unit
9	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	15,96%	16,00 %	16,10 %	16,20 %	16,30 %	16,40 %	16,40 %
10	Kontribusi Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	21,80%	23,4 %	24,3 %	25,2 %	26,1 %	27 %	27 %
11	Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB	13,22%	13,50 %	14,00 %	15,00 %	16,00 %	18,00 %	18,00 %

No	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
12	Jumlah kunjungan wisatawan	773359 Orang	820.457 Orang	845.070 Orang	870.422 Orang	896.535 Orang	923.431 O rang	923.431 O rang
13	Realisasi penanaman modal (dalam juta)	6267959 Juta	7.980.000 Juta	8.300.000 Jut a	8.650.000 Jut a	9.100.000 Jut a	9.630.000 Juta	9.630.000 Juta
14	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBI)	107 Angka	108,25 Angka	109,50 Angka	110,75 Angka	112 Angka	113,25 An gka	113,25 An gka
15	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,19%	13,50 %	13,60 %	13,70 %	13,80 %	13,90 %	13,90 %
16	Kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan RTRW	78%	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %	88 %
17	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,61%	59,50 %	59,60 %	59,70 %	59,80 %	59,90 %	59,90 %
18	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,84%	87,14 %	87,24 %	87,34 %	87,44 %	87,54 %	87,54 %
19	Indeks Kualitas lahan (IKL)	72,33%	73,66 %	74,33 %	74,99 %	75,66 %	76,06 %	76,06 %
20	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	65,04	70,48 %	71,08 %	71,67 %	72,28 %	72,88 %	72,88 %
21	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teratasi	80%	80 %	82 %	82 %	83 %	85 %	85 %
22	Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	7:10.000 per 1.000 penduduk	9:10.000 per 1.000 penduduk	9:10.000 per 1.000 penduduk	10:10.000 per 1.000 penduduk	10:100.000 pe r 1.000 penduduk	11:10.000 per 1.000 penduduk	11:10.000 per 1.000 penduduk
23	Persentase penduduk miskin pedesaan	5,38%	5,30 %	5,25 %	5,20 %	5,10 %	5,00 %	5,00 %
24	Persentase penduduk miskin perkotaan	4,86%	4,80 %	4,75 %	4,70 %	4,65 %	4,60 %	4,60 %
25	Persentase rumah layak huni	54,41%	59,93 %	65,46 %	70,98 %	71,28 %	71,58 %	71,58 %
26	Persentase akses air minum layak	85,85%	90,56 %	95,28 %	100 %	100 %	100 %	100 %
27	Persentase akses sanitasi layak	69%	72 %	76 %	80 %	85 %	90 %	90 %
28	Tingkat Indeks ketahanan daerah	3,2 Angka	3,30 Angka	3,40 Angka	3,50 Angka	3,60 Angka	3,70 Angk	3,70 Angk

No	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
							a	a
29	Kontribusi Penguatan Cadangan pangan daerah (Persentase)	5,05 Angka	50,5 %	60,5 %	70,5 %	80,5 %	90,5 %	90,5 %
30	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	85%	87 %	88 %	90 %	92 %	94 %	94 %
31	Indeks Profesionalisme ASN	74,69%	75,5 %	76 %	78 %	78 %	79 %	79 %
32	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	63,50%	69,21 %	71,68 %	74,79 %	78,69 %	84,82 %	84,82 %
33	Jumlah Kajian Kelitbangan	2 Kajian	2 Kajian	4 Kajian	4 Kajian	4 Kajian	5 Kajian	5 Kajian
34	Indeks Inovasi Digital Daerah	64,53%	79,43 %	79,61 %	81,11 %	83,27 %	83,27 %	83,27 %
35	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	A Predikat	A Predikat	A Predikat
36	Opini BPK	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai
37	Indeks Pendidikan	0,638 Indeks	0,657 Indeks	0,677 Indeks	0,682 Indeks	0,687 Indeks	0,692 Indeks	0,692 Indeks
38	Indeks kesehatan	0,765 Indeks	0,769 Indeks	0,772 Indeks	0,776 Indeks	0,781 Indeks	0,786 Indeks	0,786 Indeks
39	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	74,06 Angka Indeks	78 Angka Indeks	80 Angka Indeks	81 Angka Indeks	82 Angka Indeks	82,50 Angka Indeks	82,50 Angka Indeks
40	Nilai Toleransi	76,52 Angka	76,65 Angka	76,7 Angka	76,8 Angka	76,9 Angka	77 Angka	77 Angka
41	Nilai Kesetaraan	78,37 Angka	78,49 Angka	78,55 Angka	78,61 Angka	78,67 Angka	78,73 Angka	78,73 Angka
42	Nilai Kerjasama	78,57 Angka	78,71 Angka	78,78 Angka	78,85 Angka	78,92 Angka	78,99 Angka	78,99 Angka
43	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,76%	56,76 %	57,26 %	58,76 %	58,26 %	58,76 %	58,76 %
44	Indeks Pemberdayaan Gender	79,67%	81,90 %	81,92 %	81,94 %	81,96 %	81,98 %	81,98 %

Tabel 8. 3 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi		Target Kinerja				PD Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
I Pendapatan								
1.1	Persentase optimalisasi penerimaan pendapatan daerah (%)	100	100	100	100	100	100	Bappenda
1.2	Rasio kemandirian keuangan daerah (%)	36	40	42.3	44.2	46.4	47.5	Bappenda
1.3	Indeks kepuasan pelayanan (%)	85	90	91.2	93.1	94.5	95.2	Bappenda
II. Kesejahteraan Sosial								
2 Pendidikan								
2.1	Angka Harapan Lama Sekolah	14.5	14.5	14.6	14.7	14.8	15	Disdik
2.2	Rata-rata Lama Sekolah	9	9,5	10	10,5	11	11,5	Disdik
2.3	Angka Melek Huruf	99.8	99.8	99.82	99.84	99.85	99.90	Disdik
3 Kesehatan								
3.1	Umur Harapan Hidup (tahun)	69.84	69.99	70.19	70.44	70.74	71.09	Dinkes (BPS)
3.2	Persentase Balita Wasting	8.1	7.8	7.5	7.3	7.0	6.7	Dinkes (Bidang Kesmas)
3.3	Persentase Balita Stunting (%)	24,1	21.1	18.4	16	14	12	Dinkes (Bidang Kesmas)
3.4	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	7.3	7.1	6.9	6.7	6.5	6,3	Dinkes (Bidang Kesmas)
3.5	Angka Kematian Ibu per	137	134	131	128	125	122	Dinkes (Bidang

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100.000 Kelahiran Hidup (indeks)							Kesmas)
4	Ketenagakerjaan							
4.1	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	95,75	95,90	96.00	96.10	96.30	96.50	Disnakertrans
5	Kesejahteraan Rakyat							
5.1	Jumlah Tempat Ibadah yang Dikelola	190	200	210	220	230	240	Biro Kesra
5.2	Jumlah Kelembagaan Spiritual yang Dibina	75	80	85	90	95	100	Biro Kesra
5.3	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	11	11	12	13	14	16	Biro Kesra
III	Seni Budaya dan Olahraga							
1	Kebudayaan							
1.1	Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (grup)	360	360	380	400	430	450	Disbudpar
1.2	Jumlah pemanfaatan gedung (kali)	15	30	35	40	45	50	Disbudpar
2	Pemuda Dan Olahraga							
2.1	Jumlah Klub olahraga (buah)	136	140	145	150	155	160	Dispورا
2.2	Jumlah gedung olahraga (unit)	3	3	4	5	6	7	Dispورا
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM							
I.	Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar							
1	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan menengah							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi		Target Kinerja				PD Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	Prosentase guru SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang berkualifikasi minimal S1/D4	96,33	97	99	100	100	100	Disdik
1.1.2	Prosentase guru SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang bersertifikasi	42,46	55,33	66,50	77,67	88,63	100	Disdik
1.1.3	Persentase SMA berakreditasi minimal B (%)	52.55	62.04	72.13	81.3	90.2	95.6	Disdik
1.1.4	Persentase SMK Berakreditasi minimal B (%)	52.55	62.04	73.7	81.4	90.6	95.8	Disdik
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	67,17	67,67	68,17	68,67	69,17	69,67	Disdik
1.1.6	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK	84,4	84,4	85.5	86.2	87.46	88.02	Disdik
1.1.7	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,6	0,6	0.58	0.55	0.50	0.45	Disdik
1.1.8	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	87,84	89,25	90,42	92,75	94,15	95,85	Disdik
1.1.9	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkatagori	48 %	49 %	49,5 %	50 %	50,5 %	51 %	Disdik

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mahir							
1.1.10	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkatagori Minimal Dasar	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	Disdik
2	Kesehatan							
2.1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provins	100	100	100	100	100	100	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)
2.2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100	100	100	100	100	100	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)
2.3	Insidensi HIV (per 1000 pddk yg tdk terinfeksi HIV)	0.156	0.152	0.148	0.144	0.140	0.136	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)
2.4	Insidensi TB (per 100.000 penduduk)	58.17	54.62	51.1	47.5	44	40.4	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)
2.5	Eliminasi malaria (kab/kota)	11	11	12	13	14	14	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)
2.6	Rasio distribusi tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk Per	0.99	1.04	1.09	1.14	1.19	1.24	Dinkes (Bidang SDK)

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1000 pddk							
2.7	Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) (%) (45/100.000)	26.52	28.02	29.5	31	32.5	34	Dinkes (Bidang SDK)
2.8	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (9 nakes)	21.21	21.71	22.2	22.7	23.2	23.7	Dinkes (Bidang SDK)
2.9	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terakreditasi	97.10	99.10	100	100	100	100	Dinkes (Bidang Yankes)
2.10	Persentase rumah sakit terakreditasi	100	100	100	100	100	100	Dinkes (Bidang Yankes)
2.11	Cakupan kepesertaan JKN (persen)	89.44	91.44	93.4	95.4	97.4	99.4	Dinkes (Bidang Yankes)
2.12	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (persen)	85	90	92	94	96	98	Dinkes (Bidang SDK)
2.13	Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS)	33	40	45	50	55	60	Dinkes (Bidang Kesmas)
2.14	Jumlah Kab/kota yang melakukan Pandu (Pelayanan Terpadu) PTM (penyakit Tidak menular)	5	8	11	14	14	14	Dinkes (Bidang P2)

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	di > 80% Puskesmas							
2.15	Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	16	18	20	22	24	26	Dinkes (Bidang SDK)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	0,41	0,42	0,43	0,45	0,47	0,47	DPUPR
3.2	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	82,09	85,32	85,61	86,01	87,20	89,91	DPUPR
3.3	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	40,72	41,53	43,20	45,35	46,72	47,18	DPUPR
3.4	Persentase Jalan Provinsi yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	63,14	63,14	63,46	63,85	64,16	64,46	DPUPR
3.5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	69	72	76	80	85	90	DPUPR
3.6	Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik	77,15	77,45	77,56	77,63	77,69	77,77	DPUPR
3.7	Rasio Jaringan Irigasi	23,27	23,85	24,49	24,89	25,38	25,75	DPUPR
3.8	Persentase penduduk berakses air minum	85,85	90,56	95,28	100	100	100	DPUPR
3.9	Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	5	7	8	9	10	11	DPUPR

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.10	Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter)	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	DPUPR
3.11	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	530	830	1.080	1.330	1.730	2.130	DPUPR
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman							
4.1	Persentase Rumah layak huni (%)	54,41	59,93	65,46	70,98	71,28	71,58	Dinas Perkimtan
4.2	Rasio rumah layak huni	1 : 7,01	1 : 6,36	1 : 5,83	1 : 5,37	1 : 5,35	1 : 5,33	Dinas Perkimtan
4.3	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0,051	0,0511	0,0511	0,0511	0,0510	0,0510	Dinas Perkimtan
4.4	Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani (%)	1,190	2,381	3,571	4,762	5,952	7,143	Dinas Perkimtan
4.5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani (%)	3,030	6,061	9,091	12,121	15,152	18,182	Dinas Perkimtan
4.6	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Perkimtan
4.7	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak	100	100	100	100	100	100	Dinas Perkimtan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	huni (%)							
5	Ketentraman, Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat							
5.1	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM aktif (Prosentase)	180	75%	75%	75%	75%	75%	Kesbangpol
5.2	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah (nilai)	75,00	75,25	75,50	76,00	76,25	76,50	Kesbangpol
5.3	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang)	200	200	200	200	200	200	Kesbangpol
5.4	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (persentase kasus)	70	70	80	85	90	95	Kesbangpol
5.5	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (Orang)	7:10.000	9:10000	9:10000	10:10.000	11:10.000	11:10.000	SatpolPP
5.6	Jumlah Anggota Linmas yang Terlatih (Orang)	60	65	70	75	80	85	Satpol PP
5.7	Penegakan Perda (kali)	14	17	19	21	23	25	SatpolPP
5.8	Cakupan patroli petugas Satpol PP (kali)	528	792	836	897	920	958	SatpolPP
5.9	Pengamanan Objek Vital dan Aset Pemerintah Provinsi (kali)	1,825	2,000	2,159	2,592	2,812	2,850	SatpolPP
5.10	Pengawasan Pejabat atau	75	100	125	150	175	200	SatpolPP

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tamu VVIP (kali)							
5.11	Koordinasi Kewaspadaan Dini dengan Stakeholder terkait (kegiatan)	3	10	16	21	26	30	SatpolPP
5.12	Persentase Penanganan Pra Bencana	100	100	100	100	100	100	BPBPK
5.13	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100	100	100	BPBPK
5.14	Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan	100	100	100	100	100	100	BPBPK
5.15	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100	100	100	100	100	100	BPBPK
5.16	Terselenggaranya fungsi kelembagaan	12	12	12	12	12	12	BPBPK
5.17	Tersedianya SDM Penanggulangan Bencana yang kompeten	10	10	10	10	10	10	BPBPK
5.18	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	100	100	100	100	100	100	BPBPK
5.19	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	100	100	100	100	100	BPBPK
6	Sosial							
6.1	Sarana sosial seperti	65	65	67	68	69	70	Dinsos

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi		Target Kinerja				PD Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)							
6.2	PPKS yang memperoleh bantuan sosial (Orang)	2,000	1,000	1,000	1,100	1,200	1,200	Dinsos
6.3	Jumlah penanganan kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial (Kasus)	100	100	100	100	100	100	Dinsos
6.4	Potensi dan Sumber Kesos (PSKS) yang mendapat Pembinaan	3,000	3,000	3,100	3,100	3,200	3,300	Dinsos
6.5	Jumlah Fakir Miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar (KK)	20	150	150	175	175	200	Dinsos
6.6	Jumlah PPKS yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar secara inklusivitas di dalam panti (orang)	150	260	300	340	380	400	Dinsos
II.	Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	-	80.00	96.00	96.50	97.00	97.50	Disnakertrans

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72.5	72.50	72.50	72.60	72.60	72.70	Disnakertrans
1.3	Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	2,500	2,500	2,750	3,000	3,250	3,500	Disnakertrans
1.4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.25	4.10	4.00	3.90	3.70	3.50	Disnakertrans
1.5	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	76,00	78,00	80,00	81,00	82,00	82,50	Disnakertrans
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81.88	81.90	81.92	81.94	81.96	81.98	DP3AP2KB
2.2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,43	3,43	3,50	3,60	3,70	4,00	DP3AP2KB
2.3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85	85	87,5	90	92,5	95	DP3AP2KB
2.4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,83	61,83	63,68	65,59	67,55	69,57	DP3AP2KB
2.5	Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	50	50	55	60	65	70	DP3AP2KB
3	Pangan							
3.1	Skor Pola Harapan (PPH) Konsumsi (%)	85,5	88,3	90,4	91	91	92	DKP
3.2	Ketersediaan pangan	337,665	32.000	34.167	36.334	38.500	40.668	DKP

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	utama (surplus beras dalam ton)							
3.3	Penguatan Cadangan Pangan (%)	47.5	50.5	60.5	70.5	80.5	90.5	DKP
3.4	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	28,57	2	2	2	2	2	DKP
3.5	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	88,5	90	90,5	91	91,5	92	DKP
4	Pertanahan							
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	1,08	1,10	1,12	1,13	1,15	1,17	Dinas Perkimtan
4.2	Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%)	20,1	20,2	20,3	20,4	20,5	20,6	Dinas Perkimtan
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,07	74.30	74.53	74.75	74.97	75,16	DLH
5.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)	75	76	77	78	79	80	DLH
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1	Penerbitan Kartu	820.000	822.460	824.105	825.753	827.405	829.059	Disdukcapil

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Keluarga (dokumen)							
6.2	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)	97	98	98,7	99,22	99,30	99,50	Disdukcapi
6.3	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan (%)	37	42	45	50	60	83	Disdukcapi
6.4	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun (%)	95	97	98,50	99,40	99,70	99,90	Disdukcapi
6.5	Persentase Penerbitan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan (%)	68	72,25	75,5	80	85,5	91,25	Disdukcapi
6.6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	33	38	42	47	52	57	Disdukcapi
6.7	Jumlah Instansi/Lembaga yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (lembaga pengguna)	1	2	5	7	10	15	Disdukcapi
6.8	Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan	100	100	100	100	100	100	Disdukcapi

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi		Target Kinerja				PD Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Profil Perkembangan Penduduk (%)							
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Jumlah Aparatur Desa Terlatih	310	650	1010	1380	1770	2170	Dinas PMD
7.2	Jumlah Desa Mandiri	55	60	65	70	75	80	Dinas PMD
7.3	Jumlah Desa Berkembang	737	767	797	817	837	867	Dinas PMD
7.4	Jumlah Desa Tertinggal	361	330	300	270	240	200	Dinas PMD
7.5	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	710	720	730	750	760	780	Dinas PMD
7.6	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang akif	1722	1730	1740	1750	1760	1770	Dinas PMD
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	60,32	62.44	64.55	64.55	64.55	DP3AP2KB
8.2	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	2,10	2,10	2.06	2.00	1.96	1.96	DP3AP2KB
8.3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mPCR)	73.23	73.23	73.68	74.26	74.76	74.76	DP3AP2KB
8.4	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak	5.36	5.36	5.18	5.00	5.01	5.01	DP3AP2KB

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	terpenuhi (Unmeet Need)							
8.5	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate / ASFR</i>)	21	21	20	18	16	16	DP3AP2KB
9	Perhubungan							
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP)	1,377,544	1,500,000	1,638,000	1,765,000	1,854,000	1,870,000	Dishub
9.2	Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	360	380	400	430	450	480	Dishub
9.3	Rasio Izin Trayek	0.000063	0.000074	0.000078	0.00008	0.000082	0.000084	Dishub
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut /Udara/Terminal Bus	3	3	3	3	3	4	Dishub
9.5	Persentase Layanan Angkutan Darat (%)	59	60	63	68	69	73	Dishub
9.6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	85	85	88	93	96	98	Dishub
9.7	Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (%)	100	100	100	100	100	100	Dishub
9.8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0.010	0.012	0.014	0.015	0.017	0.019	Dishub
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum darat (Orang/Barang)	198.802 / 208.742	200.000 / 220.000	220.000 / 240.000	250.000 / 248.000	260.000 / 250.000	280.000 / 260.000	Dishub
9.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/	1.910.257 orang/	2.150.000 orang/	2.200.000 orang/	2.250.000 orang/ 32.370.000 ton	2.267.000 orang/	2.270.000 orang/	Dishub

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	bandara/ terminal per tahun	29.908.494 ton	32.320.000 ton	32.350.000 ton		32.375.000 ton	32.410.000 ton	
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	51	60	68	79	87	98	Diskominfosantik
10.2	Jumlah konten yang disebarluaskan melalui media cetak/ online/ elektronik	500	600	650	698	700	725	Diskominfosantik
10.3	Jumlah website/ aplikasi milik Pemerintah Daerah yang dikembangkan	33	43	48	50	55	60	Diskominfosantik
10.4	Jumlah lokasi yang terhubung dengan <i>Fiber Optic</i> (FO) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	33	43	52	56	58	71	Diskominfosantik
10.5	Jumlah informasi yang di upload pada portal PPID Provinsi Kalimantan Tengah	300	500	540	587	600	650	Diskominfosantik
10.6	Jumlah PD yang terintegrasi dengan Data Center Provinsi Kalimantan Tengah (co-	28	30	33	35	38	41	Diskominfosantik

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	location/hosting)							
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
11.1	Persentase Kontribusi UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%)	46,33	12,00	12,35	13,15	14,00	15,75	Diskop,UKM
11.2	Jumlah Wirausaha (Unit)	70.342	71.495	78.644	86.508	95.158	104.674	Diskop,UKM
11.3	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	66.670	48.000	57.800	69.360	83.232	83.232	Diskop,UKM
11.4	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	9,76	9,99	9,99	9,99	9	9,99	Diskop,UKM
11.5	Persentase Rasio Kewirausahaan	5,09	5,09	5,52	5,98	6,49	7,03	Diskop,UKM
11.6	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Unit)	3.672	4.200	4.242	4.285	4.328	4.371	Diskop,UKM
11.7	Jumlah UMKM yang di dampingi (Unit)	370	480	480	480	480	480	Diskop,UKM
11.8	Lembaga keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USP-Kop/KJKS) (Unit)	2.543	2.000	2.584	2.609	2.634	2.659	Diskop,UKM
11.9	Persentase koperasi aktif (%)	76,19	83,21	83,71	84,21	84,71	85,71	Diskop,UKM
11.10	Pertumbuhan Koperasi (Unit)	82	50	50	50	50	50	Diskop,UKM
11.11	Presentase koperasi yang memiliki kategori sehat/Berkualitas (%)	16,51	17,50	19,00	21,50	25,00	27,50	Diskop,UKM

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.12	Koperasi berprestasi tingkat provinsi dan nasional (unit)	12	12	12	12	12	12	Diskop,UKM
11.13	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih (Orang)	390	240	240	240	240	240	Diskop,UKM
11.14	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset (%)	1,50	1,75	2,00	2,25	2,25	2,25	Diskop,UKM
11.15	Koperasi Modern (Unit)	-	2	2	3	3	3	Diskop,UKM
11.16	Persentase Kontribusi Koperasi di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%)	3,15	1,50	1,65	1,85	2,00	2,25	Diskop,UKM
12	Penanaman Modal							
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	618	700	700	752	807	867	DPM dan PTSP
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (dalam juta rupiah)	7.420.000	7.980.000	8.300.000	8.650.000	9.100.000	9.630.000	DPM dan PTSP
12.3	PMDN (dalam Juta Rupiah)	5.194.000	5.586.000	5.810.000	6.055.000	6.370.000	6.741.000	DPM dan PTSP
12.4	PMA (dalam US \$ Ribuan)	152.465,75	163.972,60	170.547,95	177.739,73	186.986,30	197.876,71	DPM dan PTSP
12.5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Investasi (%)	40	7,55	4,01	4,22	5,20	5,82	DPM dan PTSP
12.6	Indeks Kepuasan	80	80	81	81	82	82	DPM dan PTSP

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan (%)							
12.7	Jumlah Perizinan yang Terbit Tetap Waktu	618	595	595	595	595	595	DPM dan PTSP
12.8	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	4	4	4	4	4	4	DPM dan PTSP
12.9	Jumlah Informasi Data Perijinan berusaha yang dikelola dengan baik	5	5	5	5	5	5	DPM dan PTSP
12.10	Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi	2	2	2	2	2	2	DPM dan PTSP
13	Kepemudaan dan Olahraga							
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	77,19%	80,70%	84,21%	87,71%	92,98%	100%	Dispora
13.2	Persentase Wirausaha Muda	26,10%	33,80%	41,50%	49,20%	56,90%	64,60%	Dispora
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	51,42%	71,42%	85,71%	100%	100%	100%	Dispora
13.4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	40,38%	43,75%	45,45%	50,00%	54,29%	61,11%	Dispora
13.5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	40,34%	42,68%	47,62%	58,14%	68,18%	77,78%	Dispora
13.6	Jumlah Atlet Berprestasi	6	10	12	15	17	18	Dispora
13.7	Jumlah Prestasi Olahraga	8	10	13	18	20	24	Dispora
14	Statistik							
14.1	Buku " Kalimantan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Diskominfosantik

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tengah Dalam Angka”							
14.2	Buku ”PDRB Kalimantan Tengah”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Diskominfosantik
14.3	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Diskominfosantik
15	Persandian							
15.1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	402	410	418	560	620	680	Diskominfosantik
16	Kebudayaan							
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	3	3	4	4	5	7	Disbudpar
16.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	500	631	651	680	710	740	Disbudpar
17	Perpustakaan							
17.1	Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan (eks)	120,000	146,000	147,000	150,000	155,000	160,000	DPAD
17.2	Jumlah Masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan	25.675	26.675	27.675	28.675	29.675	31.000	DPAD
17.3	Jumlah Lembaga/Perpustakaan yang diberikan Pembinaan Peprustakaan Berbasis Inklkusi Sosial	5	14	24	34	44	54	DPAD
17.4	Indeks Kepuasan	70,00%	80,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DPAD

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengunjung terhadap perpustakaan							
17.5	Jumlah Koleksi Bacaan yang tersedia di perpustakaan (judul)	30.000	32.000	35.000	50.000	60.000	70.000	DPAD
17.6	Jumlah Naskah Kuno yang terlestarikan (Naskah)	0	1	2	3	3	4	DPAD
18	Kearsipan							
18.1	Presentase SOPD Menerapkan Arsip Secara Baku Sesuai Standar Kearsipan	95%	100%	100%	100%	100%	100%	DPAD
III.	Urusan Pilihan							
1	Kelautan dan Perikanan							
1.1	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	119.876,05	128,008.34	136.140,63	144.272,92	152.405,21	160.537,50	Dislutkan
1.2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	130.526,10	133.136,62	137.130,72	141.244,64	145.481,98	149.486,44	Dislutkan
1.3	Angka Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	49,63	55.81	57,62	59,43	61,23	63,04	Dislutkan
1.4	Jumlah kebutuhan benih ikan (ekor)	67.630	69.820	72.010	74.200	76.390	78.580	Dislutkan
1.5	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	107	108.25	109.5	110.75	112	113.25	Dislutkan
1.6	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,1	3,2	3,30	3,40	3,50	3,60	Dislutkan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	85	85	85	85	90	90	Dislutkan
1.8	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok)	40	45	48	52	58	60	Dislutkan
1.9	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	0	2	4	5	6	7	Dislutkan
1.10	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	34.450	34.761,84	35.073,68	35.385,52	35.697,36	36.009,20	Dislutkan
2	Pertanian dan Peternakan							
2.1.	Luas panen tanaman pangan							
2.1.1	Padi (Ha) :	161.018	165.849	170.824	175.949	181.227	186.664	DPTPHP
2.1.2	Jagung (Ha)	26.610	27.408	28.231	29.077	29.950	30.848	DPTPHP
2.1.3	Kedelai(Ha)	93,5	96,3	99,2	102,2	105,2	108,4	DPTPHP
2.1.4	Ubi Kayu (Ha)	3.314	3.413	3.516	3.621	3.730	3.842	DPTPHP
2.2.	Produktivitas tanaman pangan							
2.2.1	Padi (ku/Ha)	3,86	3,98	4,10	4,22	4,35	4,48	DPTPHP
2.2.2	Jagung (Kwintal/Ha)	5,55	5,72	5,89	6,07	6,25	6,43	DPTPHP
2.2.3	Kedelai (Kwintal/Ha)	1,56	1,58	1,59	1,60	1,62	1,64	DPTPHP
2.2.4	Ubi Kayu (Kwintal/Ha)	26,06	26,84	27,65	28,48	29,33	30,21	DPTPHP

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi		Target Kinerja				PD Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.	Produksi tanaman pangan							
2.3.1	Padi (Ton)	625.522	644.288	663.617	683.526	704.032	725.153	DPTPHP
2.3.2	Jagung (Ton)	139.370,14	143.551,14	47.858,14	152.294,14	156.863,14	161.569,14	DPTPHP
2.3.3.	Kedelai (Ton)	146,30	150,69	155,21	159,87	164,66	169,60	DPTPHP
2.3.4.	Ubi Kayu (Ton)	103.559,60	106.666,39	109.866,38	113.162,37	116.557,24	120.053,96	DPTPHP
2.4.	Luas Panen Tanaman Hortikultura							
2.4.1	Buah-Buahan (Ku)							
	a. Jeruk (Ha)	526	548	586	595	611	624	DPTPHP
	b. Durian (Ha)	1,033	1,036	1,059	1,070	1,084	1,095	DPTPHP
	c. Rambutan (Ha)	2,727	2,734	2,765	2,775	2,785	2,803	DPTPHP
	d. Nanas (Ha)	465	484	493	502	510	519	DPTPHP
	e. Pisang (Ha)	2,002	2,011	2,019	2,025	2,037	2,049	DPTPHP
2.4.2	Sayuran (Ku)							
	a. Bawang Merah (Ha)	988	1,024	1,046	1,049	1,056	1,064	DPTPHP
	b. Cabai Besar (Ha)	1,037	1,046	1,053	1,060	1,068	1,078	DPTPHP
	c. Cabai Rawit (Ha)	2,317	2,326	2,343	2,352	2,365	2,378	DPTPHP
	d. Kacang Panjang (Ha)	2,034	2,040	2,060	2,066	2,079	2,101	DPTPHP
2.4.3.	Tanaman Hias (Tangkai)							
	a. Anggrek	1,420	1,531	1,831	2,163	2,273	2,382	DPTPHP
	b. Mawar	823	865	885	1,137	1,254	1,478	DPTPHP
2.4.4	Tanaman Obat (Kg)							
	a. Jahe	360,306	380,986	381,286	383,170	383,300	383,800	DPTPHP
	b. Kunyit	189,230	194,509	194,609	195,484	195,601	195,860	DPTPHP
2.5.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi		Target Kinerja				PD Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.1	Buah-Buahan (Ku)							
	a. Jeruk (Ton)	13,636	13,734	13,893	14,146	14,566	14,885	DPTPHP
	b. Durian (Ton)	5,390	5,639	7,695	7,812	7,970	8,151	DPTPHP
	c. Rambutan (Ton)	7,936	8,046	9,760	10,288	10,428	10,676	DPTPHP
	d. Nanas (Ton)	13,809	15,110	14,064	14,359	14,580	14,858	DPTPHP
	e. Pisang (Ton)	32,551	33,063	33,815	33,919	34,269	34,709	DPTPHP
2.5.2	Sayuran (Ku)							
	a. Bawang Merah (Ton)	7,804	7,885	7,988	8,047	8,120	8,255	DPTPHP
	b. Cabai Besar (Ton)	6,152	6,219	6,416	6,557	6,657	6,810	DPTPHP
	c. Cabai Rawit (Ton)	7,844	8,001	8,161	8,324	8,490	8,660	DPTPHP
	d. Kacang Panjang (Ton)	7,066	7,463	7,615	7,901	8,045	8,234	DPTPHP
2.5.3	Tanaman Hias (Tangkai)							
	a. Anggrek	9,777	9,848	12,990	17,439	17,894	18,496	DPTPHP
	b. Mawar	5,927	6,121	6,884	7,343	8,197	9,121	DPTPHP
2.5.4	Tanaman Obat (Kg)							
	a. Jahe	642,744	707,018	766,798	793,811	851,696	904,998	DPTPHP
	b. Kunyit	316,230	317,159	333,277	344,837	361,644	376,720	DPTPHP
2.6	Jumlah Produktivitas Tanaman Holtikultura							
2.6.1	Buah-Buahan (Ku/Pohon)							
	a. Jeruk (Ton/Ha)	18.13	18.49	18.86	19.24	19.62	20.01	DPTPHP
	b. Durian (Ton/Ha)	6.25	6.38	6.51	6.64	6.77	6.91	DPTPHP
	c. Rambutan (Ton/Ha)	4.55	4.64	4.73	4.82	4.92	5.02	DPTPHP
	d. Nanas (Ton/Ha)	90.99	92.81	94.67	96.56	98.49	100.46	DPTPHP
	e. Pisang (Ton/Ha)	19.85	19.98	20.11	20.24	20.37	20.50	DPTPHP
2.6.2	Sayuran (Ku/Ha)							
	a. Bawang Merah (Ton/Ha)	6.79	6.93	7.07	7.21	7.35	7.50	DPTPHP
	b. Cabai Besar (Ton/Ha)	5.91	6.03	6.15	6.27	6.40	6.53	DPTPHP

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	c. Cabai Rawit (Ton/Ha)	6.02	6.14	6.26	6.39	6.52	6.65	DPTPHP
	d. Kacang Panjang (Ton/Ha)	2.43	2.48	2.53	2.58	2.63	2.68	DPTPHP
2.6.3	Tanaman Hias (Tangkai/m2)							
	a. Anggrek	5.43	5.54	5.65	5.76	5.88	6.00	DPTPHP
	b. Mawar	3.33	3.40	3.47	3.54	10.54	10.75	DPTPHP
2.6.4	Tanaman Obat (Kg/m2)							
	a. Jahe	2.12	2.16	2.20	2.24	2.28	2.33	DPTPHP
	b. Kunyit	1.86	1.90	1.94	1.98	2.02	2.06	DPTPHP
2.7	Populasi Ternak							
2.7.1	Sapi Potong (Ekor)	95,541	102,388	105,459	108,623	111,882	115,238	DPTPHP
2.7.2	Kerbau (Ekor)	13,450	14,137	14,490	14,852	15,224	15,604	DPTPHP
2.7.3	Kambing (Ekor)	52,446	55,120	56,498	57,911	59,359	60,843	DPTPHP
2.7.4	Babi (Ekor)	256,883	269,990	275,390	280,897	286,515	292,246	DPTPHP
2.7.5	Ayam Buras (Ekor)	3,122,947	3,282,280	3,347,926	3,414,885	3,483,182	3,552,846	DPTPHP
2.7.6	Ayam Ras Petelur (Ekor)	505,625	510,372	520,580	530,991	541,611	552,443	DPTPHP
2.7.7	Ayam Ras Pedaging (Ekor)	25,674,626	26,984,555	27,524,246	28,074,731	28,636,226	29,208,950	DPTPHP
2.7.8	Itik (Ekor)	320,013	342,868	349,725	356,720	363,854	371,131	DPTPHP
2.8	Jumlah Produksi Daging Ternak							
2.8.1	Sapi Potong (Ton)	4,880	5,229	5,386	5,547	5,714	5,885	DPTPHP
2.8.2	Kerbau (Ton)	91	96	98	100	103	105	DPTPHP
2.8.3	Kambing (Ton)	262	248	254	260	267	274	DPTPHP
2.8.4	Babi (Ton)	1,995	2,001	2,041	2,082	2,124	2,166	DPTPHP
2.8.5	Ayam Buras (Ton)	2,617	2,750	2,805	2,861	2,918	2,977	DPTPHP
2.8.6	Ayam Ras Petelur (Ton)	41	43	44	45	45	46	DPTPHP
2.8.7	Ayam Ras Pedaging (Ton)	40,996	41,815	42,652	43,505	44,375	45,262	DPTPHP
2.8.8	Itik (Ton)	221	225	215	219	223	228	DPTPHP
2.8.1	Sapi Potong (Ton)	4,880	5,229	5,386	5,547	5,714	5,885	DPTPHP

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9	Telur							
2.9.1	Ayam Buras (Kg)	2,693,374	2,545,192	2,596,096	2,648,018	2,700,978	2,754,998	DPTPHP
2.9.2	Ayam Ras Petelur (Kg)	6,859,141	6,996,324	7,136,250	7,278,975	7,424,555	7,573,046	DPTPHP
2.9.3	Itik (Kg)	1,756,815	1,791,951	1,827,790	1,864,346	1,901,633	1,939,666	DPTPHP
2.10	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kalteng (%)	6.75	6.88	7.16	7.38	7.6	7.83	DPTPHP
2.11	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	1.41	1.45	1.5	1.54	1.59	1.64	DPTPHP
2.12	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2.43	2.43	2.57	2.65	2.73	2.81	DPTPHP
2.13	Kontribusi Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB (%)	2.91	3.00	3.09	3.19	3.28	3.38	DPTPHP
3	Pariwisata							
3.1	Jumlah wisatawan (orang)	796.560	820.457	845.070	870.422	896.535	923.431	Disbudpar
4	Perdagangan							
4.1	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	7,30	7,30	7,35	7,40	7,45	7,50	Disdagperin
4.2	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (%)	11,90	15,00	13,60	13,70	13,80	13,90	Disdagperin
4.3	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kalteng	1.050	1.700	1.785	1.875	1.968	2.066	Disdagperin

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(Juta US \$)							
4.4	Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%)	1,15	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	Disdagperin
4.5	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu (%)	5,90	5,90	5,00	5,00	4,00	4,00	Disdagperin
4.6	Pengaduan Konsumen Terkait Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdagperin
4.7	Peningkatan Sampel Produk yang Memenuhi Standar Uji Mutu	10,50	10,50	11,55	12,12	12,72	13,35	Disdagperin
5	Kehutanan							
5.1.	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan (Persen)	100	90	90	90	100	100	Dishut
5.2	Luas Kawasan Hutan KPH yang difasilitasi pemanfaatannya (hektar)	30,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	Dishut
5.3	Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (hektar)	448	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	Dishut
5.4	Penurunan Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Setiap Tahun (hektar)	305,000	299,000	285,000	268,000	252,000	234,000	Dishut
5.5	Luas Kawasan Hutan	305,000	345,000	385,000	425,000	465,000	505,000	Dishut

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	yang dikelola oleh masyarakat (hektar)							
5.6	Prosentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan per Tahun (persen)	100	100	100	100	100	100	Dishut
5.7	Luas Kawasan Konservasi/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang dikelola (hektar)	58,341	58,341	58,501	58,700	58,853	58,982	Dishut
5.8	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas gold/silver (unit)	110	150	200	260	330	410	Dishut
5.9	Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (%)	1,01	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	Dishut
5.10	Jumlah Dokumen pengelolaan DAS wilayah Kalimantan Tengah (dokumen)	-	1	1	1	1	1	Dishut
6	Perkebunan							
6.1	Persentase Penanganan Organisme Penyakit Tanaman (OPT)	70%	70%	75%	80%	82%	85%	Disbun
6.2	Jumlah Unit Pengolahan	51	51	53	55	57	59	Disbun

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi		Target Kinerja				PD Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan Pemasaran Bokar (UPPB)							
6.3	Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang Memperoleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)	50%	50%	55%	55%	60%	60%	Disbun
6.4	Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	80%	80%	80%	80%	82%	85%	Disbun
6.5	Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	500	500	500	500	500	500	Disbun
6.6	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	13,96	13,96	14,00	14,05	14,10	14,13	Disbun
6.7	Persentase Peningkatan NTP sub sektor Perkebunan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	Disbun
6.8	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	Disbun
7	Perindustrian							
7.1	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan (%)	17.50	16,00	16,10	16,20	16,30	16,40	Disdagperin
7.2	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	8.75	6,00	6,05	6,10	6,15	6,20	Disdagperin

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi		Target Kinerja				PD Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Ketransmigrasian							
8.1	Jumlah rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan	5	7	8	9	10	11	Disnakertrans
9	Energi Dan Sumber Daya Mineral							
9.1	Rasio Elektrifikasi (%)	89.01	91.20	93.39	95.58	97.77	100	DESDM
9.2	Rasio desa berlistrik (%)	93.79	95.03	96.27	97.51	98.75	100	DESDM
9.3	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) (%)	7	9	12	15	18	20	DESDM
IV. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	Bappedalitbang
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perubahan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	Bappedalitbang
2	Penelitian Dan Pengembangan							
2.1	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan	95	95	97	97	98	100	Bappedalitbang

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	daerah (%)							
3	Setda (Administrasi Pemerintahan)							
3.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85	87	88	90	92	94	Biro Organisasi
3.2	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	A	A	Biro Organisasi
3.3	Predikat Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	BB	BB	A	Biro Organisasi
3.4	Perda Kelembagaan Organisasi Daerah	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	Biro Organisasi
3.5	Pengadaan Tepat Waktu (%)	-	20	50	75	100	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3.6	Ketersediaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (%)	-	100	100	100	100	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3.7	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kabupaten/Kota serta pembangunan fisik prasarana se- Kalimantan Tengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Administrasi Pembangunan
3.8	Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Administrasi Pembangunan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.9	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	90%	90%	95%	98%	100%	100%	Biro Administrasi Pembangunan
3.10	Jumlah penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (rancangan)	10	10	10	10	10	10	Biro Hukum
3.11	Jumlah Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah (rancangan)	50	50	50	50	50	50	Biro Hukum
3.12	Jumlah penyusunan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah (rancangan)	750	750	750	750	750	750	Biro Hukum
3.13	Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi (rancangan)	179	185	191	194	197	200	Biro Hukum

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	prohumda)							
3.14	Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan secara refresif (produk hukum)	81	100	107	110	116	120	Biro Hukum
3.15	Jumlah Rancangan produk hukum daerah kabupaten.kota yang tertata format dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (rancangan prohumda)	287	292	296	300	306	310	Biro Hukum
3.16	Jumlah dokumen gugatan perkara hukum litigasi yang ditandatangani (perkara)	10	10	12	14	16	18	Biro Hukum
3.17	Jumlah dokumen perkara non litigasi yang ditangani (kasus)	5	10	12	14	16	18	Biro Hukum
3.18	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan aksi HAM (dokumen)	1	3	3	4	4	5	Biro Hukum
3.19	Jumlah buku-buku himpunan produk hukum daerah (buku)	400	500	550	600	650	700	Biro Hukum
3.20	Persentase sarana dan	80%	80%	83%	86%	89%	91%	Biro Umum

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	prasarana yang berkualitas baik							
3.21	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2%	2%	2,10%	2,20%	2,30%	2,50%	Biro Umum
3.22	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	146 Kali	150 Kali	150 Kali	155 Kali	155 Kali	160 Kali	Biro Umum
3.23	Jumlah Pelayanan Jamuan/Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	100 Kali	100 Kali	125 Kali	135 Kali	150 Kali	160 Kali	Biro Umum
3.24	Jumlah tata naskah dinas yg ditandatangani oleh pimpinan	198 Surat	215 Surat	230 Surat	230 Surat	240 Surat	250 Surat	Biro Umum
3.25	Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional	80 Kali	80 Kali	85 Kali	85 Kali	90 Kali	90 Kali	Biro Umum
3.26	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula	150 Kali	150 Kali	165 Kali	165 Kali	170 Kali	170 Kali	Biro Umum
3.27	Jumlah dokumen perencanaan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (dokumen)	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Biro Administrasi Pimpinan
3.28	Jumlah pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (dokumen)	1 dokumen	250 dokumen	300 dokumen	350 dokumen	450 dokumen	500 dokumen	Biro Administrasi Pimpinan
3.29	Jumlah pelayanan	-	250	700	700 Kegiatan	700	700	Biro Administrasi

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi		Target Kinerja				PD Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kegiatan Pimpinan (Protokol dan Humas)		Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	Kegiatan	Pimpinan
4	Kepegawaian, Pendidikan Serta Pelatihan							
4.1	Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	85%	85%	90%	95%	100%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
4.2	Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	65%	70%	75%	80%	85%	90%	Badan Kepegawaian Daerah
4.3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	60%	65%	70%	75%	80%	85%	Badan Kepegawaian Daerah
4.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	54	54	54	54	54	54	Badan Kepegawaian Daerah
4.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1006	1006	1010	1013	1015	1017	Badan Kepegawaian Daerah
4.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	5800	6000	6200	6400	6600	6800	Badan Kepegawaian Daerah
4.7	Indeks Profesionalitas ASN	75.00	75.50	76.00	77.70	78.00	78.50	Badan Kepegawaian Daerah
4.8	Persentase penurunan	0	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	Badan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelanggaran Disiplin ASN							Kepegawaian Daerah
4.9	Persentase usulan pelayanan kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	80%	80%	85%	85%	90%	95%	Badan Kepegawaian Daerah
4.10	Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	70%	70%	72%	72%	75%	75%	Badan Kepegawaian Daerah
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
5.1	Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	80%	80%	85%	85%	90%	90%	BPSDM
5.2	Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test	80%	80%	85%	85%	90%	90%	BPSDM
5.3	Persentase Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Sosial Kultural yang lulus post test	75%	75%	80%	80%	85%	85%	BPSDM
5.4	Persentase kepuasan terhadap layanan	80%	80%	85%	85%	90%	90%	BPSDM

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi		Target Kinerja				PD Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	penyelenggaraan diklat							
6	Keuangan							
6.1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.2	Persentase SILPA terhadap APBD	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.3	Persentase belanja pendidikan (20%)	30,96%	30,96%	30,96%	30,96%	30,96%	30,96%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.4	Persentase belanja kesehatan (10%)	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	6,55%	6,55%	7,00%	7,15%	7,30%	7,45%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.6	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Penghubung							
7.1	Jumlah yang mendapat fasilitasi layanan penghubung	1000	2000	2100	2200	2300	2400	Badan Penghubung
7.2	Jumlah layanan informasi dan promosi	30	50	100	150	200	250	Badan Penghubung
8	Pengawasan							
8.1	Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Inspektorat
8.2	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
8.3	Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan	Tingkat 3	Tingkat 3	Tingkat 3	Tingkat 3	Tingkat 3	Tingkat 4	Inspektorat

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi		Target Kinerja				PD Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tengah							
8.4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Selesai :							
	- BPK RI	50 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	Inspektorat
	- ITJEN Kemendagri/Teknis Lainnya	50 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	Inspektorat
	- Inspektorat	70 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	Inspektorat
8.5	Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan.	50 %	45 %	40 %	35 %	30 %	25 %	Inspektorat
8.6	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Mininal "B"	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %	90 %	Inspektorat
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH								
I. Kemampuan Ekonomi								
1 Pertanian								
1.1	Nilai Tukar Petani/ NTP (%)	107,5	107,5	108.6	109.7	110.8	111.9	DPTPHP
1.2	Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Tanaman Pangan	100.1	101.1	102.1	103.1	104.1	105.2	DPTPHP
1.3	Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Hortikultura	99.9	100.9	101.9	102.9	103.9	105.0	DPTPHP
1.4	Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Peternakan	104.3	105.4	106.4	107.5	108.6	109.7	DPTPHP

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
2.1	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemerintahan, Fasilitasi Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama	50	60	70	80	90	100	Biro Pemerintahan dan Otda
II. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1	Penataan Ruang							
1.1	Jumlah RTR Provinsi Kalimantan Tengah (Perda/Perkada)	3	6	9	12	14	16	DPUPR
1.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kab/Kota)	14	14	14	14	14	14	DPUPR
1.3	Persentase Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang (%)	50.00	60.00	70.00	80.00	100.00	100.00	DPUPR
1.4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (%)	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	DPUPR
1.5	Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	DPUPR

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tata Ruang dan Tematik (Informasi)							
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan							
2.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)	300	300	315	318	320	321	Biro Perekonomian
2.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	55	55	56	57	59	60	Biro Perekonomian
2.3	Jumlah Industri dan Kelembagaan Pariwisata (buah)	140	250	275	300	330	350	Disbudpar
2.4	Jumlah Obyek Wisata Unggulan (buah)	14	14	15	17	18	20	Disbudpar
III.	Iklm Berinvestasi							
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat							
1.1	Angka kriminalitas	10,5	10,10	9,78	9,53	9,01	8,65	Kesbangpol
IV.	Sumber Daya Manusia							
1	Ketenagakerjaan							
1.1	Jumlah peserta pelatihan yang memiliki Sertifikat Kompetensi		96	100	150	180	200	Disnakertrans

Tabel 8. 4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				2022	2023	2024	2025	2026			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang berakreditasi Minimal B (%)	64,48 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Terakreditasi (%)	31, 27 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	65 %	
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Lulusan SMK yang lulus Sertifikasi Uji Kompetensi Keahlian (%)	70 %	75 %	77 %	79 %	81 %	83 %	83 %	
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Bimtek implementasi Kurikulum 2013 dan Muatan Lokal	200 Orang	250 Orang	300 Orang	350 Orang	400 Orang	450 Orang	450 Orang	
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang Bersertifikasi	42,46 %	55,36 %	66,50 %	77,67 %	86,63 %	100 %	100 %	
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV	96,33 %	97 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase perizinan dan pengawasan pendirian USB (Unit Sekolah Baru)	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %	
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASRA	Jumlah Karya Tulis	50 Buah	64 Buah	78 Buah	92 Buah	106 Buah	120 Buah	120 Buah	
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Umur harapan hidup	69,84 Tahun	69,99 Tahun	70,19 Tahun	70,44 Tahun	70,74 Tahun	71,09 Tahun	71,09 Tahun
1	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya layanan kesehatan di rumah sakit jiwa kalawa atei melalui penyediaan sarana prasarana (persentase)	70 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terakreditasinya RS	Pariipurna	Pariipurna	Pariipurna	Pariipurna	Pariipurna	Pariipurna	Pariipurna
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Umur harapan hidup	69,84 Tahun	69,99 Tahun n	70,19 Tahun n	70,44 Tahun n	70,74 Tahun n	71,09 Tahun n	71,09 Tahun
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pelatihan/workshop/bimtek	80 %	80 %	85 %	90 %	90 %	95 %	95 %
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi (Persentase)	30 %	30 %	40 %	45 %	50 %	55 %	55 %
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Umur harapan hidup	69,84 Tahun	69,99 Tahun n	70,19 Tahun n	70,44 Tahun n	70,74 Tahun n	71,09 Tahun n	71,09 Tahun
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Umur harapan hidup	69,84 Tahun	69,99 Tahun n	70,19 Tahun n	70,44 Tahun n	70,74 Tahun n	71,09 Tahun n	71,09 Tahun
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan Irigasi (%)	8,79 %	19.21 %	37.93 %	54.19 %	70.44 %	75.86 %
1	3	3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	85,85 %	90,56 %	95,28 %	100 %	100 %	100 %
1	3	4		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN	Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun	1 Unit	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit	6 Unit

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				2022	2023	2024	2025	2026			
		PERSAMPAHAN REGIONAL	dan Ditingkatkan (unit)								
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%)	69 %	72 %	76 %	80 %	85 %	90 %	90 %
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan (meter)	1.000 m	2.000 m	3.000 m	4.000 m	5.000 m	6.000 m	6.000 m
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi (kawasan)	2 Kawasan	3 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan	7 Kawasan	7 Kawasan
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	5 Unit	7 Unit	8 Unit	9 Unit	10 Unit	11 Unit	11 Unit
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Tersedianya Bangunan UPTPPD yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	11 Unit	11 Unit	12 Unit	13 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan dikelola dengan baik (unit)	5 Unit	6 Unit	7 Unit	8 Unit	9 Unit	10 Unit	10 Unit
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio konektivitas jalan provinsi	0.34 %	0.34 %	0.36 %	0.38 %	0.39 %	0.39 %	0.39 %
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	530 Orang	830 Orang	1.080 Orang	1.330 Orang	1.730 Orang	2.130 Orang	2.130 Orang
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terselenggaranya penataan ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	78 %	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %	88 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Perbaikan Rumah Layak Huni	N.A	90 Unit	135 Unit	140 Unit	145 Unit	150 unit	660 Unit
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase terselenggaranya penyediaan PSU Perumahan	80 %	85 %	88 %	94 %	98 %	100 %	100 %
1	4	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat Sertifikasi dan Registrasi	40 Orang	60 Orang	60 Orang	80 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
1	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				2022	2023	2024	2025	2026				
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Terselenggaranya fungsi kelembagaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tersedianya SDM terampil	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	50 Orang	
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				2022	2023	2024	2025	2026			
	DAERAH PROVINSI										
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkat kemampuannya	60 %	70 %	75 %	75 %	80 %	85 %	85 %
1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	95 %	95 %
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teratasi	80 %	80 %	82 %	82 %	85 %	85 %	85 %
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial (KPM)	50.041 KPM	50.500 KPM	51.000 KPM	52.000 KPM	53.000 KPM	54.000 KPM	55.000 KPM
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya	0 %	30 %	45 %	50 %	75 %	85 %	85 %
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penduduk miskin perdesaan	5,38 %	5,3 %	5.,25 %	5.,2 %	5,1 %	5 %	5 %
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penduduk miskin perkotaan	4,86 %	4,8 %	4,75 %	4,7 %	4,65 %	4,60 %	4,6 %
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah TMP yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
				2022	2023	2024	2025	2026		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Indeks Perencanaan Tenaga Kerja	9,4 Angka Indeks	9,5 Angka Indeks	9,6 Angka Indeks	9,7 Angka Indeks	9,75 Angka Indeks	9,8 Angka Indeks
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Indeks Penduduk dan Tenaga Kerja	7,33 Angka Indeks	7,45 Angka Indeks	7,77 Angka Indeks	7,88 Angka Indeks	7,99 Angka Indeks	8 Angka Indeks
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Indeks Pelatihan dan Kompetensi Kerja	11,04 Angka Indeks	11,43 Angka Indeks	12,06 Angka Indeks	12,38 Angka Indeks	12,50 Angka Indeks	12,62 Angka Indeks
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Indeks Produktifitas Tenaga Kerja	5,85 Angka Indeks	6,07 Angka Indeks	6,29 Angka Indeks	6,40 Angka Indeks	6,55 Angka Indeks	6,61 Angka Indeks
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Indeks Kesempatan Kerja	12,88 Angka Indeks	13,1 Angka Indeks	13,32 Angka Indeks	13,43 Angka Indeks	13,5 Angka Indeks	13,55 Angka Indeks
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indeks Hubungan Industrial	3,5 Angka Indeks	4 Angka Indeks	4,24 Angka Indeks	4,35 Angka Indeks	4,7 Angka Indeks	4,82 Angka Indeks
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indeks Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	9,26 Angka Indeks	9,48 Angka Indeks	9,52 Angka Indeks	9,56 Angka Indeks	9,60 Angka Indeks	9,64 Angka Indeks
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indeks Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00 Angka Indeks	10,00 Angka Indeks	10,00 Angka Indeks	10,00 Angka Indeks	10,00 Angka Indeks	10,00 Angka Indeks
2	7	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Indeks Kondisi Lingkungan Kerja	6,76 Angka Indeks	6,98 Angka Indeks	7,20 Angka Indeks	7,30 Angka Indeks	7,41 Angka Indeks	7,47 Angka Indeks

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
				2022	2023	2024	2025	2026		
2	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah (orang)	20 Orang	25 Orang	30 Orang	35 Orang	40 Orang	44 Orang
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan (%)	85 %	85 %	87,5 %	90 %	92,5 %	95 %
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan (orang)	30 Orang	35 Orang	40 Orang	45 Orang	50 Orang	60 Orang
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Hasil Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	9 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	13 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	4 %	6 %	8 %	10 %	12 %	14 %
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)	50 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %
2	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	337,665 Ton	32,000 Ton	34,167 Ton	36,334 Ton	38,500 Ton	40,668 Ton	40,668 Ton
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	5,05 %	50,5 %	60,5 %	70,5 %	80,5 %	90,5 %	90,5 %
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	83,8 %	88,3 %	90,4 %	91 %	91 %	92 %	92 %
2 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan daerah rawan pangan (%)	28,57 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
2 9 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	88 %	90 %	90,5 %	91 %	91,5 %	92 %	92 %
2 1 0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
X X X 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2 1 0 4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Garapan (%)	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	80 %
2 1 0 6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat di sertifikat	3.000 Ha	3.000 Ha	3.000 Ha	3.000 Ha	3.000 Ha	3.000 Ha	20.000 Ha
2 1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				2022	2023	2024	2025	2026			
X X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	1 1	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran lingkungan	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	1 1	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,74 Poin	74,3 Poin	74,53 Poin	74,75 Poin	74,97 Poin	75,16 Poin	75,16 Poin
2	1 1	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah dokumen profil Kehati	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	1 1	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton)	1.406.674,627 Ton	1.407.074,727 Ton	1.407.274,777 Ton	1.407.474,827 Ton	1.407.674,877 Ton	1.407.874,927 Ton	1.407.874,927 Ton
2	1 1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	68,75 %	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %	80 %
2	1 1	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 MHA	2 MHA	2 MHA	2 MHA	2 MHA	2 MHA	2 MHA
2	1 1	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
				2022	2023	2024	2025	2026		
	LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	dilakukan (Kegiatan)								
2	1 1 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	1 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan
2	1 1 0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup (%)	83,33 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	89 %
2	1 1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	17.215,61 Ton	17.911,12 Ton	18.090,23 Ton	18.271,13 Ton	18.636,55 Ton	18.822,92 Ton	18.822,92 Ton
2	1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
X	X X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	1 2 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	65,00 %	68 %	70,35 %	73,11 %	75,65 %	78,25 %	78,25 %
2	1 2 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	66,67 %	70,42 %	73 %	76,47 %	81,73 %	91,38 %	91,38 %
2	1 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Instansi/Lembaga yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	1 Instansi/Lembaga	2 Instansi/Lembaga	5 Instansi/Lembaga	7 Instansi/Lembaga	10 Instansi/Lembaga	15 Instansi/Lembaga	15 Instansi/Lembaga
2	1 2 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyediaan data kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
				2022	2023	2024	2025	2026		
X X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	1 3	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Berkembang	737 Desa	767 Desa	797 Desa	817 Desa	837 Desa	867 Desa
2	1 3	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang bekerjasama (Mou, perjanjian Kerjasama, Laporan)	0 Desa	7 Desa	9 Desa	11 Desa	13 Desa	15 Desa
2	1 3	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Aparatur Desa Terlatih	320 Orang	650 Orang	1010 Orang	1380 Orang	1770 Orang	2170 Orang
2	1 3	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	1.722 Lembaga	1.730 Lembaga	1.740 Lembaga	1.750 Lembaga	1.760 Lembaga	1.770 Lembaga
2	1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
X X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	1 4	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Total Fertility rate (TFR)	2,1 %	2,1 %	2,06 %	2 %	1,96 %	1,96 %
2	1 4	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)	5,36 %	5,36 %	5,36 %	5,18 %	5 %	5,01 %
2	1 4	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32 Indeks (Skala 1-100)	60,32 Indeks (Skala 1-100)	60,32 Indeks (Skala 1-100)	62,44 Indeks (Skala 1-100)	64,55 Indeks (Skala 1-100)	64,55 Indeks (Skala 1-100)
2	1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					2022	2023	2024	2025	2026		
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	50 %	70 %	72 %	75 %	78 %	90 %	
2	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase terminal bus Tipe B sesuai pelayanan standard	42 %	45 %	50 %	52 %	60 %	70 %	
2	1	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase fasilitas perlengkapan sungai	10 %	20 %	25 %	30 %	45 %	50 %	
2	1	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rasio konektivitas sektor transportasi	0 %	0 %	5 %	6 %	7 %	8 %	
2	1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (orang)	200 Orang	300 Orang	400 Orang	500 Orang	600 Orang	700 Orang	
2	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	200 Orang	200 Orang	300 Orang	400 Orang	500 Orang	600 Orang	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
2 1 6 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (Tema:Protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang diseminasikan sesuai strategi komunikasi	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
2 1 6 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh dinas provinsi dan Kab/Kota sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi komunikasi publik	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
2 1 6 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase mitra strategis Pemda termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
2 1 6 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemda	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
2 1 6 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan administrasi pemerintahan G2G yang diimplementasikan	65 %	65 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %
2 1 6 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik G2B yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung	65 %	70 %	75 %	85 %	90 %	95 %	95 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				2022	2023	2024	2025	2026			
		layanan									
2	1 6 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	80 %	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %	100 %	
2	1 6 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengimplemetasikan /replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	1 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
X	X X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	1 7	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Lembaga keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USPKop/ KJKS) (Unit)	365 Unit	2000 Unit	2.584 Unit	2.609 Unit	2.634 Unit	2.659 Unit	2.659 Unit
2	1 7	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif (%)	78.63 %	83.21 %	83.71 %	84.21 %	84.71 %	85.71 %	85.71 %
2	1 7	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pertumbuhan Koperasi (unit)	182 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit
2	1 7	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase koperasi yang memiliki kategori sehat/Berkualitas (%)	16.50 %	17.50 %	19.00 %	21.50 %	25.00 %	27.50 %	27.50 %
2	1 7	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Koperasi berprestasi tingkat provinsi dan nasional (unit)	11 Unit	12 Unit	12 Unit	12.00 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit
2	1 7	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih (Orang)	880 Orang	240 Orang	240 Orang	240 Orang	240 Orang	240 Orang	240 Orang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				2022	2023	2024	2025	2026			
2	1 7	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%)	0,83 %	1,75 %	2,00 %	2,25 %	2,25 %	2,25 %	2,25 %
2	1 7	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi Modern (Unit)	0 Unit	2 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
2	1 7	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Kontribusi Koperasi di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%)	1,45 %	1,50 %	1,65 %	1,85 %	2,00 %	2,25 %	2,25 %
2	1 7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%)	11.77 %	12.00 %	12.35 %	13.15 %	14.00 %	15.75 %	15.75 %
2	1 7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Wirausaha (Unit)	64.087 Unit	71.495 Unit	78.644 Unit	86.508 Unit	95.158 Unit	104.674 Unit	104.674 Unit
2	1 7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	60.415 Unit	48.000 Unit	57.800 Unit	69.360 Unit	83.232 Unit	83.232 Unit	83.232 Unit
2	1 7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	0 %	9.99 %	9.99 %	9.99 %	9 %	9.99 %	9.99 %
2	1 7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Rasio Kewirausahaan	0 %	5.09 %	5.52 %	5.98 %	6.49 %	7.03 %	7.03 %
2	1 7	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Unit)	3.672 Unit	4.200 Unit	4.242 Unit	4.285 Unit	4.328 Unit	4.371 Unit	4.371 Unit
2	1 7	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang di dampingi (Unit)	1.364 Unit	480 Unit	480 Unit	480 Unit	480 Unit	480 Unit	480 Unit

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
				2022	2023	2024	2025	2026		
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersedianya dokumen peta potensi Investasi	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan	80 %	80 %	81 %	81 %	82 %	82 %
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan yang Terbit Tepat Waktu	618 Dokumen	595 Dokumen	595 Dokumen	595 Dokumen	595 Dokumen	595 Dokumen
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	618 Unit	700 Unit	700 Unit	752 Unit	807 Unit	867 Unit
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (juta Rupiah)	7.420.000 Juta Rupiah	7.980.000 Juta Rupiah	8.300.000 Juta Rupiah	8.650.000 Juta Rupiah	9.100.000 Juta Rupiah	9.630.000 Juta Rupiah
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PMDN dalam Juta Rupiah	5.194.000 Juta Rupiah	5.586.000 Juta Rupiah	5.810.000 Juta Rupiah	6.055.000 Juta Rupiah	6.370.000 Juta Rupiah	6.741.000 Juta Rupiah
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PMA dalam US \$ Ribu	152.465.75 US \$ Ribu	163.972.60 US \$ Ribu	170.547.95 US \$ Ribu	177.739.73 US \$ Ribu	186.986.30 US \$ Ribu	197.876.71 US \$ Ribu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi Investasi	40 %	7,55 %	4,01 %	4,22 %	5,20 %	5,82 %
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN	Jumlah Informasi data Perizinan berusaha yang terkelola dengan baik	5 Kabupaten/ Kota	5 Kabupaten/ Kota	5 Kabupaten/ Kota	5 Kabupaten/ Kota	5 Kabupaten/ Kota	5 Kabupaten/ Kota

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
				2022	2023	2024	2025	2026		
	MODAL									
2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	1	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	77,19 %	80,70 %	84,21 %	87,71 %	92,98 %	100 %
2	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cakupan pembinaan olahraga	51,42 %	71,42 %	85,71 %	100 %	100 %	100 %
2	1	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase cakupan pembinaan kepramukaan (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2	2	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Statistik Sektoral	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2	2	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengamanan informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
				2022	2023	2024	2025	2026		
2 2 2	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Peningkatan Kebudayaan Unggulan	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
2 2 2	3	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Presentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	0,021 Pagelaran seni dan budaya	0,022 Pagelaran seni dan budaya	0,023 Pagelaran seni dan budaya	0,024 Pagelaran seni dan budaya	0,025 Pagelaran seni dan budaya	0,026 Pagelaran seni dan budaya	0,026 Pagelaran seni dan budaya
2 2 2	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase Peningkatan Pemeringkatan Sejarah	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
2 2 2	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase Peningkatan Pemerhati Cagar Budaya	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
2 2 2	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase Peningkatan Komunitas Museum	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
2 2 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
X X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2 2 3	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan (pemustaka)	25.675 Orang	26.675 Orang	27.675 Orang	28.675 Orang	29.675 Orang	31.000 Orang	31.000 Orang
2 2 3	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Buku yang dibaca di perpustakaan (eksemplar)	39.916 Eksamplar	120.000 Eksamplar	146.000 Eksamplar	147.000 Eksamplar	150.000 Eksamplar	155.000 Eksamplar	155.000 Eksamplar
2 2 3	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Lembaga/Perpustakaan yang diberikan Pembinaan Perpustakaan Berbasis Inklkusi Sosial	n/a Lembaga/Perpustakaan	5 Lembaga/Perpustakaan	14 Lembaga/Perpustakaan	24 Lembaga/Perpustakaan	34 Lembaga/Perpustakaan	44 Lembaga/Perpustakaan	54 Lembaga/Perpustakaan
2 2 3	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pengunjung terhadap perpustakaan	80,13 %	70 %	80 %	95 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
				2022	2023	2024	2025	2026		
2 2 3	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Koleksi Bacaan yang tersedia di perpustakaan (judul)	31.145 judul	30.000 judul	32.000 judul	35.000 judul	50.000 judul	60.000 judul	70.000 judul
2 2 3	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah Kuno yang Terlestarikan (Naskah)	0 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	5 Naskah
2	2 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
2 2 4	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD menerapkan arsip secara baku sesuai standar kearsipan	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	100 %
2 2 4	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	100 %
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	2 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
X X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3 2 5	2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	0 Lokasi	2 Lokasi	4 Lokasi	5 Lokasi	6 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi
3 2 5	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun)	130.526,1 Ton	133.137,62 Ton	137.131,72 Ton	141.244,64 Ton	145.481,98 Ton	149.486,44 Ton	149.486,44 Ton
3 2 5	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	107,00 NTN/NTBi	108,25 NTN/NTBi	109,50 NTN/NTBi	110,75 NTN/NTBi	112 NTN/NTBi	113,25 NTN/NTBi	113,25 NTN/NTBi
3 2 5	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	119.876,05 Ton	128.008.34 Ton	136.140.63 Ton	144.272.92 Ton	152.405.21 Ton	160.537.50 Ton	160.537.50 Ton

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
3 2 5 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah kebutuhan benih (ekor)	67.630 Ekor	69.820 Ekor	72.010 Ekor	74.200 Ekor	76.390 Ekor	78.580 Ekor	78.580 Ekor
3 2 5 5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan UU yang berlaku (%)	85 %	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
3 2 5 5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kelompok masyarakat pengawasan (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok)	40 Kelompok	45 Kelompok	48 Kelompok	52 Kelompok	58 Kelompok	60 Kelompok	60 Kelompok
3 2 5 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	49,63 Kg/Kap/Tahun	55,81 Kg/Kap/Tahun	57,62 Kg/Kap/Tahun	59,43 Kg/Kap/Tahun	61,23 Kg/Kap/Tahun	63,04 Kg/Kap/Tahun	63,04 Kg/Kap/Tahun
3 2 5 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Volume Produk Olahahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	34.450 Ton	34.761.84 Ton	35.073.68 Ton	35.385.52 Ton	35.697.36 Ton	36.009.20 Ton	36.009.20 Ton
3 2 5 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,1 %	3,2 %	3,30 %	3,40 %	3,50 %	3,60 %	3,60 %
3 2 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3 2 6 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	773.359 Orang	820.457 Orang	845.070 Orang	870.422 Orang	896.535 Orang	923.431 Orang	923.431 Orang
3 2 6 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang di promosikan (%)	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %
3 2 6 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tempat wisata yang terkelola	85 %	90 %	92.5 %	95 %	97.5 %	100 %	100 %
3 2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
				2022	2023	2024	2025	2026		
X X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	2 7	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan populasi peternakan	3.05 %	3.15 %	3.20 %	3.25 %	3.30 %	3.35 %
3	2 7	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan	0.10 %	0.12 %	0.14 %	0.16 %	0.18 %	0.20 %
3	2 7	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase benih/bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat (%)	85 %	89 %	91 %	93 %	95 %	97 %
3	2 7	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan NTP sub sektor perkebunan	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.09 %	0.09 %
3	2 7	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	presentase peningkatan vaksin hewan	40 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
3	2 7	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tertanggulangi akibat bencana (%)	75 %	75 %	80 %	80 %	82 %	85 %
3	2 7	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	70 %	70 %	75 %	80 %	82 %	85 %
3	2 7	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase mediasi gangguan usaha perkebunan	80 %	80 %	80 %	80 %	82 %	85 %
3	2 7	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha pertanian yang sudah terlayani dengan baik (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
					2022	2023	2024	2025	2026			
3	2	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang Memperoleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) (%)	50 %	50 %	55 %	55 %	60 %	60 %	60 %	
3	2	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah koperasi sektor perkebunan yang mendapat pendampingan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	50 Unit	50 Unit	
3	2	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang mendapat pendampingan	85 %	85 %	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %	
3	2	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	2	8	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan (%)	77,03 %	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %
3	2	8	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Kawasan Hutan KPH yang difasilitasi pemanfaatannya (hektar)	0 Ha	30.000 Ha	40.000 Ha	50.000 Ha	60.000 Ha	70.000 Ha	250.000 Ha
3	2	8	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (hektar)	123 Ha	1.000 Ha	1.100 Ha	1.200 Ha	1.300 Ha	1.400 Ha	6.000 Ha
3	2	8	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Penurunan Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Setiap Tahun (hektar)	317.749 Ha	299.000 Ha	285.000 Ha	268.000 Ha	252.000 Ha	234.000 Ha	234.000 Ha
3	2	8	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan per Tahun (persen)	0 %	80 %	80 %	80 %	85 %	90 %	90 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
3 2 8 3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (Persen)	0,98 %	0,97 %	0,94 %	0,91 %	0,88 %	0,86 %	0,86 %
3 2 8 4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Konservasi/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang dikelola (Hektar)	0 Ha	58.341 Ha	58.501 Ha	58.700 Ha	58.853 Ha	58.982 Ha	58.982 Ha
3 2 8 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver(unit)	81 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit	330 Unit	410 Unit	410 Unit
3 2 8 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat (hektar)	270.004 Ha	345.000 Ha	385.000 Ha	425.000 Ha	465.000 Ha	505.000 Ha	505.000 Ha
3 2 8 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah dokumen pengelolaan DAS wilayah Kalimantan Tengah (Dokumen)	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
3 2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
X X X 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3 2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase perusahaan pengelolaan kegeologian yang taat aturan	80 %	82 %	85 %	87 %	90 %	90 %	90 %
3 2 9 3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah pertimbangan teknis ijin usaha	379 Dokumen	382 Dokumen	386 Dokumen	391 Dokumen	397 Dokumen	404 Dokumen	404 Dokumen
3 2 9 5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) (%)	7 %	9 %	12 %	15 %	18 %	20 %	20 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
				2022	2023	2024	2025	2026		
3 2 9 6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Desa Berlistrik	92,55 %	95,03 %	96,27 %	97,51 %	98,75 %	100 %	100 %	
3 2 9 6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi (%)	86,82 %	91,2 %	93,39 %	95,58 %	97,77 %	100 %	100 %	
3 3 0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
X X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3 3 0	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perizinan dan pendaftaran perusahaan yang terlayani dengan baik (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3 3 0	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana perdagangan di Kalteng meliputi pasar, gudang, distributor dan perdagangan besar (sarana perdagangan)	2.035 Unit	2.239 Unit	2.462 Unit	2.709 Unit	2.979 Unit	3.277 Unit	3.277 Unit
3 3 0	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah kegiatan pemantauan terhadap Bapokting (kegiatan)	260 Kegiatan	260 Kegiatan	260 Kegiatan	260 Kegiatan	260 Kegiatan	260 Kegiatan	260 Kegiatan
3 3 0	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor barang dan jasa Kalteng (juta US\$)	2.427,42 juta US\$	2.618,76 juta US\$	2.810,10 juta US\$	3.001,44 juta US\$	3.192,78 juta US\$	3.250 juta US\$	3.250 juta US\$
3 3 0	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Impor barang dan Jasa Kalteng (juta US\$)	48,1 juta US\$	52,91 juta US\$	58,2 juta US\$	64,03 juta US\$	70,43 juta US\$	75 juta US\$	75 juta US\$
3 3 0	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pengawasan (pelaku Usaha)	98 Orang	103 Orang	108 Orang	113 Orang	119 Orang	122 Orang	663 Orang
3 3 0	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah contoh/sampel komoditi ekspor yang akan di uji (sampel)	1.568 sampel	1.646 sampel	1.728 sampel	1.815 sampel	1.905 sampel	1.950 sampel	10.612 sampel

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
3 3 0 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah UUT (alat ukur) yang dikalibrasi (alat)	550 Alat	578 Alat	607 Alat	637 Alat	669 Alat	680 Alat	3.271 Alat
3 3 0 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah kegiatan promosi produk unggulan Kalteng (kegiatan)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	7 Kegiatan	10 Kegiatan	12 Kegiatan	39 Kegiatan
3 3 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3 3 1 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi Kalimantan Tengah	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	300 Unit
3 3 1 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Presentase Izin Usaha Industri yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3 3 1 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Industri Kalteng yang menggunakan aplikasi SIINAS (Kab/Kota)	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota
3 3 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
3 3 2 2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Usulan kawasan transmigrasi yang direkomendasikan (kawasan)	5 Kawasan	7 Kawasan	8 Kawasan	9 Kawasan	10 Kawasan	11 Kawasan	11 Kawasan
3 3 2 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan permukiman baru atau pemenuhan daya tampung (SP)	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	6 SP
3 3 2 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Permukiman transmigrasi dalam pembinaan (SP)	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP	1 SP	1 SP	1 SP
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 1	SEKRETARIAT DAERAH								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				2022	2023	2024	2025	2026			
X X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	1	2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	1	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Jumlah fasilitasi pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat	11 kegiatan	11 kegiatan	12 kegiatan	13 kegiatan	14 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Toleransi	76,52 Angka	76,65 Angka	76,70 Angka	76,80 Angka	76,90 Angka	77,00 Angka	77,00 Angka
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Kesetaraan	78,37 Angka	78,49 Angka	78,55 Angka	78,61 Angka	78,67 Angka	78,73 Angka	78,73 Angka
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Kerjasama	78,57 Angka	78,71 Angka	78,78 Angka	78,85 Angka	78,92 Angka	78,99 Angka	78,99 Angka
4	1	5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	1	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jenis dan jumlah bank dan cabang	300 Unit	300 Unit	315 Unit	318 Unit	320 Unit	321 Unit	321 Unit
4	1	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	55 Unit	55 Unit	56 Unit	57 Unit	59 Unit	60 Unit	60 Unit
4	1	7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pengadaan Tepat Waktu	0 %	20 %	50 %	75 %	100 %	100 %	100 %
4	1	7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
4 1 8	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Dokumen Data Pelaporandan Data Capaian Realisasi Keuangan dan Pembangunan yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4 2	SEKRETARIAT DPRD								
X X X 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4 2 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah dokumen peraturan daerah dan peraturan DPRD	100 %, 1 Tahun	100 %, 1 Tahun	100 %, 1 Tahun	100 %, 1 Tahun	100 %, 1 Tahun	100 %, 1 Tahun	100 %, 1 Tahun
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5 1	PERENCANAAN								
X X X 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5 1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen hasil Perencanaan pembangunan daerah (dokumen)	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen
5 1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (dokumen)	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen
5 1 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	87 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
				2022	2023	2024	2025	2026		
5	2	KEUANGAN								
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA terhadap APBD	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja pendidikan (20%)	30,96 %	30,96 %	30,96 %	30,96 %	30,96 %	30,96 %
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja kesehatan (10%)	10,03 %	10,03 %	10,03 %	10,03 %	10,03 %	10,03 %
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Dokumen Jasa Administrasi Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Keterlaksanaan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase optimalisasi penerimaan pendapatan daerah (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio kemandirian keuangan daerah (%)	36 %	40 %	42.3 %	44.2 %	46.4 %	47.5 %	47.5 %
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	indeks kepuasan pelayanan (%)	85 %	90 %	91.2 %	93.1 %	94.5 %	95.2 %	95.2 %
5 3	KEPEGAWAIAN								
X X X 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5 3 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN	75 %	75.5 %	76 %	77.7 %	78 %	78.5 %	78.5 %
5 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
X X X 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan diklat	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
5 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peserta Pelatihan Jabatan fungsional sosial kultural yang lulus post test	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
5 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test	75 %	75 %	80 %	80 %	85 %	85 %	85 %
5 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				2022	2023	2024	2025	2026			
5	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset yang diimplementasikan	35 %	40 %	45 %	50 %	60 %	65 %	65 %
5	7	PENGELOLAAN PENGHUBUNG									
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	7	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jumlah layanan informasi dan promosi	30 Orang	50 Orang	100 Orang	150 Orang	200 Orang	250 Orang	250 Orang
5	7	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jumlah yang mendapat fasilitasi layanan penghubung	1.000 Orang	2.000 Orang	2.100 Orang	2.200 Orang	2.300 Orang	2.400 Orang	2.400 Orang
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	1	INSPEKTORAT DAERAH									
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Selesai: BPK RI	50 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	80 %
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindakanlanjut Hasil Pengawasan Selesai: ITJEN Kemendagn/Teknis Lainnya	50 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	80 %
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Selesai: Inspektorat	70 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				2022	2023	2024	2025	2026			
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan	50 %	45 %	40 %	35 %	30 %	25 %	25 %
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %	90 %	90 %
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat 3	Tingkat 3	Tingkat 3	Tingkat 3	Tingkat 3	Tingkat 3	Tingkat 3
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang)	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	78,24 Nilai/Angka	78,25 Nilai/Angka	78,5 Nilai/Angka	78,75 Nilai/Angka	79 Nilai/Angka	79,25 Nilai/Angka	79,25 Nilai/Angka

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
8 1 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Persen)	75 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
8 1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (orang)	175 Orang	175 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang
8 1 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	70 %	70 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah representasi penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo dalam Pilkada tahun 2021, Hal ini berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan. Dokumen ini menjadi pedoman sekaligus panduan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Perangkat Daerah untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah hanya dapat terlaksana secara optimal, tergantung pada kesepakatan, kesepahaman serta komitmen bersama antara Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah serta Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Tengah, berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan penyusunan dan penetapan RPJMD ini, diharapkan mampu mewujudkan Visi “**Kalimantan Tengah Makin Berkah**” serta Misi “**Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, Harmonis**”.

9.1 Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2022 hingga tahun 2026. Setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, maka akan disusun RPJMD periode berikutnya. Dalam hal RKPD Tahun 2027 harus disusun namun daerah belum memiliki RPJMD periode berikutnya, maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2027, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD di indikasikan oleh sejauhmana berbagai program (outcome) dapat tercapai dan secara tepat memicu pencapaian sasaran (*impact*) RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini harus dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun mulai tahun 2022 sampai dengan 2026. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
2. Gubernur Kalimantan Tengah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026 kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai penyelenggara pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
4. Gubernur dalam hal ini dilaksanakan oleh Bappedalitbang berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Penyusunan RPJMD kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sehingga terwujud sinergi pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota.
7. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan berpedoman pada RPJMD dengan periode yang sama, yaitu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
8. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 ini dengan sebaikbaiknya.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-PD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
10. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan RPJMD Kabupaten/Kota.
11. Pengendalian dan evaluasi RPJMD antara lain dilaksanakan dengan menyusun rencana aksi guna mencapai indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Bab IX. Dokumen rencana aksi tersebut disusun dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, yang disusun oleh Perangkat Daerah pengampu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan. Tata cara penyusunan rencana aksi pencapaian target indikator kinerja akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala Daerah.
12. Berkaitan dengan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, beberapa hal yang perlu dipedomani sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam upaya pencapaian tujuan nasional, melalui penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2019-2024. Hal ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah

daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dukungan tersebut mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan, sebagai sinergi pembangunan antara pusat dan daerah serta antarwilayah.

- b. Penyelarasan tersebut dilaksanakan berdasarkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada hasil, dengan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam lingkup kewilayahan secara lintas bidang dan antarbagian urusan pemerintahan daerah, yakni dengan prinsip money follow program yang mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai tujuan prioritas nasional dan daerah.
- c. Terkait penyelarasan RPJMD dengan RPJMN, beberapa hal yang perlu diperhatikan :
 - 1) Penyelarasan isu strategis pembangunan daerah dengan nasional;
 - 2) Penyelarasan misi/sub misi, tujuan, sasaran, indikator pembangunan daerah dengan nasional;
 - 3) Penyelarasan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional;
 - 4) Penyelarasan program daerah dengan prioritas nasional, program prioritas dan kegiatan prioritas berdasarkan indikator dan pembagian urusan pemerintahan;
 - 5) Penyelarasan kerangka pendanaan program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional;
 - 6) Penyelarasan indikasi lokasi pelaksanaan kegiatan strategis nasional

13. Berkaitan dengan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, beberapa hal yang perlu dipedomani sebagai berikut :

Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dapat berjalan dengan efektif, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah wajib memfasilitasi, melakukan monitoring, serta mengevaluasi penjabaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra_PD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



GIANTO SABRAN